**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 menjadi:

a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan
c. Acuan bagi Kabupaten/Kota di Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2025 terdiri atas:

a. Narasi RKPD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

b. Data dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

c. Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 21 Tahun 2024
Tentang

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

*"Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari"*

**BUKU 1**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

# DAFTAR ISI


Daftar Isi ..... i
Daftar Tabel ..... iv
Daftar Gambar ..... xiv
**BAB I PENDAHULUAN ..... I-1**
1.1. Latar Belakang..... I-1
1.2. Dasar Hukum ..... I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I-6
1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-7
1.5. Sistematika ..... I-7
**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II-1**
2.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..... II-1
2.1.2 Kondisi Demografi ..... II-9
2.2 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat ..... II-13
2.3 Kondisi Perekonomian Daerah ..... II-17
2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)..... II-17
2.3.2 PDRB Per Kapita..... II-24
2.3.3 Inflasi ..... II-27
2.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson ..... II-28
2.3.5 Indeks Daya Saing Daerah..... II-30
2.3.6 Investasi ..... II-31
2.3.7 Pertanian (dalam arti luas) dan Ketahanan Pangan..... II-36
2.3.8 Koperasi, usaha kecil, dan menengah ..... II-48
2.3.9 Perdagangan..... II-52
2.3.10 Perindustrian..... II-55
2.3.11 Pariwisata..... II-57
2.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II-58
2.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman ..... II-69
2.3.14 Perhubungan..... II-74
2.3.15 Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa. ..... II-84
2.4 Sumber Daya Manusia ..... II-87
2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... II-87
2.4.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) ..... II-88
2.4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)..... II-89
2.4.4 Indeks Ketimpangan Gender ..... II-91
2.4.5 Indeks Pembangunan Kebudayaan ..... II-92
2.4.6 Indeks Pembangunan Olahraga ..... II-94
2.4.7 Pendidikan..... II-95
2.4.8 Kesehatan..... II-100
2.4.9 Kesejahteraan Sosial..... II-108
2.4.10 Tenaga Kerja..... II-112
2.4.11 Pemberdayaan Perempuan dan Anak..... II-120
2.4.12 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... II-124
2.4.13 Kepemudaan dan Olahraga..... II-126
2.4.14 Perpustakaan ..... II-128
2.4.15 Transmigrasi..... II-131

2.5 Konsisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan . II-131
2.5.1 Daya Dukung dan Daya Tampung ..... II-132
2.5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)..... II-134
2.5.3 Perubahan Iklim ..... II-135
2.5.4 Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup..... II-138
2.5.5 Rehabilitasi Lahan Kritis, Konservasi dan Perlindungan Hutan ... II-144
2.5.6 Pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan .. II-148
2.5.7 Pertambangan ..... II-151
2.5.8 Penataan Ruang ..... II-153
2.5.9 Energi dan Sumber Daya Mineral ..... II-161
2.5.10 Penanggulangan Bencana ..... II-171
2.6 Kondisi Tata Kelola Pemerintahan ..... II-195
2.6.1 Indeks Reformasi Birokrasi ..... II-195
2.6.2 Pelayanan Publik ..... II-197
2.6.3 Demokrasi ..... II-198
2.6.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik..... II-198
2.6.5 Penelitian dan Pengembangan..... II-208
2.6.6 Kearsipan ..... II-211
2.6.7 Akuntabilitas Kinerja ..... II-212
2.6.8 Manajemen ASN ..... II-213
2.6.9 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II-215
2.6.10 Pemberdayaan Masyarakat Desa..... II-219
2.6.11 Perencanaan ..... II-223
2.6.12 Pengawasan..... II-223
2.7 Kondusivitas Daerah ..... II-232
2.8 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2023 ..... II-234
2.9 Permasalahan Pembangunan ..... II-235
2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah..... II-235
2.9.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... II-238
2.9.3 Isu Strategis Daerah ..... II-249
**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..... III-1**
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III-1
3.1.1 Dinamika Perekonomian Global ..... III-1
3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional..... III-2
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah ..... III-3
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-6
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-6
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III-11
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III-16
3.2.4 Sumber Pendanaan Lainnya ..... III-20
**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 ..... IV-1**
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah ..... IV-2
4.2.1 Pokok-pokok Pikiran DPRD ..... IV-2

**BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA ..... V-1**
5.1 Arah Kebijakan Umum ..... v-1
5.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ..... v-1
5.3 Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah ..... v-3
5.4 Arahan Per Wilayah Pengembangan ..... v-4
5.4.1 Wilayah Pengembangan (WP) Kedungsepur ..... V-4
5.4.2 Wilayah Pengembangan (WP) Jekuti..... ..... V-8
5.4.3 Wilayah Pengembangan (WP) Banglor..... V-12
5.4.4 Wilayah Pengembangan (WP) Galangmanggung..... V-15
5.4.5 Wilayah Pengembangan (WP) Wonobanjar..... V-19
5.4.6 Wilayah Pengembangan (WP) Keburejo..... V-21
5.4.7 Wilayah Pengembangan (WP) Subosukowonosraten..... V-24
5.4.8 Wilayah Pengembangan (WP) Bregasmalang..... V-29
5.4.9 Wilayah Pengembangan (WP) Petanglong..... V-33
5.4.10 Wilayah Pengembangan (WP) Cibalingmas..... V-37
5.4.11 Arahan Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi..... V-40
**BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... ..... VI-1**
6.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025..... VI-1
6.2 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah..... VI-2
6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayan Dasar..... VI-2
6.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar ..... VI-7
6.2.3 Urusan Pilihan..... VI-16
6.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan..... VI-23
6.2.5 Unsur Penunjang Pemerintahan..... VI-25
6.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan..... VI-27
6.2.7 Unsur Pemerintahan Umum..... VI-27
**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... VII-1**
7.1 Indikator Kinerja Utama..... VII-1
7.2 Indikator Kinerja Daerah..... VII-1
**BAB VIII PENUTUP ..... VIII-1**

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah ..... II-3
Tabel 2.2 Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019 ..... II-3
Tabel 2.3 Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah ..... II-8
Tabel 2.4 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah, 2019-2023 ..... II-9
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) Tahun 2019-2023 ..... II-10
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-11
Tabel 2.7 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-13
Tabel 2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-14
Tabel 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-17
Tabel 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 (%) ..... II-24
Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah) ..... II-27
Tabel 2.12 Jumlah Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2016 – 2023 ..... II-33
Tabel 2.13 Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2023 ... II-33
Tabel 2.14 Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak Provinsi Jawa Tengah ..... II-43
Tabel 2.15 Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023 ..... II-44
Tabel 2.16 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah ..... II-46
Tabel 2.17 Persentase Koperasi Aktif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-49
Tabel 2.18 Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023 ..... II-50
Tabel 2.19 Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 .. II-50
Tabel 2.20 Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2019-2023 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ..... II-51
Tabel 2.21 Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-53
Tabel 2.22 Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (Juta US$) ..... II-54
Tabel 2.23 Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (Juta US$) ..... II-54
Tabel 2.24 Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (Juta US$) ..... II-55
Tabel 2.25 Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-55

Tabel 2.26 Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023 ..... II-56
Tabel 2.27 Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-57
Tabel 2.28 Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023 ..... II-57
Tabel 2.29 Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023..... II-57
Tabel 2.30 Capaian Indikator Kinerja Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023..... II-58
Tabel 2.31 Kondisi Permukaan Jalan Sesuai Kewenangan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..... II-59
Tabel 2.32 Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-60
Tabel 2.33 Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 .. II-60
Tabel 2.34 Kondisi Permukaan Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2022 ..... II-61
Tabel 2.35 Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 ..... II-62
Tabel 2.36 Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-62
Tabel 2.37 Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-63
Tabel 2.38 Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah ..... II-66
Tabel 2.39 Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2017 – 2023 ..... II-66
Tabel 2.40 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2017 – 2023 ..... II-66
Tabel 2.41 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2023..... II-67
Tabel 2.42 Jumlah Embung di Jawa Tengah Berdasarkan Sumbernya..... II-68
Tabel 2.43 Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-68
Tabel 2.44 Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis..... II-68
Tabel 2.45 Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023..... II-69
Tabel 2.46 Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-70
Tabel 2.47 Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-71
Tabel 2.48 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023 ..... II-71
Tabel 2.49 Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 melalui APBD Provinsi ..... II-73
Tabel 2.50 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-73
Tabel 2.51 Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-74

Tabel 2.52 Capaian Kualitas Pelayanan Transportasi Jawa Tengah Tahun 2022 -2023 ..... II-75
Tabel 2.53 Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-75
Tabel 2.54 Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B Tahun 2019 - 2023.. II-76
Tabel 2.55 Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2019 – 2023 .. II-76
Tabel 2.56 Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2018 – 2023 ..... II-77
Tabel 2.57 Perkembangan Pelayanan ASDP Tahun 2019 – 2023 ..... II-78
Tabel 2.58 Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara Tahun 2019 – 2023 ..... II-78
Tabel 2.59 Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian Tahun 2019 – 2023 .... II-79
Tabel 2.60 Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023..... II-79
Tabel 2.61 Perlengkapan Jalan Terpasang Tahun 2019 – 2023 ..... II-80
Tabel 2.62 Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Ruas Jalan Provinsi 2022 - 2023 ..... II-80
Tabel 2.63 Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022 - 2023 ..... II-81
Tabel 2.64 Pelaksanaan Ramp Check di Terminal Tipe B Tahun 2022 - 2023 ..... II-81
Tabel 2.65 Perlintasan Rel Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-81
Tabel 2.66 Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2023 ..... II-82
Tabel 2.67 Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan Tahun 2023 ... II-82
Tabel 2.68 Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Tahun 2017 – 2023 ..... II-83
Tabel 2.69 Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Tahun 2021 – 2023 ..... II-83
Tabel 2.70 Rekapitualasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2018-2023..... II-84
Tabel 2.71 Operasional dan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 dan 2023 ..... II-84
Tabel 2.72 Penumpang Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Tahun 2019-2023 ..... II-85
Tabel 2.73 Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah Lanjut Usia terlantar Tahun 2019-2023..... II-86
Tabel 2.74 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021 .. II-86
Tabel 2.75 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023..... II-90
Tabel 2.76 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023..... II-91
Tabel 2.77 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 - 2023 (%) ..... II-92
Tabel 2.78 Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 (%) ..... II-92
Tabel 2.79 Kondisi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)..... II-94
Tabel 2.80 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-94

Tabel 2.81 Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jawa Tengah Tahun2023 ..... II-96
Tabel 2.82 Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022 ..... II-97
Tabel 2.83 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Tengah (Persen) Tahun 2018-2022 ..... II-97
Tabel 2.84 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-98
Tabel 2.85 Sebaran APK SMA/SMK/Sederajat di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-99
Tabel 2.86 Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun2022-2023 . II-100
Tabel 2.87 Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022 ..... II-100
Tabel 2.88 Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-101
Tabel 2.89 Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2022-2023 ..... II-101
Tabel 2.90 Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-106
Tabel 2.91 Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-108
Tabel 2.92 Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023 ..... II-109
Tabel 2.93 Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-110
Tabel 2.94 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (%) ..... II-110
Tabel 2.95 Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-111
Tabel 2.96 Kondisi PSKS Tahun 2019-2023 ..... II-111
Tabel 2.97 Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 .. II-112
Tabel 2.98 Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-113
Tabel 2.99 Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-113
Tabel 2.100 Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan s/d Tahun 2021 ..... II-114
Tabel 2.101 Keterserapan Bansos Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-115
Tabel 2.102 Data KUBE Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-116
Tabel 2.103 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-120
Tabel 2.104 Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-121
Tabel 2.105 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (%) ..... II-121
Tabel 2.106 Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-121
Tabel 2.107 Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-122

Tabel 2.108 Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-122
Tabel 2.109 Jumlah Not in Employment, Education or Training (NEET) di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-123
Tabel 2.110 Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019 - 2023 ..... II-123
Tabel 2.111 Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-124
Tabel 2.112 Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-124
Tabel 2.113 Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2019-2023 ..... II-125
Tabel 2.114 Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023 ..... II-126
Tabel 2.115 Perkembangan CPR, TFR dan Unmetneed 2019-2023 ..... II-127
Tabel 2.116 Perkembangan Tri Bina 2019-2023 ..... II-127
Tabel 2.117 Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019- 2023 ..... II-129
Tabel 2.118 Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah pada Kejuaraan Tingkat Nasional ..... II-130
Tabel 2.119 Capaian Sport Development Index Tahun 2021-2022 ..... II-130
Tabel 2.120 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Orang) ..... II-131
Tabel 2.121 Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-131
Tabel 2.122 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah Tahun 2020 – 2023 ..... II-132
Tabel 2.123 Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-133
Tabel 2.124 Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor Pada Tahun 2022 ..... II-138
Tabel 2.125 Aksi Penurunan Emisi GRK untuk Setiap Sektor pada Tahun 2022 ..... II-139
Tabel 2.126 Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-140
Tabel 2.127 Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-142
Tabel 2.128 Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023 ..... II-143
Tabel 2.129 Rekapitulasi Jumlah Perusahaan yang Mengikuti Proper Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023 ..... II-144
Tabel 2.130 Luas Lahan Kritis Dan Penanganannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023 ..... II-145
Tabel 2.131 Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-146
Tabel 2.132 Rehabilitasi Mangrove Di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-147
Tabel 2.133 Produksi Kayu Dari Hutan Rakyat dan Hutan Negara Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-147
Tabel 2.134 Jumlah Pengguna Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-147

Tabel 2.135 Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2019–2023 ..... II-148
Tabel 2.136 Produksi Kayu Dari Hutan Rakyat dan Hutan Negara Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-149
Tabel 2.137 Jumlah Pengguna Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-149
Tabel 2.138 Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2019–2023 ..... II-150
Tabel 2.139 Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-151
Tabel 2.140 Perkembangan Good Mining Practice (GMP) di Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023 ..... II-152
Tabel 2.141 Update Status RTRW Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Tengah Per 19 Januari 2024 ..... II-153
Tabel 2.142 Progress Legislasi RDTR Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Per 19 Januari 2024 terdapat 3 Perda RDTR dan 33 Perkada RDTR ..... II-156
Tabel 2.143 Rata – Rata Luasan RTH Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023 ..... II-158
Tabel 2.144 Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang Tahun 2023 ..... II-159
Tabel 2.145 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-162
Tabel 2.146 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-163
Tabel 2.147 Indeks Ketersediaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023 ..... II-167
Tabel 2.148 Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-189
Tabel 2.149 Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023 ..... II-190
Tabel 2.150 Jumlah Korban Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-190
Tabel 2.151 Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-191
Tabel 2.152 Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-192
Tabel 2.153 Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2022 ..... II-192
Tabel 2.154 Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-193
Tabel 2.155 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2019 – 2023 ..... II-193
Tabel 2.156 Data Bantuan Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-194
Tabel 2.157 Catatan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2023 ..... II-195
Tabel 2.158 Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-196
Tabel 2.159 Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Dalam Kurun Waktu Tahun 2021 - 2023 ..... II-205

Tabel 2.160 Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian Tahun 2019-2023 ..... II-208
Tabel 2.161 Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant Tahun 2019-2023 ..... II-209
Tabel 2.162 Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-210
Tabel 2.163 Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-210
Tabel 2.164 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019-2023 ..... II-211
Tabel 2.165 Jumlah Pengunjung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-211
Tabel 2.166 Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-212
Tabel 2.167 Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-212
Tabel 2.168 PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Mengajukan Tugas Belajar Tahun 2019-2023 ..... II-213
Tabel 2.169 Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019-2023 ..... II-214
Tabel 2.170 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2023 ..... II-218
Tabel 2.171 Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-219
Tabel 2.172 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2023 .. II-219
Tabel 2.173 Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-223
Tabel 2.174 Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-224
Tabel 2.175 Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-225
Tabel 2.176 Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023 ..... II-225
Tabel 2.177 Capaian Sertifikasi Lahan LP2B Di Jawa Tengah Tahun 2022 .... II-226
Tabel 2.178 Capaian Reforma Agraria Di Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-226
Tabel 2.179 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-233
Tabel 2.180 Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023 ..... II-235
Tabel 2.181 Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah Tahun 2025 ..... II-250
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 ... III-4
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023 ..... III-7
Tabel 3.3 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023 (%) ..... III-8
Tabel 3.4 Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ... III-9
Tabel 3.5 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... III-10

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2023 ..... III-11
Tabel 3.7 Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-12
Tabel 3.8 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... III-15
Tabel 3.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023 ..... III-15
Tabel 3.10 Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-16
Tabel 3.11 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... III-16
Tabel 3.12 Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... III-17
Tabel 3.13 Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... III-18
Tabel 3.14 Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..... III-19
Tabel 3.15 Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... III-20
Tabel 3.16 Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2023 ..... III-21
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 ..... IV-2
Tabel 4.2 Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025, serta Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025 ..... IV-12
Tabel 4.3 Program Prioritas Daerah Mendukung Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Tahun 2025 ..... IV-15
Tabel 4.4 Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-136
Tabel 4.5 Keselarasan Target Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 dengan Target Pengembangan Wilayah Jawa Tengah Dalam RKP Tahun 2025 ..... IV-136
Tabel 4.6 Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 ..... IV-136
Tabel 5.1 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2023 ..... V-5
Tabel 5.2 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2025 ..... V-7
Tabel 5.3 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekuti Tahun 2023 ..... V-9
Tabel 5.4 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekutibanglor Tahun 2025 ..... V-11
Tabel 5.5 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Banglor Tahun 2023 ..... V-13
Tabel 5.6 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Banglor Tahun 2025 ..... V-13
Tabel 5.7 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Gelangmanggung Tahun 2023 ..... V-16

Tabel 5.8 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Gelangmanggung Tahun 2025 ..... V-18
Tabel 5.9 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Wonobanjar Tahun 2023 ..... V-21
Tabel 5.10 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Wonobanjar Tahun 2025 ..... V-21
Tabel 5.11 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Keburejo Tahun 2023 ..... V-23
Tabel 5.12 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Keburejo Tahun 2025 ..... V-24
Tabel 5.13 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2023 ..... V-26
Tabel 5.14 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2025 ..... V-29
Tabel 5.15 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2023 ..... V-31
Tabel 5.16 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2025 ..... V-33
Tabel 5.17 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2022 ..... V-35
Tabel 5.18 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2025 ..... V-37
Tabel 5.19 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Cibanglimas Tahun 2023 ..... V-39
Tabel 5.20 Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Cibalingmas Tahun 2025 ..... V-40
Tabel 6.1 Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... VI-1
Tabel 6.2 Rencana Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ... VI-27
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... VII-1
Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ..... VII-2
Tabel 7.3 Sasaran Makro Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Rakortek Pembangunan Tahun 2024 ..... VII-9
Tabel 7.4 Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang Selaras Dengan Sasaran Pembangunan..... VII-10

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Hubungan Antardokumen ..... I-6
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah ..... II-1
Gambar 2.2 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023..... II-15
Gambar 2.3 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2023..... ..... II-16
Gambar 2.4 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-16
Gambar 2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2023 ..... II-19
Gambar 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (y-on-y) Per Triwulan Tahun 2017-2023 (Persen)..... II-19
Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Se Pulau Jawa dan Nasional Pada Tahun 2023 (persen) ..... II-20
Gambar 2.8 Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2023 (%) ..... II-21
Gambar 2.9 Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%).. II-22
Gambar 2.10 Kontribusi Perekonomian Jawa Tengah Menurut Pengeluran Tahun 2019-2023 (%) ..... II-22
Gambar 2.11 Pertumbuhan Menurut Pengeluran Tahun 2019-2023 (%) ..... II-23
Gambar 2.12 Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (c-to-c, persen)..... II-25
Gambar 2.13 PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2010 – 2023..... II-25
Gambar 2.14 PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa Tahun 2023 ..... II-26
Gambar 2.15 PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah Tahun 2022 ..... II-28
Gambar 2.16 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – Januari 2024 (%)..... II-28
Gambar 2.17 Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023..... II-20
Gambar 2.18 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 ..... II-30
Gambar 2.19 Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022..... II-30
Gambar 2.20 Nilai IDSD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan 2021 ..... II-32
Gambar 2.21 Nilai PMTB Jawa Tengah 2013 – 2022..... II-34
Gambar 2.22 Kontribusi PMTB terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2013 – 2022..... II-35
Gambar 2.23 Kontribusi PMTB terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2013 – 2022..... II-35
Gambar 2.24 Nilai ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2013 – 2022 ..... II-36
Gambar 2.25 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023..... II-37
Gambar 2.26 Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023..... II-38

Gambar 2.27 Perkembangan Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2018-2022 ..... II-39
Gambar 2.28 Perkembangan Produksi Bawang Merah, Cabai Besar Tahun 2018-2022 ..... II-39
Gambar 2.29 Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2018-2022... II-40
Gambar 2.30 Perkembangan Populasi Sapi Potong dan Kambing Tahun (2019-2023) ..... II-40
Gambar 2.31 Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur Tahun (2019-2023 ..... II-41
Gambar 2.32 Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah Tahun (2019-2023)..... II-42
Gambar 2.33 Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-43
Gambar 2.34 Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (2019-2023) ..... II-44
Gambar 2.35 Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun (2019-2023) ..... II-47
Gambar 2.36 Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022 ..... II-48
Gambar 2.37 Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun (2019-2023) ..... II-48
Gambar 2.38 Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022 (%) ..... II-66
Gambar 2.39 Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m3) Tahun 2017 - 2022 ..... II-68
Gambar 2.40 Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah ..... II-76
Gambar 2.41 Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah ..... II-78
Gambar 2.42 Peta Jaringan Loop Rel Kereta Api di Jawa Tengah..... II-79
Gambar 2.43 Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 ..... II-87
Gambar 2.44 IPM Jateng dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II-89
Gambar 2.45 Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Tetangga dan Nasional Tahun 2021 ..... II-89
Gambar 2.46 IPG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2022 ..... II-91
Gambar 2.47 APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 ..... II-98
Gambar 2.48 Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2017-2022 (%) ..... II-102
Gambar 2.49 Tren Kasus Kematian Ibu Tahun 2019-2023 ..... II-103
Gambar 2.50 Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2019-2023 ..... II-104
Gambar 2.51 Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2019-2023 ..... II-104
Gambar 2.52 Tren Kasus Balita Gizi Buruk Tahun (BB/TB) 2019-2023 ..... II-105
Gambar 2.53 Angka Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Lainnya Tahun 2022 ..... II-106
Gambar 2.54 Angka Prevalensi Stunting Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan SSGBI 2019 dan SSGI 2021 ..... II-107
Gambar 2.55 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2023 (Februari-Agustus) (%) ..... II-117

Gambar 2.56 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-117
Gambar 2.57 Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-118
Gambar 2.58 Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2022 ..... II-118
Gambar 2.59 TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (%) ..... II-119
Gambar 2.60 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023 (%) ..... II-119
Gambar 2.61 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah) ..... II-120
Gambar 2.62 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2023 (Juta Rupiah) ..... II-120
Gambar 2.63 Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 ..... II-133
Gambar 2.64 Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah ..... II-136
Gambar 2.65 Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah ..... II-136
Gambar 2.66 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 ..... II-137
Gambar 2.67 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018–2023 ..... II-137
Gambar 2.68 Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-138
Gambar 2.69 Tren Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2021 ..... II-139
Gambar 2.70 Aksi Penurunan Emisi GRK Setiap Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2022 ..... II-140
Gambar 2.71 Jumlah Limbah B3 Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2022 ..... II-176
Gambar 2.72 Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah ..... II-130
Gambar 2.73 Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY ..... II-16
Gambar 2.74 Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2023 (GWh) ..... II-161
Gambar 2.75 Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2023 (Unit) ..... II-162
Gambar 2.76 Potensi Teknis PLTS Terapung di Jawa Tengah ..... II-164
Gambar 2.77 Potensi Biogenic Shallow Gas (Gas Rawa) di Provinsi Jawa Tengah ..... II-164
Gambar 2.78 Potensi Panas Bumi di Jawa Tengah ..... II-165
Gambar 2.79 Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2023 ..... II-166
Gambar 2.80 Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah ..... II-168
Gambar 2.81 Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Semarang-Demak ..... II-168
Gambar 2.82 Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Pekalongan-Pemalang ..... II-169
Gambar 2.83 Pembangunan Infrastruktur Konservasi Air Tanah ..... II-170
Gambar 2.84 Peta Bahaya Banjir Provinsi Jawa Tengah ..... II-171
Gambar 2.85 Peta Bahaya Banjir Bandang Provinsi Jawa Tengah ..... II-172
Gambar 2.86 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Provinsi Jawa Tengah ..... II-173

Gambar 2.87 Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Jawa Tengah ..... II-174
Gambar 2.88 Peta Bahaya Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah ..... II-175
Gambar 2.89 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah II-176
Gambar 2.90 Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jawa Tengah ..... II-177
Gambar 2.91 Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jawa Tengah ..... II-178
Gambar 2.92 Peta Bahaya Tsunami Provinsi Jawa Tengah ..... II-179
Gambar 2.93 Peta Bahaya Epidemi Provinsi Jawa Tengah ..... II-180
Gambar 2.94 Peta Bahaya Kegagalan Teknologi Provinsi Jawa Tengah ..... II-181
Gambar 2.95 Peta Bahaya Covid-19 Provinsi Jawa Tengah ..... II-182
Gambar 2.96 Peta Bahaya likuifaksi Provinsi Jawa Tengah ..... II-183
Gambar 2.97 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Dieng ..... II-183
Gambar 2.98 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Lawu ..... II-184
Gambar 2.99 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merapi ..... II-185
Gambar 2.100 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merbabu ..... II-185
Gambar 2.101 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Slamet ..... II-186
Gambar 2.102 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sumbing ..... II-183
Gambar 2.103 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sindoro ..... II-187
Gambar 2.104 Peta Bahaya Letusan Gunung Api Ungaran ..... II-188
Gambar 2.105 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah ..... II-191
Gambar2.106 Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah ..... II-194
Gambar2.107 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-196
Gambar2.108 Indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023 ..... II-197
Gambar2.109 Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2019-2023 ..... II-198
Gambar2.110 Gambar Rencana Bangunan Data Center Provinsi Jawa Tengah . II-199
Gambar2.111 Topologi Jaringan Perangkat Daerah ..... II-199
Gambar2.112 Topologi Jaringan Metro Kab/Kota ..... II-200
Gambar2.113 Aplikasi Terintegrasi Single Sign On Provinsi Jawa Tengah ..... II-200
Gambar2.114 Capaian Kinerja Laju Pemanfaatan Data Sektoral ..... II-203
Gambar2.115 Grafik Kunjungan Portal Data Tahun 2018-2022 ..... II-204
Gambar2.116 Presentase Penduduk yang Terfasilitasi Pengurusan Dokumen KTP-el (%) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-214
Gambar2.117 Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%) ..... II-215
Gambar2.118 Presentase Jumlah Data Kependudukan yang Terintegrasi dalam Sistem IKD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-216
Gambar2.119 Presentase Desa yang Memiliki Pasar Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-219
Gambar2.120 Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-220
Gambar2.121 Sebaran Jumlah Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-221
Gambar2.122 Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah ..... II-233
Gambar 4.1 Gambaran Keselarasan Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, dan Prioritas Daerah Tahun 2025 ..... IV-12
Gambar 4.2 Gambaran Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dengan Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025 ..... IV-14

Gambar 4.3 Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tengah (PB Backlog)..... IV-145
Gambar 4.4 Pembangunan Baru Relokasi di Provinsi Jawa Tengah (PB Relokasi) ..... IV-145
Gambar 4.5 Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah (PB Bencana) ..... IV-147
Gambar 4.6 Perkembangan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022 ..... IV-148
Gambar 4.7 Perkembangan Alokasi Bantuan Keuangan Desa Wisata di Jawa Tengah Tahun 2020-2023 ..... IV-149
Gambar 4.8 Platform Lapak BUMDES pada Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah..... IV-150
Gambar 5.1 Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah..... V-2
Gambar 5.2 Pembagian Wilayah Pengebangan Provinsi Jawa Tengah ..... V-3
Gambar 5.3 Nilai PDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Kedungsepur Tahun 2023 ..... V-5
Gambar 5.4 Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur ..... V-9
Gambar 5.5 Nilai PDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Jekutibanglor Tahun 2023 ..... V-10
Gambar 5.6 Arah Pengembangan Wilayah Jekuti ..... V-12
Gambar 5.7 Arah Pengembangan Wilayah Banglor..... V-15
Gambar 5.8 Nilai PDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung Tahun 2023 ..... V-17
Gambar 5.9 Arah Pengembangan Wilayah Galangmanggung..... V-20
Gambar 5.10 Arah Pengembangan Wilayah Keburejo ..... V-26
Gambar 5.11 Nilai Dimensi IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Subosukowonosraten..... V-27
Gambar 5.12 Arah Pengembangan Wilayah Subosukowonosraten ..... V-31
Gambar 5.13 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Bregasmalang Tahun 2023 ..... V-32
Gambar 5.14 Arah Pengembangan Wilayah Bregasmalang ..... V-35
Gambar 5.15 Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Petanglong Tahun 2023 . V-36
Gambar 5.16 Arah Pengembangan Wilayah Petanglong ..... V-38
Gambar 5.17 Arah Pengembangan Wilayah Petanglong ..... V-42

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023. RPD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan masa transisi di mana RPJMD Tahun 2018-2023 telah berakhir sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2023. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2025 juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176 SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045.

Dokumen RKPD Tahun 2025 disusun sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan perundang-undangan lainnya yang dipedomani dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2025 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan-peraturan

turunannya. Selain itu beberapa permendagri yang juga dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 juga memperhatikan proyeksi dalam RKPD Tahun 2024. RKPD Tahun 2025 juga memuat hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024, disamping rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan berpedoman pada kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026, maka RKPD Tahun 2025 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” dengan empat sasaran yaitu meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Untuk itu, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif. Terdapat 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Jawa Tengah di Tahun 2025 yang meliputi: Menjaga stabilitas politik, ekonomi (inflasi), sosial budaya, keamanan dan ketertiban; Penuntasan pengentasan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem), penurunan angka pengangguran dan *stunting*; Pemantapan ketahanan pangan, energi dan air; Perkuatan pengembangan Sumber Daya Manusia, sains, teknologi, dan Pendidikan (vokasi); Peningkatan kualitas layanan dan promosi Kesehatan masyarakat; Pengembangan investasi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan daya saing UMKM; Pengembangan ekonomi sirkuler dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; Penanganan dampak perubahan iklim dan

ketahanan bencana (kekeringan, polusi, krahutla, banjir, rob dan tanah longsor); Meningkatkan pengawasan internal ASN, peningkatan layanan publik dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota pasca Pilkada serentak.

RKPD Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Jawa Tengah, serta dalam rangka upaya meningkatkan dukungan konvergensi dan percepatan perwujudan kebijakan nasional tahun 2025 meliputi: 1) transformasi sosial, 2) transformasi ekonomi, 3) transformasi tata kelola, 4) supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, 5) ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, dengan implementasi kebijakan kewilayahan serta sarana dan prasarana, yang didukung dengan kerangka implementasi berupa kaidah pelaksanaan (kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, kerangka pendanaan dan investasi, serta kerangka pengendalian dan evaluasi). Selanjutnya, dalam RKPD Tahun 2025 disusun dengan menyinergikan program strategis Jawa Tengah dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antarwilayah, lintas sektor, dan *pentahelix* pelaku pembangunan. Pengembangan pola kerja sama antarwilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah Jawa Tengah.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), bawah-atas (*bottom-up*), serta berorientasi tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Selain itu penyusunan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result,* berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen RKPD Tahun 2025 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 meliputi: 1) Persiapan yaitu penyampaian surat edaran Gubernur Jawa Tengah tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan, serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2025; 2) Konsultasi publik sekaligus pembukaan masa musrenbang; 3) Forum perangkat daerah; 4) Musrenbang wilayah (musrenbangwil) dan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan daerah (rakortekrenbangda); 5) Musrenbang provinsi; 6) Fasilitasi RKPD Tahun 2025 oleh Kemendagri; 7) Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan DPRD dalam bentuk dialog interaktif eksekutif dan legislatif; dan 8) Penetapan RKPD Tahun 2025.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negaŕa Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12).

### 1.3. Hubungan Antardokumen

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan sehingga dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD atau RPD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah (renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Selanjutnya pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

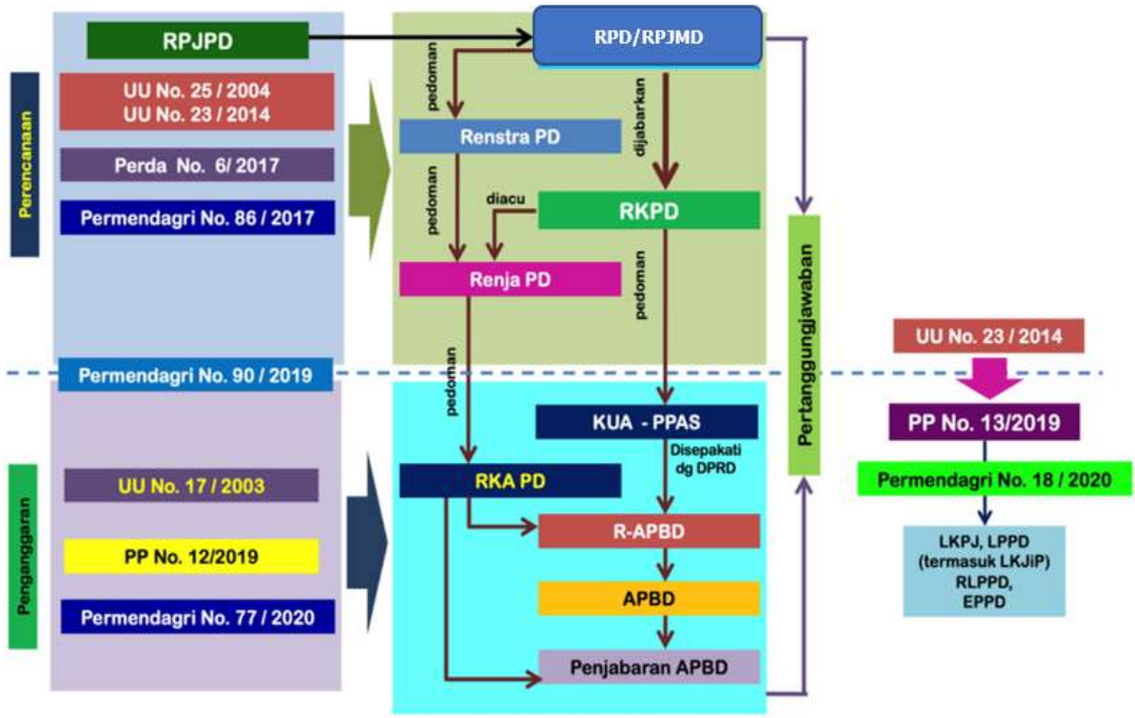


**Gambar 1.1.**
**Hubungan Antardokumen**

Selain itu, penyusunan dokumen RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*sustainable development goals* (SDGs), *road map* reformasi birokrasi, strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan *stunting*, pangan dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2025.

## 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025; dan
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPD Tahun 2024-2026 dan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025 – 2045.

Tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota.

## 1.5. Sistematika

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

1. **Buku I,** dokumen RKPD Tahun 2025 terdiri dari:

   BAB I PENDAHULUAN
   Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antardokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

   BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
   Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2023 dan capaian RPJMD sampai dengan tahun 2023; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

   BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
   Memuat kondisi perekonomian daerah; arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.

   BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
   Memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2025 berdasarkan hasil

evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dalam RPD, 10 (sepuluh) program prioritas, telaah pokok pikiran, keselarasan prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta inovasi pembangunan daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi sebagai panduan penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2025.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2025.

BAB VIII PENUTUP
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

2. **Buku II**, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, terdiri dari:
   1) Capaian Indikator Kinerja Utama;
   2) Capaian Indikator Kinerja Daerah;
   3) Capaian Indikator Kinerja Program.
3. **Buku III**, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

**a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km$^2$ atau sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan, serta meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan.

**b. Letak Geografis dan Kondisi Topografi**

Secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur, sehingga secara ekonomi posisi sangat strategis karena berada di diantara dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta – Surabaya). Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2018*

**Gambar 2.1.**
**Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah**

**c. Kondisi Geologi**

Kondisi geologi terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jenis tanah meliputi *organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol, aluvial*, serta *gromosol* yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Potensi sumber daya mineral yang tersebar meliputi 32 jenis mineral non logam (*Phospat, Asbes, Talk, Mika, Leusite, Oker, Granit, Dasit, Diorit*, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, *Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonite*, Batuapung, *Trass, Diatome, Marmer*, Batu gamping, *Dolomit, Basal, Andesit*, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, *Kalsit, Zeolit*, Sirtu, Batu Sabak, *Tosekі*), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangaan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

**d. Kondisi Hidrologi**

Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas untuk dipulihkan yaitu DAS Serayu, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Progo (Jateng, DIY), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Citanduy (Jabar, Jateng), DAS Bodri, DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Garang, DAS Serang, DAS Babakan, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Comal, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Luk Ulo, dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Jawa Tengah terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Sungai (WS) yang kewenangan pengelolaannya terbagi pada kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Sungai yang pengelolaanya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah Wilayah Sungai Pemali Comal (panjang sungai 930,44 km dan luas DAS 4.425,36 $km^2$) dan Wilayah Sungai Bodri Kuto (panjang sungai 355,03 km dan luas DAS 1.647,40 $km^2$). Sedangkan 6 (enam) WS lainnya merupakan WS kewenangan Pusat dan 2 (dua) WS kewenangan kabupaten/kota.

**Tabel 2.1.**
**Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah**

| Kewenangan | Wilayah Sungai | Luas DAS (km²) |
|---|---|---|
| Pusat | Cimanuk Cisanggarung | 6.888,35 |
| | Jratun Seluna | 9.576,01 |
| | Bengawan Solo | 19.778,00 |
| | Progo Opak Serang | 3.238,89 |
| | Serayu Bogowonto | 7.344,61 |
| | Citanduy | 4.450,44 |
| Provinsi | Pemali Comal | 4.425,36 |
| | Bodri Kuto | 1.647,40 |
| Kabupaten/Kota | Wiso Gelis | 654,27 |

*Sumber: Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015*

**e. Kondisi Klimatologi**

Suhu udara tahun 2022 berkisar antara 22,00C sampai dengan 35,20C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 74,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap yaitu sebesar 4.661 mm3 dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Banjarnegara sebanyak 249 hari.

**f. Penggunaan Lahan**

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.438.683,70 hektar. Penggunaan lahan paling besar adalah sawah dengan luas 1.181.758,99 hektar (34,39%), dan luas penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah Kebun dengan luas 638.419,21 hektar (18,58%) dan Permukiman seluas 558.687,35 hektar (16,26%). Luas lahan sawah provinsi di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2016, karena pada tahun tersebut luas lahan sawah sebesar 991.524 hektar (30,47). Penambahan luas lahan sawah merupakan salah satu komitmen Jawa Tengah dalam menjaga ketahanan pangan. Penggunaan lahan di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**
**Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019**

| No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | Luas (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cagar Alam | 2.770,02 | 0,08 |
| 2 | Danau | 16.731,58 | 0,49 |
| 3 | Hutan Lindung | 86.866,17 | 2,53 |
| 4 | Hutan Produksi Terbatas | 181.439,19 | 5,28 |
| 5 | Hutan Produksi Tetap | 366.459,45 | 10,66 |
| 6 | Industri | 10.547,83 | 0,31 |
| 7 | Kebun | 638.419,21 | 18,58 |
| 8 | Lahan Terbuka | 5.179,25 | 0,15 |
| 9 | Mangrove | 2.894,14 | 0,08 |
| 10 | Pasir Darat | 178,62 | 0,01 |
| 11 | Permukiman | 558.687,35 | 16,26 |
| 12 | Sawah | 1.181.758,99 | 34,39 |
| 13 | Semak | 30.941,91 | 0,90 |
| 14 | Suaka Margasatwa | 102,48 | 0,00 |
| 15 | Sungai | 23.718,78 | 0,69 |

| No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | Luas (%) |
|---|---|---|---|
| 16 | Taman Hutan Raya | 2.318 | 0,01 |
| 17 | Taman Nasional | 11.888,17 | 0,35 |
| 18 | Taman Nasional Laut | 183,65 | 0,01 |
| 19 | Taman Wisata Alam | 216,39 | 0,01 |
| 20 | Tambak | 56.925,79 | 1,66 |
| 21 | Tegalan | 260.456,73 | 7,58 |
| | **TOTAL** | 3.438.683,70 | **100,00** |

*Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**g. Potensi Pengembangan Wilayah**

Wilayah Jawa Tengah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, potensi dan karakter wilayahnya dibagi atas 8 (delapan) wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP) Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong, dan Bregasmalang. Potensi keseluruhan terbagi sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dibawah ini:

**1. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 546.290 hektar terbagi ke dalam 20 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), dengan fungsi hutan sebagai hutan produksi terbatas seluas ±362.360 hektar, dan hutan produksi tetap seluas ±183.930 hektar. Kawasan hutan produksi terbatas berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo) dan satu kota yaitu Kota Semarang. Sedangkan kawasan hutan produksi tetap berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar).

b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat seluas 345.822,96 hektar (10,63% luas Jawa Tengah), berada di 29 kabupaten dan 5 kota, kecuali Kota Tegal.

c) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas ±990.652 hektar, dan kawasan pertanian lahan kering seluas ±995.587 hektar, yang diarahkan dikembangkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas 1.022.570 hektar.

d) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas ±885.344 hektar, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 hektar (96%), PTPN IX seluas 28.212 hektar (3%), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS seluas 11.464 hektar (1%).

e) Kawasan Peruntukan Peternakan

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan peternakan besar, kecil dan kawasan peternakan unggas yang diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

f) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan seluas ±24.802 hektar, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi:

1) Kawasan perikanan tangkap, diarahkan pada perairan pantai utara dan pantai selatan, danau, waduk, rawa, sungai dan embung;
2) Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut), diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

g) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Potensi kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota, meliputi:

1) Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai Selatan, Serayu-Pantai Utara, Gunung Slamet, Sindoro-Sumbing–Dieng, Merapi-Merbabu-Ungaran, Gunung Muria, Pegunungan Kendeng Utara, Kendeng Selatan, dan Gunung Lawu;
2) Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi komplek/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram, Mangunan-Wanayasa, dan Condrodimuka;
3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, dan pengembangan sumur tua/marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal.

h) Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan untuk pengembangan produk-produk unggulan berbasis industri manufaktur. Wilayah industri/kawasan peruntukan industri tersebar di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal dan Kota Semarang.

i) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi koridor Borobudur–Prambanan–Surakarta; Borobudur-Dieng; Semarang–Demak–Kudus–Jepara–Pati–Rembang–Blora;Semarang–Ambarawa–Salatiga; Batang –Pekalongan–Pemalang–Tegal–Brebes; Cilacap–Banyumas-Purbalingga-Banjarnegara; dan Cilacap–Kebumen–Purworejo.

j) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota, meliputi:

1) Kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang sudah ada dan perluasan areal dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan;
2) Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada intensifikasi kawasan-kawasan yang sudah ada melalui upaya pembangunan ke arah vertikal dan perluasan kawasan perkotaan, diikuti upaya pengendalian sehingga tidak mengganggu kawasan peruntukan lainnya terutama sawah di pinggiran kawasan perkotaan.

k) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 (dua puluh tujuh) pulau terletak di Kepulauan Karimunjawa, 2 (dua) pulau di Kabupaten Jepara (Pulau Panjang, dan Pulau Mandalika); 3 (tiga) pulau di Kabupaten Rembang (Pulau Marongan, Gede dan Sualan,); serta Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.

**2. Kawasan Lindung**

Target rencana Kawasan lindung di Jawa Tengah tahun 2009–2029 seluas 561.404 hektar (17,4% dari luas wilayah provinsi). Pemanfaatan ruang hutan lindung fisiografis merupakan sub kawasan lindung yang paling besar, sedangkan pemanfaatan ruang yang paling kecil adalah kawasan pantai dan sempadan.

a) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara diarahkan penyebarannya di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes. Untuk kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat terus didorong setidaknya mencapai minimal 10% melalui alih fungsi lahan tidak produktif, yang diarahkan pengembangannya di 29 kabupaten dan 3 kota (Magelang, Salatiga, dan Semarang).

b) Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya berbentuk kawasan resapan air. Luas kawasan resapan air di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan seluas ±114.822 hektar. Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

c) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar danau/waduk/rawa. Luas kawasan perlindungan setempat ditetapkan minimal seluas ±59.918 hektar, meliputi:

1) Kawasan sempadan sungai, direncanakan berada pada semua wilayah kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai, seluas ±23.583 hektar;
2) Kawasan sempadan pantai, direncanakan seluas ±8.786 hektar yang terdiri dari kawasan pesisir pantura dan pansela sejauh 100 meter dari garis pasang tertinggi; dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil sejauh 50 meter dari garis pasang tertinggi;
3) Kawasan sekitar danau/waduk/rawa, direncanakan seluas ±24.618,2 hektar, yang terdiri dari kawasan sempadan pagar terhadap danau/waduk/rawa sejauh 50 meter dari titik pasang tertinggi danau/waduk/rawa; dan kawasan sempadan bangunan terhadap danau/waduk/rawa sejauh paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan waduk tersebar di 15 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Semarang, Pemalang, Tegal dan Brebes;
4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pengembangan RTH tersebar di tiap kabupaten/kota, terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dengan luas minimal 30% dari kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik minimal 20% sedangkan RTH privat 10%.

d) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi:

1) Daerah perlindungan plasma nutfah, tersebar di 29 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kota Magelang, Salatiga, Semarang, dan Tegal;
2) Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan, tersebar di kabupaten/ kota sepanjang pantai utara dan pantai selatan.

e) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.

Kawasan lindung ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, suaka alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:

1) Kawasan cagar alam, taman wisata alam, dan suaka marga satwa tersebar di 4 konservasi wilayah, meliputi Pati, Surakarta, Cilacap dan Pemalang, dengan luas yang telah ditetapkan sebesar ±2.923,3 hektar. Sebaran kawasan ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.3.**
**Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah**

| No | Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa | Lokasi | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|
| **A** | **Konservasi Wilayah I Pati** | | |
| 1 | Cagar Alam Keling I a, b, c | Kabupaten Jepara | 6,8 |
| 2 | Cagar Alam Keling II, III | Kabupaten Jepara | 61 |
| 3 | Cagar Alam Kembang | Kabupaten Jepara | 1,8 |

| No | Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa | Lokasi | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|
| 4 | Cagar Alam Gunung Celering | Kabupaten Jepara | 1328,4 |
| 5 | Cagar Alam Bekutuk | Kabupaten Blora | 25,4 |
| 6 | Cagar Alam Cabak I/II | Kabupaten Blora | 30 |
| 7 | Cagar Alam Gunung Butak | Kabupaten Rembang | 45,1 |
| **B** | **Konservasi Wilayah II Surakarta** | | |
| 1 | Cagar Alam Gebugan | Kabupaten Semarang | 1,8 |
| 2 | Cagar Alam Sepakung | Kabupaten Semarang | 10 |
| 3 | Cagar Alam Donoloyo | Kabupaten Wonogiri | 8,3 |
| 4 | Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan | Kabupaten Sragen | 103,9 |
| **C** | **Konservasi Wilayah III Cilacap** | | |
| 1 | Cagar Alam Pantodomas | Kabupaten Wonosobo | 4,1 |
| 2 | Cagar Alam Telogo Dringo | Kabupaten Banjarnegara | 26,1 |
| 3 | Cagar Alam Telogo Sumurup | Kabupaten Banjarnegara | 20,1 |
| 4 | Cagar Alam Pringamba I / II | Kabupaten Banjarnegara | 58 |
| 5 | Cagar Alam Nusakambangan Barat | Kabupaten Cilacap | 675 |
| 6 | Cagar Alam Nusakambangan Timur | Kabupaten Cilacap | 277 |
| 7 | Cagar Alam Wijaya Kusuma | Kabupaten Cilacap | 1 |
| 8 | Cagar Alam Karangbolong | Kabupaten Cilacap | 0,5 |
| **D.** | **Konservasi Wilayah IV Pemalang** | | |
| 1 | Cagar Alam Pagerwunung Darupono | Kabupaten Kendal | 33,2 |
| 2 | Cagar Alam Peson Subah I | Kabupaten Batang | 10,4 |
| 3 | Cagar Alam Peson Subah II | Kabupaten Batang | 10 |
| 4 | Cagar Alam Ulolanang Kecubung | Kabupaten Batang | 69,7 |
| 5 | Cagar Alam Bantarbolang | Kabupaten Pemalang | 24,5 |
| 6 | Cagar Alam Curug Bengkawah | Kabupaten Pemalang | 1,5 |
| 7 | Cagar Alam Moga | Kabupaten Pemalang | 3,5 |
| 8 | Cagar Alam Vak 53 Comal | Kabupaten Pemalang | 29,1 |
| 9 | Cagar Alam Guci | Kabupaten Tegal | 2 |
| 10 | Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara | Kabupaten Tegal | 6,6 |
| 11 | Cagar Alam Telaga Renjeng | Kabupaten Brebes | 48,5 |
| | **Jumlah** | | **2.923.3** |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

2) Kawasan Taman Nasional ditetapkan seluas ±12.135 hektar, meliputi: a) Taman Nasional Gunung Merapi seluas ±6.410 hektar berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan sebagian Sleman (Provinsi DIY); b) Taman Nasional Gunung Merbabu seluas ±5.725 hektar berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Semarang; serta c) Taman Nasional Karimunjawa seluas ±111.625 hektar berada di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
3) Kawasan pelestarian alam berupa taman hutan raya dan kebun raya, yaitu kawasan Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I berada di Berjo – Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar seluas ± 2.318 Hektar, dan Kebun

Raya Baturaden di Kabupaten Banyumas seluas ±150 hektar.

4) Pengembangan taman wisata alam dan taman wisata alam laut meliputi: Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap; Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo; Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar; Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang; Taman Wisata Alam Laut Ujung Negoro-Roban di Kabupaten Batang;
5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan untuk melindungi 597 benda cagar budaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Benda cagar budaya tersebut terdiri dari candi, situs purbakala, benteng kuno, makam kuno, masjid, gereja, klenteng, dan bangunan bersejarah lainnya;
6) Daerah pantai berhutan bakau seluas ±10.718,51 hektar tersebar di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang. Kawasan mangrove terluas di pantai selatan berada di Kabupaten Cilacap (77,99%), sedangkan di pantai utara berada di Kabupaten Demak (9,19%).

### 2.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2023 sebanyak 37.540.962 jiwa, naik sebesar 2,9 juta jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada Tahun 2019 yaitu sebesar 34.552.331. Jumlah Penduduk dan Laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah serta Rasio Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4.**
**Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| Tahun | Jumlah Penduduk | Laju pertumbuhan per tahun (%) | Rasio jenis kelamin |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34.552.331 | 0,76 | 98,49 |
| 2020 | 36.516.035 | 1,17 | 101,15 |
| 2021 | 36.742.501 | 0,83 | 101,11 |
| 2022 | 37.032.410 | 0,81 | 101,07 |
| 2023 | 37.540.962 | 1,01 | 101,03 |

*Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 2021-2023.*

Pada periode tahun 2019-2022, terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Tahun 2022, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Cilacap yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Purbalingga dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20 persen, diikuti Kabupaten Banjarnegara 1,15 persen dan Kabupaten Pemalang 1,11 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,05

persen terdapat di 2 (dua) kabupaten/kota antara lain Kota Magelang dan Kota Surakarta.

**Tabel 2.5.**
**Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)**
**Tahun 2019-2023**

| Kabupaten/ Kota | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab Cilacap | 1.718.824 | 1.944.857 | 1.963.824 | 1.988.622 | 2.007.829 |
| Kab Banyumas | 1.685.078 | 1.776.918 | 1.789.630 | 1.806.013 | 1.828.573 |
| Kab Purbalingga | 929.403 | 998.561 | 1.007.794 | 1.019.840 | 1.027.333 |
| Kab Banjarnegara | 918.715 | 1.017.767 | 1.026.866 | 1.038.718 | 1.047.226 |
| Kab Kebumen | 1.192.013 | 1.350.438 | 1.361.913 | 1.376.825 | 1.397.555 |
| Kab Purworejo | 714.816 | 769.880 | 773.588 | 778.257 | 788.265 |
| Kab Wonosobo | 786.703 | 879.124 | 886.613 | 896.346 | 909.664 |
| Kab Magelang | 1.284.627 | 1.299.859 | 1.305.512 | 1.312.573 | 1.330.656 |
| Kab Boyolali | 980.086 | 1.062.713 | 1.070.247 | 1.079.952 | 1.090.129 |
| Kab Klaten | 1.169.330 | 1.260.506 | 1.267.272 | 1.275.850 | 1.284.386 |
| Kab Sukoharjo | 887.484 | 907.587 | 911.603 | 916.627 | 932.680 |
| Kab Wonogiri | 954.646 | 1.043.177 | 1.049.292 | 1.057.087 | 1.051.085 |
| Kab Karanganyar | 882.473 | 931.963 | 938.808 | 947.642 | 955.116 |
| Kab Sragen | 886.196 | 976.951 | 983.641 | 992.243 | 997.485 |
| Kab Grobogan | 1.371.423 | 1.453.526 | 1.460.873 | 1.470.150 | 1.492.891 |
| Kab Blora | 860.957 | 884.333 | 886.147 | 888.224 | 901.621 |
| Kab Rembang | 635.294 | 645.333 | 647.766 | 650.770 | 660.166 |
| Kab Pati | 1.253.363 | 1.324.188 | 1.330.983 | 1.339.572 | 1.359.364 |
| Kab Kudus | 867.154 | 849.184 | 852.443 | 856.472 | 874.632 |
| Kab Jepara | 1.252.090 | 1.184.947 | 1.188.510 | 1.192.811 | 1.221.086 |
| Kab Demak | 1.157.421 | 1.203.956 | 1.212.377 | 1.223.217 | 1.240.510 |
| Kab Semarang | 1.049.002 | 1.053.094 | 1.059.844 | 1.068.492 | 1.080.648 |
| Kab Temanggung | 768.405 | 790.174 | 794.403 | 799.764 | 808.446 |
| Kab Kendal | 966.313 | 1.018.505 | 1.025.020 | 1.033.367 | 1.052.826 |
| Kab Batang | 764.970 | 801.718 | 807.005 | 813.791 | 828.883 |
| Kab Pekalongan | 893.290 | 968.821 | 976.504 | 986.455 | 1.007.384 |
| Kab Pemalang | 1.296.559 | 1.471.489 | 1.484.209 | 1.500.754 | 1.523.622 |
| Kab Tegal | 1.433.464 | 1.596.996 | 1.608.611 | 1.623.595 | 1.654.836 |
| Kab Brebes | 1.800.142 | 1.978.759 | 1.992.685 | 2.010.617 | 2.043.077 |
| Kota Magelang | 121.555 | 121.526 | 121.610 | 121.675 | 122.150 |
| Kota Surakarta | 517.045 | 522.364 | 522.728 | 523.008 | 526.870 |

| Kabupaten/ Kota | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Salatiga | 193.231 | 192.322 | 193.525 | 195.065 | 198.920 |
| Kota Semarang | 1.806.319 | 1.653.524 | 1.656.564 | 1.659.975 | 1.694.743 |
| Kota Pekalongan | 305.505 | 307.150 | 308.310 | 309.742 | 317.524 |
| Kota Tegal | 248.635 | 273.825 | 275.781 | 278.299 | 282.781 |
| Jawa Tengah | 34.552.531 | 36.516.035 | 36.742.501 | 37.032.410 | 37.540.962 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022.*

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

**Tabel 2.6.**
**Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah**
**Tahun 2019-2023**

| Tahun | Jawa Tengah | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) eks- karesidenan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Banyumas | Kedu | Surakarta | Pekalongan | Pati | Semarang |
| 2019 | 1.053 | 1.018 | 929 | 1.099 | 1.203 | 860 | 1.209 |
| 2020 | 1.113 | 1.112 | 994 | 1.174 | 1.320 | 863 | 1.214 |
| 2021 | 1.120 | 1.122 | 1.000 | 1.180 | 1.329 | 866 | 1.221 |
| 2022 | 1.129 | 1.134 | 1.008 | 1.189 | 1.342 | 870 | 1.228 |
| 2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023).*

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Keresidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km$^2$ diikuti eks-Keresidenan Semarang 1.228 jiwa/km$^2$, sedangkan eks-Keresidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km$^2$. Eks-Keresiden Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km$^2$ yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km$^2$ yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km$^2$. Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km$^2$.

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2019-2023, angka beban ketergantungan di Jawa Tengah fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 angka beban ketergantungan Jawa Tengah sebesar 53,71 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 53 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Berdasarkan komposisi usia penduduk, menurunnya angka beban ketergantungan lebih dipengaruhi oleh menurunnya proporsi penduduk usia 0-14 tahun yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 23,02 persen dan terus menurun hingga tahun 2022 menjadi 21,94 persen. Di sisi lain, proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas berfluktuasi dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun proporsinya.

Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 8,65 persen, meningkat menjadi 8,90 persen pada tahun 2019, menurun pada tahun 2020 menjadi 7,72 persen, namun kemudian terus meningkat menjadi 8,10 persen pada tahun 2021 dan mencapai 8,48 persen pada tahun 2022. Sementara proporsi penduduk usia produktif sendiri juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, proporsinya penduduk usia 15-64 tahun mencapai 68,33 persen, terus meningkat menjadi 69,85 persen pada tahun 2020 dan kemudian menunjukkan penurunan menjadi 69,58 persen pada tahun 2022.

**Tabel 2.7.**
**Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| Tahun | 0-14 Tahun | 15-64 Tahun | 65+ Tahun | Angka Beban Ketergantungan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.839.940 | 23.636.420 | 3.076.170 | 46,18 |
| 2020 | 8.190.778 | 24.506.691 | 2.818.566 | 43,15 |
| 2021 | 8.148.545 | 25.619.556 | 2.924.400 | 43,42 |
| 2022 | 8.123.792 | 25.768.441 | 3.140.177 | 53,71 |
| 2023 | 8.125.741 | 25.672.387 | 3.742.834 | 46,24 |

*Sumber: BPS Jawa Tengah 2022 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023)*

Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan karena jika penduduk usia tua tersebut semakin banyak maka akan semakin meningkatkan angka beban ketergantungan.

Peningkatan proporsi penduduk usia produktif disebut sebagai bonus demografi. Kondisi ini juga merupakan dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial dan politik. Bonus demografi yang terjadi di Jawa Tengah sepertinya mulai berakhir. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan 0,38 poin dari tahun sebelumnya.

Hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah dengan mendorong peningkatan kualitas penduduk usia produktif yang saat ini proporsinya masih sangat besar. Jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik, maka akan mampu menanggung beban ketergantungan yang kemungkinan akan semakin besar di masa mendatang.

## 2.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah digambarkan dengan kondisi kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2018 – 2019 menurun dari 11,32% (3.897,20 ribu orang) menjadi 10,58% (3.679,40 ribu orang). Namun mengalami peningkatan pada periode Maret 2020 menjadi 11,41% (3.980,90 ribu orang) dan mengalami peningkatan lagi pada periode September 2020 menjadi 11,84% (4.119,93 ribu orang). Kenaikan tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Seiring dengan upaya intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 11,79 pada Maret 2021. Kondisi kemiskinan di Jawa Tengah setelah tahun 2021 juga

mengalami penurunan dari 10,93 persen pada Maret 2022 menjadi 10,77 persen pada Maret 2023. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 39,94 ribu orang dari 3.831,44 ribu orang (Maret 2022) menjadi 3.791,50 ribu orang (Maret 2023). Periode Maret 2022 - Maret 2023, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 9,92% menjadi 9,78% namun secara absolut jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 3,41 ribu orang. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 12,04% menjadi 11,87% atau berkurang sebanyak 43,36 ribu orang.

**Tabel 2.8.**
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023**

| Tahun | Penduduk Miskin | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ribu orang) | | | (%) | | |
| | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan |
| 2019 | 1.633,96 | 2.109,26 | 3.743,23 | 9,20 | 12,48 | 10,80 |
| 2020 | 1.805,65 | 2.175,25 | 3.980,90 | 10,09 | 12,80 | 11,41 |
| 2021 | 1.908,29 | 2.201,44 | 4.109,73 | 10,58 | 13,07 | 11,79 |
| 2022 | 1.818.25 | 2.013,20 | 3.831,44 | 9,92 | 12,04 | 10,93 |
| 2023 | 1.821,66 | 1.969,84 | 3.791,50 | 9,78 | 11,87 | 10,77 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Rilis Periode Maret (Angka kemiskinan periode September 2023 tidak rilis).*

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional

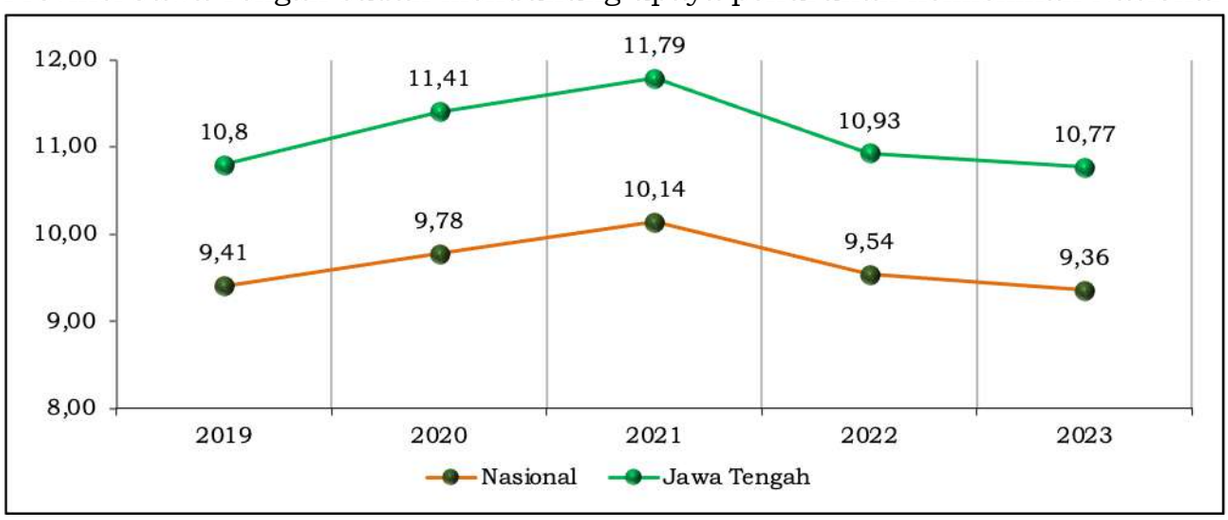


*Sumber: BPS, Rilis Periode Maret 2023.*

**Gambar 2.2.**
**Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional**
**Tahun 2019 – 2023**

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota mendasarkan data per Maret tahun 2023 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Wonogiri, Magelang, Cilacap, Purworejo, Blora, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, Brebes dan Kebumen;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 4 kabupaten meliputi Kabupaten Kendal, Pekalongan, Karanganyar dan Boyolali;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 14 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Pati.

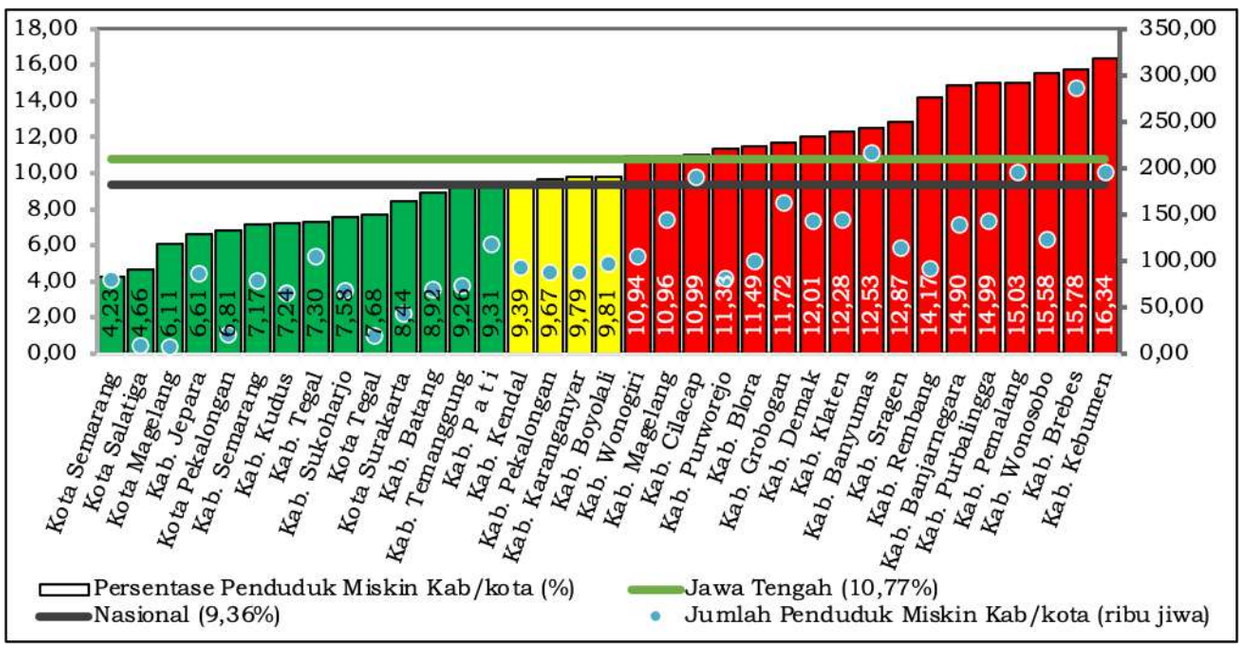


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.3.**
**Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2023**

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah periode Maret 2023 sebesar Rp477.580 per kapita per bulan, meningkat 8,83 persen dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar Rp438.833 per kapita per bulan.

Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan periode Maret 2023 sebesar Rp485.511 per kapita per bulan atau naik 9,73 persen dari kondisi Maret 2022 yang sebesar Rp442.479 per kapita per bulan. Sedangkan Garis Kemiskinan di perdesaan periode Maret 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 7,87 persen menjadi sebesar Rp469.003 per kapita per bulan dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar Rp434.785 per kapita per bulan.

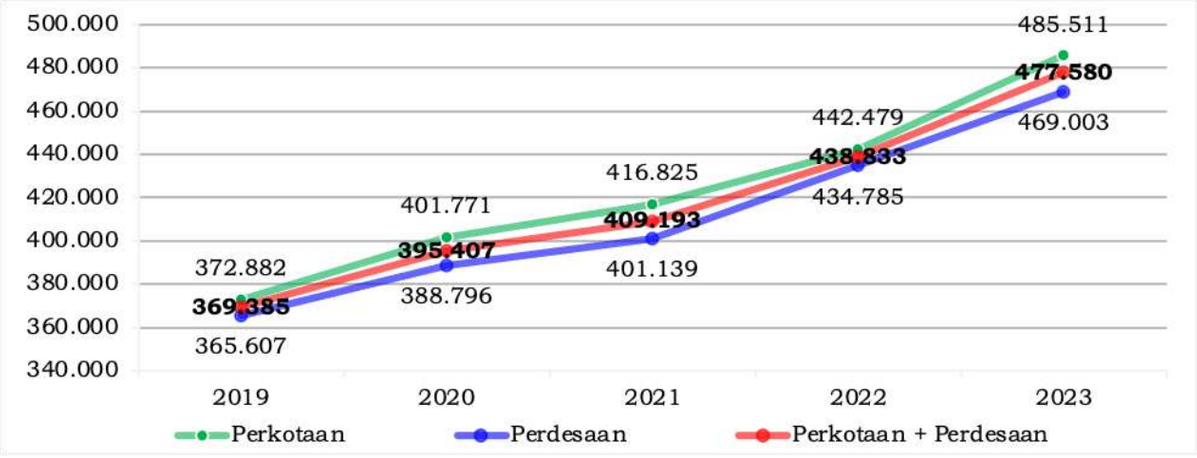


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Rilis Periode Maret*

**Gambar 2.4.**
**Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019 – 2020 meningkat dari 1,527 menjadi 1,720 pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 1,911 pada tahun 2021, namun menurun menjadi 1,771 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 1,749 pada tahun 2023. Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai P1 periode Maret 2023 di perdesaan sebesar 1,835 masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (1,673). Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019 – 2020 meningkat dari 0,299 menjadi 0,342 pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 0,450 pada tahun 2021, namun menurun menjadi 0,416 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,415 pada tahun 2023. Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai P2 pada periode Maret 2023 di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Periode Maret 2023, nilai P2 untuk daerah perkotaan sebesar 0,410 naik 0,043 poin dibandingkan Maret 2022. Sedangkan pada periode yang sama nilai P2 untuk daerah perdesaan mencapai sebesar 0,420 turun 0,050 poin dibandingkan Maret 2022.

**Tabel 2.9.**
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023**

| Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | | | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan |
| 2019 | 1,318 | 1,747 | 1,527 | 0,269 | 0,331 | 0,299 |
| 2020 | 1,526 | 1,924 | 1,720 | 0,311 | 0,376 | 0,342 |
| 2021 | 1,684 | 2,154 | 1,911 | 0,395 | 0,508 | 0,450 |
| 2022 | 1,564 | 1,997 | 1,771 | 0,367 | 0,470 | 0,416 |
| 2023 | 1,673 | 1,835 | 1,749 | 0,410 | 0,420 | 0,415 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Riilis Periode Maret*

## 2.3. Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian daerah Jawa Tengah dapat digambarkan dari beberapa indikator kinerja antara lain pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, rasio Gini, indeks Williamson, dan indeks daya saing daerah (IDSD). Kinerja perekonomian daerah Jawa Tengah didukung dengan kinerja sektor-sektor unggulan daerah yaitu pertanian, koperasi dan UKM, perdagangan, industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu juga, perekonomian daerah Jawa Tengah didukung oleh iklim investasi yang baik, kondisi infrastruktur yang mantap dan transportasi yang menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pembangunan perekonomian berbasis desa. Gambaran keseluruhan kondisi perekonomian daerah sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

### 2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Pembangunan ekonomi Jawa Tengah semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari tahun 2016-2019, dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi covid-19 yang juga dialami oleh semua daerah. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah turun sebesar minus 2,65 persen, penurunan juga terlihat pada PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Tahun 2021 dan 2022 perkembangan ekonomi sudah semakin membaik seiring menurunnya angka kasus covid-19 dan banyaknya masyarakat yang sudah vaksin, sehingga mobilitas masyarakat dapat terus meningkat.

Capaian Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,31 persen, meningkat dari capaian Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Capaian ini sudah mendekati capaian sebelum pandemi yaitu sebesar 5,36 persen Tahun 2019. Sementara itu pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,98 persen (*c-to-c*) lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,05 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2023 mengalami perlambatan dibanding tahun 2022 yang tumbuh 5,31 persen (*c-to-c*).

PDRB ADHK maupun ADHB Jawa Tengah dari tahun 2016-2023 memiliki tren yang positif selalu mengalami kenaikan. Nilai PDRB ADHK pada tahun 2021 sebesar Rp997.345 miliar meningkat dari tahun 2020 yang sebesar Rp965.225 miliar. Dan pada tahun 2022 nilai PDRB ADHK kembali meningkat mencapai sebesar Rp1.050.322 miliar. Selanjutnya, nilai PDRB ADHB pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.419.986 miliar meningkat dari tahun 2020 yang sebesar Rp1.347.922 miliar. Pada tahun 2022 nilai PDRB ADHB mencapai sebesar Rp1.560.899 miliar. Tahun 2023 PDRB ADHK Jawa Tengah sebesar Rp1.102.560 miliar, sementara berdasarkan ADHB sebesar Rp1.696.800 miliar.

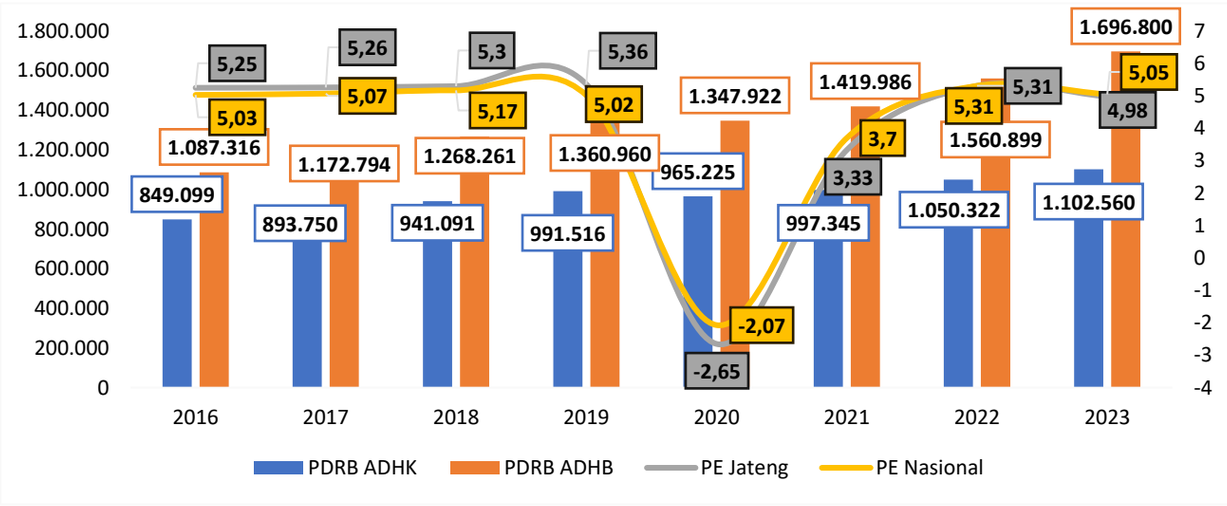


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**Gambar 2.5.**
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2023**

Pertumbuhan ekonomi dilihat secara *year on year* (*yoy*) yang mana memperbandingkan pertumbuhan PDRB tahun sekarang (t) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (t-1) sering disebut dengan istilah laju pertumbuhan PDRB dalam setahun. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan ke IV-2023 tumbuh sebesar 4,73 persen, menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,92 persen. Gambaran lebih detail terlihat bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sempat resesi dengan pertumbuhan negatif selama lebih dari dua triwulan berturut-turut yaitu pada triwulan II-2020 sampai dengan triwulan I-2021 karena pandemi Covid-19 dan kemudian mulai bangkit pada triwulan II-2021 sampai triwulan IV-2023 meskipun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif tersebut mengidentifikasikan pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih terus berlanjut.

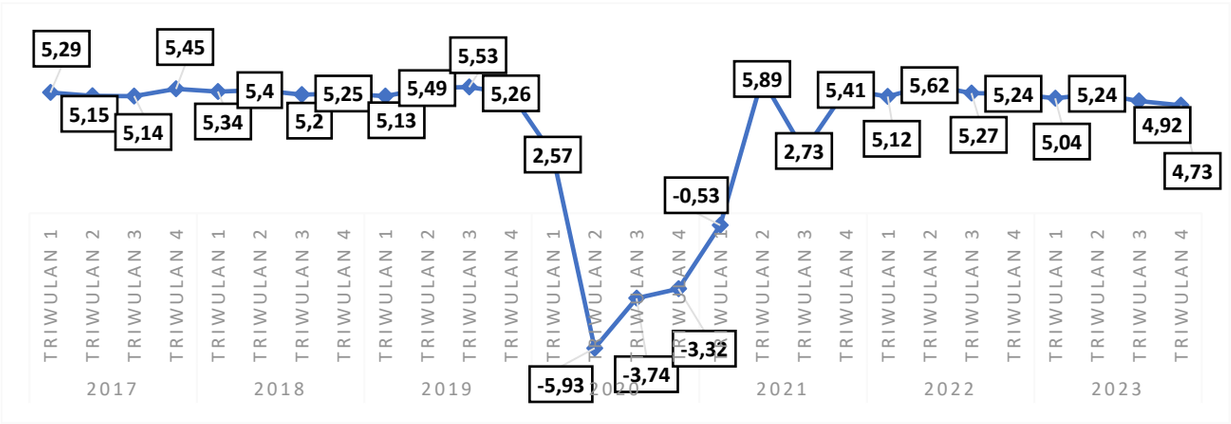


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**Gambar 2.6.**
**Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (*y-o-y*) Per-Triwulan Tahun 2017-2023 (%)**

Jika dibandingkan dengan provinsi lain se-pulau jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2023 secara *c-to-c* rata-rata lebih tinggi daripada provinsi lain di Jawa, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Barat. Jawa Tengah tumbuh 4,98 persen (*c-to-c*) sementara Provinsi DIY tumbuh 5,07 persen dan Provinsi Jawa Barat tumbuh 5,00 persen. Sementara Provinsi Banten merupakan provinsi dengan pertumbuhan terendah di Pulau Jawa yaitu sebesar 4,81 persen. Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,49 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah masih menjadi penyumbang keempat terbesar nasional maupun pulau jawa setelah provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

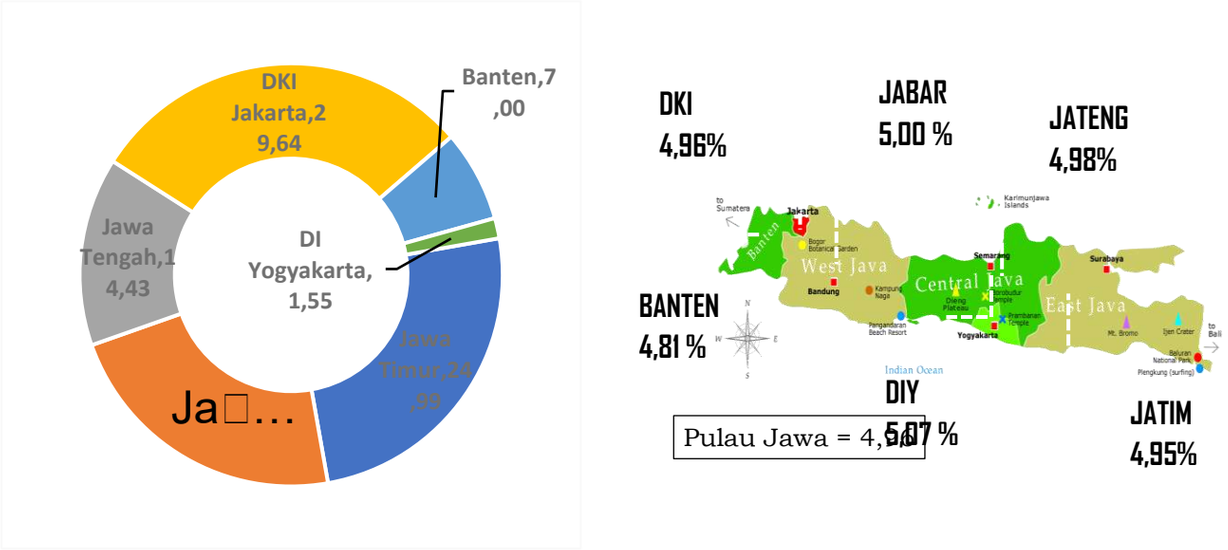


*Sumber: BPS, diolah, 2024*

**Gambar 2.7.**
**Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB Menurut Provinsi se-Pulau Jawa Pada Tahun 2023 (%)**

Pertumbuhan ekonomi dapat tergambarkan melalui sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu

diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023 didominasi oleh tiga (3) lapangan usaha yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 34,03 persen, Lapangan Usaha Perdagangan berkontribusi sebesar 13,61 persen, dan Pertanian yang memiliki kontribusi 13,23 persen. Lapangan usaha pertanian selama 3 tahun berturut-turut kontribusinya selalu mengalami penurunan, pada tahun 2021 Lapangan Usaha Pertanian berkontribusi sebesar 13,86 persen dan menurun di tahun 2022 menjadi 13,53 persen.

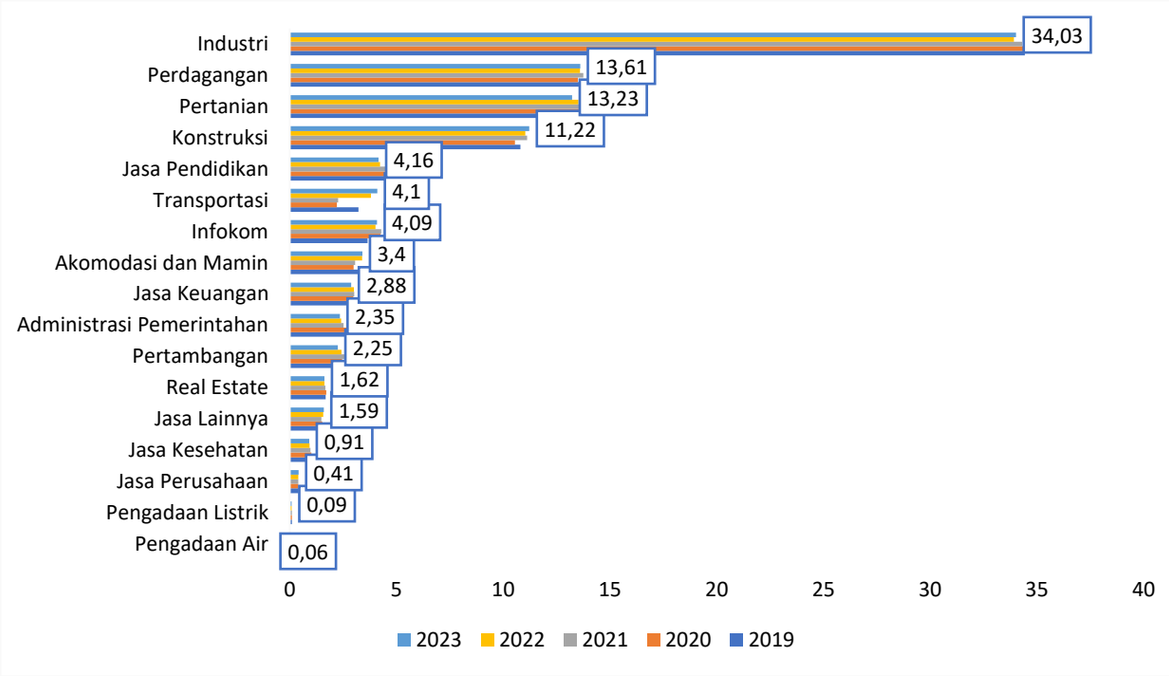


*Sumber: BPS Jateng, 2024.*

**Gambar 2.8.**
**Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (%)**

Sementara itu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2023 adalah Penyediaan Akomodasi Makan Minum yang tumbuh sebesar 11,24 persen, Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 10,67 persen dan Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 8,12 persen. Hal ini menandakan bahwa aktivitas pariwisata semakin meningkat. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Tengah seperti Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,31 persen, Perdagangan tumbuh sebesar 4,98 persen dan Pertanian tumbuh melambat sebesar 0,49 persen.

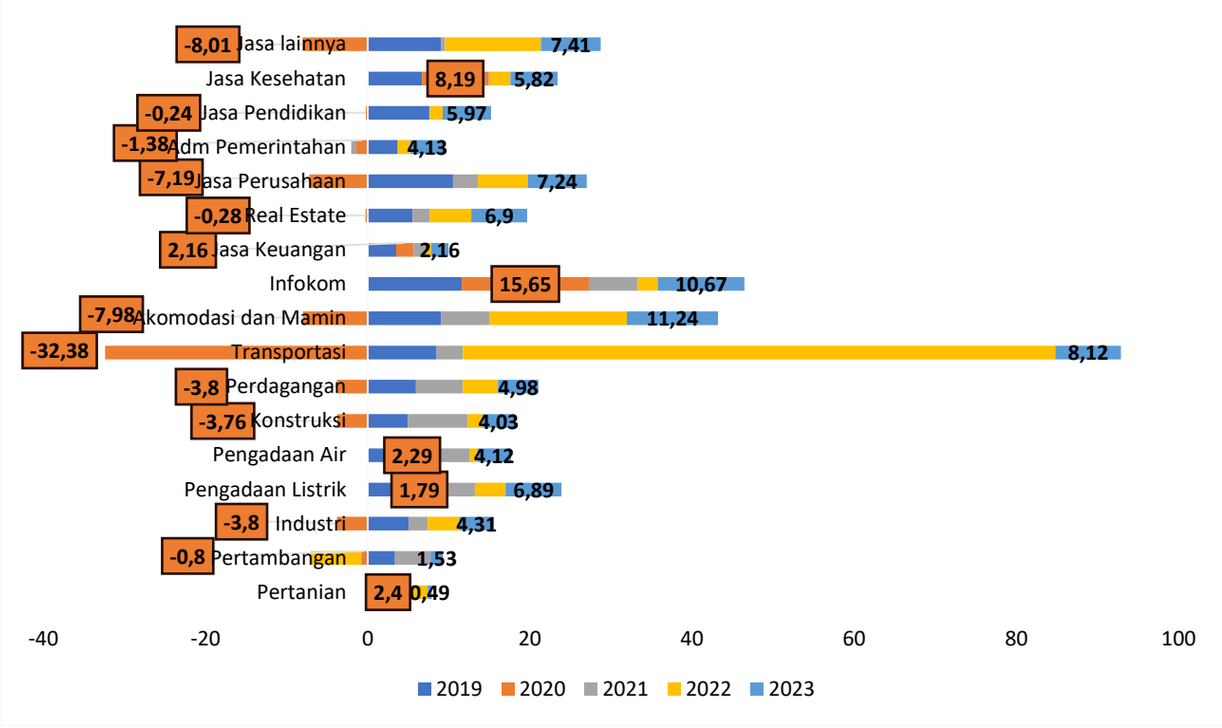


*Sumber: BPS Jateng, 2024.*

**Gambar 2.9.**
**Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)**

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran pada, pada tahun 2023 struktur ekonomi di dominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang berkontribusi sebesar 60,90 persen, selanjutnya Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) memiliki kontribusi sebesar 37,28 persen, sementara itu Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang memiliki kontribusi sebesar 30,02 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga selama tiga tahun berturut-turut selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2021 sebesar 60,17 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 60,28 persen.

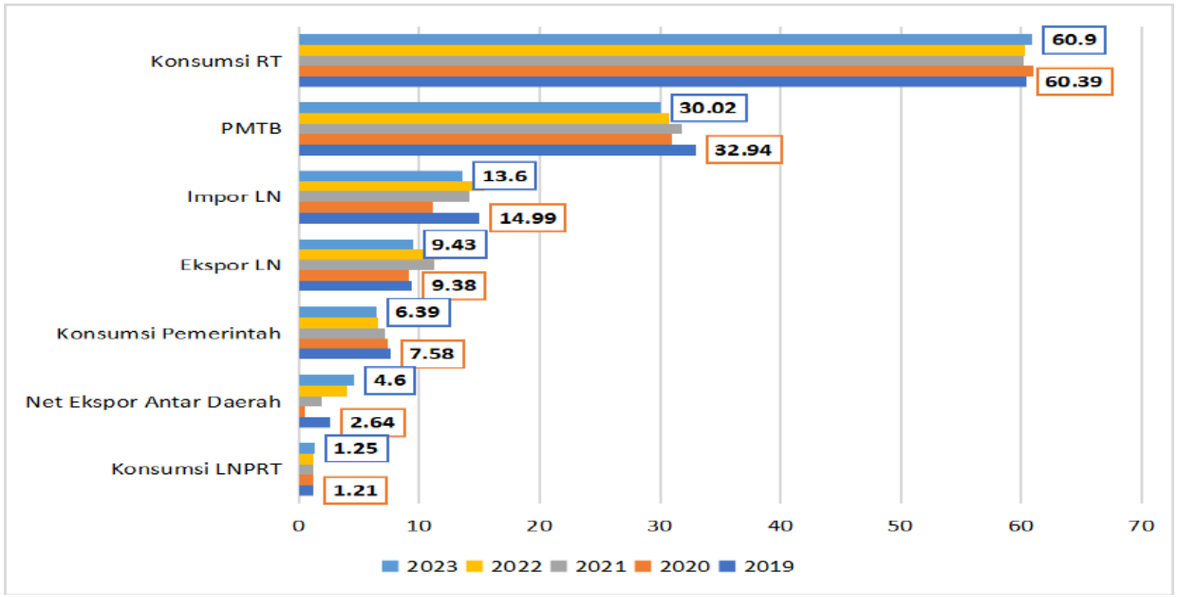


Sumber: BPS Jateng, 2024.

**Gambar 2.10.**
**Kontribusi Perekonomian Jawa Tengah Menurut Pengeluran**
**Tahun 2019-2023 (%)**

Pada tahun 2023 pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga *Non-Profit* yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 7,34 persen seriring dengan semakin meningkatnya aktivitas partai politik menjelang pemilu 2024. Kemudian Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,68 persen, disusul oleh Komponen PMTB yang tumbuh sebesar 4,36 persen. Pada tahun 2023 semua komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan.

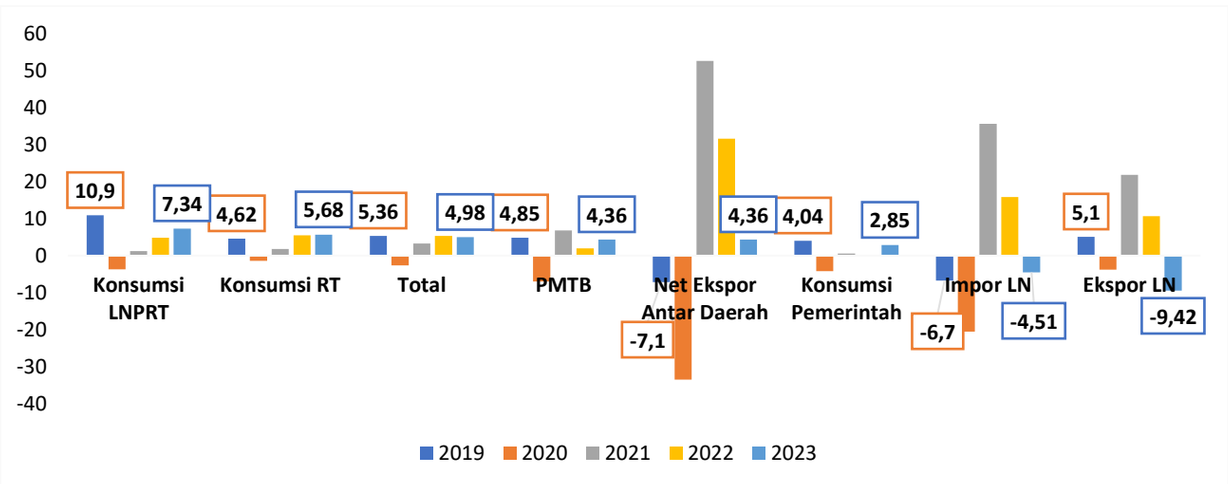


Sumber: BPS Jateng, 2024

**Gambar 2.11.**
**Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluran Di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019-2023 (%)**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang terus membaik pasca pandemi Covid-19 tahun 2020 juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2021 tumbuh positif dibandingkan tahun 2020,

kecuali Kabupaten Kudus yang mengalami kontraksi sebesar -1,54 persen yang diakibatkan karena industri tembakau di Kudus masih mengalami pertumbuhan negatif. Namun demikian, pada tahun 2022, semua kabupaten/kota telah tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Boyolali dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,33 persen, diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 6,25 persen, dan Kabupaten Grobogan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 persen. Sedangkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Kudus sebesar 2,23 persen, Kabupaten Blora 2,68 persen, dan Kabupaten Wonosobo 5,02 persen. Tahun 2023 ditengah pelambatan ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang (5,79 persen) mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan terendah adalah Kabupaten Kudus (2,19 persen). Hanya ada 4 Kabupaten / Kota yang tumbuh positif dari capaian Tahun 2022 yaitu Kabupaten Pekalongan (tumbuh 0,03), Kota Semarang (tumbuh 0,06), Kabupaten Cilacap (tumbuh 0,19) dan Kabupaten Blora (tumbuh 0,44). Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Brebes sebesar 1,87 persen dan Kabupaten Grobogan sebesar 1,00 persen.

**Tabel 2.10.**
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023 (%)**

| No | Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Cilacap | 2.27 | -10.28 | 2.15 | 5.13 | 5.34 |
| 2 | Kabupaten Banyumas | 6.32 | -1.65 | 4.00 | 5.86 | 5.40 |
| 3 | Kabupaten Purbalingga | 5.64 | -1.18 | 3.19 | 5.41 | 4.51 |
| 4 | Kabupaten Banjarnegara | 5.6 | -1.32 | 3.26 | 5.29 | 4.98 |
| 5 | Kabupaten Kebumen | 5.52 | -1.45 | 3.71 | 5.79 | 5.66 |
| 6 | Kabupaten Purworejo | 5.44 | -1.61 | 3.31 | 5.36 | 5.07 |
| 7 | Kabupaten Wonosobo | 5.57 | -1.64 | 3.68 | 5.02 | 4.30 |
| 8 | Kabupaten Magelang | 5.3 | -1.67 | 3.48 | 5.46 | 5.04 |
| 9 | Kabupaten Boyolali | 5.96 | -1.20 | 4.63 | 6.33 | 5.63 |
| 10 | Kabupaten Klaten | 5.48 | -1.17 | 3.82 | 5.90 | 5.70 |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo | 5.92 | -1.70 | 3.82 | 5.61 | 5.06 |
| 12 | Kabupaten Wonogiri | 5.14 | -1.41 | 3.35 | 5.63 | 4.98 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | 5.76 | -1.87 | 3.57 | 5.87 | 5.53 |
| 14 | Kabupaten Sragen | 5.9 | -1.81 | 3.75 | 5.76 | 5.23 |
| 15 | Kabupaten Grobogan | 5.37 | -1.57 | 3.78 | 5.98 | 4.98 |
| 16 | Kabupaten Blora | 4.05 | -4.56 | 3.68 | 2.68 | 3.10 |
| 17 | Kabupaten Rembang | 5.2 | -1.49 | 3.85 | 5.55 | 5.20 |
| 18 | Kabupaten Pati | 5.81 | -1.16 | 3.38 | 5.56 | 5.02 |
| 19 | Kabupaten Kudus | 3.09 | -3.11 | -1.54 | 2.23 | 2.19 |
| 20 | Kabupaten Jepara | 6.02 | -1.92 | 4.63 | 5.95 | 5.17 |
| 21 | Kabupaten Demak | 5.36 | -0.23 | 2.62 | 5.25 | 5.01 |
| 22 | Kabupaten Semarang | 5.39 | -2.67 | 3.63 | 5.31 | 4.74 |
| 23 | Kabupaten Temanggung | 5.05 | -2.13 | 3.34 | 5.2 | 5.00 |
| 24 | Kabupaten Kendal | 5.71 | -1.51 | 3.89 | 5.69 | 5.56 |
| 25 | Kabupaten Batang | 5.39 | -1.29 | 4.88 | 5.97 | 5.53 |
| 26 | Kabupaten Pekalongan | 5.35 | -1.89 | 3.54 | 5.11 | 5.14 |
| 27 | Kabupaten Pemalang | 5.8 | -0.61 | 4.28 | 5.08 | 4.14 |

| No | Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Kabupaten Tegal | 5.56 | -1.48 | 3.71 | 5.14 | 4.93 |
| 29 | Kabupaten Brebes | 5.76 | -0.47 | 2.57 | 5.61 | 3.74 |
| 30 | Kota Magelang | 5.41 | -2.45 | 3.20 | 5.77 | 5.45 |
| 31 | Kota Surakarta | 5.78 | -1.76 | 4.01 | 6.25 | 5.57 |
| 32 | Kota Salatiga | 5.90 | -1.68 | 3.35 | 5.53 | 5.34 |
| 33 | Kota Semarang | 6.81 | -1.85 | 5.16 | 5.73 | 5.79 |
| 34 | Kota Pekalongan | 5.50 | -1.87 | 3.59 | 5.76 | 5.44 |
| 35 | Kota Tegal | 5.77 | -2.29 | 3.12 | 5.16 | 5.01 |
| | **Jawa Tengah** | **5.40** | **-2.65** | **3.32** | **5.31** | **4.98** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Gambar dibawah ini dapat diketahui bahwa dari 35 Kabupaten/Kota, terdapat sebanyak 19 Kabupaten/Kota yang capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 melebihi capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (grafik batang warna biru), terdapat 8 Kabupaten/Kota yang capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 di atas capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan di bawah capaian pertumbuhan ekonomi Nasional (grafik batang warna kuning), serta terdapat 8 Kabupaten/Kota yang capaian pertumbuhan ekonomi nya di bawah capaian Jawa Tengah dan Nasional (grafik batang warna merah).

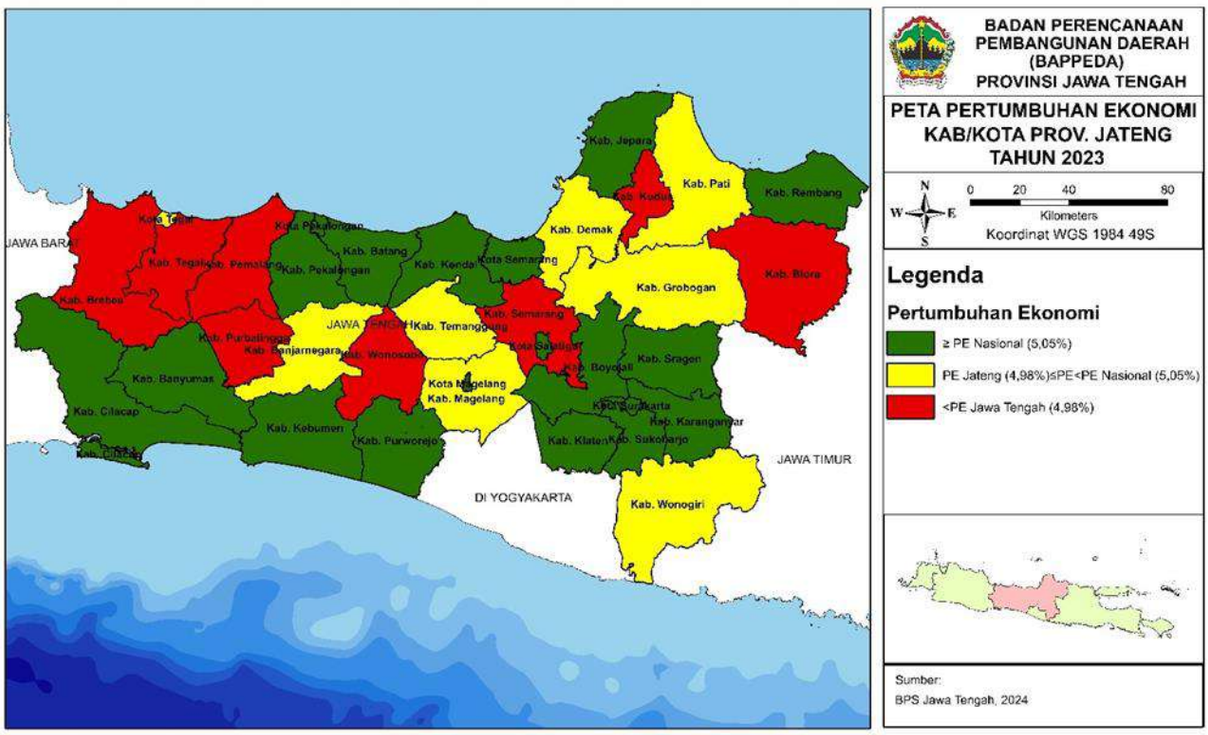


*Sumber: BPS, 2024 (diolah).*

**Gambar 2.12.**
**Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (*c-to-c*, persen)**

### 2.3.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2010-2019, PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun tahun 2020 mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19

menjadi sebesar Rp36,96 juta, turun sebesar 6,15 persen dari sebelum Pandemi yaitu Tahun 2019. Pada Tahun 2021 sudah mengalami kenaikkan seiring dengan membaiknya perekonomian dan mobilitas masyarakat sebesar 38,65 juta rupiah kemudian naik Kembali di Tahun 2023 sebesar Rp45,20 juta. Jika dibandingkan dengan Nasional, PDRB Per kapita Jawa Tengah masih dibawahnya, namun selalu menunjukkan tren yang membaik atau naik

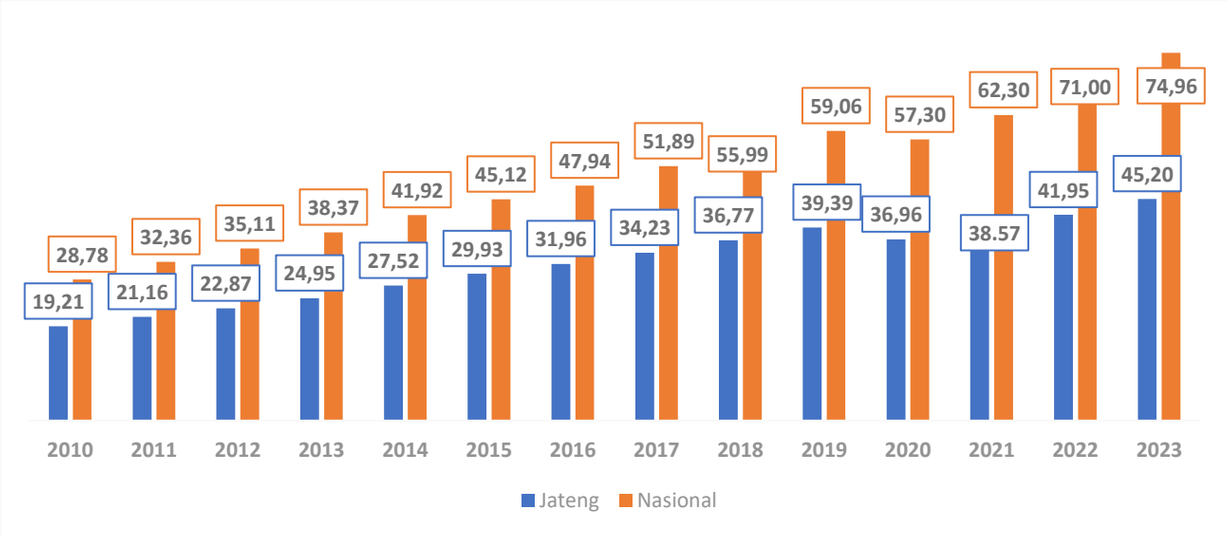


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**Gambar 2.13.**
**PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2010 – 2023**

Jika dibandingkan dengan provinsi se-Pulau Jawa, PDRB per kapita Jawa Tengah tahun 2023 berada di urutan terakhir atau ke enam. Sedangkan PDRB per kapita tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp322,62 juta, diikuti Provinsi Jawa Timur (Rp71,12 juta) dan Provinsi Banten (Rp66,15 juta).

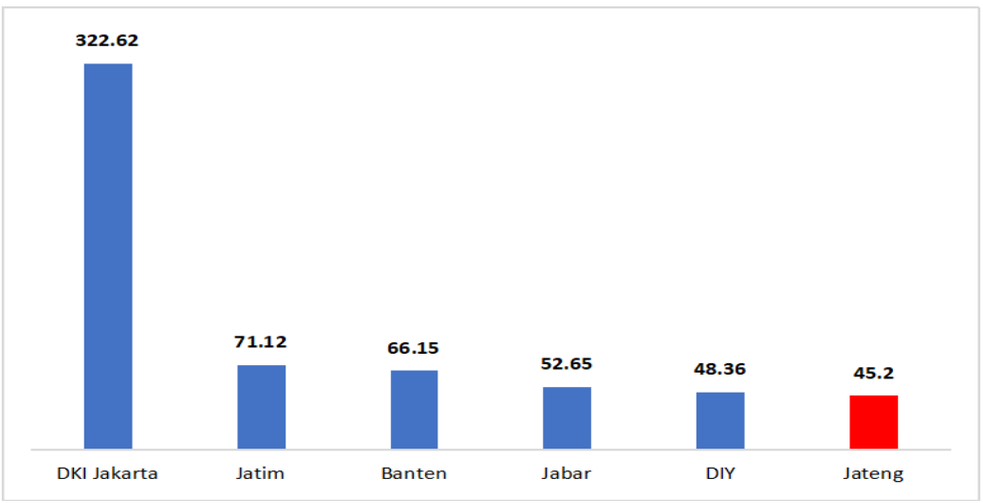


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

**Gambar 2.14.**
**PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa Tahun 2023**

Sebaran PDRB per kapita per kabupaten/kota se- Jawa Tengah sebagai berikut:

**Tabel 2.11.**
**PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023 (Juta Rupiah)**

| No | Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Cilacap | 66.39 | 53.92 | 55.74 | 60.88 | 65.95 |
| 2 | Kabupaten Banyumas | 32.02 | 30.28 | 31.79 | 34.71 | 37.6 |
| 3 | Kabupaten Purbalingga | 26.81 | 25.2 | 26.23 | 28.35 | 30.39 |
| 4 | Kabupaten Banjarnegara | 23.51 | 21.38 | 22.26 | 24.11 | 25.96 |
| 5 | Kabupaten Kebumen | 23.44 | 20.8 | 21.69 | 23.63 | 25.59 |
| 6 | Kabupaten Purworejo | 26.1 | 24.26 | 25.31 | 27.33 | 29.42 |
| 7 | Kabupaten Wonosobo | 23.91 | 21.49 | 22.38 | 24.02 | 25.65 |
| 8 | Kabupaten Magelang | 25.3 | 25.01 | 26.12 | 28.37 | 30.57 |
| 9 | Kabupaten Boyolali | 33.33 | 30.83 | 32.61 | 35.91 | 39.2 |
| 10 | Kabupaten Klaten | 34.01 | 31.74 | 33.37 | 36.52 | 39.92 |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo | 41.63 | 40.7 | 42.65 | 46.32 | 49.88 |
| 12 | Kabupaten Wonogiri | 30.42 | 28.01 | 29.28 | 32.15 | 35.15 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | 41.94 | 39.82 | 41.62 | 45.45 | 49.42 |
| 14 | Kabupaten Sragen | 42.7 | 38.83 | 40.81 | 44.69 | 48.69 |
| 15 | Kabupaten Grobogan | 19.89 | 18.79 | 19.67 | 21.51 | 23.28 |
| 16 | Kabupaten Blora | 30.16 | 27.16 | 30.32 | 34.59 | 35.22 |
| 17 | Kabupaten Rembang | 29.82 | 29.39 | 30.91 | 33.76 | 36.55 |
| 18 | Kabupaten Pati | 34.34 | 32.74 | 34.12 | 37.19 | 40.29 |
| 19 | Kabupaten Kudus | 127.52 | 129.14 | 126.95 | 132.34 | 138.7 |
| 20 | Kabupaten Jepara | 24.14 | 25.49 | 26.78 | 28.96 | 31.14 |
| 21 | Kabupaten Demak | 22.62 | 22.1 | 22.77 | 24.64 | 26.62 |
| 22 | Kabupaten Semarang | 47.3 | 46.67 | 48.79 | 52.87 | 56.71 |
| 23 | Kabupaten Temanggung | 28.17 | 27.33 | 28.46 | 30.84 | 33.29 |
| 24 | Kabupaten Kendal | 44.03 | 41.9 | 43.94 | 47.73 | 51.63 |
| 25 | Kabupaten Batang | 28.22 | 27.02 | 28.57 | 31.06 | 33.64 |
| 26 | Kabupaten Pekalongan | 25.59 | 23.6 | 24.44 | 26.08 | 27.91 |
| 27 | Kabupaten Pemalang | 19.65 | 17.6 | 18.46 | 19.88 | 21.24 |
| 28 | Kabupaten Tegal | 24.57 | 22.15 | 23.14 | 24.95 | 26.85 |
| 29 | Kabupaten Brebes | 25.65 | 23.83 | 24.52 | 26.59 | 28.19 |
| 30 | Kota Magelang | 72.45 | 71.7 | 75.49 | 82.66 | 89.91 |
| 31 | Kota Surakarta | 92.83 | 91.17 | 96.11 | 106.26 | 114.8 |
| 32 | Kota Salatiga | 68.89 | 69.14 | 72.17 | 78.26 | 84.32 |
| 33 | Kota Semarang | 105.93 | 114.19 | 123.04 | 135.33 | 146.87 |
| 34 | Kota Pekalongan | 35.59 | 35.36 | 36.95 | 40.12 | 43.29 |
| 35 | Kota Tegal | 61.47 | 55.72 | 57.95 | 63.22 | 67.76 |
| | Provinsi Jawa Tengah | 39.39 | 36.96 | 38.57 | 41.95 | 45.20 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Terdapat 12 kabupaten/kota dengan PDRB per kapita diatas capaian Jawa Tengah (lebih dari Rp.45,20 juta). Adapun sebanyak tiga kabupaten/kota memiliki PDRB per kapita diatas Rp100 juta yaitu Kota Semarang (Rp. 146,87 Juta), Kabupaten Kudus (Rp. 138,70 Juta), dan Kota Surakarta (Rp. 114,80 Juta). Sedangkan 23 kabupaten/kota lainnya memiliki PDRB per kapita di bawah PDRB per kapita Jawa Tengah (kurang dari Rp.45,20 juta).

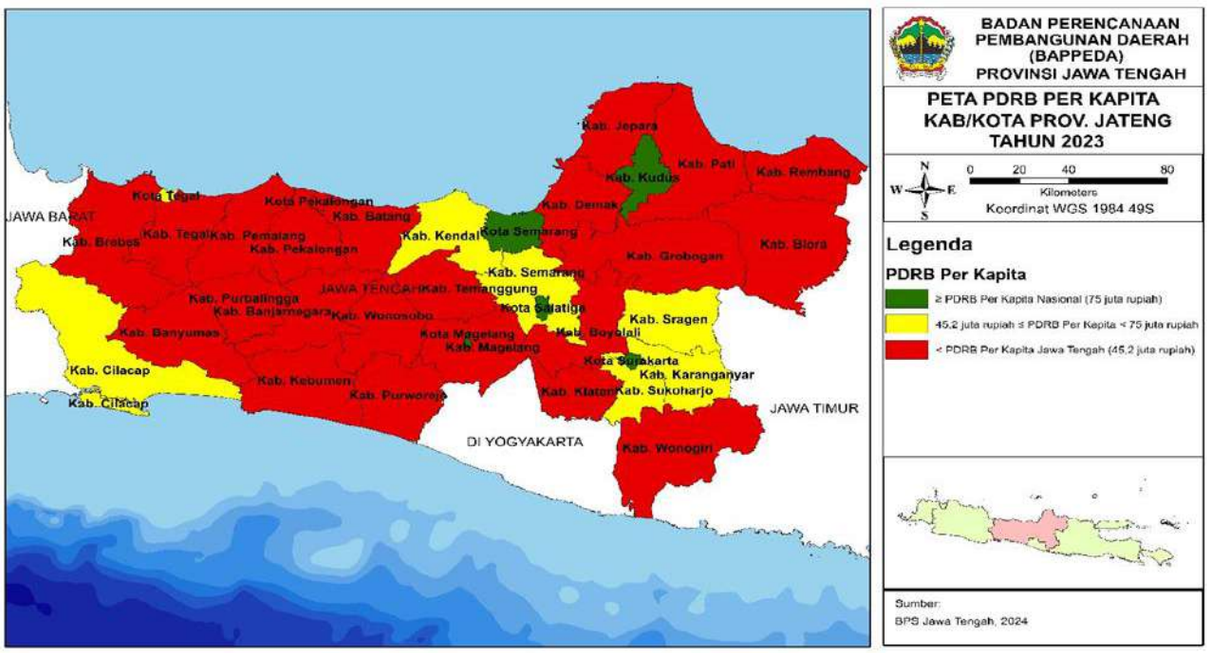


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 diolah*

**Gambar 2.15.**
**PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023**

### 2.3.3 Inflasi

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2021 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen, bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan laju inflasi di Jawa Tengah menjadi sebesar 5,63 persen. Pada tahun 2023 terjadi penurunan laju inflasi menjadi sebesar 2,89, meskipun tingkat inflasi Jawa Tengah masih lebih tinggi dibanding tingkat inflasi Nasional. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya semua indeks kelompok pengeluaran terutama komponen makanan dan minuman. Penyebab utama inflasi bulan Desember 2023 adalah kenaikan harga cabai merah, bawang merah, tarif kereta api, minyak goreng, dan emas perhiasan, sedangkan penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga daging ayam ras, buncis, beras, cumi-cumi, dan ikan bandeng/ikan bolu.

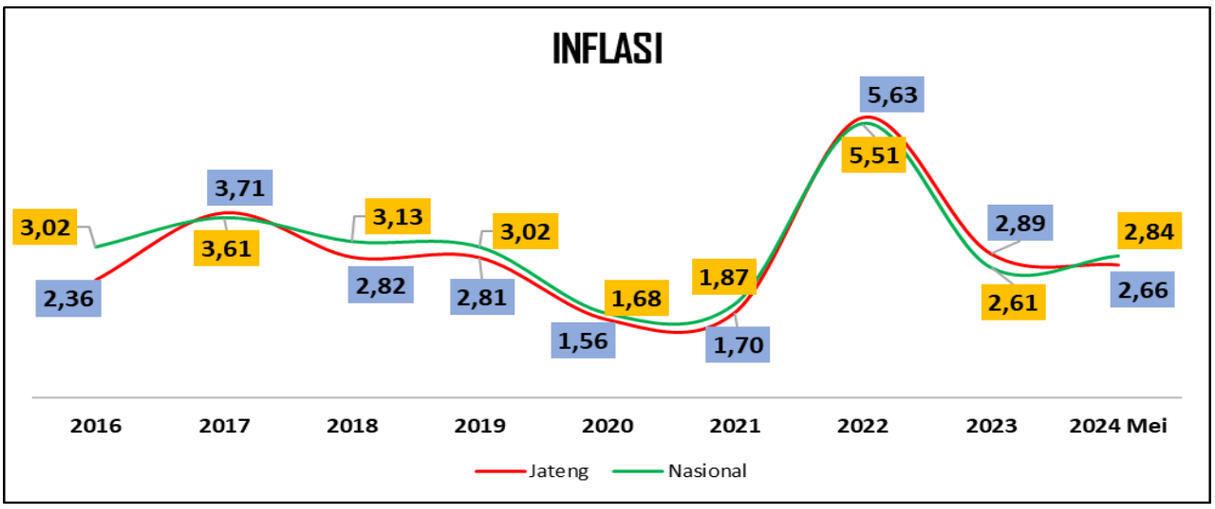


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 2.16.**
**Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional**
**Tahun 2016 – Januari 2024 (%)**

### 2.3.4 Rasio Gini dan Indeks Williamson

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, semakin tinggi nilai menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi. Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah yang digambarkan dari angka g*ini ratio* pada periode 2013-2023 terlihat berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2013 yaitu sebesar 0,390. Pada Maret 2023 Gini Ratio mengalami sedikit kenaikan dibandingkan September 2022, yaitu dari 0,366 menjadi 0,369, atau naik sebesar 0,003 poin.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,399 mengalami kenaikan sebesar 0,007 point dibandingkan rasio gini pada September 2022 yang sebesar 0,392. Sementara itu di daerah perdesaan rasio gini pada Maret 2023 sebesar 0,318 mengalami penurunan sebesar 0,018 point dibandingkan rasio gini September 2022 yang sebesar 0,326. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan.

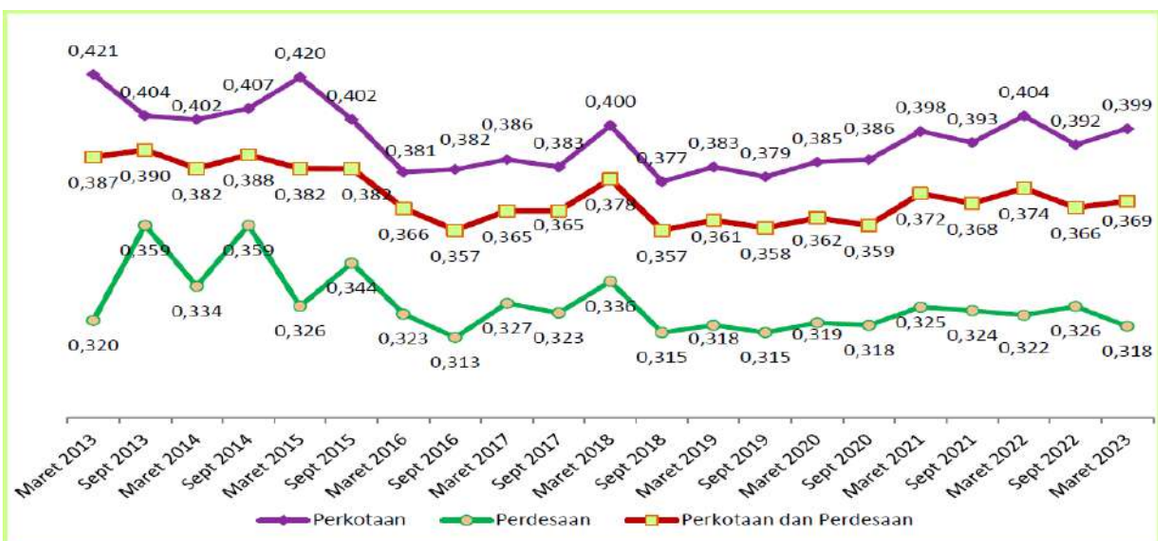


*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.17.**
**Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2023**

Indeks Williamson merupakan suatu instrument dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah lain yang lebih tinggi. Apabila nilai Indeks Williamson mendekati angka 0 maka pembangunan suatu wilayah diangkap sangat merata, sedangkan apabila nilai indeks semakin jauh dari 0, maka terdapat ketimpangan pembangunan di suatu wilayah. Pada tahun 2022 Indeks Williamson Jawa Tengah sebesar 0,6557 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 0,6562 namun angka tersebut masih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi di tahun 2019 yang sebesar 0,6186.

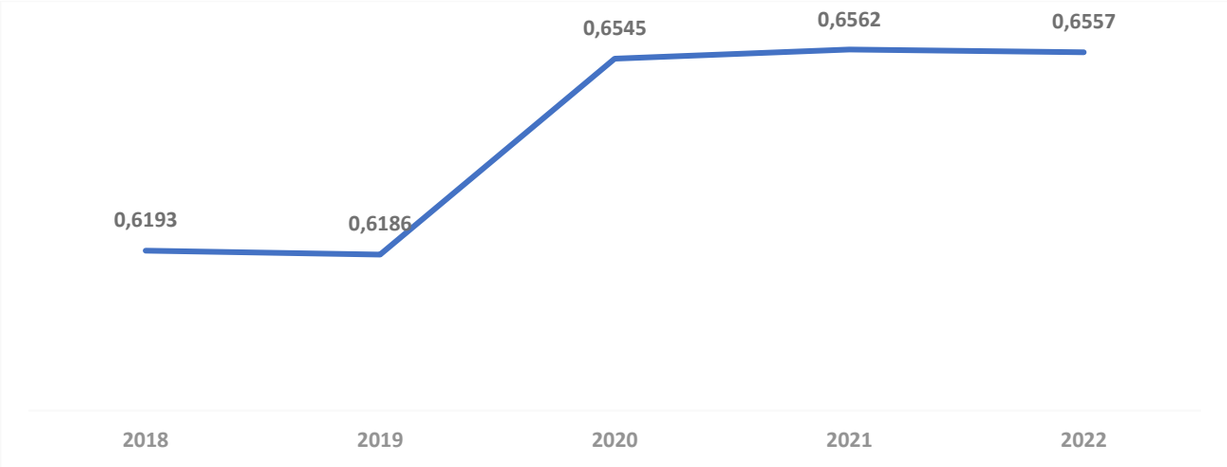


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

**Gambar 2.18.**
**Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

Jika melihat Indeks Williamson berdasarkan wilayah pengembangan, pada tahun 2022 wilayah pengembangan Wanarakuti lebih tinggi dibandingkan wilayah pengembangan yang lainnya yaitu sebesar 0,667. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah yang cukup besar. Wilayah pengembangan yang kategori ketimpangannya sedang adalah wilayah Purwomanggung. Sementara itu Banglor memiliki Indeks Williamson yang paling rendah yang menandakan bahwa wilayah tersebut pembangunannya merata, dimana karakteristik daerahnya hampir mirip yaitu pertanian dan pariwisata.

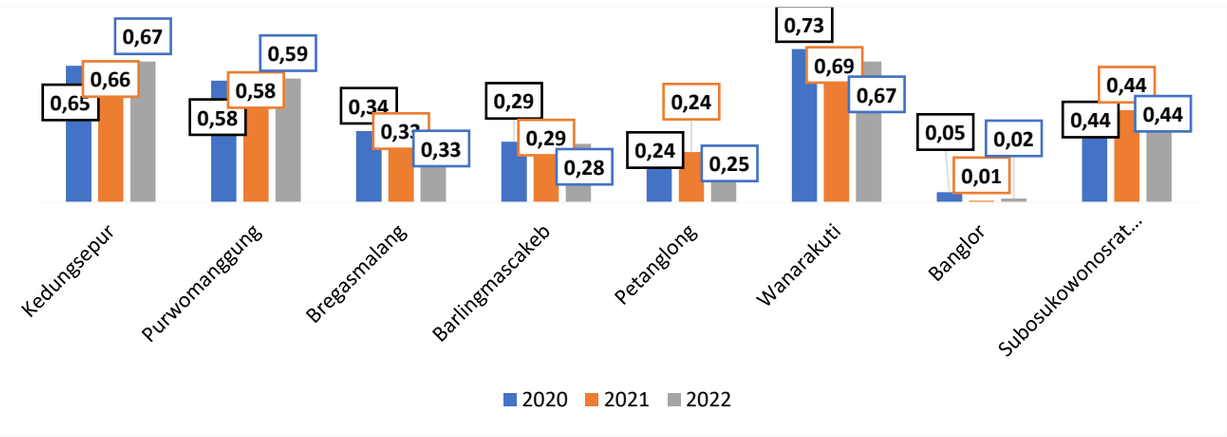


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

**Gambar 2.19.**
**Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022**

### 2.3.5 Indeks Daya Saing Daerah

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didasarkan pada empat komponen pembentuk, yaitu ekosistem inovasi, pasar sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung. Terdapat 12 pilar dan 64 indikator yang merepresentasikan ke empat komponen pembentuk tersebut. Berdasarkan nilai IDSD yang dikeluarkan oleh Kemenristek atau BRIN, capaian IDSD Jawa Tengah pada tahun 2023 mampu tumbuh sebesar 7,16 persen. Skor IDSD Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 3,89, meningkat 0,26 poin dari tahun 2022 sebesar 3,63.

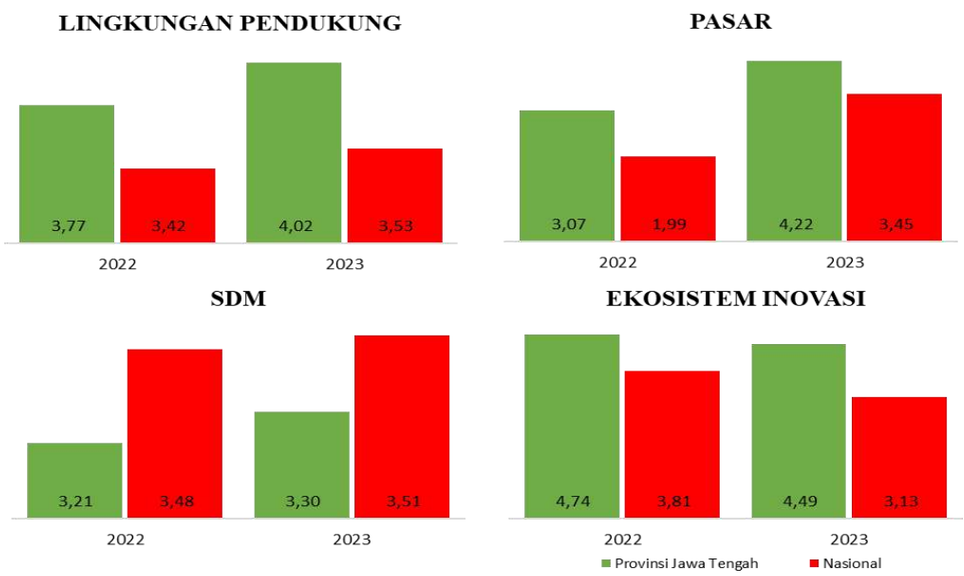


*Sumber : BRIN, 2024.*

**Gambar 2.20.**
**Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Komponen Pembentuk Tahun 2022 dan 2023**

Dari ke empat komponen pembentuk IDSD, komponen lingkungan pendukung dan sumber daya manusia mengalami peningkatan, sedangkan komponen ekosistem inovasi mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi karena terdapat penyempurnaan pada beberapa indikator pembentuk pada pilar 11 yaitu dinamisme bisnis. Sementara itu, pada komponen pasar juga tumbuh cukup tajam pada tahun 2023 yang disebabkan karena penyempurnaan pada beberapa indikator pembentuk pada pilar 9 dan pilar 10.

Berdasarkan skor komponen pembentuk IDSD, capaian Jawa Tengah tahun 2023 pada komponen lingkungan pendukung, komponen pasar dan komponen ekosistem inovasi memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai nasional. Dari ke empat komponen pembentuk IDSD, 2 komponen mampu tumbuh lebih tinggi dari angka nasional yaitu komponen lingkungan pendukung (6,43 persen) dan komponen SDM (2,72 persen), meski komponen SDM memiliki capaian yang lebih rendah dibandingkan angka Nasional. Sementara pada komponen pasar, pertumbuhan Jawa Tengah (37,68 persen) cenderung lebih rendah dibandingkan angka Nasional (73,55 persen).

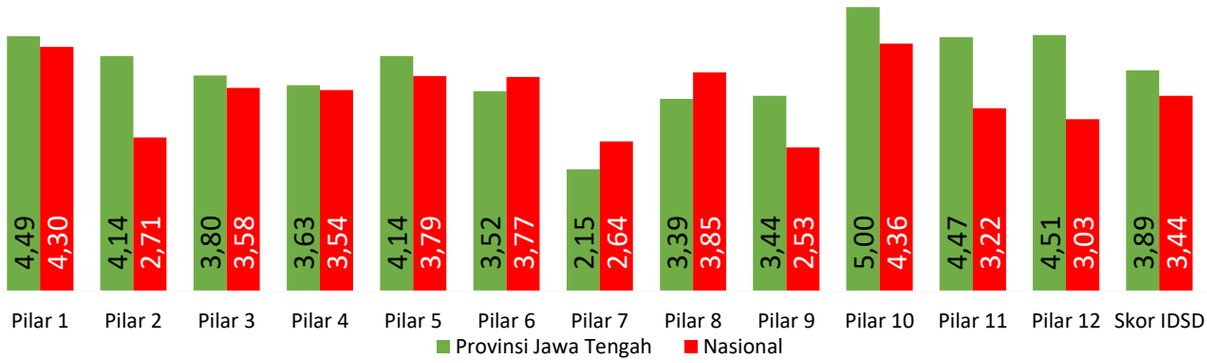


*Sumber: BRIN, 2024*

**Gambar 2.21.**
**Skor IDSD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Berdasarkan Pilar Tahun 2023**

Capaian skor IDSD pada 35 Kabupaten/Kota di tahun 2023 menunjukkan bahwa masih cukup banyak Kabupaten/Kota yang memiliki skor IDSD di bawah angka provinsi. Meski memiliki capaian IDSD yang lebih rendah dari provinsi, namun berdasarkan pertumbuhannya terdapat 21 Kabupaten/Kota yang mampu tumbuh lebih tinggi dari angka pertumbuhan IDSD provinsi dan 14 Kabupaten/Kota yang tumbuh lebih rendah dari angka pertumbuhan provinsi.

Sepuluh Kabupaten/Kota yang memiliki pertumbuhan skor IDSD tertinggi antara lain, Kabupaten Pekalongan (15,46 persen), Kota Pekalongan (14,65 persen), Kabupaten Grobogan (12,30 persen), Kabupaten Wonosobo (12,24 persen), Kabupaten Kebumen (11,80 persen), Kabupaten Batang (11,78 persen), Kabupaten Temanggung (11,64 persen), Kabupaten Purworejo (11,11 persen), Kabupaten Demak (10,92 persen) dan Kota Salatiga (10,88 persen). Sementara itu, Kota Surakarta dan Kota Semarang meski memiliki skor IDSD lebih tinggi dari skor provinsi namun ke dua kota tersebut termasuk dalam 10 Kabupaten/Kota dengan angka pertumbuhan IDSD terendah, yaitu 1,75 persen dan -5,05 persen.

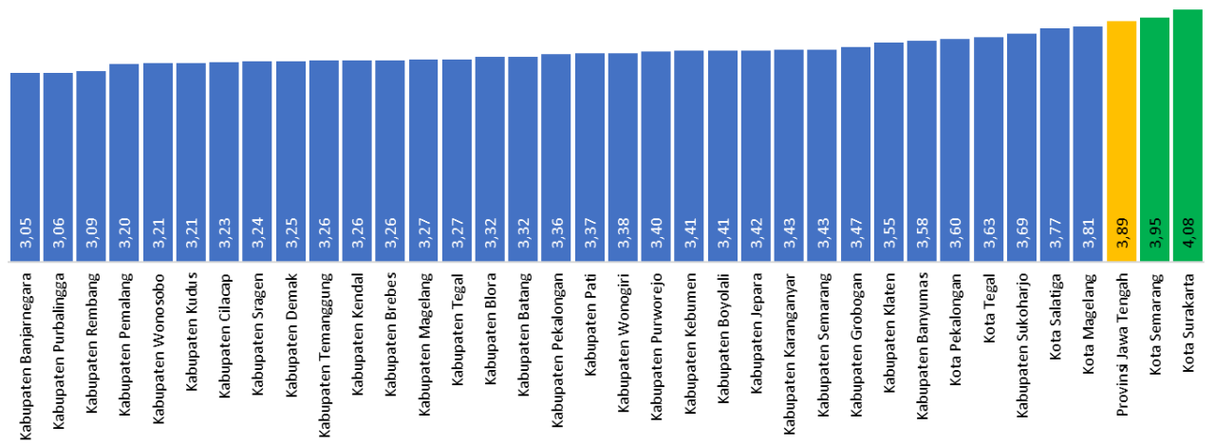


*Sumber : BRIN, 2024*

**Gambar 2.22.**
**Capaian Skor IDSD Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

### 2.3.6 Investasi

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I – IV Tahun 2023 realisasi investasi Jawa Tengah 2023 didominasi oleh Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai 32,98 triliun rupiah dari total realisasi investasi sebesar 77,02 triliun rupiah. Total realisasi investasi tersebut mengalami kenaikan 12,59 persen dibanding tahun 2022 yang sebesar 68,41 triliun rupiah. Sementara itu, realisasi investasi sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) (non LKPM) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi sektor ini sebesar 20,90 triliun rupiah, mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang nilainya 9,52 triliun rupiah. Perkembangan realisasi nilai investasi secara detil sebagaimana pada tabel 2.12.

Dari sisi jumlah proyek, jumlah proyek PMDN di tahun 2023 jauh lebih besar dibanding PMA yakni 36.048 proyek dibanding 7.032 proyek. Total investasi 43.080 proyek tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 280.643 orang dengan rincian PMDN sebanyak 158.391 tenaga kerja dan PMA menyerap 122.252 tenaga kerja.

**Tabel 2.12.**
**Jumlah Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2016 – 2023**

| Tahun | Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PMA | PMDN | | Jumlah | Pertumbuhan (%) |
| | | LKPM | Non-LKPM | | |
| 2016 | 14,113 | 24,070 | - | 38,183 | 46,63 |
| 2017 | 31,673 | 19,866 | - | 51,539 | 34,98 |
| 2018 | 31,794 | 27,474 | - | 59,269 | 15,00 |
| 2019 | 40,859 | 18,655 | - | 59,503 | 0,39 |
| 2020 | 19,63 | 30,61 | 5,83 | 56,70 | -5,80 |
| 2021 | 21,4 | 31,31 | 7,08 | 59,79 | 6,56 |
| 2022 | 33,9 | 24,99 | 9,52 | 68,41 | 4,4 |
| 2023 | 23,14 | 32,98 | 20,90 | 77,02 | 12,59 |

*Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Peningkatan realisasi investasi di Jawa Tengah didukung dengan keberadaan kawasan industri yang ada, terutama penambahan *tenant* di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Sebagaimana Tabel 2.13, dua kawasan industri terbesar di Jawa Tengah tersebut berkontribusi besar terhadap realisasi investasi di Jawa Tengah.

Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri yang ada di Jawa Tengah terus diupayakan melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur pendukung, air baku dan peningkatan pengelolaan Kawasan Industri yang lebih berkualitas. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melaksanakan promosi investasi yang fokus pada sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja dan negara tujuan prioritas dengan meningkatkan kerja sama antara stakeholder terkait dan terobosan inovasi digitalisasi promosi.

**Tabel 2.13.**

**Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2023**

| No. | Nama Kawasan Industri | Pengelola | Total Luas | Lahan Digunakan | Lahan Tersedia | Jumlah Tenant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kawasan Industri Kendal (Kawasan Ekonomi Khusus) | PT. Kawasan Industri Kendal | 1.000 Ha | ± 40% lahan (sudah dipergunakan dan terjual) | ± 60% lahan | 94 |
| 2. | Grand Batang City | PT. Kawasan Industri Terpadu Batang | 4.300 Ha (Fase I: 450 Ha; Cluster I: 3100 Ha) | 183 Ha | 61,7 Ha | 13 |
| 3. | Batang Industrial Park | PT. Perkebunan dan Industri Segajung | 287 Ha | 43 Ha | 150 Ha | 5 |
| 4. | Jatengland Industrial Park Sayung | PT. Jawa Tengah Lahan Andalan | 300 Ha | 50 Ha | 250 Ha | 6 |
| 5. | Aviarna Industrial Estate | PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara | 462 Ha (Tahap I 64 Ha) | 6 Ha | 456 Ha | 2 |
| 6. | Kawasan Industri Wijayakusuma | PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) | 250 Ha | 109,4 Ha | 56,8 Ha | 121 |
| 7. | BSB Industrial Park | PT. Karyadeka Alam Lestari | 112 Ha | 72,56 Ha | 39,44 Ha (area yang tersedia); 2,6 Ha (area yang ditawarkan) tidak dalam 1 hamparan | 52 |
| 8. | Kawasan Industri Cilacap | PT. Cilacap Segara Artha | 82 Ha | - | - | - |

*Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Mengacu pada *System of National Accounts* (SNA), besarnya penanaman modal yang direalisasikan di suatu wilayah pada suatu tahun tertentu sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah perubahan inventori/stok. Oleh karena itu untuk melihat kontribusi investasi pada ekonomi Jawa Tengah secara lebih akurat dapat digambarkan melalui indikator PMTB. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang kapital seperti bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya.

Sejak tahun 2013, PMTB Jawa Tengah menunjukkan tren realisasi yang terus meningkat. Penurunan hanya terjadi di tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 kemudian di tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat bahkan lebih tinggi dari nilai pra-pandemi. Tren pertumbuhan investasi di Jawa Tengah ini didorong antara lain oleh realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Jawa Tengah serta peningkatan impor barang modal untuk pembelian mesin oleh industri. Selain itu peningkatan investasi juga didorong oleh berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk menarik investasi antara lain melalui kegiatan *Central*

*Java Investment Business Forum (CJIBF*), business meeting, pengawalan investasi, pelayanan perijinan, serta fasilitasi kemitraan usaha menengah besar dan usaha menengah kecil.

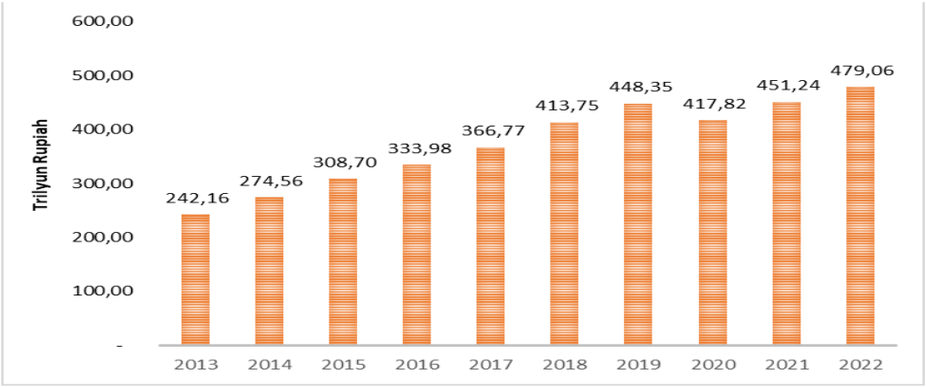


*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.23.**
**Nilai PMTB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2022**

Pada periode tahun 2013 – 2022, PMTB berkontribusi cukup stabil terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah berkisar 28% hingga 30% (Gambar 2.23). Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penanaman modal Jawa Tengah Tahun 2011-2022 saling memiliki keterkaitan. Gambar 2.24 menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PMTB di Jawa Tengah tahun 2013-2022 yang bergerak searah. Pertumbuhan penanaman modal yang terkoreksi di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19, bergerak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh negatif hingga -2,65%. Meskipun ada faktor lain, namun PMTB juga menjadi indikator yang mencerminkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi di daerah.

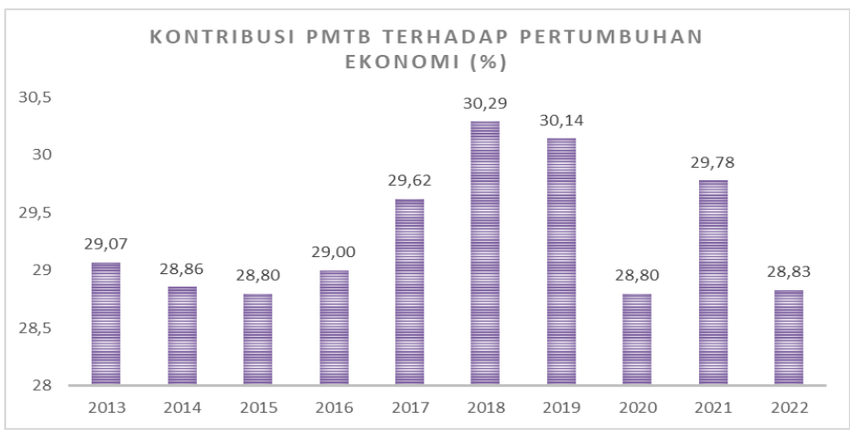


*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

**Gambar 2.24.**
**Kontribusi PMTB terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2022**

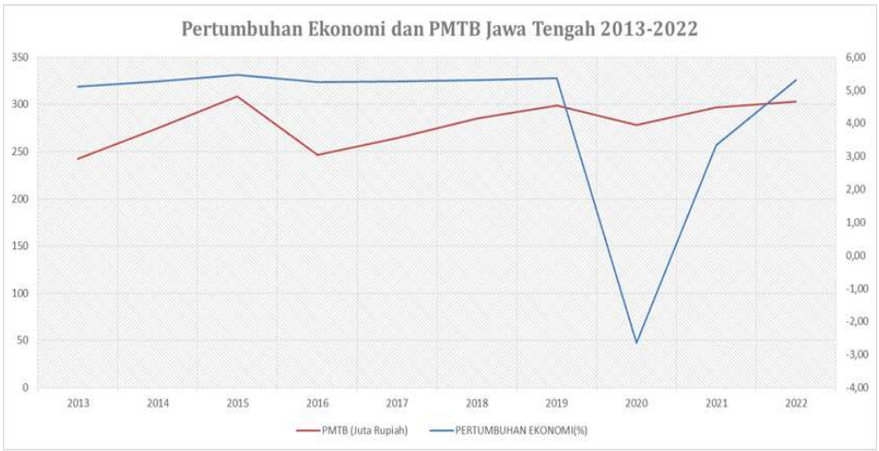


*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

**Gambar 2.25.**
**Pertumbuhan Ekonomi dan PMTB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2022**

Efisiensi investasi di suatu daerah menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha yang dicerminkan dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Nilai ICOR menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah, apakah bersifat *capital intensive* atau *labour intensive*.

ICOR dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Semakin tinggi nilai ICOR, pertumbuhan ekonomi semakin rendah dan sebaliknya. Gambar 2.26 menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2013 – 2022, nilai ICOR Jawa Tengah berkisar di *range* 5 hingga 6 yang berlawanan arah dengan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan ICOR yang cukup signifikan hingga mencapai 9,37 di tahun 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19. Nilai ini kembali mengalami perbaikan pada Tahun 2022 sebesar 5,72.

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.26.**
**Nilai ICOR dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2022**

Upaya mendorong peningkatan investasi Jawa Tengah juga dilakukan melalui berbagai regulasi. Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2025. Berdasarkan RUPM ini, kegiatan penanaman modal tahun 2025 diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya, dan industri transportasi. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang berkompeten, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Selain itu, untuk menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif, Provinsi Jawa Tengah juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Pada aspek teknis, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai macam inovasi melalui terobosan Layanan Konsultasi dan Pendampingan Terpadu Secara Elektronik (Lakon-e Pandu), Pekan Layanan Sistem Investasi Jos dan Handal (Pena Si Johan), layanan perizinan secara online menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng) yang telah dilengkapi dengan fitur *digital signature*, maupun digitalisasi promosi melalui aplikasi *Central Java Investment Platform (CJIP)*. Selain itu, dalam rangka mempermudah dan memperluas layanan perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memfasilitasi pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Hingga awal tahun 2024, telah beroperasi 33 MPP di 33 Kabupaten/Kota.

### 2.3.7 Pertanian (dalam arti luas) dan Ketahanan Pangan

#### a. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani dan untuk membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP juga menunjukan daya tukar dari harga pokok produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin tinggi tingkat kemampuan/daya beli petani.

Pada kurun waktu tahun 2019-2023 perhitungan dan rilis NTP dibandingkan dengan Tahun dasar 2019, NTP per Bulan Desember terendah pada Tahun 2020 yaitu sebesar 101,49, namun kembali meningkat dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 117,76. NTP pada tahun 2023 merupakan NTP tertinggi selama 5 tahun terakhir.

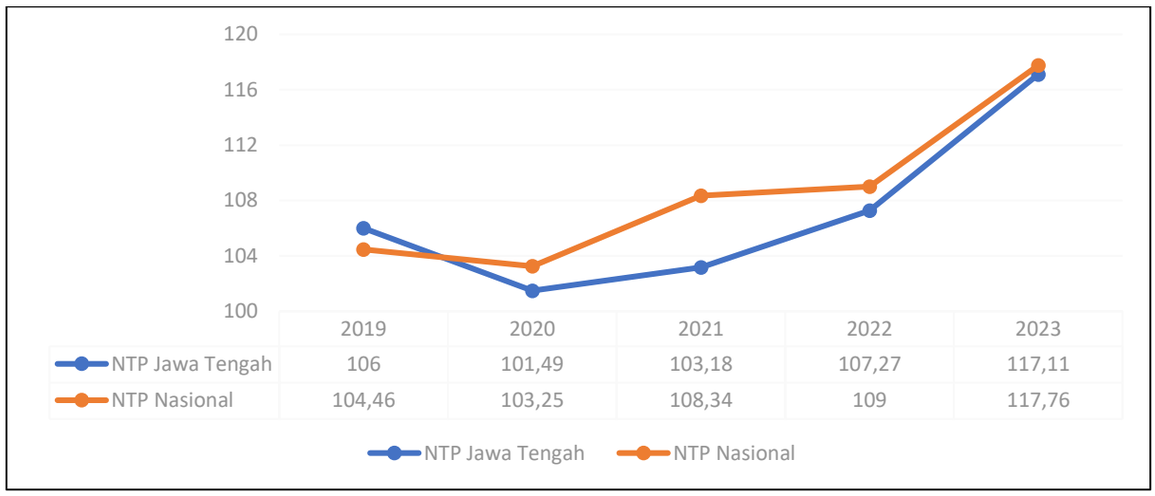


*Sumber: BPS, 2023.*
*Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun*

**Gambar 2.27.**
**Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional**
**Tahun 2019 – 2023**

Dilihat berdasarkan sub sektor, pada kurun waktu tahun 2019-2023, masing-masing sub sektor cenderung fluktuatif. Pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan perikanan cenderung mengalami tren yang meningkat, walaupun pada tahun 2020 beberapa sub sektor sempat mengalami penurunan. Tren yang meningkat menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jawa Tengah memiliki tingkat kemampuan dan daya beli yang relatif stabil. Namun sebaliknya, sub sektor perikanan memiliki tren yang menurun walaupun pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan jumlah yang tidak signifikan. Selain itu, sub sektor peternakan masih berada pada angka di bawah 100 yang menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima peternak lebih kecil dari pada indeks harga yang dibayar.

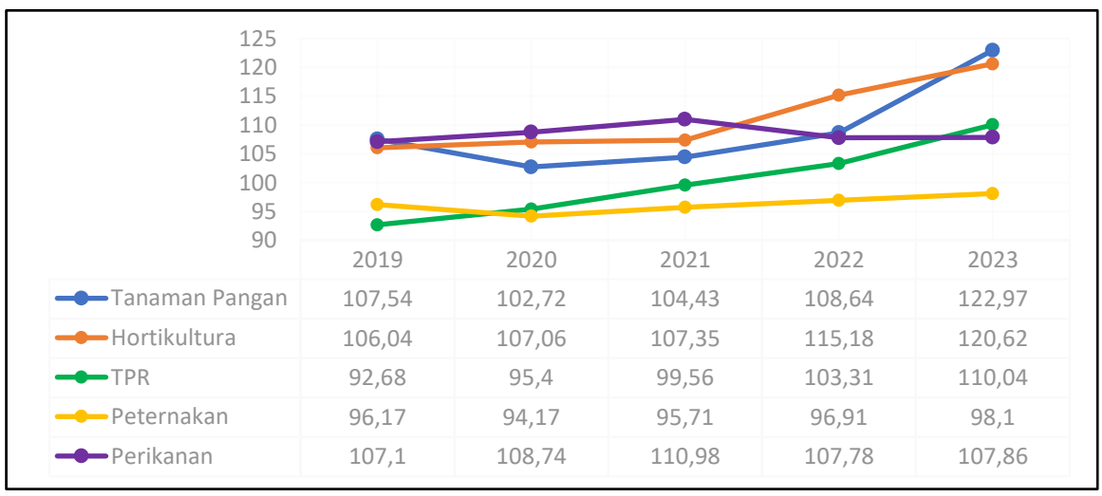


*Sumber: BPS, 2023*
*Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun*

**Gambar 2.28.**
**Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023**

**b. Produksi Pertanian**

Pembangunan sektor pertanian diarahkan sebagai basis penumpu pangan di Jawa Tengah. Hal tersebut didukung dengan Jawa Tengah sebagai penghasil

padi terbesar ketiga di Pulau Jawa.Potensi pertanian Jawa Tengah didukung melalui sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Pada kurun waktu 2018-2022, jumlah produksi pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan relatif fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen petani di Jawa Tengah, selain hal tersebut, kualitas SDM petani juga masih membutuhkan intervensi untuk dapat memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah produksi di sektor pertanian.

Pada kurun waktu 2018-2022, jumlah produksi pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sangat fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen petani di Jawa Tengah. Selain hal tersebut, kualitas SDM petani juga masih membutuhkan intervensi untuk dapat memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah produksi di sektor pertanian.

Pada periode tahun 2018-2020 komoditas padi mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan perubahan standar pengukuran produksi pada komoditas padi menggunakan kerangka sampling area (KSA). Produksi pada komoditas jagung juga masih fluktuatif. Sedangkan pada komoditas kedelai, produksinya menurun dikarenakan menurunnya luas tanam kedelai yang semakin menurun dan minat petani untuk menanam kedelai berkurang dibandingkan komoditas lain.

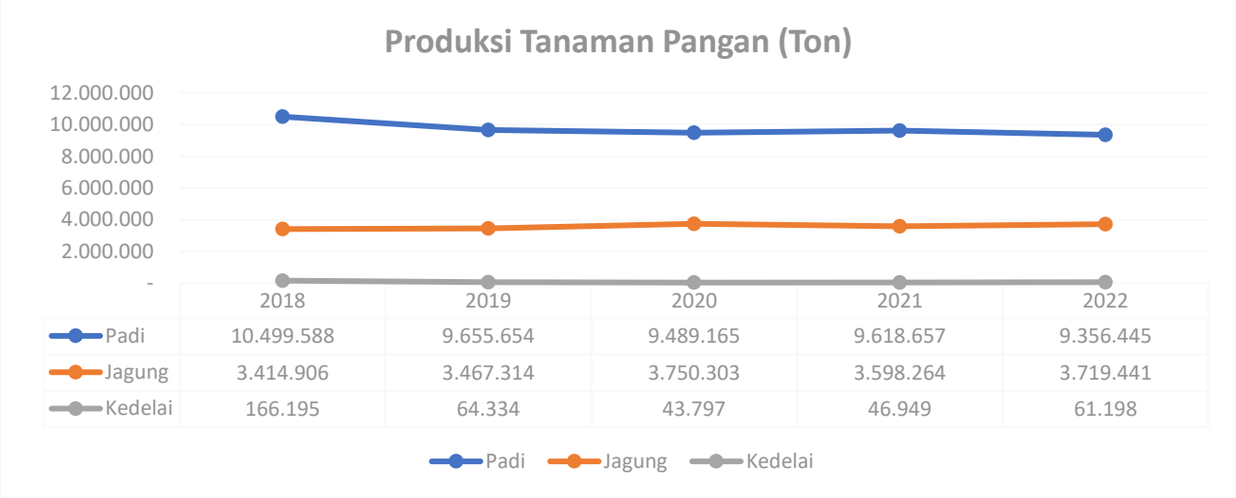


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Padi | 10.499.588 | 9.655.654 | 9.489.165 | 9.618.657 | 9.356.445 |
| Jagung | 3.414.906 | 3.467.314 | 3.750.303 | 3.598.264 | 3.719.441 |
| Kedelai | 166.195 | 64.334 | 43.797 | 46.949 | 61.198 |

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022.*

**Gambar 2.29.**
**Perkembangan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai di Jawa Tengah**
**Tahun 2018-2022**

Untuk sektor holtikultura, Komoditas utama di Jawa Tengah terdiri dari bawang merah dan cabai besar. Produksi bawang merah dan cabai besar pada kurun waktu Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, dengan produksi tertinggi bawang merah pada Tahun 2020 sebesar 611,165 Ton, sedangkan produksi tertinggi cabai besar pada Tahun 2022 sebesar 186,722 Ton. Pada komoditas bawang merah dan cabai besar masih diperlukan intervensi pada penyimpanan hasil panen dan fasilitasi distribusi untuk menjaga stabilitas stok dan harga mengingat komoditas ini menjadi pemicu inflasi di Jawa Tengah.

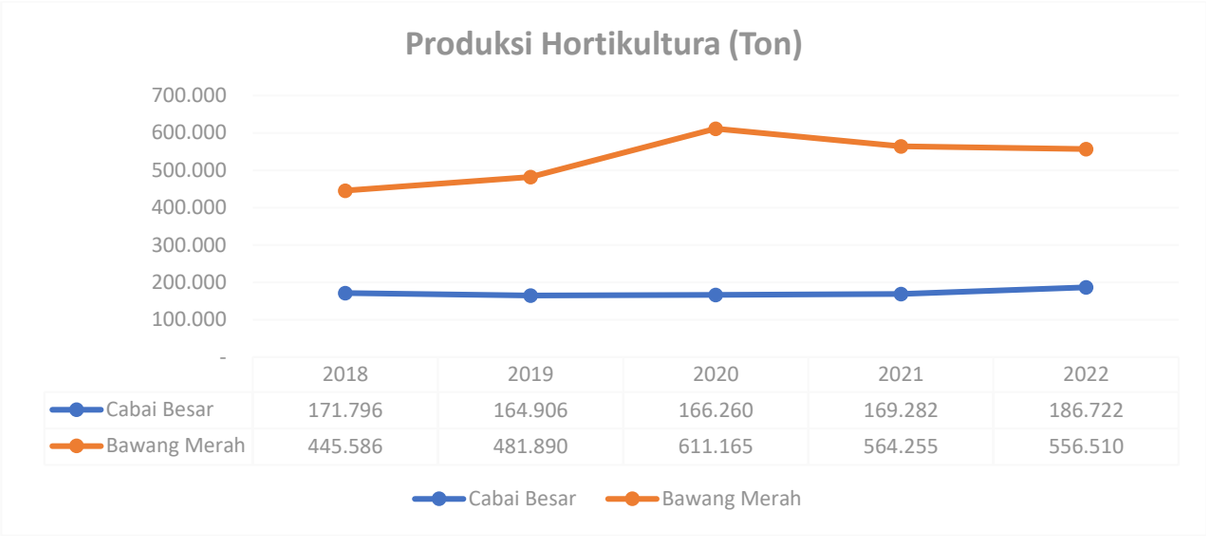


*Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022.*

**Gambar 2.30.**
**Perkembangan Produksi Bawang Merah dan Cabai Besar**
**Tahun 2018-2022**

Sementara itu, komoditas utama tanaman perkebunan di Jawa Tengah terdiri dari tebu, kopi, dan kelapa. Produksi komoditas tebu mengalami fluktuasi dengan produksi tertinggi pada 2019 sebesar 2.894.884 Ton, diperlukan upaya peningkatan produktivitas pada komoditas tebu antara lain melalui bongkar roton dan penggunaan bibit unggul. Demikian juga dengan produksi kopi dan kelapa juga mengalami fluktuasi dengan produksi kopi tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 26.549 Ton dan produksi kelapa tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 174.041 Ton.

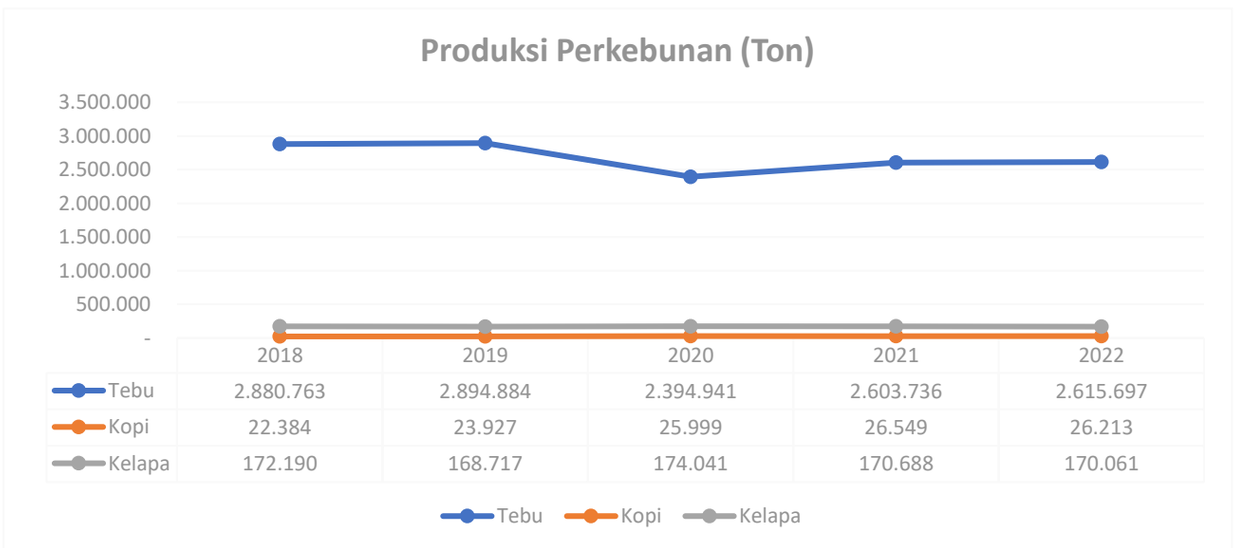


*Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022*

**Gambar 2.31.**
**Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2018-2022**

**c. Produksi Peternakan**

Produksi hasil peternakan di Jawa Tengah terutama ternak sapi potong dan kambing di Jawa Tengah mengalami tren yang fluktuatif pada kurun waktu Tahun 2018-2022. Pada komoditas sapi potong, jumlah populasi terus mengalami peningkatan hingga 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan populasi tertinggi pada Tahun 2021 sebanyak 1.873.206 ekor. Pada komoditas kambing, perkembangan populasi memiliki tren fluktuatif dengan populasi

tertinggi pada Tahun 2019 sebanyak 3.937.013 ekor. Penurunan jumlah populasi hewan ternak pada tahun 2022 disebabkan oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak ruminansia. Selain itu, usaha di sektor peternakan belum sepenuhnya pulih setelah mewabahnya PMK yang berimbas pada penurunan jumlah populasi ternak.

*Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2022*

**Gambar 2.32.**
**Perkembangan Populasi Sapi Potong dan Kambing Tahun (2019-2023)**

Produksi hasil peternakan pada daging, susu, dan telur di Jawa Tengah relatif juga mengalami peningkatan. Produksi daging tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 471.192.139 Kg, produksi susu tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 105.613.011 Kg dan produksi telur mencapai titik tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 348.471.795 Kg.

Tantangan dalam peningkatan produksi susu adalah adanya penurunan populasi sapi perah dan penurunan kualiatas genetik sapi perah di Jawa Tengah. Banyak peternak sapi perah beralih ke usaha lain dianggap lebih menguntungkan. Faktor ketersediaan hijauan pakan dan masih ditemukan peredaran pakan konsentrat belum sesuai SNI yang mengakibatkan produksi tidak optimal. Selanjutnya tantangan peningkatan produksi telur yaitu antara lain harga pakan yang tinggi, ketersediaan pakan asal jagung yang belum berlanjut sementara ketergantungan terhadap jagung sangat tinggi produktivitas. Produksi daging, telur dan susu dapat dilihat pada gambar berikut.

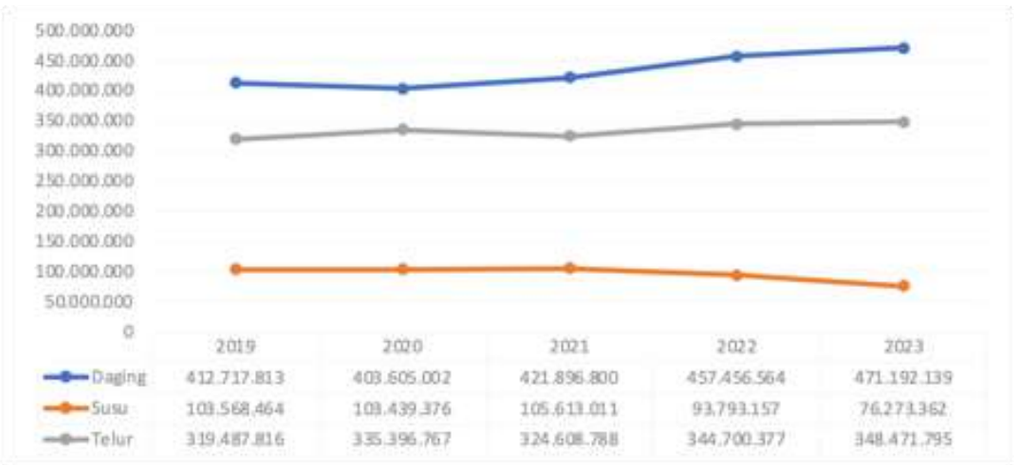


*Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2023*

**Gambar 2.33.**
**Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur**
**Tahun (2019-2023)**

**d. Ketahanan Pangan**

Kondisi ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), melalui tiga pilar yaitu: (1) Ketersediaan; (2) Keterjangkauan; dan (3) Pemanfaatan. Kurun waktu 2019-2023 IKP Provinsi Jawa Tengah menunjukkan trend meningkat, terbaik kedua secara Nasional dengan angka Tahun 2023 sebesar 84,80 (Gambar 2.34)

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024.*

**Gambar 2.34.**
**Indeks Ketahanan Pangan Jawa Tengah**
**Tahun (2019-2023)**

Aspek ketersediaan pangan digambarkan melalui angka ketersediaan energi, protein dan lemak, yaitu ketersediaan zat gizi per kapita yang terkandung dalam makanan yang siap dikonsumsi setiap penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah mencapai angka ketersediaan energi sebesar 4,021 kkal/hari dengan ketersediaan protein 90,23 gram/hari dan lemak sebesar 73,71 gram/hari.

**Tabel 2.14.**
**Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak**
**Provinsi Jawa Tengah**

| Tahun Penyusunan | ATAP | Energi (kkal/hari) | | | Protein (gram/hari) | | | Lemak (gram/hari) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Nab | Hew | Total | Nab | Hew | Total | Nab | Hew |
| 2017 | 2016 | 4,055 | 3,925 | 130 | 109.03 | 97.84 | 11.19 | 62 | 55.24 | 6.76 |
| 2018 | 2017 | 4,027 | 3,886 | 141 | 114.46 | 98.77 | 15.69 | 60.88 | 52.92 | 7.96 |
| 2019 | 2018 | 3,730 | 3,605 | 125 | 87.83 | 75.45 | 12.38 | 76.24 | 68.38 | 7.86 |
| 2020 | 2019 | 3,732 | 3,604 | 128 | 87.97 | 74.69 | 13.27 | 40.41 | 32.75 | 7.65 |
| 2021 | 2020 | 3,736 | 3,607 | 129 | 98.17 | 84.51 | 13.66 | 56.38 | 48.74 | 7.63 |
| 2022 | 2021 | 3,797 | 3,680 | 118 | 95.98 | 83.82 | 11.75 | 57.99 | 50.82 | 7.17 |
| 2023 | 2022 | 4,021 | 3,904 | 117 | 90,23 | 78,35 | 11,88 | 73,71 | 66,52 | 7,19 |

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Kondisi ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan melalui peta *Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)*. Peta FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan dan disusun berdasarkan aspek ketersediaan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan. Kondisi ketahanan dan kerentanan pangan peta FSVA diukur pada prioritas 1 sampai 6. Pada tahun 2023, dari total 576

kecamatan terdapat 20 kecamatan dengan kategori agak rentan (prioritas 3), 15 kecamatan dengan kategori rentan (prioritas 2) dan 2 kecamatan dengan kategori sangat rentan (prioritas 1). Kecamatan dengan prioritas 1, 2 dan 3 merupakan prioritas lokasi penanganan kerentanan dan ketahanan pangan di Jawa Tengah (Gambar 2.35)

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.35.**
**Peta *Food Security And Vulnerability Atlas* (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

Pemanfaatan pangan individu dapat dilihat dari keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 Provinsi Jawa Tengah masih harus mengupayakan peningkatan konsumsi pangan umbi-umbian dan pangan hewani yang masih dibawah standar, meskipun pada Tahun 2023 Skor PPH mencapai 94,2. Disisi lain masih banyak terjadi pemborosan pangan yang perlu segera ditangani.

**Tabel 2.15.**
**Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023**

| No | Kelompok Pangan | Standar | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Padi-padian | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2 | Umbi-umbian | 2,5 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
| 3 | Pangan Hewani | 24,0 | 20,0 | 20,4 | 21,0 | 22,9 | 22,5 |
| 4 | Minyak & lemak | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Buah/biji berminyak | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6 | Kacang-kacangan | 10,0 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 8,0 | 8,2 |
| 7 | Gula | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| 8 | Sayur & buah | 30,0 | 29,5 | 27,1 | 26,0 | 30,0 | 30,0 |
| 9 | Lain-lain | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Skor PPH Jateng** | | **100,0** | **89,6** | **87,1** | **86,7** | **94,4** | **94,2** |
| **Skor PPH Nasional** | | **100,0** | **90,8** | **87.9** | **87.2** | **92,9** | **94,1** |

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2023.*

**e. Produksi Perikanan dan Kelautan**

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah, selain itu juga diarahkan untuk menginisiasi Pembangunan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau. Pembangunan Ekonomi Biru ditopang oleh tiga pilar antara lain pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada pilar ekonomi didukung oleh perikanan tangkap, perikanan budidaya, manufaktur berbasis kelautan, dan pariwisata berbasis kelautan; pilar lingkungan didukung oleh kualitas sumber daya, konservasi laut, dan energi terbarukan; serta pilar sosial didukung oleh ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan yang berkurang. Sedangkan pada Pembangunan Ekonomi Hijau, aspek perikanan budidaya menjadi salah satu faktor pembangunnya.

Di sisi lain, terkait aspek ketahanan pangan, sektor kelautan dan perikanan ditopang oleh perikanan tangkap dan budidaya; pengelolaan kawasan pesisir termasuk di dalamnya pergaraman; pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pada perikanan tangkap produksi perikanan tangkap menunjukkan penurunan dari tahun 2019-2023, hal ini disebabkan karena: (1) terjadi penurunan potensi sumber daya ikan di laut Jawa (WPP-712) sebesar 387.854 ton atau berkurang 36,14% sesuai dengan hasil kajian pada Komnas Kajiskan 2021 yang dicantumkan didalam Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022; (2) Adanya transisi perijinan dari OSS 1.1 ke OSS RBA yang menyebabkan beberapa persyaratan ijin kapal belum terakomodasi sehingga kapal tidak bisa melaut; (3) Diberlakukannya kebijakan penangkapan terukur dimana ikan hasil tangkapan didata sesuai zona penangkapan, sementara sebagian besar kapal-kapal Jawa Tengah beroperasi di luar Laut Jawa WPP 712; (4) Kenaikan Harga BBM industri dan Perbekalan Kapal; dan (5) Diberlakukannya kebijakan migrasi kapal perikanan izin daerah yang beroperasi diatas 12 mil menjadi izin pusat mengakibatkan kapal perikanan yang masih dalam proses perpanjangan izin tidak dapat melaut. Perkembangan produksi perikanan tangkap ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

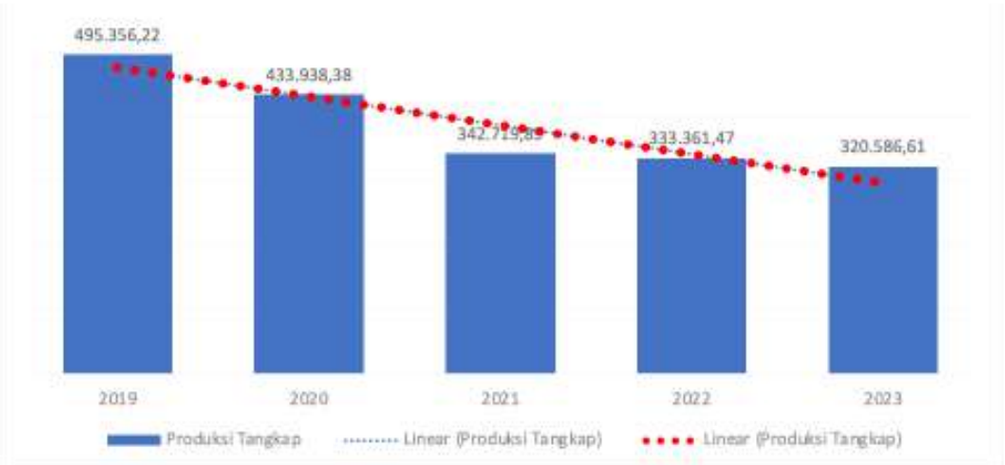


*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**Gambar 2.36.**
**Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019-2023**

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan tangkap, Provinsi Jawa Tengah memiliki 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Secara umum Pelabuhan Perikanan di Jawa Tengah telah memiliki kriteria yang sudah

sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kapasitas dermaga maupun kolam pelabuhan dan breakwater (penahan gelombang) mengingat semakin meningkatnya jumlah kapal.

**Tabel 2.16.**

**Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah**

| **KRITERIA TEKNIS :** | | **PPP Tegalsari** | **PPP Karimunjawa** | **PPP Tasikagung** | **PPP Bajomulyo** | **PPP Morodemak** | **PPP Tawang** | **PPP Klidanglor** | **PPP Wonokerto** | **PPP Asemdoyong** | **PPP Larangan** | **PPP Lohgending** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Fasilitas* | *Standar* | | | | | | | | | | | |
| Tambat labuh Kapal | ≤ 10 GT | ≥ 10 GT | ≤ 10 GT | ≥ 10 GT | ≥ 10 GT | ≤ 10 GT | ≤ 10 GT | ≥ 10 GT | ≤ 10 GT | ≤ 10 GT | ≤ 10 GT | ≤ 10 GT |
| Panjang Dermaga | ≥ 100 m | 694 m | 160 m | 2400 m | 693 m | 400 m | 450 m | 300 m | 450 m | 215 m | 130 m | 414 m |
| Kedalaman Kolam | Min >2 m | sesuai | Sesuai | Sesuai | sesuai | sesuai | Sesuai | Sesuai | sesuai | sesuai | sesuai | Sesuai |
| Daya tampung | 30 Unit Kapal/Total 300 GT | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal | ≥ 30 Unit Kapal |
| Lahan | 5 Ha | 16.3 Ha | 16,4 Ha | 9,659 Ha | 6,36 Ha | 3,9 Ha | 0,7 Ha | 50 Ha | 0,8 Ha | 2,2 Ha | 5,1 Ha | 18,7 Ha |
| PENUNJANG : | | | | | | | | | | | | |
| Hasil Perikanan | rata-rata 5 Ton/Hari | 169 Ton | 5,2 Ton | 19,2 Ton | 87 Ton | 13 Ton | 1,5 Ton | 51 Ton | 0,5 Ton | 29 Ton | 2,8 Ton | 0,9 Ton |
| Terdapat Industri Pengolahan Ikan | Perusahaan / UPI mikro | 27 | 5 | 220 | 10 | 127 | Ada | 62 | Ada | 95 | Ada | Ada |
| Industri Penunjang Lainnya | perusahaan | 478 | 1 | 2 | 19 | 4 | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| KETERANGAN : | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Kapal | | 335 | 358 | 359 | 318 | 46 | 759 | 153 | 421 | 253 | 138 | 83 |
| < 10 GT | | 1 | 351 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 332 | 227 | 109 | 83 |
| 10-30 GT | | 54 | 7 | 155 | 34 | 46 | 59 | 114 | 89 | 26 | 29 | 0 |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Sehubungan dengan risiko kecelakaan yang dihadapi nelayan saat melaut cukup tinggi, maka perlu diberikan perlindungan kepada nelayan dalam bentuk asuransi nelayan. Asuransi nelayan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi individu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, nelayan buruh, wanita nelayan dan ABK kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT).

Sektor produksi perikanan budidaya relatif mengalami peningkatan karena didukung dengan peningkatan luas lahan budidaya dan adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan. Perkembangan produksi perikanan budidaya ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

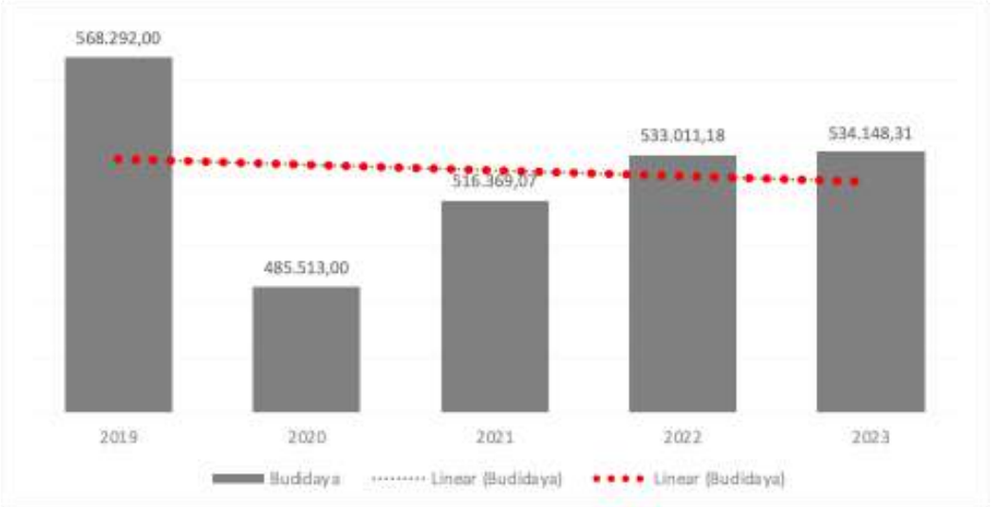


*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 2.37.**
**Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019-2023**

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan budidaya, Provinsi Jawa Tengah memiliki sepuluh loka perikanan budidaya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Budidaya Air Tawar dan Payau Nomor B.22151/DJPB/X/2021, bahwa pemerintah provinsi berperan sebagai penyedia induk unggul dan benih bermutu di lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Dalam lima tahun terakhir, produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan. Namun terdapat beberapa tantangan dalam mengelola perikanan budidaya antara lain kondisi prasarana dan sarana yang belum memadai, serta penurunan kualitas dan kuantitas induk nila, lele, dan gurame. Penurunan kualitas induk tersebut menyebabkan calon induk yang dihasilkan menurun performa dan jumlahnya. Penurunan performa terjadi pada induk kelas GGPS (*Great Grand Parent Stock*), kelas GPS (*Grand Parent Stock*) maupun benih kelas sebar.

Selain itu, pada aspek kelestarian sumber daya ikan perlu dilakukan upaya pelestarian ikan jenis endemik lokal Jawa Tengah, misalnya jenis ikan beong, wader, nilem, tawes, derbang, gabus, dan dewa. Upaya pelestarian ini memberi manfaat untuk aspek konservasi maupun aspek ekonomi. Dalam aspek konservasi berfungsi untuk mempertahankan dari kepunahan plasma nutfah serta mempertahankan keanekaragaman jenis ikan lokal di perairan umum. Sedangkan secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan nelayan perairan umum daratan karena ikan endemik memiliki rasa yang khas, unik serta bermanfaat bagi kesehatan sehingga harganya mahal. Namun masih terdapat permasalahan yang

perlu mendapatkan perhatian yaitu belum adanya prasarana dan sarana secara khusus untuk mengembangkan ikan endemik.

Sedangkan pada pergaraman, secara umum produksi garam mengalami penurunan disebabkan karena musim kemarau basah cukup lama, namun mengalami peningkatan di tahun 2023 disebabkan oleh kondisi cuaca yang dipengaruhi oleh *El Nino* sehigga musim panas lebih dominan. Perkembangan produksi garam ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

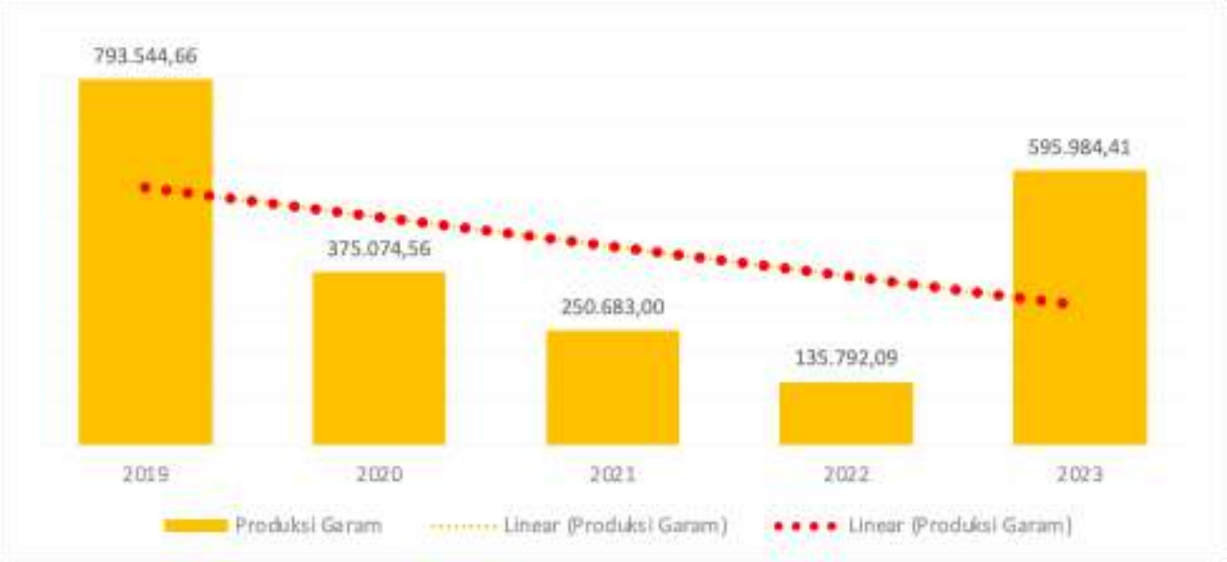


*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**Gambar 2.38.**
**Produksi Garam (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

Di sisi lain, tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah pada periode 2018 – 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih berada di bawah angka nasional. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

*Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

**Gambar 2.39.**
**Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018-2022**

Angka konsumsi ikan Jawa Tengah masih dibawah nasional disebabkan beberapa hal yaitu antara lain masih terdapat pemahaman yang salah di masyarakat bahwa ikan dapat memberikan dampak buruk berupa gatal, bau amis,

dan alergi; harga produk ikan relatif lebih tinggi dibandingkan sumber protein lainnya; serta ragam pengolahan ikan yang belum bervariasi. Sedangkan pada aspek pengolahan masih didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil dengan segala keterbatasan terutama pada aspek pemenuhan standar kelayakan produksi.

### 2.3.8 Koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Jumlah koperasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019-2023 cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 jumlah koperasi sebanyak 22.274 unit maka pada tahun 2020 turun menjadi 19.477 unit, hal tersebut disebabkan adanya pengesahan status pembubaran dan pencabutan status badan hukum koperasi dari lembaran berita negara sebagai dampak dari kebijakan percepatan pembubaran koperasi oleh Kementerian Koperasi UKM RI dalam rangka mewujudkan Koperasi modern. Adapun setelah tahun 2020 jumlah koperasi mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2023 menjadi 21.276 unit hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan kemudahan dalam membentuk koperasi melalui disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meskipun jumlah koperasi mengalami kenaikan tetapi tingkat keaktifan cenderung menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2019 persentase koperasi aktif sebesar 84,22% dan pada tahun 2023 persentase koperasi aktif sebesar 48,22%. Hal tersebut sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian Jawa Tengah dan kinerja koperasi. Secara lengkap data koperasi se-Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.17.**
**Persentase Koperasi Aktif Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023**

| No. | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Koperasi | 22.274 | 19.447 | 20.777 | 21.018 | 21.276 |
| 2. | Jumlah Koperasi aktif | 18.759 | 13.090 | 10.770 | 10.327 | 10.621 |
| 3. | Prosentase Kopereasi Aktif (%) | 84,22 | 67,35 | 48,16 | 49,13 | 48,22 |

*Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2023*

Hasil pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi dapat dilihat dari capaian indikator persentase koperasi sehat. Persentase koperasi sehat di Jawa Tengah mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 sebesar 25,33 persen sedangkan pada tahun 2023 sebesar 27,18 persen, hal ini didukung adanya kolaborasi antar bidang dalam pembinaan koperasi melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan sehingga koperasi mampu meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi dalam kelembagaan dan usahanya. Untuk Perkembangan tingkat Kesehatan koperasi di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.18.**

**Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023**

| No. | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Se-Jawa Tengah (KSP/USP) | 13.101 | 12.774 | 12.903 | 13.166 | 13.218 |
| 2. | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Provinsi (KSP/USP) yang dinilai kesehatannya | 454 | 128 | 222 | 375 | 390 |
| 3. | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (unit) | 115 | 30 | 29 | 89 | 106 |
| 4. | Prosentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (%) | 25,33 | 23,44 | 13,06 | 23,73 | 27,18 |

*Sumber: Dinkop UKM Prov. Jateng, 2023.*

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara sinergi bersama dengan segenap pihak senantiasa melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan. Jumlah UMKM yang telah dibina menunjukkan peningkatan dari sebanyak 161.458 unit pada tahun 2019 menjadi 187.746 unit pada tahun 2023. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM juga meningkat dari sebesar 1.312.400 orang pada tahun 2019 menjadi sebanyak 1.352.136 orang pada tahun 2023. Aset UMKM juga meningkat dari sebesar 38,158 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 39,221 miliar rupiah pada tahun 2023. Demikian juga omset mengalami peningkatan dari sebesar 67,550 miliar pada tahun 2019 menjadi 69,381 miliar pada tahun 2023. Secara rinci data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.19.**

**Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No. | Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah UMKM Binaan | UMKM | 161,458 | 167,391 | 173,431 | 180,579 | 187.746 |
| | – Produksi/Non Pertanian | UMKM | 55,275 | 57,527 | 60,449 | 65,063 | 70.519 |
| | – Pertanian | UMKM | 26,833 | 27,653 | 28,284 | 28,400 | 28.483 |
| | – Perdagangan | UMKM | 59,836 | 62,083 | 63,965 | 65,979 | 67.098 |
| | – Jasa | UMKM | 19,514 | 20,128 | 20,733 | 21,137 | 21.646 |
| 2 | Penyerapan Tenaga Kerja | Orang | 1,312,400 | 1,298,007 | 1,311,015 | 1,330,343 | 1.352.136 |
| 3 | Asset | Rp. Milyar | 38,158 | 38,353 | 38,521 | 38,898 | 39.221 |
| 4 | Omzet | Rp. Milyar | 67,550 | 67,087 | 68,242 | 68,581 | 69.381 |

*Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2023.*

Dukungan kredit perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank menjadi hal yang cukup penting dalam rangka pengembangan UMKM. Penyaluran kredit bagi UMKM dapat dilihat dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari tahun 2019-2023 per kabupaten/kota yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.20.**

**Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2019-2023 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

| No | Penyaluran Kur per wilayah | Tahun | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) |
| 1 | KAB. CILACAP | 41,355 | 960,285,860,282 | 49,966 | 1,394,346,710,619 | 67,017 | 2,129,737,861,185 | 71,016 | 2,624,919,833,453 | 52.614 | 1.840.190.849.426 |
| 2 | KAB. BANYUMAS | 55,115 | 1,282,747,263,690 | 62,067 | 1,722,310,316,244 | 81,032 | 2,592,038,105,781 | 84,593 | 3,076,948,656,311 | 60.395 | 2.111.050.542.451 |
| 3 | KAB. PURBALINGGA | 25,654 | 602,714,584,855 | 27,689 | 803,732,756,908 | 40,839 | 1,299,152,047,779 | 40,276 | 1,442,972,839,914 | 32.626 | 1.058.008.932.917 |
| 4 | KAB. BANJARNEGARA | 29,766 | 632,705,263,546 | 36,186 | 899,705,181,588 | 42,432 | 1,251,222,195,514 | 44,733 | 1,521,610,585,804 | 29.647 | 1.003.269.757.964 |
| 5 | KAB. KEBUMEN | 25,513 | 573,708,207,067 | 34,149 | 952,579,273,357 | 42,936 | 1,388,686,443,433 | 41,576 | 1,645,011,183,407 | 32.372 | 1.233.727.118.960 |
| 6 | KAB. PURWOREJO | 21,332 | 408,576,873,790 | 28,451 | 698,850,237,182 | 35,719 | 1,027,427,376,945 | 36,796 | 1,332,611,684,888 | 24.644 | 959.659.862.318 |
| 7 | KAB. WONOSOBO | 23,057 | 515,131,370,783 | 29,502 | 786,462,223,780 | 32,089 | 1,087,479,988,575 | 34,258 | 1,335,876,474,453 | 24.735 | 963.015.421.204 |
| 8 | KAB. MAGELANG | 32,030 | 732,548,594,861 | 40,950 | 1,097,838,191,734 | 46,039 | 1,460,713,188,234 | 49,489 | 1,867,082,199,837 | 33.043 | 1.272.358.457.628 |
| 9 | KAB. BOYOLALI | 31,959 | 828,780,579,519 | 37,366 | 1,112,557,697,460 | 45,996 | 1,606,818,765,940 | 49,694 | 2,077,453,794,156 | 32.841 | 1.480.605.654.608 |
| 10 | KAB. KLATEN | 37,544 | 982,285,115,877 | 51,196 | 1,444,646,931,716 | 61,939 | 2,121,148,190,896 | 63,467 | 2,681,277,315,450 | 38.966 | 1.830.230.807.851 |
| 11 | KAB. SUKOHARJO | 25,087 | 706,836,957,302 | 34,744 | 1,081,776,881,390 | 42,854 | 1,582,353,275,797 | 41,976 | 1,920,002,945,800 | 29.850 | 1.464.647.494.075 |
| 12 | KAB. WONOGIRI | 25,496 | 685,671,001,093 | 35,877 | 1,087,998,374,407 | 46,919 | 1,590,755,342,861 | 49,380 | 2,044,594,999,547 | 26.632 | 1.187.220.565.189 |
| 13 | KAB. KARANGANYAR | 27,911 | 722,856,807,398 | 35,901 | 1,088,590,422,286 | 43,330 | 1,569,531,753,495 | 44,436 | 2,053,690,544,527 | 28.001 | 1.442.136.910.636 |
| 14 | KAB. SRAGEN | 34,534 | 899,981,114,268 | 40,635 | 1,300,547,042,229 | 52,677 | 2,013,289,872,710 | 54,400 | 2,541,688,588,633 | 33.726 | 1.672.257.577.725 |
| 15 | KAB. GROBOGAN | 49,175 | 979,056,006,113 | 67,026 | 1,542,288,553,779 | 82,266 | 2,405,075,535,917 | 89,416 | 3,173,851,980,803 | 54.037 | 2.088.427.262.757 |
| 16 | KAB. BLORA | 57,549 | 1,210,374,601,719 | 73,654 | 1,699,912,069,917 | 75,130 | 2,104,246,917,986 | 76,514 | 2,611,075,351,064 | 41.764 | 1.592.526.050.133 |
| 17 | KAB. REMBANG | 25,223 | 544,814,780,697 | 28,769 | 699,336,336,217 | 32,345 | 1,010,725,024,881 | 36,240 | 1,369,369,188,553 | 27.307 | 1.015.201.535.982 |
| 18 | KAB. PATI | 66,826 | 1,486,154,011,274 | 79,555 | 2,249,691,305,260 | 80,544 | 2,797,359,822,366 | 83,493 | 3,631,451,274,447 | 60.426 | 2.562.022.051.348 |
| 19 | KAB. KUDUS | 23,425 | 589,874,956,352 | 26,887 | 780,606,313,383 | 29,209 | 1,061,448,572,509 | 32,328 | 1,436,607,198,786 | 24.712 | 1.060.003.420.780 |
| 20 | KAB. JEPARA | 35,160 | 740,258,155,922 | 36,752 | 954,019,977,024 | 46,850 | 1,474,838,409,206 | 50,478 | 1,976,896,899,818 | 44.487 | 1.601.310.865.169 |
| 21 | KAB. DEMAK | 32,212 | 769,213,338,424 | 36,477 | 1,020,473,479,231 | 42,974 | 1,527,633,391,898 | 48,849 | 2,037,771,456,030 | 33.056 | 1.483.481.605.841 |
| 22 | KAB. SEMARANG | 30,419 | 765,945,740,676 | 41,340 | 1,098,366,277,769 | 44,383 | 1,651,074,085,410 | 46,723 | 2,095,318,514,959 | 35.194 | 1.578.501.891.832 |
| 23 | KAB. TEMANGGUNG | 23,732 | 522,430,931,880 | 32,682 | 812,940,656,417 | 37,125 | 1,149,057,568,683 | 40,697 | 1,449,775,849,161 | 30.305 | 1.143.186.858.793 |
| 24 | KAB. KENDAL | 27,899 | 652,804,255,069 | 39,596 | 999,378,230,464 | 42,382 | 1,403,642,495,261 | 44,397 | 1,722,038,355,016 | 27.483 | 1.174.300.275.683 |

| No | Penyaluran Kur per wilayah | Tahun | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) | UMKM | Realisasi (Rp) |
| 25 | KAB. BATANG | 21,407 | 443,649,337,912 | 24,481 | 661,257,570,763 | 32,120 | 1,066,373,925,602 | 37,065 | 1,353,706,515,946 | 22.069 | 867.802.657.859 |
| 26 | KAB. PEKALONGAN | 18,725 | 378,276,899,231 | 24,150 | 629,124,933,039 | 31,580 | 981,476,531,591 | 35,577 | 1,222,824,400,202 | 23.116 | 784.239.646.945 |
| 27 | KAB. PEMALANG | 36,203 | 739,922,402,326 | 48,814 | 1,164,357,376,954 | 62,162 | 1,773,175,921,199 | 65,552 | 2,157,929,858,009 | 50.393 | 1.560.358.775.470 |
| 28 | KAB. TEGAL | 47,475 | 1,021,705,034,995 | 56,474 | 1,432,849,120,987 | 73,900 | 2,057,898,435,824 | 77,384 | 2,450,206,822,298 | 45.317 | 1.442.753.480.818 |
| 29 | KAB. BREBES | 75,573 | 1,417,876,938,238 | 86,856 | 1,956,644,782,697 | 93,977 | 2,558,951,345,370 | 102,660 | 3,080,273,062,920 | 66.398 | 1.898.270.289.270 |
| 30 | KOTA MAGELANG | 3,417 | 79,949,600,586 | 4,993 | 130,892,399,071 | 4,793 | 159,603,112,815 | 4,827 | 216,101,106,000 | 3.129 | 136.664.736.790 |
| 31 | KOTA SURAKARTA | 13,086 | 391,251,167,491 | 19,305 | 593,619,780,111 | 30,071 | 1,047,482,051,404 | 27,952 | 1,290,010,839,228 | 18.082 | 857.645.792.443 |
| 32 | KOTA SALATIGA | 4,771 | 128,492,192,604 | 5,926 | 179,309,053,998 | 5,676 | 220,769,639,245 | 6,110 | 320,100,400,000 | 4.213 | 228.617.475.000 |
| 33 | KOTA SEMARANG | 21,371 | 695,195,395,549 | 31,861 | 1,070,732,933,645 | 37,328 | 1,702,978,989,436 | 42.230 | 2,430,847,721,262 | 27.294 | 1.756.872.111.550 |
| 34 | KOTA PEKALONGAN | 6,464 | 150,943,612,600 | 7,247 | 224,298,605,237 | 10,143 | 323,354,337,497 | 11,052 | 386,682,529,242 | 8.870 | 272.832.250.604 |
| 35 | KOTA TEGAL | 7,676 | 229,764,739,800 | 7,889 | 262,776,282,173 | 9,515 | 360,062,578,224 | 10,930 | 464,287,866,282 | 5.847 | 218.073.616.271 |

*Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2023.*

### 2.3.9 Perdagangan

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2016 hingga tahun 2021 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan tiga besar sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan, dan pertanian. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan tahun 2021 sebesar 195.399.044,07 rupiah, dan memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 13,75 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.21.**
**Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Nilai total PDRB (Miliar Rp) | 1.360.960,13 | 1.347.922,69 | 1.420.799,91 | 1.560.899,02 | 1.696.795, 42 |
| 2 | Nilai Sektor Perdagangan (Miliar Rp) | 187.064,45 | 181.860,78 | 195.399,04 | 212.208,01 | 230.872,97 |
| 3 | Kontribusi (%) | 13,74 | 13,48 | 13,75 | 13,60 | 13,61 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Total ekspor Jawa Tengah selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 yang menurun karena pengaruh dari pandemi Covid-19. Nilai ekspor tahun 2018 tercatat sebesar US$8.260,18 juta, menurun menjadi sebesar US$8.088,33 juta pada tahun 2020, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar US$11.777,91 juta. Ekspor Jawa Tengah terdiri dari ekspor migas dan nonmigas dengan proporsi lebih besar pada ekspor nonmigas, yang selama kurun waktu tahun 2018-2020 trennya sejalan dengan tren nilai ekspor total di Jawa Tengah.

Nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2018 tercatat sebesar US$8.091,62 juta, menurun menjadi sebesar US$7.704,24 juta pada tahun 2020, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar US$11.210,92 juta. Namun, untuk nilai ekspor migas Jawa Tengah selama lima tahun terakhir tetap meningkat dan tidak mengalami penurunan pada tahun 2020. Nilai ekspor migas Jawa Tengah tahun 2018 tercatat sebesar US$168,55 juta, meningkat menjadi US$566,99 juta pada tahun 2022.

Komoditas utama golongan barang yang memiliki peran terbesar pada ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah komoditas pakaian dan aksesorisnya (bukan rajutan) yang tercatat sebesar US$2.470,91 juta atau 22,04 persen dari nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah. Komoditas berikutnya adalah pakaian dan aksesorisnya (rajutan) sebesar US$1.450,72 juta (12,94 persen), komoditas alas kaki sebesar US$1.283,83 juta (11,45 persen), dan komoditas kayu dan barang dari kayu sebesar US$1.130,20 juta (10,08 persen). Nilai komoditas tersebut meningkat dari nilai pada tahun 2021. Perkembangan ekspor Jawa Tengah baik migas dan nonmigas dapat dilihat di tabel berikut.

**Tabel 2.22.**
**Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023 (Juta US$)**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Ekspor** | **8.516,70** | **8.088,30** | **10.733,44** | **11.777,91** | **10.229,18** |
| - Migas | 303,86 | 384,06 | 438,99 | 566,99 | 360,56 |
| - Non Migas | 8.212,84 | 7.704,24 | 10.294,45 | 11.210,92 | 9.868,62 |

*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023.*

Sementara itu, total nilai impor Jawa Tengah selama tahun 2018-2022 cukup fluktuatif, di mana pada tahun 2018-2020 trennya menurun, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Nilai impor Jawa Tengah tahun 2018-2020 tercatat sebesar US$14.779,38 juta menurun menjadi US$8.719,80 juta, kemudian meningkat menjadi US$15.013,61 juta pada tahun 2022. Nilai impor migas Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat sebesar US$7.435,63 juta, meningkat cukup signifikan dari tahun 2021 yang sebesar US$4.440,52 juta.

Demikian juga untuk impor nonmigas Jawa Tengah yang pada tahun 2022 mencatatkan nilai sebesar US$7.577,98 juta, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar US$7.341,27 juta. Komoditas impor nonmigas terbesar adalah golongan mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya yang pada tahun 2022 tercatat sebesar US$810,13 juta atau sebesar 10,69 persen dari total nilai impor Jawa Tengah. Komoditas selanjutnya adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar US$699,49 juta (9,23 persen), serta plastik dan barang dari plastik sebesar US$657,03 juta (8,67 persen). Perkembangan nilai impor Jawa Tengah baik migas dan nonmigas dapat dilihat di tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.23.**
**Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023 (Juta US$)**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Impor** | **12.567,62** | **8.719,80** | **11.781,79** | **15.013,61** | **n/a** |
| - Migas | 3.906,03 | 2.154,76 | 4.440,52 | 7.435,63 | n/a |
| - Non Migas | 8.661,59 | 6.565,04 | 7.341,27 | 7.577,98 | n/a |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Neraca perdagangan Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami defisit, di mana selama tahun 2018-2020 mengalami penurunan defisit, namun kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2018, neraca perdagangan Jawa Tengah mengalami defisit sebesar US$6.519,20 juta, menurun pada tahun 2020 sebesar US$631,5 juta. Pada tahun 2021 defisit kembali meningkat menjadi US$1.048,35 juta, dan semakin meningkat pada tahun 2022 menjadi US$3.235,70 juta. Defisit dalam neraca perdagangan Jawa Tengah pada tahun 2022 dipicu oleh defisit sektor migas sebesar US$6.868,64 juta. Sementara di sisi lain, sektor nonmigas mencatatkan surplus pada neraca perdagangan Jawa Tengah sebesar US$3.632,94 juta.

Perkembangan neraca perdagangan Jawa Tengah tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.24.**
**Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023 (Juta US$)**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ekspor** | **8.516,70** | **8.088,30** | **10.733,44** | **11.777,91** | **10.229,18** |
| - Migas | 303,86 | 384,06 | 438,99 | 566,99 | 360,56 |
| - Non Migas | 8.212,84 | 7.704,24 | 10.294,45 | 11.210,92 | 9.868,62 |
| **Impor** | **12.567,62** | **8.719,80** | **11.781,79** | **15.013,61** | **14.497,42** |
| - Migas | 3.906,03 | 2.154,76 | 4.440,56 | 7.435,63 | 7.036,06 |
| - Non Migas | 8.661,59 | 6.565,04 | 7.341,23 | 7.577,98 | 7.461,36 |
| **Surplus/Defisit** | **(4.050,92)** | **(631,5)** | **(1.048,35)** | **(3.235,70)** | **(4.268,24)** |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Guna mendukung peningkatan ekspor nonmigas Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memfasilitas penerbitan sertifikasi mutu barang. Untuk penerbitan sertifikasi mutu barang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2018 mencapai 260 sertifikat untuk lima jenis barang, meningkat menjadi 2.019 sertifikat untuk tujuh jenis barang pada tahun 2022.

**Tabel 2.25.**
**Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Jenis Usaha Perdagangan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit) | 2.437 | 1.767 | 1.925 | 2.019 | n/a |
| 2 | Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis) | 5 jenis barang | 7 jenis barang | 6 jenis barang | 7 jenis barang | n/a |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Dalam rangka pelaksanaan konsumen cerdas, yang diharapkan konsumen dapat untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan mutu dan kualitas maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kabupaten/kota melakukan upaya perlindungan konsumen. Namun demikian apabila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Jumlah LPKSM sampai dengan tahun 2021 sebanyak 3 unit yaitu di 3 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

**Tabel 2.26.**
**Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota) | 8 | 4 | 1 | 0 | n/a |
| 2 | Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM (kab/kota) | 18 di 9 Kab/Kota | 18 di 9 Kab/Kota | 3 di 3 kab kota | 5 di 4 Kab/Kota | n/a |
| 3 | Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/kota (%) | 111 kasus (100%) | 27 kasus (100%) | 6 kasus (100%) | 0 kasus (-) | n/a |
| 4 | Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis) | 3.512 | 2.741 | 1.228 | 305 | n/a |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Lebih lanjut dalam rangka lebih memperkuat daya tahan industri dan perdagangan di dalam negeri telah diinisiasi pula upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; serta memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Adapun sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat; peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN); peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; serta peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

### 2.3.10 Perindustrian

Kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2021 sebesar 487,44 juta rupiah, dan memberikan kontribusi sebesar 34,31 persen terhadap total PDRB yang sebesar 1,42 miliar rupiah. Nilai dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.27.**
**Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Nilai total PDRB (Juta Rp) | 1.362.457.380,57 | 1.347.922.689,03 | 1.420.799.908,38 | 1.157.316.832,47 | 1.696.795.419,3 |
| 2 | Nilai Sektor Industri (Juta Rp) | 468.992.159,77 | 464.609.134,06 | 487.445.099,28 | 392.749.654,42 | 577.429.037,01 |
| 3 | Kontribusi (%) | 34,41 | 34,47 | 34,31 | 33.94 | 34.03 |

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Capaian pertumbuhan industri besar di Jawa Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Industri besar dari 1.584 unit usaha pada tahun 2019 menjadi 2.982 unit usaha pada tahun 2022. Untuk jumlah IKM di tahun 2022 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. IKM di tahun 2021 sebanyak 912.421 unit usaha meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar 327.110 unit usaha.

**Tabel 2.28.**
**Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023**

| No | Jenis Industri | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Besar | 1.584 | 1.591 | 2.417 | 2.982 | n/a |
| 2 | Kecil dan Menengah | 327.110 | 327.200 | 912.421 | 204.608 | n/a |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Dari sejumlah industri yang berkembang di Jawa Tengah, beberapa jenis industri menjadi industri unggulan daerah dan dijadikan sebagai kompetensi inti industri meliputi industri meubel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif, dan kerajinan. Pola pengembangan industri tersebut diarahkan melalui pendekatan pembentukan klaster industri potensial untuk meningkatkan jejaring dan rantai nilai industri unggulan daerah yang melibatkan industri utama, industri pendukung dan usaha terkait. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk kelembagaan klaster industri sebanyak 19 klaster terdiri dari 6 klaster logam mesin dan tekstil, 7 klaster komponen otomotif, elektronika, aneka, serta 6 klaster agro, kimia dan hasil hutan.

**Tabel 2.29.**
**Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023**

| No | Jenis industri | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | jumlah klaster logam, mesin, tekstil | 6 | 6 | 6 | 6 | n/a |
| 2 | jumlah klaster komponen otomotif, elektronika dan aneka | 7 | 7 | 7 | 7 | n/a |
| 3 | Jumlah klaster agro, kimia dan hasil hutan | 6 | 6 | 6 | 7 | n/a |
| | **Jumlah klaster industri** | **19** | **19** | **19** | **20** | n/a |

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Selain itu dalam pengembangan kelembagaan usaha sektor industri tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 3 (tiga) lembaga industri meliputi Pokja Industri pada Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), dan Mitra Praja Utama.

### 2.3.11 Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Dalam pelaksanaannya capaian indikator kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.30.**
**Capaian Indikator Kinerja Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2023**

| No | Indikator | Capaian |
|---|---|---|
| 1 | Kontribusi PAD Sektor Pariwisata | n/a |
| 2 | Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata | 3,40 % |
| 3 | Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata | 11,24% |
| 4 | Rata-rata jumlah pengeluaran belanja wisatawan nusantara (Rp/Orang) (2022) | Rp4,184,389,- |
| 5 | Rata-rata jumlah pengeluaran belanja wisatawan mancanegara | $ 670 |
| 6 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara | 442.302 orang |
| 7 | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara | 53.442.804 orang |
| 8 | Daya Tarik Wisata (DTW) | 1393 (DTW Alam 693, DTW Budaya 232 dan DTW Buatan 468) |
| 9 | Jumlah Desa Wisata | 776 Desa Wisata |
| 10 | PDRB Sektor Ekonomi Kreatif (2022) | 23,840,445,620,- |
| 11 | Pelaku Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi | 935 orang |
| 12 | Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi | 480 orang |

*Sumber: Dinporapar Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 3,29% (2022) menjadi 3,40% (2023), Jumlah kunjungan wisatawan 53.885.106 orang yang terdiri dari Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebesar 442.302 orang dan Wisatawan Nusantara 53.442.804 orang adapun kontribusi PDRB sektor ekonomi kreatif sebesar 23,840,445,620,-.

### 2.3.12 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan di Jawa Tengah sebesar 32.208,85 km yang terbagi sesuai kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan provinsi sebesar 7,58 persen;
2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 86,56 persen;
3. Kewenangan Nasional sebesar 5,86 persen.

Sedangkan jalan tol yang sudah fungsional sepanjang 330,71 km dalam kondisi baik. Kondisi jalan kewenangan provinsi tahun 2023 yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 1098,786 km atau 45,03 persen. Sedangkan berdasarkan kondisi permukaan jalan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.31.**
**Kondisi Permukaan Jalan Sesuai Kewenangan Di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2023**

| Kewenangan | Kondisi Ruas Jalan | | | | | | | | Total Panjang Jalan (Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baik | | Sedang | | Rusak Ringan | | Rusak Berat | | |
| | Km | % | km | % | km | % | Km | % | |
| Nasional | 979,17 | 51,88 | 850,95 | 45,09 | 56,67 | 3,00 | 0,50 | 0,03 | 1.887,29 |
| Provinsi | 1.716,04 | 70,33 | 487,79 | 19,99 | 124,32 | 5,09 | 111,97 | 4,59 | 2.440,12 |
| Kabupaten/ Kota | 15.468,09 | 55,48 | 6.789,90 | 24,35 | 2.687,33 | 9,64 | 2.936,13 | 10,53 | 27.881,44 |
| Jumlah Jateng | 18.163,30 | 56,39 | 8.128,64 | 25,24 | 2.868,32 | 8,91 | 3.048,60 | 9,47 | 32.208,85 |
| Jalan Tol | 330,71 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,71 |

*Sumber: SNVT P2JN Jawa Tengah, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah*

Perkembangan kondisi jalan kewenangan provinsi dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kondisi permukaan jalan baik sejak tahun 2019 dengan total panjang Jalan Provinsi 2.404,74 km (sesuai SK Gubernur No. 620/2 tahun 2016 tentang Penetapan Status Jalan sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah) mengalami penurunan hingga tahun 2021. Pada tahun 2022 dapat diperbaiki dengan kondisi mantap 92,49% (terdiri dari kondisi baik 83,60 % dan kondisi sedang 8,89 %), namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 90,88%. Hal ini disebabkan oleh telah terlampauinya usia layanan ruas-ruas jalan sehingga kondisinya menurun.

Berdasar SK Gubernur Jawa Tengah No. 622/11 Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor Primer-3 Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah, total panjang Jalan

Provinsi mengalami perubahan menjadi 2.440,12 km karena adanya *upgrade* ruas-ruas Jalan Kabupaten yang strategis dan disesuaikan dengan fungsi jalan. Penanganan jalan-jalan Kabupaten yang berubah status menjadi Jalan Provinsi baru dimulai pada tahun 2024. Kondisi permukaan Jalan Provinsi mantap tahun 2023 dengan total panjang jalan sesuai update adalah 90,33% dengan rincian seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.32.**
**Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| Tahun | Kondisi | | | | | | | | Panjang Jalan Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baik | | Sedang | | Rusak Ringan | | Rusak Berat | | |
| | KM | % | KM | % | KM | % | KM | % | KM |
| 2019 | 1.946,86 | 80,96 | 234,01 | 9,73 | 223,87 | 9,31 | 0,000 | 0,00 | 2.404,74 |
| 2020 | 1.869,69 | 77,75 | 312,13 | 12,98 | 222,93 | 9,27 | 0,000 | 0,00 | 2.404,74 |
| 2021 | 1.871,61 | 77,83 | 313,45 | 13,03 | 219,682 | 9,14 | 0,000 | 0,00 | 2.404,74 |
| 2022 | 2.010,27 | 83,60 | 213,89 | 8,89 | 68,33 | 2,84 | 112,25 | 4,67 | 2.404,74 |
| 2023 | 1.716,04 | 70,33 | 487,79 | 19,99 | 124,32 | 5,09 | 111,97 | 4,59 | 2.440,12 |

*Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Adapun persebaran kondisi jalan kewenangan kabupaten/kota untuk tiap-tiap daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.33.**
**Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

| No. | Kabupaten/ Kota | Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2023 | | | | | | | | Total Panjang (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik | | Sedang | | Rusak Ringan | | Rusak Berat | | |
| | | (km) | % | (km) | % | (km) | % | (km) | % | |
| 1 | Banjarnegara | 677,45 | 72,17 | 123,61 | 13,17 | 50,00 | 5,33 | 87,59 | 9,33 | 938,65 |
| 2 | Banyumas | 665,429 | 50,590 | 285,412 | 21,699 | 206,427 | 15,694 | 158,079 | 12,018 | 1.315,347 |
| 3 | Batang | 400,57 | 74,12 | 49,93 | 9,24 | 51,69 | 9,56 | 38,26 | 7,08 | 540,45 |
| 4 | Blora | 433,225 | 47,277 | 128,297 | 14,001 | 91,098 | 9,941 | 263,730 | 28,780 | 916,350 |
| 5 | Boyolali | 498,002 | 73,89 | 61,393 | 9,11 | 52,610 | 7,81 | 61,995 | 9,20 | 674,000 |
| 6 | Brebes | 271,879 | 22,47 | 413,769 | 34,19 | 197,005 | 16,28 | 327,540 | 27,07 | 1.210,19 |
| 7 | Cilacap | 785,320 | 61,00 | 178,315 | 13,85 | 128,577 | 9,99 | 195,163 | 15,16 | 1.287,375 |
| 8 | Demak | 536,45 | 58,98 | 276,43 | 30,39 | 49,45 | 5,44 | 47,25 | 5,19 | 909,58 |
| 9 | Grobogan | 578,667 | 61,40 | 229,210 | 24,32 | 58,362 | 6,19 | 76,150 | 8,08 | 942,389 |
| 10 | Jepara | 370,98 | 43,44 | 376,01 | 44,03 | 94,78 | 11,10 | 12,26 | 1,43 | 854,03 |
| 11 | Karanganyar | 360,17 | 41,34 | 363,50 | 41,72 | 89,51 | 10,27 | 58,16 | 6,67 | 871,34 |
| 12 | Kebumen | 479,75 | 47,17 | 276,71 | 27,20 | 142,94 | 14,05 | 117,75 | 11,58 | 1.017,15 |
| 13 | Kendal | 388,93 | 49,69 | 261,61 | 33,42 | 64,65 | 8,26 | 67,53 | 8,63 | 782,71 |
| 14 | Klaten | 489,08 | 67,85 | 172,62 | 23,95 | 53,47 | 7,42 | 5,68 | 0,79 | 720,85 |
| 15 | Kudus | 409,34 | 70,53 | 121,44 | 20,92 | 29,78 | 5,13 | 19,85 | 3,42 | 580,42 |
| 16 | Magelang | 726,38 | 71,17 | 185,38 | 18,16 | 77,30 | 7,57 | 31,60 | 3,10 | 1.020,66 |
| 17 | Pati | 875,90 | 69,72 | 135,45 | 10,78 | 102,64 | 8,17 | 142,30 | 11,33 | 1.256,285 |
| 18 | Pekalongan | 288,992 | 41,41 | 232,135 | 33,26 | 79,455 | 11,38 | 97,314 | 13,94 | 697,896 |
| 19 | Pemalang | 454,09 | 59,30 | 77,57 | 10,13 | 75,98 | 9,92 | 158,09 | 20,65 | 765,72 |

| No. | Kabupaten/ Kota | Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2023 | | | | | | | | Total Panjang (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik | | Sedang | | Rusak Ringan | | Rusak Berat | | |
| | | (km) | % | (km) | % | (km) | % | (km) | % | |
| 20 | Purbalingga | 443,98 | 46,61 | 306,94 | 32,22 | 52,41 | 5,50 | 149,27 | 15,67 | 952,60 |
| 21 | Purworejo | 146,22 | 19,30 | 331,57 | 43,76 | 163,84 | 21,62 | 116,16 | 15,33 | 757,79 |
| 22 | Rembang | 320,16 | 53,88 | 101,53 | 17,09 | 65,01 | 10,94 | 107,50 | 18,09 | 594,20 |
| 23 | Semarang | 476,69 | 64,98 | 165,10 | 22,50 | 58,03 | 7,91 | 33,80 | 4,61 | 733,62 |
| 24 | Sragen | 619,51 | 60,72 | 220,02 | 21,57 | 78,95 | 7,74 | 101,77 | 9,98 | 1.020,25 |
| 25 | Sukoharjo | 300,92 | 49,53 | 243,11 | 40,01 | 56,29 | 9,26 | 7,26 | 1,19 | 607,57 |
| 26 | Tegal | 525,61 | 62,04 | 129,66 | 15,30 | 103,27 | 12,19 | 88,73 | 10,47 | 847,27 |
| 27 | Temanggung | 474,138 | 72,89 | 105,834 | 16,27 | 47,535 | 7,31 | 22,969 | 3,53 | 650,476 |
| 28 | Wonogiri | 1194,67 | 81,20 | 112,09 | 7,62 | 111,52 | 7,58 | 52,91 | 3,60 | 1.471,19 |
| 29 | Wonosobo | 288,672 | 28,89 | 352,301 | 35,26 | 142,054 | 14,22 | 216,249 | 21,64 | 999,276 |
| 30 | Kota Magelang | 74,61 | 59,81 | 31,93 | 25,60 | 16,40 | 13,15 | 1,80 | 1,45 | 124,73 |
| 31 | Kota Pekalongan | 125,18 | 81,60 | 4,69 | 3,06 | 9,86 | 6,43 | 13,68 | 8,92 | 153,41 |
| 32 | Kota Salatiga | 240,42 | 71,24 | 86,62 | 25,67 | 7,37 | 2,18 | 3,07 | 0,91 | 337,47 |
| 33 | Kota Semarang | 304,998 | 36,314 | 476,143 | 56,690 | 23,588 | 2,808 | 35,172 | 4,188 | 839,901 |
| 34 | Kota Surakarta | 106,61 | 45,81 | 96,89 | 41,63 | 27,93 | 12,00 | 1,30 | 0,56 | 232,73 |
| 35 | Kota Tegal | 135,11 | 52,45 | 76,70 | 29,78 | 27,57 | 10,70 | 18,20 | 7,06 | 257,57 |
| | **JUMLAH** | 15.468,09 | 55,48 | 6.789,90 | 24,35 | 2.687,33 | 9,64 | 2.936,13 | 10,53 | 27.881,44 |

*Sumber: DPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, 2023.*

Mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan 10 tahun terhitung sejak diundangkan jalan provinsi harus sesuai dengan standar. Standar jalan provinsi dilihat dari aspek dimensi jalan (lebar perkerasan jalan minimal 7 m), aspek konstruksi perkerasan jalan (muatan sumbu terberat sebesar 8 ton) dan aspek ketersediaan bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan (saluran drainase dan dinding penahan tanah serta bahu jalan).

Sampai dengan tahun 2023, panjang Jalan Provinsi yang telah sesuai dengan standar (dari sisi lebar jalan ≥7 m dan konstruksi sesuai MST 8 ton) sepanjang 1.098,786 km. Sedangkan jalan provinsi yang telah sesuai dengan standar dengan kondisi permukaan mantap adalah sepanjang 2.203,83 km atau mencapai 90,32 persen. Penyesuaian standar jalan provinsi perlu dilakukan secara bertahap utamanya untuk penuntasan jalan yang mempunyai nilai strategis dengan tetap menjaga kondisi permukaan seluruh Jalan Provinsi.

**Tabel 2.34.**

**Kondisi Permukaan Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2023**

| No. | Lebar Perkerasan Jalan | Panjang (km) | Persentase (%) | Kondisi | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Baik | | Sedang | | Rusak Ringan | | Rusak Berat | |
| | | | | Panjang (km) | Persentase (%) | Panjang (km) | Persentase (%) | Panjang (km) | Persentase (%) | Panjang (km) | Persentase (%) |
| 1 | ≥7 m | 1098,79 | 45,03 | 792,90 | 32,49% | 222,78 | 9,13% | 47,73 | 1,96% | 35,38 | 1,45% |
| 2 | <7 m | 1341,33 | 54,97 | 923,14 | 37,90% | 465,01 | 10,86% | 76,59 | 3,14% | 76,59 | 3,14% |
| **Total** | | **2.440,12** | **100** | **1716,04** | **70,33%** | **487,79** | **19,99%** | **124,32** | **5,09%** | **111,97** | **4,59%** |

*Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

**b. Air Minum dan Sanitasi**

Cakupan akses air minum layak pada tahun 2023 sebesar 91,40 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 88,27 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses air minum aman pada tahun 2023 sebesar 38,75 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 36,93 persen. Sedangkan untuk cakupan akses air minum jaringan perpipaan pada tahun 2023 sebesar 48,78 persen, sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 48,82 persen dikarenakan jumlah pembangunan baru jaringan perpipaan tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk, selain itu juga dikarenakan adanya ketidakberfungsian beberapa jaringan perpipaan SPAM perdesaan akibat menurunnya debit sumber air baku.

Cakupan akses air limbah domestik layak pada tahun 2023 sebesar 92,14 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 90,38 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses air limbah domestik aman pada tahun 2023 sebesar 9,91 persen sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 9,94 persen dikarenakan terjadinya kerusakan pada prasarana yang sudah ada dan pembangunan baru tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk.

Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh air minum di Jawa Tengah direncanakan 5 (lima) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2023 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas, Keburejo dan Petanglong, serta sedang dalam proses pembangunan yaitu SPAM Regional Wososukas, dan proses inisiasi yaitu SPAM Regional Dadimuria. Sedangkan dalam rangka percepatan pencapaian akses menyeluruh air limbah domestik, diinisiasi penyediaan sarana prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa IPLT Regional di Jawa Tengah.

**Tabel 2.35.**
**Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023**

| No | Uraian | Tahun (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | **Akses Air Minum** | | | | | | |
| | Layak | 79.35 | 81.77 | 85,11 | 86,87 | 88,27 | 91,40 |
| | Aman | 22,66 | 26,7 | 32,24 | 34,06 | 36,93 | 38,75 |
| | Jaringan Perpipaan | 36,8 | 39,08 | 43,74 | 44,37 | 48,82 | 48,78 |
| 2 | **Akses Air Limbah Domestik** | | | | | | |
| | Layak | 82,04 | 89,57 | 90,72 | 88,67 | 90,38 | 92,14 |
| | Aman | - | - | 10,69 | 10,75 | 9,94 | 9,91 |

*Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Dalam rangka pengelolaan air minum dan air limbah domestik yang berkelanjutan maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelola layanan air minum dan air limbah domestik di kabupaten/kota dengan kondisi pengelolaannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 2.36.
## Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023

| No | Kab/Kota | Akses Air Minum (%) | | | Kondisi SPAM Perkotaan PDAM (Buku BPPW 2023) | | | Jaringan Perpipaan Non PDAM (Pamsimas) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Layak | Aman | Perpipa-an | Kapasitas Produksi (Lps) | Idle Capacity (Lps) | Status Kinerja | Jumlah Sambungan Runah | Jumlah SPAM Fungsi Sebagian | Jumlah SPAM Tidak Fungsi |
| 1 | Cilacap | 91,23 | 23,28 | 31,99 | 899,80 | 630,20 | Sehat | 21.854 | 16 | 0 |
| 2 | Banyumas | 77,56 | 32,38 | 32,38 | 916,05 | 151,43 | Sehat | 55.551 | 4 | 6 |
| 3 | Purbalingga | 95,99 | 47,02 | 41,28 | 603,16 | 289,83 | Sehat | 42.838 | 0 | 1 |
| 4 | Banjarnegara | 96,76 | 26,30 | 27,13 | 99,84 | 33,16 | Kurang Sehat | 35.520 | 2 | 2 |
| 5 | Kebumen | 97,29 | 18,41 | 19,05 | 339,42 | 105,58 | Sehat | 27.252 | 3 | 2 |
| 6 | Purworejo | 97,97 | 37,26 | 29,19 | 240,93 | 143,07 | Sehat | 32.220 | 2 | 4 |
| 7 | Wonosobo | 93,77 | 50,88 | 95,06 | 750,27 | 395,02 | Sehat | 28.392 | 0 | 0 |
| 8 | Magelang | 92,49 | 16,86 | 41,98 | 880,99 | 216,51 | Sehat | 29.497 | 7 | 0 |
| 9 | Boyolali | 96,44 | 38,96 | 53,48 | 397,00 | 296,50 | Sehat | 45.215 | 0 | 0 |
| 10 | Klaten | 93,38 | 33,13 | 33,13 | 555,90 | 18,00 | Sehat | 22.620 | 1 | 7 |
| 11 | Sukoharjo | 93,22 | 14,90 | 28,87 | 373,16 | 119,84 | Sehat | 21.717 | 0 | 0 |
| 12 | Wonogiri | 92,67 | 26,67 | 43,07 | 325,49 | 242,27 | Sehat | 36.132 | 3 | 0 |
| 13 | Karanganyar | 98,80 | 30,75 | 76,90 | 659,00 | 12,00 | Sehat | 33.869 | 3 | 1 |
| 14 | Sragen | 88,24 | 20,55 | 44,12 | 893,62 | 151,27 | Sehat | 55.990 | 0 | 0 |
| 15 | Grobogan | 87,93 | 25,99 | 25,99 | 291,00 | 17,00 | Sehat | 26.914 | 0 | 10 |
| 16 | Blora | 94,00 | 9,50 | 25,00 | 248,00 | 36,00 | Sehat | 26.729 | 0 | 6 |
| 17 | Rembang | 92,45 | 41,67 | 35,94 | 234,08 | 53,42 | Sehat | 23.347 | 7 | 5 |
| 18 | Pati | 82,65 | 35,81 | 67,82 | 399,32 | 75,38 | Sehat | 43.242 | 6 | 7 |
| 19 | Kudus | 98,51 | 23,90 | 35,15 | 501,20 | 241,50 | Sehat | 17.199 | 0 | 4 |
| 20 | Jepara | 98,06 | 20,50 | 20,50 | 622,00 | 195,50 | Cukup Sehat | 18.882 | 0 | 0 |
| 21 | Demak | 87,64 | 41,47 | 81,42 | 510,00 | 114,00 | Sehat | 34.377 | 4 | 6 |
| 22 | Semarang | 99,13 | 40,62 | 41,43 | 493,14 | 96,40 | Sehat | 58.867 | 1 | 0 |
| 23 | Temanggung | 95,75 | 18,19 | 77,52 | 456,99 | 152,01 | Sehat | 35.215 | 0 | 0 |
| 24 | Kendal | 95,58 | 76,82 | 56,07 | 688,54 | 157,66 | Sehat | 52.681 | 0 | 0 |
| 25 | Batang | 87,39 | 40,40 | 47,00 | 547,15 | 46,85 | Sehat | 35.619 | 1 | 1 |
| 26 | Pekalongan | 85,00 | 56,03 | 56,03 | 299,19 | 47,81 | Sehat | 38.857 | 0 | 0 |
| 27 | Pemalang | 90,05 | 41,26 | 44,95 | 583,00 | 273,00 | Sehat | 37.348 | 7 | 5 |
| 28 | Tegal | 80,68 | 35,71 | 35,71 | 414,17 | 19,42 | Sehat | 24.050 | 3 | 5 |
| 29 | Brebes | 100,00 | 21,00 | 21,00 | 476,08 | 19,29 | Sehat | 31.813 | 0 | 6 |
| 30 | Kota Magelang | 98,32 | 88,21 | 91,26 | 630,51 | 11,73 | Sehat | - | 0 | 0 |
| 31 | Kota Surakarta | 96,95 | 60,08 | 60,70 | 774,71 | 191,29 | Sehat | - | 0 | 0 |
| 32 | Kota Salatiga | 98,00 | 91,00 | 91,00 | 351,79 | 186,25 | Sehat | - | 0 | 0 |
| 33 | Kota Semarang | 81,83 | 64,00 | 81,83 | 3.446,29 | 1.213,00 | Sehat | 25.670 | 0 | 3 |
| 34 | Kota Pekalongan | 86,89 | 86,89 | 86,89 | 330,00 | 150,00 | Sehat | 13.710 | 3 | 1 |
| 35 | Kota Tegal | 61,23 | 60,22 | 52,00 | 335,57 | 56,81 | Sehat | - | 0 | 0 |
| | **Jawa Tengah** | **91,40** | **38,75** | **48,78** | **20.567,36** | **6.159,00** | **Sehat** | **1.033.187** | **73** | **82** |

*Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024*

## Tabel 2.37.
## Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023

| No | Kab/Kota | Akses Air Limbah Domestik (%) | | Kondisi Layanan Air Limbah Domestik | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Layak | Aman | Nama/Lokasi IPLT | Status Operasi | Jumlah KPP |
| 1 | Cilacap | 92 | 1,46 | IPLT Tritih Lor Desa Tritih Lor Kec. Jeruk Legi | Beroperasi | 1 |
| 2 | Banyumas | 92 | 1,40 | IPLT Gunung Tugel Desa Kedungrandu Kec. Patikraja | Beroperasi tidak sebagaimana mestinya | 30 |
| 3 | Purbalingga | 94 | belum ada IPLT | - | | 2 |
| 4 | Banjarnegara | 85,12 | belum ada IPLT | - | | 2 |
| 5 | Kebumen | 93 | 3,09 | IPLT Kaligending Desa Kaligending Kec. Karang Sambung | Beroperasi | 14 |
| | | | | IPLT Semali Desa Semali Kec. Sempor | Beroperasi | |
| 6 | Purworejo | 95,32 | 20 | IPLT Gunung Tumpeng Desa Jetis Kec. Loano | Tidak Dioperasikan | 17 |
| 7 | Wonosobo | 71,61 | 1,69 | IPLT Wonorejo Desa Wonorejo Kec. Selomerto | Beroperasi tidak sebagaimana mestinya | n/a |
| 8 | Magelang | 91,65 | belum ada IPLT | - | | 12 |
| 9 | Boyolali | 98,3 | 29,21 | IPLT Winong Desa Jelok Kec. Boyolali | Tidak Dioperasikan | 32 |
| 10 | Klaten | 100 | 1,42 | IPLT Jomboran Desa Jomboran Kec. Klaten Tengah | Beroperasi | 50 |
| 11 | Sukoharjo | 95.95 | 2,31 | IPLT Mojorejo Desa Mojorejo Kec. Bendosari | Beroperasi | 10 |
| 12 | Wonogiri | 99,86 | 0,79 | IPLT Ngadirojo Desa Kerjo Lor Kec. Ngadirojo | Beroperasi | 33 |
| 13 | Karanganyar | 99,38 | 3,30 | IPLT Mojogedang Desa Kaliboto Kec. Mojogedang | Beroperasi | 30 |
| 14 | Sragen | 85,19 | 2,20 | IPLT Tanggan Desa Tanggan Kec. Gesi | | 20 |
| 15 | Grobogan | 77,76 | 22,24 | IPLT Ngembak Desa Ngembak Kec. Purwodadi | Beroperasi | n/a |
| 16 | Blora | 95,7 | 1,45 | IPLT Temurejo Desa Temurejo Kec. Blora | Beroperasi tidak sebagaimana mestinya | 20 |
| 17 | Rembang | 96,67 | 1,06 | IPLT Landoh Desa Landoh Kec. Sulang | Tidak beroperasi | 21 |
| 18 | Pati | 100 | 15,85 | IPLT Sukoharjo Desa Sukoharjo Kec. Margorejo | Beroperasi | 22 |
| 19 | Kudus | 96,8 | 2,61 | IPLT Tanjungrejo Desa Tanjungrejo Kec. Jekulo | Beroperasi | 50 |
| 20 | Jepara | 78,92 | 3,60 | IPLT Bandengan Desa Bandengan Kec. Jepara | Beroperasi | 95 |
| 21 | Demak | 100 | 4,10 | IPLT Kalikondang Desa Kalikondang Kec. Demak | Beroperasi | 6 |
| 22 | Semarang | 97,47 | 0,72 | - | | 39 |
| 23 | Temanggung | 94,39 | 5,22 | IPLT Sanggrahan Desa Sanggrahan Kec. Kranggan | Beroperasi | n/a |
| 24 | Kendal | 85,81 | belum ada IPLT | - | | 13 |

| No | Kab/Kota | Akses Air Limbah Domestik (%) | | Kondisi Layanan Air Limbah Domestik | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Layak | Aman | Nama/Lokasi IPLT | Status Operasi | Jumlah KPP |
| 25 | Batang | 87 | 5,00 | IPLT Randu Kuning Desa Tegalsari Kec. Kandeman | Beroperasi | 4 |
| 26 | Pekalongan | 95,92 | 62,00 | IPLT Kab. Pekalongan Desa Bener Kec. Wiradesa | Beroperasi | 4 |
| 27 | Pemalang | 78,87 | 52,93 | IPLT Pegongsoran Desa Pegongsoran Kec. Pemalang | Beroperasi | 3 |
| 28 | Tegal | 99,93 | 0,00 | IPLT Kedungjati Desa Dukuhjati Kidul Kec. Pangkah | Beroperasi | n/a |
| 29 | Brebes | 84,08 | 1,25 | - | | 1 |
| 30 | Kota Magelang | 98,81 | 14,22 | IPLT Dumpoh Kel. Tegalrejo Kec. Magelang Utara | Beroperasi | 21 |
| 31 | Kota Surakarta | 97,81 | 61,52 | IPLT Putri Cempo Kel. Mojosongo Kec. Jebres | Beroperasi | 50 |
| 32 | Kota Salatiga | 98 | 12,00 | IPLT Ngronggo Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo | Beroperasi | n/a |
| 33 | Kota Semarang | 92,75 | 2,99 | IPLT Tambak Lorok Kel. Terboyo Kulon Kec. Genuk | Beroperasi | 1 |
| 34 | Kota Pekalongan | 99,08 | 8,95 | IPLT Degayu Kel. Degayu Kec. Pekalongan Utara | Beroperasi | 50 |
| 35 | Kota Tegal | 75,83 | 2,32 | IPLT Muarareja Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat | Beroperasi | 8 |

*Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

### c. Infrastruktur Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai (WS) yang pengelolaanya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah WS Pemali Comal (panjang 946,35 km/luas DAS 4.898,54 km2) dan WS Bodri Kuto (panjang 377,32 km/luas DAS 1.282,85 km2).

Kondisi baik sungai kewenangan provinsi pada tahun 2023 tercatat 52,36 persen (692,56 km dari 1.323,67 km), sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 52,32 persen. Hal ini merupakan hasil kegiatan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai dan konservasi DAS.

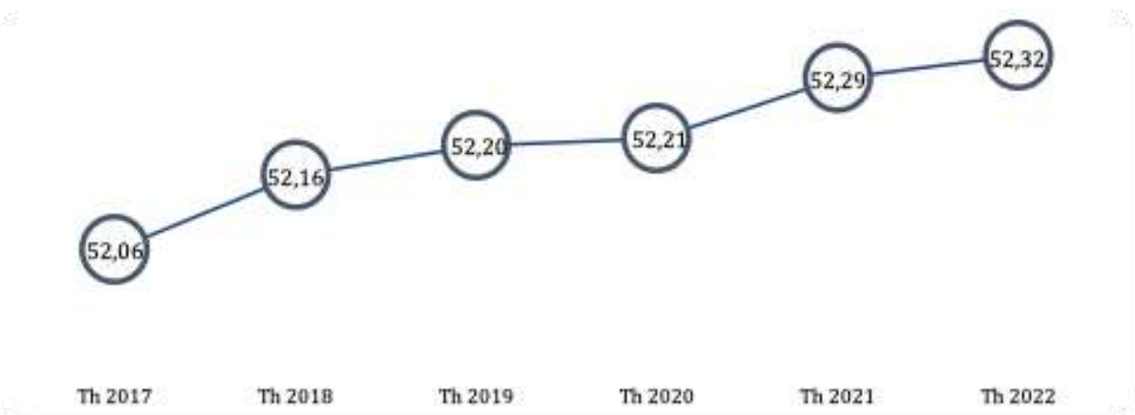


*Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.40.**
**Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022 (%)**

Kebutuhan air irigasi rata-rata pertahun sebesar 19.636.378.014 $m^3$/tahun dengan asumsi memperhitungkan/mendasarkan pada rencana kebutuhan air MT 1 (musim tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga).Dukungan terhadap ketahanan pangan ditempuh dengan pengelolaan irigasi serta pembangunan penampungan air seperti waduk dan embung.

**Tabel 2.38.**
**Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah**

| No. | Kewenangan Daerah Irigasi | Luas Area (ha) | % Dari Total Luas | Jumlah Daerah Irigasi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pusat | 347.674 | 36,45% | 37 |
| 2. | Provinsi | 86.865 | 9,11% | 108 |
| 3. | Kab/Kota | 519.265 | 54,44% | 11.401 |
| Total Jawa Tengah | | 953.804 | 100,00% | 11.546 |

*Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Namun demikian, dalam kurun waktu tahun 2016-2022 masih terdapat jaringan irigasi dalam kondisi rusak sedang hingga rusak ringan yang jumlahnya cukup besar sehingga masih perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membantu rehabilitasi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan.

**Tabel 2.39.**
**Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2017 – 2023**

| Tahun | Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Baik | | Ringan | | Sedang | | Berat | | Luas |
| | Ha | % | Ha | % | Ha | % | Ha | % | (Ha) |
| 2017 | 4.433 | 6 | 64.207 | 74 | 18.225 | 20 | 0 | 0 | 86.865 |
| 2018 | 4.941 | 7 | 63.349 | 75 | 18.575 | 18 | 0 | 0 | 86.865 |
| 2019 | 4.941 | 6 | 66.723 | 77 | 15.201 | 17 | 0 | 0 | 86.865 |
| 2020 | 4.333 | 5 | 67.178 | 77 | 15.354 | 18 | 0 | 0 | 86.865 |
| 2021 | 4.333 | 5 | 67.513 | 78 | 15.019 | 17 | 0 | 0 | 86.865 |
| 2022 | 4.333 | 5 | 67.595 | 78 | 14.937 | 17 | 0 | 0 | 86.865 |
| 2023 | 4.170 | 5 | 67.930 | 78 | 14.765 | 17 | 0 | 0 | 86.865 |

*Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Dari sisi pengelolaan irigasi, pengukuran menggunakan IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) dapat menunjukkan efektifitas fusngsi irigasi yang dikelola. Pada tahun 2017 IKSI jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada angka 74,55, namun pada akhir tahun 2023 menurun pada angka 68,87.

**Tabel 2.40.**
**Indeks Kinerja Sistem Irigasi**
**Kewenangan Provinsi Tahun 2017 – 2023**

| Tahun | IKSI Kewenagan Provinsi | Satuan |
|---|---|---|
| 2017 | 74,55 | angka |
| 2018 | 73,81 | angka |
| 2019 | 73,95 | angka |

| Tahun | IKSI Kewenagan Provinsi | Satuan |
|---|---|---|
| 2020 | 74,32 | angka |
| 2021 | 75,95 | angka |
| 2022 | 68,27 | angka |
| 2023 | 68,87 | angka |

*Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum) mengalami peningkatan dari tahun 2017 dari 58,5 persen menjadi menjadi 62,5 persen di tahun 2023.

**Tabel 2.41.**
**Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2017 – 2023**

| Uraian | Tahun | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kebutuhan Air Baku (juta $m^3$/tahun) (air minum, industri, dan lain-lain) | 745,02 | 750,25 | 755,35 | 760,33 | 760,33 | 770,08 | 774,99 |
| Ketersediaan Air Baku (juta $m^3$/tahun) (air minum, industri, dan lain-lain) | 435,84 | 456,83 | 466,78 | 466,78 | 467,62 | 477,45 | 484,4 |
| Ketersediaan Air Baku (%) | 58,5 | 60,89 | 61,8 | 61,39 | 61,50 | 62 | 62,5 |

*Sumber : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023*

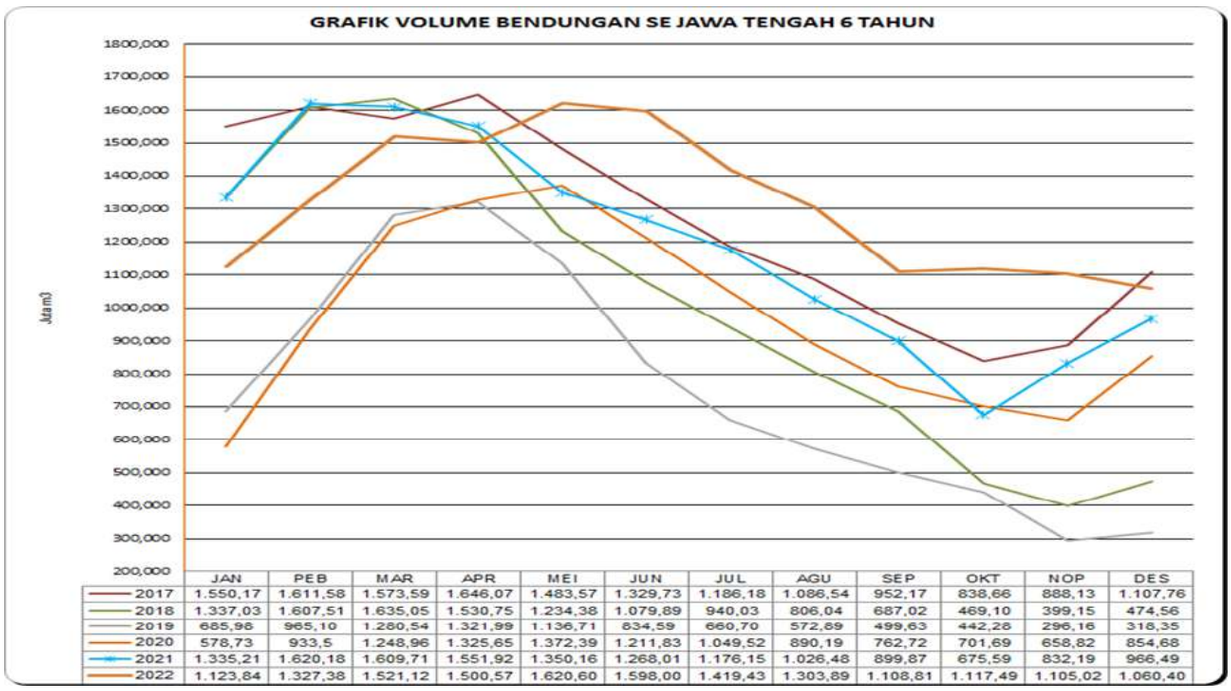


*Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.41.**
**Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta $m^3$)**
**Tahun 2017 – 2022**

Gambar diatas menunjukan bahwa ketersediaan air waduk dari tahun ke tahun memiliki pola yang hampir sama yaitu debit tertinggi berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan April dan debit terendah pada bulan Oktober sampai dengan bulan November, artinya bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan upaya agar pada saat ketersediaan air waduk mengalami penurunan kebutuhan air tetap bisa terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan air mendukung ketahanan pangan yaitu

melalui Program 1000 Embung yang sebagian besar menggunakan prinsip memanen hujan. Program 1000 embung ini diinisiasi pada tahun 2016 dan pada tahun 2023 sudah melebihi target. Tercatat sudah ada 1.162 embung yang dibangun untuk mencukupi kebutuhan air baku masyarakat. se-Jawa Tengah.

**Tabel 2.42.**
**Jumlah Embung di Jawa Tengah Berdasarkan Sumbernya**

| No | Instansi/Lembaga | Sumber Pendanaan | Embung (Lokasi) | *Long Storage (Lokasi)* | Jumlah (Lokasi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pemerintah Pusat (BBWS) | APBN | 142 | 3 | 145 |
| 2. | Pemerintah Pusat (BNPB) | APBN | 2 | - | 2 |
| 3. | Dinas PUSDATARU | APBD | 76 | 17 | 93 |
| 4. | Distanbun | APBD | 4 | - | 4 |
| | | APBN | 512 | - | 512 |
| 5. | DLHK | DAK | 390 | - | 390 |
| 6. | Pemkab (Bankeu) | APBD | 13 | - | 13 |
| 7. | CSR/TJSLP | Hibah | 3 | - | 3 |
| TOTAL | | | 1.142 | 20 | 1.162 |

*Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

**d. Jasa Konstruksi**

Sertifikasi Hasil Uji pada tahun 2022 mencapai 2.702 SHU mengalami peningkatan kondisi jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 2.312 SHU. Sedangkan pelaku jasa konstruksi yang difasilitasi di tahun 2022 sejumlah 1.260 orang bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2021 sejumlah 1.000 orang.

**Tabel 2.43.**
**Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Sertifikasi Hasil Uji (SHU) | 1.080 | 750 | 1.138 | 2.312 | 2.702 | n/a |
| 2 | Informasi Jasa Kontruksi pelaksanaan event / pameran} | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | n/a |
| 3 | Pelaku Jasa Kontruksi (orang) sosialisasi, bintek terkait jakon (peraturan jasa konstruksi, HSD, HSPK, dsb), | 2.038 | 2.798 | 3.288 | 1.000 | 1.260 | n/a |

*Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**e. Bangunan Gedung Milik Daerah**

Hingga tahun 2022, Bangunan Gedung Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1.030 komplek, Pendataan teknis Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah sudah dilakukan terhadap sejumlah 189 komplek, Bantuan Teknis untuk pengelolaan Bangunan Gedung Milik Daerah telah diberikan kepada 147 komplek bangunan Gedung.

**Tabel 2.44.**
**Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis**

| Lokasi Pendataan Teknis BGMD | TA | JUMLAH |
|---|---|---|
| BGMD Kab, Rembang + Kab, Blora | 2019 | 51 |
| BGMD Kota + Kab Pekalongan | 2021 | 36 |
| BGMD Kab, Pemalang | 2021 | 27 |
| BGMD Kab, Brebes | 2022 | 32 |
| BGMD Kota + Kab Tegal | 2022 | 43 |
| **TOTAL** | | 189 |

*Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Dari jumlah tersebut sejak tahun 2019 telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung dan telah terdata untuk 8 wilayah kabupaten/kota, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

**Tabel 2.45.**
**Hasil Pendataan Kondisi Bangunan Gedung Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2023**

| No | Lokasi | Jumlah BGMD | | Telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Komplek | Unit | Kondisi Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Khusus | Reno vasi |
| 1 | DKI Jakarta | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kab. Banjarnegara | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kab. Banyumas | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kab. Batang | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kab. Blora | 23 | 353 | 27 | 313 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Boyolali | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kab. Brebes | 32 | 405 | 0 | 365 | 26 | 9 | 0 | 5 |
| 8 | Kab. Cilacap | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kab. Demak | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kab. Grobogan | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kab. Jepara | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Kab. Karanganyar | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kab. Kebumen | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kab. Kendal | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kab. Klaten | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kota Magelang | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kota Pekalongan | 16 | 166 | 0 | 156 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Kota Salatiga | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Kota Semarang | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kota Surakarta | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Kota Tegal | 15 | 118 | 21 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kab. Kudus | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Kab. Magelang | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kab. Pati | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Kab. Pekalongan | 20 | 325 | 0 | 319 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | Kab. Pemalang | 27 | 361 | 1 | 349 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | Kab. Purbalingga | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Kab. Purworejo | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Kab. Rembang | 28 | 407 | 26 | 378 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kab. Semarang | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Kab. Sragen | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kab. Sukoharjo | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Kab. Tegal | 28 | 369 | 43 | 308 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 34 | Kab. Temanggung | 24 | - | - | - | - | - | - | - |

| No | Lokasi | Jumlah BGMD | | Telah dilakukan pendataan kondisi bangunan gedung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Komplek | Unit | Kondisi Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Kondisi Khusus | Reno vasi |
| 35 | Kab. Wonogiri | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Kab. Wonosobo | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **1.030** | **2.504** | **118** | **2.283** | **70** | **25** | **4** | **5** |

*Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023*

### 2.3.13 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

#### a. Perkembangan Jumlah dan Kebutuhan Rumah

Asumsi jumlah rumah dan rumah layak huni dihitung berdasarkan data status kepemilikan rumah yang dirilis oleh BPS. Berdasarkan data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III pada akhir tahun 2023 asumsi jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8.753.432 unit rumah dengan jumlah rumah layak huninya sebesar 68,68 % atau sebanyak 6.012.396 unit rumah.

**Tabel 2.46.**
**Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

| Kabupaten/Kota | Asumsi Jumlah Rumah | Rumah Layak Huni |
|---|---|---|
| Cilacap | 438.181 | 243.760 |
| Banyumas | 444.305 | 288.265 |
| Purbalingga | 229.028 | 129.355 |
| Banjarnegara | 234.143 | 81.224 |
| Kebumen | 307.796 | 219.828 |
| Purworejo | 187.300 | 128.170 |
| Wonosobo | 207.950 | 98.901 |
| Magelang | 336.145 | 250.025 |
| Boyolali | 264.484 | 199.183 |
| Klaten | 310.271 | 288.459 |
| Sukoharjo | 218.675 | 198.973 |
| Wonogiri | 254.457 | 223.668 |
| Karanganyar | 222.284 | 204.391 |
| Sragen | 245.387 | 192.702 |
| Grobogan | 386.315 | 189.681 |
| Blora | 235.920 | 130.275 |
| Rembang | 172.027 | 129.812 |
| Pati | 357.713 | 285.491 |
| Kudus | 213.705 | 176.414 |
| Jepara | 318.595 | 175.896 |

| Kabupaten/Kota | Asumsi Jumlah Rumah | Rumah Layak Huni |
|---|---|---|
| Demak | 307.323 | 220.904 |
| Semarang | 283.187 | 201.120 |
| Temanggung | 199.456 | 115.186 |
| Kendal | 255.416 | 164.283 |
| Batang | 193.241 | 104.157 |
| Pekalongan | 203.725 | 152.753 |
| Pemalang | 283.336 | 196.862 |
| Tegal | 300.446 | 228.970 |
| Brebes | 442.400 | 288.091 |
| Kota Magelang | 25.860 | 19.695 |
| Kota Surakarta | 104.561 | 78.045 |
| Kota Salatiga | 50.336 | 42.670 |
| Kota Semarang | 417.525 | 278.948 |
| Kota Pekalongan | 55.270 | 45.277 |
| Kota Tegal | 46.669 | 40.962 |
| **Prov. Jawa Tengah** | **8.753.432** | **6.012.396** |

*Sumber: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, 2023.*

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan backlog kepemilikan di Provinsi Jawa Tengah yaitu melalui Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat. Program Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tegah baru dimulai tahun 2020. Berikut ini adalah capaian pembangunan baru rumah di Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai sumber pembiayaan dari tahun 2019-2023.

**Tabel 2.47.**
**Pembangunan Baru Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| Tahun | Sumber Pembiayaan | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APBN | APBD Prov. | APBD Kab/Kota | Asosiasi Perumahan | CSR & Swadaya | |
| 2019 | 1.279 | - | - | 11.483 | - | 12.762 |
| 2020 | 25 | 205 | - | 30.193 | - | 30.423 |
| 2021 | 220 | 186 | – | 30.595 | 5.799 | 36.800 |
| 2022 | 2.201 | 326 | 143 | 24.709 | 224 | 27.603 |
| 2023 | 221 | 900 | 151 | 57.364 | 3.842 | 62.478 |
| **Total** | 3.946 | 1.617 | 294 | 154.344 | 9.865 | 170.066 |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2022.*

**a. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni**

Intervensi program penanganan RTLH telah dilakukan dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta. Penanganan RTLH ini dilakukan dalam rangka

mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Jawa Tengah. Adapun perkembangan penanganan RTLH dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 di Jawa Tengah dari berbagai sumber pembiayaan dapat dilihat pada tabel dan tabel berikut.

**Tabel 2.48.**
**Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019–2023**

| Tahun | Sumber Pembiayaan | | | | Verivali lapangan | JUMLAH TOTAL SESUAI LKPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APBN | APBD Prov. | APBD Kab/Kota | CSR & Swadaya | | |
| 2019 | 36.725 | 23.208 | 26.651 | 15.986 | – | 102.570 |
| 2020 | 48.809 | 10.298 | 12.855 | 3.268 | - | 75.230 |
| 2021 | 32.623 | 11.293 | 11.370 | 1.593 | 397.572 | 454.451 |
| 2022 | 35.771 | 11.487 | 12.714 | 2.659 | 231.279 (Cat. Data | 293.910 |
| 2023 | 26.542 | 16.592 | 12.229 | 2.610 | 372.771 | 430.744 |
| **Total** | **180.470** | **72.878** | **75.819** | **26.116** | **1.001.622** | **1.356.905** |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2023.*

Intervensi stimulan Peningkatan kualitas RTLH dari berbagai sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, *Corporate Social Responsibility* (CSR), BAZNAS dan lain-lain sampai dengan tahun 2023 pada data PBDT Tahun 2015 adalah sebanyak 1.071.002 unit. Sisa RTLH berdasarkan PBDT sebanyak 511.022 unit. Selain data PBDT setiap tahun terdapat penambahan RTLH melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai dengan tahun 2023 sebanyak 998.916 unit. Angka tersebut telah diintervensi dari berbagai sumber anggaran sebanyak 509.629 unit, sehingga sisa RTLH dari DTKS tersebut sebanyak 489.287 unit. Jadi total sisa RTLH yang belum tertangani (PBDT dan DTKS) sebanyak 1.000.309 unit. Penanganan RTLH dari berbagai sumber anggaran juga dilakukan diluar PBDT dan DTKS, dengan penanganan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 68.006 unit. Sehingga total RTLH yang terintervensi dari berbagai sumber anggaran sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.749.336 unit.

Penanganan RTLH dilakukan dengan dua cara yaitu bantuan stimulan material dan usulan atas kondisi rumah berdasar data yang masuk. Total bantuan stimulan RTLH dari sumber anggaran APBN sampai dengan 2023 sebanyak 180.470 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 26.542 unit. Total bantuan stimulan RTLH dari sumber anggaran APBD Provinsi sampai dengan 2023 sebanyak 72.878 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 16.592 unit. Total penanganan RTLH dari sumber anggaran APBD Kabupaten/ Kota sampai dengan 2023 sebanyak 75.819 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 12.229 unit. Total penanganan RTLH dari sumber anggaran CSR/BAZNAS/ Lainnya sampai dengan 2023 sebanyak 26.116 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 2.610 unit. Total penanganan RTLH dari verivali lapangan sampai dengan akhir Tahun 2023 sebanyak 1.001.622 unit sedangkan penanganan di tahun 2023 sebanyak 372.771 unit.

**b. Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan**

Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 (sepuluh) kawasan rawan bencana. Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan intervensi terhadap pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana Provinsi. Melalui bantuan sosial pembangunan baru rumah dan peningkatan kualitas rumah terdampak bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan. Adapun rekap penanganan rumah korban bencana pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.49.**
**Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 melalui APBD Provinsi**

| No | JENIS PENANGANAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PK Bencana** | 150 | 105 | 118 | 51 | 345 |
| 2 | **PB Bencana** | 0 | 11 | 23 | 19 | 122 |
| | **Jumlah** | **150** | **116** | **141** | **70** | **467** |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2023.*

**c. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**

Hasil verifikasi dan validasi Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh melalui SK Bupati/Walikota sampai dengan 31 Desember 2023 total kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah seluas 12.322,25 Ha yang terdiri dari baselineRPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 seluas 3.004,59 Ha dan pembaruan SK sampai dengan akhir tahun 2023 seluas 9.317,66 Ha. Adapun penanganan kawasan permukiman kumuh sampai dengan tahun 2023 tercatat seluas 5.479,30 Hayang terdiri dari lokasi baseline RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 seluas 2.717,40 Ha dan lokasi penambahan kawasan kumuh berdasarkan pembaruan SK seluas 2.761,90Ha. Dengan demikian total sisa kawasan permukiman kumuh tahun 2023 seluas 6.842,95 Ha, yang terdiri dari sisa baseline RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 seluas 287,18 Ha dan sisa dari penambahan kawasan kumuh berdasarkan pembaruan SK seluas 6.555,77 Ha.

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penanganan kawasan Permukiman Kumuh luasan 10-15 Ha.Pada Tahun 2023 telah dilakukan penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 120,20 Ha pada luasan kumuh 10-15 Ha. Total capaian kinerja penanganan kawasan permukiman kumuh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 seluas 2.717,40 Ha, dengan luasan 10-15 Ha seluas 442 Ha.

**Tabel 2.50.**

**Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani**
**Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| Kewenangan Penanganan | Luasan Kawasan Kumuh (Ha) | Penanganan Pada Tahun (Ha) | | | | | Total Penanganan s.d Tahun 2023 (Ha) | Sisa Kawasan Kumuh 2023 (Ha) | % Capaian Tahun 2023 | % Capaian Kumulatif s.d 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| Kab/ Kota (< 10 Ha) | 629,01 | 226,46 | 181,21 | 75,39 | 36,36 | 85,47 | 604,89 | 24,12 | 13,59% | 96,17% |
| Provinsi (10-15 Ha) | 474,66 | 200,06 | 35,54 | 58,42 | 27,78 | 120,20 | 442,00 | 32,66 | 25,32% | 93,12% |
| Pusat (> 15 Ha) | 1.900,92 | 350,58 | 750,33 | 363,45 | 127,91 | 78,24 | 1.670,51 | 230,40 | 4,12% | 87,88% |
| | **3.004,59** | **777,1** | **967,08** | **497,26** | **192,05** | **283,91** | **2.717,40** | **287,18** | **9,45%** | **90,44%** |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Secara detail sebaran penanganan Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.51.**

**Sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | Sisa Luasan 2023 | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | <10 | 10-15 | >15 | |
| 1 | Kab. Cilacap | 0,00 | 0,00 | 59,10 | 59,10 |
| 2 | Kab. Banyumas | 21,32 | 10,30 | 30,13 | 61,74 |
| 3 | Kab. Purbalingga | 60,30 | 48,91 | 184,39 | 293,60 |
| 4 | Kab. Banjarnegara | 83,51 | 85,47 | 288,70 | 457,68 |
| 5 | Kab. Kebumen | 150,93 | 122,05 | 36,71 | 309,70 |
| 6 | Kab. Purworejo | 4,27 | 5,60 | 0,00 | 9,87 |
| 7 | Kab. Wonosobo | 69,21 | 120,72 | 607,12 | 797,05 |
| 8 | Kab. Magelang | 116,86 | 74,66 | 53,26 | 244,78 |
| 9 | Kab. Boyolali | 0,00 | 0,00 | 31,72 | 31,72 |
| 10 | Kab. Klaten | 23,34 | 37,86 | 84,56 | 145,75 |
| 11 | Kab. Sukoharjo | 462,21 | 66,59 | 91,26 | 620,06 |
| 12 | Kab. Wonogiri | 0,00 | 22,76 | 36,09 | 58,85 |
| 13 | Kab. Karanganyar | 71,09 | 10,38 | 17,34 | 98,81 |
| 14 | Kab. Sragen | 12,48 | 3,94 | 39,39 | 55,81 |
| 15 | Kab. Grobogan | 32,65 | 0,00 | 70,64 | 103,29 |
| 16 | Kab. Blora | 37,08 | 12,16 | 276,48 | 325,72 |
| 17 | Kab. Rembang | 66,73 | 81,04 | 107,03 | 254,80 |
| 18 | Kab. Pati | 31,22 | 70,85 | 26,58 | 128,65 |
| 19 | Kab. Kudus | 25,77 | 0,00 | 60,23 | 86,01 |
| 20 | Kab. Jepara | 43,80 | 0,00 | 20,76 | 64,56 |
| 21 | Kab. Demak | 3,27 | 46,23 | 100,27 | 149,76 |
| 22 | Kab. Semarang | 34,20 | 10,28 | 269,27 | 313,75 |
| 23 | Kab. Temanggung | 3,87 | 23,91 | 93,60 | 121,38 |
| 24 | Kab. Kendal | 11,89 | 8,32 | 28,76 | 48,97 |
| 25 | Kab. Batang | 16,88 | 2,98 | 52,45 | 72,31 |
| 26 | Kab. Pekalongan | 28,16 | 36,29 | 224,67 | 289,12 |
| 27 | Kab. Pemalang | 0,00 | 0,00 | 220,82 | 220,82 |
| 28 | Kab. Tegal | 29,91 | 19,64 | 168,51 | 218,06 |
| 29 | Kab. Brebes | 333,03 | 10,72 | 126,57 | 470,32 |

| No | Kabupaten/Kota | Sisa Luasan 2023 | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | <10 | 10-15 | >15 | |
| 30 | Kota Magelang | 8,79 | 5,67 | 0,00 | 14,46 |
| 31 | Kota Surakarta | 10,12 | 0,00 | 54,69 | 64,80 |
| 32 | Kota Salatiga | 10,95 | 8,85 | 1,10 | 20,90 |
| 33 | Kota Semarang | 103,37 | 77,09 | 150,19 | 330,65 |
| 34 | Kota Pekalongan | 10,16 | 13,08 | 204,31 | 227,55 |
| 35 | Kota Tegal | 3,09 | 0,00 | 69,47 | 72,56 |
| **Jumlah** | | **1.920,45** | **1.036,31** | **3.886,18** | **6.842,95** |

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

**Tabel 2.52.**
**Capaian Sertifikasi Lahan LP2B Di Jawa Tengah Tahun 2022**

| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Jumlah Sertifikat | Jumlah Bidang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cilacap | Maos | Kalijaran | 70 | 70 |
| | | | Panisihan | 40 | 40 |
| | | | Glempang | 110 | 110 |
| | | | Karangrena | 30 | 30 |
| 2 | Blora | Kunduran | Cungkup | 100 | 100 |
| | | | Botoreco | 100 | 100 |
| 3 | Wonosobo | Mojotengah | Pungangan | 100 | 100 |
| | | Kertek | Sudungdewo | 100 | 100 |
| **Total** | | | | **650** | **650** |

### 2.3.14 Perhubungan

Kualitas pelayanan transportasi pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 diukur dari Indeks Pelayanan Transportasi yang memperhitungkan aspek **konektivitas** jaringan transportasi (Rasio Konektivitas Provinsi), tingkat **keselamatan** transportasi (Rasio Kecelakaan per 1 Juta Keberangkatan) dan kualitas pelayanan **angkutan umum** (*On Time Performance*). Perkembangan kualitas pelayanan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.53.**
**Capaian Kualitas Pelayanan Transportasi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2023**

| No | Uraian | Satuan | Provinsi | | Nasional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| | **INDEKS PELAYANAN TRANSPORTASI** | | 5,767 | 5.997 | - | - |
| **1.** | **Rasio Konektivitas Provinsi** | Angka | 0,299 | 0,373 | 0,696 | 0,763 |
| a. | Rasio Konektivitas Transportasi Darat | Angka | 0,283 | 0,340 | - | - |
| b. | Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan | Angka | 0,389 | 0,501 | - | - |
| c. | Rasio Konektivitas Trans. Laut dan ASDP | Angka | 0,230 | 0,310 | - | - |
| **2.** | **Rasio Kecelakaan Bus AKDP (1 Juta Keberangkatan)** | Angka | 16,906 | 16,698 | 19,936 | 17,64 |
| **3.** | ***On Time Performance* (OTP) Layanan Transportasi** | Angka | 82,21 | 84,19 | 74,146 | 72,592 |
| a. | OTP Angkutan Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng) | % | 86,60 | 88,20 | - | - |
| b. | OTP Kereta Api Masa Lebaran dan Nataru | % | 90,00 | 90,39 | - | - |
| c. | OTP Pesawat Masa Lebaran dan Nataru | % | 70,00 | 74,00 | - | - |
| | **INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT** | | 79,75 | 80,13 | 93,32 | 106,403 |
| 1. | Pelayanan Terminal Penumpang Tipe B | Angka | 77,67 | 79,17 | - | - |
| 2. | Pelayanan Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng) | Angka | 81,75 | 80,75 | - | - |
| 3. | Penerbitan Kartu Pengawasan (KP) dan Retribusi Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang | Angka | 82,79 | 82,56 | - | - |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

## 1. Konektivitas Jaringan Transportasi

Konektivitas jaringan transportasi terdiri dari : Angkutan Darat (terminal, trayek angkutan umum, halte Trans Jateng); Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP); Angkutan Laut; Angkutan Udara, Perkeretaapian dan Angkutan Aglomerasi Kawasan Perkotaan.

### a) Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Jawa Tengah Tahun 2023 masih didominasi oleh Tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Tabel 2.54.**
**Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023**

| No | Jumlah Terminal dan Kewenangannya | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Terminal tipe A (Pusat) | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2. | Terminal tipe B (Provinsi) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. | Terminal tipe C (Kabupaten/Kota) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| **Total Terminal di Jawa Tengah** | | **118** | **219** | **221** | **221** | **221** |

*Sumber: Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Bappeda Kab./Kota, 2024.*

Persebaran terminal tipe A dan tipe B, jika dibandingkan dengan kebutuhan mendasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2023 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 7 (tujuh) kabupaten/kota dan tipe B di 10 (sepuluh) kabupaten/kota.

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**Gambar 2.42.**
**Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah**

Jumlah kendaraan masuk ke terminal tipe B semakin meningkat dalam 2 tahun terakhir, dan masih didominasi oleh bis besar yang merupakan armada Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan juga Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

**Tabel 2.55.**
**Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B Tahun 2019 - 2023**

| No. | Jenis Kendaraan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Bis Besar | 479.583 | 202.640 | 149.252 | 271.242 | 264.998 |
| 2. | Bis Sedang | 139.951 | 71.036 | 57.057 | 77.349 | 76.828 |
| 3. | Bis Kecil | 73.979 | 64.756 | 34.883 | 58.901 | 56.000 |
| 4. | Mobil Penumpang Umum | 45.521 | 39.846 | 21.365 | 45.254 | 48.280 |
| 5. | Total | 739.034 | 378.278 | 262.557 | 452.746 | 446.106 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**b) Trayek Angkutan Umum**

Jumlah armada angkutan umum mengalami penurunan dari dari tahun ke tahun, selain merupakan lanjutan dampak dari pandemi Covid-19 juga masyarakat lebih berminat menggunakan moda angkutan pribadi.

**Tabel 2.56.**
**Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan Tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek) | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| 2. | Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek) | 269 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 3. | Angkutan wisata (kendaraan) | 4.666 | 4.666 | 3.093 | 2.754 | 2.754 |
| 4. | Jumlah bus (unit) | 12.737 | 12.737 | 12.737 | 10.825 | 6.881 |
| 5. | Mobil Penumpang Umum (unit) | 397.667 | 397.667 | 397.667 | 397.667 | 397.667 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**c) Halte Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan**

Untuk mendukung konektivitas jaringan transportasi aglomerasi perkotaan diperlukan peningkatan cakupan wilayah yang terlayani koridor Trans Jateng untuk memudahkan penumpang naik dan turun. Pemenuhan kebutuhan halte Trans Jateng dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi masih belum optimal, masih ada 36,70% yang belum terbangun.

**Tabel 2.57.**
**Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2018 – 2023**

| Koridor Trans Jateng | Inventarisasi Halte | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kebutuhan | Terbangun | | Belum Terbangun* |
| | | Aset Pemprov | Aset Kab/Kota/Swasta | |
| Kota Semarang – Bawen | 94 | 40 | 52 | 2 |
| Purwokerto – Purbalingga | 62 | 60 | 2 | 0 |
| Kota Semarang – Weleri | 53 | 40 | 13 | 0 |
| Kab. Magelang – Kutoarjo | 49 | 38 | 0 | 11 |
| Surakarta – Sumberlawang | 85 | 17 | 5 | 63 |
| Kota Semarang – Grobogan | 69 | 20 | 0 | 49 |
| Surakarta – Wonogiri | 122 | 12 | 41 | 69 |
| **Total** | **534** | **226** | **112** | **196** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*
*Catatan :* * Halte yang belum terbangun di beberapa tempat sudah dilengkapi rambu bus stop/MMT.

**d) Perhubungan Laut**

Terdapat 14 Pelabuhan yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap dan Tegal), 8

Pelabuhan Pengumpan Regional (Batang, Kendal, Jepara, Legon Bajak, Karimunjawa, Juwana, Tasik Agung dan Sluke), dan 3 Pelabuhan Lokal (Brebes, Pekalongan dan Pemalang). Pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun, sampai dengan akhir tahun 2023 proses penlimpahan aset belum diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan.

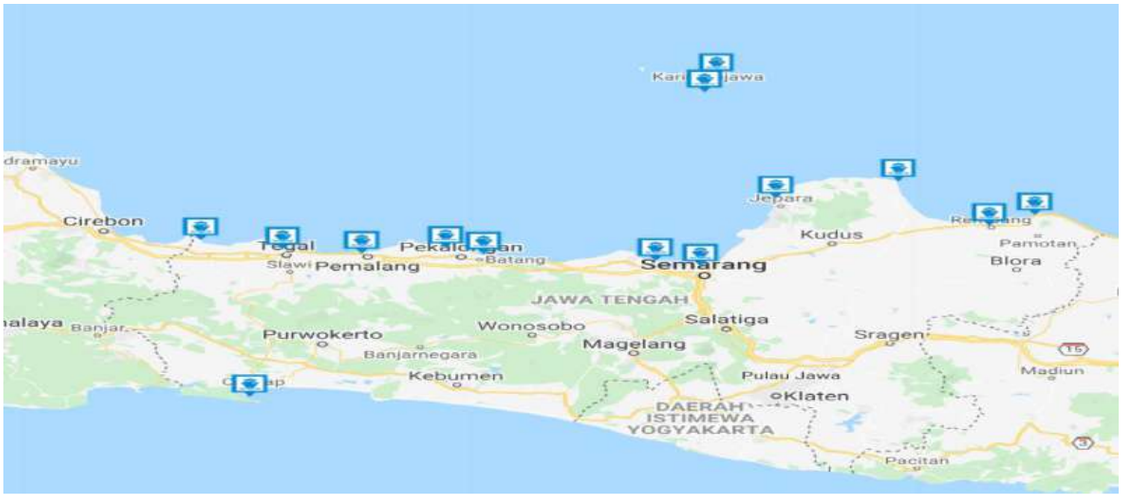


*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 2.43.**
**Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah**

Kondisi pelabuhan pengumpan regional di Jawa Tengah secara umum, laju sedimentasi pada kolam labuh dan alur pelayaran sangat tinggi yang memerlukan upaya penanganan berupa normalisasi secara berkala dengan periode 3 – 4 tahun sekali.

**e) Aktivitas Penyeberangan**

Pelabuhan penyeberangan yang ada di Jawa Tengah melayani lintas Jepara – Karimunjawa dan Semarang – Karimunjawa. KMC Kartini yang merupakan aset Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jepara yang usianya sudah tua (16 tahun) sehingga kinerjanya sudah tidak optimal. Saat ini terdapat beberapa kapal yang melayani penyeberangan ke Karimunjawa. Mendasarkan pertimbangan dimaksud, KMC Kartini dalam proses penghapusan aset. Terdapat beberapa instansi pemerintah yang berminat untuk menerima aset kapal dimaksud. Adapun kinerja dari pelayanan ASDP sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.58.**
**Perkembangan Pelayanan ASDP Tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai | 75.679 | 72.962 | 98.173 | 98.293 | 50.943 |
| 2. | Penumpang KMC. Kartini I (orang) | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Penumpang KMC. Bahari Ekspress 1 (Jepara –Karimunjawa) (orang) | 102.684 | 98.998 | 112.378 | 118.599 | 153.348 |
| 4. | Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspress 2 (Kendal –Karimunjawa) (orang) | off | off | off | off | Off |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**f) Perhubungan Udara**

Terdapat 3 bandara komersial operasional yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Boyolali dan JB. Soedirman Purbalingga, serta 3 bandara perintis operasional yaitu Bandara Dewadaru Karimunjawa Jepara, Tunggul Wulung Cilacap dan Ngloram Blora. Bandara Ngloram Blora pada Tahun 2023

mulai digunakan sebagai *feeder* jamaah umroh. Jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.59.**
**Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara Tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah bandara | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Bandara Ahmad Yani | | | | | |
| | Penumpang domestik (orang) | 3.678.104 | 1.342.341 | 884.970 | 1.618.109 | 2.100.836 |
| | Penumpang internas. (orang) | 228.700 | 35.728 | 9 | 77 | 4.867 |
| | Barang domestik (kg) | 15.788.447 | 9.157.070 | 6.763.331 | 6.222.664 | 9.797.900 |
| | Barang internasional (kg) | 2.086.421 | 239.699 | 1.212.031 | 3.578.079 | 4.341.238 |
| 3 | Bandara Adi Soemarmo | | | | | |
| | Penumpang domestik (orang) | 1.565.093 | 516.780 | 427.536 | 839.773 | 1.164.953 |
| | Penumpang internas. (orang) | 155.400 | 17.198 | 15 | 33.739 | 84.698 |
| | Barang domestik (kg) | 7.074.726 | 1.596.685 | 1.856.723 | 1.760.287 | 3.066.899 |
| | Barang internasional (kg) | 2.982.541 | - | 15.158 | 0 | 2.180 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**g) Perkeretaapian**

Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah Tahun 2023, sepanjang 1.680,26 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional (55,32%) dan 750,757 km jalur rel non aktif/belum operasional (44,68%). Posisi Jawa Tengah yang sangat strategis karena berada diantara 2 kota besar (Jakarta dan Surabaya), jalur rel di Jawa Tengah sangat padat, sehingga pembangunan rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara dan Lintas Selatan diperlukan lanjutan sampai dengan tuntas semua dengan rel ganda. Dari 929,50 km/sp rel aktif terdiri dari 292,44 km/sp jalur tunggal dan 637,06 km/sp jalur ganda.

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 2.44.**
**Peta Jaringan *Loop* Rel Kereta Api di Jawa Tengah**

**Tabel 2.60.**
**Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian Tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Penumpang (orang) | 24.638.063 | 8.318.591 | 4.982.954 | 6.434.642 | 21.498.258 |
| 2. | Barang terangkut (ton) | 2.056.546 | 1.902.245 | 2.661.209 | 2.053.983 | 2.107.754 |
| 3. | Stasiun Kereta (buah) | 106 | 106 | 115 | 115 | 116 |
| 4. | Perlintasan KA (unit) | 1.168 | 1.369 | 1369 | 1369 | 1367 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

## 2. Keselamatan Transportasi

Untuk meningkatkan keselamatan dilakukan upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi diantaranya: Pemasangan fasilitas keselamatan jalan, Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); Pelaksanaan *ramp check*; Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan; Penanganan perlintasan sebidang; dan Pemenuhan fasilitas penyeberangan sungai.

### a) Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Korban kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2019-2023, rata-rata korban jiwa setiap tahunnya sebesar ±4.000 jiwa sehingga rata-rata setiap hari terdapat 12 orang yang meninggal dunia di jalan. Pada tahun 2023, dari 54,206 kendaraan yang terlibat kecelakaan sebesar 0,69 persen atau 372 kendaraan merupakan mobil bus (AKAP, AKDP, Angkutan Kota/Pedesaan, Pariwisata).

**Tabel 2.61.**
**Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023**

| No. | Uraian | Satuan | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Laka | Kejadian | 25.962 | 21.396 | 22.521 | 30.730 | 31,425 |
| 2. | Korban MD | Jiwa | 4.141 | 3.508 | 3.750 | 4.409 | 4,302 |
| 3. | Tingkat Fatalitas/ 100.000 penduduk | Angka | 12,14 | 9,61 | 10,21 | 11,91 | 11,62 |
| 4. | Korban Luka Berat | Orang | 96 | 48 | 77 | 77 | 60 |
| 5. | Korban Luka Ringan | Orang | 30.555 | 24.495 | 25.847 | 35.869 | 36,915 |
| 6. | Kerugian Materiil | Rp. 000,- | 17.858.087 | 14.746.525 | 16.836.435 | 24.819.905 | 44.763.625.000 |

*Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, 2024.*

### b) Perlengkapan Jalan (Fasilitas Keselamatan) di Ruas Jalan Provinsi

Tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan jalan ruas jalan provinsi masih sangat rendah, namun selalu meningkat setiap tahun, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.62.**
**Perlengkapan Jalan Terpasang Tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, RPPJ, Marka, *Guard-rail*, LPJU, APILL, WL, Deliniator, Cermin Tikung, dan ATCS) terpasang (%) | 12,18 | 16,93 | 25,06 | 30,03 | 38,66 |
| 2. | Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (%) | 4,55 | 4,55 | 9,09 | 17,88 | 45,45 |
| 3. | Pemasangan Rambu Jalan (Buah) | 600 | - | 478 | 245 | 385 |
| 4. | Pemasangan RPPJ (Buah) | 60 | - | 46 | - | 29 |
| 5. | Pemasangan APILL (Unit) | 6 | - | 2 | - | 2 |
| 6. | Pemasangan *Guardrail* (*Beam*) | 290 | 30 | 176 | 31 | 116 |
| 7. | Pemasangan Marka Jalan ($m^1$) | 102.000 | - | 52.444 | 73.976 | 108.450 |
| 8. | Pemasangan LPJU (Buah) | 513 | 150 | 174 | 355 | 721 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**c) Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)**

Pada Tahun 2022 di ruas jalan provinsi masih terdapat 86 titik ruas jalan yang termasuk kategori Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang belum tertangani.

**Tabel 2.63.**
**Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Ruas Jalan Provinsi 2022 - 2023**

| No. | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP) | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DRK (Lokasi) | % | DRK (Lokasi) | % |
| 1. | BPSPP Wilayah I Kelas A (Wilayah Semarang) | 18 | 20,93 | 18 | 20,93 |
| 2. | BPSPP Wilayah II Kelas B (Wilayah Pati) | 16 | 18,60 | 16 | 18,60 |
| 3. | BPSPP Wilayah III Kelas A (Wilayah Surakarta) | 9 | 10,47 | 9 | 10,47 |
| 4. | BPSPP Wilayah IV Kelas A (Wilayah Magelang) | 14 | 16,28 | 14 | 16,28 |
| 5. | BPSPP Wilayah V Kelas B (Wilayah Banyumas) | 4 | 4,65 | 4 | 4,65 |
| 6. | BPSPP Wilayah VI Kelas A (Wilayah Pekalongan) | 25 | 29,07 | 25 | 29,07 |
| **Jumlah** | | **86** | **100%** | 86 | **100%** |

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**d) Kendaraan Laik Jalan**

Untuk meningkatkan keselamatan transportasi diperlukan peningkatan jumlah kendaraan yang laik jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangan Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan pembinaan. Semakin banyak Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji sebagai salah satu indikator penting terwujudnya keselamatan di jalan.

**Tabel 2.64.**
**Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022 - 2023**

| No. | Uraian | Tahun | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 |
| 1. | KBWU yang Diuji | 446.658 | 344.850 |
| 2. | KBWU Lulus Uji | 436.863 | 333.487 |
| 3. | KBWU Tidak Lulus Uji | 9.561 | 7.817 |
| **Jumlah** | | **446.658** | **344.850** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**e) *Ramp Check* di Terminal Tipe B Jawa Tengah**

*Ramp check* bertujuan untuk meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan. Sesuai dengan kewenangannya pelaksanaan *ramp check* dilakukan pada 23 Terminal Tipe B dengan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.65.**
**Pelaksanaan *Ramp Check* di Terminal Tipe B Tahun 2022 - 2023**

| Tahun | Jumlah Kendaraan | | | Jenis Pelanggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Diperiksa | Tidak Melanggar | Melanggar | Administrasi | Operasional | Teknis |
| 2022 | 37.564 | 28.559 | 9.005 | 8.353 | 0 | 2.000 |
| 2023 | 21.920 | 16.971 | 4.949 | 4.567 | 0 | 382 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Jawa Tengah, 2022*

**f) Perlintasan Jalur Kereta Api dengan Jalan**

Terdapat 1.369 titik perlintasan rel kereta api dengan jalan, sebagian besar di jalan kabupaten/kota, sebagian kecil berupa perlintasan tidak sebidang dan

masih banyak yang belum dilengkapi dengan palang pintu. Perlintasan sebidang di perkotaan berpotensi berkontribusi menyebabkan kemacetan dan yang belum dilengkapi dengan palang pintu berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu-lintas.

**Tabel 2.66.**

**Perlintasan Rel Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

| No | Status Jalan | Jumlah Perlintasan Dengan Rel KA | | Perlintasan Tidak Sebidang | | | | Perlintasan Sebidang | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Fly Over* | | *Underpass* | | Berpalang Pintu & Dijaga | | Tidak Ada Palang Pintu | |
| | | Jmlh | % | Jmlh | % | Jmlh | % | Jmlh | % | Jmlh | % |
| 1. | Nasional | 38 | 2.78% | 10 | 41.67% | 6 | 7.06% | 22 | 5.93% | 1 | 0.11% |
| 2. | Provinsi | 25 | 1.83% | 1 | 4.17% | 0 | 0.00% | 24 | 6.47% | 1 | 0.11% |
| 3. | Kab/Kota | 1304 | 95.39% | 13 | 54.17% | 79 | 92.94% | 325 | 87.60% | 887 | 99.78% |
| **Jumlah** | | **1.369** | **100** | **24** | **100** | **85** | **100** | **371** | **100** | **889** | **100** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**g) Fasilitas Penyeberangan Sungai**

Untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperlukan peningkatan kondisi dan kinerja angkutan penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi (kewenangan pemerintah provinsi).

**Tabel 2.67.**

**Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2023**

| No | Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota | Sisi Dermaga | Fasilitas Penyeberangan | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dermaga | Lampu Penerangan |
| 1. | Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal | Desa Lutungmati (Batang) | Permanen (2023) | Ada (2019) |
| | | Desa Tegalsari (Kendal) | Permanen (2023) | Ada (2018) |
| 2. | Sungai Kalkutho Kab. Batang – Kab. Kendal | Desa Yosorejo (Batang) | Non Permanen | Ada (2021) |
| | | Desa Jatipurwo (Kendal) | Permanen (2023) | Ada (2021) |
| 3. | Sungai Pemali Kab. Brebes – Kab. Tegal | Desa Tegalwangi (Brebes) | Non Permanen | Ada (2022) |
| | | Desa Bojong (Kab. Tegal) | Non Permanen | Ada (2022) |
| 4. | Sungai Kaligangsa Kab. Brebes – Kota Tegal | Ds Randusangawetan (Brebes) | Non Permanen | Ada (2019) |
| | | Desa Kajongan (Kota Tegal) | Non Permanen | Ada (2023) |
| 5. | Sungai Bengawan Solo Surakarta – Sukoharjo | Desa Sangkrah (Kota Surakarta) | Non Permanen | Belum Ada |
| | | Desa Gading (Sukoharjo) | Non Permanen | Belum Ada |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**3. Pelayanan Angkutan Umum**

Upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi OTP, diantaranya: peningkatan kualitas layanan angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) dan fasilitasi penyediaan angkutan umum saat *peak season* (lebaran, natal dan tahun baru).

**a) Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan**

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan di Jawa Tengah dilayani oleh Trans Jateng, kondisi Tahun 2023 telah terdapat pelayanan di 7 (tujuh) koridor sehingga dari kebutuhan masih terdapat kekurangan 7 (tujuh) koridor.

**Tabel 2.68.**
**Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan Tahun 2023**

| No. | Wilayah Aglomerasi | Jaringan Trayek |
|---|---|---|
| 1 | KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, Grobogan) | 1. Semarang – Bawen (Op. 7 Juli 2017) |
| | | 2. Semarang – Kendal (Op. 28 Oktober 2019) |
| | | 3. Semarang – Demak |
| | | 4. Semarang – Purwodadi (Op.13 Oktober 2021) |
| 2 | SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) | 5. Boyolali – Surakarta |
| | | 6. Surakarta – Sragen (Op. 3 September 2020) |
| | | 7. Surakarta – Karanganyar |
| | | 8. Surakarta – Wonogiri (Op. 8 Agustus 2023) |
| | | 9. Sukoharjo – Klaten |
| 3 | BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap & Kebumen) | 10. Purwokerto – Purbalingga (Op. 13 Agus. 2018) |
| | | 11. Purwokerto – Wangon |
| 4 | PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung | 12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur) |
| | | 13. Terminal Secang – Terminal Parakan |
| | | 14. St. Kutoarjo – Borobudur (Op. 1 Sep. 2020) |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan yang dilayani Trans Jateng memiliki kontribusi riil terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mendukung peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan (target 2030 = 32 persen). Pengguna transportasi umum diharapkan selalu meningkat seiring dengan peningkatan penumpang Trans Jateng.

**Tabel 2.69.**
**Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Tahun 2017 – 2023**

| No | Wilayah Pengembangan / Koridor TransJateng | Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 – 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total 2017-2023 |
| | **Kedungsepur** | | | | | | | |
| 1. | T. Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017) | 2.611.014 | 2.117.390 | 1.054.091 | 1.136.921 | 1.686.921 | 1.954.632 | 10.560.969 |
| 2. | T. Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019). Diperpanjang ke Weleri (Agus. 2022) | - | 178.943 | 592.411 | 682.477 | 1.235.294 | 1.479.581 | 4.168.706 |
| 3. | T. Penggaron – T. Godong – T. Gubug (Okt.2021) | - | - | - | 133.380 | 774.188 | 925.977 | 1.833.545 |
| | **Barlingmascakeb** | | | | | | | |
| 4. | Purwokerto – Purba lingga (Agus. 2018) | 351.896 | 1.141.126 | 613.804 | 673.120 | 1.261.351 | 1.344.065 | 5.385.362 |
| | **Subosukowonosraten** | | | | | | | |
| 5. | Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020) | - | - | 55.442 | 327.786 | 676.153 | 810.218 | 1.869.599 |
| 6. | Tirtonadi – Wonogiri (Agustus 2023) | - | - | - | - | - | 471.794 | 471.794 |
| | **Purwomanggung** | | | | | | | |
| 7. | Kutoarjo – Borobudur (September 2020) | - | - | 106.124 | 485.848 | 872.555 | 1.047.738 | 2.512.265 |
| | **Total 7 Koridor** | **2.962.910** | **3.437.459** | **2.421.872** | **3.439.532** | **6.506.462** | **8.034.005** | **26.802.240** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Pada tahun 2021, mulai dilakukan survey perhitungan jumlah perpindahan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) untuk mengetahui kontribusi Trans Jateng dalam meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum perkotaan. Hal ini untuk meningkatkan dukungan dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada

indikator pengguna moda transportasi umum di perkotaan. Hasil survey Kepuasan Masyarakat terkait perpindahan moda sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.70.**
**Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Tahun 2021 – 2023**

| No. | Koridor | Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng (%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Semarang-Bawen | 43,79 | 46,06 | 44,66 |
| 2. | Purwokerto-Purbalingga | 59,05 | 52,81 | 50,14 |
| 3. | Semarang-Kendal | 36,94 | 41,21 | 50,29 |
| 4. | Kutoarjo-Borobudur | 43,22 | 47,84 | 44,57 |
| 5. | Solo-Sangiran Via Sumberlawang | 49,28 | 48,16 | 55,03 |
| 6. | Semarang-Gubug Via Godong | - | 56,15 | 56,80 |
| 7. | Solo – Sukoharjo – Wonogiri | - | - | - |
| **Persentase Total Perpindahan Kendaraan Pribadi ke Trans Jateng** | | **46,39** | **48,16** | **50,12** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Proporsi biaya operasional penumpang terlayani menunjukkan tingkat efektifitas anggaran, semakin kecil proporsi semakin tinggi efektifitas anggaran yang dikeluarkan. Kinerja Trans Jateng pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari efektivitas anggaran (proporsi biaya operasional per penumpang) sebesar Rp. 13.187,- lebih efisien disbanding Tahun 2019 (sebelum pandemi). Hal yang sama untuk proporsional antara pendapatan dan biaya operasional sudah lebih tinggi (25,583%) dibandingkan Tahun 2019 (sebelum pandemi) sebesar 25,42%.

**Tabel 2.71.**
**Rekapitualasi Perbandingan Pendapatan dan Biaya Operasional Layanan Trans Jateng Tahun 2018-2023**

| Tahun | Total Operasional (Rp. 000,-) | Total Pendapatan (Rp. 000,-) | Proporsi Pendapatan & Operasional (%) | Jumlah Penumpang Terlayani (orang) | Proporsi Biaya Operasional Per Penumpang (Rp/penumpang) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4=(3:2)x100 %* | *5* | *6 = 3 : 5* |
| 2018 | 28.000.000 | 6.621.215 | 23,647 | 2.238.590 | 12.508,- |
| 2019 | 45.904.608 | 11.668.972 | 25,420 | 3.437.459 | 13.354,- |
| 2020 | 64.111.322 | 8.722.194 | 13,605 | 2.419.549 | 26.497,- |
| 2021 | 90.982.851 | 12.549.852 | 13,794 | 3.439.532 | 26.452,- |
| 2022 | 93.761.160 | 22.405.562 | 23,685 | 6.506.462 | 14.410,- |
| 2023 | 105.942.854 | 27.454.138 | 25,583 | 8.034.005 | 13.187,- |
| Total | 428.702.795 | 89.421.933 | 20,731 | 26.075.597 | 16.441,- |

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Manfaat layanan Trans Jateng yang langsung dirasakan masyarakat adalah berkurangnya biaya transportasi, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan lain dalam mendukung peningkatan kesejahteraan. Bagi pemerintah terdapat penghematan anggaran yang dikeluarkan terkait bahan bakar yang bersubsidi. Penghematan konsumsi bahan bakar selain bermanfaat untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup juga untuk memenuhi prioritas pembangunan lain.

Beralihnya masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum *(mode shifting)* dapat mengatasi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keselamatan dan

menghemat biaya peningkatan kapasitas infrastruktur jalan. Manfaat layanan Trans Jateng yang dapat dikapitasikan dibandingkan dengan biaya atau anggaran yang dikeluarkan sebagai mana tabel berikut.

**Tabel 2.72.**
**Operasional dan Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022 dan 2023**

| No. | Uraian | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 |
| 1. | Total Biaya Operasional Trans Jateng | | | |
| | a. Biaya Operasional Kendaraan (BOK) | Rp.000,- | 72.935.587 | 82.982.804 |
| | b. Biaya Tenaga Kerja (Gaji Crew) | Rp.000,- | 19.166.873 | 21.127.030 |
| | c. Biaya Prasarana (Shelter, dll) | Rp.000,- | 1.658.700 | 1.833.500 |
| | d. Total Biaya (1a+1b+1c) | Rp.000,- | 93.761.160 | 105.942.854 |
| 2. | Nilai Manfaat Layanan Trans Jateng | | | |
| | a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp.000,- | 22.405.562 | 27.454.138 |
| | b. Estimasi Penghematan Biaya Perjalanan | Rp.000,- | 36.763.473 | 45.880.510 |
| | c. Estimasi Penghematan Subsidi BBM | Rp.000,- | 12.825.370 | 14.861.343 |
| | d. Total Nilai Manfaat (2a+2b+2c) | Rp.000,- | 71.994.406 | 88.195.991 |
| 3. | Proporsi Anggaran & Manfaat (2d:1d)x100% | % | 76,78 | 83,2 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Beberapa nilai manfaat layanan angkutan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) yang belum dikapitasikan diantaranya: penurunan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas, peningkatan kualitas udara, peningkatan keselamatan lalu lintas dan pengendalian inflasi.

**b) Angkutan Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru**

Saat lebaran, natal dan tahun baru merupakan penyelenggaraan angkutan pada masa lalu lintas tinggi (*peak season*) yang melibatkan beberapa *stakeholder* untuk menciptakan kelancaran lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, dan terkendali. Setelah pandemi terdapat lonjakan pada tahun sebelumnya dikarenakan tidak diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

**Tabel 2.73.**
**Penumpang Masa Angkutan Lebaran dan Nataru Tahun 2019-2023**

| No | Jumlah Penumpang | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Lebaran** | **16.329.328** | **NA** | **7.851.683** | **24.343.824** | **30.474.683** |
| a. | Angkutan Umum | 8.179.814 | NA | 5.295.715 | 15.477.634 | 17.895.047 |
| b. | Pribadi | 8.149.514 | NA | 2.555.968 | 8.866.190 | 12.579.636 |
| | | | | | | |
| 2. | **Nataru** | **11.482.975** | **NA** | **15.653.528** | **16.978.216** | **17.072.434** |
| a. | Angkutan Umum | 3.660.441 | NA | 11.446.488 | 9.986.033 | 11.803.434 |
| b. | Pribadi | 7.822.534 | NA | 4.207.039 | 6.992.183 | 5.269.000 |
| **Total** | | **27.812.303** | **NA** | **23.505.211** | **41.322.039** | **47.547.137** |

*Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

### 2.3.15 Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Desa

Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Untuk memotret

perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan PDTT dengan gambaran sebagai berikut.

dari data tersebut, pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal. Desa dengan status tertinggal berkurang dari 266 pada tahun 2020 menjadi 147 di tahun 2021. Di Tahun 2021 status desa mandiri mengalami peningkatan dari 140 di tahun 2020 menjadi 199 pada tahun 2021. Selanjutnya salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Tengah adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

**Tabel 2.74.**
**Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah Lanjut Usia terlantar Tahun 2019-2023**

| No | Jenis Lembaga Ekonomi Desa | Jumlah (unit) s.d. Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | BUMDesa | 4.215 | 5.539 | 6.776 | n/a | n/a |
| 2 | Pasar desa | 1.349 | 1.671 | 1.671 | n/a | n/a |
| 3 | UED-SP | 1.029 | 1.029 | 1.029 | n/a | n/a |
| 3 | UP2K-PKK | 22.326 | 22.326 | 22.326 | n/a | n/a |

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2017-2021 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa meningkat signifikan dari 2.230 unit di tahun 2017 menjadi 6.776 unit di tahun 2021. Untuk melihat perkembangan BUMDes berdasarkan Klasifikasi pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.75.**
**Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021**

| NO | KABUPATEN | JML DESA | PENILAIAN BUMDES 2021 | | | | | KETERANGAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DASAR | TUMBUH | BERKEMBANG | MAJU | JUMLAH | *2021 BARU* | *% progres input* | *pertumbuhan BUMDES 2020-2021* |
| 1 | Banjarnegara | 266 | 103 | 67 | 1 | - | 171 | - | 100 | 0,00% |
| 2 | Banyumas | 301 | 120 | 153 | 23 | 3 | 299 | 30 | 100 | 10,03% |
| 3 | Batang | 239 | 132 | 68 | 7 | 1 | 208 | 86 | 100 | 41,35% |
| 4 | Blora | 271 | 131 | 101 | 10 | 3 | 245 | 40 | 100 | 16,33% |
| 5 | Boyolali | 261 | 84 | 96 | 16 | 4 | 200 | 66 | 100 | 33,00% |
| 6 | Brebes | 292 | 116 | 161 | 14 | 1 | 292 | 10 | 100 | 3,42% |
| 7 | Cilacap | 269 | 59 | 179 | 27 | 4 | 269 | 18 | 100 | 6,69% |
| 8 | Demak | 243 | 111 | 67 | 7 | - | 185 | 69 | 100 | 37,30% |
| 9 | Grobogan | 273 | 163 | 99 | 7 | 4 | 273 | 11 | 100 | 4,03% |
| 10 | Jepara | 184 | 81 | 93 | 10 | - | 184 | - | 100 | 0,00% |
| 11 | Karanganyar | 162 | 80 | 65 | 8 | 1 | 154 | 37 | 100 | 24,03% |
| 12 | Kebumen | 449 | 78 | 275 | 44 | 5 | 402 | 13 | 100 | 3,23% |
| 13 | Kendal | 266 | 124 | 91 | 6 | 1 | 222 | 75 | 100 | 33,78% |
| 14 | Klaten | 391 | 157 | 177 | 34 | 12 | 380 | 49 | 100 | 12,89% |
| 15 | Kudus | 123 | 41 | 3 | 1 | - | 45 | 13 | 100 | 28,89% |
| 16 | Magelang | 367 | 137 | 167 | 23 | 6 | 333 | 144 | 100 | 43,24% |

| NO | KABUPATEN | JML DESA | PENILAIAN BUMDES 2021 | | | | | KETERANGAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DASAR | TUMBUH | BERKEMBANG | MAJU | JUMLAH | *2021 BARU* | *% progres input* | *pertumbuhan BUMDES 2020-2021* |
| 17 | Pati | 401 | 222 | 172 | 5 | 2 | 401 | - | 100 | 0,00% |
| 18 | Pekalongan | 272 | 91 | 85 | 8 | 7 | 191 | 56 | 100 | 29,32% |
| 19 | Pemalang | 211 | 106 | 93 | 9 | 3 | 211 | - | 100 | 0,00% |
| 20 | Purbalingga | 224 | 98 | 75 | 25 | 4 | 202 | 49 | 100 | 24,26% |
| 21 | Purworejo | 469 | 152 | 240 | 20 | 5 | 417 | 43 | 100 | 10,31% |
| 22 | Rembang | 287 | 144 | 69 | 8 | 5 | 226 | 90 | 100 | 39,82% |
| 23 | Semarang | 208 | 51 | 107 | 15 | 1 | 174 | 44 | 100 | 25,29% |
| 24 | Sragen | 196 | 110 | 80 | 1 | 1 | 192 | 4 | 100 | 2,08% |
| 25 | Sukoharjo | 150 | 45 | 77 | 3 | - | 125 | 55 | 100 | 44,00% |
| 26 | Tegal | 281 | 63 | 97 | 18 | 4 | 182 | 83 | 100 | 45,60% |
| 27 | Temanggung | 266 | 43 | 150 | 11 | 1 | 205 | - | 100 | 0,00% |
| 28 | Wonogiri | 251 | 97 | 122 | 6 | - | 225 | 80 | 100 | 35,56% |
| 29 | Wonosobo | 236 | 114 | 44 | 3 | 2 | 163 | 72 | 100 | 44,17% |
| | **JUMLAH** | **7.809** | 3.053 | 3.273 | 370 | 80 | **6.776** | **1.237** | 100 | **0,18355608** |

Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit (1,02 persen) dan kategori berkembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit (1,02 persen) dan kategori berkembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang. Pembangunan di desa dilaksanakan dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan.

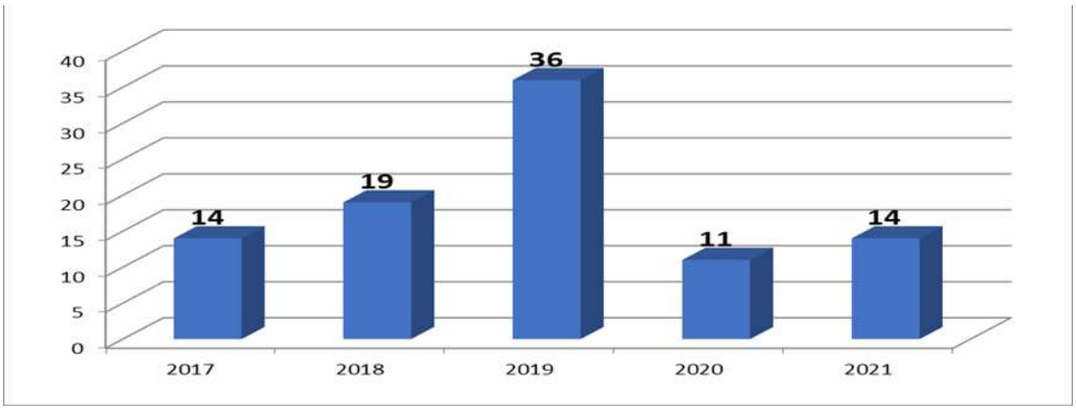


**Gambar 2.45.**
**Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021**

Walaupun dari sisi kuantitas meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

## 2.4. Kondisi Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Jawa Tengah dilakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Gambaran kinerja hasil pembangunan sumber daya manusia Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga), dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing didukung kinerja berbagai sektor antara lain pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Gambaran keseluruhan kondisi sumber daya manusia sebagaimana diuraikan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

### 2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak. Ketiga dimensi tersebut diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai dimensi kesehatan serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai dimensi kehidupan layak. Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata *geometric*, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019 hingga 2023, namun masih berada di bawah capaian nasional, demikian pula dengan laju pertumbuhannya.

Capaian tiga komponen IPM yaitu RLS, HLS dan Pengeluaran per kapita disesuaikan berada di bawah nasional, namun tidak demikian halnya dengan

komponen UHH yang berada di atas nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional.

RLS Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, namun laju pertumbuhan mulai menurun dari tahun 2022 baik nasional maupun Jawa Tengah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat RLS menunjukkan gambaran rata-rata tingkat pendidikan yang ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Tengah. Upaya intervensi melalui pendidikan non formal dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan RLS di Jawa Tengah.

Berbeda dengan RLS, HLS Jawa Tengah dan nasional menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan mulai tahun 2022. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya penyediaan layanan pendidikan mengalami peningkatan, sehingga diharapkan Program Wajar 13 Tahun dapat tercapai.

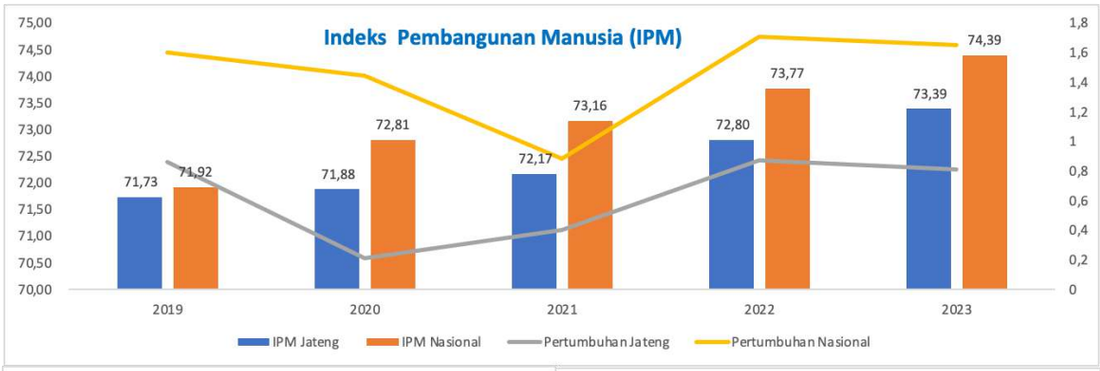


*Sumber: BPS, 2023*

**Gambar 2.46.**
**IPM Jateng dan Nasional Tahun 2019-2023**

### 2.4.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa. Keluarga juga menjadi lingkungan pertama dan utama untuk pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral, cinta kasih, agama, moral, budaya dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat, sehingga terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas masa depan bangsa. Terkait dengan pembangunan keluarga telah dirilis indeks Pembangunan Keluarga oleh BKKBN yang merupakan indeks untuk mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan. Capaian Ibangga Jawa Tengah periode 2021 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang meningkat yaitu dari 56,1 menjadi 63,07 dan masuk pada kategori berkembang. Angka Ibangga Jawa Tengah juga lebih baik dari nasional yang senada dengan Jawa Tengah mengalami perkembangan meningkat yaitu dari 54,01 di tahun 2021 menjadi 61,43 di tahun 2023.

*Sumber: BKKBN, 2023*

**Gambar 2.47.**
**Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2023**

### 2.4.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Ketimpangan gender diukur dari indeks komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPG Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2019-2023 berada di atas nasional dan menunjukkan tren kecenderungan yang terus meningkat. Namun demikian, trend peningkatan Jawa Tengah mulai melambat dan sebaliknya pada angka nasional mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga mulai mengejar angka Jawa Tengah. Perlu untuk diperkuat kembali untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih berkualitas.

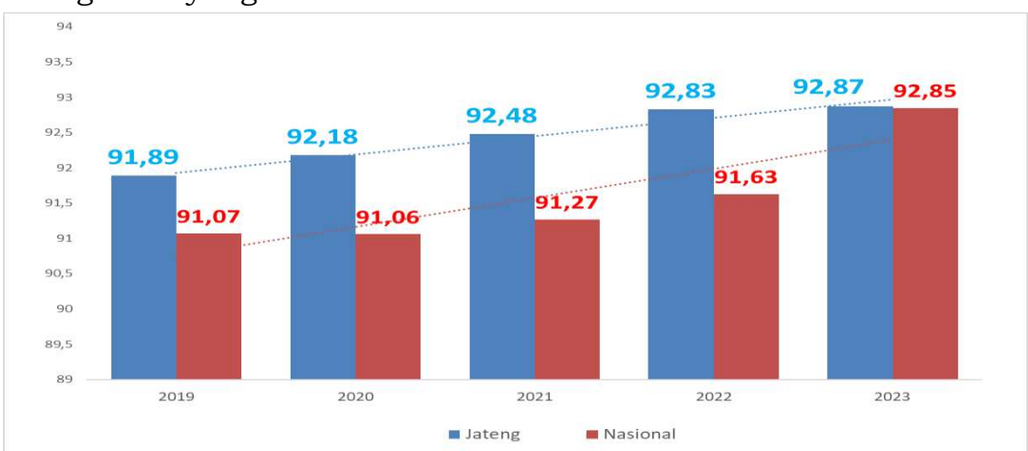


*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

**Gambar 2.48.**
**Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023**

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2023, diketahui bahwa komponen Usia Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan selalu

tertinggal dibandingkan laki-laki. Atas kondisi tersebut maka aspek pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesadaran di sektor pendidikan bagi perempuan menjadi kunci agar tercipta kesetaraan gender. Sementara itu bagi laki-laki, pola/gaya hidup yang kurang sehat perlu untuk di reduksi agar laki-laki memiliki harapan hidup yang lebih berimbang dibanding perempuan.

Pada tahun 2023 UHH perempuan di Jawa Tengah telah mencapai 76,62 tahun, sementara laki-laki mencapai 72,95 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti, indikasi tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Di sisi yang lain, selisih UHH antara perempuan dan laki-laki di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa kedepannya, fenomena female advantages tidak terjadi di Jawa Tengah. Sementara itu pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023, HLS perempuan adalah 13,03 tahun dan laki-laki sebesar 12,76 tahun, peningkatan HLS antara laki-laki dan perempuan di tahun 2023 mengalami peningkatan yang sama yaitu sebesar 0,04 dibanding tahun 2022 mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan secara merata dalam waktu yang tidak lama.

Rata-rata lama sekolah Jawa Tengah tahun 2023 untuk laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan yaitu laki laki adalah sekitar 8,42 tahun, sedangkan perempuan 7,62 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SMP kelas 1. Capaian tahun 2023 untuk Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan gap yang kian meningkat dimana selisih RLS antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya (tahun 2022) 0,76 kini menjadi 0,8. Sementara itu dari sisi pertumbuhan, sektor perempuan (0,07) lebih rendah dibanding laki-laki (0,11). Oleh sebab itu penting untuk mendorong kaum perempuan untuk sekolah lebih tinggi.

Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar 10,513 juta rupiah per kapita per tahun, jauh di bawah laki-laki sebesar 16,102 juta rupiah per kapita per tahun. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya. Selain itu juga karena perempuan lebih banyak berada pada sektor usaha informal atau nonformal yang terkadang tidak tercatat resmi.

**Tabel 2.76.**
**Perkembangan Komponen IPG 2019-2023 Provinsi Jawa Tengah**

| Komponen IPG | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| RLS Laki-Laki | 8,06 | 8,16 | 8,17 | 8,31 | 8,42 |
| RLS Perempuan | 7,03 | 7,24 | 7,34 | 7,55 | 7,62 |
| | | | | | |
| HLS Laki-Laki | 12,69 | 12,70 | 12,71 | 12,72 | 12,76 |
| HLS Perempuan | 12,66 | 12,79 | 12,93 | 12,99 | 13,03 |
| | | | | | |
| AHH laki-Laki | 72,33 | 72,51 | 72,61 | 72,71 | 72,95 |
| AHH Perempuan | 76,16 | 76,3 | 76,42 | 76,53 | 76,62 |

| Komponen IPG | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| PENGELUARAN PER KAPITA laki-Laki | 15,279 | 15,031 | 15,253 | 15,606 | 16,102 |
| PENGELUARAN PER KAPITA Perempuan | 9,895 | 9,274 | 9,805 | 10,098 | 10,513 |

*Sumber: BPS, 2024*

### 2.4.4 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Tengah sejak tahun 2018-2022 mengalami tren menurun yaitu dari 0,389 menjadi 0,371. Tren penurunan ini memberikan arti bahwa ketimpangan gender yang terjadi di Jawa Tengah semakin mengecil atau kesetaraan gender yang semakin membaik, namun upaya mereduksi ketimpangan masih perlu terus dilakukan guna meningkatkan kesetaraan gender yang lebih baik lagi dimasa mendatang. Dilihat dari indicator pembentuk dimensi IKG terdapat beberapa indicator yang mengalami perkembangan membaik namun ada juga yang mengalami perkembangan memburuk.

Pada **dimensi kesehatan reproduksi** terdapat dua indictor pembentuk yaitu proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). MTF membaik dari 0,066 pada tahun 2018 menjadi 0,042 pada tahun 2022, sedangkan MHPK20 memburuk dari 0,222 di tahun 2018 menjadi 0,264 di tahun 2022. Dimensi ini memberikan sinyal bagi Jawa Tengah untuk terus berupaya meningkatkan layanan akses Kesehatan bagi ibu hamil melahirkan, disisi lain juga pencegahan pernikahan dini penting untuk terus dilakukan guna mereduksi persalinan beresiko diusia dini.

**Dimensi pemberdayaan** dibentuk dua indicator yaitu presentase keterwakilan dilegislatif dan presentase pendidikan SMA ke atas. Keterwakilan legislatif perempuan cukup rendah dibanding laki-laki dan mengalami tren yang menurun yaitu dari 22% di tahun 2018 menjadi 20% ditahun 2022, sedangkan Pendidikan SMA ke atas tercatat perempuan hanya berkontribusi 23,21% di tahun 2018 meningkat 5,58% menjadi 28,79% di tahun 2022. Peningkatan ini melebihi laki-laki yang hanya meningkat sebesar 4,79% sehingga ke depan memberikan harapan bagi Perempuan untuk mengejar ketertinggalannya dengan laki-laki dalam pendidikan.

**Dimensi pasar tenaga kerja** direpresentasikan dengan indicator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama kurun waktu 2018-2022 TPAK perempuan dan laki-laki semakin meningkat. TPAK perempuan pada tahun 2018 sebesar 56,43 persen menjadi 58,31 persen pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 1,88 persen. Sedangkan TPAK laki-laki pada tahun 2018 sebesar 81,59 persen menjadi 83,74 persen pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 2,15 persen. Nilai TPAK perempuan dan laki-laki sama-sama meningkat, namun peningkatan TPAK perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki membuat kesempatan memasuki pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki menjadi belum setara.

**Tabel 2.77.**
**Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender 2018-2022**

| Komponen IKG | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Dimensi Kesehatan Reproduksi*** | | | | | | |
| Proporsi perempuan yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitasi kesehatan (MTF) | | 0,066 | 0,04 | 0,041 | 0,042 | 0,042 |
| Proporsi 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia <20 tahun (MHPK20) | | 0,222 | 0,259 | 0,254 | 0,267 | 0,264 |
| ***Dimensi Pemberdayaan*** | | | | | | |
| Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA | laki-laki | 29,35 | 30,94 | 32,85 | 32,26 | 34,14 |
| | perempuan | 23,21 | 23,94 | 26,97 | 26,82 | 28,79 |
| Persentase anggota legislatif | laki-laki | 78 | 80,83 | 81,2 | 81,67 | 80 |
| | perempuan | 22 | 19,17 | 18,8 | 18,33 | 20 |
| ***Dimensi Ekonomi*** | | | | | | |
| Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) | laki-laki | 81,59 | 82,78 | 81,68 | 81,94 | 83,74 |
| | perempuan | 56,43 | 55,35 | 57,54 | 57,58 | 58,31 |

### 2.4.5 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kontribusi kebudayaan dalam pembangunan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Namun demikian, pembangunan kebudayaan di Jawa tengah menghadapi tantangan tersendiri, yaitu menurunnya nilai pembangunan kebudayaan yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dalam kurun waktu 2020-2021 sebagai dampak dari pandemi Cov-19. IPK dibentuk melalui 7 dimensi yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan bersifat lintas sektor, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.78.**
**Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018-2023**

| Dimensi IPK | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ekonomi Budaya | 37,67 | 44,45 | 37,17 | 25,96 | 44,00 | 45,11 |
| Pendidikan | 69,71 | 71,46 | 72,64 | 71,21 | 73,56 | 73,50 |
| Ketahanan Sosial Budaya | 79,57 | 80,30 | 80,97 | 72,37 | 74,02 | 75,61 |
| Warisan Budaya | 55,16 | 51,95 | 45,58 | 50,12 | 52,31 | 53,13 |
| Ekspresi Budaya | 44,70 | 45,45 | 43,69 | 34,79 | 41,59 | 46,35 |
| Budaya Literasi | 51,64 | 56,67 | 59,90 | 50,00 | 53,36 | 56,63 |
| Gender | 60,05 | 58,95 | 58,57 | 58,28 | 58,88 | 59,61 |
| **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah** | **60,05** | **60,94** | **59,12** | **55,24** | **59,43** | **60,89** |
| **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional** | **53,74** | **55,91** | **54,65** | **51,9** | **55,13** | **57,13** |

*Sumber: Kemendikbud, 2024*

Beberapa dimensi pembentuk IPK Jawa Tengah mengalami penurunan kinerja atau pertumbuhan yang lebih rendah, seperti ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya dan budaya literasi, meskipun secara absolut ke-6 dimensi tersebut cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain dimensi pembentuk IPK, beberapa indikator pada masing-masing dimensi juga mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan cukup tajam pada indikator persentase satuan

pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan/atau seni budaya sebesar -2,73%, yang merupakan pembentuk dimensi pendidikan. Hal tersebut berpengaruh pada penurunan nilai absolut dimensi pendidikan yang sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Rendahnya capaian dimensi ekonomi budaya mengindikasikan bahwa minat masyarakat yang menurun untuk menjadikan aktivitas seni budaya sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena "pasar budaya lokal" di Jawa Tengah belum memberikan reward yang menjanjikan untuk para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini.

Hal serupa pada rendahnya capaian dimensi ekspresi budaya menunjukkan indikasi bahwa ada kecenderungan peralihan cara masyarakat untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yaitu melalui media digital. Sementara itu, pengukuran dimensi ekspresi budaya (indikator) masih terbatas pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat, kegiatan organisasi, penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni, dan rumah tangga yang menyelenggarakan/menghadiri acara adat. Pada dimensi ekspresi budaya, penurunan angka didorong oleh menurunnya indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni. Meskipun demikian jumlah pelaku atau pendukung seni di Jawa Tengah cukup banyak, mencapai 1.967 kelompok yang terbagi menjadi 7 kelompok jenis seni yaitu Seni Media, Rupa, Film, Sastra, Musik, Teater dan Tari.

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan sebagai penggerak roda pembangunan berkelanjutan bukan merupakan hal yang baru. Unsur kebudayaan menjadi hal penting yang patut diperhatikan, saat arah pembangunan berkelanjutan saat ini tidak hanya bertumpu pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan semata.

Dengan segala karakteristik penduduknya, keanekaragaman budaya di Jawa Tengah merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, rancangan kebijakan yang berfokus kepada pengembangan dan pelestarian budaya, sekaligus sebagai *booster* untuk mendorong laju pembangunan perlu dilakukan. Isu-isu sosial budaya yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga perwujudan agenda SDGs (*Goals* 11.4 Mempromosikan dan Menjaga Warisan Budaya Dunia dan Warisan Alam Dunia) dapat dipetakan dengan baik.

Pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017). Upaya tersebut dilakukan untuk memajukan objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Data perkembangan OPK yang tersedia di Jawa Tengah dijelaskan dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.79.**
**Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jawa Tengah Tahun 2023**

| KABUPATEN / KOTA | TRAD. LISAN | MANUSKRIP | ADAT ISTIADAT | PERMAINAN RAKYAT | OR TRADISIONAL | PENGETAHUAN TRAD | TEKNOLOGI TRAD | SENI | BAHASA | RITUS | TERCATAT | ICH UNESCO | DITETAPKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Tengah | 0 | 1 | 16 | 1 | 6 | 17 | 5 | 9 | 0 | 3 | 58 | 5 | 8 |
| Kabupaten Banjarnegara | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Kabupaten Banyumas | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 19 | 0 | 7 |
| Kabupaten Batang | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Kabupaten Blora | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 |
| Kabupaten Boyolali | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| Kabupaten Brebes | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 31 | 0 | 4 |
| Kabupaten Cilacap | 13 | 2 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 97 | 6 | 15 | 16 | 0 | 4 |
| Kabupaten Demak | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 22 | 0 | 1 |
| Kabupaten Grobogan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Kabupaten Jepara | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 |
| Kabupaten Karanganyar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| Kabupaten Kebumen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Kabupaten Kendal | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| Kabupaten Klaten | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| Kabupaten Kudus | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 |
| Kabupaten Magelang | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
| Kota Magelang | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kabupaten Pati | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Kabupaten Pekalongan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| Kota Pekalongan | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kabupaten Pemalang | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2 |
| Kabupaten Purbalingga | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| Kabupaten Purworejo | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Kabupaten Rembang | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kota Salatiga | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Kabupaten Semarang | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Kota Semarang | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 |
| Kabupaten Sragen | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Kabupaten Sukoharjo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Kota Surakarta | 47 | 23 | 28 | 1 | 1 | 44 | 21 | 44 | 0 | 3 | 207 | 0 | 38 |
| Kabupaten Tegal | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 |
| Kota Tegal | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kabupaten Temanggung | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| Kabupaten Wonogiri | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Kabupaten Wonosobo | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 | 6 |
| Total | 103 | 28 | 274 | 15 | 9 | 143 | 93 | 264 | 8 | 38 | 745 | 5 | 135 |

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Cagar Budaya (CB) tidak menjadi bagian dari WBTB, berikut data Cagar Budaya di Jawa Tengah mencapai 1.982 (terdiri dari 665 Benda Cagar Budaya, 830 Bangunan Cagar Budaya, 319 Struktur Cagar Budaya, 142 Situs Cagar Budaya, dan 26 Kawasan Cagar Budaya) serta 9 Objek belum dapat teridentifikasi.

### 2.4.6 Indeks Pembangunan Olahraga

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit. Ada tiga faktor yang berdampak pada partisipasi olahraga, yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor sosial budaya. Peran olahraga mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik yang baik. Selain bermanfaat untuk jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter.

Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat.

*Sport Development Index* (SDI) merupakan metode pengukuran keberhasilan pembangunan olahraga di Indonesia. Terdapat 9 dimensi dalam SDI, yaitu ketersediaan SDM olahraga, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran jasmani, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, performa, dan ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada indeks pembangunan olahraga/*Sport Development Index* (SDI).

Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuatif, sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.80.**

**Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2022**

| Tahun | Angka *Sport Development Index* (SDI) Jawa Tengah |
|---|---|
| 2019 | 0,55 |
| 2020 | 0,60 |
| 2021 | 0,34 |
| 2022 | 0,37 |

*Sumber: Laporan Nasional Sport Development Index (SDI) Kemenpora Tahun 2022*

### 2.4.7 Pendidikan

Keberhasilan pencapaian Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun salah satunya ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan. Partisipasi pendidikan digambarkan sebagai jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan merupakan salah satu indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Capaian SPM Pendidikan Jawa Tengah berdasarkan Rapor Pendidikan-Kemdikbud masih kurang yaitu 72,71 kategori Tuntas Pratama. Semakin tinggi jenjang pendidikan kecenderungan partisipasi pendidikan semakin turun, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.84.

**Tabel 2.81.**

**Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Tengah (Persen) Tahun 2018-2023**

| Tahun | PENDUDUK KELOMPOK UMUR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-12 | | | 13-15 | | | 16-18 | | |
| | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tdk Sekolah Lagi |
| 2018 | 0,15 | 99,76 | 0 | 0,35 | 95,79 | 3,86 | 0,35 | 69,02 | 30,63 |
| 2019 | 0,05 | 99,77 | 0,18 | 0,11 | 96,11 | 3,78 | 0,49 | 69,65 | 29,86 |
| 2020 | 0,22 | 99,73 | 0,05 | 0,24 | 96,37 | 3,39 | 0,28 | 70,14 | 29,58 |
| 2021 | 0,32 | 99,66 | 0,02 | 0,32 | 96,84 | 2,84 | 0,28 | 70,80 | 28,92 |
| 2022 | 0,31 | 99,58 | 0,11 | 0,27 | 96,77 | 2,97 | 0,29 | 70,82 | 28,89 |
| 2023 | 0,30 | 99,57 | 0,13 | 0,27 | 97,08 | 2,65 | 0,16 | 70,87 | 28,97 |

*Sumber: Susenas, BPS (2023)*

Data Susenas BPS memperlihatkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi, yang kemudian dikategorikan sebagai kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS). Hasil olahan terhadap data Susenas mencatat bahwa tahun 2023 jumlah ATS Usia 7-18 tahun di Jawa Tengah sebesar 552.033 jiwa.

**Tabel 2.82.**
**Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

| TAHUN | Usia 7-12 th | | Usia 13-15 th | | Usia 16-18 th | | Jumlah ATS Usia 7-18 th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | Tdk/Blm Pernah Sekolah | Tdk Sekolah Lagi | |
| **2018** | 5.031 | - | 5.814 | 64.117 | 6.204 | 542.899 | 624.065 |
| **2019** | 1.688 | 6.075 | 1.821 | 62.577 | 8.253 | 502.951 | 583.365 |
| **2020** | 7.909 | 1.798 | 4.046 | 57.157 | 4.816 | 508.724 | 584.449 |
| **2021** | 10.494 | 656 | 5.340 | 47.390 | 4.715 | 486.980 | 555.575 |
| **2022** | 10.110 | 3.587 | 4.499 | 49.485 | 4.883 | 486.438 | 559.002 |
| **2023** | 9.748 | 4.224 | 4.478 | 43.947 | 2.689 | 486.948 | 552.033 |

*Sumber: Susenas, BPS, diolah (2024)*

Kondisi ini memperlihatkan perlunya penanganan secara serius terhadap ATS di Jawa Tengah, mengingat penanganan ATS juga merupakan bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pendidikan sepanjang hayat untuk semua. Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya partisipasi pendidikan khusus untuk penduduk disabilitas usia 4-18 tahun yaitu sebesar 23,21% (Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud 2023).

Selain partisipasi pendidikan, akses pemerataan layanan pendidikan juga perlu untuk diperhatikan. Akses pemerataan layanan pendidikan yang direpresentasikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional.APK SMA/SMK/Sederajat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 mampu tumbuh hingga 1,16 persen dari tahun 2022. Pertumbuhan tersebut bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan APK SMA/SMK/Sederajat Nasional yang hanya tumbuh sebesar 0,99 persen.

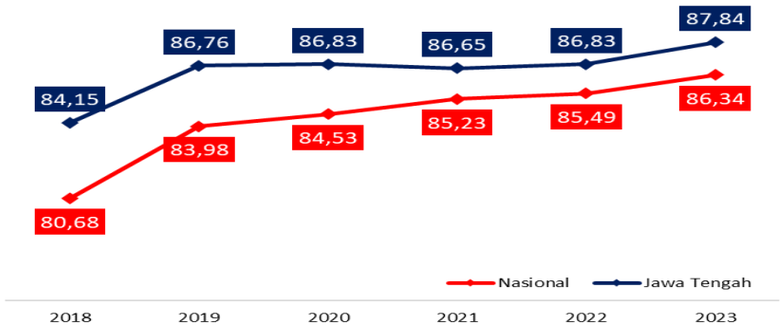


*Sumber: BPS, 2023*

**Gambar 2.49.**
**APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023**

Meskipun secara nasional capaian APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah lebih baik, namun distribusi akses layanan pendidikan di 35 kab/kota belum merata. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.111, dimana APK SMA/SMK/Sederajat di 35 kabupaten/kota sangat bervariasi dari kisaran 50% hingga di atas 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya gap atau kesenjangan yang cukup tinggi antar kabupaten dan kota. Persoalan kesenjangan dan distribusi pemerataan akses layanan pendidikan telah diupayakan untuk diatasi oleh

pemerintah, salah satunya melalui zonasi pendidikan. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan, tidak hanya secara distribusi akses namun juga kualitas layanan pendidikan. Zonasi juga dianggap efektif, hal ini terlihat pada perkembangan angka APK Kabupaten Pati yang cenderung mengalami peningkatan sementara APK Kabupaten Demak cenderung menurun yang berarti dapat diindikasikan adanya pemerataan antar wilayah. Melalui zonasi ini diharapkan wilayah kota bukan satu-satunya tempat dan tujuan favorit untuk menempuh pendidikan.

**Tabel 2.83.**

**Sebaran APK SMA/SMK/Sederajat di Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023**

| Kabupaten/Kota | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROVINSI JAWA TENGAH** | **86,76** | **86,83** | **86,65** | **86,83** | **87,84** |
| Kabupaten Cilacap | 91,42 | 91,73 | 91,50 | 91,40 | 89,79 |
| Kabupaten Banyumas | 101,68 | 100,42 | 108,66 | 107,57 | 93,18 |
| Kabupaten Purbalingga | 71,56 | 71,28 | 69,89 | 71,77 | 80,89 |
| Kabupaten Banjarnegara | 71,90 | 71,37 | 70,02 | 68,95 | 61,98 |
| Kabupaten Kebumen | 104,39 | 103,71 | 102,46 | 102,43 | 96,59 |
| Kabupaten Purworejo | 92,67 | 93,63 | 95,57 | 95,41 | 96,81 |
| Kabupaten Wonosobo | 55,20 | 56,29 | 57,43 | 57,08 | 67,37 |
| Kabupaten Magelang | 70,56 | 70,13 | 67,70 | 68,84 | 82,84 |
| Kabupaten Boyolali | 81,37 | 80,40 | 79,36 | 79,22 | 99,06 |
| Kabupaten Klaten | 109,20 | 108,59 | 106,85 | 106,46 | 100,26 |
| Kabupaten Sukoharjo | 81,17 | 83,41 | 84,16 | 83,90 | 108,18 |
| Kabupaten Wonogiri | 90,45 | 92,36 | 90,30 | 89,97 | 84,10 |
| Kabupaten Karanganyar | 77,28 | 78,20 | 75,34 | 81,08 | 101,63 |
| Kabupaten Sragen | 114,62 | 110,98 | 108,05 | 108,20 | 104,87 |
| Kabupaten Grobogan | 93,21 | 93,60 | 92,47 | 91,02 | 78,21 |
| Kabupaten Blora | 86,39 | 87,30 | 85,16 | 85,16 | 89,76 |
| Kabupaten Rembang | 72,99 | 74,53 | 71,94 | 72,85 | 81,47 |
| Kabupaten Pati | 101,67 | 101,34 | 102,60 | 102,10 | 95,08 |
| Kabupaten Kudus | 91,45 | 90,10 | 92,16 | 90,89 | 95,42 |
| Kabupaten Jepara | 87,65 | 88,00 | 90,31 | 90,74 | 88,91 |
| Kabupaten Demak | 106,41 | 102,70 | 100,07 | 96,72 | 90,88 |
| Kabupaten Semarang | 78,44 | 78,77 | 80,91 | 79,91 | 88,18 |
| Kabupaten Temanggung | 77,34 | 77,59 | 75,27 | 76,14 | 101,33 |
| Kabupaten Kendal | 105,77 | 103,73 | 106,32 | 103,84 | 94,34 |
| Kabupaten Batang | 67,57 | 69,78 | 72,27 | 71,24 | 73,98 |
| Kabupaten Pekalongan | 61,24 | 64,22 | 62,30 | 62,30 | 68,94 |
| Kabupaten Pemalang | 75,14 | 74,18 | 72,03 | 73,82 | 69,10 |
| Kabupaten Tegal | 81,00 | 80,26 | 78,78 | 78,76 | 77,88 |
| Kabupaten Brebes | 68,96 | 70,34 | 73,73 | 73,36 | 77,17 |
| Kota Magelang | 89,74 | 90,07 | 88,16 | 89,46 | 107,97 |
| Kota Surakarta | 77,92 | 81,43 | 79,62 | 81,05 | 95,71 |
| Kota Salatiga | 121,91 | 119,10 | 118,12 | 119,89 | 112,30 |
| Kota Semarang | 106,63 | 104,60 | 105,01 | 104,23 | 102,59 |
| Kota Pekalongan | 74,92 | 78,66 | 76,12 | 77,40 | 84,15 |
| Kota Tegal | 83,20 | 82,32 | 84,39 | 84,07 | 91,78 |

*Sumber: BPS,2024*

Selain akses pemerataan layanan pendidikan, mutu pendidikan juga masih menjadi persoalan di Jawa Tengah. Mutu pendidikan merupakan kemampuan

sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri. Relevansi pendidikan, kualitas guru, kondisi sarana prasarana pendidikan serta kemampuan literasi dan numerasi siswa dapat menggambarkan bagaimana kondisi mutu pendidikan di Jawa Tengah. Relevansi pendidikan ditunjukkan melalui kualitas lulusan pendidikan terutama pada kesesuaian lulusan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja. Data memperlihatkan bahwa serapan tamatan SMK belum optimal, ditandai dengan penurunan jumlah lulusan SMK yang bekerja, sebaliknya jumlah lulusan SMK yang berwirausaha justru mengalami peningkatan. Namun demikian, dari hasil penilaian Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik untuk tingkat penyerapan lulusan SMK di Jateng sudah mencapai 89,32% pada tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan adanya kecenderungan serapan lulusan SMK lebih banyak ke arah berwirausaha daripada bekerja di dunia usaha maupun industri.

**Tabel 2.84.**
**Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024**

| Uraian | Skor Rapor Pendidikan | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| ✓ Penyerapan lulusan SMK | 38,51 | 92,53 | 89,32 |
| ✓ Lulusan yang melanjutkan studi | 11,58 | 13,74 | 14,87 |
| ✓ Lulusan yang bekerja | 38,51 | 60,71 | 53,52 |
| ✓ Lulusan yang berwirausaha | 27,72 | 18,07 | 20,93 |
| ✓ Keselarasan bidang kerja | 28,90 | 64,69 | 44,63 |
| ✓ Masa tunggu bekerja/wirausaha | 8,92 | 3,25 | 3,88 |

*Sumber: Rapor Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan peningkatan keterserapan lulusan SMK pada DUDI salah satunya melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa SMK yang sesuai kebutuhan DUDI serta mengoptimalkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk SMK melalui program *Center of Excellent* (CoE) dan DAK Fisik Sarpras Pendidikan SMK.

Kualifikasi guru minimal D4/S1 dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Kondisi tersebut diperkuat dengan data sebagaimana table 2.112, memperlihatkan bahwa di Jawa Tengah masih terdapat Guru belum memiliki kualifikasi minimal D4/S1 dan paling banyak dijumpai pada jenjang pendidikan khusus.

**Tabel 2.85.**
**Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2022**

| Uraian | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sudah D4/S1 | Belum D4/S1 | Sudah D4/S1 | Belum D4/S1 | Sudah D4/S1 | Belum D4/S1 | Sudah D4/S1 | Belum D4/S1 | Sudah D4/S1 | Belum D4/S1 |
| Kualifikasi Guru | SMA | 98,15 | 1,85 | 89,50 | 10,50 | 97,18 | 2,82 | 98,83 | 1,17 | 99,05 | 0,95 |
| | SMK | 65,80 | 34,20 | 89,46 | 10,54 | 96,34 | 3,66 | 97,35 | 2,65 | 97,59 | 2,41 |

*Sumber: BPS, 2023*

Mutu pendidikan lainnya tergambarkan melalui kondisi sapras pendidikan di Jawa Tengah. Jawa Tengah masih memiliki ruang kelas kondisi rusak berat, sedang maupun ringan. Pada tahun 2022, ruang kelas dengan kategori rusak berat mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 2,47 persen dan 0,73 persen. Peningkatan tersebut sebagai akibat dari meningkatnya kejadian bencana alam (angin topan, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan gelombang pasang) pada

tahun yang sama di Jawa Tengah. Terhadap kondisi tersebut, maka pemerintah berupaya melakukan peningkatan sarpras pendidikan melalui rehabilitasi sarpras pendidikan baik dengan optimalisasi APBN (DAK Fisik Sarpras Pendidikan) maupun APBD.

**Tabel 2.86.**
**Persentase Ruang Kelas pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

| URAIAN | TAHUN per JENJANG | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | SMA | SMK | SMA | SMK | SMA | SMK | SMA | SMK | SMA | SMK |
| Rusak berat | 2,14 | 1,24 | 1,28 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,73 |
| Rusak ringan/ sedang | 46,58 | 52,55 | 70,17 | 69,06 | 41,59 | 44,28 | 42,76 | 46,90 | 23,66 | 27,35 |
| Baik | 51,29 | 46,20 | 28,55 | 30,26 | 58,41 | 55,72 | 57,24 | 53,10 | 73,87 | 71,92 |

*Sumber: BPS, 2023*

Kemampuan literasi dan numerasi juga gambaran mutu pendidikan dari segi proses. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa serta mampu menganalisa dan memahamai konsep, sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai literasi secara umum mengalami penurunan pada tahun 2023, sementara nilai numerasi mengalami peningkatan pada tahun yang sama, terkecuali jenjang SMPLB.

**Tabel 2.87.**
**Kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Jawa Tengah Tahun 2021-2023**

| Capaian | Jenjang Pendidikan | Skor Literasi | Skor Numerasi | Iklim Keamanan | Iklim Inklusivitas | Iklim Kebinekaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SMA* | 67,18 | 52,84 | 76,23 | 53,73 | 61,28 |
| | SMK | 63,64 | 51,10 | 75,11 | 53,43 | 61,76 |
| | SDLB | 61,63 | 52,55 | 83,80 | 60,35 | 60,82 |
| | SMPLB | 63,68 | 57,20 | 81,68 | 59,62 | 60,95 |
| | SMALB | 59,72 | 49,94 | 77,72 | 59,28 | 61,26 |
| 2022 | SMA* | 68,79 | 56,56 | 70,35 | 56,98 | 68,40 |
| | SMK | 64,14 | 53,71 | 69,00 | 55,79 | 67,07 |
| | SDLB | 60,61 | 52,58 | 78,40 | 60,45 | 71,64 |
| | SMPLB | 60,21 | 56,99 | 72,56 | 61,93 | 68,55 |
| | SMALB | 56,24 | 52,26 | 69,94 | 60,48 | 67,31 |
| 2023 | SMA* | 73,82 | 61,46 | 71,73 | 59,29 | 72,02 |
| | SMK | 70,37 | 59,07 | 70,80 | 58,37 | 72,77 |
| | SDLB | 67,87 | 64,28 | 75,56 | 61,59 | 67,31 |
| | SMPLB | 64,91 | 65,38 | 72,40 | 66,74 | 67,19 |
| | SMALB | 61,30 | 56,74 | 69,34 | 62,39 | 67,70 |

*Sumber: Rapor Pendidikan Jawa Tengah, 2024*
**) merupakan nilai rata-rata dari SMA Umum dan SMA Keagamaan*

Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi siswa, namun juga nilai karakter siswa. Rapor Pendidikan juga telah memuat pengukuran nilai karakter siswa yang mengukur

kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai - nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong – royong, kreativitas, nalar kritis kebinekaan global, serta kemandirian. Penerimaan terhadap siswa dari kelompok rentan seperti kurang mampu secara ekonomi dan disabilitas merupakan bagian dari perwujudan nilai karakter siswa. Nilai karakter tertinggi berada pada jenjang SMA dan terendah pada jenjang SD, namun terjadi penurunan nilai karakter pada jenjang SMALB di Tahun 2023.

Transformasi digital menuntut pemahaman dan *skill*/keterampilan terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Data memperlihatkan bahwa proporsi penduduk usia 15-24 tahun dengan keterampilan TIK jauh lebih baik dibandingkan penduduk usia 15-59 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penguasaan TIK masih didominasi oleh kelompok usia muda produktif.

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2024*

**Gambar 2.50.**
**Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2017-2023 (%)**

### 2.4.8 Kesehatan

#### a. Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Kondisi capaian Kasus Kematian Ibu di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2019 –2023 menunjukkan tren yang baik, namun terjadi kenaikan pada saat pandemi covid 19 pada Tahun 2021, Untuk Capaian Angka kematian ibu mengalami kondisi fluktuatif Tahun 2019 sebesar 76,93 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) menjadi 88,11 per 100.000 KH. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 menimbulkan perburukan kasus kematian ibu secara signifikan pada 2020 dan 2021 menjadi 98,60 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan menjadi 199 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2021. Keterbatasan layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil selama pandemi, potensi keterpaparan virus, dan komplikasi kehamilan (perdarahan, hipertensi kehamilan, jantung, diabetes) menjadi faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi naiknya angka kematian ibu. Berdasarkan data Tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus kematian ibu di Jawa Tengah menurun dibanding dengan tahun 2022 sebanyak 485 Kasus menjadi 438 kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 54 Kasus dan terendah di Kota Magelang 0 kasus. Penyebab Kematian ibu di Tahun 2023 yaitu hipertensi, perdarahan, infeksi masa nifas, abortus, jantung, gangguan metabolic,

gangguan darah, gangguan ektropik, CA Vulva Maligna, TBC/Pneumonia, Ca otak , Krisis Tyroid, shock septik, Gg Ginjal, DM on pregnancy 1, Suspect jantung dg obesitas 1, Sirosis Hepatis, Ca mammae, Komplikasi non obstetrik, Nifas post SC Morbili.

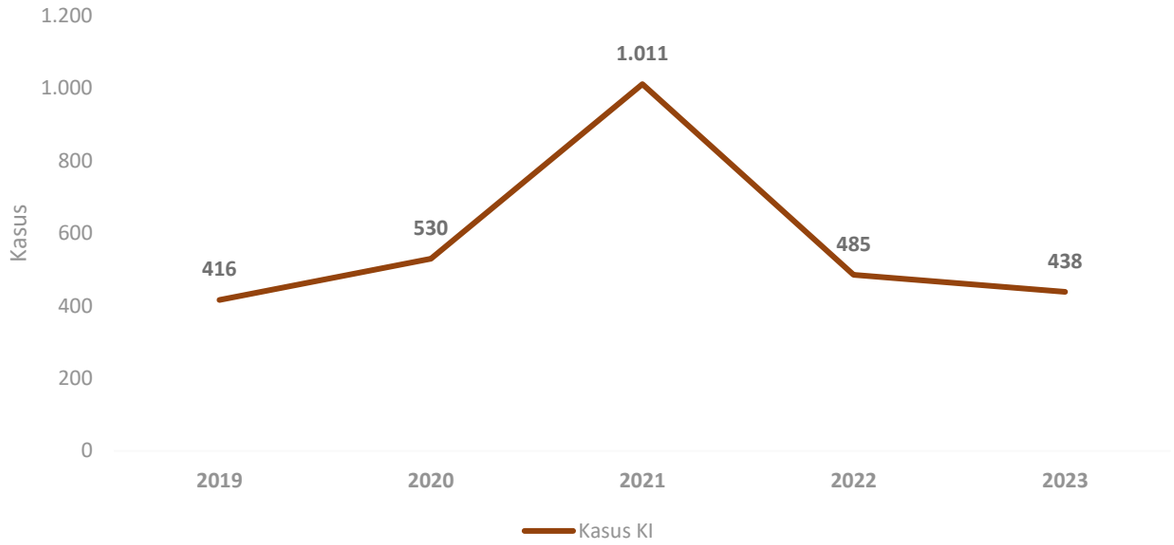


*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 2.51.**
**Tren Kasus Kematian Ibu Tahun 2019-2023**

Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah pada 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan tren membaik dari 8,22 per 1.000 KH pada 2019 menjadi 8,20 per 1.000 KH pada 2023. Berdasarkan Data Tw III 2023 menunjukkan bahwa kasus kematian balita di Jawa Tengah sebanyak 3.585 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 239 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 7 kasus. Beberapa penyebab kematian balita antara lain pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita. Masih perlu upaya edukasi dan peningkatan pemahaman orang tua dan pengasuh untuk menerapkan pola asuh secara benar kepada balita.

Angka Kematian Bayi (AKB) periode tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren fluktuatif yaitu sebesar 8,22 per 1.000 KH pada tahun 2019 dengan jumlah 4.450 kasus kematian bayi menjadi sebesar 9,28 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2023 yaitu 4.612 kasus. Faktor penyebab kematian bayi antara lain kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan serta banyak ditemukan kasus pneumonia. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa Kasus kematian bayi di Jawa Tengah naik dibandingkan tahun 2022 sebanyak 588 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 333 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 7 kasus.

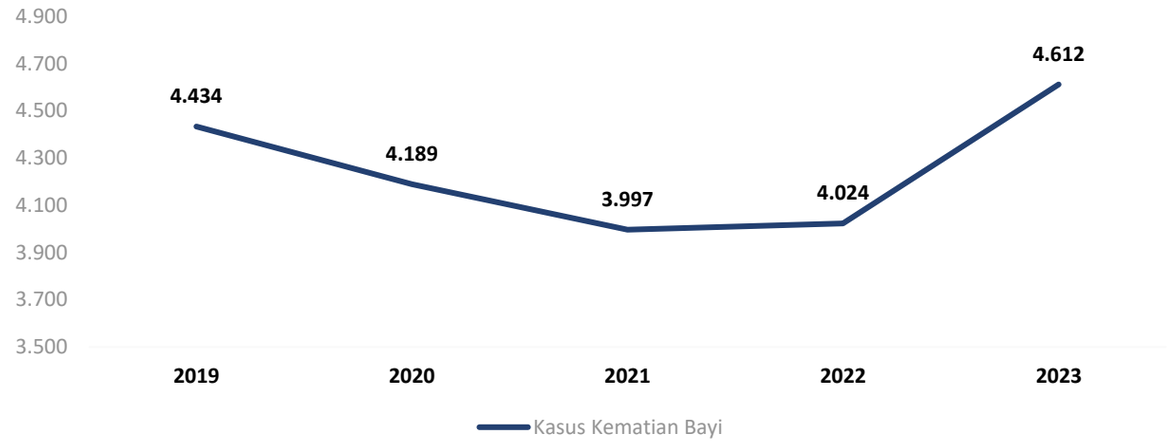


*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.52.**
**Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2019-2023**

Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah pada 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan tren naik dari 9,63 per 1.000 KH pada 2019 menjadi 10,47 per 1.000 KH pada 2023. Berdasarkan Data 2023 menunjukkan bahwa kasus kematian balita di Jawa Tengah sebanyak 5.339 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Tegal sebanyak 430 Kasus dan terendah di Kota Surakarta sebanyak 0 kasus. Beberapa penyebab kematian balita antara lain pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita. Masih perlu upaya edukasi dan peningkatan pemahaman orang tua dan pengasuh untuk menerapkan pola asuh secara benar kepada balita.

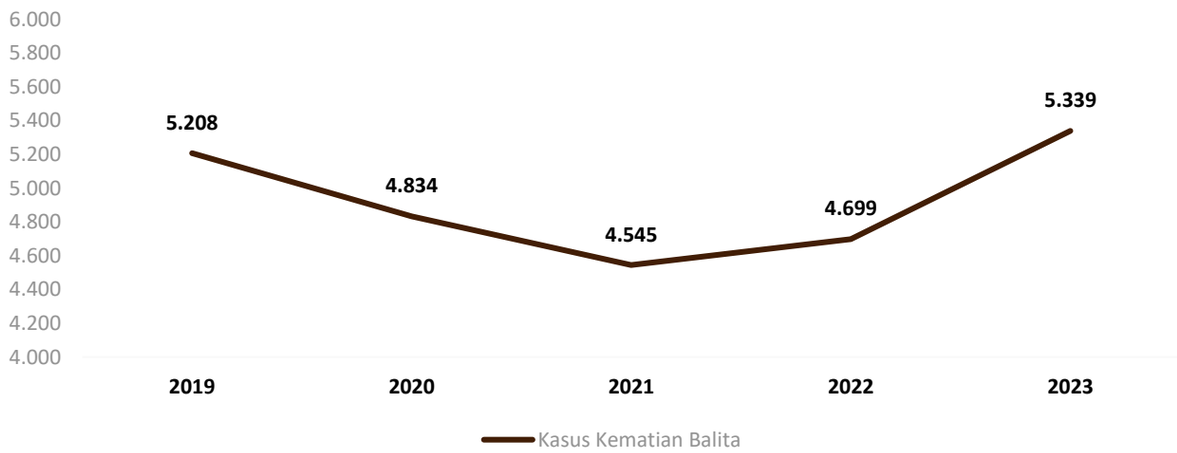


*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.53.**
**Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2019-2023**

**b. Kasus gizi buruk**

Kasus gizi buruk di Jawa Tengah mengindikasikan peningkatan dari 1.216 pada tahun 2019 menjadi 2.794 pada tahun 2022 seperti yang ditunjukan pada gambar 2.4. Hal ini terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi gizi buruk yaitu: ekonomi, sanitasi, pendidikan orangtua, dan perilaku orangtua. Kemiskinan salah satu determinan sosial-ekonomi, merupakan akar dari ketiadaan pangan, tempat mukim yang berjejalan, dan tidak sehat serta ketidak mampuan mengakses fasilitas kesehatan. Malnutrisi masih saja melatar belakangi penyakit dan

kematian anak. Kurang kalori protein sesungguhnya berpeluang menyerap siapa saja, terutama bayi dan anak yang tengah tumbuh-kembang.

Gizi buruk cenderung menyerang setelah mereka berusia 12 bulan. Penilaian status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjamin setiap anggota masyarakat mendapatkan makanan yang cukup jumlah dan mutunya. Gizi yang diperoleh seorang anak melalui konsumsi makanan setiap hari. Kecukupan zat gizi berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak. Kasus gizi buruk bukanlah jenis penyakit yang datang tiba-tiba begitu saja. Tetapi karena proses yang menahun terus bertumpuk dan menjadi kronik saat mencapai puncaknya. Masalah defisiensi gizi khususnyamenjadiperhatian karena berbagai penelitian menunjukan adanya efek jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak manusia.

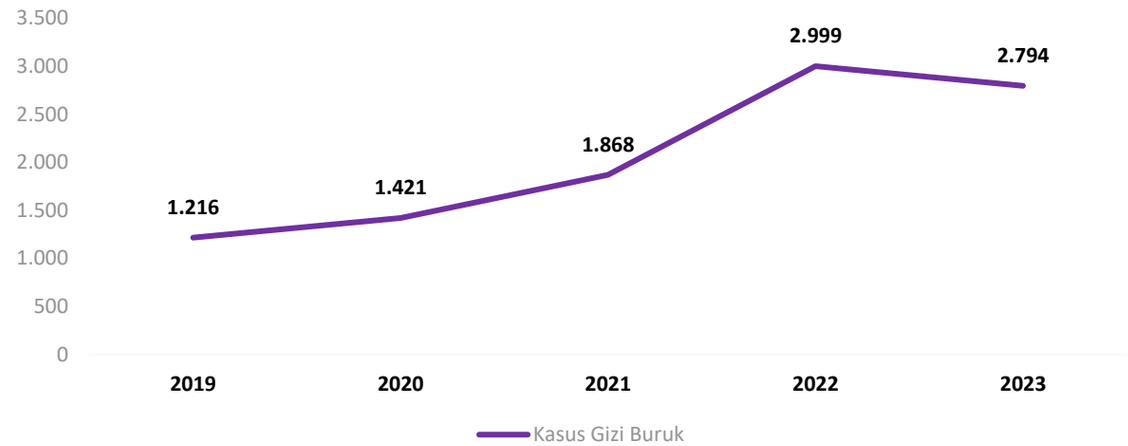


*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.54.**
**Tren Kasus Balita Gizi Buruk (BB/TB) Tahun 2019-2023**

Permasalahan gizi yang terjadi di Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama maupun infeksi berulang yang mengganggu intake zat gizi menyebabkan masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (stunting). Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga mengakibatkan anak menjadi kurus (underweight dan wasted). Selain permasalahan kekurangan gizi, kelebihan gizi juga menimbulkan masalah karena menyebabkan anak menjadi obesitas. Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa tren permasalahan gizi di Jawa Tengah menunjukkan angka yang semakin membaik. Prevalensi balita underweight dan wasted sebesar 17,1 persen dan 7,7 persen pada 2022. Prevalensi balita stunted turun dari 20,9 persen pada 2021 menjadi 20,8 persen pada 2022. Berdasarkan standar WHO, suatu wilayah dikatakan baik jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prvalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Suatu wilayah dikalakan mengalami masalah gizi kronis apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan memiliki permasalahan gizi kronis dan akut apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen.

Berdasarkan standar tersebut, Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan permasalahan gizi kronis dan akut.

Penanganan permasalahan gizi yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan angka prevalensi stunting pada balita menjadi 14 persen dan angka prevalensi wasting pada balita menjadi 7 persen sampai dengan tahun 2024. Angka prevalensi stunting di Jawa Tengah terus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Jika mengacu pada target nasional maka perlu upaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Jawa Tengah pada tahun 2023 menjadi di bawah 16 persen dan menjaga angka prevalensi wasting tidak lebih dari 7 persen.

**Tabel 2.88.**

**Prevalensi *Stunting* Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| Tahun | *Stunting* | Sumber |
|---|---|---|
| 2019 | 27,68% | Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI telah terintegrasi dengan riskesdas) |
| 2020 | - | Tidak dilakukan pengukuran karena pandemi |
| 2021 | 20,9% | Survey Status Gizi Indonesia |
| 2022 | ~~21,6%~~ 20,8% | Survey Status Gizi Indonesia |
| 2023 | | |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

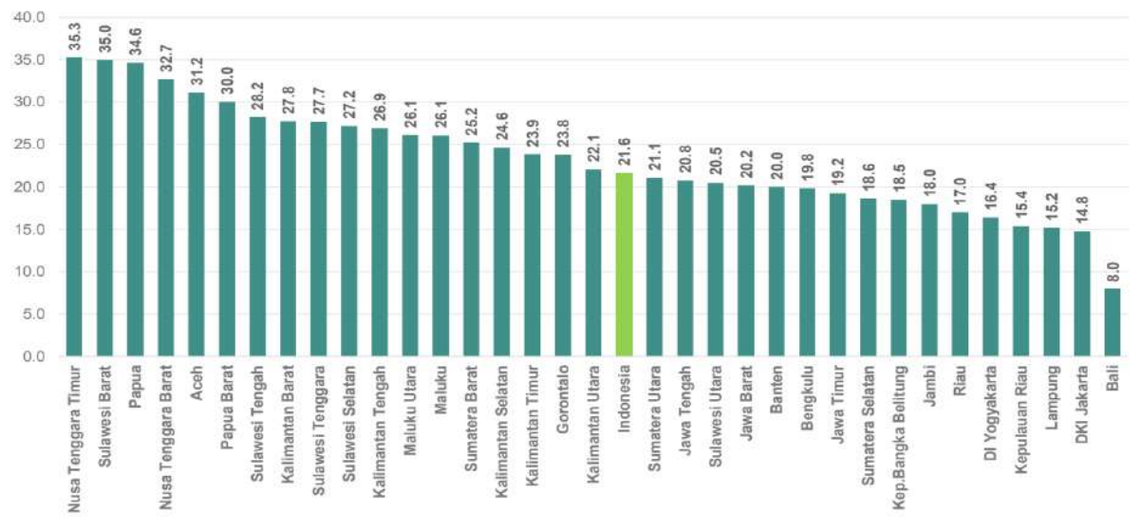


*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.55.**

**Angka Prevalensi *Stunting* Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Lainnya Tahun 2022**

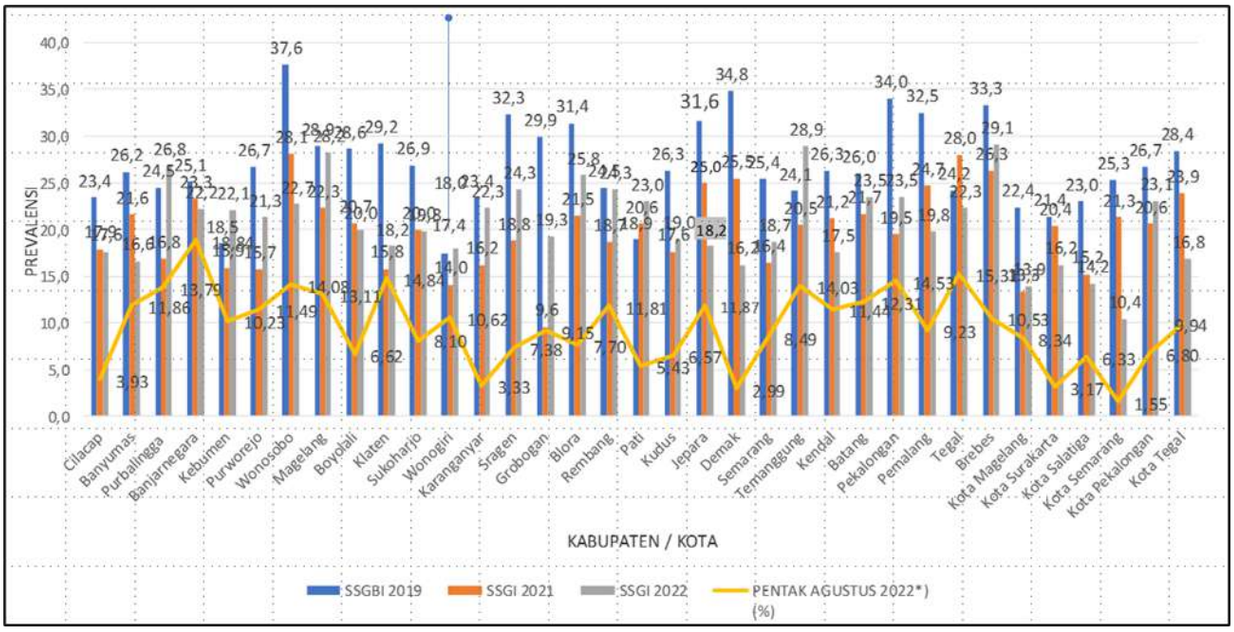


*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021*

**Gambar 2.56.**
**Angka Prevalensi Stunting Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan SSGBI 2019, SSGI 2021 dan SSGI 2022**

Terjadinya kondisi stunting secara umum dipengaruhi oleh asupan gizi dan status kesehatan. Asupan gizi berkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi. Status kesehatan berkaitan dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan permukiman, serta lingkungan sosial (noram dan pola asuh, pendidikan, lingkungan kerja).

**c. Penyakit Menular dan Tidak Menular**

Beban ganda penyakit saat ini menjadi tantangan kesehatan Jawa Tengah, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

**1) Kondisi Penyakit Menular**

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Provinsi Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS, Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD (Incidence Rate/IR DBD) di Jawa Tengah mengalami penurunan pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 yaitu menjadi 17,78 per 100.000 penduduk setelah tahun sebelumnya di angka 33,69 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kesakitan DBD (CFR DBD) mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yaitu dari 2,08 persen pada tahun 2022 menjadi 2,15 persen pada tahun 2023.

Angka Kesakitan Malaria (API) berdasarkan data tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022 sebesar 0,028 menjadi sebesar 0,02. Jumlah Kasus Malaria di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2023 sebanyak

371 kasus. Kasus Indegionus Malaria Tertinggi di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banyumas.

Sementara itu penemuan kasus TB yang ternotifikasi (CNR TB) mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 179 persen menjadi 226 persen pada tahun 2023 ,dengan jumlah penemuan 84.965 kasus TB di Jawa Tengah. namun harapan penanganan TB mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu ditandai dengan naiknya angka keberhasilan pengobatan TB (SR TB) dari tahun 2022 sebesar 84,5 persen menjadi sebesar 87 persen di tahun 2023. Penemuan kasus TB semakin membaik seiring dengan dilakanakannya deteksi dini oleh petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat serta peran Balai Kesehatan Masyarakat milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pada aspek non kesehatan, rumah yang tidak sehat, status gizi masyarakat dan perilaku tidak sehat menjadi pemicu dan pemberat kasus TB.

Pada penyakit HIV/AIDS perlu masih perlu diwaspadai secara serius, berdasarkan data Tahun 2023 mengalami kenaikan, tercatat kasus HIV naik dari 3.120 kasus di tahun 2022 menjadi 4.464 kasus di tahun 2023. Kasus AIDS juga naik dari1.309 kasus di tahun 2022 menjadi 1.608 kasus di tahun 2023. Kasus HIV dan AIDS perlu menjadi perhatian bersama dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Meskipun kinerja pelayanan HIV/AIDS semakin baik, hal ini dipengaruhi karena semakin efektifnya pemanafaatan Voluntary Conselling Test (VCT) di Puskesmas dan Rumah Sakit.

**Tabel 2.89.**
**Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| Tahun | IR DBD per 100.000 penduduk | CFR DBD (%) | API Malaria (%) | CNR TB (%) | SR TB (%) | HIV / AIDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kasus HIV | Kasus AIDS |
| 2019 | 26,21 | 1,4 | 0,012 | 210,8 | 83,93 | 2.704 | 2.316 |
| 2020 | 16,30 | 1,9 | 0,009 | 118 | 84,5 | 2.749 | 1.549 |
| 2021 | 12,80 | 2,71 | 0,024 | 116,2 | 83,5 | 2.708 | 835 |
| 2022 | 33,69 | 2,08 | 0.028 | 179 | 84,5 | 3.120 | 1.309 |
| 2023 | 17,73 | 2,15 | 0,02 | 226 | 87 | 3.464 | 1.608 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**2) Kondisi Penyakit Tidak Menular (PTM)**

Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas sik, dan merokok serta alkohol. Peningkatan PTM dapat mengakibatkan penurunan produktivas penduduk karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Berdasarkan Data 2023 menunjukkan bahwa jumlah penderita hipertensi mengalami kenaikan sebesar 4.695.927 kasus pada tahun 2022 menjadi 5.032.288 kasus pada tahun 2023. Selain Hipertensi diabetes melitus mengalami tren kenaikan dari 613.524 kasus pada tahun 2022 menjadi 670.252 kasus di tahun 2023. Jumlah Penderita Jantung mengalami kenaikan

dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 78.247 menjadi 97.416 di tahun 2023. Namun untuk penderita stroke mengalami penurunan di tahun 2022 sebanyak 62.621 menjadi 22.276 di tahun 2023. Penyakit kanker juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari 17.292 kasus di tahun 2022 menjadi 14.770 kasus di tahun 2023.

**Tabel 2.90.**

**Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023**

| Tahun | Jenis PTM | | |
|---|---|---|---|
| | Diabetes Milletus | Hipertensi | Kanker |
| 2019 | 490.444 | 2.073.852 | 13.256 |
| 2020 | 582.559 | 2.543.732 | 12.702 |
| 2021 | 467.365 | 3.329.052 | 12.886 |
| 2022 | 613.524 | 4.695.927 | 17.292 |
| 2023 | 670.252 | 5.032.288 | 14.770 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

**d. Kesehatan Lingkungan**

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat adalah melalui program *Open Defacation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga.

Pada Tahun 2023 masih terdapat 5 kabupaten/kota yang belum ODF yakni Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Batang, Magelang dan Pekalongan. Akan dilakukan percepatan pencapaian target seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah Bebas Buang Air Besar Sembarangan pada Tahun 2023.

Perkembangan desa/kelurahan ODF di Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2023 terus meningkat yaitu sebanyak 3.668 desa/kelurahan ODF di tahun 2018 menjadi 7.710 desa/kelurahan ODF di tahun 2023.

**Tabel 2.91.**

**Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Tahun | Jumlah Kelurahan/Desa ODF |
|---|---|---|
| 1 | 2019 | 5.863 |
| 2 | 2020 | 6.818 |
| 3 | 2021 | 7.162 |
| 4 | 2022* | 7.710 |
| 5 | 2023 | 8.562 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022.*

**e. Kesehatan Usia Lanjut**

Dalam rangka antisipasi pasca bonus demografi dimasa mendatang, penduduk usia lanjut (penduduk usia 60 tahun keatas) perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan agar lansia dapat tetap menjalani aktivitas fisik, menjaga kesehatan, tidak menggantungkan kepada orang lain dalam kehidupan bahkan masih bisa produktif. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Tengah, data yang tersaji adalah periode

2018 sampai 2022. Tahun 2018 cakupan pelayanan kesehatan lansia sebesar 65,00 persen yang kemudian meningkat menjadi 85,00 persen di tahun 2022.Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan promosi kesehatan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan lanjut usia, Kerjasama dengan universitas dan Lembaga penelitian untuk pengembangan program, pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri di usia lanjut, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya kesehatan lanjut usia.

**Tabel 2.92.**

**Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah**

**Tahun 2019 – 2023 (%)**

| No | Tahun | Cakupan Layanan Kesehatan Lansia |
|---|---|---|
| 1 | 2019 | 74,90 |
| 2 | 2020 | 65,90 |
| 3 | 2021 | 70,90 |
| 4 | 2022 | 85,00 |
| 5 | 2023 | 85,30 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

### 2.4.9 Kesejahteraan Sosial

#### a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kondisi kesejahteraan sosial di Jawa Tengah selain masih dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan juga masih tingginya penduduk yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS). Berdasarkan perkembangan data PPKS lima tahun terakhir, PPKS di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang meningkat jika mendasarkan base line pada tahun 2019. Tahun 2020 dan 2021 PPKS mengalami peningkatan menjadi 4.056.054 jiwa dan 4.654.151 jiwa. Tahun 2022 turun menjadi 4.579.790 jiwa dan tahun 2023 turun kembali menjadi 4.112.263 jiwa. Perkembangan populasi PPKS yang tidak signifikan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sebanding dengan penambahan PPKS baru, baik yang disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun dampak pandemi covid-19 di tahun 2021. Hal tersebut tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam penanganan PPKS baik melalui layanan panti maupun bantuan sosial yang hanya sebesar 0,47% atau hanya 19.214 penerima manfaat. Tahun 2023 jumlah penanganan PPKS meningkat diangka 325.010 dikarenakan adanya tambahan intervensi berupa BLT DBHCHT dan BLT DID. Diperlukan kolaborasi semua pihak baik Pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota, swasta maupun masyarakat sesuai kewenangannya untuk terus bersama-sama memberikan layanan kepada PPKS.

**Tabel 2.93.**

**Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Tahun | Populasi PPKS (Orang) | Jumlah Penanganan (Orang) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 3.042.030 | 19.214 | 0,47 |
| 2 | 2020 | 4.056.054 | 19.214 | 0,47 |
| 3 | 2021 | 4.654.151 | 19.214 | 0,47 |
| 4 | 2022 | 4.579.790 | 19.214 | 0,47 |
| 5 | 2023 | 4.112.263 | 325.010 | 8,03 |

*Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

**b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Sementara itu, peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diharapkan dapat menjadi faktor dominan dalam penyelenggaraan sosial termasuk membantu para PPKS untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya belum dapat diharapkan sepenuhnya. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan pada PSKS dalam menjalankan perannya yaitu terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM PSKS, termasuk tingkat kesejahteraan SDM PSKS yang masih rendah sehingga berpengaruh pada komitmen dalam penyelenggaraan sosial maupun pengkaderisasian SDM PSKS. Data perkembangan jumlah PSKS menunjukkan bahwa jumlah PSKS makin menurun sejak tahun 2019 sebesar 32.874 PSKS menjadi 26.870 PSKS pada tahun 2023.

**Tabel 2.94.**
**Kondisi PSKS Tahun 2019-2023**

| No | Jenis | Jumlah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Karang Taruna (KT) | 8.578 | 8.562 | 8.562 | 8.562 | 4.712 |
| 2 | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | 902 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| 3 | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 16.260 | 12.540 | 11.440 | 11.440 | 11.377 |
| 4 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 5 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 |
| 6 | Dunia Usaha | 63 | 63 | 63 | 56 | 58 |
| 7 | Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | 1.090 | 1.123 | 1.123 | 1.019 | 1.345 |
| 8 | Family Care Unit (FCU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Sakti Peksos | 63 | 63 | 63 | 69 | Mulai 2023 sdh tidak ada sakti peksos berubah menjadi pendamping resos yang merupakan gabungan pekos anak, pendamping disabilitas, pendamping LU dan konselor Napsa / peksos adiksi |
| 10 | Pekerja Sosial Profesional (PSP)/Fungsional | 120 | 117 | 117 | 123 | 136 |
| 11 | Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) | 38 | 38 | 38 | 38 | 228 |
| 12 | Penyuluh Sosial Fungsional | 0 | 25 | 25 | 46 | 36 |
| 13 | Penyuluh Sosial Masyarakat | 710 | 77 | 77 | 77 | 2.023 |
| 14 | PPNS | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | Pelopor Perdamaian | 0 | 230 | 230 | 245 | 230 |
| 16 | SDM PKH | 2.348 | 5.495 | 5.495 | 5026 | 5097 |
| 17 | SLRT | 11 | 21 | 21 | 21 | 31 |
| 18 | Puskesos | 52 | 306 | 385 | 405 | 116 |
| | **Total** | **32.874** | **32.165** | **31.145** | **30.632** | **26.870** |

*Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

**c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial**

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan SPM Sosial mendasarkan pada capaian tahun 2023 menunjukkan bahwa layanan terhadap rehabilitasi sosial dalam panti untuk anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta dan layanan penanganan saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana telah mencapai 100 persen. Namun demikian, capaian 100 persen belum menunjukkan *coverage* seluruh kebutuhan penanganan di Jawa Tengah dan masih sebatas sasaran yang ditangani saja. Kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya kapasitas sarpras, pendanaan dan SDM panti. Berikut tabel capaian pelaksanaan SPM Sosial Tahun 2023.

**Tabel 2.95.**

**Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

| No | Jenis Pelayanan | Penerima layanan Dasar | | | Anggaran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian (%) | APBD (Rp000) | Realisasi (Rp000) | Capaian Anggaran (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti | 3.762 Orang | 3.762 Orang | 100 | 18.428.688.000 | 18.371.996.279 | 99,69 |
| 2 | Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di dalam panti | 2.795 Orang | 2.795 Orang | 100 | 16.685.252.400 | 15.673.4141.345 | 93,94 |
| 3 | Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia Terlantar di dalam panti | 1.685 Orang | 1.685 Orang | 100 | 14.964.445.000 | 14.814.445.076 | 99,00 |
| 4 | Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan & pengemis di Dalam panti | 810 Orang | 810 Orang | 100 | 5.766.601.000 | 5.635.273.400 | 97,72 |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi | 145.407 Orang | 145.407 Orang | 100 | 2.115.488.000 | 2.086.409.950 | 98,63 |
| | Jumlah | 154.459 Orang | 154.459 Orang | 100 | 57.960.474.400 | 56.581.539.050 | 97,62 |

*Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**d. Penanganan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Urusan sosial mempunyai peranan besar dalam memberikan pelayanan umum khususnya terkait dengan layanan pemenuhan kesejahteraan sosial. Beberapa layanan yang tersedia dan menjadi kewenangan provinsi antara lain layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS terlantar di dalam panti, dan layanan SLRT/Puskessos.

**(1) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Panti**

Layanan PPKS dalam Panti menghadapi beberapa tantangan antara lain kondisi sarpras panti, kapasitas dan kuantitas SDM panti serta pemenuhan layanan panti yang terbatas. Kondisi sarpras panti mengalami perkembangan yang terus memburuk secara fisik jika dilihat dari kondisi bangunan namun tahun 2023 ada upaya yang berarti untuk melakukan perbaikan sehingga

kondisi bangunan baik meningkat dari 548 di Tahun 2022 menjadi 597 di tahun 2023.

**Tabel 2.96.**
**Jumlah dan Kondisi Bangunan Panti Sosial Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019-2023**

| No | Tahun | Panti/ Rumpel | Jumlah Unit Bangunan | Kondisi Baik | Kondisi Rusak Ringan | Kondisi Rusak Sedang | Kondisi Rusak Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 54 | 770 | 572 | 95 | 71 | 32 |
| 2 | 2020 | 54 | 789 | 570 | 105 | 70 | 44 |
| 3 | 2021 | 54 | 789 | 548 | 110 | 73 | 58 |
| 4 | 2022 | 54 | 790 | 548 | 111 | 73 | 58 |
| 5 | 2023 | 54 | n/a | 597 | 133 | - | 50 |

*Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022.*

Dari sisi SDM Panti, beberapa kebutuhan tenaga layanan yang ada saat ini masih jauh dari kebutuhan untuk memberikan layanan di 54 panti/rumah pelayanan sosial. Beberapa pos SDM yang dibutuhkan antara lain pekerja sosial terampil dari kebutuhan 57 orang baru tersedia 35 27 orang, pekerja sosial ahli dari kebutuhan 426 orang baru tersedia 65 107, penyuluh sosial ahli dari 104 kebutuhan baru tersedia 36 orang, perawat dari 68 orang hanya tersedia 4 orang.

**Tabel 2.97.**
**Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

| PEKSOS TERAMPIL | | PEKSOS AHLI | | PENYSOS AHLI | | PERAWAT | | DOKTER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kondisi | Kebutuhan | Kondisi | Kebutuhan | Kondisi | Kebutuhan | Kondisi | Kebutuhan | Kondisi | Kebutuhan |
| 27 | 57 | 107 | 426 | 36 | 104 | 4 | 68 | 1 | 1 |

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Kondisi terbatasnya panti milik provinsi baik menyangkut kapasitas maupun SDM sehingga dalam penanganan PPKS kurang optimal, maka penting untuk mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan PPKS. Sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan rumah singgah yang berfungsi untuk melakukan penanganann PPKS yang sifatnya sementara dan melakukan assesment terhadap PPKS hasil penjaringan. Sampai dengan tahun 2023 tercatat baru 27 kabupaten/kota yang telah memiliki rumah singgah baik dibiayai APBD masing-masing maupun bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Tersisa delapan kabupaten/kota yang belum memiliki rumah singgah yaitu Cilacap, Banjarneqara, Pemalang, Wonosobo, Sukoharjo. Kab. Semarang, Kudus, dan Kota Magelang.

**(2) Layanan Puskessos-SLRT**

Puskessos-SLRT sebagai lembaga dan sistem layanan untuk membantu dalam program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (berupa mengidentifikasi kebutuhan, menangani aduan dan sebagai rujukan masyarakat miskin/rentan miskin) masih dihadapkan pada tantangan pada konsistensi/ keaktifan layanan dikarenakan terbatasnya kapasitas SDM pengelola dan kurangnya kemitraan dengan pemangku kepentingan termasuk dunia usaha. Selain itu juga masih terbatasnya Puskessos-SLRT yang belum merata terbentuk di semua desa/kelurahan. Kondisi sampai dengan tahun

2023, Puskessos –SLRT tingkat kabupaten/kota telah terbentuk 100%, sedangkan Puskessos-SLRT tingkat desa/kelurahan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 405 Puskessos-SLRT menjadi 1.166. hal ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.

**Tabel 2.98.**

**Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan s/d Tahun 2021**

| Sumber Dana | Pembentukan Puskessos-SLRT Desa/Kelurahan |
|---|---|
| APBN | 64 |
| APBD Prov | 127 |
| APBD Kab/Kota | 500 |
| Total | 1.166 |

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**e. Pemberian Bantuan Sosial dan Ekonomi**

Upaya penanganan kemiskinan melalui bantuan kepada masyarakat non produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah dilaksanakan tiap tahunnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan termasuk penurunan angka kemiskian ekstrim. Tahun 2023 telah dilakukan top up indeks KJS dari Rp250.000 menjadi Rp 370.000 per orang per bulan yang harapannya dapat lebih tajam untuk penurunan angka kemiskinan ekstrim. Tantangan dari pelaksanaan KJS ini adalah penentuan penerima manfaat yang masih mengikuti pola penganggaran secara regular menyebabkan KJS kurang responsif untuk mengganti penerima manfaat ketika yang bersangkutan meninggal, pindah alamat atau telah menerima bantuan lain dari pemerintah pusat atau kab/kota, sehingga pada tahun 2024 telah diinisiasi KJS dialihkan dari belanja bansos menjadi belanja kepada pihak ke tiga yang harapannya pelaksanaan KJS lebih responsif dan lebih luas menjangkau sasaran penerima manfaat.

Untuk bantuan pengembangan produktif kepada kelompok usaha bersama tahun 2023 telah ditingkatkan cakupannyanya dari sebelumnya yang hanya 100 sasaran KUBE menjadi 1000 KUBE. Bantuan untuk KUBE ini berupa stimulus modal sebesar Rp20.000.000 per KUBE (20 orang anggota). Tantangan dari pelaksanaan KUBE adalah keberlanjutan usaha dan replikasi ke kelompok lainnya yang perlu untuk terus ditingkatkan.

### 2.4.10 Tenaga kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Agustus 2023 sebesar 5,13 persen turun sebesar 0,44 persen poin dari kondisi TPT pada Agustus 2022 yang sebesar 5,57 persen. Di tingkat nasional TPT Agustus 2023 lebih besar dari Jawa Tengah yaitu sebesar 5,32 persen turun sebesar 0,54 persen point dibandingkan edngan TPT Nasional bulan Agustus 2022.

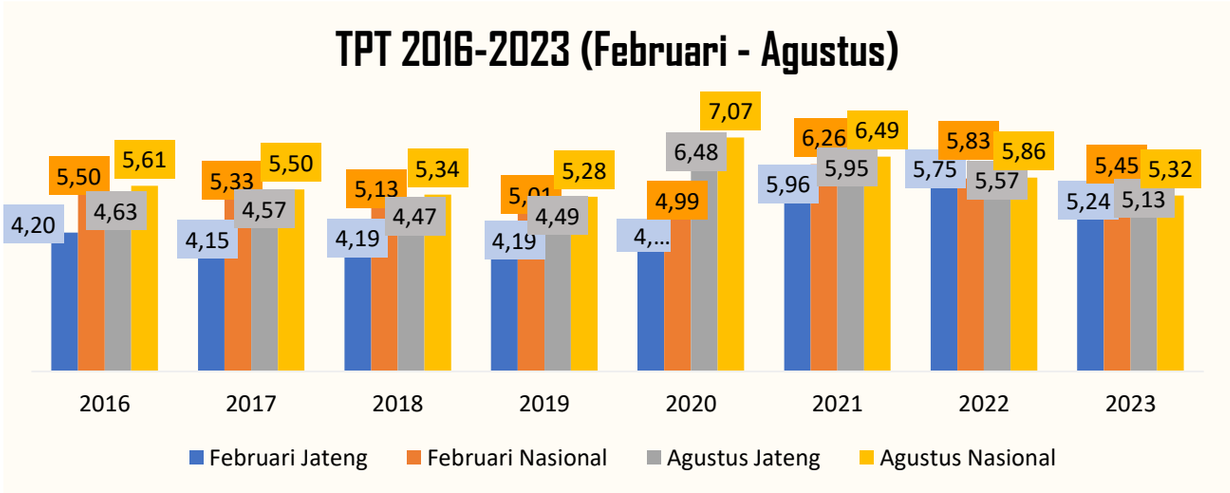


*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.57.**
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2016–2023 (Februari-Agustus) (%)**

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 menunjukkan perbaikan. Terdapat 22 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di bawah capaian provinsi dan nasional atau lebih baik (peta warna hijau), terdapat 1 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di antara capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah atau lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan lebih baik dibanding Nasional (peta warna kuning), dan terdapat 12 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di atas capaian nasional dan Jawa Tengah atau lebih rendah (peta warna merah).

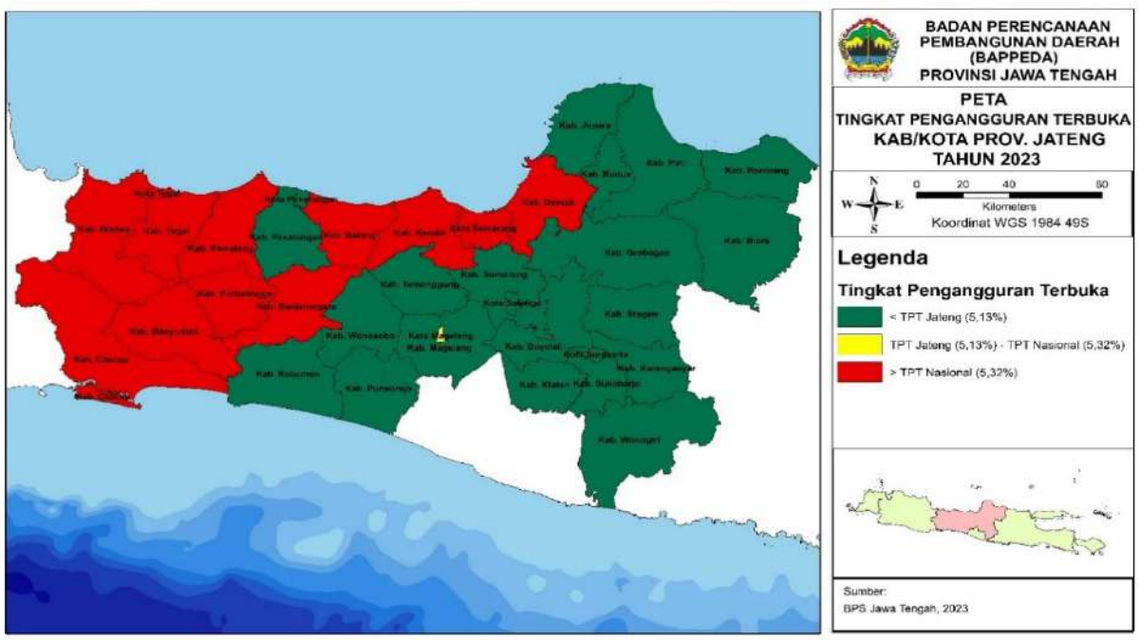


**Gambar 2.58.**
**Peta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2023**

Salah satu imbas dari persoalan kependudukan dan dihadapi hampir di semua wilayah adalah pengangguran. Bahkan di negara maju pun pengangguran masih menjadi masalah serius. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut rendah. Tingkat tenaga kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai

menambah beban persoalan yang ada. Struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah tahun 2022 menurut BPS, diperlihatkan pada gambar di bawah ini.

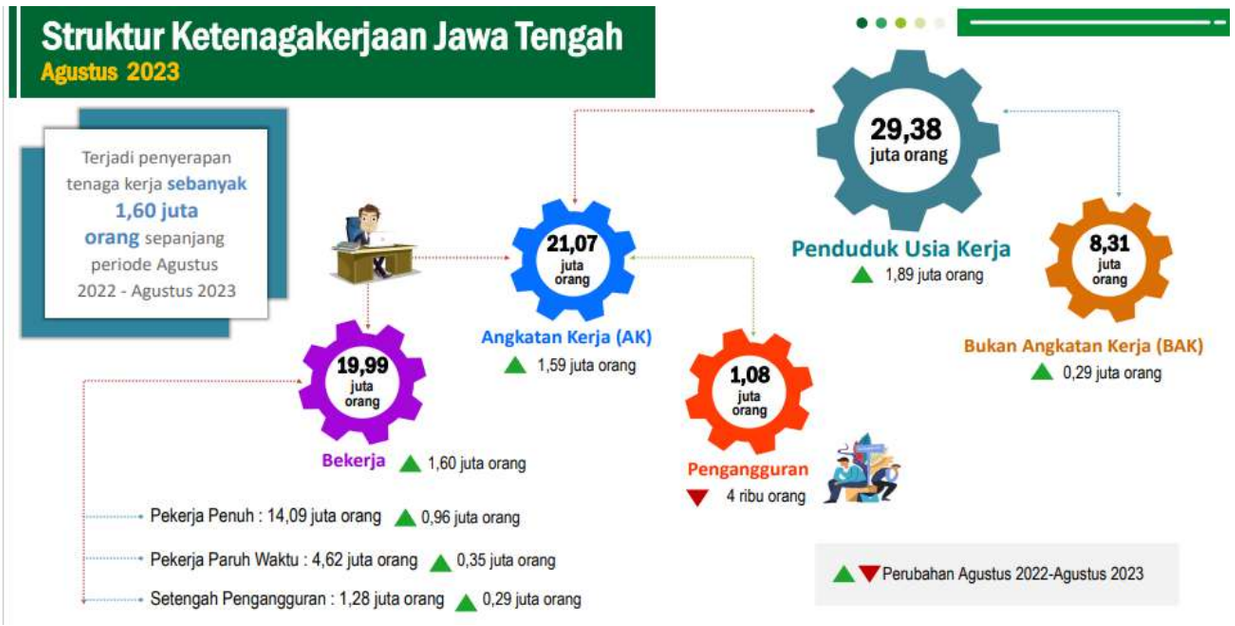


**Gambar 2.59.**
**Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2023**

Dari 36,74 juta jiwa penduduk Jawa tengah, 29,38 juta jiwa merupakan penduduk usia kerja dengan jumlah Angkatan Kerja (AK) sebesar 21,07 juta orang. Dimana sebanyak 19,99 juta orang bekerja dan 1,08 juta orang pengangguran. Meskipun jumlah bekerja lebih banyak dibandingkan pengangguran, namun secara kualitas perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah sebesar 42,65 persen merupakan lulusan SD ke bawah, dan 20,59 persen merupakan lulusan SMP. Hal ini menandakan bahwa kualitas tenaga kerja Jawa Tengah masih rendah/*low skill*.

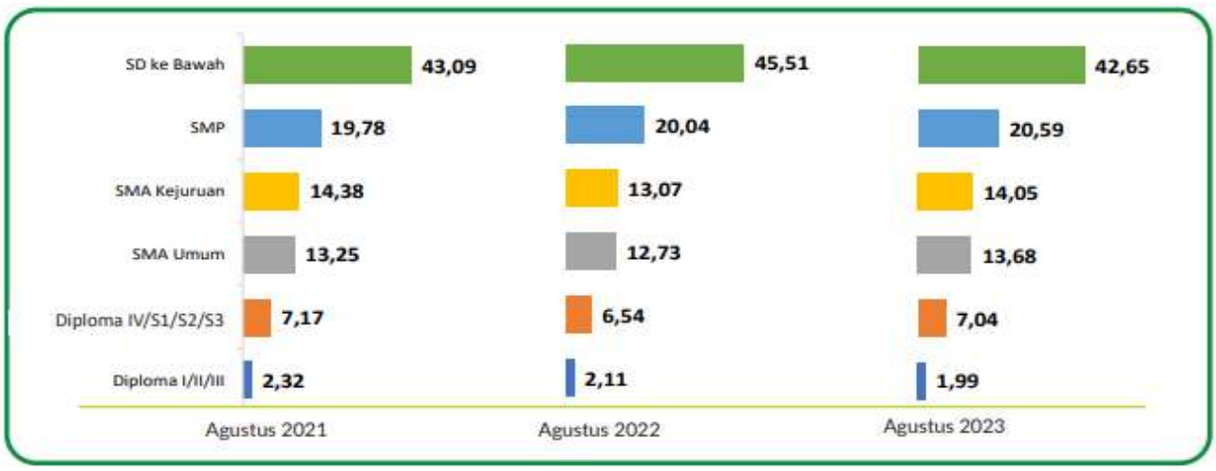


*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.60.**
**Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2022**

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2023 TPT tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 9,89 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yang sebesarn. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat filosofi adanya SMK agar para lulusan kejuruan

sudah siap kerja atau bahkan sudah direkrut oleh dunia usaha atau industri sebelum lulus. Sehingga perlu dicari apa penyebab mendasar dari kondisi itu. Apakah karena ketidakseimbangan antara demand dan supply atau terjadinya asimetri antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. TPT untuk lulusan Diploma dan Universitas juga mengalami kenaikan di tahun 2023. Pada tahun 2022 TPT lulusan Diploma sebesar 2,29 persen kemudian naik menjadi 5,09 persen di tahun 2023. Begitu juga dengan TPT lulusan Universitas dimana pada tahun 2022 sebesar 4,02 persen mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 5,60 persen.

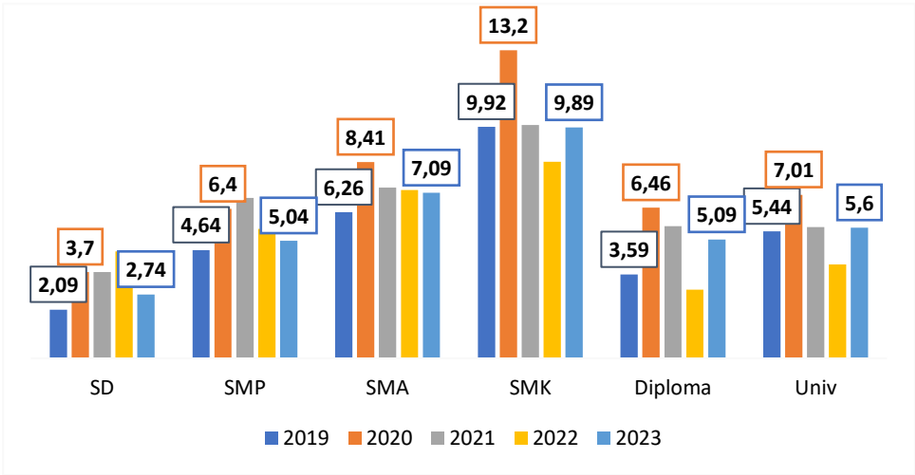


*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.61.**
**TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (%)**

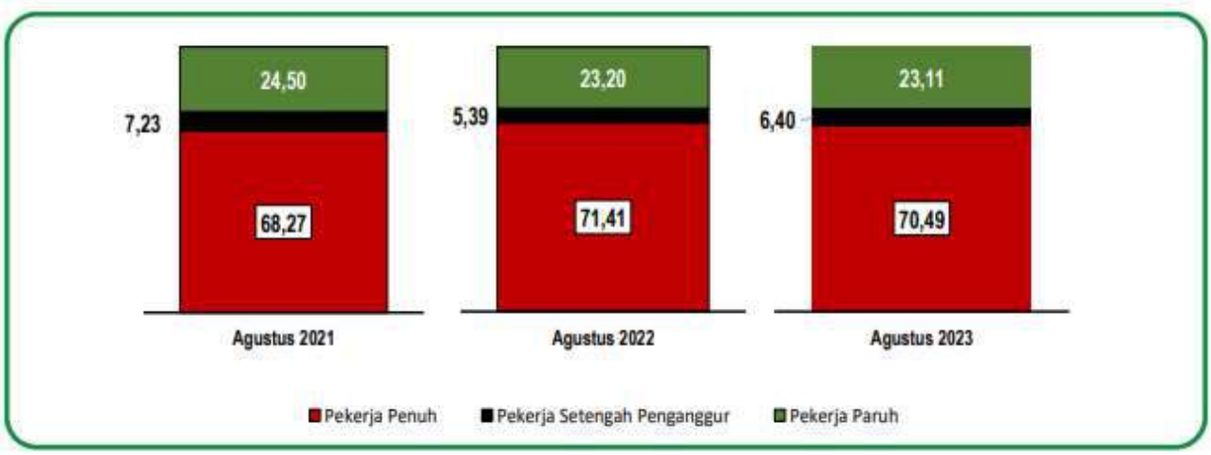


**Gambar 2.62.**
**Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023 (%)**

Pada tahun 2023 sebanyak 70,49 persen penduduk bekerja Jawa Tengah merupakan pekerja penuh waktu, sementara sebanyak 23,11 persen merupakan pekerja paruh waktu dan 6,40 persen merupakan setengah pengangguran. Dibandingkan dengan tahun 2022, pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 0,92 persen poin dan 0,09 persen poin. Setengah pengangguran dan pekerja tidak penuh waktu merupakan pekerja yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dan masih mencari atau menerima pekerjaan lain. Hal ini perlu menjadi perhatian

karena menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah yang masih rendah.

Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 55,16 juta rupiah mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2022 yang sebesar 57,11 juta rupiah. Penurunan ini bisa disebabkan beberapa hal seperti modal fisik (perlengkapan, perlengkapan dan fasilitas) yang dimiliki pekerja masih kurang memadai, kurangnya penggunaan teknologi atau metode baru untuk menghasilkan output yang lebih banyak, serta kualitas pendidikan dan keterampilan pekerja yang masih rendah.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat penting karena menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Jika produktivitas suatu sektor tinggi akan diikuti oleh pendapatan pekerja yang semakin tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan pekerja. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi berdampak pada perekonomian suatu daerah karena nilai tambahnya semakin tinggi.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2023 tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 377,62 Juta Rupiah, kemudian disusul oleh Provinsi Banten sebesar 91,93 Juta Rupiah dan Provinsi Jawa Timur sebesar 81,27 Juta Rupiah, sementara Provinsi Jawa Tengah berada di posisi terakhir setelah Provinsi DIY.

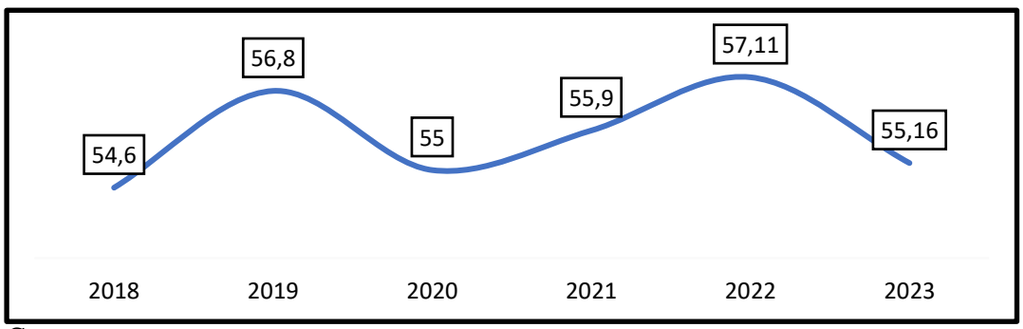


*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024.*

**Gambar 2.63.**
**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah**
**Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah)**

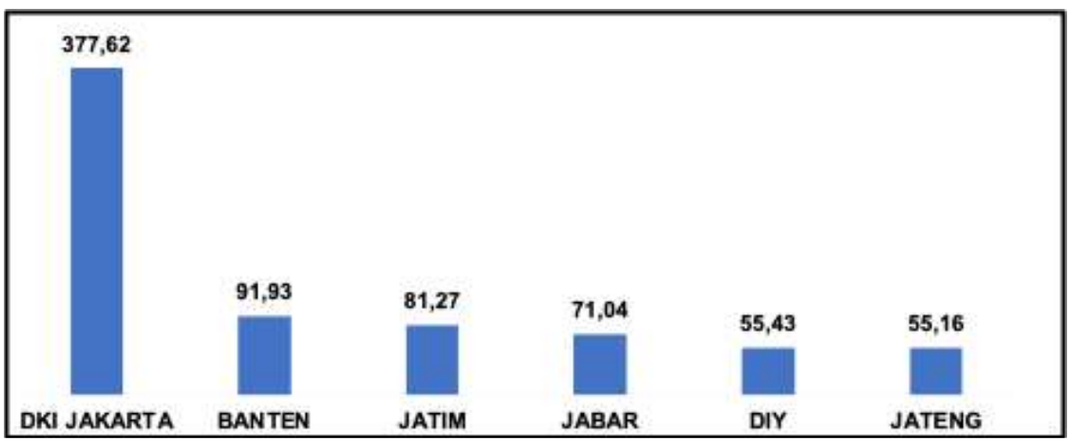


*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024.*

**Gambar 2.64.**
**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2023 (Juta Rupiah)**

Rasio kesempatan kerja pada tahun 2023 sebesar 68,04% naik 1,45 persen poin dibanding dengan tahun 2021 dan 1,14 persen poin dibanding dengan tahun 2022. Rasio kesempatan kerja yang naik ini menandakan bahwa peluang penduduk usia kerja yang bekerja semakin meningkat, dan menandakan juga semakin baiknya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Adanya peningkatan kesempatan kerja merupakan suatu indikator yang penting karena hal itu dapat diartikan bahwa permintaan terhadap tenaga kerja pada pasar kerja dapat dipenuhi.

**Tabel 2.99.**

**Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Tahun | Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang) | Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang) | Rasio Kesempatan Kerja (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019 | 17.440.000 | 26.610.000 | 69,22 |
| 2. | 2020 | 17.540.000 | 27.010.000 | 64,93 |
| 3. | 2021 | 17.835.770 | 27.253.914 | 65,45 |
| 4. | 2022 | 18.390.459 | 27.490.000 | 66,90 |
| 5. | 2023 | 19.990.000 | 29.380.000 | 68,04 |

*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang selalu naik. Pada tahun 2023 TPAK sebsar 71,72% naik sebanyak 0,88 persen poin dibanding dengan TPAK tahun 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang selalu naik menandakan bahwa pasokan tenaga kerja (*labour supply*) di Jawa Tengah yang tersedia semakin tinggi dan mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi semakin naik. TPAK yang tinggi ini harus diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang luas juga agar tidak berdampak negatif terhadap peningkatan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah.

**Tabel 2.100.**

**Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Tahun | Penduduk Usia Kerja (orang) | Angkatan Kerja*) | TPAK (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019 | 26.610.000 | 18.421.193 | 68,85 |
| 2. | 2020 | 27.010.000 | 18.751.277 | 69,43 |
| 3. | 2021 | 27.250.000 | 18.963.993 | 69,58 |
| 4. | 2022 | 27.490.000 | 1□4□4.□□4 | 70,84 |
| 5. | 2023 | 29.380.000 | 21.070.000 | 71,72 |

*Sumber: BPS 2022 diolah dari Sakernas.*
*Keterangan : *) data per Agustus tahun bersangkutan*

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2019-2020 cenderung meningkat. Namun di tahun 2020 kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana di tahun 2019 sebesar 70,27 persen menjadi 37,07 persen di tahun 2020. Kondisi ini merupakan salah satu dampak terjadinya pandemi Covid-19 dimana perekonomian terpuruk akibat pandemi. Namun di tahun 2021 mulai kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah. Untuk itu ke depan perlu dilakukan

upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

**Tabel 2.101.**

**Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 (%)**

| Tahun | Pencari Kerja yang Terdaftar | Pencari Kerja yang Ditempatkan | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300.098 | 210.889 | 70,27 |
| 2020 | 220.763 | 81.835 | 37,07 |
| 2021 | 269.810 | 136.611 | 50,63 |
| 2022 | 322.041 | 227.088 | 70,52 |
| 2023 | 332.644 | 236.491 | 71,09 |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

**Tabel 2.102.**

**Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Tahun | Jumlah Perusahaan (Unit) | Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Peserta Program Jamsostek |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 69.866 | 1.781.754 |
| 2 | 2020 | 76.196 | 1.908.465 |
| 3 | 2021 | 83.511 | 2.003.518 |
| 4 | 2022 | 89.016 | 3.196.431 |
| 5 | 2023 | 103.666 | 2.318.493 *) |

*Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berfluktuasi selama tahun 2018-2022. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dan kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2022, hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dan sebagainya. Selanjutnya mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2021 menjadi 310.785 orang disebabkan dampak pandemi Covid-19. Namun pada Tahun 2023 jumlah pekerja non formal meningkat menjadi 1.441.492.

**Tabel 2.103.**

**Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Tahun | Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek |
|---|---|---|
| 1 | 2019 | 1.378.435 |
| 2 | 2020 | 892.866 |
| 3 | 2021 | 310.785 |

| No | Tahun | Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek |
|---|---|---|
| 4 | 2022 | 1.192.763 |
| 5 | 2023 | 1.441.492 *) |

*Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2023. *) Data per Okt 2023*

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah kasus hubungan industrial sebanyak 124 kasus yang 100 persen terselesaikan. Tahun-tahun berikutnya jumlah kasus menurun dan kasus tersebut meningkat pada tahun 2022 dan 2023 namun juga kasus tersebut dapat diselesaikan 100 persen sejalan dengan meningkatnya pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Di tahun 2023, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 124 kasus yang 100 persen dapat terselesaikan.

**Tabel 2.104.**

**Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Tahun | Jumlah Kasus | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 124 | 100% terselesaikan |
| 2 | 2020 | 96 | 100% terselesaikan |
| 3 | 2021 | 35 | 100% terselesaikan |
| 4 | 2022 | 66 | 100% terselesaikan |
| 5 | 2023 | 124 | 100% terselesaikan |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2023*

*Not in Employment, Education or Training* (NEET) adalah penduduk usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan (sekolah), dan tidak dalam pelatihan. Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2017 dari 1.044.465 orang menjadi 1.205.564 orang pada tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.298.297 orang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.097.209 orang. Namun pada tahun 2022 jumlah NEET mengalami peningkatan menjadi 1.101.412 orang . Hal tersebut menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat sekelompok orang yang mempunyai ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga.

**Tabel 2.105.**

**Jumlah *Not in Employment, Education or Training (NEET)* di Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Tahun | Jumlah *NEET* (orang) | Penduduk Usia Kerja Muda | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 1.205.564 | 5.524.810 orang | 21,82 |
| 2 | 2020 | 1.298.297 | 5.407.899 orang | 24,00 |
| 3 | 2021 | 1.097.209 | 5.388.228 orang | 20,36 |
| 4 | 2022 | 1.101.412 | 5.388.513 orang | 20,44 |
| 5 | 2023 | 1.185.589 | 5.648.751 orang | 20,98 |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022.*

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh perusahaan selama periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

**Tabel 2.106.**
**Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**
**Tahun 2019 - 2023**

| No | Tahun | Jumlah *Peraturan Perusahaan (PP)* | Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 3.967 | 579 |
| 2 | 2020 | 4.230 | 614 |
| 3 | 2021 | 4.540 | 661 |
| 4 | 2022 | 4.641 | 661 |
| 5 | 2023 | 4.6481 | 662 |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

### 2.4.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es dimana kejadian yang tampak dipermukaan (terlapor) tidak sebanding dengan kejadian sesungguhnya yang diperkirakan jauh lebih tinggi. Adanya budaya malu dan takut melapor karena bisa dianggap aib menjadi kendala di masyarakat sehingga ini perlu terus didorong untuk memberikan penyadaran dan keberanian kepada masyarakat utamanya kaum perempuan dan anak.

Upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan baik berupa advokasi, sosialisasi maupun pelatihan bagi SDM yang terlibat dalam layanan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Upaya ini telah memberikan dampak positif pada penurunan rasio kasus maupun rasio korban kekerasan. Periode 2019-2023, tercatat rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 7,44 di tahun 2023, menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar 7,78. Demikian juga dengan rasio korban kekerasan perempuam dan anak yang turun dari 8,25 di tahun 2019 menjadi 8,02 di tahun 2023. Sementara itu, Rasio korban kekerasan terhadap perempuan juga mengalami penurunan dari 5,89 di tahun 2019 menjadi 4,64 di tahun 2023, sedangkan rasio korban kekerasan terhadap anak turun dari 12,44 di tahun 2019 menjadi 9,86 di tahun 2023. Angka tersebut meskipun telah mengalami perkembangan yang positif tetap perlu mendapat perhatian serius dimasa mendatang mengingat angkanya yang masih cukup tinggi dan masih banyak yang belum terlaporkan.

**Tabel 2.107.**

**Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| Tahun | Rasio Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk) | Rasio Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk) | Rasio Korban Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk) | Rasio Korban kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7,78 | 8,25 | 5,89 | 12,44 |
| 2020 | 8,49 | 8,99 | 5,75 | 12,15 |
| 2021 | 8,35 | 8,97 | 5,11 | 11,02 |
| 2022 | 7,47 | 8,10 | 4,38 | 10,33 |
| 2023 | 7,44 | 8,02 | 4,64 | 9,86 |

*Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id/AplikasiSimfoni-PPA 2024.*

Sementara itu, upaya pemenuhan hak anak secara umum telah mencapai tahap yang cukup menggembirakan jika dilihat dari capaian program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), meskipun berbagai persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak masih menjadi tantangan untuk dipecahkan. Jawa Tengah secara berturut turut sejak tahun 2021 memperoleh penghargaan kategori tertinggi KLA sebagai pelopor Provinsi Layak Anak. Tentu dengan raihan ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan sebanding dengan makin meningkatnya upaya pemenuhan hak anak dan makin membaiknya berbagai persoalan yang melingkupi anak seperti kekerasan terhadap anak, putus sekolah, stunting dan lain sebagainya. Pada tataran kabupaten/kota sampai dengan tahun 2023 secara bervariasi sesuai tingkatkan penghargaan tercatat sudah 100 persen kabupaten/kota memperoleh penghargaan KLA (kategori pratama, madya, nindya dan utama). Tercatat di tahun 2023 ada peningkatan jumlah Kab/Kota yang memperoleh penghargaan kategori Utama yaitu yang sebelumnya hanya Kota Surakarta menjadi bertambah Kota Semarang dan Kabupaten Sragen. Demikian juga dengan jumlah kab/kota yang memperoleh penghargaan madya dan nindya yang mengalami peningkatan. Rincian capaian KLA Tahun 2023 sebagaimana dalam table dibawah ini.

**Tabel 2.108.**

**Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Jawa Tengah Tahun 2023**

| Pratama | Madya | Nindya | Utama |
|---|---|---|---|
| Kab. Purworejo, Kab. Jepara, Kab. Kudus, Kab. Kendal, Kab. Semarang, Kabupaten Banyumas | Kab. Grobogan, Kab. Wonosobo, Kab. Temanggung, Kab. Pekalongan, Kab. Kebumen, Kota Salatiga, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Batang, Kab. Demak, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Pati, Kab. Blora | Kabupaten Magelang, Kab. Rembang, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kab. Tegal, Kota Magelang, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Pemalang | Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Sragen |

Dari sisi jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak secara paling banyak yang dialami oleh perempuan dewasa adalah kekerasan fisik, psikis dan seksual. Sementara pada anak tertinggi adalah kekerasan seksual disusul psikis dan fisik. Jenis kekerasan yang dialami perempuan yang perlu mendapat perhatian dimana angkanya terus meningkat yaitu kekerasan seksual dan trafficking, sedangkan pada anak yang perlu mendapat perhatian antara lain fisik, seksual, penelantaran dan lainnya.

**Tabel 2.109.**

**Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2019-2023**

| URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis kekerasan yang dialami korban perempauan dewasa: | | | | | |
| Fisik | 604 | 484 | 539 | 495 | 481 |
| psikis | 438 | 297 | 372 | 405 | 373 |
| seksual | 146 | 126 | 145 | 186 | 212 |
| penelantaran | 203 | 119 | 135 | 117 | 117 |
| *trafficking* | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 |
| eksploitasi | 2 | 0 | 7 | 9 | 8 |
| lainnya | 44 | 26 | 47 | 60 | 49 |
| **Total** | **1.438** | **1.057** | **1.255** | **1.274** | **1.248** |
| Jenis kekerasan yang dialami korban anak: | | | | | |
| Fisik | 293 | 205 | 204 | 193 | 217 |
| psikis | 312 | 296 | 327 | 361 | 303 |
| seksual | 700 | 789 | 807 | 748 | 755 |
| penelantaran | 85 | 58 | 66 | 84 | 107 |
| *trafficking* | 8 | 8 | 16 | 7 | 4 |
| eksploitasi | 9 | 15 | 9 | 30 | 18 |
| lainnya | 51 | 56 | 72 | 72 | 133 |
| **Total** | **1.458** | **1.427** | **1.501** | **1.495** | **1.537** |

*Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id/AplikasiSimfoni-PPA 2023.*

Isu lain terkait anak adalah mengenai perkawinan anak, data I tahun 2023 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Jawa Tengah sebanyak 10.531 kasus, tertinggi berada di Kabupaten Pemalang (786 kasus) dan terendah di Kota Magelang (16 kasus). Data tersebut menurun dibanding tahun 2022 yang sebesar 11.366 kasus.

**Tabel 2.110.**
**Data Perkawinan Usia Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Cilacap | 119 | 498 | 617 |
| 2 | Kabupaten Banyumas | 101 | 340 | 441 |
| 3 | Kabupaten Purbalingga | 69 | 333 | 402 |
| 4 | Kabupaten Banjarnegara | 60 | 507 | 567 |
| 5 | Kabupaten Kebumen | 33 | 189 | 222 |
| 6 | Kabupaten Purworejo | 38 | 166 | 204 |
| 7 | Kabupaten Wonosobo | 38 | 315 | 353 |
| 8 | Kabupaten Magelang | 79 | 414 | 493 |
| 9 | Kabupaten Boyolali | 41 | 119 | 160 |
| 10 | Kabupaten Klaten | 75 | 148 | 223 |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo | 28 | 79 | 107 |
| 12 | Kabupaten Wonogiri | 25 | 115 | 140 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | 43 | 157 | 200 |
| 14 | Kabupaten Sragen | 48 | 211 | 259 |
| 15 | Kabupaten Grobogan | 97 | 677 | 774 |
| 16 | Kabupaten Blora | 40 | 378 | 418 |
| 17 | Kabupaten Rembang | 16 | 221 | 237 |
| 18 | Kabupaten Pati | 79 | 400 | 479 |
| 19 | Kabupaten Kudus | 41 | 188 | 229 |
| 20 | Kabupaten Jepara | 70 | 421 | 491 |
| 21 | Kabupaten Demak | 64 | 326 | 390 |
| 22 | Kabupaten Semarang | 64 | 187 | 251 |
| 23 | Kabupaten Temanggung | 36 | 267 | 303 |
| 24 | Kabupaten Kendal | 45 | 173 | 218 |
| 25 | Kabupaten Batang | 38 | 277 | 315 |
| 26 | Kabupaten Pekalongan | 17 | 228 | 245 |
| 27 | Kabupaten Pemalang | 99 | 687 | 786 |
| 28 | Kabupaten Tegal | 22 | 184 | 206 |
| 29 | Kabupaten Brebes | 44 | 358 | 402 |
| 30 | Kota Magelang | 3 | 13 | 16 |
| 31 | Kota Surakarta | 26 | 67 | 93 |
| 32 | Kota Salatiga | 8 | 19 | 27 |
| 33 | Kota Semarang | 42 | 142 | 184 |
| 34 | Kota Pekalongan | 9 | 39 | 48 |
| 35 | Kota Tegal | 2 | 29 | 31 |
| **Total** | | **1.659** | **8.872** | **10.531** |

*Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2023.*

Perkawinan anak dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, khususnya pada anak perempuan. Selain melahirkan, norma yang masih banyak berlaku di masyarakat memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada istri untuk mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Di sisi lain, norma sosial mengenai peran laki-laki dalam keluarga dapat menyebabkan suami yang masih

berusia muda rentan mengalami tekanan mental jika tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya. Tekanan ini dapat memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan perceraian. Data perkawinan anak menunjukkan bahwa tahun 2023 sebesar 10.531 kasus telah mengalami penurunan dibanding tahun 2022 (11.366 kasus), namun angka ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan data tahun 2019 yang hanya 5.239 kasus. Perlu upaya lebih keras dimasa depan untuk bagaimana melakukan pencegahan kekerasan perkawinan usia dini khususnya memberikan pemahaman dan penyadaran bagi orang tua maupun anak muda mengenai arti penting kehidupan masa depan, kesiapan secara matang untuk menikah, pergaulan positif dan nilai-nilai tradisional yang masih melekat yang memicu/mendorong meningkatnya perkawinan usia dini.

**Tabel 2.111.**
**Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023**

| Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1.513 | 3.726 | 5.239 |
| 2020 | 1.671 | 11.301 | 12.972 |
| 2021 | 1.909 | 11.686 | 13.595 |
| 2022 | 1.850 | 9.516 | 11.366 |
| 2023 | 1.659 | 8.872 | 10.531 |

*Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2024.*

### 2.4.12 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pembangunan kependudukan ke depan dihadapkan pada tantangan mengimplementasikan sinergitas pembangunan kependudukan lima pilar yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan data dan informasi kependudukan termasuk administrasi kependudukan. Implementasi ini kian sulit terwujud manakala capaian kab/kota yang seharusnya telah menyusun *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan (GDPK) masih belum 100% di Jawa Tengah dan pengintegrasian dengan dokumen perencenaan masih belum optimal. Rakapitulasi data Kab/Kota di Jawa Tengah yang telah menyusun GDPK sampai dengan tahun 2023 baru tercatat 21 Kab/kota yaitu Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Wonosobo.

Sementara itu, upaya menggalakkan kembali program keluarga berencana perlu untuk terus dilakukan mengingat angka CPR sejak tahun 2019 mengalami tren menurun dari 73,48 menjadi 65,70 di tahun 2023. Namun disisi lain angka TFR justru mengalami penurunan menjadi 2,04 di tahun 2023 dari 2,23 di tahun 2019. Demikian halnya dengan unmetneed juga mengalami tren penurunan dari 13,03 pada tahun 2019 menjadi 8,6 di tahun 2023. Untuk TFR yang makin menurun perlu untuk diwaspadai jangan sampai hal itu terus berlanjut mengingat

TFR yang ideal sangat diperlukan untuk menghasilkan kondisi pertumbuhan penduduk yang seimbang

Tri bina memiliki peranan penting dalam pembangunan keluarga. Melalui tri bina (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR dan Bina Keluarga Lansia/BKL) diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang tua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita, remaja dan mempersiapkan kelak di masa lansia agar tetap memiliki produktifitas. Data perkembangan BKB, BKR dan BKL menunjukkan hanya BKR yang mengalami peningkatan di tahun 2023 baik jumlah maupun keaktifannya sedangkan BKB dan BKL mengalami tren sebaliknya. Tri Bina ke depan dihadapkan pada tantangan bagaimana meningkatkan Tri Bina ini lebih berkembang dan berkualitas agar ketahanan keluarga dapat menjadi barometer Pembangunan masyarakat yang berkarakter.

**Tabel 2.112.**

**Perkembangan Tri Bina 2019-2023**

| Tahun | BKB | | | BKR | | | BKL Jateng | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah | Aktif | % | Jumlah | Aktif | % | Jumlah | Aktif | % |
| 2019 | 19.465 | 11.473 | 58,94 | 10.268 | 6.145 | 59,85 | 13.496 | 7.948 | 58,89 |
| 2020 | 11.071 | 10.533 | 95,14 | 5.947 | 5.921 | 99,56 | 7.763 | 7.696 | 99,14 |
| 2021 | 10.473 | 10.338 | 98,71 | 5.860 | 5.794 | 98,87 | 7.804 | 7.724 | 98,97 |
| 2022 | 9.184 | 9.049 | 98,53 | 5.490 | 5.311 | 96,74 | 7.180 | 7.010 | 97,63 |
| 2023 | 8.984 | 8.816 | 98,13 | 5.909 | 5.600 | 94,77 | 6.647 | 6.382 | 96,01 |

*Sumber: BKKBN dan DP3AP2KB Prov.Jateng, 2023.*

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena data penduduk wajib KTP yang sangat dinamis, setiap harinya terdapat penambahan penduduk wajib KTP. Peningkatan layanan kependudukan melalui perekaman, penerbitan KTP dan mendekatkan layanan terus didorong dalam rangka mewujudkan target semua penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk.

Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran Kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2019 meningkat dari 87,42 persen menjadi 96,09 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,16 persen. Tingkat kepemilikan akte kelahiran kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 99,01 persen. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan karena pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, sms *gateway*, dan layanan *online*.

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2021, sebanyak 24 antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### 2.4.13 Kepemudaan dan olahraga

Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai kekuatan utama berupa daya pikir revolusioner, kreatif, agresif, inovatif, dan produktif sehingga mampu memunculkan ide-ide konstruktif dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan kekuatan moral, *control social*, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 16-30 Tahun. Data berdasarkan Statistik Pemuda Jawa Tengah yang dipublikasi terakhir pada November 2023), jumlah pemuda di Jawa Tengah mencapai 7,97 juta jiwa atau sebesar 22,75 persen penduduk Jawa Tengah.

Berbekal kemampuan dan kecakapannya, pemuda mampu menjadi bagian dalam proses pembangunan yang mandiri, kreatif dan berkomitmen. Pemuda memiliki peran penting dalam berbagai aspek pembangunan di Jawa Tengah, salah satunya pembangunan perekonomian Jawa Tengah. Permasalahan terkait pengangguran merupakan salah satu masalah pembangunan perekonomian di Jawa Tengah yang perlu mendapat perhatian serius. Pengangguran dapat menjadi sumber utama kemiskinan, mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Jawa Tengah menjelaskan persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan dan tidak sedang mempunyai pekerjaan. TPT Pemuda Jawa Tengah tahun 2019-2022 mengalami perkembangan fluktuatif, TPT Pemuda Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 11,87% membaik mengalami penurunan sejak Tahun 2020 sebesar 14,83% dan Tahun 2021 sebesar 13,23%.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari banyaknya jumlah pemuda yang bekerja. Salah satu indikator kemandirian pemuda dapat dilihat dari persentase Pemuda yang berusaha sendiri/berwirausaha. Dengan adanya kewirausahaan pemuda diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesempatan bekerja. Tingginya jumlah pemuda yang berstatus sebagai buruh/karyawan menggambarkan masih rendahnya kewirausahaan di kalangan Pemuda Jawa Tengah. Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 60,78 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 58,21.Di sisi lain persetase pemuda yang berusaha sendiri mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sebesar 12,44 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 12,05. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemuda yang berusaha sendiri/berwirausaha, dan masih tingginya pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan.

Selain itu pembangunan pemuda juga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang di dalamnya terdapat 5 (lima) domain yaitu

Pendidikan; Kesehatan dan Kesejahteraan; Lapangan dan Kesempatan Kerja; Partisipasi dan Kepemimpinan; Gender dan Diskriminasi. Data terakhir dari KEMENPORA menunjukkan bahwa capaian IPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 55,50 Meningkat dibandingkat Tahun 2022 sebesar 53,33. Perkembangan Kepemudaan di Jawa Tengah tergambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.113.**

**Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019- 2023**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah Pemuda di Jawa Tengah (Juta Jiwa) | 7,79 | 7,75 | 7,77 | 7,97 | n/a |
| Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda | 11,87 | 14,83 | 13,23 | 11,87 | n/a |
| Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan | 60,91 | 54,18 | 58,21 | 60,78 | n/a |
| Persentase pemuda yang berusaha sendiri | 12,31 | 11,83 | 12,05 | 12,44 | n/a |
| Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | 54,50 | 53,67 | 50,67 | 53,33 | 55,50 |

*Sumber: 1. BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun, 2024.*
*2. KEMENPORA Tahun 2024*

Olahraga merupakan jati diri bangsa dan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Peran olahraga di antaranya bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Perkembangan prestasi olahraga di Jawa Tengah salah satunya dapat diukur dari peringkat pada kejuaraan tingkat nasional melalui Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) bagi atlet penyandang disabilitas. Pelaksanaan kejuaraan PON dan PEPARNAS dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Gelaran kejuaraan tingkat nasional tersebut terakhir dilaksanakan pada Tahun 2021 di Provinsi Papua. Perkembangan prestasi atlet Jawa Tengah pada perhelatan PON mengalami fluktuatif dari Tahun 2012-2021 yaitu menduduki peringkat 4 pada Tahun 2012, meningkat keperingkat 2 pada Tahun 2016, namun mengalami penurunan cukup siknifikan pada Tahun 2021 pada peringkat 6 nasional. Sedangkan prestasi olahraga Jawa Tengah pada kejuaraan PEPARNAS terus mengalami penurunan dari Tahun 2021-2021. Perkembangan prestasi olahraga Provinsi Jawa Tengah pada kejuaraan tingkat Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.114.**
**Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah**
**pada Kejuaraan Tingkat Nasional**

| Kejuaraan | Peringkat | | |
|---|---|---|---|
| | Tahun 2012 | Tahun 2016 | Tahun 2021 |
| Pekan Olahraga Nasional (PON) | 4 | 2 | 6 |
| Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) | 1 | 2 | 3 |

*Sumber: DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Pada UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, disebkan bahwa tujuan olahraga bersifat majemuk yang mencakup kesehatan fisik dan psikis, karakter etos dan moral, ekonomi, sosial, budaya, dan martabat bangsa. Tujuan tersebut perlu diukur untuk memastikan sudah sampai di mana upaya kita mewujudkan tujuan tersebut. *Sport Development Index* (SDI) merupakan instrumen untuk mengukur sekaligus instrumen kebijakan untuk mendinamisasi dan mengoptimalisasi pembangunan olahraga. SDI terdiri dari dimensi SDM, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa. Capaian SDI Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 0,379 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 0,346. Dimensi pembentuk SDI yang mengalami peningkatan yaitu SDM, ruang terbuka, literasi, kesehatan, perkembangan ekonomi, perkembangan personal. Sedangkan dimensi partisipasi, kebugaran, dan performa mengalami penurunan capaian.

**Tabel 2.115.**
**Capaian *Sport Development Index* Tahun 2021-2022**

| Tahun | Dimensi *Sport Development Index* | | | | | | | | | SDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sumber Daya Manusia | Ruang Terbuka | Literasi | Partisipasi | Kebugaran | Kesehatan | Perkembangan Ekonomi | Perkembangan Personal | Performa | |
| **2021** | 0,037 | 0,307 | 0,535 | 0,276 | 0,183 | 0,414 | 0,524 | 0,289 | 0,547 | 0,346 |
| **2022** | 0,038 | 0,472 | 0,567 | 0,237 | 0,164 | 0,42 | 0,531 | 0,462 | 0,522 | 0,379 |

*Sumber: KEMENPORA Tahun 2024.*

### 2.4.14 Perpustakaan

Pada awalnya konsep literasi dimaknai hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun konsep ini semakin berkembang dengan cakupan yang lebih luas. Konsep literasi yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini salah satunya adalah litersi informasi yaitu sebuah keterampilan untuk mengenali kebutuhan informasi dalam setiap permasalahan atau persoalan yang dihadapi, mampu menemukan informasi yang dibutuhkan, mampu mengevaluasi sumber informasi dan mampu memanfaatkan informasi secara etis dan mampu mengkomunikasihan pengetahuan yang diperoleh dalam sebuah informasi (Anjali & Istiqomah, 2021).

Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang peradaban manusia tidak dapat lepas dari perpustakaan. Oleh karenanya, perpustakaan memegang peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan

dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan di daerah terdapat 36 Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan data pengunjung dan jumlah koleksi Perpustakaan Umum Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 2.116.**

**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Orang)**

| NO | Tahun | Pengunjung |
|---|---|---|
| 1 | 2019 | 5.871.814 |
| 2 | 2020 | 3.160.335 |
| 3 | 2021 | 3.131.755 |
| 4 | 2022 | 4.891.435 |
| 5 | 2023*) | 6.405.731 |

*Sumber: *) Data 30 kabupaten/kota dan Provinsi.*
*Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Pengunjung perpustakaan daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah tiap tahun mengalami peningkatan. Pertumbuhan jumlah pengunjung yang tertinggi terjadi di tahun 2023. Hal ini salah satunya didorong oleh kebijakan penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pasca pandemi Covid-19 yang membuat layanan kunjungan perpustakaan umum daerah kembali dibuka untuk masyarakat umum. Pengunjung yang datang ke perpustakaan umum Kembali memanfaatkan koleksi bahan Pustaka yang ada disana. Jumlah koleksi bahan Pustaka berdasarkan jenisnya mengalami peningkatan di tahun 2023.

**Tabel 2.117.**

**Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Jenis Koleksi | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Judul | Eks | Judul | Eks | Judul | Eks | Judul | Eks | Judul | Eks |
| 1 | Koleksi Perpustakaan Provinsi dan Keliling | 1.053.825 | 1.906.840 | 1.061.697 | 1.920.846 | 1.111.585 | 1.914.474 | 1.190.688 | 2.092.799 | 1.342.661 | 2.293.506 |
| 2 | Koleksi *e-book* | 50.085 | 235.236 | 75.998 | 452.112 | 68.802 | 516.436 | 79.949 | 527.485 | 96.322 | 633.197 |
| 3 | Koleksi Khusus untuk pemustaka berkebutuhan khusus | 8.462 | 16.096 | 9.165 | 17.618 | 10.756 | 19.665 | 4.480 | 6.525 | 6.337 | 8.926 |
| | **TOTAL** | **1.112.372** | **2.158.172** | **1.146.860** | **2.390.576** | **1.184.867** | **2.437.435** | **1.275.117** | **2.626.809** | **1.445.320** | **2.935.629** |

*Sumber: *) Data 30 kabupaten/kota dan Provinsi.*
*Dinas Kersipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah koleksi perpustakaan daerah diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan literasi Masyarakat di Jawa Tengah. Tingkat literasi masyarakat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) seperti yang tersaji pada Tabel 2.121. Terlihat bahwa nilai IPLM Provinsi Jawa Tengah di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini berbanding terbalik dari data Tabel 2.119 dan Tabel 2.120 yang menunjukkan peningkatan pengunjung dan jumlah koleksi bahan Pustaka. Penurunan nilai IPLM Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dapat dilihat dari menurunnya tingkat kunjungan masyarakat (UPLM 4) yang merupakan representasi dari pemanfaatan perpustakaan. Hal ini menunjukkan perpustakaan yang ada belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat.

**Tabel 2.118.**
**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah**
**Tahun 2020 – 2023**

| Unsur Pembentuk Literasi Masyarakat (UPLM) | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1) | 0,00080 | 0,00066 | 0,0033 | 0,6030 |
| Ketercukupan Koleksi (UPLM 2) | 0,06760 | 0,04780 | 1,5831 | 0,3020 |
| Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3) | 0,00000 | 0,00003 | 0,0045 | 0,4078 |
| Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (UPLM 4) | 0,00050 | 0,00057 | 0,3342 | 0,1956 |
| Perpustakaan ber-SNP (UPLM 5) | 0,00000 | 0,00006 | 2,3270 | 1,000 |
| Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM 6) | 0,03380 | 0,03249 | 0,2727 | 1,000 |
| Anggota Perpustakaan (UPLM 7) | 0,03260 | 0,03160 | 0,6471 | 1,000 |
| **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)** | **13,54** | **11,33** | **15,62** | **13,67** |

*Sumber: Perpusnas, 2020-2023.*

*Sumber: Perpusnas, 2023 (diolah).*

**Gambar 2.65.**
**Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

### 2.4.15 Transmigrasi

Upaya sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui kerjasama dengan daerah transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi lahan transmigrasi yang ideal yaitu 2C (*clean and clear*) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha, dan Layak lingkungan) bagi calon transmigran. Upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah kerjasama dengan 22 provinsi lokasi transmigrasi diluar Jawa yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Utara, Aceh, dan Bangka Belitung. Kerjasama tersebut direalisasikan dengan penyusunan *MoU* antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 22 Provinsi tersebut.

Selama tahun 2016 – 2021, persentase penempatan transmigran Jawa Tengah cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 13,26 persen menurun menjadi 10,23 persen di tahun 2019, dan sempat terjadi kekosongan penempatan transmigran di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 dan di tahun 2021 menjadi sebesar 0,79 persen. Apabila dilihat dari animo masyarakat terhadap transmigrasi cukup baik namun terkendala kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga realisasi penempatannya tidak cukup besar setiap tahunnya.

**Tabel 2.119.**
**Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No | Tahun | Animo (KK) | Kuota Pusat (KK) | Jumlah Penempatan (KK) | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 2.160 | 257 | 221 | 10,23 |
| 2 | 2020 | 1.263 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2021 | 1.263 | 10 | 10 | 0,79 |
| 4 | 2022 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | 2023 | n/a | n/a | n/a | n/a |

*Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan transmigran sebagai bekal di daerah tujuan telah dilaksanakan pelatihan dan pembekalan pengetahuan mengenai kondisi tempat tujuan, budaya dan tradisi masyarakat setempat kepada calon transmigran yang dilakukan oleh Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatranspenca) Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 pelatihan dasar umum calon transmigran dialihkan ke Balai Latihan Pertanian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Klampok, Banjarnegara. Di tahun 2021, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Banjarnegara tidak lagi melatih calon transmigran. Namun demikian para calon transmigran dari Provinsi Jawa Tengah tetap mengikuti pelatihan di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPLM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2.5. Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan

Kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan di Provinsi Jawa Tengah ditunjukan dari gambaran daya dukung dan daya tampung lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan perubahan iklim. Gambaran lainnya yang dapat menunjukan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup antara lain terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan

hidup, kualitas lahan, rehabilitasi pesisir, pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan, kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB, pengelolaan sumberdaya energi dan mineral, dan penganggulangan bencana. ambaran kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kebencanaan diuraikan sebagai berikut.

### 2.5.1.Daya Dukung dan Daya Tampung

Keberadaan sumberdaya alam di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus memperhatikan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Indeks Jasa Penyedia Air, Jasa Penyedia Pangan, Jasa Pengaturan Air, Jasa Pengaturan Iklim, Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Perlindungan Bencana masih dalam rentang sedang, status D3T air terlampaui, dan D3T pangan belum terlampaui.

Pada Keputusan Menteri LHK No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/ 2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional ditetapkan bahwa kondisi daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Jawa Tengah telah terlampaui yang mana ketersediaan air sebesar 31.032.527.608,75 m3/tahun dan kebutuhan atau pemanfaatan air sebesar 32.719.164.930,76 m3/tahun. Jika dilihat dari distribusi wilayah dengan status D3T air sudah terlampaui mencapai 47,55% dan yang belum terlampaui sebesar 52,45% dari total wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian dari hasil perhitungan secara nasional maka kondisi ketersediaan di Jawa Tengah mengalami defisit sebesar 1.686.637.322,01 m3/tahun. Berdasarkan pemetaan D3T air Jawa Tengah, maka terdapat 20 Kabupaten/Kota dengan status agregrat daya dukung dan daya tampung air terlampaui. Berikut distribusi daya dukung dan daya tampung air setiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

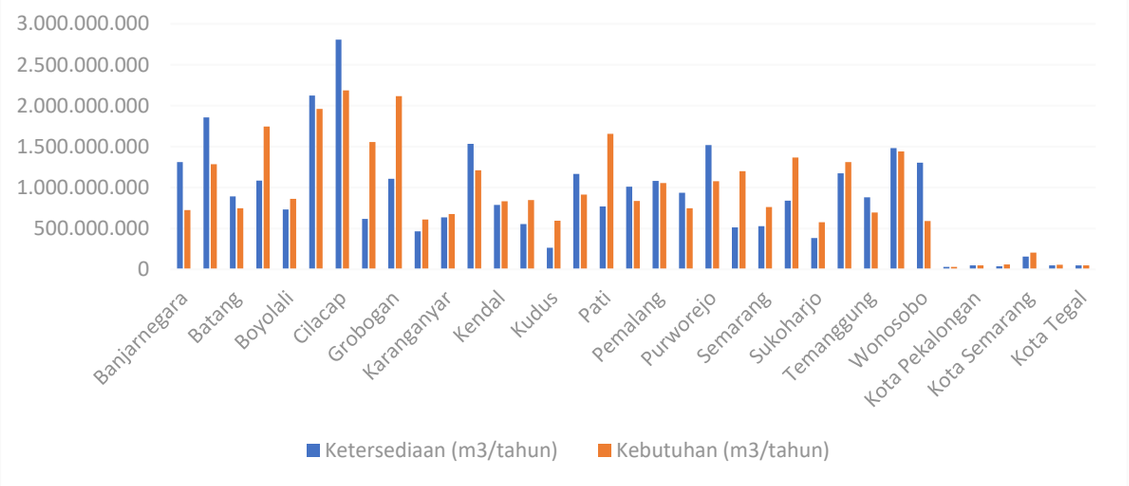


**Gambar 2.66.**
**Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Air Provinsi Jawa Tengah**

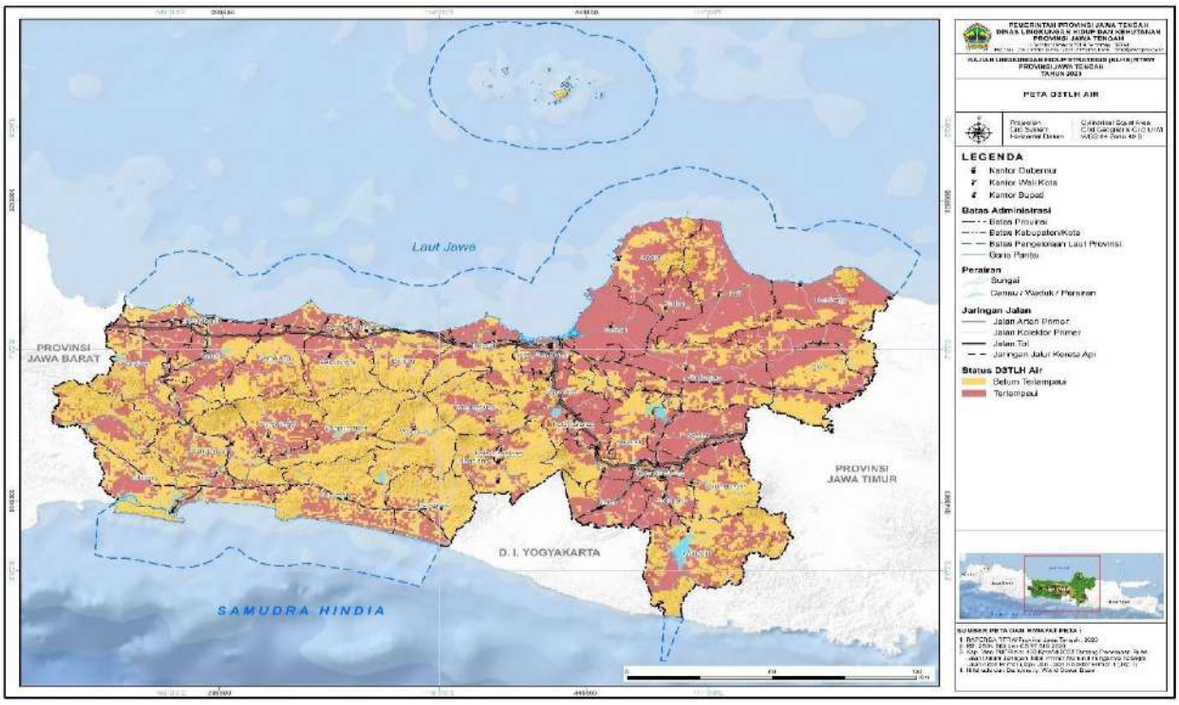


*Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023*

**Gambar 2.67.**
**Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan grafik diatas wilayah Kota di Jawa Tengah cenderung melampaui ambang batas penduduk yang dapat didukung, hal ini disebabkan kondisi wilayah terkait jasa lingkungan hidup penyedia air tidak terlalu baik, tetapi disisi lain wilayah tersebut memiliki jumlah populasi yang banyak. Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan ketersediaan dan kebutuhan air. Hal ini disebabkan perubahan penutupan lahan di Jawa Tengah diikuti dengan peningkatan jumlah populasi.

Selanjutnya Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki total ketersediaan 5.508.531,0 ton beras dan kebutuhan mencapai 2.792.243,71 ton beras sehingga kondisinya masih surplus sebesar 2.716.287,29 ton beras. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya maka masih terdapat sekitar 11,38% yang daya dukung pangannya sudah terlampaui dan 88,62% wilayah yang belum terlampaui daya dukung pangannya. Kondisi daya dukung pangan di setiap kabupaten/kota berbeda sesuai kondisi wilayah tersebut terutama penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Jika dilihat di masing-masing kabupaten/kota maka seluruh kota daya dukung pangannya terlampaui. Berikut ditampilkan status daya dukung dan daya tampung pangan untuk setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.

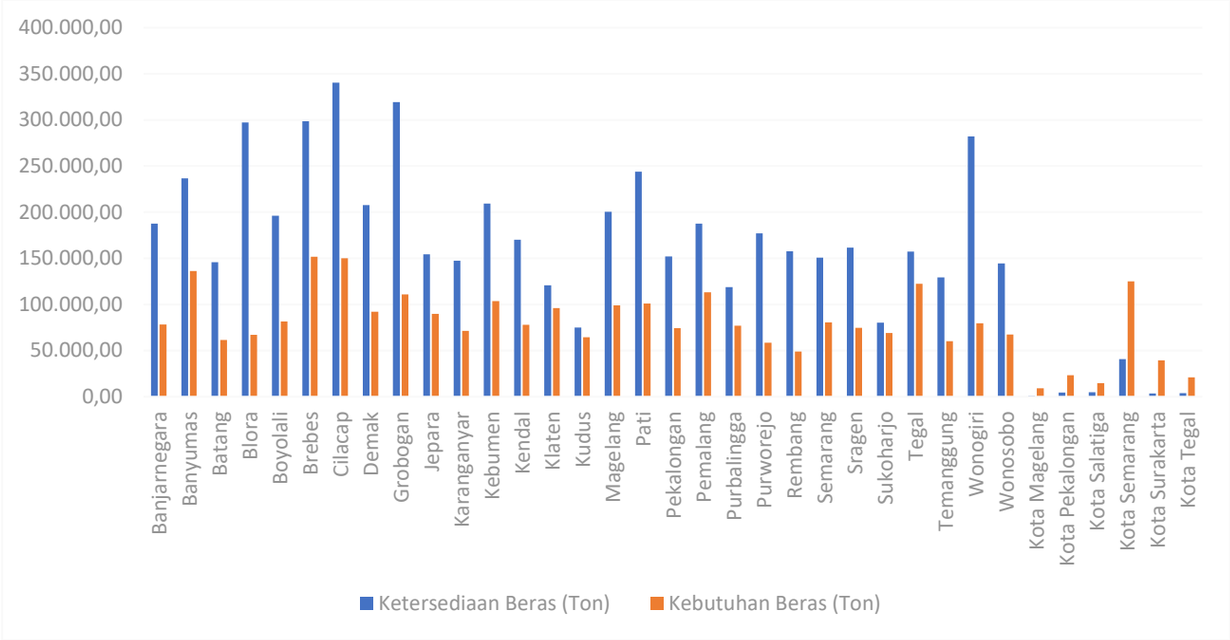


*Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023*

**Gambar 2.68.**

**Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Pangan Provinsi Jawa Tengah**

*Sumber: Dokumen KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, 2023*

**Gambar 2.69.**

**Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah**

### 2.5.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Terjadi kecenderungan peningkatan IKLH Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019-2023 sebesar 1,94 poin, dan pada tahun 2023 IKLH Provinsi Jawa Tengah mencapai 68,59. Meski terus mengalami peningkatan, kondisi IKLH Provinsi Jawa Tengah masih berada di bawah IKLH nasional setiap tahunnya. Mendasarkan pada surat Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024, terdapat perubahan metode perhitungan IKLH sehingga konversi capaian IKLH Jawa Tengah pada 2023 menjadi 75,34. Hal ini akan menjadi baseline dalam penyusunan target yang berlaku mulai tahun 2025. Capaian komponen IKLH setelah dikonversi dengan metode perhitungan baru tersebut adalah sebagai berikut:

- IKA (Indeks Kualitas Air): 68,31
- IKU (Indeks Kualitas Udara): 84,51
- IKL (Indeks Kualitas Lahan): 59,32
- IKAL (Indeks Kualitas Air Laut): 81,39

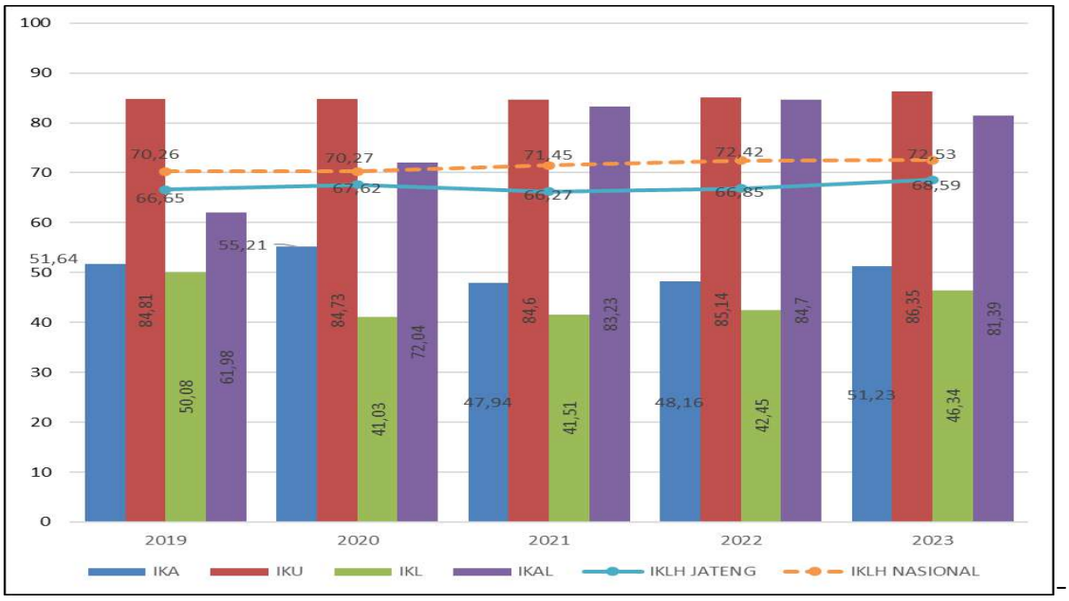


*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,2023*

**Gambar 2.70.**
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018–2023**

### 2.5.3.Perubahan Iklim

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan iklim secara global. Perubahan iklim berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti adanya bencana hidrometeorologi, perubahan musim dan kenaikan muka air laut. Penanganan dampak dari perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi maupun aksi adaptasi guna meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah (dalam skala kecamatan) menunjukan hasil bahwa mayoritas kecamatan di Provinsi Jawa Tengah berada di kelas kerentanan sedang yaitu sebanyak 442 kecamatan atau 77%. Kecamatan dengan kerentanan kelas sangat rendah sebanyak 68 kecamatan atau 12%, sedangkan kecamatan dengan kelas kerentanan tinggi sebanyak 24 kecamatan atau 4%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Tengah saat ini cukup rentan terhadap perubahan iklim yang dikategorikan dari banyaknya kecamatan yang berada di kerentanan kelas sedang. Apabila dilihat dari kondisi geografis maka ancaman wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan peningkatan banjir dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadi peningkatan banjir, dan

dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor rentan terhadap bencana longsor. Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman terjangan gelombang laut terhadap aktivitas nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir.

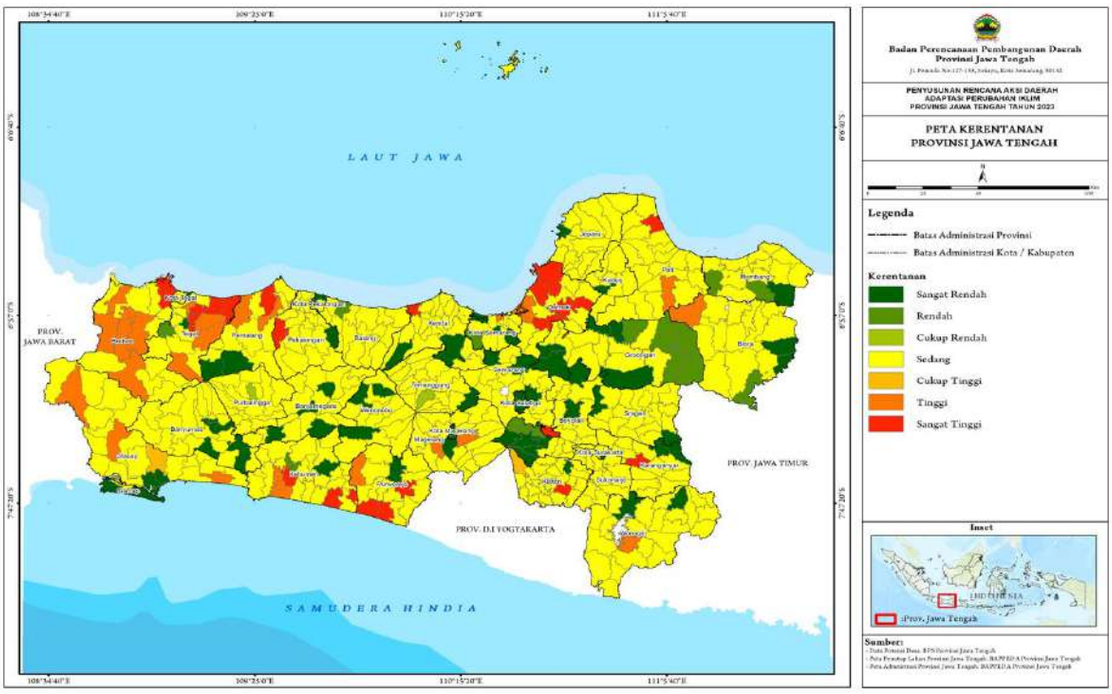


*Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.71.**
**Peta Kerentanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

Terjadinya perubahan iklim berkaitan dengan emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 112.133,9 GgCO2e, meningkat signifikan dari tahun 2010 sebesar 44.062,09 GgCO2e dengan peningkatan sebesar 68.071,81 GgCO2e selama kurun waktu 12 tahun. Pada tahun 2022, sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi GRK di Jawa Tengah dengan total emisi sebesar 84.824,93 GgCO2e (75,65% dari total emisi GRK), disusul sektor pertanian sebesar 24.072,82 GgCO2e (21,46%) dan sektor limbah sebesar 4.923,04 GgCO2e (4,39%).

Peningkatan emisi GRK pada periode 2010-2022 tersebut didominasi oleh peningkatan emisi pada sektor energi. Selama periode tersebut, sektor energi meningkat 283,74% (dari dari 29.895,59 GgCO2e pada tahun 2010 menjadi 84.824,93 GgCO2e pada tahun 2022). Emisi GRK sektor energi ini didominasi oleh pembakaran bahan bakar di pembangkit listrik dan transportasi yang terus meningkat. Pembakaran pada pembangkitt listrik menyumbang lebih dari 44%, sedangkan transportasi menyumbang lebih dari 14% dari total emisi GRK di Jawa Tengah. Pada sektor pertanian, emisi GRK didominasi oleh lepasnya gas metan (CH4) dari budidaya padi dan lepasnya gas N2O dari pengolahan tanah. Lebih dari 14% total emisi GRK di Jawa Tengah diakibatkan oleh budidaya padi dan 8% akibat lepasnya gas N2O. Sementara itu, emisi dari sektor limbah didominasi oleh limbah cair domestik yang menyumbang sekitar 3% dari total emisi GRK Jawa Tengah.

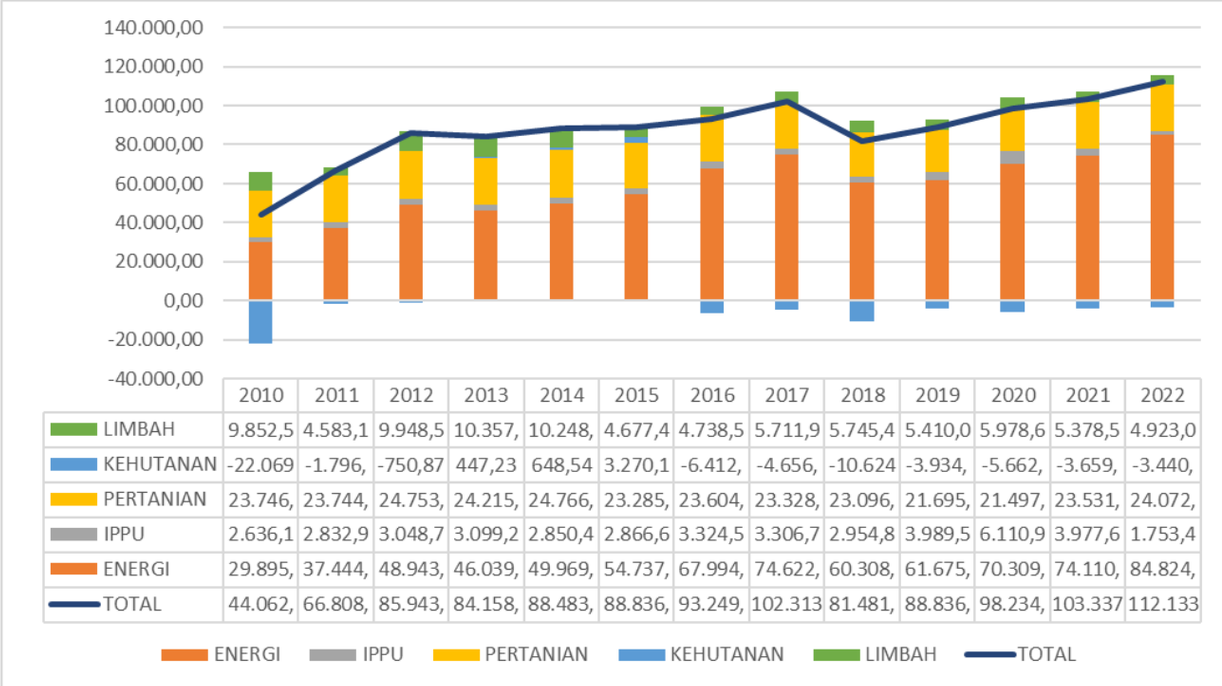


| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMBAH | 9.852,5 | 4.583,1 | 9.948,5 | 10.357, | 10.248, | 4.677,4 | 4.738,5 | 5.711,9 | 5.745,4 | 5.410,0 | 5.978,6 | 5.378,5 | 4.923,0 |
| KEHUTANAN | -22.069 | -1.796, | -750,87 | 447,23 | 648,54 | 3.270,1 | -6.412, | -4.656, | -10.624 | -3.934, | -5.662, | -3.659, | -3.440, |
| PERTANIAN | 23.746, | 23.744, | 24.753, | 24.215, | 24.766, | 23.285, | 23.604, | 23.328, | 23.096, | 21.695, | 21.497, | 23.531, | 24.072, |
| IPPU | 2.636,1 | 2.832,9 | 3.048,7 | 3.099,2 | 2.850,4 | 2.866,6 | 3.324,5 | 3.306,7 | 2.954,8 | 3.989,5 | 6.110,9 | 3.977,6 | 1.753,4 |
| ENERGI | 29.895, | 37.444, | 48.943, | 46.039, | 49.969, | 54.737, | 67.994, | 74.622, | 60.308, | 61.675, | 70.309, | 74.110, | 84.824, |
| TOTAL | 44.062, | 66.808, | 85.943, | 84.158, | 88.483, | 88.836, | 93.249, | 102.313 | 81.481, | 88.836, | 98.234, | 103.337 | 112.133 |

*Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*

**Gambar 2.72.**

**Tren Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2021**

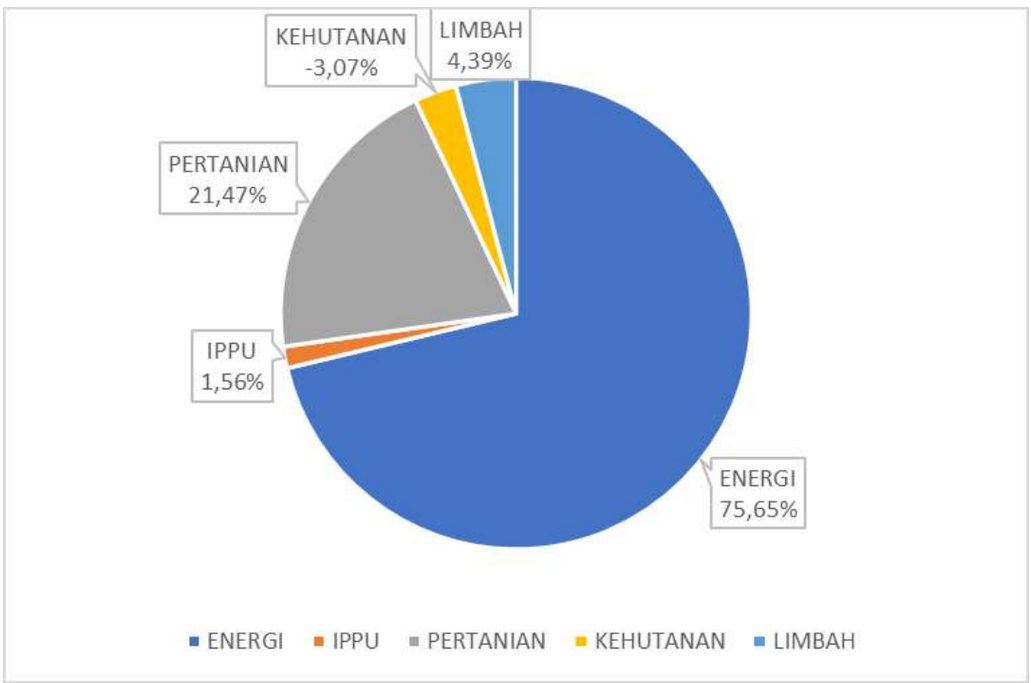


*Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*

**Gambar 2.73.**

**Kontribusi Sektor Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (%)**

Secara akumulasi, total capaian penurunan emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2010 hingga tahun 2023 mencapai 11,6 juta ton $CO_2$eq (status data final). Angka ini merupakan kinerja penurunan emisi GRK yang dilaporkan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak non Pemerintah di Jawa Tengah. Capaian penurunan tersebut berasal dari 3.953 kegiatan. Dari sisi intensitas emisi, saat ini intensitas emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,43 ton/milyar. Sementara itu, capaian penurunan pada periode tahun 2021-2023 berdasarkan data yang telah terlaporkan melalui Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan

Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA) yaitu sebesar 1.934.671,81 ton $CO_2$eq.

Beberapa sektor berperan dalam penurunan emisi GRK di Jawa Tengah selama periode 2021-2023 di antaranya air limbah, blue carbon, energi, industrial process and production use (IPPU), kehutanan dan lahan gambut, persampahan, pertanian, dan transportasi. Dari delapan sektor tersebut, penurunan emisi paling tinggi berasal dari sektor persampahan sebesar 419.650,72 ton $CO_2$eq atau 21,69 persen, sektor kehutanan dan lahan gambut sebesar 405.096,18 ton $CO_2$eq atau 20,94 persen, dan sektor energi sebesar 366.154,31 ton $CO_2$eq atau 18,93 persen. Sedangkan kontribusi paling rendah adalah blue carbon sebesar 16.028,52 ton $CO_2$eq atau 0,83 persen.

Salah satu upaya dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim adalah Pembangunan Rendah Karbon. Pembangunan Rendah Karbon merupakan platform pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalisir eksploitasi sumber daya alam. Strategi dan kebijakan di dalam Pembangunan Rendah Karbon merupakan aksi mitigasi yang melibatkan multisektor dan multi pihak. Aksi-aksi mitigasi Pembangunan Rendah Karbon yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota dilaporkan ke dalam aplikasi AKSARA Bappenas.

### 2.5.4.Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Kondisi kualitas lingkungan hidup juga digambarkan dari tingkat pencemaran, baik pencemaran air, udara, maupun akibat sampah. Kualitas air di Jawa Tengah dominan berada pada kategori tercemar ringan dengan nilai indeks pencemaran pada tahun 2023 sebesar 3,39. Dari 25 sungai di Jawa Tengah yang dilakukan pemantauan seluruhnya berada pada status tercemar ringan-sedang. Sebanyak 24 sungai berada dalam kondisi cemar ringan dan 1 sungai berada pada status cemar sedang yaitu Sungai Palur. Sementara itu tingkat pencemaran air laut dalam kondisi baik dengan nilai indeks kualitas air laut tahun 2023 sebesar 81,39. Demikian juga tingkat pencemaran udara di Jawa Tengah dinilai masih dalam kategori baik, yang ditunjukkan dengan indeks kualitas udara tahun 2023 sebesar 86,35.

**Tabel 2.120.**
**Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| No | Nama Sungai | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu |
| 1 | Baki | 3,66 | Cemar Ringan | 5,2 | Cemar Sedang | 4.72 | Cemar Ringan | 4,09 | Cemar Ringan | 4,00 | Cemar ringan |
| 2 | Premulung | 4,06 | Cemar Ringan | 3,5 | Cemar Ringan | 4.57 | Cemar Ringan | 3,41 | Cemar Ringan | 4,96 | Cemar ringan |
| 3 | Mungkung | 3,01 | Cemar Ringan | 2,85 | Cemar Ringan | 3.55 | Cemar Ringan | 3,39 | Cemar Ringan | 3,43 | Cemar ringan |
| 4 | Grompol | 4,03 | Cemar Ringan | 5,33 | Cemar Sedang | 3.84 | Cemar Ringan | 3,33 | Cemar Ringan | 4,14 | Cemar ringan |
| 5 | Samin | 2,61 | Cemar Ringan | 5,18 | Cemar Sedang | 4.35 | Cemar Ringan | 3,69 | Cemar Ringan | 3,35 | Cemar ringan |
| 6 | Jlantah | 3,36 | Cemar Ringan | 3,02 | Cemar Ringan | 3.16 | Cemar Ringan | 4,32 | Cemar Ringan | 3,98 | Cemar ringan |
| 7 | Palur | 4,06 | Cemar Ringan | 6,12 | Cemar Sedang | 5.08 | Cemar Sedang | 4,92 | Cemar Ringan | 5,15 | Cemar sedang |
| 8 | Pepe | 4,35 | Cemar Ringan | 3,42 | Cemar Ringan | 3.12 | Cemar Ringan | 3,69 | Cemar Ringan | 3,5 | Cemar ringan |

| No | Nama Sungai | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu | Nilai IP | Status Mutu |
| 9 | Babon | 3,97 | Cemar Ringan | 6,62 | Cemar Sedang | 4.03 | Cemar Ringan | 5,04 | Cemar Sedang | 3,96 | Cemar ringan |
| 10 | Bogowonto | 3,51 | Cemar Ringan | 4,02 | Cemar Ringan | 3.22 | Cemar Ringan | 2,91 | Cemar Ringan | 1,95 | Cemar ringan |
| 11 | Garang | 6,53 | Cemar Sedang | 3,4 | Cemar Ringan | 2.88 | Cemar Ringan | 3,40 | Cemar Ringan | 3,27 | Cemar ringan |
| 12 | Gung | 3,51 | Cemar Ringan | 2,9 | Cemar Ringan | 3.78 | Cemar Ringan | 3,33 | Cemar Ringan | 3,48 | Cemar ringan |
| 13 | Kupang | 3,15 | Cemar Ringan | 3,86 | Cemar Ringan | 3.30 | Cemar Ringan | 3,53 | Cemar Ringan | 3,37 | Cemar ringan |
| 14 | Luk Ulo | 2,94 | Cemar Ringan | 0,91 | Kondisi baik | 3.30 | Cemar Ringan | 2,74 | Cemar Ringan | 2,85 | Cemar ringan |
| 15 | Lusi | 3,35 | Cemar Ringan | 3,75 | Cemar Ringan | 2.95 | Cemar Ringan | 1,56 | Cemar Ringan | 2,45 | Cemar ringan |
| 16 | Pemali | 4,66 | Cemar Ringan | 0,77 | Kondisi baik | 3.89 | Cemar Ringan | 3,90 | Cemar Ringan | 3,72 | Cemar ringan |
| 17 | Sambong | 3,74 | Cemar Ringan | 3,41 | Cemar Ringan | 3.04 | Cemar Ringan | 2,73 | Cemar Ringan | 2,84 | Cemar ringan |
| 18 | Serang | 4,66 | Cemar Ringan | 2,29 | Cemar Ringan | 2.32 | Cemar Ringan | 2,14 | Cemar Ringan | 3,15 | Cemar ringan |
| 19 | Serayu | 3,7 | Cemar Ringan | 2,24 | Cemar Ringan | 2.89 | Cemar Ringan | 2,78 | Cemar Ringan | 3,92 | Cemar ringan |
| 20 | Tuntang | 3,19 | Cemar Ringan | 3,59 | Cemar Ringan | 3.09 | Cemar Ringan | 2,84 | Cemar Ringan | 3,86 | Cemar ringan |
| 21 | Wulan | 2,13 | Cemar Ringan | 4 | Cemar Ringan | 4.89 | Cemar Ringan | 3,94 | Cemar Ringan | 2,15 | Cemar ringan |
| 22 | Bengawan Solo | 3,85 | Cemar Ringan | 2,68 | Cemar Ringan | 1.98 | Cemar Ringan | 2,46 | Cemar Ringan | 2,27 | Cemar ringan |
| 23 | Progo | 4,03 | Cemar Ringan | 2,03 | Cemar Ringan | 1.94 | Cemar Ringan | 1,95 | Cemar Ringan | 1,40 | Cemar ringan |
| 24 | Citanduy | 4,62 | Cemar Ringan | 1,97 | Cemar Ringan | 2.14 | Cemar Ringan | 2,62 | Cemar Ringan | 1,94 | Cemar ringan |
| 25 | Cisanggarung | 5,28 | Cemar Sedang | 1,94 | Cemar Ringan | 2.75 | Cemar Ringan | 0,61 | Baik | 1,78 | Cemar ringan |
| 26 | Danau Rawapening | 2,32 | Cemar Ringan | 2 | Cemar Ringan | 2,27 | Cemar Ringan | 3,02 | Cemar Ringan | 1,88 | Cemar ringan |
| Nilai IP Jawa Tengah | | 3,84 | Cemar Ringan | 3,4 | Cemar Ringan | 3.39 | Cemar Ringan | 3,17 | Cemar Ringan | 3,18 | Cemar ringan |

*Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Sedangkan kondisi persampahan di Jawa Tengah digambarkan dengan data timbulan sampah di Jawa Tengah, pada tahun 2023 telah mencapai 6.338.109,37 ton per tahun atau turun 0,40% persen dibandingkan tahun 2022. Pengelolaan sampah di Jawa Tengah baik pengurangan maupun penanganan pada tahun 2023 baru mencapai 3.912.331,17 ton per tahun (61,73 persen), dengan rincian pengurangan sampah sebesar 1.321.899,86 (20,86 persen) dan penanganan sampah sebesar 2.590.431,31 (40,87 persen). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan upaya pengurangan dan penanganan sampah di Jawa Tengah. Meski demikian capaian pengolahan sampah yang meliputi komponen pengolahan sampah organik dan daur ulang materi (material recovery) masih rendah yaitu 16,51 persen pada tahun 2022 (SEB Bappenas-Kemendagri).

**Tabel 2.121.**

**Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Timbunan Sampah (Ton/tahun) | 5.604.080,65 | 6.055.617,05 | 6.152.654,76 | 6.363.806 | 6.338.109,37 |
| 2 | Jumlah Sampah Yang Dapat Dikurangi (ton/tahun) | 1.069.308,62 | 1.175.675,24 | 1.128.400,92 | 1.317.993 | 1.321.899.86 |
| 3 | Jumlah sampah yang tertangani (Ton/tahun) | 2.774.189,20 | 2.626.441,58 | 2.408.372,35 | 2.590.830 | 2.590.431,31 |
| 4 | Total Pengelolaan Sampah | 3.843.497,82 | 3.802.116,82 | 3.536.773 | 3.908.823 | 3.912.331,17 |
| Persentase Pengelolaan Sampah (% ) | | 68,58 | 62,79 | 57,48 | 61,42 | 61,73 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**Tabel 2.122.**

**Data TPA di Jawa Tengah per Tahun 2023**

| No | TPA | Kabupaten/ Kota | Usia Pakai s.d Tahun | Ketinggian Sampah (Meter) | Keberadaan Lapisan Geomembran | Keberadaan IPAL | Keberfungsian IPAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPST Tritih Lor | Cilacap | 2019 | 15 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 2 | TPA Malabar | Cilacap | 2025 | 12 | Ada | Ada | Tidak fungsi |
| 3 | TPA Kunci | Cilacap | 2025 | 7 | Ada | Ada | Tidak fungsi |
| 4 | TPST BLE | Banyumas | selamanya | Residu habis diolah secara termal | Tidak gunakan landfill | Ada | Berfungsi |
| 5 | TPA Kalipancur | Purbalingga | 2024 | 6 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 6 | TPA Winong | Banjarnegara | 2030 | 10 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 7 | TPA Kaligending | Kebumen | 2030 | 20 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 8 | TPA Semali | Kebumen | 2030 | 20 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 9 | TPA Jetis | Purworejo | 2022 | 12 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 10 | TPA Wonorejo | Wonosobo | 2024 | 50 | Tidak ada | Ada | Tidak fungsi |
| 11 | TPA Pasuruhan | Kab. Magelang | 2017 | 25 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 12 | TPA Klegen | Kab. Magelang | 2028 | 5 | Ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 13 | TPA Winong | Boyolali | 2024 | 8 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 14 | TPA Troketon | Klaten | 2026 | 10 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 15 | TPA Mojorejo | Sukoharjo | 2025 | 20 | Tidak ada | Ada | Berfungsi |
| 16 | TPA Ngadirojo | Wonogiri | 2026 | 5 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 17 | TPA Baturetno | Wonogiri | 2023 | 7 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 18 | TPA Purwantoro | Wonogiri | 2024 | 3 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 19 | TPA Slogohimo | Wonogiri | 2026 | 6 | Tidak ada | Tidak Ada | Tidak fungsi |
| 20 | TPA Sukosari Jumantono | Karanganyar | 2023 | 10 | Ada | Ada | Tidak fungsi |

| No | TPA | Kabupaten/ Kota | Usia Pakai s.d Tahun | Ketinggian Sampah (Meter) | Keberadaan Lapisan Geomembran | Keberadaan IPAL | Keberfungsian IPAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | TPA Tanggan | Sragen | 2028 | 25 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 22 | TPA Ngembak | Grobogan | 2030 | 14,79 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 23 | TPA Temurejo | Blora | 2031 | 4 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 24 | TPA Jambe | Blora | 2030 | 5 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 25 | TPA Landoh | Rembang | 2017 | 30 | Ada | Ada | Tidak fungsi |
| 26 | TPA Sukoharjo | Pati | 2027 | 20 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 27 | TPA Tanjungrejo | Kudus | 2025 | 10 | Tidak ada | Ada | Berfungsi |
| 28 | TPA Bandengan | Jepara | 2024 | 10 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 29 | TPA Krasak | Jepara | 2022 | 4 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 30 | TPA Karimunjawa | Jepara | 2024 | 1,5 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 31 | TPA Berahan Kulon | Demak | 2040 | 7 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 32 | TPA Blondo | Kab. Semarang | 2019 | 40 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 33 | TPA Sanggrahan | Temanggung | 2021 | 25 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 34 | TPA Darupono Baru | Kendal | 2027 | 12 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 35 | TPA Randukuning | Batang | 2015 | 15 | Tidak ada | Ada | Berfungsi |
| 36 | TPA Degayu | Kota Pekalongan | 2015 | 20 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 37 | TPA Bojonglarang | Kab. Pekalongan | 2010 | 17 | Tidak ada | Ada | Tidak fungsi |
| 38 | TPA Pegongsoran | Pemalang | 2025 | 10 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 39 | TPA Penujah | Kab. Tegal | 2017 | 4 | Tidak ada | Ada | Tidak fungsi |
| 40 | TPA Kaliwlingi | Brebes | 2050 | 10 | Tidak ada | Ada | Tidak fungsi |
| 41 | TPA Kalijurang | Brebes | 2050 | 50 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 42 | TPA Banyu Urip | Kota Magelang | 2025 | 15 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 43 | TPA Putri Cempo | Kota Surakarta | 2025 | 20 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |
| 44 | TPA Ngronggo | Kota Salatiga | 2026 | 12 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 45 | TPA Jatibarang | Kota Semarang | 2021 | 15 | Ada | Ada | Berfungsi |
| 46 | TPA Muarareja | Kota Tegal | 2025 | 5 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak fungsi |

*Sumber: Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Data di atas menunjukkan bahwa dari 46 TPA, secara teknis terdapat 14 TPA yang telah melebihi usia pakai dan 6 TPA yang usia pakainya habis tahun 2023. Hal ini berarti ada sekitar 43,48% TPA yang usia pakainya habis tahun 2024. Berdasarkan data yang ada 9 dari 46 TPA tidak memiliki IPAL, sedangkan 9 dari 37 IPAL yang ada di TPA tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan pengelolaan air lindi tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan pencemaran terhadap air yang ada di sekitar TPA.

Permasalahan pengelolaan sampah di Jawa Tengah ini menjadi sorotan tersendiri. Selain karena jumlah timbulan yang semakin meningkat, jumlah TPA yang semakin sedikit, juga dikarenakan oleh banyaknya sarana prasarana pengolahan sampah yang kondisinya sudah rusak, sehingga kinerja pengelolaan sampah menjadi tidak optimal. Secara teknis, kondisi TPA di Jawa Tengah ini masih banyak yang menggunakan sistem *open dumping*. Biaya untuk beralih ke sistem *sanitary landfill* dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan (teknologi RDF maupun *Waste to Energy*) masih cukup tinggi, sehingga alternatif paling mudah adalah pengelolaan sampah dengan sistem *open dumping* dan masih banyak ditemui masyarakat membakar maupun membuang sampah ke sungai.

Dalam rangka peningkatan pemenuhan dasar untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kawasan (Perpres Nomor 79/2019) yang mendukung KSPN Borobudur, maka diperlukan sistem persampahan terpadu yakni Pembangunan TPST Regional di Kabupaten Magelang. Adapun perkembangan pelaksanaan pembangunan TPST Regional Magelang adalah penyusunan *Feasibility Study* (DLHK, 2019), penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL (DLHK, 2020), penyusunan DED (DLHK, 2021) dan Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan, *Feasibility Study* jalan masuk, serta proses persiapan pengadaan tanah (DLHK, 2022), tahun 2023 proses pelaksanaan pengadaan tanah oleh Tim BPN serta proses pelepasan kawasan hutan (DLHK, Maret 2023), dan progress untuk 2024 adalah akses jalan masuk ke TPST (BMCK, 2024), pembentukan kelembagaan dan penyusunan DED *landfill* (DLHK, 2024), serta penyusunan kajian dampak negatif (DLH Kab. Magelang, 2024).

Selain timbulan sampah, peningkatan aktivitas seperti industri, pelayanan (rumah sakit, hotel dan lain sebagainya) juga akan menambah sumber pencemar dan volume limbah yang dihasilkan. Sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) umumnya dihasilkan dari sektor industri. Total Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 1.589.621,42 ton/tahun. Produksi limbah B3 paling besar berasal dari Kabupaten Cilacap karena adanya industri semen, beton dan PLTU Batubara yang berasal dari FABA (*Fly Ash and Bottom Ash*). Berikut merupakan tabel jumlah timbulan limbah B3 per kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2022.

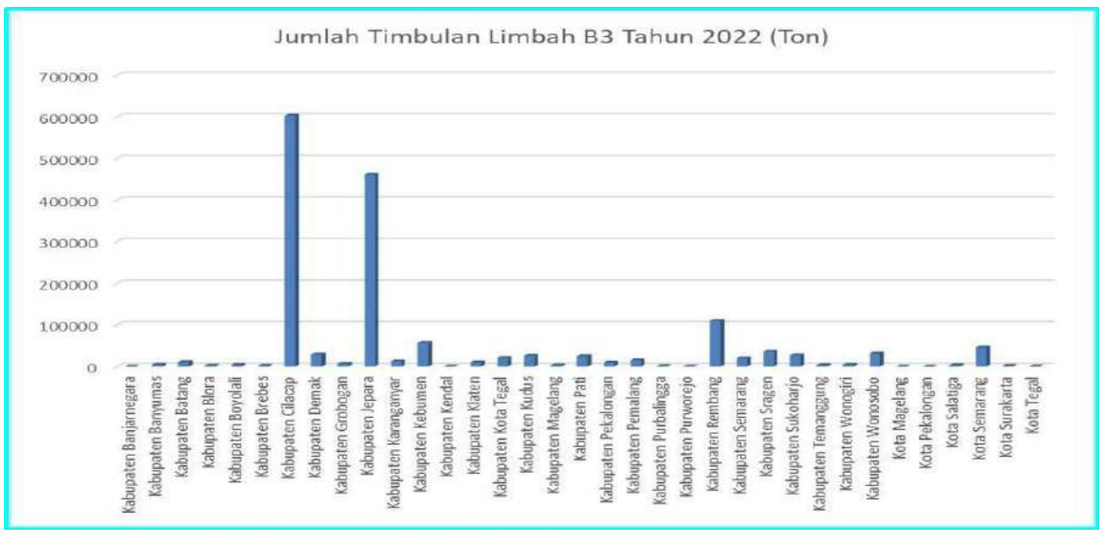


*Sumber : DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.74.**

**Jumlah Limbah B3 Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2022**

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup, Pemerintah melaksanakan kegiatan pengawasan penaatan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Pengawasan lingkungan yang diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) identik dengan kegiatan pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.123.**

**Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023**

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi | Izin | 62 | 69 | 83 | 89 | 236 |
| 2 | Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Usaha dan/ atau kegiatan | 35 | 57 | 38 | 63 | 65 |
| 3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | Usaha dan/ atau kegiatan | 27 | 49 | 19 | 47 | 50 |
| 4 | Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Orang | - | - | 6 | 7 | 7 |

*Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Selain itu DLHK Provinsi Jawa Tengah melakukan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan dalam program propenas (proper nasional). Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995, untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya. Dari penilaian proper, perusahaan akan memperoleh citra/reputasi sesuai bagaimana pengelolaan lingkungannya. Citra tersebut dinilai dengan warna emas, hijau, biru, merah dan hitam. Proper emas merupakan proper yg terbaik, artinya perusahaan tersebut sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan kontinu. Jika sebuah perusahaan mendapat 2x warna hitam secara berturut-turut, perusahaan tersebut bisa dituntut dan usaha akan dihentikan. Dari 220 perusahaan yang dibina, terdapat 147 perusahaan atau 66,82% dalam kategori taat (Warna Emas, Hijau, Biru, Biru-P). Berikut merupakan data perusahaan yang dibina oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah dalam program propenas (proper nasional).

**Tabel 2.124.**

**Rekapitulasi Jumlah Perusahaan yang Mengikuti Proper Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023**

| Kategori | Jumlah Perusahaan |
|---|---|
| EMAS | 10 |
| HIJAU | 11 |
| BIRU | 109 |
| BIRU-P | 0 |
| MERAH | 93 |
| HITAM | 0 |
| DITANGGUHKAN | 2 |
| **JUMLAH** | **225** |
| **TINGKAT KETAATAN** | **58,30%** |

*Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2024*

### 2.5.5.Rehabilitasi Lahan Kritis, Konservasi dan Perlindungan Hutan

Kualitas lahan dinilai dari kondisi tutupan lahan terhadap fungsi lahan, kondisi ini berkaitan dengan luasnya lahan kritis di Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018, luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah, seluas 375.733 ha (11,45 persen dari luas daratan Provinsi Jawa Tengah).

Hutan negara/kawasan hutan di Jawa Tengah seluas 766.390 ha dan hutan rakyat seluas 682.425,61 ha, sehingga total luas hutan di Jawa Tengah 1.448.815,61 ha. Lahan kritis tersebut 86 persen berada di lahan masyarakat/tanah (tanah hak), sedangkan 14 persen di kawasan hutan (hutan negara). Penanganan lahan kritis di Jawa Tengah dilakukan dengan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan *vegetatif* (penanaman bibit) dan sipil teknis (bangunan konservasi tanah dan air). Rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan vegetatif dilakukan melalui pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan pada lahan-lahan yang dibebani hak/lahan masyarakat, sedangkan pendekatan sipil teknis dengan membuat gully plug, dam penahan, dam pengendali, sumur resapan dan bangunan konservasi tanah dan air (KTA) lainnya. Penanganan lahan kritis secara teknis dilaksanakan dengan melibatkan sumberdaya dan partisipasi para pihak yang ada di Jawa Tengah. Perkembangan penanganan lahan kritis tahun 2019-2023 (pendekatan vegetatif dan sipil teknis) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.125.**

**Penanganan Lahan Kritis (Pendekatan Vegetatif / Penanaman) di Jawa Tengah**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Luas Hutan (dalam dan luar kawasan) (ha) | 1.334.232,13 | 1.334.232,13 | 1.334.232,13 | 1.334.232,13 | 1.334.232,13 |
| Luas Lahan Kritis (ha)* | 375.733 | 375.733 | 375.733 | 375.733 | 375.733 |
| Luas lahan kritis yang direhabilitasi per tahun (ha) | 23.431 | 32.389 | 23.477 | 21.371 | 19.052 |
| Persentase rehabilitasi lahan | 6,24 | 8,62 | 6,24 | 5,69 | 5,07 |

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| kritis per tahun (%) | | | | | |
| *Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi (akumulatif) ha* | *23.431* | *55.820* | *79.297* | *100.668* | *119.720* |
| *Persentase rehabilitasi lahan kritis per tahun (%) (akumulatif)* | *6,24* | *14,86* | *21,1* | *26,79* | *31,86* |

*Sumber:*
*1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*
*2.*) Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional.*

**Tabel 2.126.**
**Penanganan Lahan Kritis (Pendekatan Sipil Teknis/ Penerapan Bangunan Konservasi Tanah dan Air) di Jawa Tengah**

| Jenis Bangunan KTA | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Dam Penahan (unit) | 156 | 248 | 62 | 118 | 77 |
| Dam Pengendali (unit) | - | - | - | - | - |
| Gully Plug (unit) | 242 | 440 | 262 | 270 | 235 |
| Sumur Resapan (unit) | 450 | 522 | 1.500 | 840 | 180 |
| Instalasi Pemanenan Air Hujan - IPAH (unit) | - | - | - | - | 28 |
| JUMLAH | 848 | 1.210 | 1.824 | 1.228 | 520 |

*Sumber/ Keterangan :*
*1.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*
*2.KTA : Konservasi tanah dan air*

Lahan kritis yang tersebar di kawasan hutan/hutan negara dilakukan melalui reboisasi hutan baik pada hutan lindung, hutan konservasi. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan hutan negara, yang terkait dengan permasalahan sosial seperti konflik tenurial, terbatasnya akses kelola sumberdaya hutan dilakukan melalui program perhutanan sosial. Untuk mengupayakan kelestarian usaha, kelestarian hasil dan kelestarian lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan melalui *agroforestry* (wanatani).

Keberadaan lahan kritis ini telah berkontribusi terhadap penurunan daya dukung DAS, sehingga rehabilitasi lahan kritis difokuskan pada 18 DAS prioritas yang perlu dipulihkan daya dukungnya dan 12 DAS prioritas yang perlu dipertahankan daya dukungnya di di Jawa Tengah sesuai Perda Jawa Tengah No.15 tahun 2014 dan Pergub Jawa Tengah No.42 tahun 2015.

Penanganan/ rehabilitasi lahan kritis juga dilakukan melalui penguatan kelembagaan DAS, seperti forum – forum DAS pada berbagai lokusnya. Selain itu juga diberikan apresiasi kepada desa – desa di Jawa Tengah yang telah melakukan pengelolaan DAS sebagai wujud kontribusi masyarakat dalam mengelola DAS pada level wilayah administratif terkecil dalam bentuk Desa Peduli DAS Lestari. Pada

tahun 2023, telah ditetapkan 14 Desa Peduli DAS Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah (2 Desa Kategori Utama, 5 Desa Kategori Madya, 1 Desa Kategori Pratama, 6 Desa Kategori Rintisan). Penetapan Desa Peduli DAS Lestari melalui rangkaian penapisan dan penilaian berdasarkan kriteria/ ketentuan tertentu yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah.

Penanganan lahan juga dilaksanakan di daerah lahan basah/ pesisir melalui konservasi dan rehabilitasi mangrove. Rehabilitasi lahan basah mangrove dilakukan melalui penanaman mangrove yang dimaksudkan untuk melindungi pantai dari arus dan hempasan ombak, sebagai tempat memijah, membesar dan mencari makan berbagai biota. Perkembangan rehabilitasi lahan basah mangrove sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.127.**

**Rehabilitasi Mangrove Di Jawa Tengah**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luas rehabilitasi mangrove (Ha) (A) | 58 | 19,4 | 174,12 | 27 | 55,7 | DLHK* |
| Luas Penanaman Mangrove (Ha) (B) | 19.6 | 6.4 | 9 | 8,89 | 8,15 | DKP** |
| Luas rehabilitasi mangrove per tahun (ha) (A+B) | 77,6 | 25,8 | 183,12 | 35,89 | 63,85 | - |
| Akumulatif Luas rehabilitasi mangrove (ha) | 77,6 | 103,4 | 286,52 | 322,41 | 386,26 | - |

*Sumber:*
*1. * ) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024*
*2. **) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Selain rehabilitasi lahan kritis/pemulihan DAS, dilakukan juga upaya mempertahankan tutupan lahan melalui inisiatif - inisiatif konservasi kawasan yang dikelola secara kolaboratif multisektor dan multipihak misalnya melalui pembentukan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) dan Cagar Biosfer, maupun kawasan konservasi/ perlindungan keanekaragaman hayati yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti Taman Hutan Raya Mangkunegoro I dan Kebun Raya Baturaden.

Selanjutnya mempertimbangkan UU No.5 tahun 1990, UU No.32 tahun 2009, UU No.23 tahun 2014 dan PP 28 tahun 2011, penggunaan nomenklatur Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) sebagai entitas konservasi berbasis kawasan yang dikelola secara kolaboratif multisektor dan multi pihak yang diiniasiasi oleh daerah disesuaikan menjadi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP)

Cagar Biosfer merupakan kawasan/situs yang ditetapkan oleh UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan atas upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang terpercaya. UNESCO telah menetapkan 2 (dua) Cagar Biosfer di Jawa Tengah yaitu Cagar Biosfer Karimun Jawa–Jepara–Muria seluas 1.236.083,97 Ha dan Cagar Biosfer Merapi–Merbabu–Menoreh seluas 254.876,75 Ha

Kondisi tutupan lahan dan hutan bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, pencurian kayu dan

kebakaran hutan. Gambaran mengenai kerusakan kawasan hutan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.128.**

**Kerusakan Kawasan Hutan di Jawa Tengah**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Luas pencurian pohon (ha)* | 22,88 | 17,41 | 14,6 | 91 | 105,09 |
| Indikasi Luas Karhutla (ha)** | 4.782,00 | 7.516,00 | 599,00 | 107,00 | 9.965,59 |
| Emisi $CO_2$ Karhutla (Ton $CO_2e$)** | 491.617,00 | 85.750,00 | 90.504,00 | 19.537,00 | 1.193.013,00 |

*Sumber :*
1. *) *Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*
2. ** ) www.sipongi.menlhk.go.id (KLHK) / waktu akses 20 mei 2024 pukul 10.16 WIB

Luasan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jawa Tengah berbeda-beda setiap tahun, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh pola cuaca. Pada tahun 2023 luasan karhutla mencapai 9.965,59 ha atau terluas pada periode 5 tahun terakhir karena kuatnya pengaruh *el-nino* di tahun 2023. Hal ini sudah diantisipasi dengan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan pembuatan infrastruktur pemadaman karhutla seperti misalnya sekat bakar. Karhutla menimbulkan kerugian ekonomi (hilang/ rusaknya potensi hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan) dan ekologi (kerusakan habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan).

### 2.5.5.Pemanfaatan hutan dan Kapasitas Pengelolaan Hutan

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Sedangkan pengolahan hasil hutan berkelanjutan ditentukan sejauh mana pengguna kawasan hutan (yang bersifat perorangan, kelompok masyarakat maupun badan hukum swasta) memenuhi kewajiban terhadap izin/kerjasama yang telah ditetapkan dan industri pengolahan hasil hutan tertib dalam penatausahaan hasil hutan Berikut gambaran perkembangan produksi kayu di Jawa Tengah.

**Tabel 2.129.**

**Produksi Kayu di Jawa Tengah**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Produksi Kayu Asal Hutan Rakyat ($m^3$) | 2.632.756,10 | 2.682.476,19 | 1.821.315,97 | 2,149,541.51 | 2.061.492,71 |
| Produksi Kayu Asal Hutan Negara ($m^3$) | 278.118,06 | 361.641,11 | 249.517.67 | 328,451.67 | 332.316,00 |
| Total Produksi Kayu ($m^3$) | 2.910.874,16 | 3.044.117,30 | 1.821.315,97 | 2,477,993.17 | 2.393.808,71 |

*Sumber:*
*Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Salah satu instrumen untuk mencapai pengelolaan hutan lestari adalah Kepatuhan industri pengolahan hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan melalui Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Industri pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikasi SVLK akan memiliki keunggulan kompetitif terutama di pasar internasional karena memenuhi kriteria produk ramah lingkungan (*ecolabel*) sehingga akan mendorong implementasi pengelolaan hutan lestari. Berikut gambaran perkembangan pengguna kawasan, industri pengolahan hasil hutan dan di Jawa Tengah.

**Tabel 2.130.**

**Penggunaan Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Jawa Tengah**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pengguna kawasan hutan (unit) | 193 | 201 | 203 | 207 | 190 |
| Industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 $m^3$ berizin (unit) | 967 | 999 | 1.007 | 1.026 | 1061 |
| Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (unit) | 736 | 838 | 894 | 905 | 955 |

*Sumber:*
*Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses kelola serta pemanfaatan hutan oleh masyarakat, memberi kesempatan masyarakat mengelola hutan secara legal dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan yang tinggal di kawasan hutan. Berikut gambaran perkembangan perhutanan sosial di Jawa Tengah tahun 2019-2023.

**Tabel 2.131.**

**Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah**

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Luas Akses kelola Perhutanan Sosial (ha) | 35.173,63 | 35.828,84 | 79.461,49 | 79.461,49 | 93.426,09 |
| Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi (kelompok) | 79 | 81 | 90 | 90 | 119 |
| Kepala Keluarga yang terlibat dalam pengelolaan Perhutanan Sosial (kk) | 17.358 | 17.508 | 19.579 | 19.579 | 23.327 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Sampai dengan tahun 2023, di Jawa Tengah telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 119 SK untuk 23.327 KK di Jawa Tengah dengan luas total sebesar 93.426,09 Ha. Pengelolaan kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial maupun skema lainnya dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH). Khusus untuk pengelolaan usaha Perhutanan Sosial dibentuk kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan

Sosial (KUPS). KTH dan KUPS dalam pengelolaan kawasan hutan dibina / didampingi oleh Penyuluh Kehutanan untuk meningkatkan kapasitas kelola kawasan, kelola usaha dan kelola lingkungan. Namun demikian terjadi kecenderungan jumlah Kelompok Tani Hutan meningkat setiap tahun sementara jumlah Penyuluh Kehutanan berkurang.

**Tabel 2.132.**

**Perkembangan Kelembagaan KTH dan SDM Penyuluh Kehutanan di Jawa Tengah**

| OPD | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | KTH | Penyuluh | KTH | Penyuluh | KTH | Penyuluh | KTH | Penyuluh | KTH | Penyuluh |
| CDK I | 504 | 58 | 504 | 54 | 504 | 54 | 508 | 53 | 508 | 52 |
| CDK II | 427 | 38 | 427 | 41 | 427 | 41 | 427 | 39 | 428 | 39 |
| CDK III | 465 | 42 | 465 | 39 | 465 | 38 | 477 | 31 | 518 | 26 |
| CDK IV | 211 | 22 | 211 | 23 | 211 | 23 | 234 | 22 | 251 | 21 |
| CDK V | 276 | 29 | 276 | 29 | 276 | 29 | 257 | 28 | 265 | 26 |
| CDK VI | 393 | 50 | 393 | 45 | 393 | 45 | 462 | 41 | 528 | 38 |
| CDK VII | 612 | 44 | 612 | 41 | 612 | 41 | 934 | 39 | 1.041 | 38 |
| CDK VIII | 380 | 25 | 380 | 27 | 380 | 26 | 233 | 25 | 283 | 24 |
| CDK IX | 259 | 27 | 259 | 25 | 259 | 24 | 256 | 24 | 308 | 24 |
| CDK X | 434 | 44 | 434 | 42 | 434 | 41 | 436 | 37 | 497 | 34 |
| CDK XI | 191 | 28 | 191 | 26 | 191 | 25 | 293 | 19 | 313 | 18 |
| Kantor DLHK | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| JUMLAH | 4152 | 412 | 4152 | 397 | 4152 | 392 | 4517 | 363 | 4940 | 345 |

*Sumber:*
*Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Sedangkan kapasitas Penyuluh Kehutanan dan perkembangan kelembagaan KTH dan KUPS sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.133.**

**Perkembangan Kapasitas Penyuluh, KTH dan KUPS di Jawa Tengah**

| KATEGORI | JENJANG | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Penyuluh** | Pemula | n.a | 1 | - | 1 | - |
| | Terampil | n.a | - | 5 | - | 5 |
| | Mahir | n.a | - | 26 | - | 26 |
| | Penyelia | n.a | - | 26 | - | 26 |
| | Pertama | n.a | - | 43 | - | 42 |
| | Muda | n.a | 175 | - | 72 | 169 |
| | Madya | n.a | | 21 | - | 20 |
| | Utama | n.a | - | - | - | - |
| | JUMLAH | 412 | 397 | 392 | 363 | 345 |
| **KTH** | Pemula | 3.794 | 3.794 | 3.794 | 4.148 | 4.539 |
| | Madya | 349 | - | 49 | - | 49 |
| | Utama | - | 9 | - | 9 | - |
| | JUMLAH | 4.152 | 4.152 | 4.152 | 4.517 | 4.940 |
| **KUPS** | Blue | - | - | - | - | 167 |
| | Silver | - | - | - | - | 58 |
| | Gold | - | - | - | - | 11 |
| | Platinum | - | - | - | - | - |
| | JUMLAH | - | - | - | - | 236 |

*Sumber/ Keterangan :*
1. *Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2024.*
2. KTH : kelompok tani hutan
3. KUPS : kelompok usaha perhutanan sosial

Pengelolaan kawasan hutan oleh KTH memberikan dampak ekonomi pada tingkat tapak yang diukur melalui Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (NTE KTH) merupakan instrumen pengukuran nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor kehutanan dalam hal terkait aktifitas ekonomi berbasis lahan hutan. Adanya data NTE KTH menjadi sarana yang strategis untuk menyusun strategi ekonomi yang efektif dalam pengelolaan kehutanan di tingkat tapak, perkembangan NTE KTH di Jawa Tengah dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.134.**

**Perkembangan Nilai Transaksi Ekonomi KTH di Jawa Tengah**

| TAHUN | KTH (unit) | NTE KTH (Rp.) |
|---|---|---|
| *2022* | *200* | 29.625.748.907 |
| *2023* | *563* | 90.778.196.837 |

*Sumber/ Keterangan :*
1. www.simluh.bp2sdm.menlhk.go.id (KLHK)/ waktu akses 6 Mei 2024 pukul 14.30WIB
2. Inisiasi penghitungan NTE KTH dimulai tahun 2022

Peningkatan nilai NTE KTH di Jawa Tengah pada periode 2022 - 2023 salah satunya disebabkan peningkatan partisipasi pencatatan yang dilakukan KTH di Jawa Tengah. Namun demikian pendalaman terhadap komponen penyusun NTE KTH seperti nilai transaksi, volume produksi, permintaan pasar, dan faktor-faktor ekonomi lainnya, akan dapat menjadi masukan dalam membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas KTH. Selain itu, NTH KTH ini juga merupakan indikasi kinerja pendampingan Penyuluh Kehutanan. Penyuluh Kehutanan juga melakukan pendampingan terhadap Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang mengelola kawasan hutan yang menjadi objek Perhutanan Sosial. Perkembangan Nilai Ekonomi KUPS yang menunjukkan proses pengelolaan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.135.**

**Perkembangan Nilai Ekonomi KUPS di Jawa Tengah**

| TAHUN | KUPS* | KOMODITAS** | JENIS KOMODITAS** | NILAI EKONOMI (Rp)*** |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | Ekowisata | 4.000.000 |
| 2021 | 1 | 3 | HHK Lainnya | 34.325.000 |
| 2022 | 4 | 3 | Kayu Putih | 304.200.000 |
| 2023 | 29 | 14 | Jagung | 123.267.230.000 |

Sumber/ Keterangan :
1. https://gokups.menlhk.go.id (KLHK)/ *waktu akses tanggal 16 Mei 2024 pukul 10.37 WIB*
2. *)KUPS (dengan hasil produk) yang melakukan pemutakhiran data
3. **)Jenis Komoditas terbanyak
4. ***) Nilai Ekonomi Tertinggi

Nilai Ekonomi KUPS menunjukkan perkembangan aktifitas kelola usaha yang dilakukan oleh KUPS. Pada periode 2020 - 2023 nilai ekonomi KUPS selalu meningkat yang sangat terkait dengan partisipasi pemutakhiran data oleh KUPS

dan dorongan dari pendamping perhutanan sosial, kondisi ini akan semakin meningkat pada masa yang akan datang dengan meningkatnya partisipasi KUPS. Terkait pengelolaan perhutanan sosial, harus dipahami secara komprehensif meliputi pilar kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola lingkungan. Sehingga untuk menilai keberhasilan perhutanan sosial harus mencakup ketiga pilar dimaksud.

### 2.5.1.Pertambangan

Potensi mineral dan batuan di Jawa Tengah tersebar di 35 kabupaten/kota yang menjadi komoditas utama sebagai bahan konstruksi pembangunan, baik untuk proyek infrastruktur Jawa Tengah maupun Proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perkiraan kebutuhan material untuk Proyek PSN di Jawa Tengah adalah sebesar ± 113 Juta $m^3$. Akan tetapi Jawa Tengah hanya mampu memenuhi ± 31 Juta m3. Potensi mineral dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya sehingga diharapkan penambangan yang dilakukan tidak berdampak besar pada kerusakan lingkungan hidup.

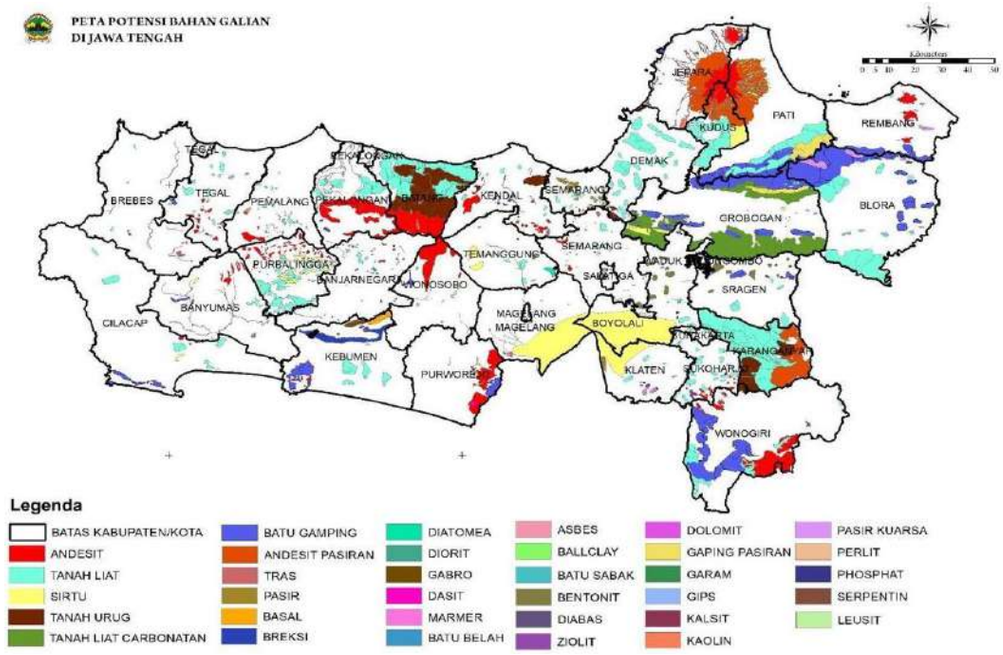


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021*

**Gambar 2.75.**
**Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah**

Tantangan yang di hadapi Provinsi Jawa Tengah terkait urusan pertambangan adalah pertambangan ilegal yang keberadaanya hilang dan timbul. Hilang setelah dilakukan penertiban tetapi muncul lagi di kemudian hari. Aktivitas ilegal *mining* di Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan perkembangan yang fluktuatif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan melalui penegakan hukum agar fungsi dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Berikut kondisi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019-2023.

**Tabel 2.136.**
**Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Luas PETI (ha) | 133 | 128 | 85,98 | 278,97 | 134,83 |
| Sidak PETI (obyek) | 114 | 107 | 89 | 160 | 158 |
| Proses Hukum (kasus) | 9 | 8 | 23 | 23 | 1 |
| Lokasi di Kab/Kota | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 |

*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Karakter pertambangan tanpa izin bersifat sporadik sehingga luas areanya tidak bisa ditetapkan secara pasti. Pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar peraturan sektor mineral dan batubara. tetapi dapat diduga melanggar sektor lain seperti lingkungan dan tata ruang sehingga penertiban dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang di sektor tersebut, baik instansi provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah yang terdiri dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangani aktivitas pertambangan tanpa izin. Penertiban pertambangan tanpa izin selain dengan cara penegakan hukum tetapi juga diarahkan pada pemenuhan aspek legalitas sehingga dapat dilakukan penindakan dan pengendalian yang didukung dengan Sistem Pelaporan Usaha Pertambangan (SILUP).

Aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan masalah lingkungan, sehingga perlu dorongan untuk melaksanakan kaidah penambangan yang baik. Kaidah penambangan yang baik artinya penambangan yang menaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dengan berlandaskan pada efektifitas dan efesiensi, melaksanakan konservasi, memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta ikut serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kaidah penambangan yang baik dapat diukur melalui persentasi *Good Mining Practice*. Di Jawa Tengah selama kurun waktu 2018 hingga 2022 persentase *Good Mining Practice* mengalami peningkatan dari 54,82 persen tahun 2018 menjadi 96,53 persen tahun 2023. Provinsi Jawa Tengah telah meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup sekitar yang lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.137.**
**Perkembangan *Good Mining Practice* (GMP) di Jawa Tengah**
**Tahun 2019 - 2023**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah Total Pemegang IUP | 360 | 355 | 355 | 309 | 317 |
| Jumlah Pemegang IUP yang melaksanakan GMP | 306 | 302 | 306 | 275 | 306 |
| Persentase *Good Mining Practice* (%) | 85,00 | 85,07 | 86,20 | 89,00 | 96,53 |

*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Kedepan penilaian *Good Mining Practice* periode 2024 sampai dengan 2026 menggunakan penilaian baru yang lebih detail, yaitu terkait 5 aspek kewajiban diantaranya:

1) Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3 Pertambangan);
2) Keselamatan Operasi Pertambangan (KO Pertambangan);
3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang;
4) Upaya konservasi sumberdaya mineral dan Batubara; dan
5) Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan baik cair, padat, gas, sampai memenuhi baku mutu lingkungan.

Lima aspek kewajiban kemudian dijabarkan menjadi 15 (lima belas) poin kriteria sebagai berikut:

1) Kepala Teknik Tambang;
2) Tanda Batas WIUP;
3) Statistik kecelakaan tambang;
4) Laporan Kegiatan;
5) Kelengkapan sarana pendukung;
6) Tenaga teknis;
7) Pembayaran pajak mineral;
8) Teknik pertambangan;
9) Pengolahan lanjutan;
10) Konservasi bahan tambang;
11) Keselamatan operasional pertambangan;
12) Keselamatan dan kesehatan kerja;
13) Pengelolaan lingkungan hidup;
14) Program pemberdayaan masyarakat/CSR; dan
15) Reklamasi dan pascatambang.

### 2.5.2. Penataan Ruang

Menindaklajuti terbitnya Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, provinsi Jawa Tengah melakukan revisi Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dilakukan revisi seuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan antara matra darat dengan matra laut.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 sebagai dokumen rencana tata ruang matra laut, pada tahun 2022 dilakukan reviu untuk diintegrasikan pada revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun 2023 dokumen materi teknis yang disusun/direviu telah mendapatkan persetujuan teknis dari Kementrian Kelautan Perikan, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dalam menyusun Rencana Tata Ruang. Kebutuhan dokumen Rencana Tata Ruang bagi Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, acuan pemanfaatan ruang dalam pembangunan sectoral dan penerbitan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut serta pemberian ha katas tanah dan hak pengelolaan. Perkembangan status penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.138.**
**Update Status RTRW Kabupaten/Kota Di provinsi Jawa Tengah**
**Per 17 April 2024**

| NO | KABUPATEN | Revisi &PK | Tahapan di Prov | | *Proses* | *Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)* | Perda Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rekom Gub (Sblm UUCK) | BAT KPRD Prov (Pasca UUCK) | *Persub ATR (Sdh Terbit Rekom Gub/ BAT KPRD Prov)* | | |
| 1 | Kabupaten Cilacap | | | | | | Perda No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda 9/2011 tentang RTRW Kab Cilacap 2011-2031(1April2021) |
| 2 | Kabupaten Banyumas | | | | | | Penetapan revisi RTRW Kabupaten Banyumas menggunakan mekanisme melalui permen ATR |
| 3 | Kabupaten Purbalingga | | | | | | Perda 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda 5/2011 tentang RTRW Kab Purbalingga 2011-2031(28 Agustus 2020) |
| 4 | Kabupaten Banjarnegara | | | | | | Perda No. 6 Tahun 2023 (19 Oktober 2023) |
| 5 | Kabupaten Kebumen | | | | | | Perda No. 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Kebumen (1 Februari 2024) |
| 6 | Kabupaten Purworejo | | | | | | Perda No.10 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Purworejo 2021-2041(30Juli2021) |
| 7 | Kabupaten Wonosobo | | | | | | Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 - 2043 (10 Juli 2023) |
| 8 | Kabupaten Magelang | | | | | | Evaluasi FPR Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 April 2024 |

| NO | KABUPATEN | Revisi &PK | Tahapan di Prov | | *Proses* | *Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)* | Perda Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rekom Gub (Sblm UUCK) | BAT KPRD Prov (Pasca UUCK) | *Persub ATR (Sdh Terbit Rekom Gub/ BAT KPRD Prov)* | | |
| 9 | Kabupaten Boyolali | | | | | | Perda No 8 Th 2019 tentang Perubahan atas Perda 9 Th 2011 tentang RTRW Boyolali 2011–2031.(17 Juli 2019) |
| 10 | Kabupaten Klaten | | | | | | Perda Kab. Klaten No. 10 tahun 2021 tentang RTRW Kab.Klaten Tahun 2021-2041 (24 November 2021) |
| 11 | Kabupaten Sukoharjo | | | | | | Perda 1 Th 2018 tentang perubahan atas Perda 14 Th 2011 tentang RTRWSukoharjo 2011–2031.(9 Maret 2018) |
| 12 | Kabupaten Wonogiri | | | | | | Perda No.2 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Wonogiri 2020-2040 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | | | | | | Perda 19 Th 2019 tentang perubahan atas Perda 1 Th 2013 tentang RTRW Karanganyar 2013–2032.(27 Agust 2019) |
| 14 | Kabupaten Sragen | | | | | | Perda 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Sragen tahun 2011–2031 tanggal 5 Mei 2020 |
| 15 | Kabupaten Grobogan | | | | | | Perda Kab. Grobogan No.12 Tahun 2021 ttg RTRW Kab Grobogan Tahun 2021-2041 Ditetapkan 17 Des 2021 |
| 16 | Kabupaten Blora | | | | | | Perda No. 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Blora 2021-2041 tanggal 1 April 2021 |
| 17 | Kabupaten Rembang | | | | | | Perda RTRW Kabupaten Rembang No. 2 tahun 2023 per tgl 10 oktober 2023 |
| 18 | Kabupaten Pati | | | | | | Perda 2/2021 tentang Perubahan Atas Perd a5/2011 tentang RTRW Kab Pati 2010-2030 tgl 1 April 2021 |
| 19 | Kabupaten Kudus | | | | | | Perda 1/2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 tgl 30 Maret 2022 |
| 20 | Kabupaten Jepara | | | | | | Perda No. 4 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 (7 September 2023) |
| 21 | Kabupaten Demak | | | | | | Perda No.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kab 2020 |
| 22 | Kabupaten Semarang | | | | | | Perda No. 6 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Semarang |

| NO | KABUPATEN | Revisi &PK | Tahapan di Prov | | *Proses* | *Proses Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)* | Perda Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rekom Gub (Sblm UUCK) | BAT KPRD Prov (Pasca UUCK) | *Persub ATR (Sdh Terbit Rekom Gub/ BAT KPRD Prov)* | | |
| 23 | Kabupaten Temanggung | | | | | | Proses SK Gub |
| 24 | Kabupaten Kendal | | | | | | Perda 1 Th 2020 tentang Perubahan atas Perda 20 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Kendal tahun 2011–2031 tanggal 22 Mei 2020 |
| 25 | Kabupaten Batang | | | | | | Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Batang 2019–2039. (26Des2019) |
| 26 | Kabupaten Pekalongan | | | | | | Perda 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Pekalongan 2020-2040 (5 Agustus 2020) |
| 27 | Kabupaten Pemalang | | | | | | Perda 1 Tahun 2018 tentang RTRW Pemalang 2018–2038 (8 Feb 2018) |
| 28 | Kabupaten Tegal | | | | | | Perda No. 2 Tahun 2023 tentang RTRW Kab. Tegal Tahun 2023 - 2043 (21 Juli 2023) |
| 29 | Kabupaten Brebes | | | | | | Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Brebes 2019–2039. (23Des2019) |
| 30 | Kota Magelang | | | | | | Perda 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011-2031 (17Juli2020) |
| 31 | Kota Surakarta | | | | | | Perda No.4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021-2041 tanggal 9 Juli 2021 |
| 32 | Kota Salatiga | | | | | | Perda Nomor 3 Th 2023 tentang RTRW Kota Salatiga tahun 2023-2043 tgl 12 Juni 2023 |
| 33 | Kota Semarang | | | | | | Perda No. 5 Th 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Semarang No.14 Th 2011tentang RTRW Kota Semarang 2011-2031 |
| 34 | Kota Pekalongan | | | | | | Perda 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No.30 Th 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan 2009-2029 |
| 35 | Kota Tegal | | | | | | Perda Kota Tegal No.1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Kota Tegal No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011–2031 tanggal 24 Feb 2021 |
| | **JUMLAH** | **35** | **28** | **7** | **35** | **32** | **32** |
| | **%** | **100** | **80,00** | **20,00** | **100,00** | **91,43** | **91,43** |

Berdasarkan Tabel 2.139 diatas Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan revisi RTRW sebanyak 32, sedangkan 3 RTRW Kabupaten/Kota sedang berproses. Sebanyak 32 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah pada tabel diatas juga diinformasikan terdapat Rencana Tata Ruang yang masih berproses untuk menjadi Peraturan Daerah dan terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas berproses menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN. Perlu adanya upaya percepatan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melegalkan dokumen Rencana Tata Ruang untuk mempermudah investasi dan juga sebagai acuan pembangunan di daerah.

**Tabel 2.139.**

**Progress Legislasi RDTR Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah**
**Per 19 Januari 2024 terdapat 3 Perda RDTR dan 33 Perkada RDTR**

| No. | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Perda/Perkada | Nama RDTR | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Banyumas | 3 | RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto | Perda Kab Banyumas No.6 Tahun 2019 tentang RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto Th. 2019 - 2039 |
| | | | RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas | Perbup No. 9 Tahun 2023 tentang RDTR KP Banyumas Tahun 2023-2043 |
| | | | RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja | Perbup No. 4 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja |
| 2 | Kabupaten Batang | 3 | RDTR Kec Limpung | Perbup No. 13 Tahun 2023 tentang RDTR WP Limpung |
| | | | RDTR Kec Tulis | Perda Kab Batang No.6 Tahun 2020 tentang RDTR BWP Tulis Th. 2020 – 2040 |
| | | | RDTR Gringsing | Perbup No. 12 Tahun 2023 tentang RDTR WP Gringsing |
| 3 | Kabupaten Boyolali | 4 | RDTR Kec Sawit | Perbup 77/2021 tentang RDTR Kec. Sawit Tahun 2021-2041 (12 November 2021) |
| | | | RDTR Wilayah Perencanaan Mojosongo | Perbup RDTR Mojosongo No. 68 Tahun 2022 (4 Juli 2022) |
| | | | RDTR Kecamatan Banyudono | Perbup RDTR Kecamatan Banyudono No. 106 Tahun 2022 tgl 1 Desember 2022 |
| | | | RDTR Kecamatan Cepogo | Perbup No. 57 Tahun 2023 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Cepogo Tahun 2023 – 2043 (10 Oktober 2023) |
| 4 | Kabupaten Brebes | 3 | RDTR Kecamatan Losari | Perbup No. 14 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Losari (26 Mei 2023) |
| | | | RDTR Kecamatan Tanjung | Perbup No. 19 Tahun 2023 tentang RDTR Kec. Tanjung |
| | | | RDTR Kecamatan Bulakamba | Perbup No. 26 Tahun 2023 Tentang RDTR Kecamatan Bulakamba |
| 5 | Kabupaten Cilacap | 2 | RDTR Kaw Perkotaan Cilacap | Perbup Cilacap 75/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021 - 2041 (9 Juni 2021) |
| | | | RDTR Kawasan Perkotaan Sidareja | Perbup No. 6 Tahun 2023 tentang RDTR Sidareja (4 April 2023) |
| 6 | Kabupaten Jepara | 1 | RDTR Kec Jepara | Perbup Jepara No 55 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Jepara Tahun 2021 - 2041 (26 Oktober 2021) |

| No. | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Perda/Perkada | Nama RDTR | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Kabupaten Kendal | 2 | RDTR Kecamatan Kaliwungu | Perbup No. 62 tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Kaliwungu |
| | | | RDTR Kecamatan Brangsong | Perbup No. 58 tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Brangsong |
| 8 | Kabupaten Klaten | 1 | RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan | Perb No. 58 tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan |
| 9 | Kabupaten Pekalongan | 1 | RDTR Kec Kedungwuni | Perbup Pekalongan 21/2021 tentang RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni 2021 - 2041 (9 Juni 2021) |
| 10 | Kabupaten Purbalingga | 2 | RDTR Kaw Perkotaan Purbalingga | Perbup Purbalingga 46/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021 - 2041 (10 Juni 2021) |
| | | | RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari | Perbup Purbalingga No. 70 Tahun 2023 Tentang RDTR Kawasan perkotaan Bobotsari Tahun 2023-2043 (15 Agustus 2023) |
| 11 | Kabupaten Purworejo | 2 | RDTR Perkotaan Purworejo Kutoarjo | Perbup No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo Tahun 2022-2041 |
| | | | RDTR Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Yogyakarta International Airport | Perbup No. 106 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan kota Perbatan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Tahun 2023-2043 (18 Desember 2023) |
| 12 | Kabupaten Sragen | 3 | RDTR Perkotaan Sragen | Perbup 69 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sragen (22 Desember 2021) |
| | | | RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan | Perbup No. 15 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Kota Industri Gondang-Sambungmacan Tahun 2023-2043 (31 Maret 2023) |
| | | | RDTR Gemolong | Perbup No. 34 Tahun 2023 tentang RDTR Gemolong (21 Agustus 2023) |
| 13 | Kabupaten Sukoharjo | 4 | RDTR Kec Sukoharjo | Perbup 91/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Sukoharjo Tahun 2020 – 2039 |
| | | | RDTR Kec Kartasura | Perbup 93/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Kartasura Tahun 2020 – 2039 |
| | | | RDTR Kec Grogol | Perbup 92/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Grogol Tahun 2020 - 2039 |
| | | | RDTR Kecamatan Nguter dan Bendosari | Perbup Sukoharjo No. 1 Tahun 2023 tentang RDTR Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari Tahun 2024-2044 (2 Februari 2024) |
| 14 | Kabupaten Wonogiri | 2 | RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Wonogiri | Peraturan Bupati Wonogiri No. 63 Tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Wonogiri Tahun 2022-2042 |
| | | | RDTR Gunungsewu | Peraturan Bupati Wonogiri No. 1 Tahun 2024 (11 Januari 2024) |
| 15 | Kabupaten Demak | 1 | RDTR Perkotaan Demak | Perbup Demak No. 11 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Demak (22 Maret 2024) |
| 16 | Kota Surakarta | 1 | RDTR Perkotaan Surakarta | Peraturan Wali Kota Surakarta No. 33 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Surakarta Tahun 2023-2043 (20 Desember 2023) |
| 17 | Kota Salatiga | 1 | RDTR Kota Salatiga | Perda Kota Salatiga No.9 Tahun 2018 tentang RDTR BWP PK I, II, III, IV Kota Salatiga 2017 - 2030 |
| 18 | KotaTegal | 1 | RDTR Kota Tegal | Perwal No 52/2023 Tahun 2023 tentang RDTR Kota Tegal 2023-2043 (31 Mei 2023) |

| No. | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Perda/Perkada | Nama RDTR | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Kota Semarang | 1 | RDTR Kecamatan Tugu | Peraturan Wali Kota Semarang No. 2 Tahun 2024 tentang RDTR Kecamatan Tugu Tahun 2023-2043 (5 Januari 2024) |
| **Total** | **19 Kabupaten/Kota** | **38 Perda/Perkada RDTR** | | |

*Sumber : Dinas PUSDATARU Prov. Jateng,*

Dalam rangka pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sebesar 20 persen, pemerintah provinsi perlu melakukan upaya pendorongan untuk mewujudkan hal tersebut. Rata-rata luasan RTH publik di Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 7,86 persen dari luas perkotaan di Jawa Tengah. Proporsi ini tentunya masih jauh dari angka sebagaimana yang diamanatkan.

**Tabel 2.140.**
**Rata – Rata Luasan RTH Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2020-2023**

| No | Kabupaten/Kota | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rata2 Luasan | % | Rata2 Luasan | % | Rata2 Luasan | % | Rata2 Luasan | % |
| 1 | Kota Semarang | 2.700,68 | 6,99% | 2.700,68 | 6,99% | 2.700,68 | 6,99% | 2.700,68 | 6,99% |
| 2 | Kab. Semarang | 756,48 | 6,73% | 756,48 | 6,73% | 382,87 | 6,31% | 382,87 | 6,31% |
| 3 | Kota Salatiga | 482,16 | 8,33% | 482,16 | 8,33% | 482,16 | 8,33% | 482,16 | 8,33% |
| 4 | Kab. Kendal | 477,62 | 5,43% | 477,62 | 5,43% | 393,82 | 4,48% | 393,82 | 4,48% |
| 5 | Kab. Demak | 392,02 | 5,49% | 392,02 | 5,49% | 311,56 | 4,37% | 311,56 | 4,37% |
| 6 | Kab. Grobogan | 869,91 | 11,70% | 869,91 | 11,70% | 869,91 | 11,70% | 214,70 | 7,73% |
| 7 | Kab. Pati | 615,39 | 5,66% | 615,39 | 5,66% | 352,47 | 3,88% | 352,47 | 3,88% |
| 8 | Kab. Kudus | 1.036,77 | 9,92% | 1.036,77 | 9,92% | 1.036,77 | 9,92% | 287,25 | 2,76% |
| 9 | Kab. Jepara | 449,05 | 4,72% | 468,35 | 4,88% | 468,35 | 4,88% | 468,35 | 4,88% |
| 10 | Kab. Blora | 547,84 | 12,34% | 547,84 | 12,34% | 547,84 | 12,34% | 325,32 | 2,68% |
| 11 | Kab. Rembang | 448,48 | 16,33% | 448,48 | 16,33% | 448,48 | 16,33% | 416,94 | 5,32% |
| 12 | Kab. Klaten | 611,43 | 6,17% | 611,43 | 6,17% | 547,82 | 5,58% | 547,82 | 5,58% |
| 13 | Kab. Boyolali | 114,44 | 3,20% | 195,68 | 4,96% | 195,68 | 4,96% | 195,68 | 4,96% |
| 14 | Kab. Wonogiri | 357,85 | 5,80% | 357,85 | 5,80% | 316,59 | 7,24% | 316,59 | 7,24% |
| 15 | Kab. Sukoharjo | 998,32 | 6,15% | 998,32 | 6,15% | 177,40 | 2,59% | 177,40 | 2,59% |
| 16 | Kab. Sragen | 208,64 | 2,78% | 242 | 5,57% | 242 | 5,57% | 242,00 | 5,57% |
| 17 | Kota Surakarta | 583,78 | 12,35% | 583,78 | 12,35% | 583,78 | 12,35% | 583,78 | 12,35% |
| 18 | Kab. Karanganyar | 252,65 | 7,40% | 252,65 | 7,40% | 252,65 | 7,40% | 252,65 | 7,40% |
| 19 | Kab. Purworejo | 524,41 | 7,30% | 524,41 | 7,30% | 524,41 | 7,30% | 468,70 | 7,23% |
| 20 | Kab. Temanggung | 245,45 | 7,56% | 245,45 | 7,56% | 245,45 | 7,56% | 279,82 | 6,45% |
| 21 | Kab. Wonosobo | 504,13 | 14,41% | 504,13 | 14,41% | 504,13 | 14,41% | 468,04 | 5,88% |
| 22 | Kab. Kebumen | 1.434,68 | 11,00% | 1.434,68 | 11,00% | 1.434,68 | 11,00% | 540,26 | 3,63% |
| 23 | Kab. Magelang | 543,62 | 3,47% | 1.055,54 | 9,30% | 1.055,54 | 9,30% | 1.055,54 | 9,30% |
| 24 | Kota Magelang | 449,15 | 24,22% | 449,15 | 24,22% | 449,15 | 24,22% | 449,15 | 24,22% |
| 25 | Kab. Banjarnegara | 403,23 | 10,03% | 403,23 | 10,03% | 403,23 | 10,03% | 208,80 | 4,73% |
| 26 | Kab. Banyumas | 1.178,83 | 5,79% | 1.178,83 | 5,79% | 1.178,83 | 5,79% | 786,95 | 4,81% |
| 27 | Kab. Batang | 345,47 | 7,51% | 345,47 | 7,51% | 345,47 | 7,51% | 155,43 | 4,64% |
| 28 | Kab. Brebes | 1.185,43 | 9,62% | 1.185,43 | 9,62% | 1.185,43 | 9,62% | 941,56 | 4,79% |
| 29 | Kab. Cilacap | 1.677,33 | 6,48% | 1.677,33 | 6,48% | 1.677,33 | 6,48% | 993,02 | 6,06% |
| 30 | Kota Pekalongan | 294,91 | 6,35% | 294,91 | 6,35% | 294,91 | 6,35% | 294,91 | 6,35% |
| 31 | Kota Tegal | 592,9 | 15,12% | 592,9 | 15,12% | 592,9 | 15,12% | 592,90 | 15,12% |
| 32 | Kab Pekalongan | 196,09 | 3,89% | 120,17 | 4,53% | 120,17 | 4,53% | 120,17 | 4,53% |

| No | Kabupaten/Kota | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rata2 Luasan | % | Rata2 Luasan | % | Rata2 Luasan | % | Rata2 Luasan | % |
| 33 | Kab. Pemalang | 1.267,67 | 16,72% | 1.267,67 | 16,72% | 1.267,67 | 16,72% | 473,62 | 3,71% |
| 34 | Kab. Purbalingga | 164,49 | 5,89% | 164,49 | 5,89% | 164,49 | 5,89% | 164,49 | 5,89% |
| 35 | Kab. Tegal | 377,46 | 5,70% | 377,46 | 5,70% | 203,53 | 6,97% | 203,53 | 6,97% |
| 36 | Jumlah Provinsi Jawa Tengah | 23.288,76 | 7,49% | 23.858,66 | 7,91% | 21.958,15 | 7,86% | 16.848,93 | 5,76% |

*Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng.*

Selain itu upaya pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan dengan pengawasan terhadap kinerja Penataan Ruang baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui sistem pengawasn teknis (SIWASTEK). Pengawasan penataan ruang merupakan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengawasan penataan ruang dilaksanakan terhadap kinerja pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pelaksanaan penataan ruang; kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang; serta kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 216 PP No. 21/2021 diamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan penataan ruang terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 telah melaksanakan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN melalui sistem SIWASTEK. Selain itu juga sebagai bentuk provinsi melaksanakan tugas pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Provinsi Jawa Tengah juga telah membentuk Tim Pengawas Provinsi sebagai pelaksana kegiatan pengawasan kinerja penyelenggaraan penatan ruang pada tahun 2023.

Tujuan dari Pengawasan Kinerja TURBINLAK Penataan Ruang dan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai indikator kemajuan Penataan Ruang suatu daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Hasil Siwastek kabupaten kota pada tahun 2023 tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 2.141.**

**Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang Tahun 2023**

| Kabupaten/Kota | Nilai | Predikat/Kategori | Peringkat |
|---|---|---|---|
| Kota Semarang | 97,5 | Baik | 1 |
| Kota Tegal | 97 | Baik | 2 |
| Kabupaten Batang | 95,5 | Baik | 3 |
| Kabupaten Pati | 95,5 | Baik | 3 |
| Kabupaten Temanggung | 94,67 | Baik | 4 |
| Kabupaten Sukoharjo | 93,38 | Baik | 5 |
| Kabupaten Brebes | 93 | Baik | 6 |

| Kabupaten/Kota | Nilai | Predikat/Kategori | Peringkat |
|---|---|---|---|
| Kota Pekalongan | 90,25 | Baik | 7 |
| Kabupaten Banyumas | 89,92 | Baik | 8 |
| Kota Salatiga | 88,32 | Baik | 9 |
| Kabupaten Jepara | 87,27 | Baik | 10 |
| Kabupaten Klaten | 83,13 | Baik | 11 |
| Kabupaten Rembang | 82,42 | Baik | 12 |
| Kabupaten Purworejo | 82,24 | Baik | 13 |
| Kabupaten Purbalingga | 82,13 | Baik | 14 |
| Kabupaten Cilacap | 81,82 | Baik | 15 |
| Kabupaten Demak | 81,25 | Baik | 16 |
| Kabupaten Blora | 80,25 | Baik | 17 |
| Kabupaten Tegal | 79,25 | Sedang | 18 |
| Kabupaten Pekalongan | 77,6 | Sedang | 19 |
| Kabupaten Boyolali | 77,23 | Sedang | 20 |
| Kabupaten Kebumen | 77,17 | Sedang | 21 |
| Kota Magelang | 75,54 | Sedang | 22 |
| Kota Surakarta | 74,38 | Sedang | 23 |
| Kabupaten Grobogan | 71,96 | Sedang | 24 |
| Kabupaten Sragen | 71,08 | Sedang | 25 |
| Kabupaten Pemalang | 70,17 | Sedang | 26 |
| Kabupaten Kendal | 67,54 | Sedang | 27 |
| Kabupaten Wonosobo | 64,54 | Sedang | 28 |
| Kabupaten Magelang | 62,67 | Sedang | 29 |
| Kabupaten Banjarnegara | 61,7 | Sedang | 30 |
| Kabupaten Wonogiri | 58,59 | Sedang | 31 |
| Kabupaten Semarang | 56,46 | Sedang | 32 |
| Kabupaten Karanganyar | 53,88 | Sedang | 33 |
| Kabupaten Kudus | 34,17 | Buruk | 34 |

*Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng.*

### 2.5.3.Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistem ketenagalistrikan Jawa Tengah ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi antar Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Jawa Tengah tidak hanya ditopang oleh pembangkit yang ada di Jawa Tengah namun juga Jawa Barat, Jawa Timur, Madura dan Bali. Sistem ketenagalistrikan di Jawa Tengah merupakan bagian dari satu kesatuan sistem di Pulau Jawa, Pulau Madura dan Pulau Bali yang terhubung secara interkoneksi dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV. kecuali wilayah di Kepulauan Karimunjawa. Wilayah Kepulauan Karimunjawa merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang tidak terhubung dengan sistem JAMALI karena merupakan pulau berlistrik mandiri *(Isolated*). Pasokan energi di Karimunjawa disuplai oleh PLTD Legon Bajak dengan kapasitas sebesar 2 x 2,2 MW sehingga pada tahun 2016 penduduk di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan sudah dapat menikmati listrik 24 jam. Selain itu berdasarakan nota kesepahaman antara PLN dan Pemkab Jepara tentang pengalihan pengelolaan kelistrikan di Pulau Karimunjawa pada tanggal 21 Juli 2022, pengelolaan kelistrikan di Pulau Parang, Genting, dan Nyamuk, Kecamatan Karimunjawa telah di ambil alih PLN. Pulau Parang disupply oleh PLTS eksisting sebesar 135,8 KWp dan diesel 350 KVA, melayani pelanggan sebanyak 342KK. Pulau Nyamuk dengan kapasitas PLTS 111KWp dan diesel 100KVA melistriki 177KK serta Pulau Genting di*supply* oleh

PLTS sebesar 36 KWp dan diesel 30KVA mampu menghidupkan listrik 86 KK. Rencana pada tahun 2023 PLN melalui program *dedieselisasi*, untuk ketiga pulau tersebut akan dilakukan penambahan kapasitas PLTS dengan rincian Pulau Parang sebesar 645KWp, Pulau Nyamuk sebesar 345KWp dan Pulau Genting sebesar 155KWp. Diharapkan setelah dilakukan penambahan kapasitas PLN, maka diesel sudah tidak digunakan lagi dan 3 pulau tersebut menggunakan *green energy*. Karimunjawa diharapkan menuju *Green Tourism* di Jawa Tengah.

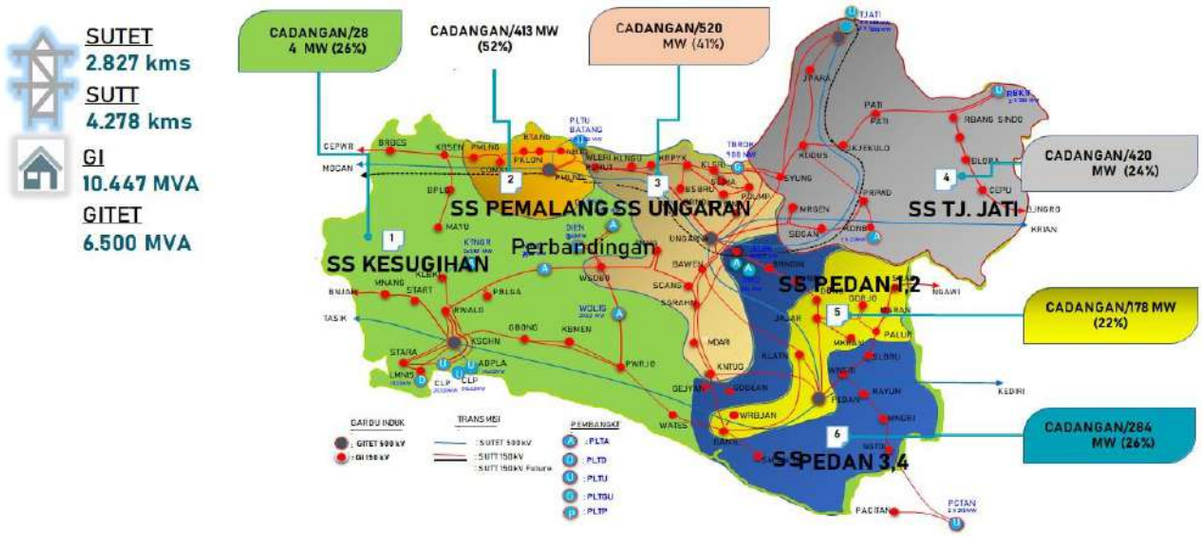


*Sumber: PLN , 2022*

**Gambar 2.76.**
**Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY**

Kelistrikan Jawa Tengah dan DIY disuplai dari 6 subsistem (SS), antara lain : Subsistem Ungaran 1-2, Subsistem Pedan 1-2, Subsistem Pedan 3-4, SubsistemTanjung Jati, Subsistem Kesugihan, dan Subsistem Pemalang. Beban Puncak Sistem Jateng dan DIY sebesar 4851 MW dengan reserve power sebesar 2621 MW.

Selain itu terdapat beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah selesai dibangun di Jawa Tengah dalam rangka mendukung Program Listrik 35.000 MW secara nasional. Progress pembangunan pembangkit interkoneksi di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022, yaitu:

1) PLTU Jawa Tengah/ PLTU Batang (2x1000 MW): *overall progress* 100 persen (per Desember 2022); telah COD Unit 1 pada 15 Agustus 2022 dan Unit 2 pada 31 Agustus 2022;
2) PLTU Jawa 4/ PLTU Tj. Jati B Unit 5 dan 6 (2x1.000 MW): *overall progress* 100 persen (per Desember 2022); telah COD Unit 5 pada 17 Maret 2022 dan Unit 6 pada 30 September 2022;
3) PLTGU Jawa-Bali 1/ Tambaklorok (779 MW): *overall progress* 100 persen sudah tahap *komisioning*; rencana COD pada Februari 2024.

Seiring dengan peningkatan kapasitas daya listrik terpasang berbanding lurus dengan konsumsi energi listrik di Jawa Tengah. Selama kurun waktu 2014 hingga 2023 menunjukkan peningkatan konsumsi energi listrik dari 19.631 GWh pada tahun 2014 menjadi 28.432 GWh pada tahun 2023.

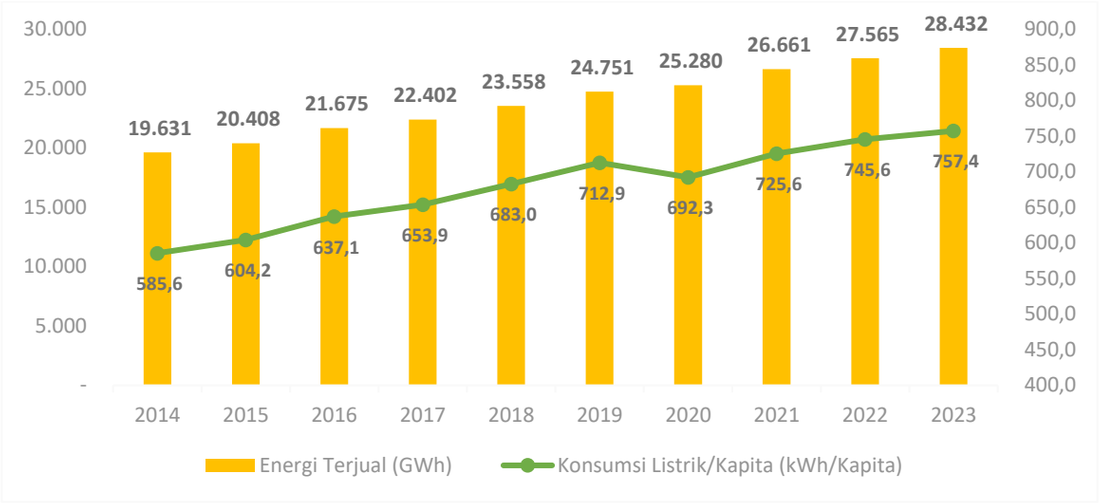


*Sumber: Statistik PLN, BPS diolah, 2023*

**Gambar 2.77.**
**Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2014 - 2023 (GWh)**

Selain itu peningkatan kebutuhan energi listrik juga terlihat dari Konsumsi listrik per kapita. Selama kurun waktu 2014 hingga tahun 2023 mengalami trend peningkatan dari 585,6 menjadi 757,4 kWh per Kapita. Konsumsi listrik perkapita erat kaitanya dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi konsumsi listrik perkapita disuatu daerah maka semakin tinggi juga potensi kesejahteraan di daerah tersebut. Konsumsi Listrik di Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah tetangga di Pulau Jawa. Dengan demikian, potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan. Mendorong dan meningkatkan *demand* listrik tidak hanya mendorong pemanfaatan untuk kegiatan konsumtif tetapi utamanya juga mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif.

Rasio Elektrifikasi (RE) Jawa Tengah sejak tahun 2020 telah mencapai 99,99% dengan Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) di Jawa Tengah telah mencapai 100%. Berdasarkan data RE masih terdapat 0,01 persen KK belum memiliki listrik secara mandiri. KK belum berlistrik tersebut sebagian besar merupakan rumah tangga miskin. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan akses listrik mandiri bagi rumah tangga tidak mampu melalui program listrik gratis yang telah dimulai sejak Tahun 2014. Jumlah pemasangan sambungan listrik gratis hingga Tahun 2022 sejumlah 78.955 unit rumah tersambung listrik. Perkembangan rasio elektrifikasi dan akumulasi sambungan listrik gratis selama tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.142.**
**Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Rasio Elektrifikasi (%) | 99,91 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 2. | Sambungan Listrik Gratis kumulatif (Unit) | 27.225 | 40.173 | 55.280 | 78.955 | 107.892 |

*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

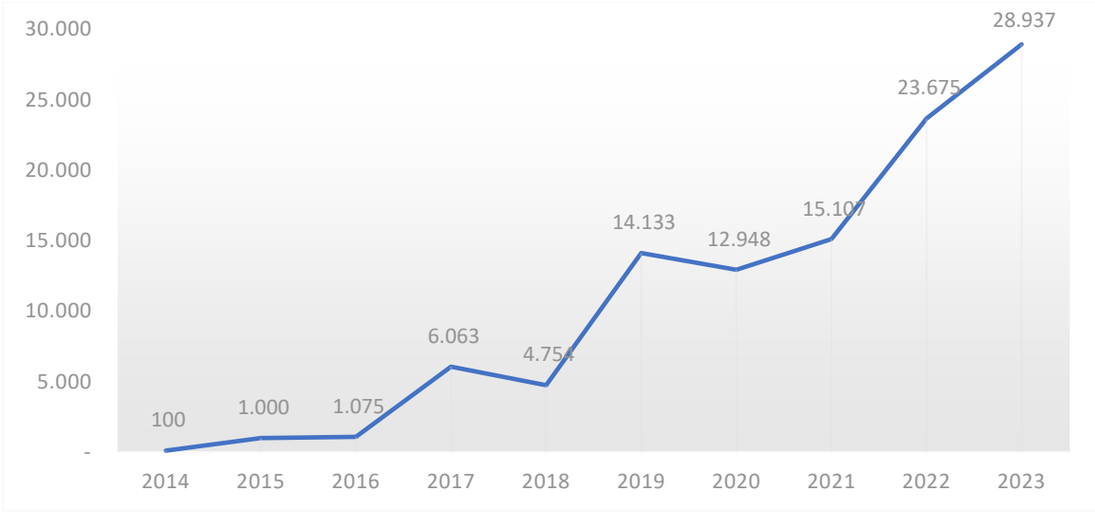


*Sumber: PLN, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

**Gambar 2.78.**
**Program Listrik Gratis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2023 (Unit)**

Kecukupan pemenuhan listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rasio Ketersediaan Daya Listrik yang merupakan perbandingan daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan. Idealnya Rasio Ketersediaan Daya Listrik menunjukkan angka 1 atau 100 persen yaitu menunjukkan bahwa antara daya terpasang sesuai dengan jumlah kebutuhan listrik.

**Tabel 2.143.**
**Rasio Ketersediaan Daya Listrik Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Daya Listrik Terpasang (MW) | 6.365 | 7.203 | 7.203 | 9.200 | 9.200 |
| 2 | Kebutuhan Listrik (MW) | 5.480 | 5.588 | 5.720 | 6.306 | 6.044 |
| 3 | Rasio Ketersediaan Daya Listrik (angka) | 1,16 | 1,29 | 1,26 | 1,46 | 1,52 |

*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa pasokan listrik di Jawa Tengah sangat memadai bahkan memiliki *reserve margin*/cadangan sebesar 52%. *Reserve margin* yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah siap untuk menerima investasi baru khususnya di Kawasan Industri yang telah tersedia di Jawa Tengah diantaranya Batang Industrial Park ( KI Segayung), Grand Batang City (KIT Batang), KI Kendal (KEK Kendal), KI Wijayakusuma, Tanjung Emas *Export Processing Zone* (Lamicitra Nusantara), KI Terboyo, LIK Bugangan Baru Semarang, Jatengland *Industrial Park* Sayung, KI Candi, Taman Industri BSB, dan KI Cilacap. Tantangan Ketenagalistrikan bukan lagi tentang ketersediaan tetapi terkait keandalan mutu layanan untuk mengurangi keluhan dari sisi ditribusinya dan keberlanjutan dari sisi produksi energi listriknya.

Jawa Tengah masih memiliki ketergantungan pada energi fosil. Hal tersebut terlihat dari jumlah persentase penggunaan energi fosil sebesar 84,02 persen pada tahun 2023 yang berdampak pada tingginya emisi gas rumah kaca di Jawa Tengah. Peta jalan Provinsi Jawa Tengah terkait transisi energi menuju

energi baru terbarukan ada dalam Perda RUED Provinsi Jateng No 12 Tahun 2018. Dalam perda tersebut Pemerintah Jawa Tengah telah mentargetkan persentase EBT dalam bauran energi sebesar 21,32% tahun 2025 dan 28,82% di tahun 2050. Kolaborasi multi-pihak, yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/provinsi menjadi kebutuhan bersama dan masing-masing pihak punya *resources* dan *capacity* yang bisa dikontribusikan untuk menyiapkan fasilitas energi terbarukan. Dalam hal ini semua pihak memberikan kontribusi sesuai kewenangan.

Walaupun penggunaan energi fosil masih relatif tinggi tetapi penggunaan EBT menunjukkan trend positif setiap tahunnya. Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi, hingga akhir Tahun 2023 telah mencapai 15,98% dari kondisi awal pada tahun 2014 sebesar 7,01%. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus tetap mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan yaitu EBT, mengingat potensi EBT di Jawa Tengah cukup banyak, antara lain energi surya, air, biogas, *waste to energy* (biomassa), gas rawa, dan panas bumi. Peta Potensi EBT di Jateng dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, dan IESR 2022*

**Gambar 2.79.**
**Potensi Teknis PLTS Terapung di Jawa Tengah**

Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya terapung di Jawa Tengah mencapai 723,07 MWp. Dua Bendungan dengan potensi terbesar adalah Kedung Ombo dan Gajahmungkur. Kedua bendungan tersebut telah masuk dalam RUPTL PLN 2021-2030 sebagai pembangkit yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem.

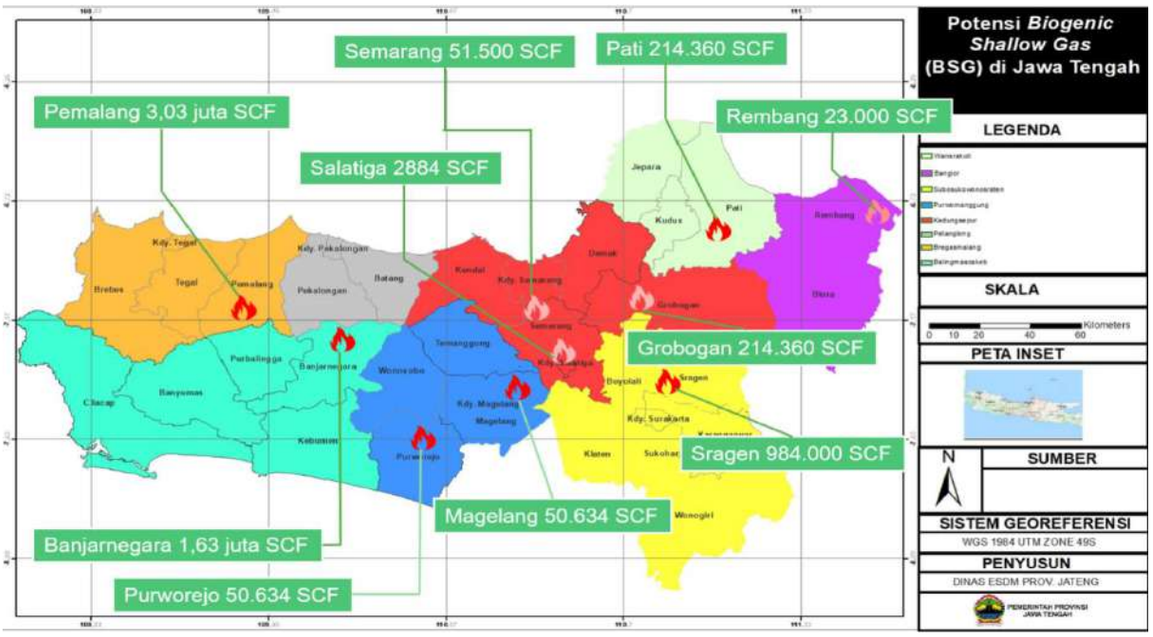


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022*

**Gambar 2.80.**
**Potensi *Biogenic Shallow Gas* (Gas Rawa) di Provinsi Jawa Tengah**

Total potensi BSG yang diketahui di Jawa Tengah adalah sekitar 14,47 juta SCF (*Standart Cubic Feet*). Potensi terbesar terpetakan di Kabupaten Pemalang dengan 3,03 juta SCF dan terendah dideteksi di Kota Salatiga sebesar 2.884 SCF. Potensi lainnya tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan variasi besaran potensi cadangan gas rawa (lihat gambar Peta Potensi BSG). Potensi yang besar dapat menjadikan pergeseran gas rawa sebagai sumber energi primer yang dapat secara langsung digunakan dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat sehari-hari. Bentuk optimalisasi sumber daya gas rawa ini, terlihat pada kegiatan pembangunan infrastruktur instalasi gas rawa (*biogenic shallow gas*) di Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini telah tersebar pada 6 titik lokasi di 4 kabupaten dengan jumlah jangkauan sambungan sebanyak 340 sambungan rumah.

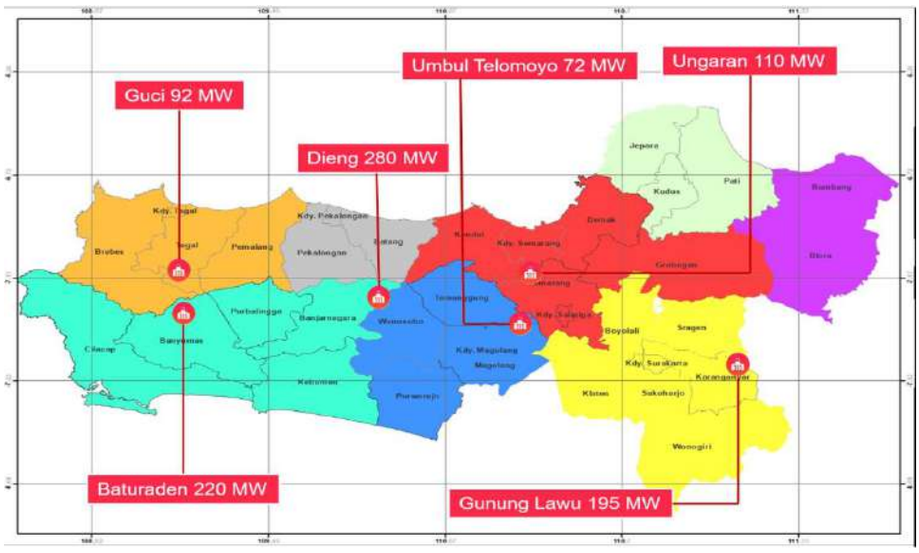


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022.*

**Gambar 2.81.**
**Potensi Panas Bumi di Jawa Tengah**

Jawa Tengah juga memilki potensi panas bumi cukup besar. Potensi panas bumi yang diperkirakan dapat dikembangkan di Jawa Tengah mencapai 1.981 MW. Potensi panas bumi yang sudah dimanfaatkan di Jawa Tengah sebagai pembangkit adalah di PLTPanas Bumi Dieng dengan kapasitas 70 MW. Baru 3,53 % yang telah termanfaatakan dari total potensi. Pengembangan potensi panas bumi menjadi prioritas karena diharapkan akan menambah pasokan energi listrik berbasis EBT di Jawa Tengah. Melalui pengembangan dan pemanfaatan EBT ini, maka diharapkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama dari sektor energi dapat ditekan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menurunkan emisi GRK sektor energi dari 24.512 tCO2e pada tahun 2019 menjadi 123.401 tCO2e tahun 2023 adalah melalui pembangunan infrastruktur EBT. Perkembangan persentase EBT dalam bauran energi selama tahun 2014-2023 sebagai berikut:

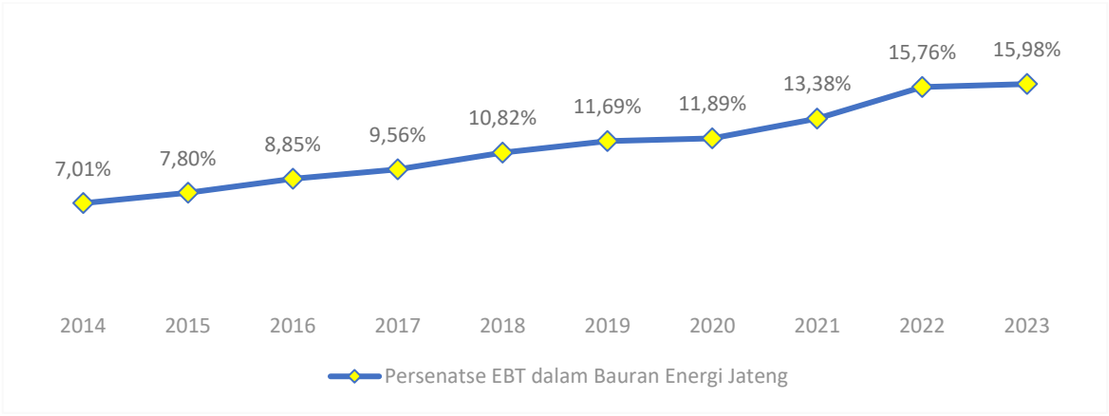


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.82.**
**Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2014 - 2023**

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur EBT, upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca, antara lain melalui pelaksanaan penghargaan Desa Mandiri Energi, Hemat Energi dan Air, dan Audit Energi. Penghargaan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pemerintah Desa dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan diversifikasi energi dan pengembangan teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di Jawa Tengah. Adapun upaya konservasi energi diwujudkan salah satunya dengan pelaksanaan penghargaan Gerakan Hemat Energi dan Air serta audit energi. Gerakan Hemat Energi dan Air menjadi sebuah tindakan promotif untuk mendorong peran serta pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor Industri dalam menggerakkan perilaku budaya hemat energi dan air di masa yang akan datang serta mendorong upaya konservasi energi untuk menjaga ketahanan energi. Sedangkan kegiatan Audit Energi dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik gedung, baik instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan konservasi energi.

Sebagai motor penggerak peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan diperlukan langkah strategis untuk mengajak peran serta seluruh masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi daerah, melalui program penyuluh energi. Program penyuluh energi bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih, memakai, mengembangkan energi baru terbarukan yang tersedia dan berpotensi di sekitarnya, sehingga akan ada perubahan perilaku masyarakat

dari penggunaan energi konvensional (energi fosil) sebagai sumber energi utama menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan serta memberikan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan pengelolaan energi di daerah. Adanya program penyuluh energi dapat menjadi katalis terwujudnya desa mandiri energi di Jawa Tengah. Capaian Desa Mandiri Energi (DME) sampai dengan tahun 2023 sejumlah 2.422 desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Energi maupun Hemat Energi dan Air perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pengembangan pemanfaatan EBT di desa tersebut.

Pengembangan suatu wilayah dan pembangunan di berbagai sektor akan mempengaruhi keberadaan air tanah dan siklus air tanah. Penggunaan air yang tidak sesuai kebutuhan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan mengakibatkan potensi air tanah semakin berkurang. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Indeks Ketersediaan Air Tanah Jawa Tengah cenderung menurun secara fluktuatif selama kurun waktu 2016 hingga 2020, sedangkan pada tahun 2023 meningkat.

**Tabel 2.144.**
**Indeks Ketersediaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 - 2023**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah potensi aman pengambilan air tanah | 820.185.750 | 820.185.750 | 820.185.750 | 820.185.750 | 820.185.750 |
| Jumlah pengambilan air tanah | 263.724.945 | 269.109.632 | 228.463.997 | 223.483.855 | 218.134.508 |
| Indeks Ketersediaan Air Tanah | 3,08 | 3,05 | 3,59 | 3,67 | 3,76 |

*Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Berdasarkan tabel di atas kecenderungan ketersediaan air tanah meningkat, yang menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku yang bersumber dari air permukaan bisa dikatakan juga meningkat. Pada 25 Cekungan Air Tanah di Jawa Tengah yang berada di CAT dalam Provinsi, 21 CAT telah disusun zona pemanfaatan dan konservasi, berdasarkan Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penyusunan Zona Konservasi Air Tanah. Zona Konservasi Air Tanah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu zona imbuhan air tanah, zona aman, zona rawan, zona kritis, zona rusak. Mengacu pada hasil evaluasi zona pemanfaatan dan konservasi tahun 2022 Dari 21 CAT yang telah disusun zona pemanfaatan dan konservasi air tanah, terdapat 3 CAT yang masuk zona kritis serta 2 CAT yang masuk zona rusak. 3 CAT yang terdapat Zona Kritis adalah pada CAT Semarang-Demak, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Karanganyar-Boyolali. Sedangkan 2 CAT yang terdapat zona rusak adalah CAT Semarang-Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang. Kondisi CAT Semarang-Demak, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Karanganyar-Boyolali yang terdapat zona kritis dan rusak disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

a. Kondisi kualitas air tanah yang memiliki nilai daya hantar listrik (DHL) tinggi, >1000 µs/cm, serta nilai zat terlarut (TDS) >1500 ppm;
b. Kondisi muka air tanah mengalami penurunan kedudukan >40% dari kedudukan awal.

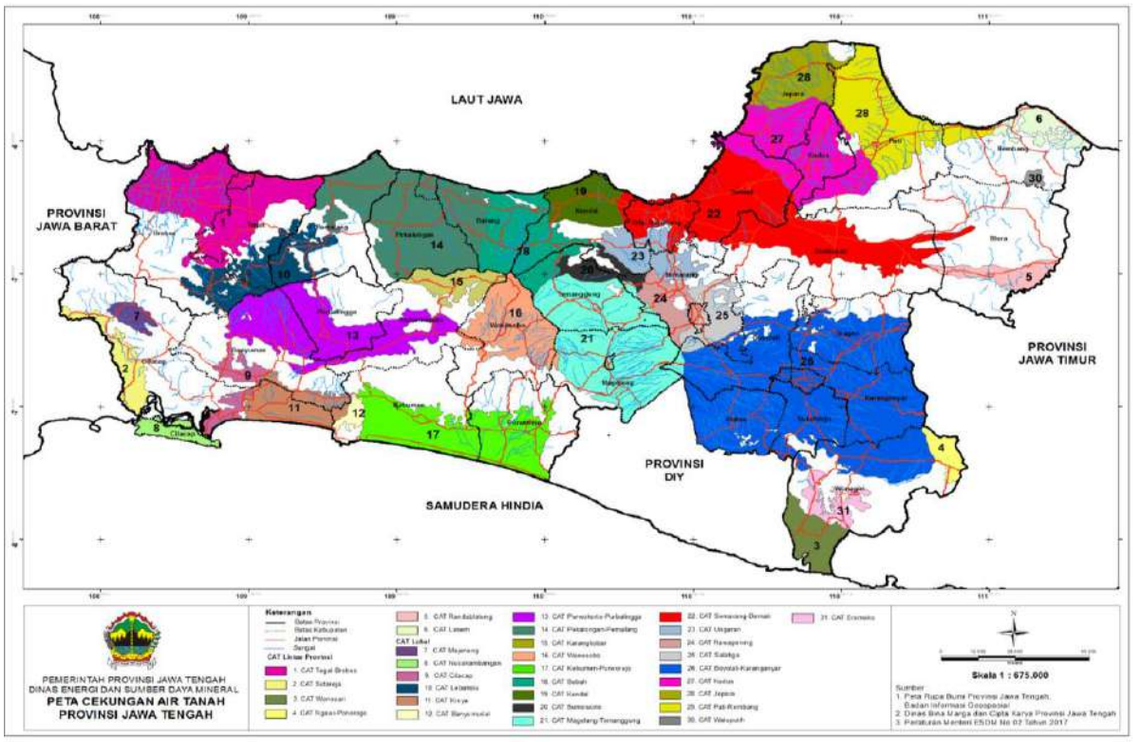


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2021*

**Gambar 2.83.**
**Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah**

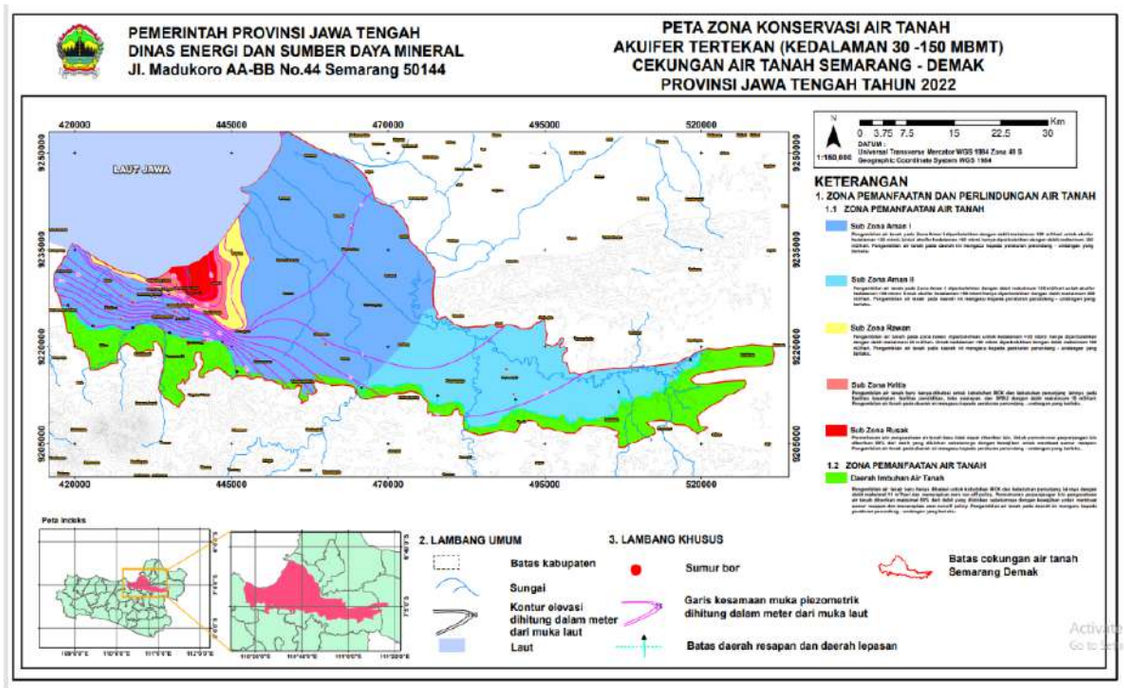


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2022*

**Gambar 2.84.**
**Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Semarang-Demak**

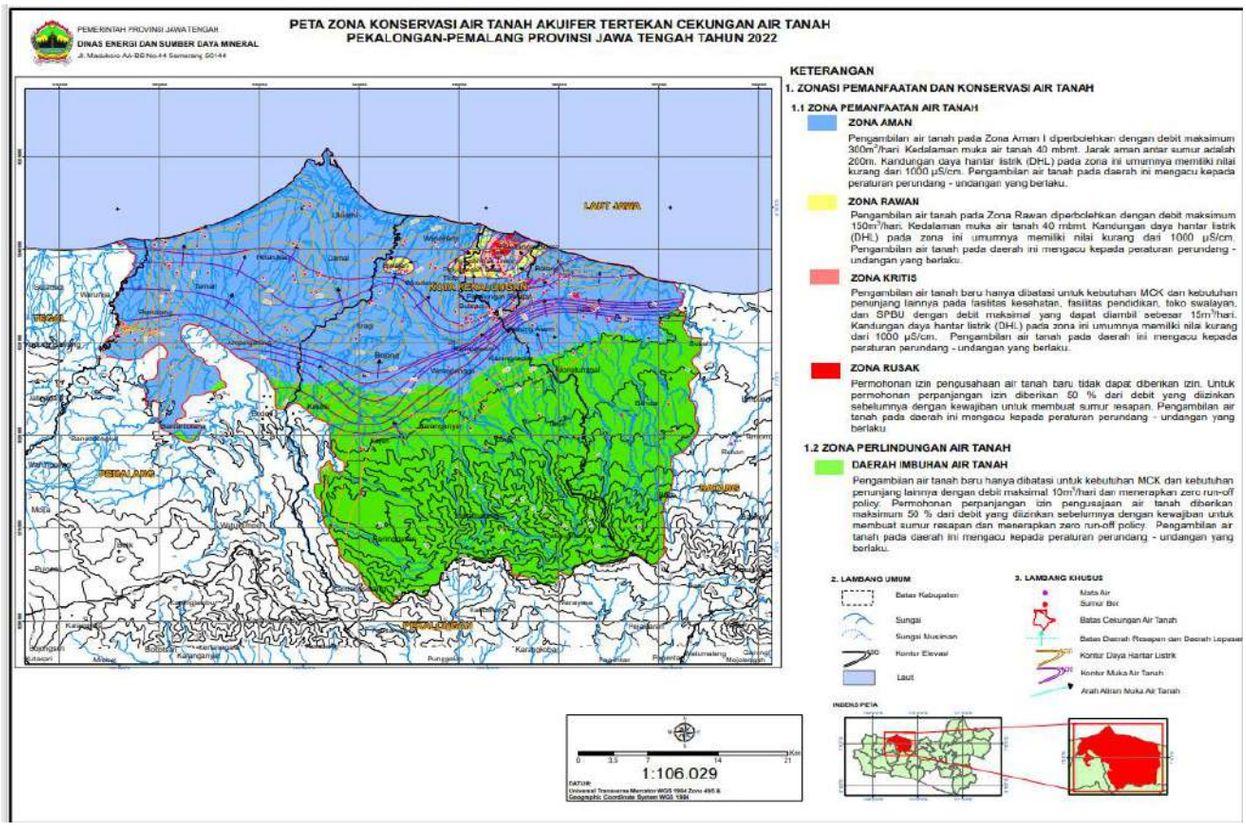


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2022.*

**Gambar 2.85.**
**Peta Evaluasi Zona Pemanfaatan dan Konservasi CAT Pekalongan-Pemalang**

Dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air tanah maka diperlukan konservasi air tanah berupa pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah. Pentingnya konservasi air tanah belum banyak disosialisasikan dalam bentuk visualisasi meskipun upaya tersebut telah dilakukan kepada masyarakat khususnya generasi muda, melalui penghargaan Hemat Energi dan Air di sekolah-sekolah, sebagai upaya membudayakan hemat pemakaian air.

Penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah periode 2024 sampai dengan 2026 menggunakan penilaian baru yang lebih detail, yaitu terkait dengan faktor pengambilan air tanah. Pada periode 2018 sampai dengan 2023, penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah untuk faktor pengambilan hanya menggunakan parameter jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin saja. Pada periode 2024 sampai dengan 2026 untuk penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah, faktor pengambilan akan menggunakan parameter sebagai berikut:

1) Jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin;
2) Jumlah pengambilan air tanah dari penduduk non PDAM.

Selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2023, Dinas ESDM Provinsi telah membangun sebanyak 503 infrastruktur Air Tanah di tersebar di 35 kabupaten/kota, sehingga meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah. Pelaksanaan pembangunan sumur resapan dangkal sejak Tahun 2019 dilaksanakan secara padat karya melibatkan masyarakat setempat. Grafik pembangunan infrastruktur konservasi air tanah sebagai berikut:

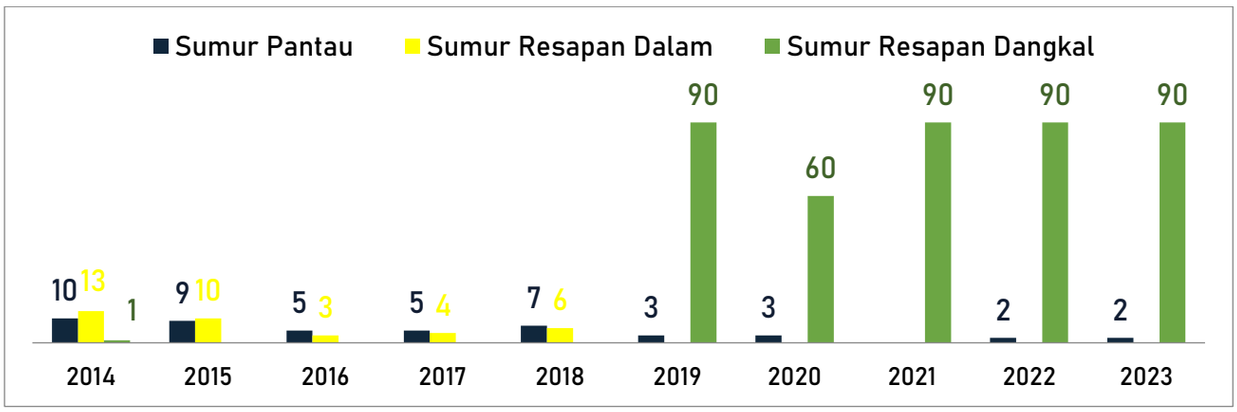


*Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2023*

**Gambar 2.86.**
**Pembangunan Infrastruktur Konservasi Air Tanah**

### 2.5.4. Penanggulangan Bencana

**1) Wilayah Rawan Bencana**

a) Kawasan Potensi Bahaya Banjir

Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya, dengan kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air (Smith & Ward 1998). Apabila suatu peristiwa terendamnya suatu wilayah oleh air yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis maka banjir tersebut dapat disebut Bencana Banjir. Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, ukuran bahaya (*hazard*) dari banjir adalah ketinggian genangan. Total luas bahaya banjir di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 935.504 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu kelas bahaya dengan kelas rendah seluas 19.340 Ha, kelas sedang seluas 469.909 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi seluas 446.255 Ha. Kawasan berpotensi bahaya banjir dapat dilihat pada peta berikut ini.

*Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/*

**Gambar 2.87.**
**Peta Bahaya Banjir Provinsi Jawa Tengah**

Dalam peta bahaya banjir dapat kita peroleh potensi bahaya banjir dengan cakupan wilayah terluas dalam satuan Hektar. Dari tingkatan bahaya rendah terdapat Kabupaten Cilacap dengan potensi bahaya banjir mencapai luasan 2.384 Ha, tingkatan bahaya sedang adalah Kabupaten grobogan dengan luasan bahaya banjir mencapai 47.626 Ha. Sedangkan pada kelas tinggi adalah Kabupaten Demak dengan luas 53.960 Ha. Kabupaten/kota dengan potensi bahaya banjir tinggi meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal. Hanya terdapat 3 Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat bahaya banjir sedang yaitu Kabupaten Purbalingga, Karanganyar dan Kota Surakarta.

b) Kawasan Potensi Bahaya Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Ukuran bahaya banjir bandang mengacu pada Pedoman Pembuatan Peta Rawan Longsor dan Banjir Bandang akibat runtuhnya bendungan alam yang dibuat oleh Kementerian PU (2012) yaitu asumsi ketinggian genangan banjir bandang setinggi 5 meter. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bahaya banjir bandang. Kawasan berpotensi bahaya banjir bandang dapat dilihat pada peta berikut ini.

*Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/*

**Gambar 2.88.**
**Peta Bahaya Banjir Bandang Provinsi Jawa Tengah**

Pada peta tersebut dapat kita peroleh informasi potensi luas bahaya banjir bandang berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah seluas 104.332 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.678 Ha, kelas sedang seluas 32.757 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 58.897 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah, sedang dan tinggi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 1.465 Ha, 4.746 Ha dan 9.574 Ha.

c) Kawasan Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrim antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai taifun. Pada kajian ini pembahasan cuaca ekstrim lebih dititikberatkan kepada angin kencang. Angin kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB). Terjadinya angin kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus angin kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu terjadinya angin kencang.

Potensi bahaya cuaca ekstrim pada peta di bawah menunjukan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum wilayah Provinsi Jawa Tengah terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah seluas 2.832.304 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 997.704 Ha, pada kelas sedang seluas 324.567 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 1.510.033 Ha. Kawasan berpotensi bahaya cuaca ekstrim dapat dilihat pada peta berikut ini.

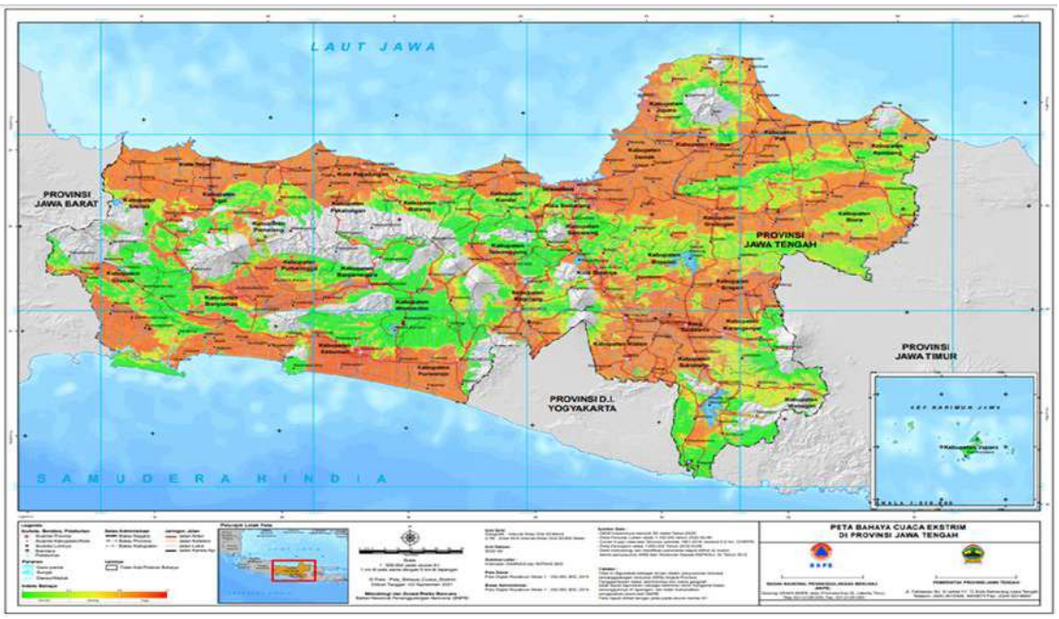


*Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/*

**Gambar 2.89.**
**Peta Bahaya Cuaca Ekstrim Provinsi Jawa Tengah**

Pada peta tersebut dapat kita peroleh informasi Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah dengan luas 84.966 Ha adalah Kabupaten Blora. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas sedang dengan luas 37.207 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 104.032 Ha adalah Kabupaten Grobogan.

d) Kawasan Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dari parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Kawasan berpotensi bahaya bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada peta berikut ini.

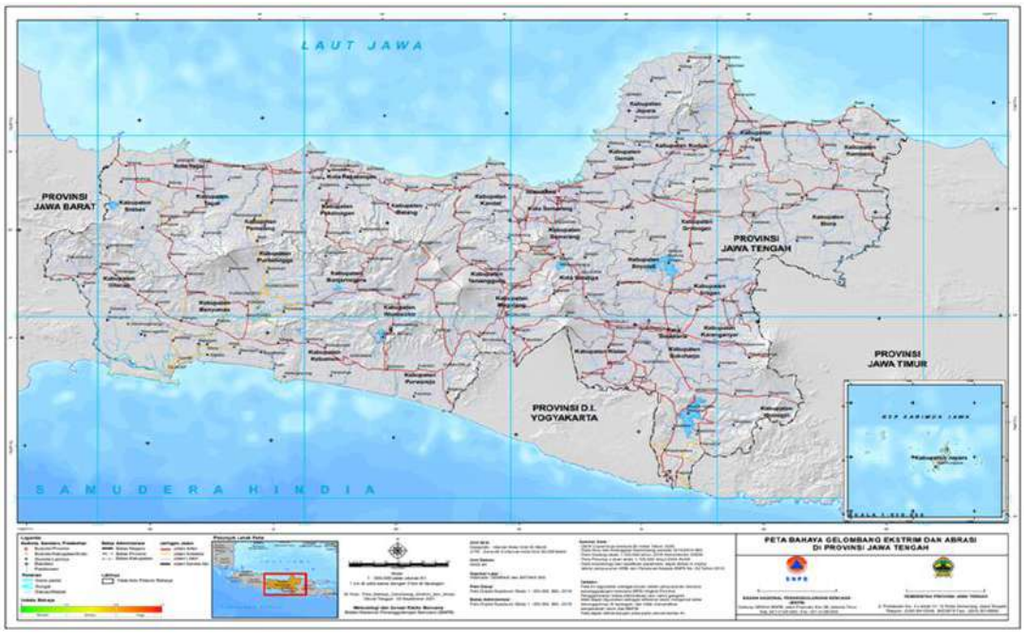


*Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/*

**Gambar 2.90.**
**Peta Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi Provinsi Jawa Tengah**

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari gambar di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah adalah 15.705 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 8.891 Ha, pada kelas sedang seluas 2.282 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 4.532 Ha. Sebaran luas bahaya di Provinsi Jawa Tengah untuk untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi, dimana Kabupaten Cilacap memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah, yaitu seluas 1.632 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas sedang adalah Kabupaten Jepara dengan luas 1.684 Ha, Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi adalah Kabupaten Cilacap, yaitu 1.027 Ha.

e) Kawasan Potensi Bahaya Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Gempa dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal. Potensi luas bahaya gempa bumi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terpapar bencana gempa bumi. Potensi bahaya gempa bumi tersebut merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap

bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Sedangkan kelas bahaya gempa bumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdampak bahaya gempa bumi. Kawasan berpotensi bahaya gempa bumi dapat dilihat pada peta berikut ini.

*Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/*

**Gambar 2.91.**
**Peta Bahaya Gempa Bumi Provinsi Jawa Tengah**

Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya gempa bumi tersebut dirinci

menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 2.793.772 Ha, kelas sedang seluas 451.437 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya gempa bumi pada kelas tinggi seluas 31.898 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.103 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempa bumi pada kelas sedang dengan luas 68.662 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempabumi pada kelas tinggi seluas 17.341 Ha adalah Kabupaten Klaten.

f) Kawasan Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia. Analisis bahaya kebakaran hutan dan lahan

(karhutla) yang berkembang adalah analisis multi-kriteria yang menggabungkan beberapa parameter yang memiliki hubungan sebagai faktor penyebab terjadinya ancaman karhutla. Kawasan berpotensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada peta berikut ini.

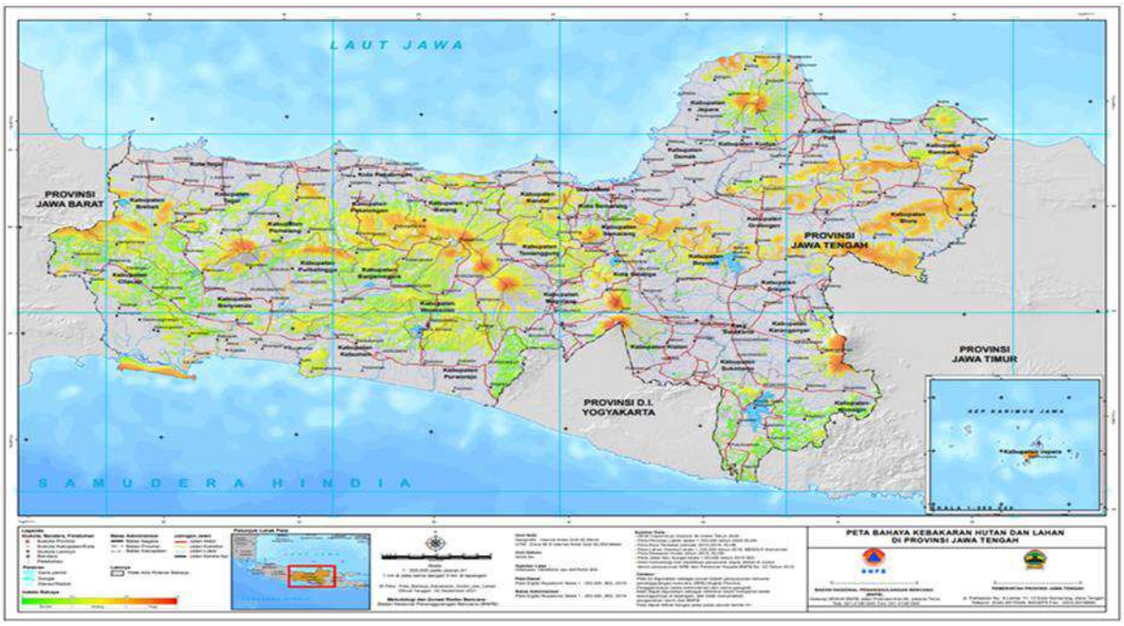


*Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/*

**Gambar 2.92.**
**Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Tengah**

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah adalah Kabupaten Blora, Batang, Boyolali, Karanganyar, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Temanggung, Wonosobo. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 963.331 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 304.437 Ha, kelas sedang seluas 548.759 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi seluas 110.135 Ha.

g) Kawasan Potensi Bahaya Kekeringan,

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam dokumen ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun metode analisis indeks kekeringan yang dilakukan adalah *Standardized Precipitation Evapotranspiration Index* (SPEI) yang dikembangkan oleh Vicente-Serrano dkk pada tahun 2010.

Penentuan kekeringan dengan SPEI membutuhkan data curah hujan dan suhu udara bulanan dengan periode waktu yang cukup panjang. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Thornthwaite, maka data suhu yang digunakan adalah hanya suhu bulanan rata-rata. Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kekeringan. Kawasan berpotensi bahaya kekeringan dapat dilihat pada peta berikut ini.

*Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/*

**Gambar 2.93.**
**Peta Bahaya Kekeringan Provinsi Jawa Tengah**

Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi.Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi kelas sedang seluas 2.336.056 Ha dan kelas tinggi seluas 941.051 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang dengan luas 196.387 Ha adalah Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas tinggi seluas 107.775 Ha.

h) Kawasan Potensi Bahaya Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah dari PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana

tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Kawasan berpotensi bahaya tanah longsor dapat dilihat pada peta berikut ini.

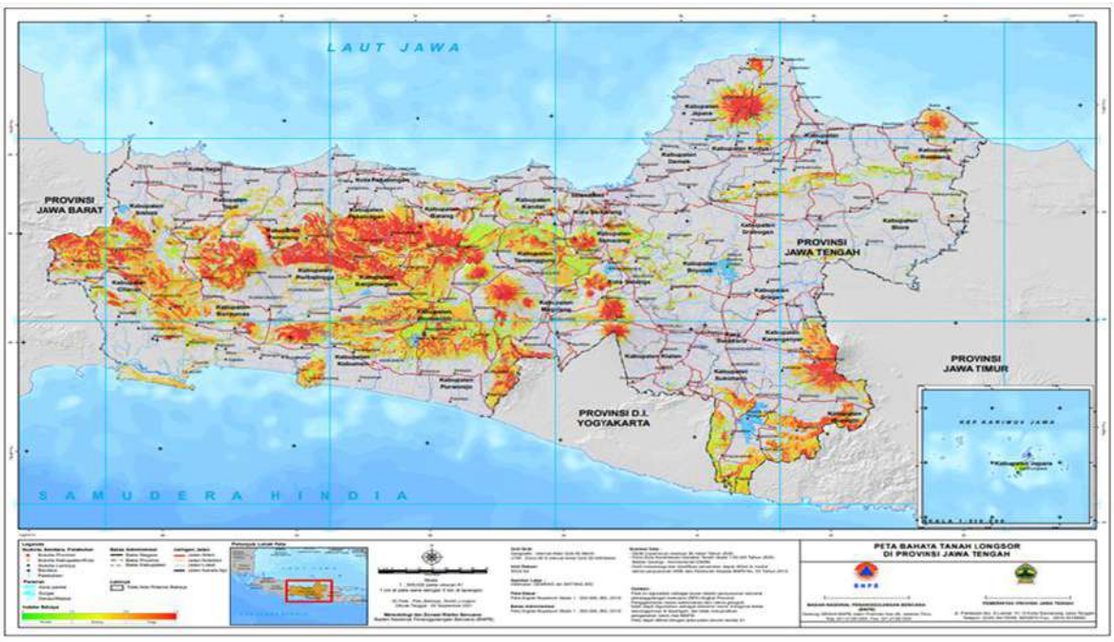


*Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/*

**Gambar 2.94.**
**Peta Bahaya Tanah Longsor Provinsi Jawa Tengah**

Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 1.020.772 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 78.622 Ha, kelas sedang seluas 207.456 Ha dan kelas tinggi seluas 734.693 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah adalah Kabupaten Semarang dengan luas 5.959 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas sedang adalah Kabupaten Wonosobo dengan luas 24.364 Ha. Pada kelas tinggi, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor adalah Kabupaten Wonogiri dengan luas 62.658 Ha.

i) Kawasan Potensi Bahaya Tsunami

Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ukuran bahaya tsunami yang dikaji adalah pada seberapa besar potensi *inundasi* (genangan) di daratan berdasarkan potensi ketinggian gelombang maksimum yang tiba di garis pantai. Penentuan tingkat bahaya tsunami diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh Berryman (2006) berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inundasi (ketinggian genangan), nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan. Kejadian tsunami di Jawa Tengah pada umumnya tidak terjadi secara langsung, namun Jawa Tengah merupakan daerah yang terpengaruh dan terimbas tsunami.

Kejadian tsunami di Pantai Selatan Jawa relatif tidak terlalu banyak dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kejadian tsunami pada tanggal 17 Juli 2006 yang terjadi di daerah Pangandaran dan sekitarnya hingga pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kawasan berpotensi bahaya tsunami di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

*Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/*

**Gambar 2.95.**
**Peta Bahaya Tsunami Provinsi Jawa Tengah**

Pantai Selatan Jawa merupakan kawasan yang rawan tsunami. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa di daerah tersebut bersinggungan langsung dengan jalur lempeng yang sering terjadi gempa bumi. Berdasarkan letak wilayah Jawa Tengah yang berbatasan dengan laut, terutama di wilayah selatan Jawa Tengah (berbatasan dengan Samudera Indonesia) daerah yang rawan terjadi tsunami, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tsunami pada kelas rendah seluas 3.447 Ha, pada kelas sedang seluas 2.827 Ha, dan pada kelas tinggi dengan luas 19.372 Ha.

j) Kawasan Potensi Bahaya Epidemi

Epidemi adalah suatu keadaan yang menunjukkan kejadian penyakit meningkat dalam waktu singkat dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas. Wabah adalah kejadian suatu penyakit menular yang meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi secara harfiah dalam konteks potensi bencana, Epidemi dan Wabah Penyakit (EWP) merupakan potensi ancaman bencana non-alam yang diakibatkan oleh kejadian suatu penyakit menular pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat menimbulkan dampak (risiko) kematian dan gangguan aktivitas masyarakat. Metode yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya EWP adalah metode skoring dan pembobotan terhadap parameter berbasis wilayah administrasi kecamatan. Parameter yang digunakan untuk penyusunan peta bahaya EWP adalah terjadinya kepadatan atau prevalensi dari bahaya EWP (berdasarkan data yang tersedia secara nasional), yaitu: Malaria, Demam Berdarah, Campak, Difteri, dan Hepatitis.

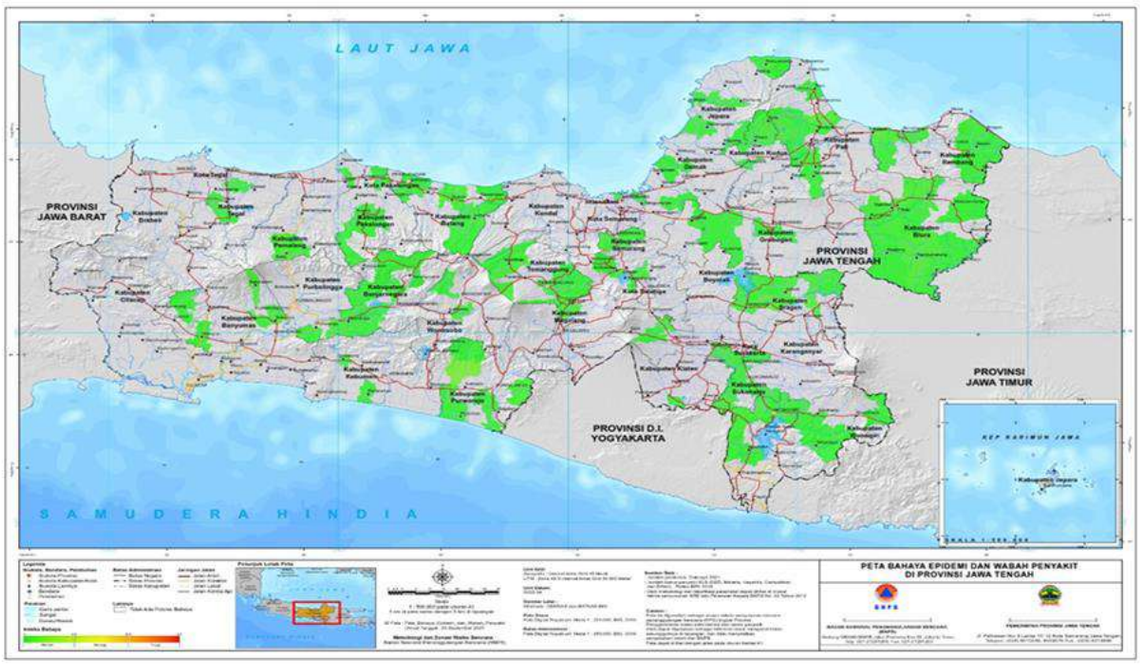


*Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/*

**Gambar 2.96.**
**Peta Bahaya Epidemi Provinsi Jawa Tengah**

Sebaran luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya epidemi dan wabah penyakit pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.386 Ha.

k) Kawasan Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolok ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri. Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Kawasan berpotensi bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

*Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/*

**Gambar 2.97.**
**Peta Bahaya Kegagalan Teknologi Provinsi Jawa Tengah**

Pada peta tersebut kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah adalah Kabupaten Boyolali seluas 3.607 Ha dan Kabupaten Cilacap adalah wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas sedang dengan luas 375 Ha.

l) Kawasan Potensi Bahaya Covid-19

Penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan pandemi global dan telah dinyatakan oleh WHO, sehingga merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan dan rekomendasi pencegahan harus diprioritaskan. Apalagi wabah penyakit Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara berdasarkan bukti ilmiah (Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020). Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan penilaian risiko meliputi analisis bahaya, paparan/kerentanan dan kapasitas untuk melakukan karakteristik risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasil dari penilaian risiko ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi penanggulangan kasus Covid-19.

*Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/*

**Gambar 2.98.**
**Peta Bahaya Covid-19 Provinsi Jawa Tengah**

Potensi luas bahaya Covid-19 adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Covid-19 tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 2.346.083 Ha, kelas sedang seluas 605.417 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya Covid-19 pada kelas tinggi seluas 325.608 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas rendah adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 190.358 Ha. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas sedang seluas 50.337 Ha dan pada kelas tinggi seluas 33.967 Ha adalah Kabupaten Wonogiri.

m) Kawasan Potensi Bahaya Likuifaksi

Likuifaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan tanah ini dapat berupa longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba menyebabkan daya dukung pondasi menurun dan terjadi kerusakan bangunan/infrastruktur yang lebih besar.

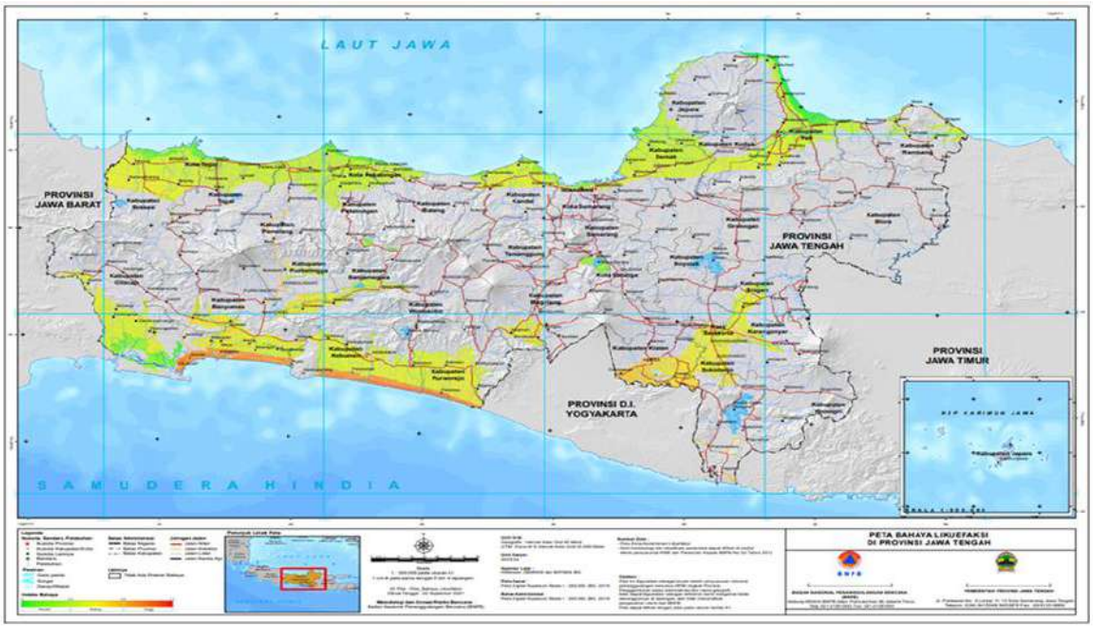


*Sumber: Inarisk BNPB - https://inarisk.bnpb.go.id/*

**Gambar 2.99.**
**Peta Bahaya Likuifaksi Provinsi Jawa Tengah**

Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak likuifaksi, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah kabupaten/kota terdampak. Total luas bahaya likuifaksi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 729.062 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya likuifaksi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 49.145 Ha, kelas sedang seluas 641.289 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya likuifaksi pada kelas tinggi adalah seluas 38.627 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuifaksi pada kelas rendah dengan luas 15.054 Ha dan pada kelas tinggi dengan luas 16.881 Ha adalah Kabupaten Cilacap. Sedangkan pada kelas sedang, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuifaksi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 65.705 Ha.

n) Kawasan Potensi Bahaya Gunungapi

Gunungapi dibedakan menjadi bahaya primer (langsung) dan bahaya sekunder (tidak langsung). Bahaya primer merupakan bahaya yang diakibatkan secara langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: aliran lava, awan panas, jatuhan piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan lahar erupsi. Sedangkan, bahaya sekunder merupakan bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: lahar dan longsoran gunungapi.

(1) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah3.816Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

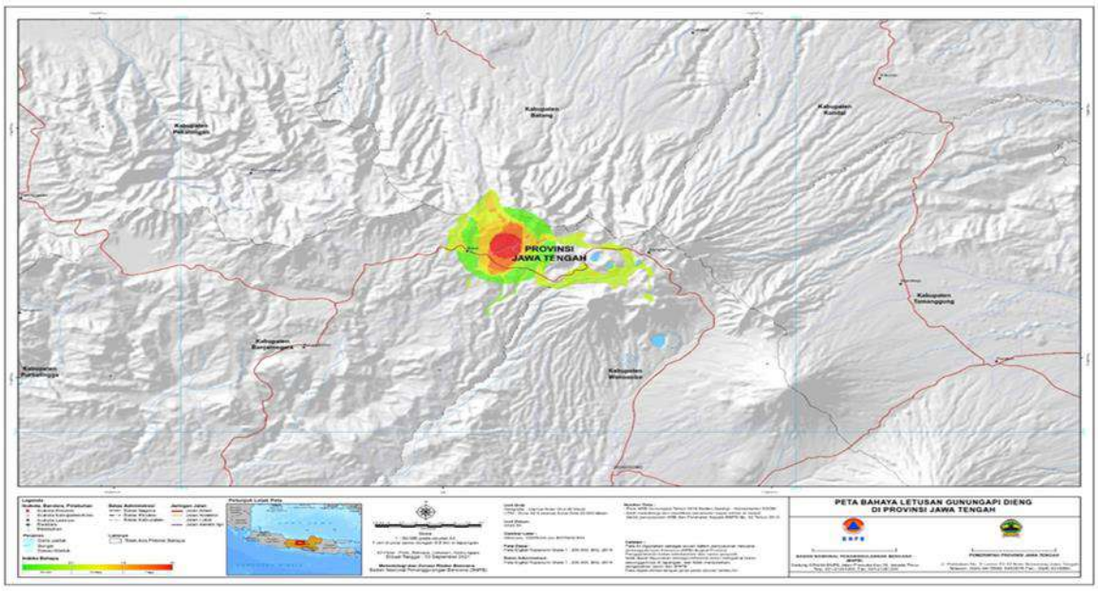


*Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah*

**Gambar 2.100.**
**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Dieng**

Luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 1.168 Ha, kelas sedang seluas 2.054 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Dieng pada kelas tinggi seluas 594 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunungapi pada kelas rendah seluas 1.059 Ha, kelas sedang seluas 1.304 Ha dan kelas tinggi seluas 568 Ha adalah Kabupaten Banjarnegara.

(2) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah10.116Hadan berada pada kelas Sedang. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

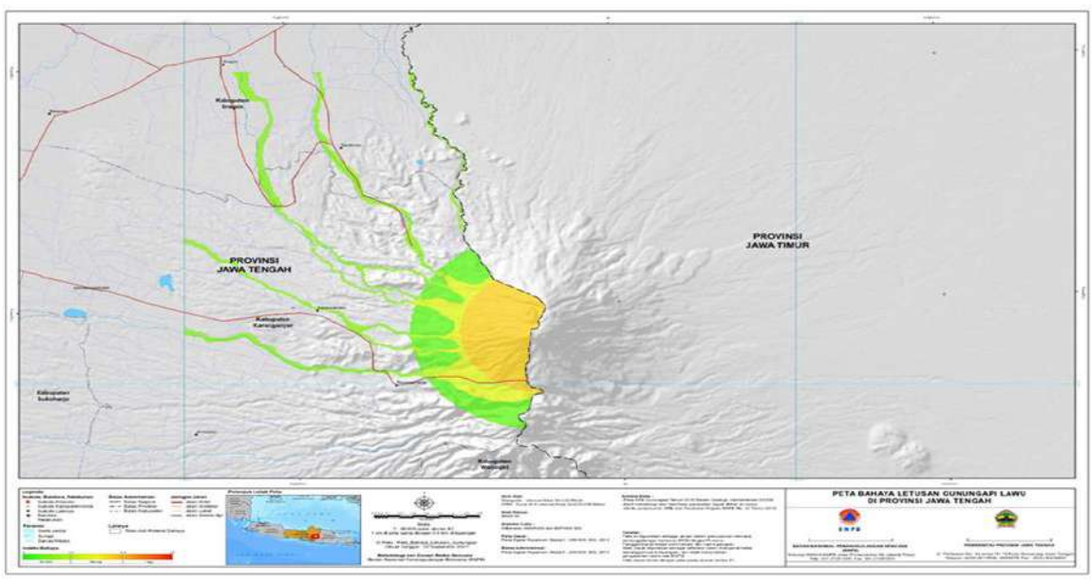


*Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah*

**Gambar 2.101.**
**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Lawu**

Luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu tersebut dirinci menjadi 2 (dua) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.546 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelas sedang seluas 4.570 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelas rendah seluas 4.652 Ha, dan kelas sedang seluas 4.570 Ha adalah Kabupaten Karanganyar.

(3) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengahsecara keseluruhan adalah 28.239 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

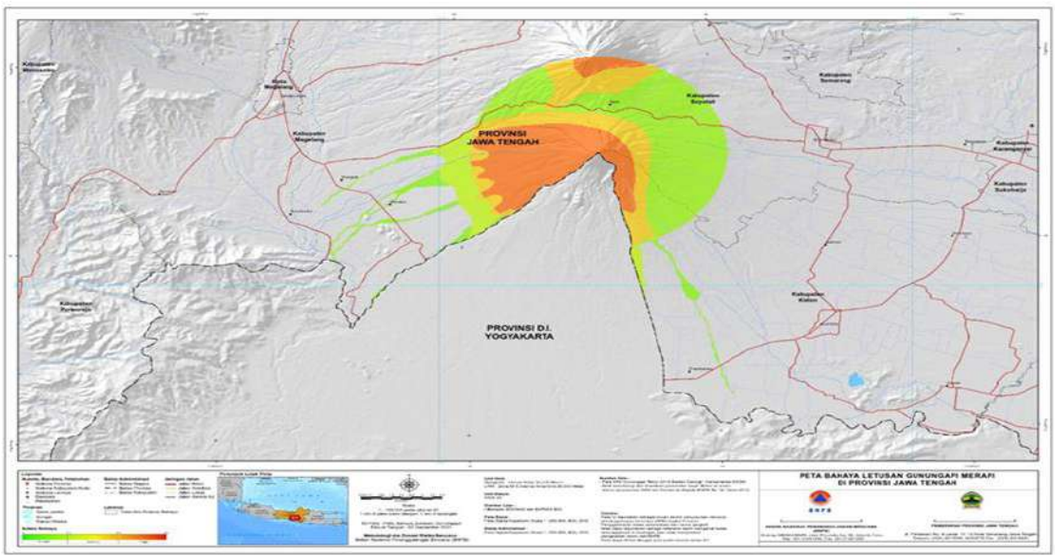


*Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah*

**Gambar 2.102.**
**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merapi**

Berdasarkan peta diatas luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.441 Ha, kelas sedang seluas 8.182 Ha, dan kelas tinggi seluas 7.616 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas rendah seluas 7.957 Ha adalah Kabupaten Boyolali. Sedangkan Kabupaten Magelang adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas sedang dengan luas 3.930 Ha dan kelas tinggi seluas 5.275 Ha.

(4) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 19.819Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

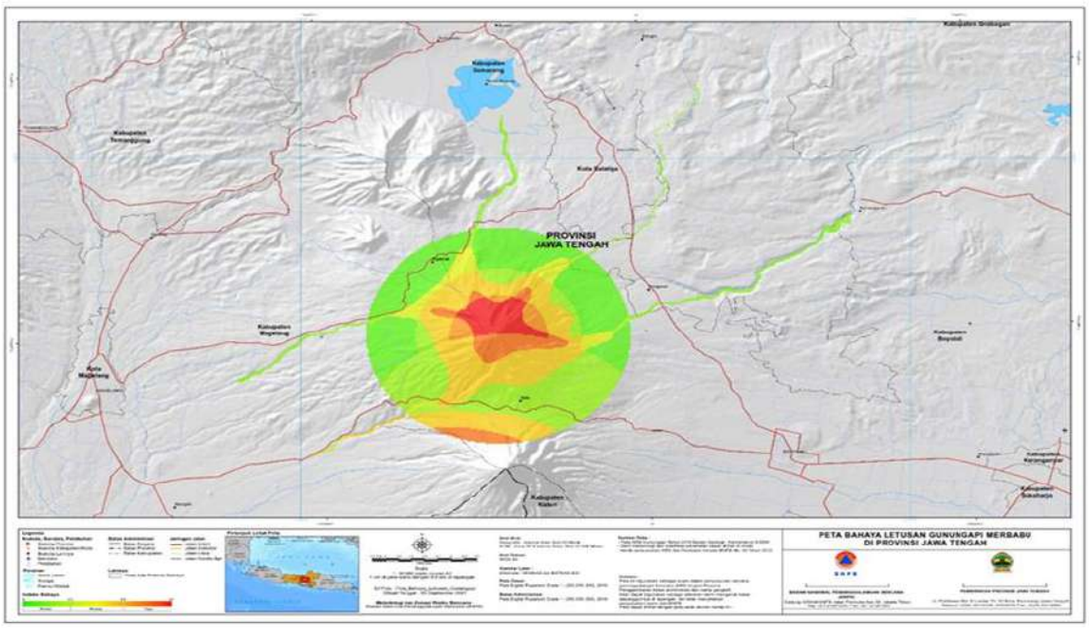


*Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsiawa Tengah*

**Gambar 2.103.**
**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Merbabu**

Luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 11.474Ha, kelas sedang seluas 5.820 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas tinggi seluas 2.526 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas rendah seluas 4.790 Ha, kelas sedang seluas 3.163 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 1.358 Ha adalah Kabupaten Boyolali.

(5) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 22.740 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

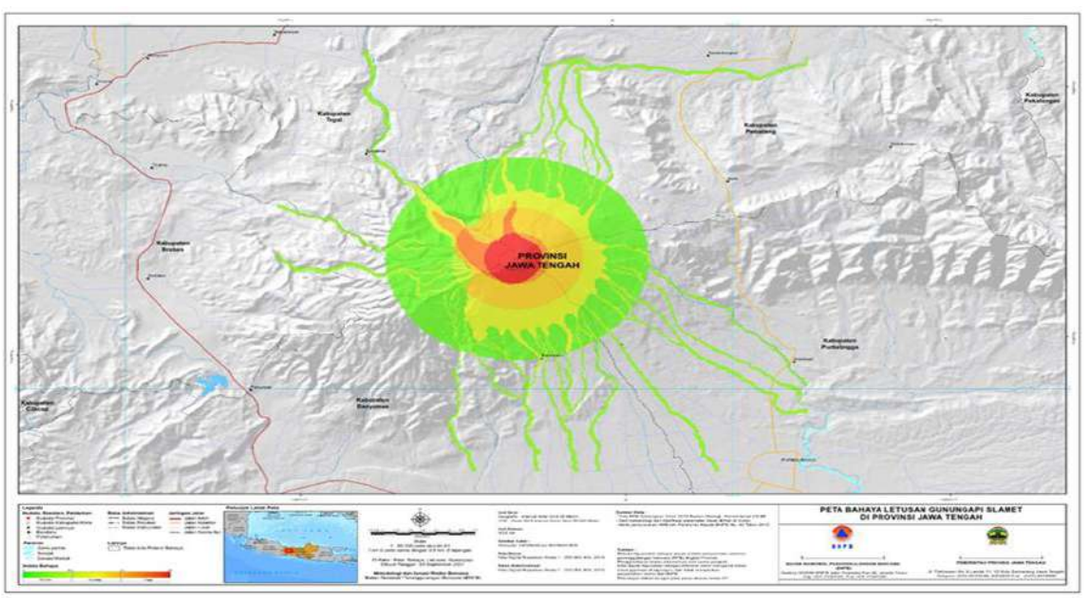


*Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah*

**Gambar 2.104.**
**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Slamet**

Berdasarkan peta tersebut luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14.631 Ha, kelas sedang seluas 6.288 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 1.820 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas rendah seluas 3.905 Ha dan kelas sedang seluas 2.533 Ha adalah Kabupaten Banyumas. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 723 Ha adalah Kabupaten Pemalang.

(6) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 25.650 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sumbing di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

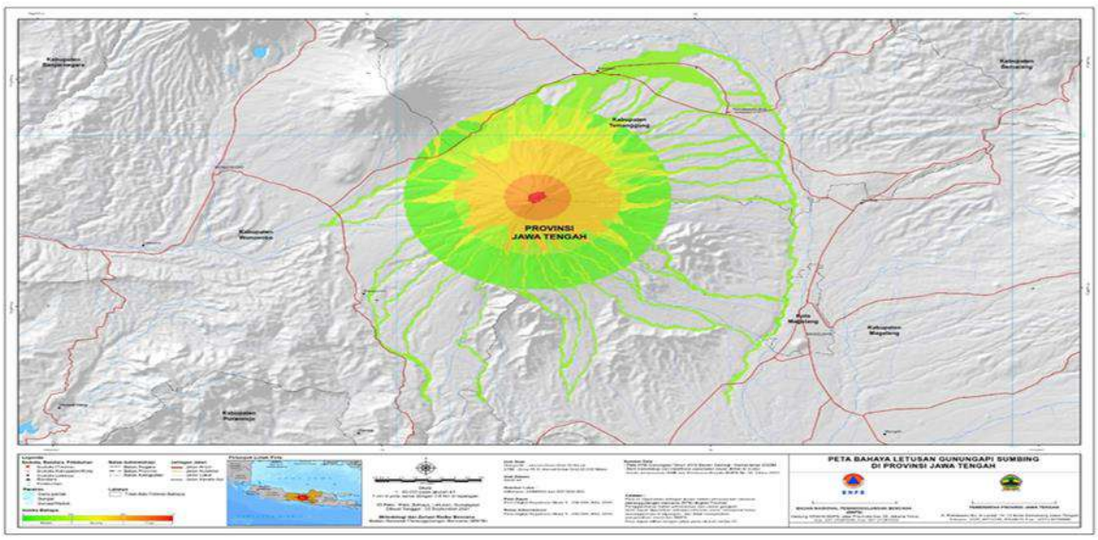


*Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah*

**Gambar 2.105.**
**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sumbing**

Luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbing tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 16.553 Ha, kelas sedang seluas 7.876 Ha,dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas tinggi seluas 1.221 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas rendah seluas 6.681 Ha, pada kelas sedang seluas 4.443 Ha dan kelas tinggi seluas 563 Ha adalah Kabupaten Temanggung.

(7) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Sundorodi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 23.580 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sindoro di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

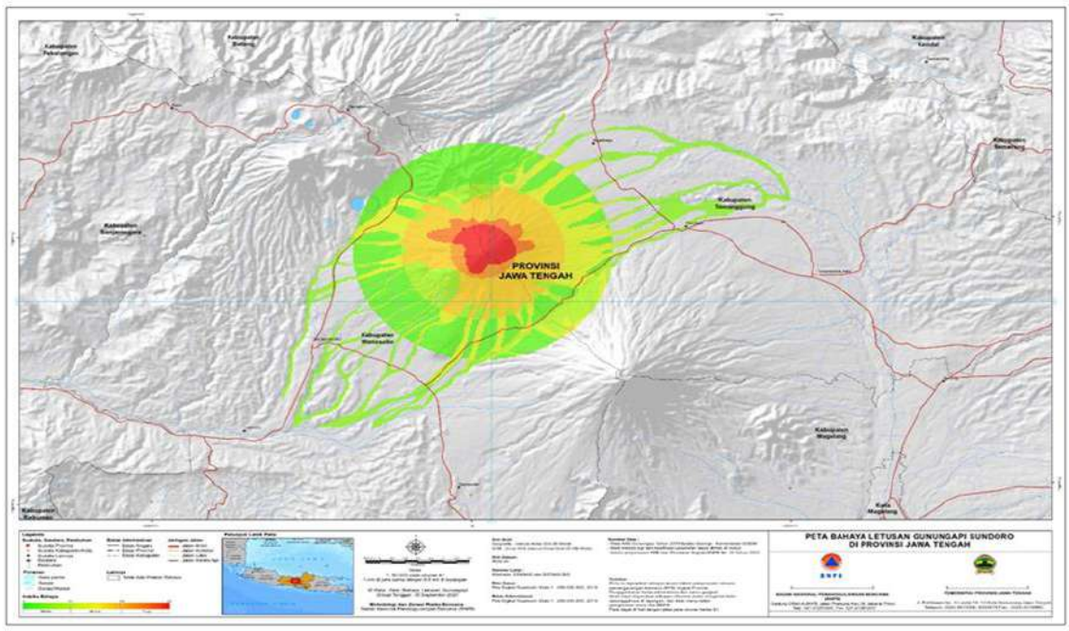


*Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah*

**Gambar 2.106.**
**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Sindoro**

(8) Luas bahaya Letusan Gunungapi Sindoro tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.468 Ha, kelas sedang seluas 8.372 Ha, dan kelas tinggi seluas 1.739 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sindoro pada kelas rendah dengan luas 8.236 Ha dan kelas tinggi seluas 981 Ha adalah Kabupaten Wonosobo. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sundoro pada kelas sedang adalah Kabupaten Temanggung dengan luas 4.474 Ha.

(9) Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Ungaran di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan seluas 15.404 Ha dan berada pada kelas tinggi. Kawasan berpotensi bahaya letusan Gunungapi Sindoro di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada peta berikut ini.

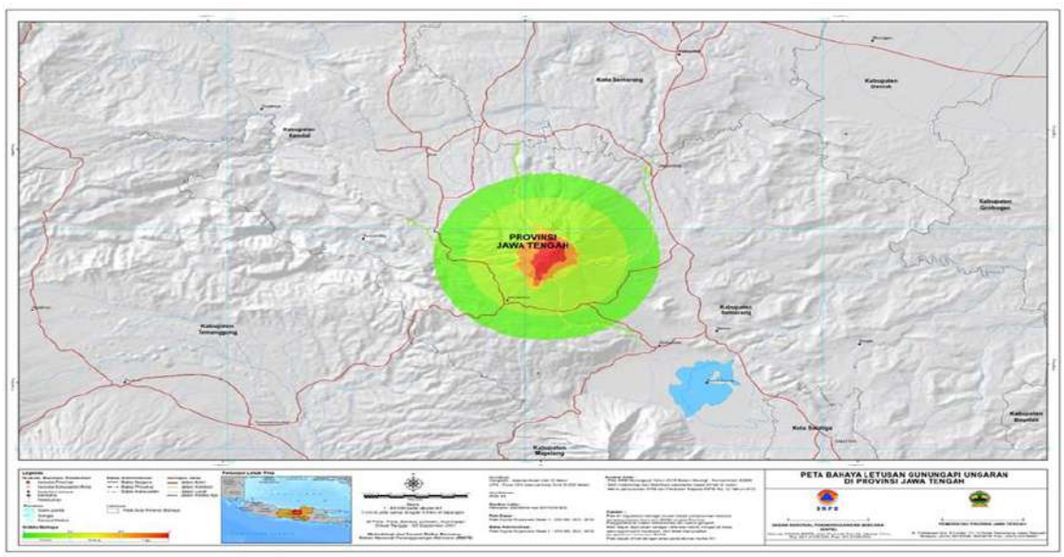


*Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah*

**Gambar 2.107.**
**Peta Bahaya Letusan Gunung Api Ungaran**

Luas bahaya Letusan Gunungapi Ungaran tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.787 Ha, kelas sedang seluas 526 Ha dan kelas tinggi seluas 1.091 Ha. Kabupaten Semarang merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Ungaran pada kelas rendah seluas 9.254 Ha, sedang seluas 312 Ha dan pada kelas tinggi seluas 617 Ha.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 (sepuluh) kawasan rawan bencana. Adapun data rumah korban terdampak bencana di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.145.**
**Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kejadian | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarnegara | 14 | 12 | 12 | 22 | 46 |
| 2 | Banyumas | 30 | 1 | 9 | 35 | 45 |
| 3 | Batang | 14 | 1 | 1 | 24 | 26 |
| 4 | Blora | 14 | 7 | 1 | 29 | 37 |
| 5 | Boyolali | 6 | - | - | - | 0 |
| 6 | Brebes | 17 | 1 | 1 | 22 | 24 |
| 7 | Cilacap | 55 | 69 | 28 | 179 | 276 |
| 8 | Demak | 13 | 10 | 1 | 603 | 614 |
| 9 | Grobogan | 30 | 1 | 1 | 101 | 103 |
| 10 | Jepara | 31 | 1 | 5 | 109 | 115 |
| 11 | Karanganyar | 17 | 6 | 7 | 27 | 40 |
| 12 | Kebumen | 11 | - | 5 | 37 | 42 |
| 13 | Kendal | 14 | 1 | 5 | 30 | 36 |
| 14 | Klaten | 98 | 24 | 12 | 32 | 68 |
| 15 | Kota Magelang | 3 | - | - | - | - |
| 16 | Kota Pekalongan | 11 | - | 1 | - | 1 |
| 17 | Kota Salatiga | 7 | - | 4 | - | 4 |
| 18 | Kota Semarang | 51 | 28 | 15 | 61 | 104 |
| 19 | Kota Surakarta | 13 | - | - | 9 | 9 |
| 20 | Kota Tegal | 10 | - | - | - | - |
| 21 | Kudus | 60 | | 5 | 1 | 6 |
| 22 | Magelang | 81 | 1 | 5 | 86 | 92 |
| 23 | Pati | 16 | - | - | 3 | 3 |
| 24 | Pekalongan | 10 | - | - | 6 | 6 |
| 25 | Pemalang | 11 | - | - | 50 | 50 |
| 26 | Purbalingga | 15 | 3 | 9 | 47 | 59 |
| 27 | Purworejo | 31 | 1 | - | 56 | 57 |
| 28 | Rembang | 9 | 1 | - | 1 | 2 |
| 29 | Semarang | 53 | 3 | - | 1 | 4 |
| 30 | Sragen | 55 | 4 | - | 242 | 246 |
| 31 | Sukoharjo | 31 | 1 | | 56 | 57 |
| 32 | Tegal | 16 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 33 | Temanggung | 38 | 17 | 15 | 140 | 172 |
| 34 | Wonogiri | 35 | 5 | 58 | 209 | 272 |
| 35 | Wonosobo | 18 | 9 | 48 | 223 | 280 |
| | **TOTAL** | **946** | **210** | **257** | **2.407** | **2.874** |

*Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Kejadian bencana di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2019-2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 2.396 kejadian di tahun 2022 dan kembali meningkat di tahun 2023 dengan 2.874 kejadian. Selama periode tersebut, kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang meliputi kebakaran, banjir, tanah longsor, dan angin topan. Dari total desa/kelurahan di Jawa Tengah teridentifikasi sejumlah 1.674 desa/kelurahan (19,5 persen) dari total 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan (24,9 persen) rawan tanah longsor.

**Tabel 2.146.**
**Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019– 2023**

| No | Jenis Bencana | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Angin topan | 706 | 629 | 439 | 671 | 11□ |
| 2 | Banjir | 171 | 459 | 242 | 374 | 1□1 |
| 3 | Gas beracun | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gempa bumi | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 |
| 5 | Kebakaran | 718 | 356 | 229 | 312 | 4□1 |
| 6 | Kekeringan | 30 | 0 | 0 | 0 | □4 |
| 7 | Letusan gn.Api | 2 | 12 | 5 | 1 | □ |
| 8 | Tanah longsor | 18 | 387 | 0 | 1.010 | 12□ |
| 9 | Tsunami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gelombang pasang | 6 | 3 | 6 | 24 | 2□ |
| **Jumlah** | | **1.356** | **2.870** | **1.753** | **2.396** | **946** |

*Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data TW II Tahun 2023.*

Pada tahun 2023 jumlah kerugian akibat bencana maupun korban jiwa yang meninggal dunia maupun hilang dan luka - luka menurun secara signifikan dari 234 miliar rupiah di 2022 menjadi 7 miliar rupiah di 2023 serta 8 korban meninggal dunia,1 hilang, 20 luka berat dan 54 luka ringan. Hal ini menunjukkan meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

**Tabel 2.147.**
**Jumlah Korban Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023**

| Tahun | Jumlah Kejadian Bencana | Jumlah Korban (Orang) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Meninggal Dunia | Hilang | Luka Berat | Luka Ringan |
| 2019 | 2.356 | 39 | 4 | 24 | 175 |
| 2020 | 2.909 | 32 | 3 | 15 | 91 |
| 2021 | 1.753 | 34 | 5 | 14 | 73 |
| 2022 | 2.440 | 22 | 2 | 27 | 100 |
| 2023 | □4□ | □ | 1 | 20 | □4 |
| **Jumlah** | | **166** | **18** | **97** | **563** |

*Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Taksiran kerugian pada tahun 2019 hingga 2023 jumlah tingkat kerugian fluktuatif dan taksiran kerugian tertinggi terjadi akibat bencana kebakaran dengan

kerugian Rp217.955.599.000,- dan kerugian keseluruhan termasuk kebakaran pemukiman ditaksir sebesar Rp345.778.272.000,-.

**Tabel 2.148.**
**Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023**

| No | Jenis Bencana | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jml | Kerugian (Rp. 000) | Jml | Kerugian (Rp. 000) | Jml | Kerugian (Rp. 000) | Jml | Kerugian (Rp. 000) | Jml | Kerugian (Rp. 000) |
| 1 | Angin Topan | 706 | 15.367.598 | NA | 5.469.095 | 437 | 4.288.779 | 671 | 6.267.966 | 115 | 1.585.200 |
| 2 | Banjir | 171 | 2.777.845 | NA | 32.798.305 | 242 | 44.106.000 | 374 | 2.367.000 | 132 | 412.500 |
| 3 | Tanah Longsor | 718 | 9.354.277 | NA | 16.806.207 | 740 | 7.098.159 | 1.010 | 7.052.281 | 126 | 2.473.680 |
| 4 | Kekeringan | 30 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kebakaran | 718 | 55.387.150 | NA | 18.779.138 | 229 | 52.965.785 | 312 | 217.955.599 | 491 | 690.600 |
| 6 | Gempa Bumi | 5 | 65.000 | NA | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.115.000 |
| 7 | Letusan Gunung Api | 2 | 0 | NA | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ombak Besar | 6 | 0 | NA | 0 | 6 | 45.000 | 24 | 25.000 | 0 | 0 |
| 9 | Lainnya | - | - | NA | 0 | 46 | 131.687,50 | 44 | 581.000 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **2.356** | **82.951.870** | **2.870** | **73.582.747** | **1.753** | **108.823.410,5** | **2.440** | **234.248.846** | **946** | **6.276.980** |

*Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data per tanggal 24 Desember 2023.*

*Sumber: BNPB, IRBI 2023*

**Gambar 2.108.**
**Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah**

Provinsi Jawa Tengah mendasarkan indeks rawan dan risiko bencana yang diterbitkan BNPB termasuk provinsi dengan indeks bencana sedang. Indeks risiko bencana 2023 Provinsi Jawa Tengah pada urutan 5 dengan nilai skor 109.01 dengan kategori sedang.

**Tabel 2.149.**

**Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| No. | Tahun | Skor | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 144,91 | Tinggi |
| 2 | 2020 | 132,99 | Sedang |
| 3 | 2021 | 125,73 | Sedang |
| 4 | 2022 | 115,38 | Sedang |
| 5 | 2023 | 109,01 | Sedang |

*Sumber: BNPB, IRBI 2022.*

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Kabupaten Brebes mendapat urutan tertinggi untuk indeks risiko bencana dengan urutan 1 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai skor 155,35 dan urutan 122 Nasional. Capaian ini menurun signifikan dari capaian di tahun 2022 dengan skor 171,01 dan urutan 68 Nasional. Selain Brebes masih ada 2 Kabupaten lain dengan kelas risiko tinggi di tahun 2023 yaitu Kabupaten Pati dan Pekalongan.

**Tabel 2.150.**

**Indeks Risiko Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2023**

| NO | KABUPATEN/KOTA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | KELAS RISIKO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREBES | 211.20 | 211.20 | 211.20 | 211.20 | 211.20 | 189.94 | 189.94 | 171.01 | 155.35 | TINGGI |
| 2 | PATI | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 171.10 | 171.10 | 165.53 | 150.21 | TINGGI |
| 3 | PEKALONGAN | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 183.20 | 172.56 | 160.19 | 168.52 | 149.83 | TINGGI |
| 4 | BATANG | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | 161.93 | 154.49 | 143.13 | SEDANG |
| 5 | PURBALINGGA | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 148.12 | 139.78 | 130.82 | SEDANG |
| 6 | JEPARA | 163.20 | 163.20 | 163.20 | 163.20 | 163.20 | 148.77 | 135.11 | 122.27 | 129.86 | SEDANG |
| 7 | PURWOREJO | 215.20 | 215.20 | 215.20 | 215.20 | 215.20 | 190.01 | 163.63 | 144.57 | 127.62 | SEDANG |
| 8 | REMBANG | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 171.60 | 151.12 | 131.73 | 117.89 | 126.95 | SEDANG |
| 9 | TEGAL | 212.80 | 212.80 | 212.80 | 212.80 | 212.80 | 181.08 | 158.93 | 141.32 | 126.26 | SEDANG |
| 10 | BANYUMAS | 207.20 | 207.20 | 207.20 | 207.20 | 207.20 | 193.71 | 164.25 | 140.18 | 122.82 | SEDANG |
| 11 | KOTA PEKALONGAN | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | 138.13 | 138.13 | 138.13 | 122.75 | SEDANG |
| 12 | BANJARNEGARA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 127.36 | 127.36 | 107.61 | 121.40 | SEDANG |
| 13 | BLORA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 135.33 | 123.19 | 113.90 | 119.58 | SEDANG |
| 14 | TEMANGGUNG | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 134.51 | 121.33 | 110.38 | 116.84 | SEDANG |
| 15 | PEMALANG | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 185.70 | 185.70 | 165.97 | 146.38 | 128.55 | 115.11 | SEDANG |
| 16 | SRAGEN | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 133.75 | 126.18 | 114.91 | SEDANG |
| 17 | KEBUMEN | 203.20 | 165.76 | 151.08 | 140.31 | 131.45 | 114.67 | 114.67 | 102.05 | 110.78 | SEDANG |
| 18 | BOYOLALI | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 159.20 | 130.32 | 130.32 | 130.32 | 110.06 | SEDANG |
| 19 | KARANGANYAR | 130.40 | 130.40 | 130.40 | 130.40 | 130.40 | 108.03 | 108.03 | 91.51 | 102.77 | SEDANG |
| 20 | KOTA MAGELANG | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 102.08 | SEDANG |
| 21 | KOTA SEMARANG | 183.60 | 124.72 | 124.72 | 120.75 | 113.83 | 115.52 | 108.63 | 103.49 | 99.41 | SEDANG |
| 22 | DEMAK | 183.60 | 138.20 | 127.42 | 118.21 | 118.21 | 105.77 | 105.21 | 103.88 | 97.71 | SEDANG |
| 23 | WONOGIRI | 145.60 | 145.60 | 145.60 | 145.60 | 145.60 | 124.77 | 124.77 | 108.91 | 97.24 | SEDANG |
| 24 | GROBOGAN | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 154.66 | 131.66 | 111.59 | 97.03 | SEDANG |
| 25 | CILACAP | 215.20 | 172.90 | 157.92 | 138.61 | 124.20 | 112.75 | 112.75 | 103.72 | 96.93 | SEDANG |
| 26 | KOTA TEGAL | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 116.80 | 105.36 | 94.56 | SEDANG |
| 27 | KLATEN | 123.20 | 123.20 | 123.20 | 123.20 | 123.20 | 99.24 | 99.24 | 82.18 | 94.09 | SEDANG |
| 28 | KENDAL | 167.20 | 156.80 | 142.49 | 124.57 | 111.20 | 98.97 | 100.40 | 97.90 | 91.74 | SEDANG |
| 29 | KUDUS | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 131.60 | 130.59 | 119.71 | 102.40 | 90.23 | SEDANG |
| 30 | SEMARANG | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 143.20 | 118.89 | 118.89 | 101.79 | 89.67 | SEDANG |
| 31 | MAGELANG | 143.20 | 96.86 | 90.82 | 90.82 | 81.07 | 71.16 | 71.16 | 77.90 | 86.49 | SEDANG |
| 32 | KOTA SALATIGA | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 90.89 | 83.98 | SEDANG |
| 33 | WONOSOBO | 135.20 | 135.20 | 135.20 | 122.94 | 122.94 | 122.94 | 102.83 | 87.55 | 76.24 | SEDANG |
| 34 | SUKOHARJO | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 81.29 | 71.27 | SEDANG |
| 35 | KOTA SURAKARTA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 67.96 | 67.96 | 57.17 | 49.50 | SEDANG |

*Sumber: BNPB, IRBI 2023.*

Untuk menurunkan nilai indeks risiko bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya mitigasi struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi struktural dilakukan antara lain melalui pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) berbasis masyarakat dan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi di lokasi rawan bencana. Sampai dengan tahun 2023, telah terpasang sebanyak 93 unit peralatan EWS dan 417 unit rambu jalur evakuasi.

**Tabel 2.151.**
**Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019 – 2023**

| Tahun | EWS | | | Rambu Jalur Evakuasi |
|---|---|---|---|---|
| | BPBD | ESDM | Total EWS Terpasang (Akumulatif) | |
| 2019 | 15 | - | 75 | 230 |
| 2020 | 1 | - | 76 | - |
| 2021 | 10 | - | 86 | 347 |
| 2022 | 3 | - | 89 | 377 |
| 2023 | 4 | - | 93 | 417 |

*Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Implementasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang dilakukan oleh Jawa Tengah antara lain melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Dengan adanya Desa/kelurahan tangguh bencana, warga desa akan mampu mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan, dan cara penanganannya. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 189 desa, dari total seluruh desa/kelurahan sebanyak 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah.

**Tabel 2.152.**
**Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2019 – 2023**

| Tahun | Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun | Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Terbentuk |
|---|---|---|
| 2019 | 18 | 92 desa |
| 2020 | 3 | 95 desa |
| 2021 | 30 | 125 Desa |
| 2022 | 7 | 132 Desa |
| 2023 | 57 | 189 Desa |

*Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir dan berperan serta dalam pemulihan pasca bencana melalui pemberian bantuan akibat bencana di Provinsi Jawa Tengah yang diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2014. Dari 2019 hingga 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya membantu korban bencana meliputi rumah atau tempat

usaha, rumah ibadah dan sarana prasarana yang musnah/terbakar habis atau roboh yang datanya dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 2.153.**
**Data Bantuan Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019-2023**

| No | Tahun | Jumlah Kejadian | Roboh | Rusak Berat | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 9 | 277 | 34 | 4.495.000.000 |
| 2 | 2020 | 7 | 60 | 18 | 1.080.000.000 |
| 3 | 2021 | 7 | 206 | 122 | 4.310.000.000 |
| 4 | 2022 | 4 | 9 | 120 | 1.335.000.000 |
| 5 | 2023 | 5 | 22 | 31 | 480,000,000 |
| | **Total** | **32** | **574** | **325** | **11.700.000.000** |

*Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2023*

## 2.6. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja tata kelola pemerintahan diukur dengan salah satunya adalah indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Implementasi tata kelola pemerintahan daerah diwujudkan dengan pelayanan publik yang baik didukung dengan manajemen organisasi dan sumberdaya aparatur, serta dukungan fungsi-fungsi pendukung pemerintahan. Gambaran kondisi tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut.

### 2.6.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian pada tahun 2022 mencapai angka 80,31, meningkat 1,34 dari tahun 2021 yang sebesar 78,97. Jika dilihat secara 5 tahun, kinerja Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah juga terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan baik sesuai dengan *roadmap* nasional.

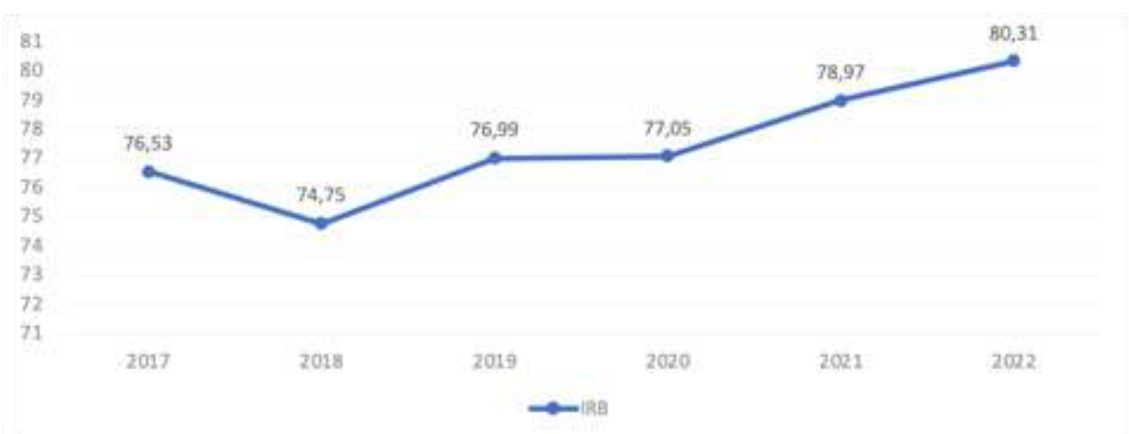


*Sumber: Kemenpan RB, 2023*

**Gambar 2.109.**
**Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018-2023**

Salah satu komponen yang mendukung capaian reformasi birokrasi adalah hasil antara. Terdapat beberapa hasil antara yang memerlukan perhatian karena tidak mengalami peningkatan pada tahun 2022, yaitu kualitas kebijakan dan kualitas pengelolaan pengadaan barang jasa. Hal tersebut mengindikasikan adanya pekerjaan rumah dalam tata kelola sektor tersebut, baik dalam hal kinerja atau tertib administrasinya.

**Tabel 2.154.**
**Catatan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2021 - 2023**

| No | Hasil Antara | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kualitas Kebijakan | 37,97 | 35,65 | n.a |
| 2 | ASN Profesional | 51,85 | 54,56 | n.a |
| 3 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2,74 | 3,34 | n.a |
| 4 | Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 78,88 | 65,70 | n.a |
| 5 | Kualitas Pelayanan Publik | 4,48 | 4,54 | n.a |
| 6 | Kapabilitas APIP | 3 | 3 | n.a |
| 7 | Maturitas SPIP | 2 | 3 | n.a |
| 8 | Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik | 73,49 | 93,14 | n.a |
| 9 | Kualitas Pengelolaan Arsip | 91,31 | 93,45 | n.a |
| 10 | Reformasi Hukum | - | 76,25 | n.a |

*Sumber: Kemenpan RB, 2023*

Adapun menurut catatan hasil evaluasi dari Kemenpan RB diatas, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Provinsi Jawa Tengah yaitu:

a. Memperkuat kualitas pelaksaanan reformasi birokrasi dengan mengawal capaian makro dan menciptakan reformasi birokrasi yang berdampak;
b. Mengoptimalikan digitalisasi reformasi birokrasi dan budaya berAkhlak;
c. Menetapkan arah pembangunan reformasi birokrasi ke depan sesuai dengan isu prioritas yang akan diselesaikan;
d. Memperkuat komponen hasil antara yang kurang baik;
e. Memperkuat performance based budgeting melalui formalisasi dan pengacuan kebijakan TPP;
f. Optimalisasi peran Pemerintah Provinsi sebagai pendamping Pemerintah Kabupaten/Kota terkait implemetnasi reformasi birokrasi berdampak.

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan *e-Government* memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan *e-Government*/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Media sosial, audio-visual dan aplikasi digunakan untuk menyapa masyarakat, membangun kesamaan persepsi pembangunan dengan perangkat daerah dan mengkomunikasikan pembangunan dengan masyarakat, memahami permasalahan pembangunan langsung dari masyarakat dan sekaligus eksekusinya, serta pemecahan aduan masalah pembangunan. Diskominfo, menjadi perangkat daerah yang dipercaya Kepala Daerah dalam mewujudkan pemenuhan persyaratan-persyaratan indikasi SPBE yang baik untuk menunjang

kinerjanya. Selama periode 2018-2023, anggaran Diskominfo terkait substansi tugas dan fungsi telah ditingkatkan secara signifikan.

### 2.6.2 Pelayanan Publik

Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, berkualitas, terjangkau, dan teratur sesuai dengan harapan masyarakat.

Kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat melalui Indeks Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB melalui proses yang disebut Pemantauan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPP). PEKPP dilakukan secara tahunan oleh KemenPAN-RB dengan metode sampling unit pelayanan publik (UPP) yang mewakiili sektor pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa. Selain itu PEKPP juga dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sampling yang lebih luas dimaksudkan sebagai sarana pembinaan disamping sarana evaluasi. Indeks ini mengukur kualitas pelayanan publik melalui 6 aspek yaitu 1) aspek kebijakan pelayanan, 2) aspek profesionalisme SDM, 3) aspek sarpras, 4) aspek system informasi pelayanan publik, 5) aspek konsultasi dan pengaduan, dan 6)aspek inovasi.

Capaian kinerja pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Jika dilihat perkembangan nilai awal tahun 2018 yang sebesar 4,22 dan nilai akhir 2023 sebesar 4,11, pelayanan publik di Jawa Tengah diketahui memiliki kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Kelemahan tersebut terindikasi terdapat pada sektor pelayanan barang yang dinilai melalui sample Dinas Sosial dengan nilai indeks sebesar 3,65. Hasil penilaian ini menunjukkan perlunya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan strategi dalam mengembangkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

**Tabel 2.155.**
**Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018-2023**

| IPP | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provinsi Jawa Tengah | 4,22 | 4,46 | 4,45 | 4,48 | 4,54 | 4,11 |
| OPD sample | | | | | | |
| RSUD Provinsi | 4,72 | 4,74 | n/a | n/a | n/a | 4,66 |
| PTSP Provinsi | 4,11 | 4,3 | 4,41 | 4,46 | 4,56 | n/a |
| Bapenda/Samsat | 3,84 | 4,33 | 4,49 | 4,5 | 4,51 | 4,01 |
| Dinas Sosial | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3,65 |

Selain IPP yang mengukur dari segi *supply* atau penyedia layanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan untuk melengkapi informasi dari sisi *demand* atau pengguna. Indeks ini diukut melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Selama kurun waktu tahun 2018 – 2023 IKM terus mengalami peningkatan secara konsisten. Hal ini menunjukkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan publik yang terekam melalui SKM menunjukkan peningkatan penerimaan yang positif.

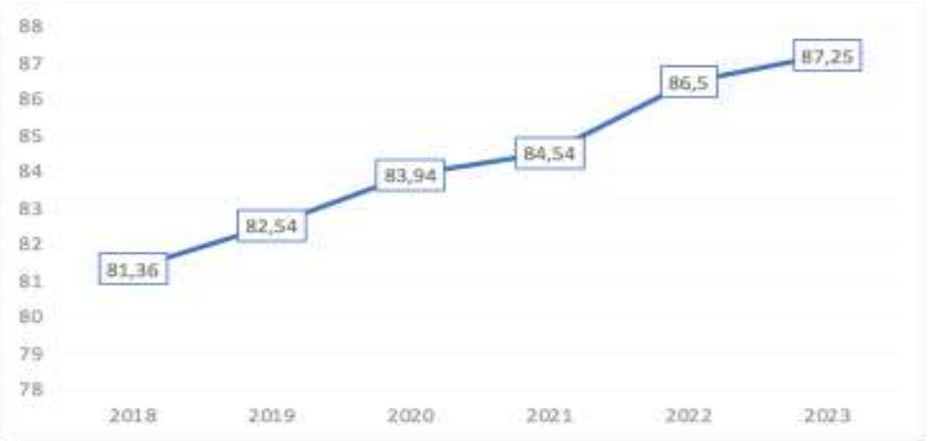


*Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.110.**
**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2018-2023**

### 2.6.3 Demokrasi

Penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dengan pengukuran terbaru memperoleh nilai 84,79. Hal yang perlu upaya keras terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja, kinerja lembaga legislatif, Aspek kesetaraan pada penilaian IDI Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sedang, dimana pada aspek tersebut memperlihatkan akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, akses masyarakat terhadap informasi publik, serta anti monopoli sumber daya ekonomi

### 2.6.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan *e-Government* memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan *e-Government*/ SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Terkait digitalisasi pemerintahan telah dilakukan pembangunan infrastruktur TIK seperti pembangunan jaringan *Fiber Optic*, pengadaan server dan storage; pengadaan sarana dan prasarana studio visual - ruang Multi Media Center (MMC), pembangunan pusat data, sewa internet dan sewa aplikasi analisis media serta, sarpras layanan keamanan informasi. Pembangunan infrastruktur diatas antara lain untuk kegiatan operasional komunikasi dan koordinasi pemecahan masalah-masalah pembangunan (*video conference*, iklan layanan dan, layanan aduan) dan penyediaan portal data.

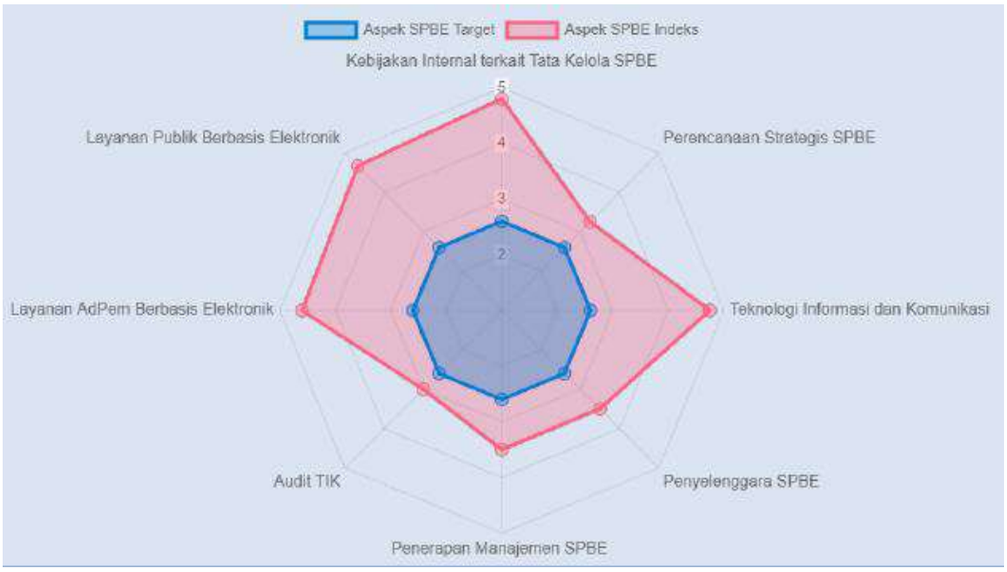


**Gambar 2.111.**
**Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Jawa Tengah Tahun 2020-2023**

Hasilnya, berdasarkan Kepmen PanRB Nomor 13 tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE tahun 2023, capaian indeks SPBE untuk Provinsi Jawa Tengah telah mencapai predikat memuaskan (4,26) terbaik nasional. Adapun rinciannya untuk domain kebijakan mencapai 4,80, domain tata Kelola mencapai 3,90, domain manajemen mencapai 3,36, dan domain layanan mencapai 4,63. Lebih lanjut pada domain kebijakan SPBE untuk aspek kebijakan internal telah mencapai 4,80; pada domain tatakelola untuk aspek perencanaan strategis telah mencapai 3,25, aspek TIK sebesar 4,75 dan aspek penyelenggaraan sebesar 3,50; domain manajemen untuk aspek penerapan manajemen sebesar 3,50 dan audit TIK sebesar 3,00; serta domain layanan SPBE untuk aspek layanan administrasi pemerintah sebesar 4,60 dan layanan publik sebesar 4,67. Capaian tersebut telah melampaui target indeks SPBE tahun 2023 sebesar 3,24 (predikat sangat baik). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya digitalisasi pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.

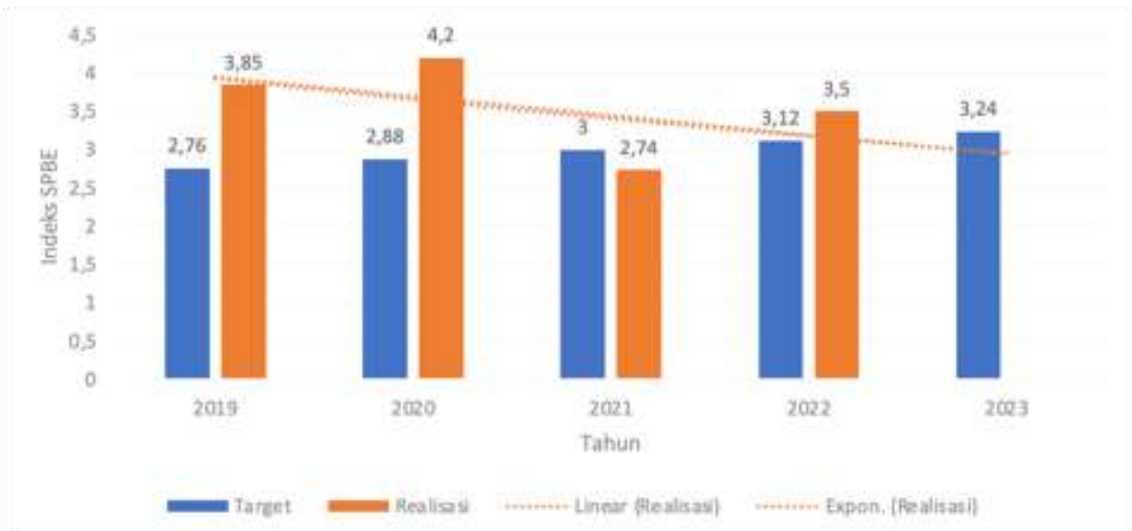


*Sumber: Diskominfo, 2023.*

**Gambar 2.112.**
**Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2019-2023**

Upaya pemenuhan persyaratan implementasi *e-Government*/SPBE yang baik ternyata berpengaruh pada capaian Indeks SPBE-nya. Gambar 2.98 diatas menunjukkan bahwa, sepanjang 2019-2020 target akhir SPBE sudah terlampaui sejak awal penetapan target RPJMD Tahun 2018-2023. Meskipun pada Tahun 2021 sempat mengalami penurunan drastis karena perubahan metode perhitungan dari PermenPan RB No. 5 Tahun 2018 ke PermenPan RB No. 59 Tahun 2020, pada Tahun 2022 dengan perbaikan persyaratan sebagaimana PermenPan RB yang baru dapat naik lagi dan diperkirakan target akhir Indeks SPBE Tahun 2023 tetap terlampaui.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan SPBE telah dilakukan berbagai kegiatan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian.

**1) Komunikasi dan Informatika**

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika telah dilakukan melalui 3 (tiga) layanan yaitu Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Layanan Data Terbuka. Ketiga layanan dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Layanan Pusat Data (*Data Center*)**

Dalam upaya meningkatkan layanan SPBE telah diselesaikan pembangunan *Data Center*. Pembangunan data center telah memperbaiki kondisi *Data Center* seperti lokasi *Data Center* dapat dipindah ke lokasi yang aman (seperti rawan banjir, pernah mengalami konsleting listrik dan terganggu/terdapat kegiatan lain dalam satu gedung). Kapasitas juga telah ditingkatkan.

*Sumber: Diskominfo, 2022*

**Gambar 2.113.**

**Gambar Rencana Bangunan Data Center Provinsi Jawa Tengah**

Meskipun demikian kondisi pusat data saat ini masih perlu ditingkatkan, karena berada dalam tingkatan standard 1 / rated 1, dimana fasilitas pusat data masih belum memiliki *redundancy* seperti belum memiliki *redundancy* jalur power atau kelistrikan, *redundancy genset, redundancy* panel listrik, *redundancy* UPS dan belum memiliki tangki penyimpanan BBM harian, mingguan maupun bulanan

**b. Layanan Jaringan Intra**

Layanan jaringan intra merupakan bagian dari layanan data center sebagaimana diterangkan diatas. Jaringan intra pemerintah merupakan jaringan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam instansi pemerintah daerah (Gambar 2.). Pengembangan

jaringan intra dilakukan seperti dengan pemasangan jaringan *Fiber Optic* untuk menghubungkan antar perangkat daerah dengan data center, pemenuhan kapasitas *bandwidth* internet yang lebih cepat dan aman pada semua OPD.

*Sumber: Diskominfo*

**Gambar 2.114.**
**Topologi Jaringan Perangkat Daerah**

Selanjutnya setelah infrastruktur jaringan intra pemerintah terimplementasi dapat digunakan untuk sarana atau media pengembangan teknologi informasi seperti aplikasi berbagi pakai, integrasi aplikasi layanan pemerintah, media *video conference*, media *blow up* berita melalui televisi digital (IPTV), media komunikasi jarak jauh dengan internet (VOIP).

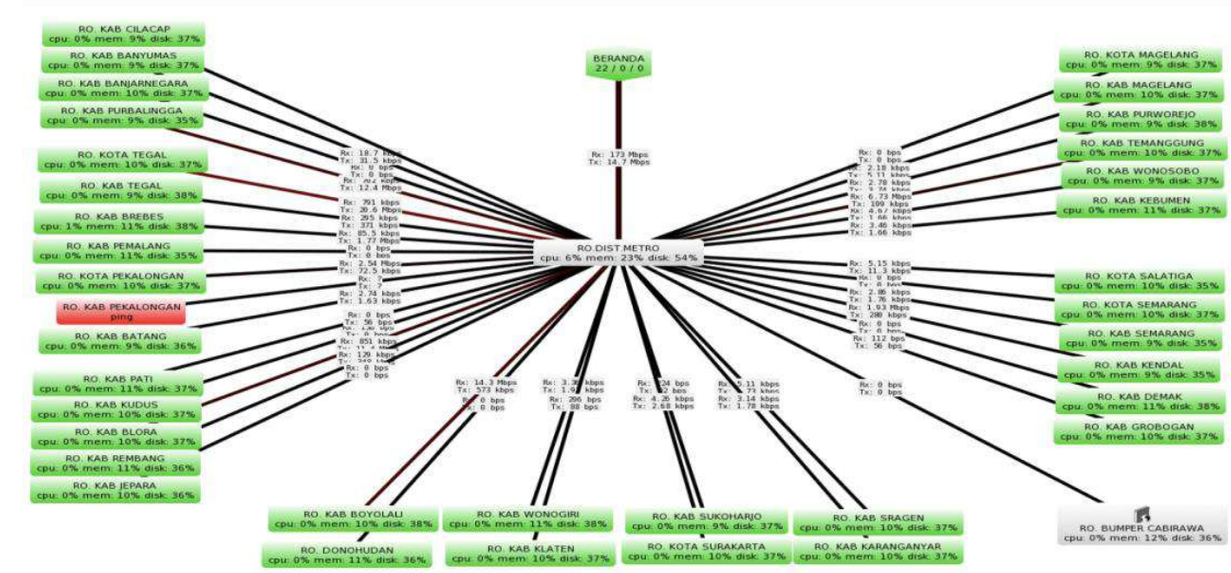


*Sumber: Diskominfo*

**Gambar 2.115.**
**Topologi Jaringan Metro Kab/Kota**

Sampai dengan saat ini, Diskominfo telah menghubungkan jaringan Fiber Optic mandiri antar OPD se Provinsi Jawa Tengah, memiliki jaringan Metro yang menghubungkan 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan tentunya jaringan tersebut terintegrasi dengan *data center*, yang juga memiliki DRC (*Disaster Recovery Center*) dengan kapasitas *bandwidth* sebesar 11.800 Mbps.

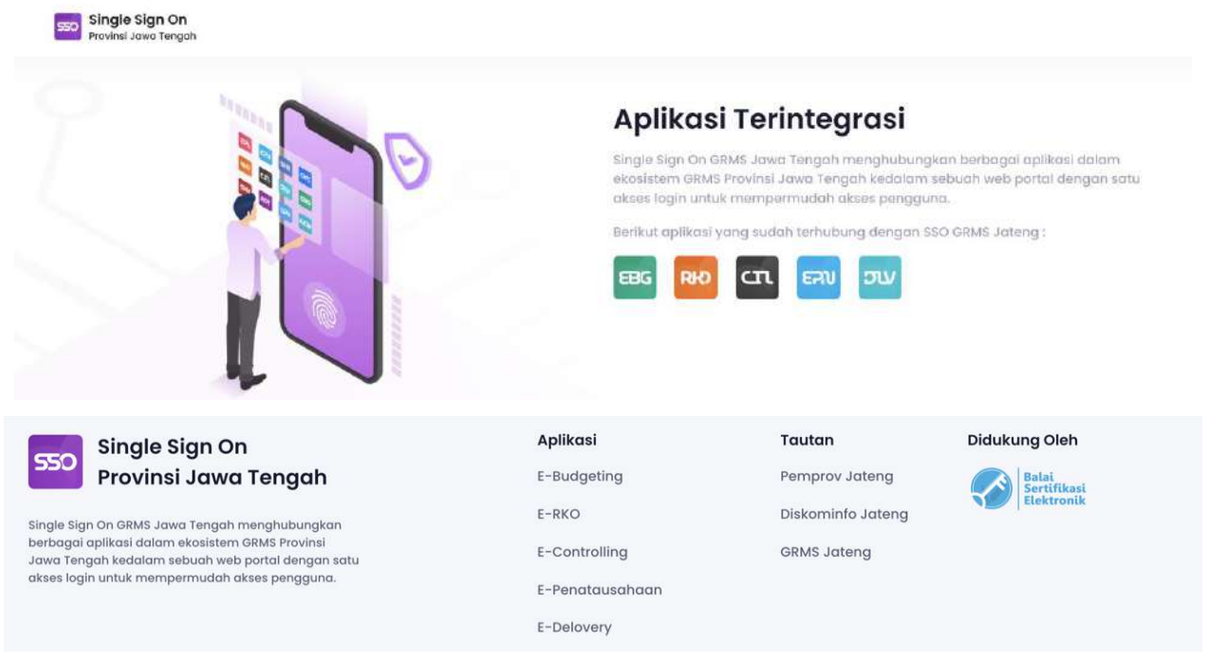


*Sumber: Diskominfo*

**Gambar 2.116.**
**Aplikasi Terintegrasi *Single Sign On* Provinsi Jawa Tengah**

Upaya pemenuhan fasilitas sarpras jaringan intra tersebut sesuai dengan Pergub Nomor 15 Tahun 2013. Pergub mengharapkan agar Diskominfo mampu memfasilitasi keterpaduan jaringan komputer intranet. Fasilitasi penyusunan aplikasi juga sesuai atas perubahan pergub diatas dengan Pergub Nomor 45 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan Diskominfo untuk melakukan audit terkait usulan sistem informasi / aplikasi / website yang diajukan oleh perangkat daerah. Upaya pengembangan layanan jaringan intra diduga telah berpengaruh pada tingkat kematangan layanannya. Tingkat kematangan level sudah masuk tahap terakhir, yaitu dengan nilai 5. Artinya, pada kematangan kapabilitas layanannya masuk dalam level optimalisasi. Optimalisasi berarti bahwa layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Adapun pada kapabilitas prosesnya masuk pada tahap optimum. Optimum berarti pengaturannya telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

Meskipun demikian, masih dijumpai adanya sejumlah permasalahan dalam layanan jaringan intra pemerintah. Permasalahan yang sangat besar dampaknya terhadap pelayanan yaitu *fiber cut* atau putusnya jalur *fiber optic*. Putusnya jalur fiber optic bisa disebabkan karena pekerjaan bangunan/galian oleh pihak eksternal di titik yang dilewati jalur kabel fiber. Permasalahan juga muncul dari jaringan lokal masing masing perangkat daerah, karena peralatan jaringan seperti *router, switch*, kabel utp, *accespoint* belum memenuhi standar yang sesuai, sehingga distribusi *bandwidth* internet tidak terdistribusi dengan maksimal. Belum lagi realitas perangkat daerah masih melakukan belanja internet/sewa internet mandiri karena alasan untuk mempunyai *backup* internet. Sebenarnya bukan hanya sewa internet yang diambil alih pengelolaannya oleh Diskominfo, pengadaan server juga seharusnya dikoordinasikan dengan Diskominfo. Pengkoordinasikan tersebut penting mengingat, agar server dapat didata, terstandarisasi, menjadi satu wadah dan, disinergiskan terlebih, saat ini

Diskominfo sudah selesai membangun *Data Center* dan diresmikan pada awal tahun 2023 dimana *data center* sudah dirancang dan memiliki kapasitas yang besar dalam mengelola file data dan aplikasi Perangkat Daerah. *Server* dan *storage* sebaiknya menyatu dalam data center. Dalam upaya men-standar-kan, mensinergiskan dan efisensi anggaran diskominfo perlu mengidentifikasikan kebutuhan/distribusi jaringan FO dan *bandwidth* bagi masing-masing Perangkat Daerah.

Hasil pemantauan dinamika aplikasi Perangkat Daerah juga menunjukkan bahwa, aplikasi di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat diberbagai Perangkat Daerah seperti tingkat keaktifannya, perkembangannya, dan ragam layanannya. Meskipun demikian, dari total 881 aplikasi yang terdaftar yang ada di Perangkat Daerah, 113 aplikasi (13,93 %) posisinya tidak aktif. Kondisi ini menggambarkan bahwa aplikasi online sudah biasa digunakan Perangkat Daerah tetapi belum semuanya dapat diakses oleh publik. Adapun perkembangannya dari 881 aplikasi sebanyak 380 aplikasi (46,86%) berstatus transaksional, 319 aplikasi (39,33 %) masih bersifat informatif dan sisanya sudah tidak aktif. Secara umum aplikasi yang ada digunakan untuk memperlancar tugas kedinasan. Gambaran diatas menunjukkan bahwa belum semua aplikasi berjalan aktif, belum bersifat transaksional serta belum sinergis dan terintegrasi satu dengan lainnya. Kebanyakan baru untuk layanan kedinasan saja, masih dibutuhkan perbaikan-perbaikan.

**c. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik**

Layanan pengaduan pelayanan publik menggunakan media *online* seperti *website, whatsapp*, *android*, instagram, SMS, facebook, twitter, layanan *hotline*, aduan langsung, youtube dan aplikasi Laporgub sendiri. Total pengaduan pada Tahun 2022 adalah 22.980 aduan. Pengaduan umumnya menyangkut permohonan perbaikan jalan, permohonan Bansos Covid, permohonan informasi vaksinasi Covid, aduan bantuan tidak tepat sasaran dan, permohonan penanggulangan banjir. Adapun aduan masyarakat yang sudah selesai ditindaklanjuti sebesar 65,20% (14.983 aduan), yang berada dalam tahap verifikasi sebesar 21,44% (4.927 aduan), yang masih dalam tahap progress sebesar 8,25% (1.895 aduan) dan yang bukan wewenang sebesar 2,68% (615 aduan).

Masyarakat dapat melihat aduan pada laman LaporGub! dan dapat juga mengunggah bukti aduannya ke dalam sistem seperti yang dapat dilihat pada bukti dukung LaporGub! Setiap aduan yang masuk ke dalam LaporGub!, otomatis akan disampaikan kepada instansi terkait. Setiap progres aduan akan terlihat oleh admin LaporGub!, apakah aduan tersebut sudah diverifikasi, proses maupun selesai seperti yang disertakan pada data dukung Indikator Progres Aduan LaporGub!. Admin juga dapat mendownload aduan untuk bahan laporan kepada atasan dengan bukti dukung: - Indikator Download Laporan LaporGub! - Indikator Tampilan Review Laporan – Indikator REKAP LaporGub!. Kemudian sistem LaporGub! sudah melakukan Konsolidasi data dengan SP4N LAPOR! Kemenpan-RB, Sehingga aduan LaporGub! dapat juga dilihat di aplikasi SP4N LAPOR! milik Kemenpan-RB dengan proses. Aduan memang tidak semua dijawab, terdapat 42 aduan dikembalikan dan 615 aduan di luar wewenang Pemerintah Daerah. Dari laporan implementasi LaporGub!, baru terinformasikan secara global bahwa aduan sudah terjawab tetapi tingkat solutifnya belum terinformasikan dalam rekapitulasi aduan LaporGub!.

Meskipun demikian tidak semua layanan mendapatkan jawaban yang solutif atau tidak dapat dijawab. Kondisi ini disebabkan karena level kematangan layanannya belum maksimal. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik baru mencapai level 3. Artinya, layanan pengaduan publik melalui LaporGub! Secara kapabilitas layanan SPBE masuk dalam kriteria Transaksi, yaitu dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan. Secara kapabilitas proses masuk dalam kriteria terstandarisasi, yaitu pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah. Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya terstandarisasi. Pada level 3 ini dalam SPBE sudah masuk predikat Baik (2,6-<3,5). Kenaikan level kematangan misalkan sampai level 4 memungkinkan secara kapabilitas layanannya sudah terkolaborasi sehingga bukan hanya terjadi pertukaran informasi tetapi terjadi integrasi layanan dengan SPBE lainnya sehingga, sesuatu yang dianggap bukan tugas dan fungsinya dapat dikoordinasikan segera.

**2) Statistik.**

Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengelolaan data statistik sektoral dan geospasial, baik berupa *hardware* maupun *software* Pengembangan *Single Data System* (SDS) dalam rangka merealisasikan arsitektur Big Data Jawa Tengah Berdasarkan Roadmap yang telah ditetapkan serta pengembangan Geospasial dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah Satu Peta. Dalam rangka mewujudkan *Smart Government* dengan penerapan penuh layanan digital publik dan administrasi pemerintahan nasional; dan pemanfaatan *Big Data* dan Kecerdasan Artifisial (Data Driven Government); Dampak SDI Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Perencanaan Pembangunan, konkritnya berupa data prioritas yang akan digunakan sebagai perencanaan pembangunan bukan hanya katalog data; Data terkini atau ter-*update* akan meningkatkan kualitas program secara tepat sasaran. Dengan program yang tepat sasaran tersebut otomatis akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

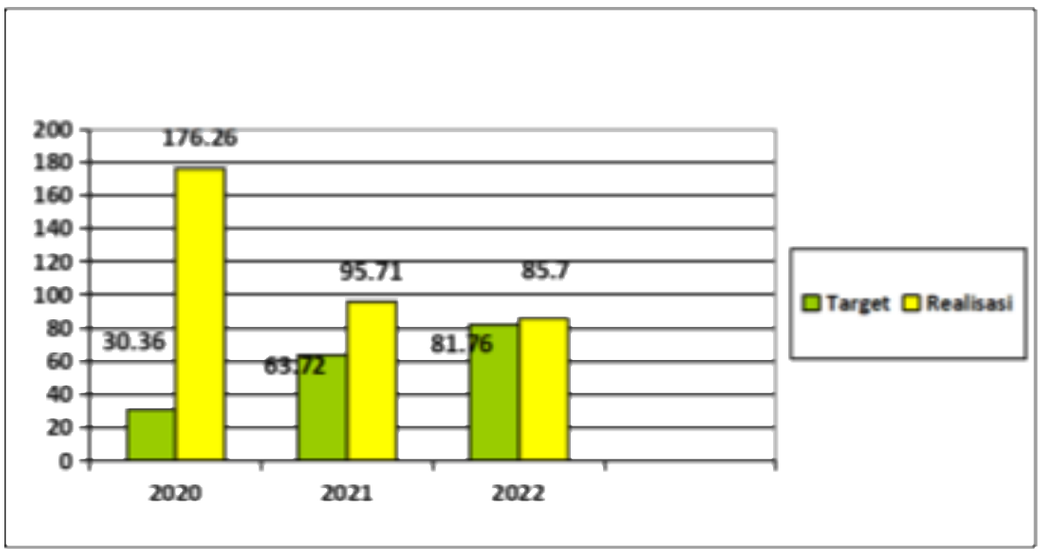


*Sumber: LKPJ, 2022*

**Gambar 2.117.**
**Capaian Kinerja Laju Pemanfaatan Data Sektoral**
**Tahun 2020-2023**

Dalam pelaksanaan Tahun 2021, capaian laju pemanfaatan data sektoral sebesar 95,71%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 (63,72%) mengalami peningkatan sebesar 31,99%. Sedangkan pada tahun 2022 laju pemanfaatan data sektoral mencapai 85,70% yang berarti terdapat kenaikan sebesar 3,94% dibandingkan dengan target pada tahun 2022 di triwulan IV yaitu sebesar 81,76%. Capaian pada tahun 2021 dan 2022 tersebut melampaui target karena respon positif OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota yang antusias dalam memanfaatkan aplikasi *Single Data System* (SDS) dalam pengiriman data sektoral, sehingga data sektoral yang masuk melebihi target awal.

Hingga saat ini, Diskominfo telah melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup Provinsi (SDS). Kegiatan ini berupa Pengumpulan, Pemeriksaan dan Publikasi Data Statistik Sektoral di Lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Melaksanakan Forum Data Satu Data Jawa Tengah sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara Satu Data Jawa Tengah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk Menyediakan data dan informasi hasil pembangunan lebih cepat dan akurat untuk perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah melalui *Single Data System* serta mendukung Pengambilan Kebijakan Pimpinan.

Selanjutnya, dalam menjamin keterbukaan informasi publik telah dilakukan difasilitasi melalui aplikasi portal data. Dalam aplikasi portal data, masyarakat umum dapat mengakses data dan informasi Perangkat Daerah dan mendapatkan informasi publik yang diperlukan. Portal data diharapkan menjadi sarana OPD dalam mempublikasikan data dan informasi yang perlu diketahui publik atas sektor pembangunan yang ditangani. Jadi, aplikasi portal data adalah mendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / PPID Utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi sektor-sektor publik. Aplikasi portal data diharapkan akan menjadi sarana untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Tengah, karena data dari berbagai OPD yang masuk harus melalui tahap pemeriksaan prinsip SDI sebelum dipublikasikan dalam portal data.

*Sumber: Diskominfo, 2022*

**Gambar 2.118.**
**Grafik Kunjungan Portal Data Tahun 2018-2022**

Selain disampaikan fasilitasi publikasi hasil pembangunan satu arah dalam bentuk tayangan berita dalam PPID, urusan statistik juga memfasilitasi dukungan website untuk komunikasi dua arah seperti melalui portal berita pada website jatengprov.go.id. Diskominfo juga mengaktifkan website kominfo jateng untuk komunikasi yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan Diskominfo terkait suatu topik pembangunan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.106. Terhadap layanan komunikasi dua arah tersebut terdapat hambatan dalam merespon pihak-pihak yang berkomunikasi, tentu membutuhkan spesialisasi siapa pihak yang menangani, kualitas pemahaman substansi topik yang dibahas dan, jaringan komunikasi antar pihak yang memadai.

**3) Persandian**

Persandian memiliki peran yang sangat vital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu untuk mengamankan informasi dengan kriteria CIA (*confidentiality, integrity, availability*) Ketiga aspek tersebut merupakan aspek yang paling penting dalam menciptakan sebuah keamanan informasi yang kuat dan efektif. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 (ayat 2) bahwa Persandian sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kondisi Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini, berdasarkan hasil pelaksanaan dan rekomendasi IT Assessment yang dilakukan oleh BSSN serta kegiatan Penetration Test (Pentes) mandiri dengan memanfaatkan beberapa *tools* pengamanan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022 terhadap aplikasi yang telah dibangun/dikembangkan oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperoleh hasil dalam kondisi yang cukup baik meskipun ada beberapa aplikasi yang masih diperlukan penguatan keamanan, layanan seperti SSL, *firewall* dan anti virus juga diharapkan dapat memperkuat keamanan sistem atau aplikasi dari sisi lalu lintas data dan keamanan *workstation* pengguna.

**Tabel 2.156.**
**Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Dalam Kurun Waktu**
**Tahun 2021 - 2023**

| NO | AREA EVALUASI | TAHUN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Tata Kelola | 118 | 123 | 123 |
| 2 | Pengelolaan Risiko | 50 | 67 | 72 |
| 3 | Kerangka Kerja | 156 | 159 | 159 |
| 4 | Pengelolaan Aset | 147 | 167 | 167 |
| 5 | Teknologi dan Keamanan Informasi | 87 | 118 | 18 |
| Tingkat Kematangan | | III | III+ | III+ |
| Predikat | | CUKUP BAIK (558) | BAIK (634) | BAIK (639) |

*Sumber : BSSN RI, 2023*

Berdasarkan tabel diatas, capaian tingkat kematangan Keamanan Informasi dalam kurun waktu 2020 s.d 2023 menunjukkan kondisi yang semakin

baik, dimana terjadi peningkatan skor tingkat kematangan yang semula 634 pada tingkat III+ (predikat "Baik") di tahun 2022, dan mengalami peningkatan sebesar 5 poin sehingga capaian menjadi 639 pada tingkat III+ (predikat "Baik") di tahun 2023. Capaian pada tahun 2023 mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat terbaik Nasional untuk Pengelolaan Keamanan Informasi Sektor Pemerintah Daerah. Hal ini menandakan bahwa keamanan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terkelola dengan baik pada aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, dan respon.

Prestasi dalam pencapaian indeks KAMI masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target maksimal sebesar 645. Peningkatan itu mencakup Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga, Pengamanan Layanan Infrastruktur dan Perlindungan Data Pribadi (PDP). Meningkatnya Keamanan Informasi Dan Pemanfaatan Persandian Daerah yang diukur melalui Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI), yang dinilai menggunakan instrumen dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta dilakukan visitasi dan evaluasi langsung dari BSSN, dengan hasil Indeks KAMI di level III+ mencapai target, penilaian terdiri dari 8 unsur penilaian yaitu Tata Kelola, Pengelolaan resiko; Kerangka Kerja Keamanan Informasi; Pengelolaan Aset; Teknologi dan Keamanan Informasi; Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga; Pengamanan layanan Infrastruktur; dan Perlindungan data Pribadi.

Hingga saat ini, pada urusan persandian, telah dilakukan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan upaya pengamanan informasi. Upaya pengamanan informasi dilakukan melalui assessment aplikasi; layanan *e mail* sanapati, 49 SSL, 520 antivirus bagi 50 OPD, *live streaming* dan, *conference*. Kegiatan-kegiatan ini untuk menjamin keamanan informasi perangkat daerah. Terdapat 45 OPD yang aplikasinya sudah di pentest dan melakukan tindaklanjut atas hasil pentest nya. Sampai saat ini juga secara aktif terus dilakukan peningkatan kualitas keamanan informasi. Upaya peningkatan keamanan informasi seperti sedang dalam tahap pembuatan Pergub SMKI, *Risk Manajemen,* Arsitektur Keamanan dan SOP.

Upaya pengamanan informasi lebih detil sebagai berikut: dilakukan Digital Forensik dilaksanakan pada alat komunikasi milik Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; Pada layanan pengelolaan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Bidang Persandian dan KI menyediakan aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik (MSE) sebagai aplikasi untuk membantu pendaftaran dan pengelolaan Sertifikat elektronik / Tanda Tangan Elektronik untuk seluruh Pejabat / Fungsional hingga staf pelaksana di seluruh OPD Pemprov Jateng dengan basis website dan Aplikasi Mobile. Selain itu Bidang Persandian dan KI juga menyediakan Chatbot "SORE MASE" sebagai layanan helpdesk bagi pemilik TTE yang dapat digunakan bagi pemilik TTE untuk mengecek data yang berkaitan dengan TTE secara realtime dan 24 jam. Hingga saat ini sudah terbit sejumlah 297 TTE; Pengamanan distribusi/pengiriman data atau surat sudah menggunakan email terenkripsi Sanapati baik dari pusat ke provinsi hingga ke kab/kota; Fasilitasi layanan *Video Conference* untuk komunikasi pejabat VVIP seperti Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; Layanan publikasi kegiatan yang ada di Pemprov Jateng melalui *Video Live Streaming* pada kanal medsos *(Youtube, Facebook, Twitter, Tiktok dan Instagram).*

Dalam menjamin keamanan informasi, Provinsi juga sudah membentuk Tim CSIRT atau *Computer Security Incident Response Team* pada Tahun 2020. Tugas Tim CSIRT adalah menerima, meninjau, dan merespon laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Provinsi juga melakukan fasilitasi pembentukan Tim CSIRT di Kabupaten / Kota. Sampai saat ini sudah 11 Kab/Kota telah memiliki Tim CSIRT.

Tim CSIRT Provinsi Jawa Tengah selalu secara rutin melakukan layanan penetration testing, sertifikasi elektronik, kontra penginderaan dan *jamming*. *Pentest / Penetration Testing* dan *IT Security Assement* Mandiri adalah kegiatan pengujian kerentanan aplikasi yang digunakan di lingkup Pemprov Jateng oleh tenaga ahli pada bidang Persandian dan Keamanan Informasi baik pada saat aplikasi belum dirilis maupun pada saat aplikasi sudah dirilis atau sudah berjalan. Hingga saat ini sudah ada 47 OPD dari total 49 OPD aplikasinya telah di pentest dengan status akhir kerentanan LOW; SSL (*security Socket Layer*) adalah sebagai pengaman pertukaran data yang terjadi melalui jaringan internet, SSL sudah diterapkan pada semua sub domain yang digunakan pada aplikasi yang ada di Pemprov Jateng; Anti virus yang bertujuan untuk mengamankan data yang ada pada computer/desktop dari serangan virus atau malware, sebanyak 31 OPD sudah menerapkan anti virus pada desktop atau perangkat komputer yang digunakan; Pengamanan signal atau (Jamming) dilakukan untuk kegiatan yang menghadirkan pejabat VVIP atau Presiden dan Wakil Presiden serta pada kegiatan tes atau ujian kompetensi; Kontra penginderaan merupakan kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain, termasuk metode-metode yang melibatkan peralatan elektronik dan mendeteksi adanya peralatan surveilance (alat sadap), hal ini dilakukan pada kediaman, ruang kerja dan kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Upaya peningkatan keamanan informasi juga dilakukan melalui jalur regulasi, agar langkah-langkahnya lebih tertata dan didukung semua perangkat daerah. Regulasi tersebut adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang digunakan sebagai acuan atau dasar pelaksanaan Persandian dan Keamanan Informasi di Provinsi Jawa Tengah. Atas capaian pengamanan informasi, Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan pengakuan ISO 27001 pada Tahun 2022 tentang Keamanan Informasi dan *Data Center*.

### 2.6.5 Penelitian dan Pengembangan

Sesuai dengan Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka dalam rangka optimalisasi urusan penelitian dan pengembangan serta terciptanya integrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Provinsi Jawa Tengah maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu keluaran yang dihasilkan oleh fungsi penelitian dan pengembangan adalah dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi penelitian yang dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan kebijakan dan

perencanaan pembangunan daerah. Selama kurun waktu tahun 2019-2023 dokumen dan rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.157.**
**Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian Tahun 2019-2023**

| No. | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dokumen Penelitian | 9 | 4 | 2 | 23 | 18 |
| 2. | Rekomendasi/Implementasi Penelitian | 9 | 4 | 2 | | |

*Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Selama kurun waktu 2017 – 2021 dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi hasil penelitian fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan litbang daerah sejak 2017, kegiatan penelitian dalam bentuk Riset Unggulan Daerah (RUD) dan penelitian mandiri sudah tidak difasilitasi lagi. Pada tahun 2021 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya volume kegiatan penelitian karena pemerintah memfokuskan pada kegiatan dalam upaya penanggulangan dampak pandemi. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan hasil litbang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM Peneliti melalui pendidikan dan pelatihan, membangun komunikasi melalui Jaringan Penelitian dan Inovasi, kerjasama dengan pemerintah pusat (Ristek dan LIPI), serta koordinasi dan membangun jejaring antara penelitian dan perencanaan.

Guna mendukung fungsi kelitbangan maka dibentuk beberapa lembaga pendukung kelitbangan di Jawa Tengah antara lain berbentuk *technopark, agro technopark, marine science technopark,* digitalisasi *technopark* dan taman teknologi pertanian. Bentuk kelembagaan *technopark* di Jawa Tengah di Kabupaten/Kota dikelola oleh PD teknis dan mendapatkan pendanaan dari anggaran daerah. *Technopark* dengan bidang fokus dibidang pertanian dan pangan terdapat di Ganesha Sragen dikelola oleh UPT Dinas Tenaga Kerja, *technopark* Lebaksiu yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tegal, *Agrotechnopak* Klaten yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, *Technopark* Pangan Kabupaten Grobogan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan *technopark* perikanan di Kota Pekalongan dikelola oleh UPT Dinas kelautan Perikanan, serta *technopark* dengan bidang fokus otomotif di Kota Surakarta (Solo *Technopark*).

Kelembagaan lain yang memiliki peran untuk menghilirkan inovasi agar dapat menjadi produk yang bisa dijual dan mampu menghasilkan *start up* inovasi adalah Inkubator Bisnis dan Teknologi yang melakukan kegiatan proses pra inkubasi dan inkubasi. Pada proses Pra inkubasi dilakukan dengan meningkatkan sumberdaya manusia untuk mengubah pola pikir dan membentuk calon *start up* menjadi *start up*. Sedangkan proses inkubasi dilakukan dengan melakukan pendampingan, mentoring, pelayanan, fasilitasi, promosi untuk meningkatkan kapasitas produk. Di Jawa Tengah setidaknya terdapat 22 inkubator yang berfungsi aktif dalam memberikan layanan inkubasi.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki Inkubator Wirausaha Inovasi Jawa Tengah (Inwinov Jateng) yang berada di bawah naungan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Alokasi sumber pendanaan berasal dari APBD dan APBN (melalui Kementerian Ristekdikti, BRIN dan Kemenkop UKM). Selama lima

tahun terakhir, Inwinov Jateng telah melakukan pembinaan terhadap tenant yang dikelola masyarakat melalui fasilitasi program penguatan inkubator/tenant yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.158.**

**Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant Tahun 2019-2023**

| No | Tahun | Total Tenant | Program | Sumber Pendanaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 6 Tenant | Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) | Kemenristekdikti |
| 2 | 2020 | 1 Tenant | Startup Inovasi Indonesia (SSI) | BRIN |
| 3 | 2021 | 40 Tenant | Fasilitasi Lembaga Inkubator | Kemenkop UKM |
| 4 | 2022 | 17 tenant | Inwinov Jateng | APBD |
| 5 | 2023 | 17 tenant | Inwinov Jateng | APBD |

*Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023.*

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Tengah yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (SIDa) Provinsi Jawa Tengah adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Pengembangan SIDa di Jawa Tengah ada 4 pilar tematik yaitu 1) Provinsi Inovatif; 2) Kabupaten Kota Inovatif; 3) Desa Inovatif; dan 4) UMKM Inovatif. Semenjak digulirkan tahun 2013, telah difasilitasi pengembangan system inovasi di 35 Kabupaten/Kota, pengembangan inovasi di 90 desa, serta pada 43 UMKM di Jawa Tengah.

Kegiatan lainnya adalah memfasilitasi inovasi masyarakat melalui Krenova atau Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk lomba krenova dan penjaringan inovasi. Kegiatan krenova dilakukan dengan 2 jalur dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki inovasi untuk bisa terlibat dalam kegiatan lomba krenova dan seleksi inovasi dengan jalur penjaringan inovasi. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah menghasilkan karya inovasi sehingga mampu untuk mengatasi kebutuhan teknologi di sekitarnya atau dapat direplikasi di daerah lain, sehingga memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Jawa Tengah.

Partisipasi masyarakat Jawa Tengah mengikuti kegiatan KRENOVA Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai tahun 2022 terjadi fluktuasi, pada tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan sedangkan tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan dikarenakan ada 2 kabupaten yang tidak mengikuti lomba krenova dan

pembatasan jumlah peserta dari masing-masing Kabupaten/Kota maksimal 5 inovasi. Tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan disebabkan karena dilakukannya 2 mekanisme proses krenova melalui lomba krenova dan penjaringan inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki inovasi, perlu diberikan kesempatan dan wadah agar inovasi tersebut tersalurkan.

**Tabel 2.159.**

**Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

| No | Tahun | Jumlah Inovasi | Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 201 | 35 Kabupaten/Kota | • Mulai tahun 2019 Lomba Krenova dibatasi maksimal 5 inovasi per kabupaten/kota;<br>• Lomba krenova belum semua Kabupaten/Kota mengirimkan;<br>• Penjaringan Inovasi Masyarakat baru dimulai tahun 2021. |
| 2 | 2019 | 169 | 35 Kabupaten/Kota | |
| 3 | 2020 | 167 | 34 Kabupaten/Kota | |
| 4 | 2021 | 230 | 35 Kabupaten/Kota | |
| 5 | 2022 | 276 | 34 Kabupaten/Kota | |
| 6 | 2023 | 309 | 35 Kabupaten/Kota | |

*Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi daerah serta untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perhitungan Indeks Inovasi Daerah didasarkan pada 16 indikator satuan pemda dan 20 indikator satuan inovasi. Predikat penilaian IID terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut: 0 (tidak dapat dinilai); 0,01-29,99 (Kurang Inovatif); 30,00-59,99 (Inovatif) dan 60,00-100,00 (Sangat Inovatif).

**Tabel 2.160.**

**Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| No | Tahun | Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) | Predikat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 22.560 | Sangat Inovatif | Perubahan Penilaian IID mulai tahun 2021 dengan menggunakan skala perhitungan 0 - 100 |
| 2 | 2020 | 36.357 | Sangat Inovatif | |
| 3 | 2021 | 62.57 | Sangat Inovatif | |
| 4 | 2022 | 71.32 | Sangat Inovatif | |
| 5 | 2023 | 65.40 | Sangat Inovatif | |

*Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2023*

### 2.6.6 Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain masih perlunya pengolahan kearsipan sesuai ketentuan, serta belum optimalnya digitalisasi arsip.

**Tabel 2.161.**

**Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019-2023**

| NO | Tahun | Nilai | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 79,33 | Sangat Baik |
| 2 | 2020 | 92,08 | Sangat Memuaskan |
| 3 | 2021 | 91,314 | Sangat Memuaskan |
| 4 | 2022 | 93,45 | Sangat Memuaskan |
| 5 | 2023 | 93,99 | Sangat Memuaskan |

*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023.*

Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Penyediaan dan pengelolaan arsip untuk akses dan informasi masyarakat masih perlu dioptimalkan. Berikut data jumlah kunjungan pengguna arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 2.162.**

**Jumlah Pengunjung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

| No | Jenis Layanan | Tahun (orang) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Penelitian atau Mencari Arsip | 757 | 780 | 209 | 346 | 496 | 1.182 |
| 2 | Kunjungan atau Wisata Arsip | 1.890 | 2.036 | 15.001 | 112 | 3.206 | 2.465 |
| 3 | Magang atau PKL | 219 | 151 | 103 | 67 | 97 | 260 |
| 4 | Konsultasi Kearsipan atau Perpustakaan | 669 | 485 | 206 | 127 | 288 | 494 |
| 5 | Umum atau lain-lain | 3535 | 594 | 33 | 81 | 338 | 242 |
| 6 | Layanan SIKS, Website | | | | 11.289 | 41.718 | 91 |
| | Jumlah | 7.070 | 4.046 | 15.552 | 12.022 | 46.413 | 4.734 |

*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023.*

### 2.6.7 Akuntabilitas Kinerja

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut pada tahun 2018-2023 mendapatkan predikat A. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun 2016-2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat BB.

Komponen SAKIP terdiri atas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Semua komponen mengalami kenaikan sehingga nilai SAKIP total juga mengalami kenaikan secara signifikan dari 81,13 di tahun 2022 menjadi 81,92 di tahun 2023 atau naik sebesar 0,79 poin. Hal ini menunjukkan ada perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Meski begitu masih terdapat beberapa catatan dari masing-masing komponen yang perlu ditindaklanjuti antara lain, menyempurnakan penjenjangan

kinerja, rebiew identifikasi *cross-cutting* pada pohon kinerja, memastikan penetapan target kinerja OPD yang lebih baik, memastikan penerapan kinerja mempertimbangkan kinerja tahun terkahir yang telah tertuang pada perencanaan jangka menengah, mendorong komitmen seluruh pimpinan OPD untuk memanfaatkan e-kinerja, memastikan kembali perumusan kinerja individu melalui SKP, membangun budaya dialog kinerja, dan melakukan inovasi.

**Tabel 2.163.**
**Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| No. | Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30 | 26,77 | 26,64 | 26,66 | 25,53 | 25,71 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 25 | 20,50 | 20,23 | 20,23 | 23,63 | 23,78 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15 | 11,99 | 12,08 | 12,27 | 12,84 | 12,93 |
| 4. | Evaluasi Internal | 10 | 8,26 | 7,02 | 7,21 | 19,13 | 19,5 |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 | 14,04 | 14,28 | 14,35 | n/a | n/a |
| | Hasil Nilai SAKIP | **100** | **81,56** | **80,25** | **80,72** | **81,13** | **81,92** |
| | Predikat | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |

*Sumber: Kemenpan RB, Maret 2023*

### 2.6.8 Manajemen ASN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem merit ini meliputi 8 aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan; serta Sistem Informasi.

Pada tahun 2021, nilai penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Tengah sebesar 335,5. Nilai tersebut terus meningkat dari nilai penerapan sistem merit pada tahun 2020 yaitu sebesar 289 yang berarti penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Provinsi Jawa Tengah dalam Kategori Sangat Baik.

**Tabel 2.164.**
**Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023**

| NO | Aspek | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Kebutuhan | 10 | 37,5 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Pengadaan | 30 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Pengembangan Karier | 72,5 | 55 | 75 | 76 | 75 |
| 4 | Promosi dan Mutasi | 30 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| 5 | Manajemen Kinerja | 50 | 67,5 | 70 | 70 | 75 |
| 6 | Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin | 30 | 35 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 7 | Perlindungan dan Pelayanan | 10 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| 8 | Sistem Informasi | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| **Skor Nilai** | | **280** | **289** | **335,5** | **337,5** | **340,5** |
| **Indeks Sistem Merit** | | **0,70** | **0,70** | **0,81** | **0,82** | **0,83** |

*Sumber: KASN, 2023*

Capaian Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 dari 0,82 naik menjadi 0,83 dengan skor nilai yang meningkat dari 337,5 menjadi 340,5.

Capaian Nilai Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah dari aspek Perlindungan dan Pelayanan tahun 2023 sebesar 14 mengalami penurunan nilai sebesar 2 poin dibandingkan 2022 sebesar 16, dikarenakan program perlindungan dan konsistensi pelaksanaan dinilai tidak berprogres dengan baik. Selain itu pada aspek pengembangan karir juga mengalami penurunan 1 poin dibanding tahun 2022 dari 76 menjadi 75 dikarenakan belum ada SKJ pada semua jabatan dan belum tuntasnya analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai serta penyusunan program/strategi pengembangan kompetensi berdasarakan analisis tersebut.

**Tabel 2.165.**

**PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Mengajukan Tugas Belajar Tahun 2019-2023**

| NO | JENJANG PENDIDIKAN | TAHUN | | | | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | S1/DIV/PROFESI | 13 | 0 | 0 | 10 | 2 | 25 |
| 2 | S2 | 15 | 22 | 16 | 28 | 20 | 101 |
| 3 | PPDS | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 29 |
| 4 | S3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 18 |
| 5 | SUB SPESIALIS | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| | JUMLAH | 38 | 30 | 22 | 58 | 37 | 185 |

*Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Salah satu upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi ASN yaitu melalui jalur pendidikan lanjutan dalam bentuk Tugas Belajar. Kurun waktu tahun 2019-2023 Provinsi Jawa Tengah sudah memfasilitasi tugas belajar sebanyak 185 orang. 25 orang untuk jenjang S1/DIV/Profesi, 101 orang untuk jenjang S2, 29 orang untuk PPDS, 18 orang untuk jenjang S3, dan 12 orang untuk Sub Spesialis. Pemberian fasilitasi tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

Selain melalui jalur pendidikan lanjutan, peningkatan kompetensi ASN juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2018-2022 kapasitas peneyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terus meningkat secara kuantitas. Hal ini menunjukkan kemampuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat mencakup kalangan ASN secara luas yang tidak terbatas pada ASN Provinsi Jawa Tengah tetapi juga seluruh ASN di Jawa Tengah. Selain pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh BPSDMD, pengembangan kompetensi ASN juga dilakukan melalui sertifikasi. Pada tahun 2022 dari jumlah 50.115 peserta terdapat 46.012 sertifikat terkirim atau sebesar 91,8% peserta tersertifikasi. Hal ini menunjukkan potensi kompetensi SDM ASN yang cukup mumpuni tetapi juga menjadi pekerjaan rumah untuk menuntaskan 9,2% potensi yang tidak tersertifikasi. Hal itu bisa jadi disebabkan karena peserta tidak lulus sertifikasi atau tidak melaporkan kepada BPSDMD selaku *leading sector* pendidikan dan pelatihan.

**Tabel 2.166.**
**Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2019-2023**

| Tahun | Target Peserta (orang) | Realisasi Peserta (orang) |
|---|---|---|
| 2019 | 10.110 | 9.820 |
| 2020 | 2.789 | 2.763 |
| 2021 | 6.935 | 6.956 |
| 2022 | 18.932 | 19.838 |
| 2023 | 31.268 | 40.910 |

*Sumber : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2023*

Meski telah menglami peningkatan kuantitas pendidikan dan pelatihan yang signifikan, pendidikan dan pelatihan ASN di Jawa Tengah belum terstruktur untuk perbaikan kompetensi dan kinerja ASN. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya Road Map pengembangan kompetensi berbasis analisi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN yang menjadi acuan untuk pengembangan kompetensi dan karir ASN. Kondisi tersebut menyebabkan *gap* kompetensi dan kinerja ASN belum terpetakan dengan baik, pengembangan kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan kinerja, serta penilaian kinerja ASN belum akurat dalam suatu sistem yang terintegrasi.

### 2.6.9 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah salah satunya direpresentasikan melelui capauan kepemilikan KTP-el. Pada Tahun 2019-2023, kepemilikan KTP-el di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan. Meskipun, penurunan presentase kepemilikikan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, namun sampai dengan tahun 2023 sudah 99,64% penduduk wajib KTP yang sudah terekam KTP-el. Berdasarkan data terget indikator kinerja dalam RPD, pada tahun 2025 ditetapkan target kepemilikan KTP-el Provinsi Jawa Tengah adalah 99%. Meskipun capaian pada tahun 2023 sudah melampaui target teesebut, namun banyak faktor yang dapat mempengaruhi capaian kepemilikan KTP-el melalui perekaman KTP-el, salah satunya adalah dinamika perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada peningkatan dan penurunan jumlah penduduk. Dengan adanya dinamika tersebut, maka Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pelaksanaan perekaman KTP-el perlu meningkatkan kinerja seiring dengan perubahan jumlah penduduk. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kinerja kepemilikan KTP-el diantaranya adalah mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan, sosialisasi perekaman KTP-el, fasilitasi blangko perekaman KTP-el, percepatan penerbitan KTP-el, dan upaya lainnya. Untuk mengetahui kinerja kepemilikan KTP, maka berikut merupakan grafik presentase penduduk yang terfasilitasi pengurusan dokumen KTP-el mengacu pada data jumlah penduduk dengan usia wajib KTP.

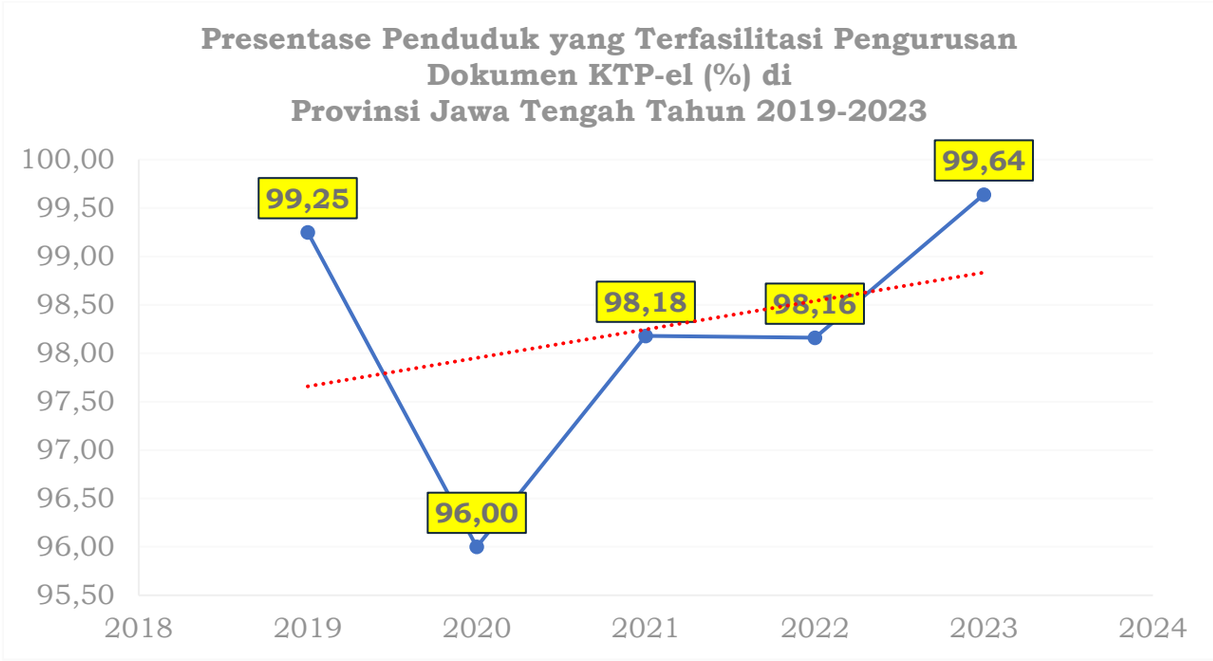


*Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2023*

**Gambar 2.119.**
**Presentase Penduduk yang Terfasilitasi Pengurusan Dokumen KTP-el (%) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

**a. Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran**

Aspek pendukung dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lainnya adalah terkait kepemilikan akta kelahiran. Pentingnya kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum yang sah anak sebagai warna negara. Selain itu, akta kelahiran menjadi instrumen kependudukan yang sah bagi seorang anak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas Pendidikan, ha katas Kesehatan, ha katas tempat tinggal yang layak, dn ha katas perlindungan sosial. Upaya peningkatan kepemilikan akta kelhairan di Jawa Tengah terus diupayakan di 35 Kabupaten/Kota. Sampai dengan Tahun 2023, presentase kepemilikan akta kelahiran adalah 98,71%. Angka tersebut tentunya belum optimal apabila dibandingkan dengan target kepemilikan akta kelahiran pada RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, yaitu 99% di Tahun 2025 dan 100% di Tahun 2026. Berikut merupakan grafik capaian kinerja pada kepemilikan akta kehahiran di Jawa Tengah Tahun 2019-2023

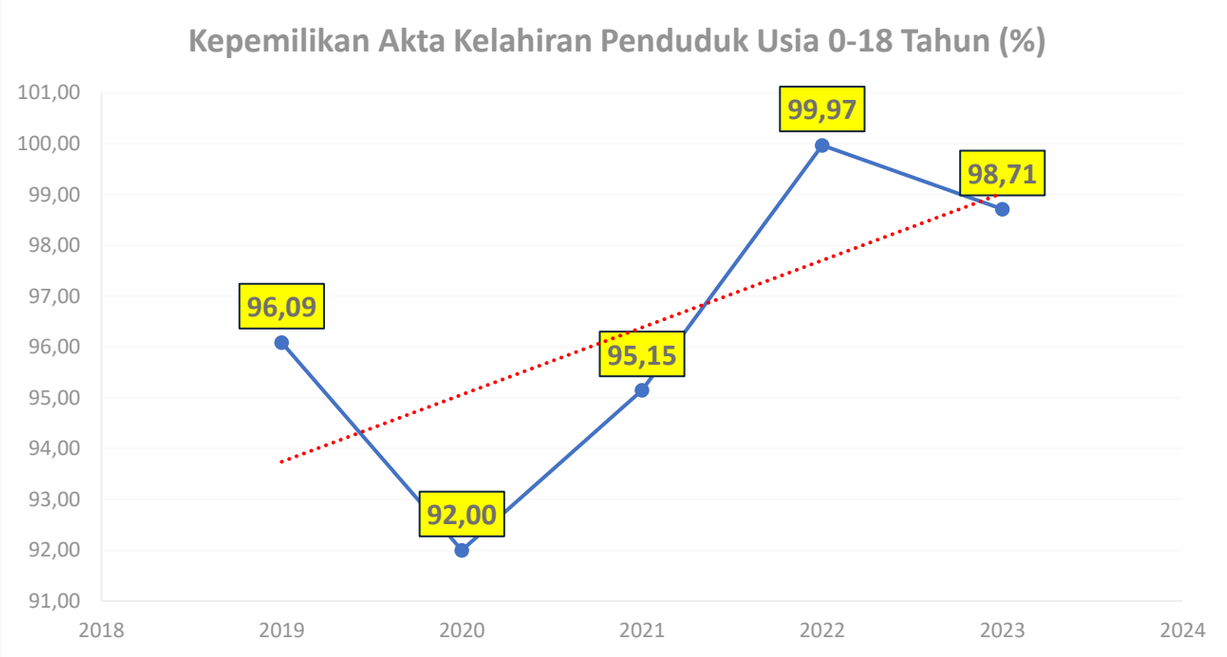


*Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2020*

**Gambar 2.120.**
**Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (%)**

Berdasarkan grafik di atas, terjadi penurunan capaian pada rentang Tahun 2022-2023 meski begitu tren dari Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan meski tidak signifikan. Tren peningkatan tersebut disebebkan oleh pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, *sms gateway*, dan layanan *online.* Penyebarluasan informasi mengenai pentingnya kepemilikan data kependudukan yang diantaranya meliputi KTP, akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) juga menjadi salah satu faktor dalam upaya peningkatan data kependudukan masyarakat di Jawa Tengah. Penyebarluasan informasi tersebut disampaikan dalam beberapa media baik *online* maupun *offline.*

**c. Kepemilikan Kartu Identitas Anak**

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik terhadap anak, pemenuhan hak kewarganegaraan anak, peningkatan pendataan anak, dan dasar intervensi perlindungan sosial terhadap anal. Pelaksanaan penerbitan kartu identitas anak diatur dalam Permendagri Nomro 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Sementara itu, kinerja pelayana terhadap penerbitan KIA di Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2023 adalah 64,06. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada spek pelayanan penerbitan KIA, Provinsi Jawa Tengah perlu upaya yang cukup keras agar seluruh anak (usia 0-17) terpenuhu atas hak kepemilikan KIA.

**d. Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)**

Seiring dengan pesatnya perkekbangan teknologi dan meluasnya penggunaan informasi digital, telah diterbitakan salah satu inovasi dalam rangka mengintegrasikan data kependudukan secara digital. IKD merupakan program dari

pemerintah Pusat dalam rangka memberikan layanan kependuudkan secara praktis dengan basis data terpusat yang dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah langkah startegis, diantaranya adalah: (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung kemanana data, privasi, dan inklusivitas, (2) Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri proaktif dalam mengembangkan dan memelihara infrastruktur yang mendukung implementasi IKD, (3) Edukasi dan kesadaran masyarakat merupakan komponen penting dalam menerapkan IKD yang inklusif, dan (4) Berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, Kemendagri terus pro aktif dalam menjaga keamanan data dan privasi pengguna. Dengan adanya IKD diharapkan akses terhadao dokumen kependudukan dalam berbagai aspek kepentingan dapat terlaksana secara efisien dengan sistem yang terintegrasi. Meski begitu masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam implementasi IKD, diantaranya adalah keterbatasan informasi masyarakat, keterbatasan akses internet dan perangkat digital, dan pengoperasian sistem. Pada Tahun 2023, capaian perekaman data kependudukan yang terintegrasi dalam IKD di provinsi Jawa Tengah baru mencapai 3,60%, tentunya perlu upaya keras dalam rangka meningkatkan penggunaan IKD untuk integrasi data kependudukan digital. Berikut merupakan capaian IKD di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

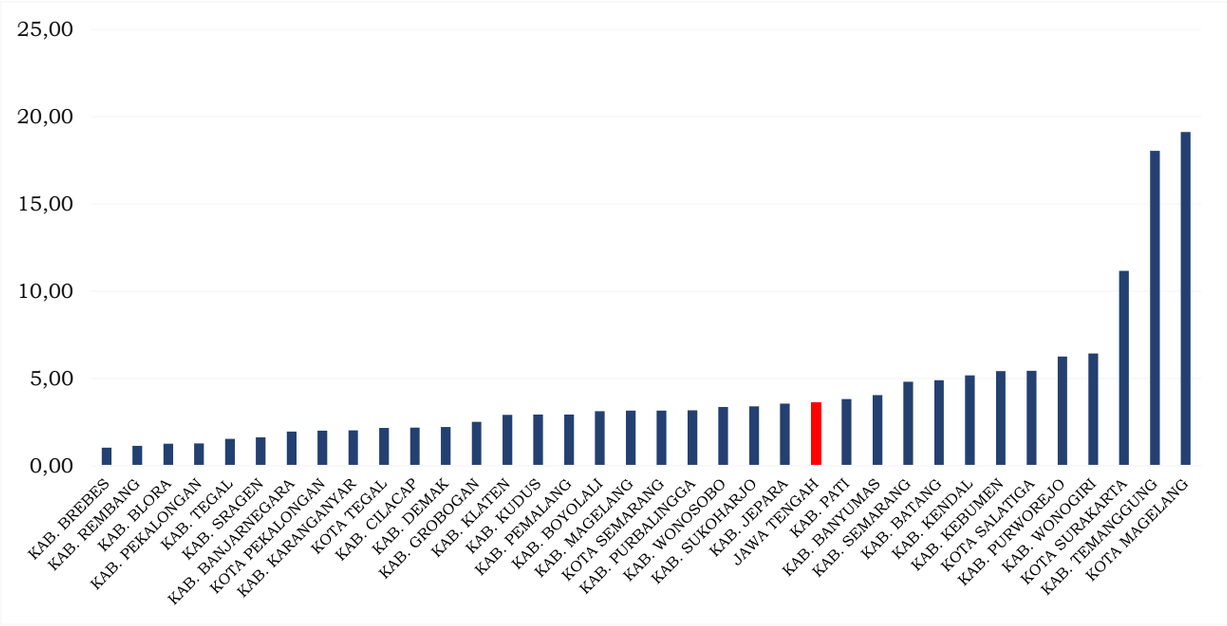


**Gambar 2.121.**
**Presentase Jumlah Data Kependudukan yang Terintegrasi dalam Sistem IKD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

**d. Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan**

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2023, sebanyak 37 antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### 2.6.10 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan PDTT dengan gambaran capaian Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

**Tabel 2.167.**
**Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2023**

| Status Desa | Jumlah (desa) s.d. Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sangat tertinggal | 6 | 2 | - | - | - |
| Tertinggal | 528 | 262 | 147 | 66 | 25 |
| Berkembang | 5.582 | 5.565 | 5.168 | 4.331 | 3.321 |
| Maju | 1.576 | 1.841 | 2.295 | 3.006 | 3.648 |
| Mandiri | 117 | 140 | 199 | 406 | 825 |
| **Total Desa Terverifikasi** | **7.809** | **7.809** | **7.809** | **7.809** | **7.810** |

*Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Dari data tersebut, pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal di Jawa Tengah. Sedangkan pada Tahun 2023, jumlah desa "mandiri" meningkat menjadi 825 atau 10,56% dari jumlah total desa. Sementara itu desa "maju" berjumlah 3.648 desa, desa "berkembang" adalah 3.321 desa, dan desa tertinggal masih ada 25 desa. Upaya peningkatan kemandirian desa perlu dilaksanakan oleh berbagai pihak yang saling bersinergi dari lintas sektor.

Selanjutnya salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Tengah adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes dan Pasar Desa dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Perkembangan lembaga ekonomi desa di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.168.**

**Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah**
**Tahun 2019-2023**

| No | Jenis Lembaga Ekonomi Desa | Jumlah (unit) s.d. Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | BUMDesa | 4.750 | 5.539 | 6.776 | 7.189 | 6.581 |
| 2 | Pasar desa | 1.349 | 1.671 | 1.671 | 1.671 | 1.674 |

*Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2022.*

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2019-2022 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa meningkat signifikan dari 4.750 unit di tahun 2018 menjadi 7.189 unit di tahun 2022. Namun justru mengalami penurunan yang signifikan pada Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan sumber data yang digunakan dalam rangka penilaian klasifikasi BUMDes di Jawa Tengah sesuai dengan arahan yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangnan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan BUMDes. Untuk melihat perkembangan BUMDes berdasarkan Klasifikasi pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.169.**

**Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah**
**Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2023**

| NO | KABUPATEN | JML DESA | KLASIFIKASI BUMDES 2024 KEMENTERIAN DESA PDTT RI | | | | TOTAL KLASIFIKASI BUMDES (31 JAN 2024) | PERSEN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERINTIS | PEMULA | BER-KEMBANG | MAJU | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kudus | 123 | 27 | 42 | 36 | 4 | 109 | 187.93% |
| 2 | Rembang | 287 | 205 | 48 | 9 | 1 | 263 | 106.05% |
| 3 | Demak | 243 | 165 | 31 | 16 | 2 | 214 | 104.90% |
| 4 | Sukoharjo | 150 | 81 | 34 | 19 | 1 | 135 | 103.05% |
| 5 | Purbalingga | 224 | 149 | 55 | 19 | 1 | 224 | 102.75% |
| 6 | Purworejo | 469 | 303 | 99 | 60 | 2 | 464 | 101.53% |
| 7 | Batang | 239 | 181 | 20 | 8 | 1 | 210 | 100.96% |
| 8 | Jepara | 184 | 137 | 34 | 12 | 1 | 184 | 100.00% |
| 9 | Klaten | 391 | 270 | 77 | 34 | 10 | 391 | 100.00% |
| 10 | Temanggung | 266 | 178 | 55 | 22 | 0 | 255 | 99.22% |
| 11 | Karanganyar | 162 | 70 | 28 | 53 | 6 | 157 | 98.13% |
| 12 | Blora | 271 | 223 | 26 | 8 | 0 | 257 | 97.72% |
| 13 | Brebes | 292 | 156 | 80 | 41 | 0 | 277 | 94.86% |
| 14 | Grobogan | 273 | 184 | 55 | 16 | 1 | 256 | 93.77% |
| 15 | Boyolali | 261 | 159 | 29 | 4 | 1 | 193 | 93.69% |
| 16 | Wonogiri | 251 | 142 | 63 | 30 | 0 | 235 | 93.63% |
| 17 | Magelang | 367 | 243 | 45 | 19 | 5 | 312 | 90.17% |
| 18 | Pekalongan | 272 | 141 | 41 | 13 | 0 | 195 | 87.44% |
| 19 | Kendal | 266 | 148 | 43 | 17 | 1 | 209 | 86.36% |
| 20 | Wonosobo | 236 | 125 | 27 | 11 | 3 | 166 | 85.13% |
| 21 | Banjarnegara | 266 | 141 | 49 | 21 | 3 | 214 | 83.27% |
| 22 | Tegal | 281 | 113 | 58 | 33 | 3 | 207 | 83.13% |
| 23 | Kebumen | 449 | 186 | 108 | 64 | 4 | 362 | 80.62% |

| NO | KABUPATEN | JML DESA | KLASIFIKASI BUMDES 2024 KEMENTERIAN DESA PDTT RI | | | | TOTAL KLASIFIKASI BUMDES (31 JAN 2024) | PERSEN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERINTIS | PEMULA | BER-KEMBANG | MAJU | | |
| 24 | Banyumas | 301 | 107 | 75 | 46 | 8 | 236 | 78.93% |
| 25 | Sragen | 196 | 72 | 41 | 32 | 4 | 149 | 76.80% |
| 26 | Semarang | 208 | 76 | 36 | 27 | 2 | 141 | 73.06% |
| 27 | Pemalang | 212 | 102 | 32 | 14 | 2 | 150 | 71.09% |
| 28 | Cilacap | 269 | 57 | 67 | 45 | 0 | 169 | 62.83% |
| 29 | Pati | 401 | 162 | 72 | 12 | 1 | 247 | 61.60% |
| | **JUMLAH** | **7810** | **4303** | **1470** | **741** | **67** | **6581** | **89.79%** |

*Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2023*

Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021, klasifikasi terbagi menjadi empat klasifikasi, yaitu “perintis”, “pemula”, “berkembang”, dan “maju”. Berdasarkan data di atas, pada Tahun 2023 terdapat 4.303 BUMDes perintis, 1470 BUMDes pemula, 741 BUMDes berkembang, dan 67 BUMDes maju. Angka tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi seluruh BUMDes di Jawa Tengah dikarenakan presentase klasifikasi belum 100%, yaitu masih 89,79% atau 6.581 dari 7.810 desa. Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Selain BUMDES, lembaga perekonomian desa yang juga berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa adalah Pasar Desa. Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 terdapat 1.674 unit pasar yang tersebar di 29 Kabupaten. Kondisi saat ini belum seluruh desa di Jawa Tengah memiliki pasar desa, berikut merupakan presentase keberadaan pasar desa di Jawa Tengah.

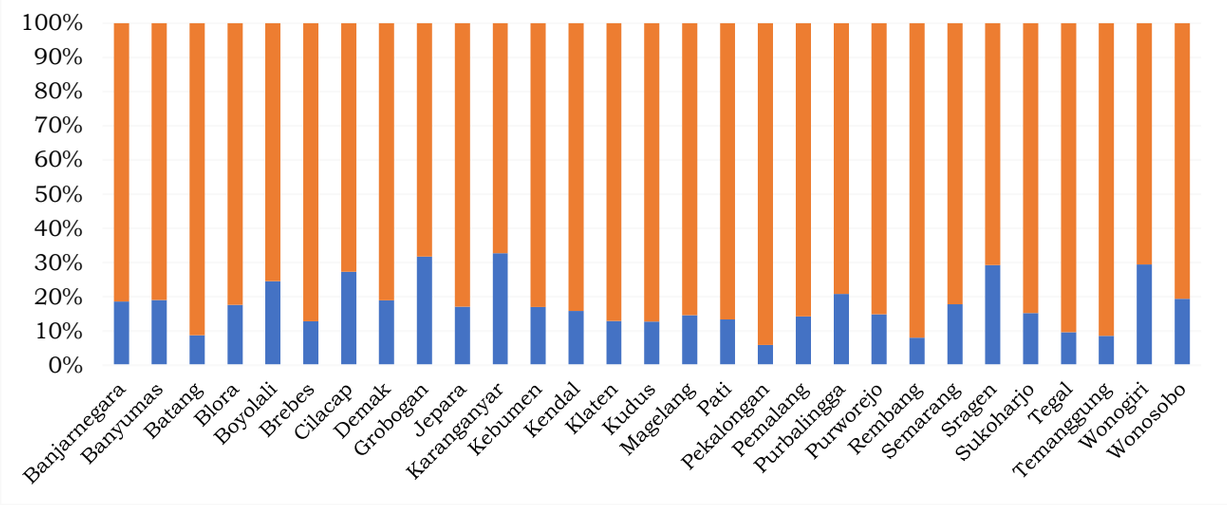


**Gambar 2.122.**
**Presentase Desa yang Memiliki Pasar Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan perdesaan, yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayananan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang sampai dengan tahun 2023 telah terbentuk 148 kawasan perdesaan. 148 kawasan perdesaan tersebut dikembangkan melalui potensi tematik masing-masing kawasan yang berbeda-beda. Tema pengembangannya diantaranya adalah pertanian, wisata, perkebunan, perikanan, peternakan, dan industri kecil.

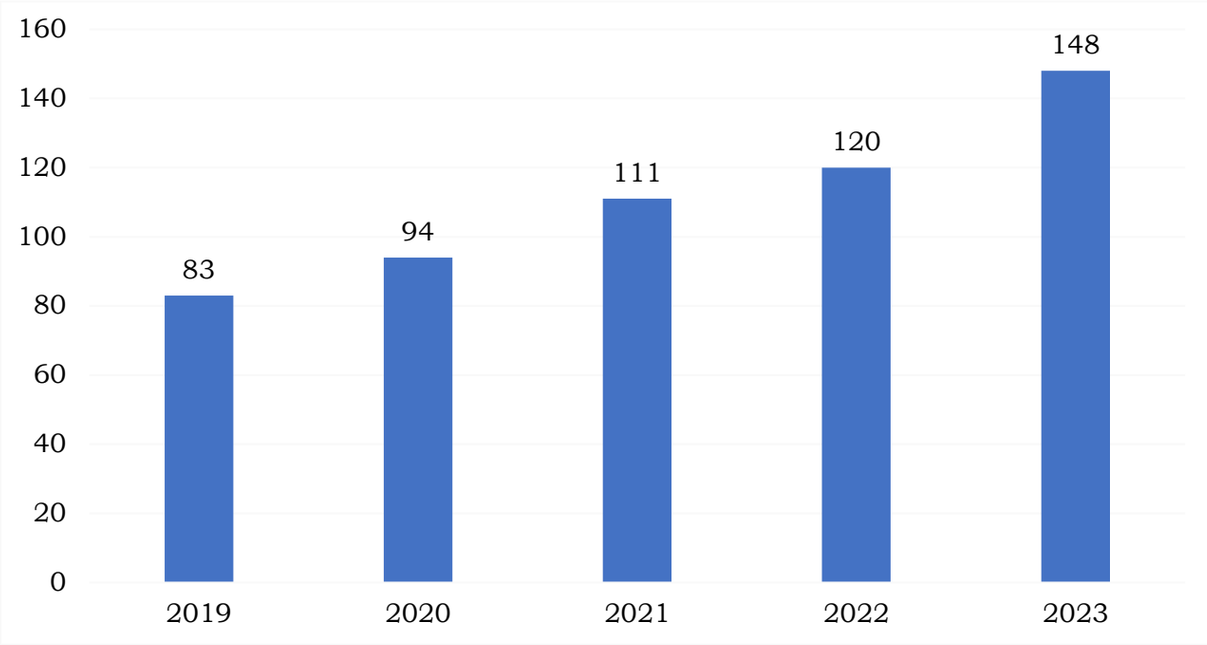


*Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, April 2022*

**Gambar 2.123.**
**Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

Sebanyak 148 kawasan perdesaan tersebut tersebar di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk kawasan perdesaan yang menjadi priotitas provinsi agar selanjutnya dapat menjadi fokus lokasi intervensi pengembangan desa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya prioritas tersebut, maka dapat meningkatkan kualitas kawasan perdesaan melalui intervensi yang diberikan dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan berdampak pada pengurangan kemiskinan di perdesaan. Berikut merupakan sebaran jumlah kawasan perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

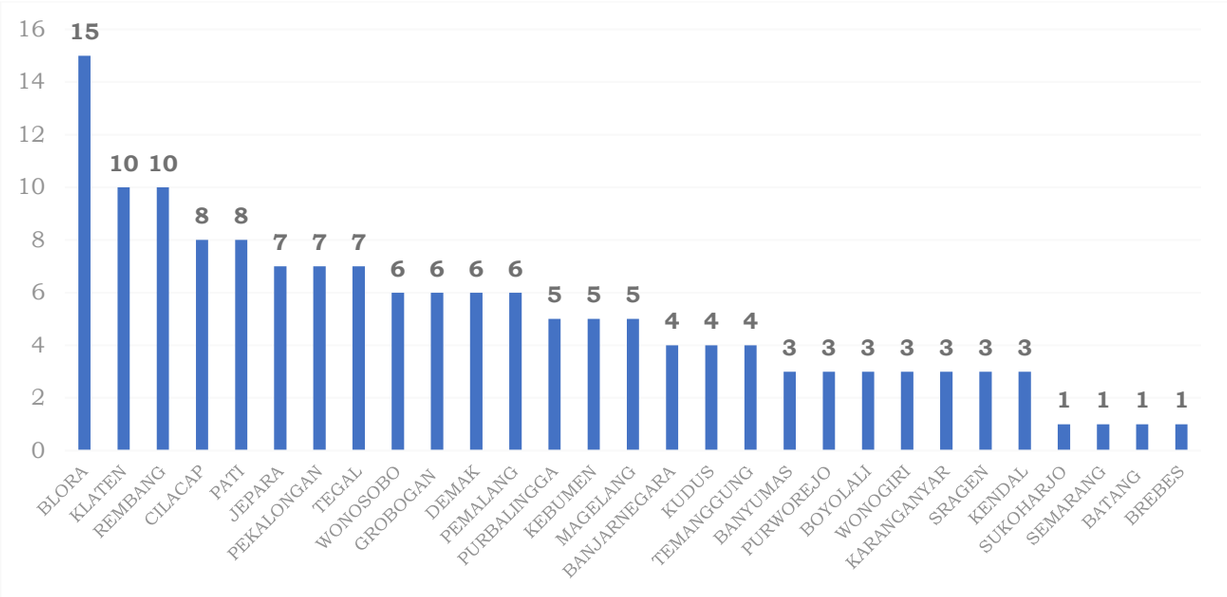


*Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah 2023*

**Gambar 2.124.**
**Sebaran Jumlah Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

Walaupun dari sisi kuantitas meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

### 2.6.11 Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 bidang program dan 7 indikator kinerja. Pada Tahun 2020 realisasi capaian kinerja perencanaan persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) pada lingkup bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan sosial budaya, infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada masing – masing bidang mencapai target 90 persen dan untuk Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan pada Tahun 2020 juga sebesar 90 persen. Sehingga indikator urusan Perencanaan sebanyak 7 indikator dengan keseluruhan indikator berstatus telah tercapai.

### 2.6.12 Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada tercapainya terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan terwujudnya peningkatan

kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*). Mendasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMD dan Renstra PD, kinerja bidang pengawasan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.170.**
**Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2019-2023**

| No. | Kinerja Pengawasan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Tingkat Maturitas SPIP | Nilai 2,85 | n/a | 3,115 | 3,267 | 3,464 |
| 2. | Tingkat Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

*Sumber: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang disebabkan perubahan metodologi penilaian. Sedangkan tahun 2020, tidak dilakukan *quality assurance* oleh BPKP serta terdapat perubahan pedoman aplikasi SPIP online, sehingga berakibat tidak ada penilaian maturitas SPIP tahun 2020 yang telah berjalan dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Sedangkan nilai maturitas SPIP pada tahun 2021 sebesar 3,115 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,043. Hal ini disebabkan karena belum menerapkan manajemen resiko sebagai indikator unit kerja. Namun pada Tahun 2023 nilai maturitas SPIP kembali mengalami peninkatan dari 2022 sebesar 3,267 menjadi 3,464. Namun apabila dilihat trend lima tahun, kinerja pengawasan cenderung meningkat yang artinya kebijakan pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik.

Sesuai dengan hasil reviu atas *quality assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan 2023 Kapabilitas APIP sudah mencapai Level 3 penuh. Ini artinya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu terwujudnya peran APIP yang efektif baik dari sisi *quality assurance* maupun *consulting partner*.

### 2.6.13 Pertanahan

Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), lingkup bidang pertanahan merupakan pendukung kegiatan pembangunan fisik dalam hal mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran yaitu ijin penetapan lokasi (penlok) yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan mendapat ganti untung yang layak dari pemerintah. Pada Tahun 2023 terdapat penetapan lokasi aktif sebanyak 7 ijin yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.171.**

**Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2023**

| No | Penetapan Lokasi | Jumlah Bidang | Luas Tanah | No. / Tanggal Terbit SK |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV Ungaran – Pedan Sirkit 2 *Section* 1 (Ungaran – Ampel) di Provinsi Jawa Tengah | 225 | ±96.001m2 | 590/13<br>30 Maret 2023<br>**(Sutet 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 *Section* 1 (Ungaran – Ampel) di Prov. Jateng)** |
| 2. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah | 130 | ±319.838 m2 | 590/19<br>7 Juni 2023<br>**(Sisa Tanah Bendungan Bener di Kab. Purworejo dan Kab. Wonosobo Prov. Jateng)** |
| 3. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Provinsi Jawa Tengah | 266 | ±12,12 Ha | 590/22<br>25Juli2023<br>**(Sisa Tanah Jalan Tol Trans Jawa Prov. Jateng)** |
| 4. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora | 345 | ± 97,24 Ha | 590/23<br>28 Juli 2023<br>**(Bendungan Cabean Di Kabupaten Blora)** |
| 5. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Slinga Tahap II di Kabupaten Purbalingga | 154 | ±7,02 Ha | 590/26<br>21Agustus 2023<br>**(Daerah Irigasi Slinga Tahap II Di Kabupaten Purbalingga)** |
| 6. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Provinsi Jawa Tengah | 393 | ±246.483 m2 | 590/42<br>18 September 2023<br>**(Sisa Tanah Jalan Tol Solo-Yogyakarta)** |
| 7. | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung Di Kabupaten Semarang | 103 | ±71.370 m2 | 590/43<br>18 September 2023<br>**(Sisa Tanah Bendungan Jragung di Kab. Semarang)** |
| | **Jumlah** | **1.616** | **411,58 Ha** | |

*Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023.*

**Tabel 2.172.**

**Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023**

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pemantauan Penetapan Lokasi | - | 400 | 526 | 2.217 | 898 | 224 |
| 2 | Penetapan Lokasi | 7.414 | 2.237 | 5928 | 2.811 | 12.433 | 1.616 |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*

**Tabel 2.173.**

**Capaian Kinerja urusan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah**

**Tahun 2020-2023**

| NO | URAIAN | REALISASI | | | | TOTAL (S.D AKHIR TAHUN 2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Penetapan Lokasi | 5.928 Bidang (493,4437 Ha) | 2.811 Bidang (± 858,8916 Ha) | + 12.433 Bidang (1.223,60 Ha) | 1.616 Bidang (411,68 Ha) | 25.025 Bidang (3.230,515 Ha) |
| 2. | Reforma Agraria | | | | | |
| | a). Sertifikasi LP2B | 200 Bidang | 350 Bidang | 150 Bidang | 650 Bidang | 1.450 Bidang |
| | b). Sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD) | 15 Bidang | 0 | 63 Bidang | 37 Bidang | 130 Bidang |
| | c). Inventarisasi Tanah HP dan HGU | 20 Bidang | 10 Bidang | 30 Bidang | 27 Bidang | 107 Bidang |
| | d). Pelatihan untuk Akses Reforma Agraria | 100 Orang | 260 Orang | 350 Orang | 350 Bidang | 1.167 Orang |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Dalam rangka mempertahankan lahan dikawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan insentif berupa sertipikasi gratis tanah yang yang masuk dalam kawasan LP2B. Melalui program ini diharapkan masyarakat berkomitmen menjaga fungsi lahan serta status lahan yang memiliki kepastian hukum (bersertipikat). Namun hal ini masih perlu dukungan program lainnya yang dapat memberikan insentif dan disinsentif untuk lebih meningkatkan keuntungan bagi masyarakat petani yang memiliki lahan dikawasan LP2B. Capaian stimulasi pembuatan sertipikat lahan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 2.174.**

**Capaian Sertifikasi Lahan LP2B Di Jawa Tengah Tahun 2022**

| No | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Jumlah Sertifikat | Jumlah Bidang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cilacap | Maos | Kalijaran | 70 | 70 |
| | | | Panisihan | 40 | 40 |
| | | | Glempang | 110 | 110 |
| | | | Karangrena | 30 | 30 |
| 2 | Blora | Kunduran | Cungkup | 100 | 100 |
| | | | Botoreco | 100 | 100 |
| 3 | Wonosobo | Mojotengah | Pungangan | 100 | 100 |
| | | Kertek | Sudungdewo | 100 | 100 |
| **Total** | | | | **650** | **650** |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2023*

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat provinsi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah menginventarisasi potensi penataan aset dan mengkoordinasi serta melakukan fasilitasi penataan akses bagi penerima program Reforma Agraria. Penataan akses yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan subyek program reforma agraria antara lain seperti pelatihan kepada kelompok tani dikawasan LP2B dan pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik. Capaian pelaksanaan program Reforma Agraria yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.175.**

**Capaian Reforma Agraria Di Jawa Tengah Tahun 2022**

| NO | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | DESA | KEBUTUHAN AKSES | JUMLAH PENERIMA MANFAAT | BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Tegal | Kecamatan Balapulang | Desa Balapulang Kulon | Sebagian besar masyarakat Desa Balapulang Kulon dengan pekerjaan pokok adalah petani, namun belum didukung dengan irigasi teknis dan merupakan sawah tadah hujan dengan irigasi non teknis, sehingga yang diperlukan adalah pembangunan jaringan irigasi, dan pembangunan embung desa (namun sulit terealisir karena jauh dari sumber mata air) atau pun dengan pembuatan sumur bor. Dalam rangka mengatasi atau memperbaiki jaringan irigasi sawah tersebut Pemerintah Desa Balapulang Kulon telah menginisiasi kerjasama dengan Desa sekitar dan Instansi terkait bail Kabupaten maupun Provinsi, namun sampai saat ini belum terealisir, hal ini menyebabkan 50% nya lahan sawah gagal terutama yang letaknya jauh dari sumber air. Selain itu menurut warga penggarap hama yang serig menyerang lahan | 50 KK | Pelatihan “Pengelolaan Lahan Pertanian Tadah Hujan” dan “Penanggulangan Hama Wereng” |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | DESA | KEBUTUHAN AKSES | JUMLAH PENERIMA MANFAAT | BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pertanian adalahan hama wereng. | | |
| 2 | Kabupaten Sragen | Kecamatan Sambirejo | Desa Jetis | Permasalahan yang dihadapi di Desa Jetis yaitu terkait masalah pupuk dikarenakan pembelian pupuk sekarang di batasi sehingga tiddak bias mencakupi luas lahan para petani yang mengaki batkan hasil pertanian yang kurang optimal, sebagian kecil warga masyarakat Desa Jetis berinisiatif untuk membuat pengolahan pupuk kandang organik namun harapannya sebagian besar masyarakat desa dapat menerapkan pembuatan pupuk organik untuk membantu memenuhi kebutuhan pupuk warga sendiri. Selain itu, Pemdes Jetis juga mendapatkan keluhan dari petani terkait penyakit tanaman yang menyerang tanaman mereka seperti busuk leher/jamur pada tanaman dan rata – rata pada tanaman padi | 50 KK | Pelatihan Penanganan Busuk Leher Pada Tanaman Padi dan Pembuatan Pupuk Organik |
| 3 | Kabupaten Grobogan | Kecamatan Tegowanu | Desa Tegowanu Wetan | Permasalahan yang sering di hadapi oleh petani di antaranya kurangnya pasokan pupuk bagi petani meskipun sudah ada beberapa kelompok tani yang sekarang sudah mengembangkan pupuk organik dari sampah daun – daun kering akan tetapi kelompok tani yang sudah berinisiatif membuat pupuk organik namun masih sebagian kecil. Pemerintah Desa Tegowanu Wetan mempunyai rencana kedepannya desa mereka akan di jadikan obyek wisata terkait tanaman | 50 KK | Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Guna Mendukung Pertanian Organik |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | DESA | KEBUTUHAN AKSES | JUMLAH PENERIMA MANFAAT | BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | organik. Pemerintah Desa Tegowanu Wetan juga mengharapkan selain pengolahan sampak organik menjadi pupuk di harpakan juga warga masyarakat bias mengolah sampah rumah tangga guna di jadikan obat, pupuk maupun hal hal lainnya, selain itu karena konsep kedepannya akan dijadikan wisata organik pemerintah desa tegowanu wetan masih terkendala terkait serifikasi organiknya | | |
| 4 | Kabupaten Pati | Kecamatan Gabus | Desa Wuwur | Hasil utama pertanian di Desa Wuwur yaitu padi. Terkait permasalahan yang terdapat di Desa Wuwur yaitu hama tikus serta hama burung. Sementara ini penanganan masih menggunakan setrum/listrik untuk hama tikus serta hama burung hanya secara manual para petani yaitu di usir oleh tangan saja. Dalam hal ini, masyarakat Desa Wuwur membutuhkan penanganan yang efektif terkait permasalahan hama tikus dan hama burung tersebut. | 50 KK | Kegiatan Akses Reform Pelatihan Pemanfatan Burung Hantu (Tyto Alba) sebagai Pengendali Hama Tikus dengan pokok bahsan tata cara pemeliharaan dan pemanfatan burung hantu untuk penanggulangan hama tikus serta penanganan hama tikus untuk meningkatkan perekonomian desa |
| 5 | Kabupaten Wonosobo | Kecamatan Kejajar | Desa Sigedang | Potensi yang berada di Desa Sigedang merupakan tanaman kentang, namun selama ini para warga menanam kentang dengan bibt yang di ekspor dari wilayah lain (Jawa Barat). Sejauh ini di Desa Sigedang yaitu belum terlalu banyak warga masyarakat maupun kelompok tani yang berminat untuk melakukan pembuatan bibit kentang sehingga produksi pembibitan kentang masih rendah, | 50 KK | Peningkatan Budidaya Bibit Kentang dan Pengembalian Fungsi Lahan Secara Organik |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | KECAMATAN | DESA | KEBUTUHAN AKSES | JUMLAH PENERIMA MANFAAT | BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | padahal telah dilakukan sertifikasi pembibitan kentang. Sehingga secara legalitas bibit kentang sudah dapat di komersilkan maupun di pakai sendiri. | | |
| 6 | Kabupaten Sragen | Kecamatan Sambungmacan | Desa Sambung Macan | Desa Sambungmacan memiliki danau kecil yang ditengahnya terdapat pulau kecil, yang merupakan potensi untuk menjadi wisata desa. Dan harapan kedepannya di tengah pulau kecil di danau tersebut akan dikembangkan untuk wisata pertanian organik di Desa Sambungmacan | 50 KK | Pelatihan Pertanian Organik untuk Mendukung Wisata Desa |
| 7 | Kabupaten Cilacap | Kecamatan Maos | Desa Mernek | Mernek telah memiliki 4 pilar MERNEK JENEK yaitu lingkungan lestari, pertanian, perikanan, & pertenakan melimpah, kemandirian ekonomi serta desa aman dan kondusif. Potensi Desa Mernek yang salah satunya yaitu Gapoktan yang aktif memiliki kegiatan rutin dan menjadi salah satu factor untuk mengembangkan wisata Desa organik di Desa Mernek | 50 KK | Pelatihan Pengelolaan Lahan Organik Menuju Wisata Desa |

*Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah , 2022*

## 2.7 Kondusivitas Daerah

Salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari apakah daerah tersebut kondusif, sehingga peran pemerintah untuk dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat menjadi mutlak. Mewujudkan kemanan perlu juga menciptakan kondisi yang teratur, tertib sesuai norma yang berlaku dan juga yang ada di masyarakat. Dengan perwujudan tersebut, maka potensi konflik akan secara simultan dapat ditekan dan stabilitas daerah terjaga.

Upaya yang telah dilakukan yaitu terkait dengan terselesaikannya seluruh pelanggaran Produk hukum daerah yang terinventarisasi melalui cara persuasif dan represif. Namun apabila terindikasi adanya sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana, maka dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Hingga saat ini tercatat 147 Perda yang masih aktif, dengan Perda yang memiliki sanksi hukum (sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana) sebanyak 65 Perda. Beberapa Perda

tidak dapat ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya.

Berbeda dengan penegakan hukum yang ada, secara intensitas atas patroli yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup Provinsi Jawa Tengah tiap tahun terus menurun, sehingga kurang dapat menciptakan kondisi yang tentram disebagian daerah. Rasio jumlah linmas terhadap jumlah penduduk Jawa Tengah semakin menurun karena rendahnya minat masyarakat menjadi anggota linmas, banyak anggota linmas yang meninggal dunia, dan adanya perpindahan anggota linmas keluar provinsi. Selain itu jumlah Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya masih cukup rendah. Hingga tahun 2023 masih sebanyak 15.382 Linmas yang sudah ditingkatkan kapasitasnya atau sebesar 6,76% dari jumlah linmas tahun 2023.

**Tabel 2.176.**
**Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| No | Tahun | Jumlah Linmas | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Linmas | Peningkatan Kapasitas Linmas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 230.782 | 34.490.835 | 66,91 | 5.420 |
| 2 | 2020 | 239.430 | 36.516.035 | 66,57 | 560 |
| 3 | 2021 | 240.958 | 36.516.035 | 65,98 | 840 |
| 4 | 2022 | 241.349 | 37.032.410 | 65,17 | 2.488 |
| 5 | 2023 | 227.415 | 37.540.962 | 60,58 | 6.830 |

*Sumber : Sat. Polisi Pamong Praja Prov. Jateng dan BPS Jateng, 2022*

Mendasarkan atas upaya yang telah dilakukan, masih ada beberapa hal yang perlu adanya peningkatan kinerja dan langkah kongkrit dalam cipta kondisi. Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2023, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir konflik masih memerlukan upaya yang cukup keras, karena di tahun 2018 dapat diminimalisir hingga hanya terjadi 16 kasus saja.

*Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah*

**Gambar 2.125.**
**Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah**

Potensi radikalisme di Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan nilai 6,8% atau masih diatas rata-rata nasional. Potensi radikalisme lebih tinggi pada perempuan, generasi muda, dan mereka yang aktif diinternet. Masih menjadi satu kesatuan riset yang dilakukan oleh BNPT, Indeks kebhinekaan masyarkat di Jawa Tengah adalah 89,6% dengan dimensi sikap masih tergolong rendah jika dibanding dengan dimensi pemahaman, hal ini dikarenakan kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses internet dan sosial media, termasuk pada kalangan rural. Melihat pentingnya akses internet dalam meningkatkan internalisasi kebhinekaan, perlu juga disiapkan tentang literasi digital yang ada di masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut karena pada mereka yang aktif diinternet memiliki potensi radikalisme yang lebih tinggi.

Hal lain yang dapat merepresentasikan kondisi umum dalam menjaga kondusivitas wilayah adalah dengan melihat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Berdasarkan rilis oleh Kementerian Agama, IKUB Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dimana skors tahun 2022 sebesar 74,28, sedangkan di tahun 2023 sebesar 76,02.

Selain itu pada penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dengan pengukuran terbaru memperoleh nilai 84,79. Hal yang perlu upaya keras terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja, kinerja lembaga legislatif, Aspek kesetaraan pada penilaian IDI Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sedang, dimana pada aspek tersebut memperlihatkan kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, serta anti monopoli sumber daya ekonomi dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian karena keterbatasan sumber daya.

Informan yang ada tidak dapat mencakup keseluruhan luas wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu adanya alternatif lain untuk memiliki informan di beberapa titik yang terindikasi rawan terjadinya pelanggaran yang menganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu alternatif yang ada adalah melakukan mobilisasi linmas yang ada di daerah. Persoalan yang perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan alternatif tersebut adalah menurunnya rasio linmas yang ada.

## 2.8 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2023

Kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Wajib sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPJMD di tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKPPD) sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.177.**
**Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023**

| Indikator | Jumlah Indika-tor | Sangat Tinggi: 91%≤100% | | Tinggi : 76 % ≤ 90% | | Sedang : 66 % ≤ 75 % | | Rendah : 51 % ≤ 65 % | | Sangat Rendah : ≤ 50 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| **I K U** | 13 | 10 | 76,92 | 3 | 23,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **I K P P D** | 194 | 151 | 77,84 | 15 | 7,73 | 6 | 3.09 | 9 | 4,64 | 13 | 6,70 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023 (hasil analisis)*

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, untuk Indikator Kinerja Utama dari 13 target indikator kinerja utama daerah terdapat 10 indikator Sangat Tinggi dan 3 indikator Tinggi.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 194 target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibagi dalam 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing terdapat 151 indikator Sangat Tinggi, 15 indikator Tinggi, 6 indikator Sedang.

## 2.9. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan meliputi permasalahan pembangunan daerah makro yang akan diintervensi melalui cross cutting strategy dengan mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing, serta permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Jawa Tengah dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum. Berdasarkan data yang ditampilkan dan hasil Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 maka permasalahan yang perlu untuk diselesaikan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### 2.9.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah ini sifatnya permasalahan makro, dan merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang juga perlu menjadi perhatian perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah untuk diselesaikan pada Tahun 2025. Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing untuk Tahun 2025 sebagai berikut.

1. **Masih cukup tingginya angka kemiskinan.**

   Cukup tingginya kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2023 sebesar 10,77 persen, turun 0,21 persen dari bulan September 2022. Namun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang sebesar 9,36 persen. Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, juga termasuk ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

Karakteristik penduduk miskin di Jawa Tengah sebagian besar antara lain merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan sampai dengan SD/SLTP, penduduk yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal, pengeluaran penduduk lebih banyak untuk makanan, dan penghasilan utamanya bersumber dari sektor pertanian.

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesbilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah akan memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, pengguaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

2. **Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka.**

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Di sisi lain tantangan bonus demografi dan perubahan industri di era digital atau revolusi industri 4.0 menuntut perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah. Hingga saat ini kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah dinilai belum memadai yang ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah nasional meskipun termasuk dalam kategori tinggi.

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan ukuran usia harapan hidup. Kualitas usia harapan hidup berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Selain derajat kesehatan, kebugaran menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia.

Peran perempuan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah juga memegang peranan penting terutama sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan manusia untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak sejak dini. Meskipun demikian pemberdayaan perempuan Jawa Tengah masih perlu perhatian yang ditunjukkan dari beberapa variabel indeks pemberdayaan gender Jawa Tengah yang masih rendah. Tantangan dalam pembangunan perempuan Jawa Tengah yaitu berupa kemauan atau motivasi, pandangan atau budaya patriarki di masyarakat terhadap perempuan.

Satu hal yang juga menjadi penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah adalah bagaimana membentuk karakter sumber daya manusia yang tercermin dari internalisasi nilai budaya, agama, dan sikap mental masyarakat Jawa Tengah. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa kontribusi budaya dalam pembangunan di Jawa Tengah menurun yang

ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan Jawa Tengah tahun 2021 yang semakin menurun dari tahun 2018.

Selain itu kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah juga dilihat dari aspek tenaga kerja dimana daya saing tenaga kerja Jawa Tengah belum optimal. Permasalahan ini dapat dilihat dari karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah yang didominasi oleh lulusan SD sebanyak 43,09 persen di tahun 2021. Sementara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang sebesar 5,95 persen justru didominasi oleh penduduk usia kerja lulusan SMK, dan terendah adalah lulusan SD. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian, karena persaingan tenaga kerja di era globalisasi yang semakin kompetitif dan menuntut kompetensi tenaga kerja yang semakin tinggi agar kesejahteraan penduduk Jawa Tengah semakin meningkat.

3. **Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.**

   Perekonomian Jawa Tengah masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 sampai dengan triwulan III meningkat positif jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, yaitu sebesar 5,36 persen (*c to c*) dimana tahun 2021 sebesar 2,63 persen (*c to c*). Perekonomian Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan sektor-sektor unggulan Jawa Tengah (pertanian, industri pengolahan, perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pariwisata), kemudahan investasi, pengendalian inflasi, serta infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa. Tantangan kedepan adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan antar wilayah yang ditunjukan dari Rasio Gini Jawa Tengah. Tahun 2022, Rasio Gini Jawa Tengah sebesar 0,366 menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,368.

4. **Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.**

   Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Namun disisi lain ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah semakin menurun. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di tahun 2021 sebesar 67,48 masuk dalam kategori sedang. Selain itu dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Jawa Tengah terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara, dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksikan. Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya bencana yang juga tidak dapat diprediksikan apalagi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Risiko Bencana Jawa Tengah yang sebesar 125,73 di tahun 2021.

5. **Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta**

**kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.**

Dalam rangka menjawab tantangan global, perlu dioptimalkan implementasi reformasi birokrasi antara lain percepatan pelayanan publik yang tepat sasaran, penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapasitas kelembagaan yang sesuai proses bisnis, kapasitas dan pola pikir sumber daya aparatur yang semakin adaptif dan terbuka, serta birokrasi yang kolaboratif, yang kesemuanya didukung dengan digitalisasi pemerintahan. Reformasi birokrasi ditunjukkan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dimana IRB Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Meskipun kinerjanya semakin baik dari tahun ke tahun, namun yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi tidak hanya tentang administrasi namun lebih mendorong agar dapat menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan daerah Jawa Tengah.

6. **Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah.**

Kondusivitas daerah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing sebuah daerah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dinilai cukup kondusif yang ditunjukkan dari indeks ketahanan daerah dengan kategorisasi cukup Tangguh, disertai hal-hal kongkrit yaitu semakin menurunnya angka kejadian konflik. Meskipun demikian, berbagai risiko ancaman kondusivitas daerah di Jawa Tengah perlu dilakukan antisipasi, Dimana saat ini terbukanya informasi tanpa batas (*borderless*) menjadi ancaman nyata dalam perwujudan kemanan dan ketertiban masyarakat.

### 2.9.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari hasil analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk Tahun 2024 sebagai berikut.

**A. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

1. Pendidikan

   Permasalahan pokok urusan pendidikan yang masih perlu dioptimalkan ke depan adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan merata di Jawa Tengah yang ditandai dengan permasalahan antara lain:

   a. Masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan;
   b. Akses pemerataan layanan pendidikan belum memadai;
   c. Masih kurangnya mutu pendidikan.

2. Kesehatan

   Permasalahan urusan kesehatan berkaitan dengan masih perlunya mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan permasalahan antara lain:

   a. Masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular serta Kesehatan jiwa;

b. Masih ditemukannya kasus kematian ibu;
c. Masih rendahnya aksesibilitasi pelayanan Kesehatan lansia;
d. Masih tingginya angka stunting dan gizi buruk;
e. Masih belum semua fasilitas pelayanan Kesehatan primer dan rujukan melayani 9 prioritas layanan unggulan;
f. Keterbatasan sarana dan prasarana.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih perlu ditangani kedepan terutama terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas dan pengembangan wilayah serta pelayanan dasar bagi masyarakat meliputi:

a. Masih adanya Jalan Provinsi di Jawa Tengah yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak ringan. Selain itu terdapat titik rawan longsor pada ruas-ruas Jalan Provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana;
b. Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi layak termasuk di dalamnya aman;
c. Belum semua bangunan gedung milik daerah dalam kondisi baik;
d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air yang meliputi permasalahan:
    1) pemanfaatan sumber daya air antara lain kurangnya ketersediaan air, kurangnya sarana prasarana tampungan air baku, dan banyak sarana prasarana irigasi yang rusak;
    2) pengendalian daya rusak air terutama ditunjukkan dengan adanya kerusakan sarpras sungai dan pengendali banjir;
e. Belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang, implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terutama terkait dengan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, yang meliputi:

a. Masih tingginya angka kebutuhan rumah layak huni;
b. Keterbatasan ketersediaan lahan yang aman dari bencana dan sesuai dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/ Kota untuk penanganan rumah terdampak bencana dan relokasi program pemerintah
c. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh;
d. Belum optimlanya penyelenggaran pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada urusan ini terkait dengan masih belum optimalnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum terutama terkait dengan permasalahan:

a. Peraturan daerah yang ada tidak dapat ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;

b. Minimnya pemberdayaan satlinmas yang ada di daerah;
c. Masih belum semua kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan kebencanaan;
d. Masih terbatasnya jumlah pemasangan sistem peringatan dini (*Early Warning System*/EWS) di wilayah rawan bencana;
e. Masih kurangnya edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana;
f. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana;
g. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam perhitungan kebutuhan pasca bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi.

6. Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial berkaitan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani, yang hingga saat ini penanganannya belum optimal, ditunjukkan dari masih cukup tingginya PPKS. Permasalahan ini didukung dengan permasalahan antara lain:

a. Rendahnya penanganan PPKS;
b. Masih adanya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang belum mendapatkan bantuan modal dan pendampingan;
c. Masih adanya panti yang kondisinya rusak.

**B. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

1. Tenaga Kerja

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Jawa Tengah berkaitan dengan masih cukup tingginya pengangguran, dan belum optimalnya daya saing tenaga kerja, dengan beberapa permasalahan lainnya meliputi:

a. Masih tingginya penduduk usia kerja yang tidak bekerja (*Not in Employment, Education or Training*);
b. Sarana dan Prasarana pada Balai Latihan Kerja yang jauh tertinggal dibandingkan dengan kebutuhan industri saat ini;
c. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;
d. Belum optimalnya kesejahteraan tenaga kerja;
e. Belum optimalnya hubungan industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkaitan dengan belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga yang ditunjukkan dari permasalahan:

a. Masih adanya ketimpangan gender dalam pembangunan;
b. Masih tingginya perkawinan usia anak;
c. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Pangan

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pada aspek ketersediaan, masih terdapat beberapa komoditas pangan utama yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Adapun pada aspek keterjangkauan, beberapa komoditas bahan pangan masih

mengalami fluktuasi harga. Selain itu masih terdapat kecamatan dan desa di Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori rentan pangan. Selanjutnya pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antar kelompok pangan. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan ketahanan pangan sebagai berikut:

a. Ketersediaan Pangan
   Secara umum komoditas pangan utama yaitu beras, jagung, dan kedelai telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun masih terdapat beberapa komoditas pangan yang perlu didorong.
b. Keterjangkauan
   Kondisi keterjangkauan pangan dicerminkan berdasarkan peta kerawanan pangan, secara umum masih terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan pangan.
c. Pemanfaatan
   Berdasarkan tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat, masih diperlukan dorongan pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.

4. Pertanahan

Permasalahan utama urusan pertanahan adalah belum optimalnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan, yang diindikasikan dari beberapa permasalahan antara lain:

a. Masih terdapat konflik atau sengketa permasalahan pertanahan di Jawa Tengah;
b. Masih terdapatnya keterbatasan data yuridis dan data fisik dalam penyelesaian sengketa tanah garapan;
c. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan asset dan akses reforma agraria;
d. Masih tingginya intensitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Tengah melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum .
e. Belum optimalnya penyelenggaraan Zonasi Nilai Tanah.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama urusan lingkungan hidup adalah degradasi kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh permasalahan antara lain:

a. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, disebabkan oleh:
   1) Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya;
   2) Ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan dan aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (brown economy);
   3) Beberapa tekanan lingkungan hidup antara lain perubahan tata guna lahan, peningkatan produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan (air, lahan, udara),

dan masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup; dan

4) Meningkatnya Degradasi lahan dan keanekaragaman hayati

b. Meningkatnya risiko bencana alam dan perubahan iklim
c. Meningkatnya emisi GRK akibat aktivitas ekonomi dan penduduk belum diimbangi dengan capaian penurunan emisi GRK
d. Meningkatnya tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya adalah:

a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang ditunjukkan dengan belum optimalnya fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi kabupaten/kota;
b. Rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah maupun instansi swasta;
c. Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara digital.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pokok urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah

a. Belum optimalnya upaya peningkatan kemandirian desa ditunjukkan dengan presentase desa mandiri yang masih rendah dan masih adanya desa tertinggal di Jawa Tengah
b. Pengembangan BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya belum optimal
c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
d. Kerjasama kawasan perdesaan skala provinsi masih rendah

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tantangan utama dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah bagaimana meningkatkan keluarga yang berkualitas karena hingga saat ini kondisinya belum optimal. Permasalahan yang mempengaruhi kualitas keluarga antara lain meliputi:

a. Belum optimalnya pengendalian penduduk;
b. Masih rendahnya kepesertaan KB.

9. Perhubungan

Permasalahan utama pada urusan perhubungan adalah masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Permasalahan tersebut dipengaruhi beberapa hal antara lain:

a. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, yang ditandai dengan : Belum optimalnya kinerja terminal (menurunnya jumlah kunjungan kendaraan), belum meratanya persebaran dan pemenuhan kebutuhan terminal serta dukungan terminal sebagai simpul perekonomian; Masih kurangnya pemenuhan halte Trans Jateng; Masih belum selesainya rencana reaktivasi rel kereta api oleh Pemerintah

Pusat dan Belum juga selesainya pelimpahan aset pelabuhan pengumpan regional dari Pusat.

b. Masih diperlukannya peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, yang ditandai dengan : Tingginya dan semakin meningkatnya jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas, jumlah korban meninggal dunia serta tingkat fatalitas; Masih rendahnya tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan jalan di ruas provinsi dan upaya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); Belum optimalnya penanganan perintasan dengan rel kereta api dan fasilitas penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota.
c. Masih diperlukannya peningkatan kualitas layanan angkutan umum yang ditandai dengan : Menurunya tingkat kepuasan masyarakat pengguna Trans Jateng seiring dengan peningkatan *load factor* Trans Jateng dan Belum optimalnya integrasi antara Trans Jateng dengan angkutan perkotaan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota serta integrasi antar moda yang secara bertahap harus dipenuhi.

10. Komunikasi dan Informatika

    Permasalahan pokok untuk urusan komunikasi dan informatika yang perlu perhatian penanganan ke depan adalah belum optimalnya digitalisasi tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah, yang meliputi permasalahan antara lain:
    a. Belum optimalnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
    b. Belum optimalnya implementasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

    Tantangan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah berkaitan dengan upaya meningkatnya perekonomian daerah. Permasalahan utamanya adalah belum optimalnya kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap PDRB, yang didukung dengan permasalahan antara lain:
    a. Belum optimalnya omset koperasi dan UMKM;
    b. Belum optimalnya tingkat kesehatan koperasi.
12. Penanaman Modal

    Permasalahan utama urusan penanaman modal adalah perlunya mendorong peningkatan realisasi dan persebaran penanaman modal di Jawa Tengah. Permasalahan yang masih berpengaruh terhadap permasalahan utama tersebut antara lain:
    a. Belum selarasnya koordinasi antar instansi Kementerian/ Lembaga/ Pemda dalam penyusunan dan implementasi regulasi, khususnya regulasi terkait perizinan dan penanaman modal;
    b. Belum sempurnanya pelayanan perijinan melalui aplikasi *One Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA);
    c. Ketersediaan lahan untuk usaha yang sesuai dengan tata ruang masih bermasalah di sebagian wilayah;
    d. Ketersediaan infrastruktur pendukung penanaman modal yang belum sepenuhnya mendukung investasi;

e. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja kompeten yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan DUDI;
f. Belum ada persamaan persepsi antara masyarakat, pemerintah dan investor terhadap penanaman modal yang berakibat masih kurangnya partisipasi terhadap kehadiran penanaman modal;
g. Belum optimalnya keberadaan kawasan industri karena harga sewa tanah yang relatif mahal dan kondisi kawasan belum sepenuhnya sesuai dengan kegiatan usaha calon investor.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama urusan kepemudaan dan olahraga berkaitan dengan belum optimalnya pembangunan pemuda dan kebugaran masyarakat, dengan permasalahan antara lain meliputi:

a. Daya saing pemuda masih rendah;
b. Prestasi olahraga belum memadai;
c. Tingkat partisipasi olahraga masih kurang.

14. Statistik

Permasalahan utama urusan statistik adalah belum optimalnya pengelolaan data baik data sektoral maupun geospasial dan perwujudan Satu Data Pemerintahan.

15. Persandian

Permasalahan yang masih dijumpai pada urusan persandian di Jawa Tengah adalah belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintahan.

16. Kebudayaan

Permasalahan utama yang masih dihadapi urusan kebudayaan di Jawa Tengah adalah: Belum optimalnya pemajuan kebudayaan yang dilakukan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, antara lain: Dari sisi kuantitas dan kualitas, SDM Kebudayaan masih kurang; Inventarisasi dan validitas data kebudayaan masih lemah; serta kurangnya sinergitas antar pemangku kebudayaan;

Belum tersedianya ekosistem yang adaptif, kokoh dan tangguh sebagai penopang ketahanan budaya sekaligus pemajuan kebudayaan.

17. Perpustakaan

Permasalahan utama urusan perpustakaan adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat yang ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan oleh asmyarakat.

18. Kearsipan

Permasalahan utama urusan kearsipan adalah masih belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kearsipan di Jawa Tengah yang ditandai dengan belum optimalnya digitalisasi dalam peningkatan pengolahan, dan pelayanan kearsipan.

**C. Urusan Pilihan**

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah adalah belum optimalnya produksi perikanan secara berkelanjutan,

kesejahteraan pelaku usaha perikanan, dan tingginya kerusakan ekosistem perikanan. Lebih lanjut permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya produksi perikanan
   Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan tangkap, budidaya, dan garam. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dikarenakan sarana prasarana penangkapan yang belum memadai dan kondisi pelabuhan perikanan yang perlu pengembangan baik dari sisi fasilitas maupun tata kelolanya, sedangkan dari sisi perikanan budidaya, selain dikarenakan kondisi sarana dan prasarana, juga disebabkan oleh penurunan kualitas dan kuantitas induk. Sementara pada produksi garam, juga masih terdapat luasan tambak garam yang belum menerapkan teknologi, sehingga proses produksi garam masih tergantung cuaca. Selain itu, pada ketiganya, baik perikanan tangkap, budidaya, dan garam, masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM untuk mendukung produksi perikanan.

b. Rendahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan
   Kesejahteraan pelaku usaha perikanan berkaitan erat dengan produk perikanan yang mudah busuk (*perishable*) sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai standar dari hulu ke hilir, sementara saat ini usaha yang ada masih didominasi usaha skala kecil dan belum sepenuhnya sesuai standar, ditambah jangkauan pemasaran yang masih terbatas. Hal yang lain adalah rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah sehingga membutuhkan dorongan lebih kuat untuk meningkatkan preferensi masyarakat terhadap ikan sebagai sumber protein hewani. Secara simultan dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan SDM para pelaku usaha perikanan, serta secara khusus pada perikanan tangkap, risiko terjadinya kecelakaan kerja masih cukup tinggi sehingga membutuhkan perlindungan.
c. Tingginya kerusakan ekosistem perikanan
   Kerusakan ekosistem perikanan khususnya di wilayah pesisir disebabkan abrasi dan akresi yang cukup tinggi yang imbasnya dapat menyebabkan terjadinya banjir rob. Di sisi lain, masih dibutuhkan edukasi terhadap semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan khususnya lingkungan perairan. Sedangkan pada perikanan budidaya diperlukan upaya untuk mempertahankan ikan jenis endemik lokal yang mulai menurun populasinya.

2. Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pariwisata di Jawa Tengah masih menjumpai permasalahan pokok terkait seberapa besar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berkontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh:

a. Kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara belum optimal;

b. Masih rendahnya pengeluaran wisatawan;
c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Kondisi pertanian ditopang oleh sektor pertanian dan peternakan. Kondisi ini dipengaruhi oleh produksi serta tingkat kesejahteraan petani dan peternak. Lebih lanjut kondisi dan permasalahan sektor pertanian dan peternakan sebagai berikut:

a. Produksi sektor pertanian
   Secara umum produksi pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan mencapai target. Namun produksi kedelai masih perlu didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
b. Kesejahteraan petani dan peternak
   Berdasarkan tingkat kesejahteraan pelaku usaha, masih diperlukan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

4. Kehutanan

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan kehutanan adalah masih rendahnya luasan tutupan lahan di Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh:

a. Adanya penurunan vegetasi tutupan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis menyebabkan penurunan daya dukung DAS, rusaknya habitat keanekaragaman hayati
b. Adanya degradasi ekosistem pesisir
c. Adanya peningkatan alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan;
d. Masih belum optimalnya pemanfaatan hutan (kayu, non kayu, dan jasa lingkungan)
e. Masih terjadinya ancaman terhadap perlindungan kawasan hutan (kebakaran hutan, pencurian, dan perambahan

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tantangan yang dihadapi penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral berkaitan dengan ketahanan energi, pengelolaan air tanah, pemanfaatan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut disertai dengan permasalahan antara lain:

a. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi
   Persentase pemanfaatan EBT tahun 2023 sebesar 15,98 persen dari total bauran energi di Jawa Tengah. Sampai dengan saat ini, penggunaan energi fosil mendominasi sebesar 84,02 persen. Efek buruk dari ketergantungan terhadap sumber energi fosil sebagai sumber energi utama adalah sifatnya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, sehingga berpotensi dapat menyebabkan krisis energi.
b. Masih rendahnya konsumsi listrik per kapita
   Permasalahan konsumsi listrik erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Jika masyarakat pendapatanya bertambah maka pola konsumsi listriknya berpotensi bertambah. Pada sisi *demand,* konsumsi listrik di Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah tetangga di Pulau Jawa. Konsumsi listrik di Jawa Tengah sebesar 757,54 kWh/kapita pada 2023, Jawa Timur sebesar 907

kWh/kapita, Jawa Barat sudah mencapai 1.012 kWh/kapita, dan DKI Jakarta telah mencapai 3.248 kWh/kapita. Dengan demikian, potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan, utamanya juga mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif. Tingkat *availability* listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rasio Ketersediaan Daya Listrik yang pada tahun 2023 sebesar 1,52. Hal tersebut menunjukan bahwa Jawa Tengah memiliki *reserve margin* (cadangan daya) sebesar 52 persen, yang telah terintegrtasi dalam sistem transmisi Jawa Madura Bali. *Reserve margin* yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri di wilayah Jawa Tengah.

c. Belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan

   Potensi pertambangan di Jawa Tengah memiliki sebaran komoditas yang beragam dan cukup melimpah. Masih terdapat komoditas unggulan yang belum mendapatkan perhatian dari masyarakat di daerah sekitar, sehingga pemanfaatan dari potensi tersebut belum optimal. Rangkaian aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan antara lain berkurangnya vegetasi hutan, tumbuhan, dan lapisan tanah. Sehingga perlu dorongan untuk melaksanakan pertambangan dengan baik *(Good Mining Practice)* agar dapat mewujudkan keseimbangan antara nilai ekonomis dan nilai lingkungan. Di Jawa Tengah sendiri terdapat 317 pemegang Ijin Usaha Pertambangan, dan dari jumlah tersebut yang telah melaksanakan pertambangan yang baik sebesar 96,53 persen pada tahun 2023.

d. Meningkatnya pemanfaatan air tanah

   Jumlah pengambilan air tanah di Jawa Tengah cenderung naik secara fluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Akan tetapi, pada tahun 2021 hingga tahun 2023 jumlah pengambilan air tanah menunjukan penurunan. Walaupun demikian, pengendalian dan pengawasan harus tetap dilaksanakan untuk semakin menurunkan laju pengambilan air tanah utamanya pada wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) kritis dan rusak. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi laju *land subsidence* di Provinsi Jawa Tengah.

6. Perdagangan

   Penyelenggaraan urusan perdagangan di Jawa Tengah sebagai salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah masih ditemukan permasalahan utama yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya ekspor dan impor Jawa Tengah, belum optimalnya nilai tambah produksi perdagangan, dan fluktuatifnya harga kelompok kebutuhan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

7. Perindustrian

   Permasalahan utama di urusan perindustrian yang juga menjadi salah satu sektor unggulan perekonomian Jawa Tengah yaitu masih belum optimalnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhinya antara lain belum optimalnya

produksi industri terutama industri kecil menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri terutama industri kecil dan menengah.

8. Transmigrasi

Permasalahan yang dijumpai pada urusan transmigrasi adalah terbatasnya kuota transmigrasi yang tidak sebanding dengan minat transmigrasi masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah terkait dengan transmigrasi.

**D. Unsur Pendukung Pemerintahan**

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan utama unsur sekretariat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyedia kebijakan pembangunan daerah adalah belum optimalnya kualitas kebijakan daerah yang dihasilkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melakukan proses analisis kebijakan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan unsur sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan untuk anggota DPRD. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya kapasitas aparatur dalam pelayanan, serta belum optimalnya sarana prasarana pelayanan bagi anggota DPRD.

**E. Unsur Penunjang Pemerintahan**

1. Perencanaan

Permasalahan utama dari unsur perencanaan adalah masih perlunya mendorong kinerja perencanaan pembangunan daerah agar lebih berkualitas. Hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan, serta keselarasan perencanaan daerah dengan perencanaan di tingkat pusat maupun perencanaan sektoral lainnya. Di sisi lain, dinamika kebijakan pemerintah pusat juga mempengaruhi kualitas perencanaan dari aspek keselarasan antar perencanaan di tingkat pusat maupun daerah.

2. Keuangan

Permasalahan utama unsur keuangan adalah belum optimalnya pendapatan daerah dan tata kelola keuangan daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa permasalahan antara lain;

a. Belum optimalnya penanganan piutang pajak kendaraan bermotor;
b. Belum optimalnya layanan pembayaran pajak dan retribusi secara digital;
c. Masih rendahnya kontribusi pemanfaatan aset daerah terhadap penerimaan PAD;
d. Masih terbatasnya skema pendanaan di luar APBD.

3. Kepegawaian

Permasalahan utama yang masih dijumpai dalam unsur kepegawaian adalah belum optimalnya meritokrasi dalam manajemen ASN dalam hal distribusi ASN sesuai kebutuhan dan kompetensi, serta layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama dalam unsur pendidikan dan pelatihan adalah belum optimalnya kompetensi ASN Jawa Tengah ditandai dengan belum terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN dan belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten.

5. Penelitian dan Pengembangan

   Permasalahan utama dari unsur penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya kompetensi ASN dalam hal riset dan pengembangan inovasi, serta masih terbatasnya sarana prasarana riset dan inovasi.

**F. Unsur Pengawasan Pemerintahan**

Permasalahan utama dari penyelenggaraan unsur pengawasan pemerintahan adalah masih belum optimalnya pengawasan, pembinaan dan pendampingan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**G. Unsur Pemerintahan Umum**

Permasalahan utama dari unsur pemerintahan umum di Jawa Tengah antara lain :

1. Potensi radikalisme yang mengarah pada ekstrimisme dan teorisme masih tergolong tinggi di beberapa daerah;
2. Internalisasi kebhinekaan yang belum optimal;
3. Terjadinya degradasi rasa toleran dimasyarakat;
4. Masih perlunya pendidikan politik bagi Masyarakat, terkhusus pada pemilih pemula;
5. Partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan masih perlu untuk didorong.

### 2.9.3 Isu Strategis Daerah

Isu Strategis di Jawa Tengah mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah) dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Perumusan isu strategis dilakukan dengan berbagai metodologi antara lain analisis isu dari berbagai kebijakan yang ada, *focus group discussion* bersama stakeholder pentahelix, dan analisis pembobotan. Berbagai isu yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis daerah baik isu secara global, nasional, maupun daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.178.**

**Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah Tahun 2025**

| Isu Global (SDG's) | Isu Nasional (RKP) | Permasalahan Daerah (RPJPD) | Isu Strategis Daerah (RPJPD) | Permasalahan Pembangunan Daerah (RPD) | Permasalahan Pembangunan Daerah (RKPD) | Arah Kebijakan RPD | Arah Kebijakan RPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kemiskinan | 1. **Isu ekonomi:** rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi | Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat | 1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan | Masih cukup tingginya angka kemiskinan | Masih cukup tingginya angka kemiskinan | Tema: Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter | Tema: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan |
| 2. Pangan dan Gizi | 2. **Isu sosial**: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial | Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat | 2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan | Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka | Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka | Prioritas: | Prioritas: |
| 3. Kesehatan | 3. **Isu tata kelola pemerintahan:** pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas | Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana | 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan | Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan | Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan | 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) |

| Isu Global (SDG's) | Isu Nasional (RKP) | Permasalahan Daerah (RPJPD) | Isu Strategis Daerah (RPJPD) | Permasalahan Pembangunan Daerah (RPD) | Permasalahan Pembangunan Daerah (RKPD) | Arah Kebijakan RPD | Arah Kebijakan RPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | infrastruktur | infrastruktur | berkualitas | |
| 4. Pendidikan | 4. **Isu** supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh | Ketahanan pangan | 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana | Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana | Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana | 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |
| 5. Gender | **5. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi** | Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal | 5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia | Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi | Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi | 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi |
| 6. Air bersih dan sanitasi | 6. **Ketimpangan** antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi | Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia | 6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat | Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan | Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan | 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, |

| Isu Global (SDG's) | Isu Nasional (RKP) | Permasalahan Daerah (RPJPD) | Isu Strategis Daerah (RPJPD) | Permasalahan Pembangunan Daerah (RPD) | Permasalahan Pembangunan Daerah (RKPD) | Arah Kebijakan RPD | Arah Kebijakan RPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | kondusivitas daerah | kondusivitas daerah | | kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas |
| 7. Energi | 7. **Isu kesinambungan pembangunan**: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas | Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah | 7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis | | | | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri |
| 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja | | Belum optimalnya kondusivitas wilayah | | | | | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan |
| 9. Infrastruktur | | Belum optimalnya tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi | | | | | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil |

| Isu Global (SDG's) | Isu Nasional (RKP) | Permasalahan Daerah (RPJPD) | Isu Strategis Daerah (RPJPD) | Permasalahan Pembangunan Daerah (RPD) | Permasalahan Pembangunan Daerah (RKPD) | Arah Kebijakan RPD | Arah Kebijakan RPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dan makmur |
| 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman | | Demokrasi substansial | | | | | |
| 11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan | | | | | | | |
| 12. Perubahan iklim | | | | | | | |
| 13. Sumberdaya kelautan | | | | | | | |
| 14. Ekosistem daratan | | | | | | | |
| 15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan | | | | | | | |
| 16. Kemitraan global | | | | | | | |

Berdasarkan telaah pada tabel diatas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 masih dihadapkan pada isu strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat terutama isu kemiskinan. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah tahun 2023 periode Maret tercatat sebesar 10,77 persen. Meskipun menurun 0,21 poin jika dibandingkan pada periode September 2022 sebesar 10,98 persen, namun tingkat kemiskinan Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,36 persen. Isu lain yang berkaitan dengan kondisi tersebut adalah pendapatan per kapita yang masih rendah. Pada tahun 2022 pendapatan per kapita Jawa Tengah sebesar 42,15 juta rupiah per kapita lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang sebesar 71,03 juta rupiah. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga masih menjadi isu daerah pada tahun 2025, ditunjukkan dari Rasio Gini yang di tahun 2023 periode bulan Maret sebesar 0,369 meningkat dibandingkan periode September 2022 yang sebesar 0,366. Isu tersebut berkaitan dengan isu strategis lainnya yang masih menjadi perhatian dalam pembangunan daerah Jawa Tengah di tahun 2025 sebagai berikut.

**1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

Perekonomian daerah Jawa Tengah secara kumulatif sampai dengan triwulan III tahun 2023 (c-to-c) tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,07 persen. Kondisi ini melambat dibandingkan pencapaian secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2022 (c-to-c) yang sebesar 5,34 persen. Meskipun demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ini merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta sebesar 5,00 persen, Jawa Timur 5,02 persen, dan Jawa Barat 4,94 persen. Hal tersebut mengindikasikan, aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat, dunia usaha, dan didukung peran pemerintah dalam memberikan stimulus lewat belanja pemerintah, berjalan sangat optimal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ekonomi Jawa Tengah tetap tumbuh positif didukung dengan sektor-sektor unggulan daerah Jawa Tengah antara lain sektor pertanian (dalam arti luas), industri pengolahan, perdagangan, UMKM, koperasi, dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif sejalan dengan tingkat inflasi Jawa Tengah pada Desember 2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y) lebih baik dari inflasi tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y).

Seiring membaiknya kondisi perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja juga semakin baik. Hal tersebut ditunjukkan dari penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah sepanjang Agustus 2022-Agustus 2023 sebanyak 1,60 juta orang, yang berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada periode Agustus 2023 sebesar 5,13 persen menurun 0,44 persen poin dibandingkan periode Agustus 2022 yang sebesar 5,57 persen. Kondisi perekonomian daerah yang membaik juga memberikan pengaruh pada tingkat kesejahteraan petani yang ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani/NTP Jawa Tengah yang di bulan Desember 2023 sebesar 117,11 tertinggi di Pulau Jawa naik 0,71 persen dibandingkan dengan bulan November 2023 yang sebesar 116,29.

Perekonomian Jawa Tengah yang membaik pada tahun 2023 ke depan akan menghadapi tantangan perekonomian daerah pada tahun 2025. Tantangan tersebut antara lain adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar lebih berdaya saing, dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya. Perekonomian daerah agar tumbuh optimal ke depan didukung dengan upaya meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah seperti sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Tantangan lain ke depan adalah inisiasi penerapan ekonomi hijau dalam rangka mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan, serta ekonomi yang semakin merata atau inklusif. Hal tersebut didukung dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, penguatan riset dan inovasi juga harus terus didorong agar dapat semakin mengoptimalkan produktivitas perekonomian daerah Jawa Tengah tahun 2025.

Agar ekonomi semakin tumbuh merata, maka kebutuhan akan infrastruktur yang semakin berkualitas dan merata menjadi prasyarat untuk dipenuhi. Penyediaan infrastruktur adalah sebagai akses distribusi barang dan jasa serta meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi. Penyediaan infrastruktur antara lain dengan penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi. Selain itu, pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan keserasian pembangunan antar

wilayah sesuai dengan arah kebijakan wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.

2. **Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif.**

Pembangunan SDM Jawa Tengah ke depan dihadapkan pada tantangan daya saing yang semakin meningkat, yang digambarkan dari kondisi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 73,39 dan masih berada di bawah IPM Nasional yang sebesar 74,39. Isu pembangunan SDM Jawa Tengah ke depan antara lain berkaitan dengan pendidikan berkualitas yang inklusif terutama pada penyediaan akses, mutu, relevansi, serta partisipasi pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah (RLS) Jawa Tengah yang pada tahun 2023 sebesar 8,01 tahun atau setara kelas 2 SMP, di bawah nasional yang sebesar 8,77 tahun. Sementara harapan lama sekolah (HLS) Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 12,85 tahun, juga lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 13,15 tahun. Kondisi RLS dan HLS lebih mengarah pada representasi partisipasi pendidikan dan sistem pendidikan di Jawa Tengah. Sedangkan untuk menggambarkan kondisi kualitas pendidikan di Jawa Tengah ditunjukkan dengan skor literasi dan numerasi. Mendasarkan pada rapor pendidikan yang dirilis oleh Kemendikbud, pada kurun waktu 2022 dan 2023 diperoleh rerata capaian terendah literasi berada pada jenjang pendidikan dasar (SD) sebesar 36,75, tertinggi pada jenjang pendidikan menengah umum (SMA) sebesar 47,15, sedangkan numerasi terendah pada jenjang pendidikan dasar (SD) sebesar 39,86, tertinggi pada jenjang pendidikan khusus (SMPLB) sebesar 57,10. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan numerasi lebih baik dibandingkan literasi.

Isu pembangunan SDM lainnya adalah kesehatan untuk semua yang dihadapkan pada ketersediaan layanan kesehatan berkualitas yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular yang diperkuat dengan pembudayaan gerakan masyarakat untuk hidup sehat dan bugar, mobilisasi pembiayaan sektor non-pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan, dan beban ganda permasalahan gizi (kelebihan dan kekurangan gizi). Hal ini ditunjukkan dengan usia harapan hidup (UHH) Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 74,69 tahun, lebih baik dari UHH Nasional yang sebesar 73,93 tahun. Transisi demografi dari struktur penduduk usia produktif menuju penduduk usia tua juga memerlukan penyediaan layanan dan perlindungan bagi penduduk lanjut usia untuk menjaga kualitas hidup penduduk lanjut usia.

Selain itu tantangan dalam pembangunan SDM adalah menciptakan SDM berkarakter dan berbudaya sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Jawa Tengah. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 59,43 membaik dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 55,24. Tantangan era disrupsi, globalisasi, dan transformasi digital yang terjadi saat ini menuntut SDM Jawa Tengah agar lebih adaptif tanpa meninggalkan jatidiri sebagai masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya berbasis kearifan lokal. Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan SDM berkarakter adalah pendekatan keluarga. Kinerja pembangunan keluarga di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang pada tahun 2022 sebesar 58,16

membaik dari tahun 2021 yang sebesar 56,10. Adapun Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari 92,48 pada tahun 2021 menjadi 92,83 pada tahun 2022, tetapi masih terjadi ketimpangan pada komponen HLS laki-laki, RLS perempuan, UHH laki-laki, serta pengeluaran per kapita perempuan. Selain itu, rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan penurunan dari 8,97 pada 2021 menjadi 7,47 pada tahun 2022, serta angka pernikahan usia anak masih cukup tinggi yaitu 11.366 perkawinan.

Pembangunan SDM juga berkaitan dengan isu perlindungan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat. Kondisi perlindungan sosial di Jawa Tengah masih dihadapkan belum akuratnya penerima manfaat dan belum menjangkau seluruh penduduk rentan. Hal ini dikarenakan data belum mutakhir dan belum adanya sistem yang terintegrasi. Tercatat dari total penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 3,8 juta jiwa hanya sekitar 1,8 juta penduduk atau 47,36 persen yang mendapat jaminan perlindungan sosial karena perlindungan sosial seharusnya dapat menjangkau seluruh penduduk rentan dan secara adaptif saat kondisi darurat dapat menjangkau penduduk terdampak.

**3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah tahun 2025. Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui terutama daya dukung air yang sudah terlampaui pada tahun 2022. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang di tahun 2022 sebesar 67,53 masuk dalam kategori sedang. Disisi lain, perubahan iklim juga sudah berdampak di Jawa Tengah sehingga diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim utamanya pada lokasi prioritas ketahanan iklim. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarinya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Potensi risiko bencana ditunjukkan dengan indeks risiko bencana Jawa Tengah yang pada tahun 2022 mencapai 115,38 atau dalam kategori sedang.

**4. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis**

Tata kelola pemerintahan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025. Tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis ditujukan untuk memampukan pemerintah dalam bekerja dengan kerangka yang lebih efektif dan akuntabel. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan dalam kinerja Indeks Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2022 mencapai angka 81,30 meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 78,79.

Tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administratif, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis

dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme *co-creator* dapat dioptimalkan (kolaboratif). Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya proses untuk mencapai pembangunan demokrasi substantif guna peningkatan kualitas kebijakan publik.

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah dirumuskan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional maupun regional serta telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Jawa Tengah.

### 3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada tahun 2023 ditengah pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun dan ketidakpastian pasar keuangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap tinggi ditopang oleh permintaaan domestik yang kuat, stabilitas perekonomian yang terjaga, neraca pembayaran yang baik, stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga dan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran.

Tantangan dan kondisi yang mewarnai ekonomi global tahun 2023 serta berpotensi masih akan berlangsung di Tahun 2024 yang menjadi perhatian antara lain:

1. Konflik geopolitik (perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, Israel-Iran, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-Tiongkok-Taiwan, perang dagang Amerika-Tiongkok) yang mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas;
2. Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama (*higher interest for longer*);
3. Pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan disertai melebarnya divergensi pertumbuhan antar negara (*slower and divergent growth*);
4. Penurunan inflasi yang melambat (*gradual disinflation*);
5. Arus modal keluar karena lonjakan yield USD mendorong *capital outflow* dari *Emerging Market;*
6. Nilai tukar Dollar AS tetap kuat (*strong dollar*);
7. Peningkatan kebijakan perdagangan dan industri yang proteksionis (*Geo-economic fragmentation*);
8. Perubahan iklim (cuaca ekstrem, bencana alam);
9. Digitalisasi dan *Aging Population*.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi baik dari *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* (WB), *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan pelemahan. IMF (rilis Januari 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 3,1 persen (2024) dan 3,2 persen (2025), negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,1 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), Negara Eropa tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), Jepang tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 0,8 persen (2025), Tiongkok tumbuh sebesar 4,6 persen (2024) dan 4,1 persen (2025), India tumbuh sebesar 6,5 persen (2024) dan 6,5 persen (2025) serta Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen (2024) dan 5,0 persen (2025).

*World Bank* (WB) (rilis Januari 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 2,4 persen (2024) dan 2,7 persen (2025), negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,6 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), negara Eropa tumbuh sebesar 0,7 persen (2024) dan 1,6 persen (2025), Jepang tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 0,8 persen (2025), Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen (2024) dan 4,3 persen (2025), India tumbuh sebesar 6,4 persen (2024) dan 6,5 persen (2025) serta Indonesia tumbuh sebesar 4,9 persen (2024) dan 6,5 persen (2025).

*Asian Development Bank* (ADB) (rilis Desember 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 untuk negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,6 persen (2024), negara Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen, Vietnam tumbuh sebesar 6,0 persen, Thailand tumbuh sebesar 3,3 persen, Malaysia tumbuh sebesar 4,6 persen, India tumbuh sebesar 6,7 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen.

*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (rilis November 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 2,7 persen (2024) dan 3,0 persen (2025), negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,5 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), negara Eropa tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 1,5 persen (2025), Jepang tumbuh sebesar 1,0 persen (2024) dan 1,2 persen (2025), Tiongkok tumbuh sebesar 4,7 persen (2024) dan 4,2 persen (2025), India tumbuh sebesar 6,1 persen (2024) dan 6,5 persen (2025) serta Indonesia tumbuh sebesar 5,2 persen (2024) dan 5,2 persen (2025).

Meskipun terdapat perlambatan ekonomi global, masih terdapat harapan terjadinya perbaikan ekonomi global di Tahun 2024. Tanda-tanda membaik (*upside risks*) dapat dilihat dari: (1) Tekanan inflasi telah mereda namun melambat penurunannya; (2) Perlambatan laju pengetatan moneter; (3) Potensi sumber pertumbuhan baru (ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru). Disisi lain terdapat beberapa risiko (*downside risk*) antara lain: (1) Peningkatan tensi geopolitik; (2) Geo Ekonomi Fragmentasi dan Proteksionisme; (3) Pelemahan ekonomi Tiongkok; (4) Terbatasnya *policy space* (fiskal); (5) Peningkatan risiko *debt distress*; (6) *Shock* akibat perubahan iklim.

### 3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh sebesar 5,05 persen (*c-to-c*), sedikit melambat dibanding Tahun 2022 sebesar 5,31 persen (*c-to-c*). Kemudian pada triwulan II Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,05 persen (y-o-y) lebih rendah dibandingkan periode yang sama Tahun 2023 sebesar 5,17 persen (y-o-y). Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif pada Triwulan II Tahun 2024, Konsumsi Rumah Tangga tumbuh positif sebesar 4,93% menunjukkan masih kuatnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 4,43%, Ekspor tumbuh sebesar 8,28% dan pertumbuhan tertinggi didorong oleh Konsumsi Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 9,98%. Sedangkan menurut lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB menunjukkan tren pertumbuhan positif yaitu industri pengolahan tumbuh 3,95%, pertanian tumbuh 3,25%, perdagangan 4,86%,

konstruksi 7,29%, dan pertambangan 3,17%. Sektor akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,17% karena adanya event berskala nasional dan internasional baik event pertemuan (MICE), musik dan olahraga.

Perekonomian Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh baik dan berdaya tahan, ditengah perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi seperti (1) Pertumbuhan ekonomi global yang melemah; (2) Penurunan inflasi global yang melambat; (3) Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama; (4) Perdagangan global tumbuh negatif yang utamanya disebabkan penurunan nilai perdagangan barang, harga komoditas unggulan perdagangan Indonesia (Kelapa Sawit, Batubara, Nikel, Gas Alam, Minyak Mentah) nilainya mengalami penurunan; (5) *Prompt Manufacturing Index* (PMI) atau Indeks Manufaktur Global masih berada di zona ekspansif.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,32 persen pada tahun 2023 dari 5,86 persen pada tahun 2022. Sementara, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun dibandingkan September 2022 sebesar 9,57 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,381 pada September 2022, menjadi 0,388 pada maret 2023. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga ditengah gejolak perekonomian dunia. Tema Pembangunan (Rencana Kerja Pemerintah (RKP)) Tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko, *game changers* transformasi ekonomi (Industrialisasi, Transisi Energi, Integrasi Infrastruktur Konektivitas, *Super Platform*, Pembangunan IKN, dan Anggaran IPTEKIN) dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, target indikator makro nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi (%) : 5,1 - 5,5;
2. Inflasi (%) ; 1,5 - 3,5;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) : 5,0 – 4,5;
4. Angka Kemiskinan (%) : 8,0 - 7,0;
5. Rasio Gini : 0,379 – 0,382;
6. Indeks Modal Manusia (nilai) : 0,56;
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) : 38,6.

### 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,31 persen (*c-to-c*). Ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh sedikit melambat pada Tahun 2023 sebesar 4,98 persen (*c-to-c*), pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terus berlanjut ditengah pelambatan ekonomi global. Kemudian pada triwulan II 2024 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,92% (y-on-y) melambat dibandingkan dengan triwulan I 2024 sebesar 4,97% (y-on-y) dan lebih rendah dari capaian nasional sebesar 5,05 persen (y-o-y) akan tapi sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Jawa yaitu sebesar 4,92 persen (y-o-y).

Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, jasa pendidikan serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Tahun 2023 semua sektor dalam lapangan usaha tumbuh positif dan yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi makan minum sebesar 11,24 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 10,67 persen hal tersebut seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah dan aktivitas Pemilu. Kemudian pada Triwulan II 2024 pertumbuhan tertinggi masih didukung sektor akomodasi makan minum sebesar 11,43 persen karena adanya event berskala regional, nasional dan internasional baik event pertemuan (MICE), musik dan olahraga.

Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran pertumbuhan terbesar didukung dari pengeluaran konsumsi LNRT (7,34 persen), pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,68 persen), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (4,36 persen). Sementara ekspor Jawa Tengah hanya sebesar 0,87 persen akibat perekonomian di negara mitra dagang yang mengalami perlambatan. Kemudian pada Triwulan II 2024 pertumbuhan tertinggi masih didukung pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 18,76 persen (yoy), diikuti impor barang dan jasa sebesar 12,39 persen (yoy) dan ekspor barang dan jasa sebesar 8,78 persen (yoy).

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 4,39% pada Februari 2024 setelah sebelumnya sebesar 5,13% pada Agustus 2023. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,77% pada Maret 2023, turun menjadi 10,47% pada Maret 2024. Sedangkan Laju inflasi dalam tren yang membaik, tercatat sebesar 1,86% (y-on-y) pada bulan Juli 2024 lebih baik dari capaian bulan Juni 2024 sebesar 2,22% (y-on-y). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,392 (September 2022) turun menjadi 0,369 (Maret 2023).

Salah satu upaya meningkatkan pemerataan ekonomi adalah melalui peningkatan inklusi keuangan, adanya ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat literasi keuangan Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,38 persen menjadi 51,69 persen pada tahun 2022 dan inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71 persen menjadi 85,97 persen pada tahun 2022.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,90–5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 1,5 – 3,5 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,66-9,00 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,81-4,42 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 49,30 – 49,73 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan

dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 – 0,367 di tahun 2025.

**Tabel 3.1.**
**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025**

| No | Indikator | Satuan | Proyeksi Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,90 – 5,60 |
| 2 | PDRB per kapita | Juta Rp | 49,30 – 49,73 |
| 3 | Inflasi | % | 1,5 – 3,5 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,81 – 4,42 |
| 5 | Angka Kemiskinan | % | 9,66-9,00 |
| 6 | Rasio Gini | Angka | 0,362 – 0,367 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs*

dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan adanya dukungan berbagai sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* melalui tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan realisasi penjualan industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2023 cenderung meningkat, akan tetapi penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) diproyeksikan akan menyebabkan penurunan pajak daerah sebesar 18,23 persen pada tahun 2025 yang disebabkan oleh penurunan PKB sebesar 33,08 persen dan BBNKB sebesar 22,50 persen. Pemberlakuan UU HKPD juga membawa konsekuensi adanya

penurunan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada UU HKPD, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kabupaten/kota.

**1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penerimaan Pajak Daerah masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2023, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 5,509 triliun rupiah meningkat sebesar 77,36 miliar rupiah (1,42 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar 5,432 triliun rupiah. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2023 sebesar 2,963 triliun rupiah meningkat 77,83 miliar rupiah (2,7 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2022 yang sebesar 2,886 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 2,667 triliun rupiah juga mengalami peningkatan 418,83 miliar rupiah (18,63 persen) dibanding penerimaan tahun 2022 sebesar 2,248 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada tahun 2023 sebesar 17,05 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 1,74 miliar rupiah (9,3 persen) dibanding penerimaan tahun 2022 sebesar 18,80 miliar rupiah. Sementara itu penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 80,50 miliar (2,78 persen) rupiah dari realisasi tahun 2022 sebesar 2,898 triliun rupiah menjadi 2,818 triliun rupiah.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2023 sebesar 139,32 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 24,17 miliar rupiah (20,99 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2022 sebesar 115,15 miliar rupiah.

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh positif pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 638,48 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 91,76 miliar rupiah atau 16,78 persen dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar 546,71 miliar rupiah.

**2. Pendapatan transfer**

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan dari 7,810 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 8,278 triliun rupiah pada tahun 2023.

**3. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2021 – 2022 terutama bersumber pada pendapatan hibah dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 78,29 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 14,13 miliar rupiah (15,30 persen) dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 92,43 miliar rupiah.

**Tabel 3.2.**
**Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **PENDAPATAN DAERAH** | **26.633.000.085.963** | **24.167.935.634.127** | **25.369.913.414.883** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **14.695.474.898.162** | **16.264.618.853.852** | **17.012.689.279.214** |
| Pajak Daerah | 11.718.378.320.505 | 13.484.851.151.740 | 13.976.642.716.351 |
| Retribusi Daerah | 91.634.269.205 | 115.158.014.199 | 139.364.048.636 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 508.263.876.971 | 546.717.104.899 | 638.482.406.528 |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 2.377.197.927.406 | 2.117.892.583.014 | 2.258.200.107.699 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | **11.871.796.336.054** | **7.810.882.578.787** | **8.278.928.086.424** |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 1.023.258.872.325 | 909.711.090.450 | 923.168.698.355 |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 12.586.758.109 | 18.989.623.430 | 9.942.824.636 |
| Dana Alokasi Umum | 3.432.978.859.000 | 3.435.718.090.405 | 3.558.428.755.500 |
| Dana Alokasi Khusus (fisik) | 401.885.567.398 | 371.734.785.185 | 425.034.850.842 |
| Dana Alokasi Khusus (non fisik) | 6.932.375.674.222 | 3.013.376.489.317 | 3.275.155.012.091 |
| Dana Insentif Daerah | 68.710.605.000 | 61.352.500.000 | 87.197.945.000 |
| Dana Penyesuaian | - | - | - |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | - | - | - |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **65.728.851.747** | **92.434.201.488** | **78.296.049.245** |
| Pendapatan Hibah | 64.882.003.502 | 92.161.740.403 | 77.972.123.308 |
| Lain lain pendapatan | 846.848.245 | 272.461.085 | 323.925.937 |

*Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2021-2022 audited, 2023 unaudited.*

Selama kurun waktu tahun 2021-2023, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2023 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 67,06 persen, pendapatan transfer sebesar 32,63 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,31 persen. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2023 mencapai 82,91 persen.

**Tabel 3.3.**
**Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah**
**Tahun 2021 – 2023 (%)**

| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | Rata–Rata |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **PENDAPATAN DAERAH** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **55,18%** | **67,30%** | **67,06%** | **63.18%** |
| Pajak Daerah | 44,00% | 55,80% | 55.09% | 51.63% |
| Retribusi Daerah | 0,34% | 0,48% | 0.55% | 0.46% |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1,91% | 2,26% | 2.52% | 2.23% |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 8,93% | 8,76% | 8.90% | 8.86% |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | **44,58%** | **32,32%** | **32,63%** | **36.51%** |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 2,89% | 3,76% | 3.64% | 3.43% |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 1,00% | 0,08% | 0.04% | 0.37% |
| Dana Alokasi Umum | 12,89% | 14,22% | 14.03% | 13.71% |
| Dana Alokasi Khusus (fisik) | 1,51% | 1,54% | 1.68% | 1.58% |
| Dana Alokasi Khusus (non fisik) | 26,03% | 12,47% | 12.91% | 17.14% |
| Dana Insentif Daerah | 0,26% | 0,25% | 0.34% | 0.28% |
| Dana Penyesuaian | 0,00% | 0,00% | - | 0.00% |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 0,00% | 0,00% | - | 0.00% |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **0,25%** | **0,38%** | **0,31%** | **0.31%** |
| Pendapatan Hibah | 0,24% | 0,38% | 0.31% | 0.31% |
| Lain-Lain Pendapatan | 0,00% | 0,00% | 0.00% | 0.00% |

*Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2021-2022 audited, 2023 unaudited.*

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Daerah ditargetkan naik sebesar 1,462 triliun rupiah menjadi sebesar 26,831 triliun rupiah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,216 triliun rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 8,591 triliun rupiah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu berupa Hibah sebesar 22,750 miliar rupiah. Pajak Daerah masih menjadi kontribusi terbesar penyumbang PAD ditargetkan sebesar 15,471 triliun rupiah atau naik sebesar 1,495 triliun rupiah dari realisasi tahun 2023. Retribusi Daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,539 triliun rupiah menjadi sebesar 1,678 triliun rupiah. Kenaikan yang cukup besar tersebut sebagai dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana penerimaan atas jasa layanan BLUD menjadi objek Retribusi Jasa Umum, sehingga terdapat penyesuaian pencatatan komponen pendapatan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan naik sebesar 49,071 miliar menjadi sebesar 687,553 miliar rupiah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi sebesar 379,971 miliar rupiah, karena BLUD berpindah ke Retribusi Daerah.

**Tabel 3.4.**
**Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| NO | URAIAN | TAHUN 2024 |
|---|---|---|
| **1.** | **PAD** | **18.216.864.276.000** |
| 1.1. | Pajak Daerah | 15.471.102.880.000 |
| 1.2. | Retribusi Daerah | 1.678.236.270.000 |
| 1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 687.553.929.000 |
| 1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 379.971.197.000 |
| **2.** | **Pendapatan Transfer** | **8.591.957.067.000** |
| 2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 8.591.957.067.000 |
| 2.2 | Transfer antar daerah | - |
| **3.** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **22.750.000.000** |
| | **Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)** | **26.831.571.343.000** |

*Sumber: Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024.*

Mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 4,80-5,60 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2021-2023, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan sebesar 23,549 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 15,519 triliun rupiah menurun sebesar 2,697 triliun atau 14,81 persen, pendapatan transfer sebesar 8,006 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 23,47 miliar rupiah. Penurunan proyeksi pendapatan asli daerah dikarenakan mekanisme opsen pajak sebagai konsekuensi pemberlakuan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD. Pendapatan transfer tahun 2025 diproyeksikan menurun 585,57 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 8,591 triliun rupiah. Hal tersebut dengan mempertimbangkan kebijakan bahwa pendapatan transfer akan dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

**Tabel 3.5.**
**Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

| NO | URAIAN | TAHUN 2025 |
|---|---|---|
| | **PENDAPATAN DAERAH** | |
| **1.** | **PAD** | **15.519.788.406.000** |
| 1.1. | Pajak Daerah | 12.650.725.636.000 |
| 1.2. | Retribusi Daerah | 1.805.361.743.000 |
| 1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 707.349.144.000 |
| 1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 356.351.883.000 |
| **2.** | **Pendapatan Transfer** | **8.006.377.888.000** |
| 2.1 | Transfer Pemerintah Pusat | 8.006.377.888.000 |
| 2.2 | Transfer antar daerah | - |
| **3.** | **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **23.476.500.000** |
| | **Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)** | **23.549.642.794.000** |

*Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2024.*

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2025, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi pelayanan pembayaran pajak;
b. Penambahan titik layanan dengan mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes, BPR BKK, dan Badan Usaha lainnya (Samsat Budiman);
c. Optimalisasi peran Kabupaten/Kota, desa, pemerintah pusat, dan dunia usaha lainnya (Samsat Corporate, Mitra Putra Bangsa);
d. Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak (GADIS PANTURA, CHIPS, Lets Activate New Sakpole and Signal (LANS), influencer Jawa Tengah) dan pelaksanaan door to door;
e. Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan;
f. Menyelenggarakan Auto Show serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025;
g. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI (optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan);
h. Pemutakhiran data objek retribusi, review tarif retribusi serta perbaikan tata kelola retribusi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi (SIPENARI);
i. Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
j. Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
k. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
l. Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerjasama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada tahun anggaran 2023 terserap secara optimal dengan realisasi serapan sebesar 93,85 persen. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 907 miliar rupiah berada pada Kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar 276 miliar rupiah dan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar 610 miliar rupiah. Kas pada RKUD digunakan sebagai manajemen kas untuk pembayaran Belanja Gaji bulan Januari Tahun 2024 dimana Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer belum sepenuhnya terealisasi. Sehubungan dengan SILPA sesuai rencana manajemen kas Januari, maka penyerapan APBD Tahun 2023 sudah cukup optimal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

Secara umum realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Pegawai meningkat seiring mulai dibayarkannya Gaji PPPK (Pendidikan dan Kesehatan) dan kenaikan tambahan penghasilan ASN, kegiatan dalam Belanja Barang dan Jasa dapat berjalan maksimal karena aktivitas masyarakat sudah mulai normal, meningkatnya Belanja Subsidi yang diarahkan pada penanganan inflasi melalui stabilisasi harga, dan penyegaran aset tetap sehingga Belanja Modal mengalami kenaikan. Sedangkan realisasi belanja yang kurang optimal dikarenakan sisa hasil pengadaan seperti sisa pengadaan tanah untuk TPST Regional Magelang, sisa lelang renovasi asrama atlet maupun beberapa pekerjaan yang tidak selesai dan/atau putus kontrak.

**Tabel 3.6.**
**Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2023**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **BELANJA DAERAH** | **25.843.800.193.834** | **23.950.350.260.348** | **25.792.831.703.331** |
| **BELANJA OPERASI** | **16.826.577.831.470** | **13.456.887.671.949** | **14.839.193.203.154** |
| Belanja Pegawai | 5.685.925.255.020 | 5.902.903.886.767 | 6.362.330.027.856 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.345.399.454.776 | 5.377.369.153.895 | 5.742.522.778.584 |
| Belanja Subsidi | 90.482.166 | 4.958.884.836 | 5.350.753.069 |
| Belanja Hibah | 5.728.982.384.318 | 2.092.761.564.803 | 2.610.303.175.760 |
| Belanja Bantuan Sosial | 66.180.255.190 | 78.894.181.648 | 118.686.467.885 |
| **BELANJA MODAL** | **1.447.620.411.245** | **1.713.641.630.081** | **1.835.940.083.456** |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | **72.303.305.000** | **16.545.479.100** | **740.000.000** |
| **BELANJA TRANSFER** | **7.497.298.646.119** | **8.763.165.716.275** | **9.116.958.416.721** |
| Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kab/Kota | 5.735.553.033.353 | 6.085.808.822.482 | 6.264.046.226.668 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota | 493.309.827.766 | 804.934.393.793 | 653.134.590.053 |
| Bantuan Keuangan kepada Desa | 1.268.435.785.000 | 1.872.422.500.000 | 2.199.777.600.000 |

*Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah, 2021-2022 audited, 2023 unaudited.*

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, anggaran Belanja Daerah naik sebesar 2,056 triliun rupiah menjadi sebesar 27,849 triliun rupiah, yang meliputi Belanja Operasi sebesar 16,165 triliun rupiah, Belanja Modal sebesar 1,703 triliun rupiah, Belanja Tidak Terduga sebesar 25,158 miliar rupiah, dan Belanja Transfer yaitu berupa Belanja Bagi Hasil sebesar 6,907 triliun rupiah dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 3,048 triliun rupiah. Belanja Operasi merupakan komponen belanja terbesar dengan rincian Belanja Pegawai sebesar 16,165 triliun rupiah, Belanja Barang dan Jasa sebesar 5,765 trliun rupiah, Belanja Subsidi sebesar 1 miliar rupiah, Belanja Hibah sebesar 36,783 miliar rupiah dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 1,703 triliun rupiah.

**Tabel 3.7.**
**Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| URAIAN | | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| **BELANJA DAERAH** | | |
| **BELANJA OPERASI** | | **16.165.486.886.000** |
| 1 | Belanja Pegawai | 7.573.527.979.000 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.765.363.499.000 |
| 3 | Belanja Subsidi | 1.000.000.000 |
| 4 | Belanja Hibah | 2.788.812.408.000 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 36.783.000.000 |
| **BELANJA MODAL** | | **1.703.224.650.000** |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | | **25.158.773.000** |
| **BELANJA TRANSFER** | | **9.955.407.650.000** |
| 1 | Belanja Bagi Hasil | 6.907.335.038.000 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan | 3.048.072.612.000 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **27.849.277.959.000** |

*Sumber: Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024.*

Komposisi belanja daerah tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2025 diproyeksikan menurun 14,14 persen dari tahun 2024 menjadi sebesar 23,911 triliun rupiah yang diarahkan pada tema **"Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter"** dengan fokus utama pada:

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu:
   a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
   b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
   c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
   d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
2. Dukungan prioritas nasional tahun 2025 meliputi:
   a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
   b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
   c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
   d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender,

serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;

e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyeludupan;
h. Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

3. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi Pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan; serta *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
4. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's);
5. Dukungan 10 (sepuluh) program prioritas pembangunan daerah;
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
8. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2025 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2025 diproyeksikan dengan asumsi untuk penambahan belanja pegawai PPPK dan CPNS, termasuk penyesuaian tambahan penghasilan pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk

mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol kesehatan; Belanja barang dan jasa di antaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan Pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;

c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk menjaga kondusifitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Peruntukan belanja modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
      4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2025 terdiri atas:
   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada

Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

**Tabel 3.8.**
**Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

| URAIAN | | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| **BELANJA DAERAH** | | |
| **BELANJA OPERASI** | | **15.389.713.402.000** |
| 1 | Belanja Pegawai | 7.582.145.530.000 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.337.560.651.000 |
| 3 | Belanja Subsidi | 9.274.000.000 |
| 4 | Belanja Hibah | 2.428.133.221.000 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 32.600.000.000 |
| **BELANJA MODAL** | | **1.253.873.852.000** |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | | **25.000.000.000** |
| **BELANJA TRANSFER** | | **7.243.355.540.000** |
| 1 | Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota | 4.196.561.232.000 |
| 2 | Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota & Pem Desa | 3.046.794.308.000 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **23.911.942.794.000** |

*Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2021-2023 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

**Tabel 3.9.**
**Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 – 2023**

| Uraian | Jumlah (Rp) | | |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **PEMBIAYAAN** | **646.492.992.625** | **1.018.773.865.813** | **1.330.599.602.535** |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **861.492.992.625** | **1.909.773.865.813** | **1.330.599.602.535** |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 861.376.784.856 | 1.435.692.146.361 | 1.236.469.002.535 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 116.207.769 | 474.081.719.452 | 94.130.600.000 |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **215.000.000.000** | **891.000.000.000** | - |
| Pembentukan dana cadangan | 200.000.000.000 | 400.000.000.000 | |
| Penyertaan modal | 15.000.000.000 | 491.000.000.000 | |

*Sumber: LRA APBD Provinsi Jawa Tengah 2020-2022 audited, 2023 unaudited.*

Pada APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan cukup besar karena adanya pencairan dana cadangan guna mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak.

**Tabel 3.10.**
**Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| **1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **1.087.706.616.000** |
| | SiLPA | 581.837.216.000 |
| | Pencairan Dana Cadangan | 505.869.400.000 |
| **2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **70.000.000.000** |
| | Penyertaan Modal | 70.000.000.000 |
| **3** | **Pembiayaan Netto Daerah** | **1.017.706.616.000** |

*Sumber: Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024.*

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 3.11.**
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| | **PEMBIAYAAN** | |
| **1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **432.300.000.000** |
| | SiLPA | 432.300.000.000 |
| | Pencairan Dana Cadangan | - |
| **2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **70.000.000.000** |
| | Pembentukan Dana Cadangan | - |
| | Penyertaan Modal | 70.000.000.000 |
| **3** | **Pembiayaan Netto Daerah** | **362.300.000.000** |

*Sumber: Bapenda, BPKAD, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Dari uraian tersebut diatas maka kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.12.**
**Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

| URAIAN | | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| **PENDAPATAN DAERAH** | | |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | **15.519.788.406.000** |
| 1 | Pajak Daerah | 12.650.725.636.000 |
| 2 | Retribusi Daerah | 1.805.361.743.000 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 707.349.144.000 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 356.351.883.000 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | | **8.006.377.888.000** |
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 8.006.377.888.000 |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | | **23.476.500.000** |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | **23.549.642.794.000** |
| **BELANJA DAERAH** | | |
| **BELANJA OPERASI** | | **15.389.713.402.000** |
| 1 | Belanja Pegawai | 7.582.145.530.000 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.337.560.651.000 |
| 3 | Belanja Subsidi | 9.274.000.000 |
| 4 | Belanja Hibah | 2.428.133.221.000 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 32.600.000.000 |
| **BELANJA MODAL** | | **1.253.873.852.000** |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | | **25.000.000.000** |
| **BELANJA TRANSFER** | | **7.243.355.540.000** |
| 1 | Belanja Bagi Hasil | 4.196.561.232.000 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan | 3.046.794.308.000 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **23.911.942.794.000** |
| **SURPLUS/DEFISIT** | | **(362.300.000.000)** |
| **PEMBIAYAAN** | | |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | **432.300.000.000** |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 432.300.000.000 |
| 2 | Pencairan dana cadangan | 0 |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | **70.000.000.000** |
| 1 | Penyertaan modal | 70.000.000.000 |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | | **362.300.000.000** |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)** | | **0** |

*Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2024*

### 3.2.4. Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

**Tabel 3.13.**
**Realisasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

| NO | OPD | PAGU OPD (Rp) | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|
| | | | KEUANGAN (Rp) | FISIK (%) |
| **DEKONSENTRASI** | | **96.409.230.000** | **92.640.454.702** | **95,9** |
| **ATRUBUTIF** | | **1.978.997.000** | **1.918.357.277** | **90,66** |
| 1 | BAPPEDA | 297.810.000 | 280.879.700 | 85,63 |
| 2 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 235.239.000 | 235.104.320 | 99,94 |
| 3 | INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH | 287.255.000 | 286.090.646 | 97,58 |
| 4 | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH | 1.158.693.000 | 1.116.282.611 | 88,62 |
| **DELEGATIF** | | **94.430.233.000** | **90.722.097.425** | **96,02** |
| 1 | BAPPEDA | 1.170.444.000 | 1.169.068.960 | 99,88 |
| 2 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 551.296.000 | 548.924.820 | 99,57 |
| 3 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 4.066.101.000 | 3.826.913.077 | 94,12 |
| 4 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 4.416.000.000 | 4.297.216.850 | 97,31 |
| 5 | DINAS KESEHATAN | 17.487.195.000 | 14.940.747.069 | 85,44 |
| 6 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | 1.407.136.000 | 1.375.341.352 | 97,74 |
| 7 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 309.546.000 | 308.477.300 | 99,65 |
| 8 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 2.107.246.000 | 1.935.945.298 | 91,87 |
| 9 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 57.202.511.000 | 56.750.532.375 | 99,11 |
| 10 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 5.712.758.000 | 5.568.930.324 | 97,48 |
| 11 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 8.234.297.000 | 8.156.518.339 | 99,06 |
| **TUGAS PEMBANTUAN** | | **307.224.699.000** | **300.217.962.202** | **90,98** |
| 1 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 473.200.000 | 472.977.225 | 99,95 |
| 2 | DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1.630.000.000 | 1.547.027.146 | 94,91 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG | 82.744.782.000 | 81.546.797.033 | 98,55 |
| 4 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | 94.017.267.000 | 92.292.536.913 | 93,68 |
| 5 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | 108.002.250.000 | 104.055.134.949 | 82,44 |
| 6 | DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | 19.959.583.000 | 19.937.469.651 | 99,68 |
| 7 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 397.617.000 | 366.019.285 | 92,05 |

*Sumber: Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**Tabel 3.14.**
**Alokasi Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

| NO | NAMA SATKER | DIPA (Rp) | BLOKIR (Rp) |
|---|---|---|---|
| **DEKONSENTRASI** | | **66.931.378.000** | **14.431.527.000** |
| 1 | BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH | 1.677.221.000 | 194.778.000 |
| 2 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH | 435.287.000 | 0 |
| 3 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH | 3.202.633.000 | 3.202.633.000 |
| 4 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH | 4.450.600.000 | 4.450.600.000 |
| 5 | DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TENGAH | 13.331.297.000 | 1.364.740.000 |
| 6 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH | 47.355.517.000 | 1.117.200.000 |
| 7 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH | 571.103.000 | 406.765.000 |
| 8 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA TENGAH | 1.657.343.000 | 1.657.343.000 |
| 9 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH | 23.137.396.000 | 2.280.300.000 |
| 10 | KETAHANAN PANGAN | 9.454.965.000 | 0 |
| 11 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH | 4.837.107.000 | 68.210.000 |
| 12 | INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH | 327.892.000 | 126.024.000 |
| 13 | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH | 1.706.817.000 | 121.134.000 |
| **TUGAS PEMBANTUAN** | | **208.655.949.000** | **31.615.490.000** |
| 1 | DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH | 63.623.186.000 | 12.996.125.000 |
| 2 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH | 19.725.102.000 | 825.644.000 |
| 3 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH | 1.743.332.000 | 400.721.000 |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH | 84.778.880.000 | 0 |
| 5 | DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH | 36.258.696.000 | 17.393.000.000 |
| 6 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH | 2.070.000.000 | 0 |
| 7 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH | 456.753.000 | 0 |

*Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2024.*

Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017.

Adapun realisasi kegiatan pada tahun 2023 tertinggi pada Bidang Kesejahteraan Sosial sebesar Rp27.709.278.014 dan terendah pada Bidang Energi Baru Terbarukan sebesar Rp1.504.857.980. Perusahaan dengan alokasi anggaran terbanyak adalah Bank Jateng sebesar Rp18.639.633.350. Sedangkan perusahaan

dengan alokasi program terbanyak adalah PT Kilang Pertamina International Refinery Unit IV Cilacap sebanyak 209 program.

**Tabel 3.15.**

**Rekapitulasi Pelaksanaan TJSLP/CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

| No | Perusahaan | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank Jateng | 163 | 18.639.633.350 |
| 2 | PT Pertamina Patra Niaga | 74 | 15.736.046.050 |
| 3 | PT Semen Gresik Tbk | 122 | 9.553.592.312 |
| 4 | PT Bhimasena Power Indonesia | 199 | 7.056.993.632 |
| 5 | PT Sumber Segara Primadaya – PLTU Cilacap | 26 | 6.766.500.000 |
| 6 | PT Kilang Pertamina International Refinery Unit IV Cilacap | 209 | 6.720.272.600 |
| 7 | PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | 102 | 6.379.124.200 |
| 8 | PT Tirta Investama (AQUA) Klaten | 18 | 5.249.650.000 |
| 9 | PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan DI Yogyakarta | 23 | 4.833.269.059 |
| 10 | PT Phapros Tbk | 131 | 3.828.319.146 |
| 11 | PT Sri Rejeki Isman Tbk | 44 | 3.700.815.304 |
| 12 | PT Solusi Bangun Indonesia Tbk – Cilacap | 195 | 3.387.737.200 |
| 13 | PT Telkom Regional IV Jateng & DIY | 107 | 2.668.505.170 |
| 14 | PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk | 19 | 1.889.500.000 |
| 15 | PT Indonesia Power Unit Pembangkitan (UP) Mrica Banjarnegara | 51 | 1.857.768.007 |
| 16 | PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan | 63 | 1.802.434.883 |
| 17 | PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B | 6 | 1.724.593.060 |
| 18 | PT Nestle Indonesia Pabrik Bandaraya | 2 | 1.480.000.000 |
| 19 | PT Indonesia Power Semarang PGU | 96 | 1.470.527.987 |
| 20 | BPR BKK Purwodadi | 102 | 1.315.019.447 |
| 21 | Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah | 67 | 1.244.000.000 |
| 22 | PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) | 18 | 1.152.630.000 |
| 23 | PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng | 35 | 1.135.938.000 |
| 24 | Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) | 124 | 1.105.254.493 |
| 25 | PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) | 75 | 932.264.055 |
| 26 | BPR BKK Purwokerto | 162 | 766.028.100 |
| 27 | PT Dan Liris | 82 | 727.207.577 |
| 28 | PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah | 90 | 693.201.860 |
| 29 | PT Norojono Tobacco International | 60 | 656.346.429 |
| 30 | PT Jamkrida Jateng | 68 | 547.726.000 |
| 31 | BPR BKK Karangmalang | 18 | 406.230.000 |
| 32 | BPR BKK Demak | 85 | 399.197.370 |
| 33 | PT Kayu Lapis Indonesia – Kendal | 93 | 393.728.737 |
| 34 | BPR Surya Yudhakencana | 27 | 306.637.500 |
| 35 | BPR BKK Blora | 33 | 268.579.150 |
| 36 | PT Dua Kelinci | 173 | 256.524.980 |
| 37 | PT Trans Marga Jateng | 20 | 252.513.150 |
| 38 | BPR BKK Kendal | 62 | 247.529.108 |
| 39 | BPR BKK Ungaran | 72 | 234.918.400 |
| 40 | BPR BKK Pati | 59 | 209.746.525 |

| No | Perusahaan | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 41 | RS Panti Wilasa Citarum | 49 | 204.115.000 |
| 42 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Semarang | 4 | 160.000.000 |
| 43 | Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (PD CMJT) | 19 | 145.727.000 |
| 44 | Angkasa Pura Airport | 5 | 134.500.000 |
| 45 | BPR BKK Kab. Pekalongan | 22 | 130.226.000 |
| 46 | BPR BKK Tasikmadu | 52 | 127.572.000 |
| 47 | BPR BKK Temanggung | 25 | 124.505.000 |
| 48 | BPR BKK Kudus | 21 | 113.178.750 |
| 49 | BPR BKK Muntilan | 34 | 98.837.000 |
| 50 | BPR BKK Boyolali | 10 | 93.000.000 |
| 51 | BPR BKK Tulung | 11 | 51.763.000 |
| 52 | BPR BKK Banjarharjo | 12 | 31.795.000 |
| 53 | PT SAS Kreasindo Utama | 16 | 29.319.200 |
| 54 | BPR BKK Jepara | 4 | 28.000.000 |
| 55 | BPR BKK Kota Tegal | 6 | 17.929.800 |
| 56 | BPR BKK Kota Magelang | 4 | 15.991.000 |
| 57 | PT Pusat Rekeasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah | 5 | 9.500.000 |
| 58 | RS Panti Waluyo YAKKUM Surakarta | 7 | 8.300.000 |
| 59 | PT Jateng Petro Energi (JPE) | 1 | 7.500.000 |
| 60 | Grand Dian Hotel Slawi | 3 | 7.000.000 |
| 61 | PT Kenlee Indonesia | 3 | 6.700.000 |
| 62 | PT Intiniaga Tunassejahtera (Wings Group) | 8 | 5.699.998 |
| 63 | PT BPR BKK Kota Semarang | 2 | 3.392.150 |
| 64 | BPR BKK Batang | 2 | 3.000.000 |
| 65 | PT Gopek Cipta Utama | 3 | 2.000.000 |
| **TOTAL** | | **3.503** | **119.556.053.739** |

*Sumber: Sistem Pelaporan Online CSR Provinsi Jawa Tengah, Per 31 Januari 2024.*

**Tabel 3.16.**

**Rekapitulasi Alokasi Anggaran TJSLP Per Bidang Pokja Tahun 2023**

| No | Bidang Pokja | Jumlah Program | Jumlah Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bidang Kesejahteraan Sosial | 683 | 27.709.278.014 |
| 2 | Bidang Usaha Ekonomi Rakyat | 333 | 21.543.993.427 |
| 3 | Bidang Kesehatan | 363 | 16.119.554.793 |
| 4 | Bidang Pendidikan | 394 | 11.856.902.284 |
| 5 | Bidang Infrastruktur | 289 | 10.907.848.796 |
| 6 | Bidang Keagamaan | 455 | 9.792.605.666 |
| 7 | Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 144 | 5.810.307.480 |
| 8 | Bidang Pendampingan Umum | 148 | 5.386.582.036 |
| 9 | Bidang Olahraga, Seni, Budaya Dan Pariwisata | 455 | 4.204.589.950 |
| 10 | Bidang Kedaruratan | 198 | 2.487.087.653 |
| 11 | Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan | 35 | 2.232.445.660 |
| 12 | Bidang Energi Baru Terbarukan | 6 | 1.504.857.980 |
| **TOTAL** | | **3503** | **119.556.053.739** |

*Sumber: Sistem Pelaporan Online CSR Provinsi Jawa Tengah, per 31 Januari 2024.*

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2025 merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Kebijakan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 juga mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045.

Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026, pembangunan Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan untuk mencapai **tujuan "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari"**, yang diukur dengan indikator produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, rasio gini, dan angka kemiskinan. Masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, dibutuhkan adanya keberlanjutan pembangunan. Lestari bermakna sebagai pembangunan masyarakat Jawa Tengah yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Keberhasilan pencapaian tujuan daerah selama tahun 2024-2026 ditunjukkan dengan indikator menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita masyarakat Jawa Tengah dari tahun ke tahun, dan menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Tujuan pembangunan daerah tahun 2025 "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari" didukung dengan empat **Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025**, meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 berdasarkan RPD Tahun 2024-2026, dengan target yang telah memperhatikan capaian tahun 2023 tersaji dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.1.**
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025**

| Tujuan Pembangunan Daerah | Sasaran Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Tujuan Pembangunan Daerah yaitu Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari** | | | | |
| | | PDRB per Kapita | Juta Rupiah | 49,30 - 49,73 |
| | | Angka Kemiskinan | % | 9,66 – 9,00 |
| | | Rasio Gini | Angka | 0,362 - 0,367 |
| | Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan | | | |
| | | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,90 - 5,60 |
| | | Inflasi | % | 1,50 - 3,50 |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,81 - 4,42 |
| | | Nilai Tukar Petani | Angka | 107,52 |
| | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif | | | |
| | | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 73,99 |
| | | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Angka | 62,24 – 62,31 |
| | | Indeks Pembangunan Gender | Angka | 93,13 |
| | | Indeks Pembangunan Keluarga | Angka | 64,07 |
| | Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup | | | |
| | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 75,68 |
| | | Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana | % | 4,00 |
| | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis | | | |
| | | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 83,50 |

*Sumber: RPD Tahun 2024-2026 (dengan target yang disesuaikan)*

## 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

### 4.2.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran disampaikan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2025 yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan terutama terkait dengan kelengkapan data, permasalahan beberapa sektor yang belum terakomodir, dan arah kebijakan keuangan daerah. Pokok-pokok pikiran DPRD diuraiakan sebagai berikut:

1. **Aspek Pemerintahan**
   a. Netralitas dan profesionalisme serta tanggung jawab seluruh aparat birokrasi pada semua tingkatan dalam menghadapi tahun politik guna melahirkan kualitas berdemokrasi yang lebih kuat, kokoh dan mapan;
   b. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat pedesaan dengan terobosan melakukan percepatan pembangunan desa melalui peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan desa serta sekaligus peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparat desa demi mendukung percepatan dan perbaikan pelayanan masyarakat secara lebih berkualitas;
   c. Sosialisasi terhadap undang-undang, peraturan daerah dan berbagai peraturan gubernur terutama yang terkait dengan hajat hidup sebagian besar masyarakat bisa terus digencarkan lagi agar tidak terjadi miskomunikasi atau terputusnya pemahaman antara program pemerintah dan masyarakat;
   d. Sosialisasi yang terus menerus dengan target munculnya pemahaman masyarakat, khususnya yang terkait dengan masalah pertanian, pupuk, bibit, permodalan, peternakan, UMKM serta koperasi, mengingat kepentingan ekonomi mayoritas masyarakat desa sangat berkaitan dengan bidang-bidang ini;
   e. Menjaga stabilitas harga dan stok pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan terus melakukan koordinasi dengan Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
   f. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, penguatan modal, penguatan pertumbuhan ekonomi, karang taruna, dan penguatan pariwisata;
   g. Peningkatan prasarana digitalisasi desa serta perbaikan fasilitas desa;
   h. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan di Jawa Tengah;
   i. Pembuatan kebijakan dan inovasi daerah dalam peningkatan kemudahan berusaha di Provinsi Jawa Tengah;
   j. Pemerintah Jawa Tengah melakukan *update* data induk kemiskinan di desa dengan sebaik-baiknya, agar masalah bantuan apapun dari pemerintah (baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota) yang seringkali dianggap tidak tepat sasaran dapat diatasi secara tuntas;
   k. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengeluarkan regulasi agar semua lembaga pendidikan melakukan pembelajaran cara penggunaan *hp android* yang baik dan produktif bagi peningkatan kualitas siswa/siswi;
   l. Perlu disusunnya regulasi terkait terkait dengan:
      - Tata kelola pupuk yang jelas dan berpihak pada rakyat;
      - Pemanfaatan media pembelajaran elektronik;
      - Larangan membuang sampah di sembarang tempat.

2. **Aspek Perekonomian**
   a. Peningkatan kesejahteraan kaum tani dengan memberikan kemudahan berusaha/berproduksi di bidang pertanian;
   b. Modernisasi sektor pertanian yang dikelola secara kreatif, inovatif dan profesional sehingga bidang ini menjadi lapangan kerja yang menarik ditekuni generasi muda karena menjanjikan peluang serta kesejahteraan

yang terus berkembang sehingga pada saatnya mereka bisa tampil sebagai *enterpreneur*/usahawan di bidang ini;

c. Pendampingan, pemihakan dan pemberdayaan oleh pemerintah daerah juga dibutuhkan untuk kegiatan dan produk-produk ekonomi kreatif lokal yang menjadi ciri kas kearifan daerah (kabupaten/kota) wajib terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki produk–produk unggulan ekonomi yang menjadi ciri khasnya;
d. Pembinaan dan pendampingan secara serius, terutama terkait dengan promosinya kepada publik terhadap potensi desa wisata di Provinsi Jawa Tengah;
e. Pemberian sanksi berupa penghentian izin operasi kepada perusahan bongkar muat (PBM) dan *trucking* yang angkutan barangnya melebihi tonase, *memblacklist* kontraktor jalan yang kualitas pekerjaannya buruk dan/atau tidak memenuhi standar;
f. Pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mendalami masalah praktek jual beli jabatan dan jika terdapat laporan resmi dari masyarakat agar segera di proses sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

**3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

a. Pembagian BOSDa harus ditingkatkan dan disamakan sehingga tidak boleh mendiskriminasi antara sekolah/madrasah, karena hanya bernaung di kementrian yang berbeda;
b. Adanya insentif/honor terhadap tenaga kependidikan keagamaan (nonformal) ke depan hendaknya terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan cakupan dan nilai nominalnya;
c. Pemberian bantuan secara signifikan dan terus menerus kepada sekolah-sekolah swasta di bawah yayasan sangat diperlukan sebagai upaya percepatan untuk meningkatkan kualitas agar sejajar dengan sekolah-sekolah negeri pada khususnya;
d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan juga meningkatkan pengelolaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) secara memadai, dengan meningkatkan kuantitas dan melakukan monitoring penyaluran dana BSM secara tepat sasaran;
e. Penguatan sarana dan prasarana terhadap Sekolah Luar Biasa, khususnya pemenuhan terhadap rasio guru Sekolah Luar Biasa;
f. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan program peningkatan ketersediaan dan akses terhadap air bersih, serta program rumah layak huni untuk masyarakat;
g. Peningkatan penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS yang membuka akses dan peluang lebih besar kepada masyarakat secara umum untuk mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan gratis dengan melakukan pembayaran premi yang terjangkau;
h. Bantuan pendidikan lebih diperbesar karena dampak yang dihasilkan sangat baik untuk generasi ke depan;
i. Peningkatan pelayanan kesehatan di desa–desa;
j. Peningkatan terhadap kemudahan akses disabilitas pada ruang-ruang publik dan pelayanan masyarakat.

**4. Aspek Pembangunan dan Lingkungan Hidup**

a. Peningkatan pembangunan yang diarahkan atau lebih dikonsentrasikan pada penguatan serta perluasan pembangunan infrastruktur, khususnya yang ada di wilayah pedesaan, pinggiran dan perbatasan, jalan penghubung antardesa, antarkecamatan, dan antarkabupaten/kota;
b. Terkait dengan kondisi jalan di Jawa Tengah yang rusak sehingga diperlukan koordinasi penanganan kerusakan jalan dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota;
c. Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya di Jawa Tengah diharapkan lebih merata di 35 kabupaten/kota dan 7.809 desa, hal ini sebagai komitmen bersama dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup yang layak;
d. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat di segala bidang untuk ditingkatkan.

**5. Aspek Keuangan Daerah**

Fokus utama yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa terutama pada anggaran daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah khususnya pada alokasi belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.

### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada **tema pembangunan daerah tahun 2025** yaitu **Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah yang ditetapkan berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. **Prioritas Daerah (PD) Tahun 2025** yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Penetapan empat prioritas daerah tahun 2025 konsisten dengan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025, dan dapat digambarkan sebagai berikut.

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 4.1**
**Gambaran Konsistensi Tujuan Daerah, Sasaran Pembangunan Daerah, dan Prioritas Daerah Tahun 2025**

Prioritas daerah tahun 2025 juga konsisten dalam rangka menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah, serta konsisten dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Konsistensi tersebut dapat digambarkan dalam tabel dan gambar sebagai berikut.

**Tabel 4.2.**
**Konsistensi Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025, serta Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, dan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025**

| RPD Tahun 2024-2026 | RKPD Tahun 2025 | | |
|---|---|---|---|
| **Arah Kebijakan**<br>Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | **Tema Pembangunan**<br>Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter | | |
| **Prioritas** | **Prioritas Daerah** | **Isu Strategis** | **Permasalahan Daerah** |
| Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas | Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas | Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan | - Masih cukup tingginya angka kemiskinan<br>- Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur |
| Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata | Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata | Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif | Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi era disrupsi |

| RPD Tahun 2024-2026 | RKPD Tahun 2025 | | |
|---|---|---|---|
| Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung | Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan | Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana |
| Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif | Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif | Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis | - Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi<br>- Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

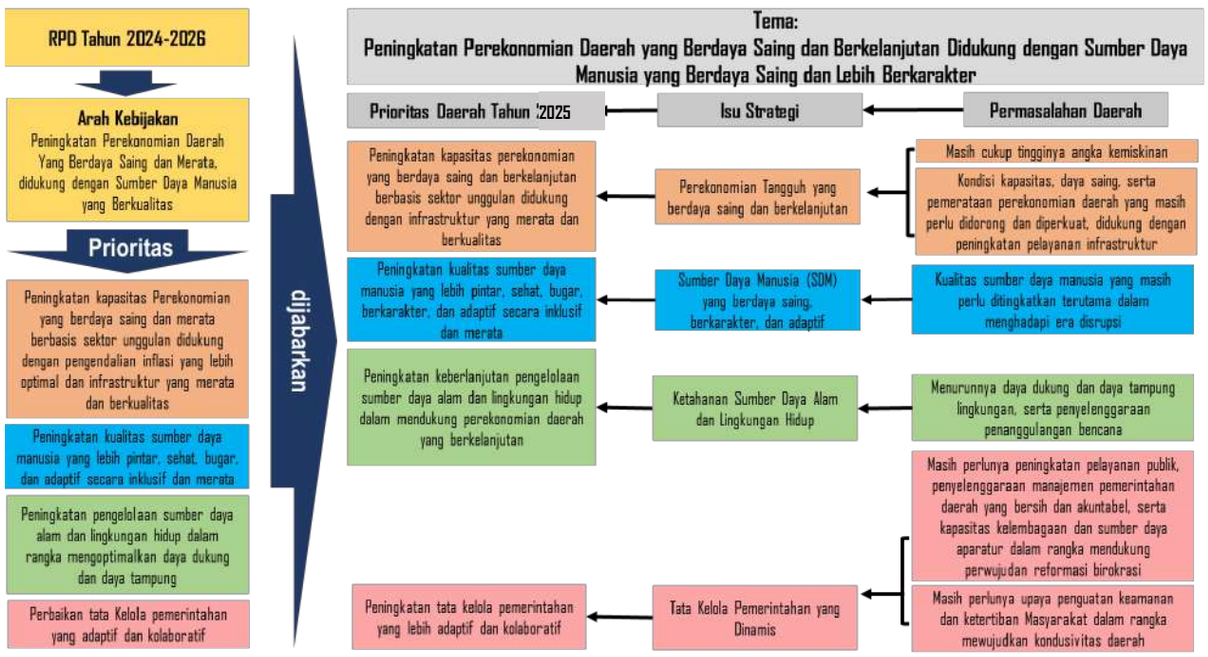


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 4.2**

**Gambaran Penjabaran Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah RPD Tahun 2024-2026 Dalam RKPD Tahun 2025, Serta Gambaran Konsistensi Permasalahan Daerah, Isu Strategis, Dengan Prioritas Daerah RKPD Tahun 2025**

Penjabaran prioritas daerah (PD) Jawa Tengah tahun 2025 lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

## 1. PD 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas

### A. Sasaran Prioritas Daerah

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut.

| Sasaran Prioritas Daerah | Satuan | Target 2025 |
|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,90 – 5,60 |
| Inflasi | % | 1,50 – 3,50 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,81 – 4,42 |
| Nilai Tukar Petani | Angka | 107,52 |

### B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah

Prioritas daerah *Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas*, difokuskan pada:

a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
   1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
   2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
   3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste);*
   4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
   5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumber daya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
   6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
   7) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah; dan
   8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau *(green economy)* yang diawali dengan perumusan kebijakan sebagai bagian dalam penyusunan *roadmap* pembangunan ekonomi hijau di Provinsi Jawa Tengah.

b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan

dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:

1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi pengelolaan SPAM kabupaten/kota, pembangunan sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
3) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat termasuk masyarakat miskin, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesos;
4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan.

c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

## C. Program Prioritas

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 67 program, dengan total pagu indikatif sebesar Rp8.039.750.720.000 atau sebesar 33,62 persen dari total pagu indikatif tahun 2025. Program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah ini dilaksanakan oleh 17 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

3) Program Penyelenggaraan Jalan;
4) Program Pengembangan Perumahan;
5) Program Kawasan Permukiman;
6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
7) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
9) Program Pemberdayaan Sosial;
10) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
11) Program Rehabilitasi Sosial;
12) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
13) Program Penanganan Bencana;
14) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
15) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
16) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
17) Program Pengawasan Keamanan Pangan;
18) Program Penataan Desa
19) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
20) Program Administrasi Pemerintahan Desa;
21) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
22) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
23) Program Pengelolaan Pelayaran;
24) Program Pengelolaan Perkeretaapian;
25) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
26) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
27) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
28) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
29) Program Pengembangan UMKM;
30) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
31) Program Promosi Penanaman Modal;
32) Program Pelayanan Penanaman Modal;
33) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
34) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
35) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
36) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
37) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
38) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
39) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
40) Program Pemasaran Pariwisata;
41) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
42) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
43) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
44) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
45) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

46) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
47) Program Penyuluhan Pertanian;
48) Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
49) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
50) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
51) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
52) Program Pengembangan Ekspor;
53) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
54) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
55) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
56) Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
57) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
58) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
59) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
60) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
61) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
62) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
63) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
64) Program Penempatan Tenaga Kerja;
65) Program Hubungan Industrial;
66) Program Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
67) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Secara rinci penjabaran prioritas daerah ke dalam program prioritas yang disertai indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan perangkat daerah penanggung jawab tertuang dalam tabel 4.3.

**2. PD 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata**

**A. Sasaran Prioritas Daerah**

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut.

| Sasaran Prioritas Daerah | Satuan | Target 2025 |
|---|---|---|
| Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 73,99 |
| Indeks Pembangunan Kebudayaan | Angka | 62,24 – 62,31 |
| Indeks Pembangunan Gender | Angka | 93,13 |
| Indeks Pembangunan Keluarga | Angka | 64,07 |

**B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah**

Prioritas daerah *Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata*, difokuskan pada:

a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata, peningkatan kualitas pembelajaran berbasis *softskill* dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal,

budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi serta kecerdasan buatan; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan melalui kampanye perubahan perilaku, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi); peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pelatihan/seminar/*workshop*/magang/lainnya yang mendukung program prioritas; peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan *surveilans* berbasis laboratorium; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan program prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan prasarana sarana olahraga memadai dan terjangkau, serta pembinaan dan pelatihan atlet;
d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM perpustakaan;
e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai *platform* termasuk *platform* digital;
g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## C. Program Prioritas

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 26 program, dengan total pagu indikatif sebesar Rp4.338.343.815.000 atau sebesar 18,14 persen dari total pagu indikatif tahun 2025. Program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah ini dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

1) Program Pengelolaan Pendidikan;
2) Program Pengembangan Kurikulum;
3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
7) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
8) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
9) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
10) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
11) Program Pengembangan Kebudayaan;
12) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
13) Program Pembinaan Sejarah;
14) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
15) Program Pengelolaan Permuseuman;
16) Program Pembinaan Perpustakaan;
17) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
18) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
19) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
20) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
21) Program Perlindungan Perempuan;
22) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
23) Program Perlindungan Khusus Anak;
24) Program Pengendalian Penduduk;
25) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
26) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Secara rinci penjabaran prioritas daerah ke dalam program prioritas yang disertai indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan perangkat daerah penanggung jawab tertuang dalam tabel 4.3.

## 3. PD 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan

### A. Sasaran Prioritas Daerah

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut.

| Sasaran Prioritas Daerah | Satuan | Target 2025 |
|---|---|---|
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 75,68 |
| Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana | % | 4,00 |

### B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah

Prioritas daerah *Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan*, difokuskan pada:

a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara *ambien*, penyediaan prasarana sarana pengolah limbah dan persampahan (percepatan penyelesaian *readiness criteria* TPST regional dan fasilitasi proses pembangunan IPLT regional), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak, serta rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat (termasuk masyarakat miskin) terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;

c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;

d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan

bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*early warning system* (EWS), pembentukan desa/ kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

## C. Program Prioritas

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 22 program, dengan total pagu indikatif sebesar Rp129.488.609.000 atau sebesar 0,54 persen dari total pagu indikatif tahun 2025. Program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah ini dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
4) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
5) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
6) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
7) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
8) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
9) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
11) Program Pengelolaan Persampahan;
12) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
14) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
15) Program Pengelolaan Hutan;
16) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
17) Program Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
18) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
19) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
20) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;

21) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan; dan
22) Program Penanggulangan Bencana.

Secara rinci penjabaran prioritas daerah ke dalam program prioritas yang disertai indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan perangkat daerah penanggung jawab tertuang dalam tabel 4.3.

**4. PD 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**

**A. Sasaran Prioritas Daerah**

Prioritas daerah ini diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut.

| Sasaran Prioritas Daerah | Satuan | Target 2025 |
|---|---|---|
| Indeks Risiko Birokrasi | Angka | 83,50 |

**B. Fokus Kebijakan Prioritas Daerah**

Prioritas daerah *Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif*, difokuskan pada:

a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui *co-creator*.

**C. Program Prioritas**

Prioritas daerah dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas sebanyak 41 program, dengan total pagu indikatif sebesar Rp11.404.360.100.000, di dalamnya termasuk pagu indikatif untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang sebesar Rp10.175.320.587.000. Proporsi pagu indikatif untuk prioritas daerah ini sebesar 47,69 persen (termasuk Program Penunjang) atau 5,14 persen (tanpa Program Penunjang) dari total pagu indikatif tahun 2025. Program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran prioritas daerah ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan antara lain pemerintah kabupaten/kota, kementerian/ lembaga, swasta melalui TJSLP/CSR, dan lembaga non pemerintah lainnya. Program prioritas yang mendukung prioritas daerah ini meliputi:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2) Program Penataan Bangunan Gedung;
3) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
4) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;

6) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
7) Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
8) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
9) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*;
10) Program Pendaftaran Penduduk;
11) Program Pencatatan Sipil;
12) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
14) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
15) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
16) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
17) Program Pengelolaan Arsip;
18) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
19) Program Penataan Organisasi;
20) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
21) Program Kesejahteraan Rakyat;
22) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
23) Program Perekonomian dan Pembangunan;
24) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
25) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
26) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
27) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
28) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
29) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
31) Program Kepegawaian Daerah;
32) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
33) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
34) Program Pelayanan Penghubung;
35) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
36) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
37) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
38) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
39) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
40) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
41) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Upaya perwujudan tema pembangunan, prioritas daerah, dan pencapaian sasaran kinerja pembangunan daerah tahun 2025 tersebut didukung dengan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai program unggulan daerah tahun 2025. Kesepuluh program prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Menjaga stabilitas politik, ekonomi (inflasi), sosial budaya, keamanan dan ketertiban**

   Dalam rangka menjaga stabilitas politik, ekonomi (inflasi), sosial, ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah perlu dilakukan berbagai strategi agar kondusivitas daerah terjaga. Kondusivitas daerah merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung perekonomian daerah yang stabil diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai strategi telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat di antaranya:

   a. pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini;
   b. mobilisasi satlinmas untuk membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban, penanggulangan dan pencegahan bencana;
   c. penegakan perda provinsi atau peraturan gubernur;
   d. pembinaan trantibum terdiri dari pembinaan pengamanan obyek vital (pam obvit) serta pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali);
   e. patroli pengendalian trantibum;
   f. penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; dan
   g. operasi penertiban trantibum (pekat dan cipta kondisi).

   Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui perangkat daerah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program. Pada tahun 2025, pengendalian inflasi juga menjadi salah satu prioritas nasional dan provinsi untuk dilaksanakan. Beberapa strategi yang dilakukan untuk pengendalian inflasi meliputi antara lain:

   a. intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya;
   b. memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

2. **Penuntasan pengentasan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem), penurunan angka pengangguran dan *stunting***

   Program penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan *stunting* menjadi program prioritas Jawa Tengah sejak tahun 2024, dan dilanjutkan pada tahun 2025. Program ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menuntaskan dan mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah dan mendukung kebijakan nasional dalam penurunan angka kemiskinan. Strategi penuntasan kemiskinan di tahun 2025, meliputi:

   a. Pengurangan beban pengeluaran, diantaranya dengan pemberian Kartu Jateng Sejahtera (KJS), Beasiswa Siswa Miskin/BSM SMA/SMK/SLB, pemberian seragam siswa miskin, iuran jaminan kesehatan (PBI Jamkes), listrik murah, pemenuhan kebutuhan PPKS, stabilisasi harga, bansos dan hibah, SMA *boarding* dan semi *boarding*, BOSDa (Bantuan Operasional

Sekolah Daerah), BOP (Bantuan Operasioanl Penyelenggaraan Pendidikan), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT);

b. Meningkatkan pendapatan, diantaranya dengan pelatihan peningkatan ekonomi produktif dan fasilitasi bantuan alat (UMKM, kehutanan, perindustrian, kelautan, dan lainnya), padat karya tunai, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pelatihan calon tenaga kerja dan eksmigran, asuransi, akses kredit bagi UMKM, serta insentif pengajar keagamaan;

c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, diantaranya dengan mengurangi ketimpangan utara dan selatan dengan membangun akses peningkatan akses sumber air minum, RTLH dan jamban terintegrasi, pembangunan baru *backlog* (jumlah rumah yang belum tertangani) bencana dan relokasi, serta subsidi harga pangan di desa rawan pangan.

Selanjutnya dalam rangka penurunan angka *stunting*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah dan akan terus melaksanakan berbagai upaya terintegrasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan. Penurunan *stunting* pada tahun 2025 difokuskan kembali dengan strategi-strategi yang dikhususkan untuk penanganan *stunting* antara lain:

1) Pembinaan dalam peningkatan status dan pengetahuan gizi masyarakat;
2) Pembinaan pencegahan *stunting*;
3) Peningkatan *surveilans* gizi;
4) Penguatan intervensi implementasi gizi pada ibu hamil dan balita;
5) Pengelolaan pelayanan kesehatan usia sekolah remaja, kesehatan reproduksi, dan disabilitas;
6) Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kekurangan gizi;
7) Pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
8) Pelaksanaan advokasi implementasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) dalam penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB);
9) Pembinaan pelaksana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM;
10) Layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan;
11) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan kawasan mandiri pangan;
12) Koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait cakupan keluarga penerima manfaat bantuan tunai bersyarat:
    a. PKH (Program Keluarga Harapan) yaitu program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
    b. KPM yang mendapatkan bantuan sosial pangan dan lingkup pertanian dalam arti luas;
13) Pengawasan produk pangan fortifikasi;
14) Pembenahan data dan pengelolaan sistem;
15) Implementasi “Strategi Komunikasi, Perubahan Perilaku dan Sosial” pada lokasi prioritas;
16) Fasilitasi pengembangan DASHAT (dapur sehat atasi *stunting*) di kampung KB;

17) Fasilitasi pembinaan percepatan penurunan *stunting* melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
18) Pemberian bantuan benih padi inbrida untuk daerah rawan pangan;
19) Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan;
20) Pelatihan tentang Gerakan AKU HATINYA PKK (Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman) dalam mengatasi *stunting*;
21) Pelatihan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) dan konseling PMBA untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan
22) *Stakeholder meeting* untuk penyusunan Strategi Komunikasi KPPS.

Program lainnya yang menjadi prioritas untuk dilakukan pada tahun 2025 adalah penurunan angka pengangguran. Penurunan angka pengangguran dalam pelaksanaannya beririsan dengan program prioritas Peningkatan Kualitas Sistem Pendidikan Vokasi, sehingga beberapa kegiatan prioritasnya pun akan saling beririsan, contohnya seperti upaya peningkatan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, serta peningkatan mutu pendidikan vokasi dengan peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kegiatan prioritas lainnya yang sudah dan akan dilaksanakan guna mendukung program ini seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta optimalisasi BLK; pengembangan wirausaha baru; serta program padat karya di berbagai sektor.

**3. Pemantapan ketahanan pangan, energi dan air**

Upaya mewujudkan pemantapan ketahanan pangan pada tahun 2025 dilakukan melalui beberapa strategi antara lain melalui:

a. Intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya;
b. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian;
c. Mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerja sama antar daerah;
d. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.

Selain strategi tersebut, upaya pemantapan ketahanan pangan juga didukung dari sisi hulu dengan mendorong produksi dan produktivitas pertanian agar ketersediaan bahan pangan tetap terjaga. Selanjutnya, upaya yang akan dilakukan dalam rangka pemantapan ketahanan energi dan air di Jawa Tengah antara lain dengan peningkatan ketahanan energi melalui kebijakan transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan meningkatkan ketahanan sumber daya air.

4. **Perkuatan pengembangan sumber daya manusia, sains, teknologi, dan pendidikan (vokasi)**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dan akan secara konsisten melakukan berbagai program terkait peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan tersebut ditempuh melalui berbagai cara beberapa diantaranya melalui peningkatan kualitas pembelajaran, pelaksanaan kerja sama pendidikan, dan penguatan pendidikan karakter. Dalam perencanaan pembangunan tahun 2025 ini, peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu program prioritas daerah. Strategi yang akan dilakukan guna pencapaiannya antara lain adalah:

a. Peningkatan kompetensi bagi instruktur/guru, tenaga pendidik dan peserta didik;
b. Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi instruktur/guru, tenaga pendidik dan peserta didik; dan
c. Pemberian beasiswa.

Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan memiliki keterampilan serta kompetensi yang lebih baik. Poin penting dalam program ini adalah terintegrasinya kurikulum pendidikan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan terfasilitasinya lulusan pendidikan vokasi dalam rekruitmen tenaga kerja sesuai DUDI. Sinkronisasi kurikulum SMK dengan DUDI dilakukan agar kurikulum pendidikan SMK sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Berikut strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Jawa Tengah tahun 2025:

a. Kerja sama satuan pendidikan vokasi dengan pelibatan dunia usaha (DUDI);
b. Penyelarasan kurikulum dengan DUDI;
c. Pengembangan dan peremajaan sarana dan parasarana (pendidikan vokasi dan pelatihan kerja);
d. Fasilitasi rekruetmen lulusan pendidikan vokasi, serta berperan dalam menjembatani terwujudnya *link and match* antara SMK dan industri (termasuk kerajinan dan pariwisata).

5. **Peningkatan kualitas layanan dan promosi kesehatan masyarakat**

Program prioritas ini dilakukan dengan peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang merupakan strategi untuk mewujudkan kesehatan untuk semua. Upaya yang dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualitas layanan guna mencapai akses dan mutu layanan yang terstandar, serta didukung dengan upaya promosi kesehatan masyarakat guna meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi bagi masyarakat dibidang kesehatan.

6. **Pengembangan investasi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan daya saing UMKM**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menjadikan program pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu dari sepuluh program prioritas pada tahun 2025. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Jawa Tengah, dan pada tahun 2025 pariwisata difokuskan pada upaya

peningkatan promosi pariwisata, pengembangan aplikasi layanan pariwisata dan monitoring pariwisata, serta penyelenggaraan berbagai even pariwisata antara lain even *sport tourism*, kuliner festival, dan *e-sport tournament*.

Selain sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong peningkatan daya saing sektor UMKM berbasis ekonomi kreatif karena sektor UMKM juga merupakan salah satu sektor unggulan daerah yang menopang perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah juga didorong untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif di tiap wilayah kabupaten/kota melalui perwujudan kabupaten/kota kreatif.

Strategi pengembangan pariwisata dan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut:

a. Pengembangan pemasaran pariwisata dan UMKM (promosi, sarana pemasaran dan pengembangan pasar);
b. Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi dengan program pelatihan, dan pengembangan keterampilan;
c. Pengembangan destinasi wisata;
d. Pembangunan aksesibilitas dan infrastruktur penunjang destinasi wisata;
e. Fasilitasi bantuan wirausaha;
f. Inovasi dan pengembangan produk UMKM; dan
g. Kolaborasi/kerja sama melalui CSR.

**7. Pengembangan ekonomi sirkuler dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan**

Pada tahun 2025, pengembangan sistem ekonomi sirkular menjadi salah satu program prioritas Jawa Tengah. Ekonomi sirkular merupakan sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular tidak sekedar membahas pengelolaan limbah yang lebih baik dengan lebih banyak melakukan daur ulang mencakup serangkaian intervensi yang luas di semua sektor ekonomi, namun juga mencakup efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon.

**8. Penanganan dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana (kekeringan, polusi, krahutla, banjir, rob dan tanah longsor)**

Penanganan dampak perubahan iklim menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak dampak dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah antara lain kekeringan, polusi, serta kebakaran hutan dan lahan akibat perubahan iklim. Peningkatan suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi semakin sering terjadi. Hal tersebut terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK. Strategi yang akan dilakukan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan dampak perubahan iklim pada tahun 2025 antara lain adalah:

a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengendalian pencemaran;
b. Konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi hutan dan mangrove;

c. Menurunkan risiko bencana;
d. Penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim; serta
e. Meningkatkan akses layanan infrastruktur dasar masyarakat.

**9. Meningkatkan pengawasan internal ASN, peningkatan layanan publik dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perwujudan pelayanan publik adalah dengan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang dinamis. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

SPBE merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menetapkan kebijakan yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk mengembangkan satu inovasi pelayanan publik dalam satu tahun.

Reformasi birokrasi di Jawa Tengah diwujudkan melalui penerapan manajemen berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabel. Dalam proses manajemen menjadi penting untuk dilakukan pengawasan terhadap setiap proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, dalam bentuk reviu atau audit.

Pengawasan terhadap organisasi yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi *quality assurance*, asistensi, dan *consulting* pada proses manajemen pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta tidak menimbulkan *fraud* di kemudian hari. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mendorong penerapan manajemen risiko dalam manajemen pemerintahan, penguatan kapasitas APIP, serta penguatan saber pungli. Sedangkan pengawasan terhadap seluruh ASN Jawa Tengah dilakukan dalam rangka penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Upaya yang dilakukan antara lain dengan sosialisasi dan edukasi kepada ASN dalam mewujudkan ASN Berakhlak, penyelenggaraan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, pelatihan teknis dan kompetensi ASN dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional dan fungsional, dan pengembangan sistem merit.

**10. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota pasca Pilkada serentak**

Keterpaduan perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota pasca Pilkada serentak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan.

Sinkronisasi dan sinergi akan mendorong lahirnya perencanaan yang terpadu, efektif dan efisien dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Strategi yang ditempuh antara lain dengan memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi baik dengan pusat maupun kabupaten/kota.

Selanjutnya penjabaran dukungan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka perwujudan tema dan prioritas daerah tahun 2025 selengkapnya tertuang dalam tabel sebagai berikut.

## Tabel 4.3.
## Program Prioritas Daerah Mendukung Tema Pembangunan dan Prioritas Daerah Tahun 2025

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| **PD1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas** | | | | | | | | | **8.039.750.270.000** | |
| | Pertumbuhan Ekonomi | 4,90 - 5,60 | % | | | | | | 7.978.440.171.000 | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | 6.457.965.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | | | Persentase akses air minum aman | | 42,93 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses air minum jaringan perpipaan | 57,82 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | 674.105.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | | | Persentase akses air limbah domestik aman | | 12,50 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses air limbah domestik layak | 95,18 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | 129.159.390.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor | | 46,55 | % | | |
| | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaaan mantap | | 89,46 | % | | |
| | | | | | Persentase kondisi jembatan provinsi baik | | 83,38 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal | 76,84 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal | 77,6 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan | 91,44 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan | 86,19 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap | 98,25 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap | 88,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang | 93,47 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang | 85,47 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang | 90,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang | 63,52 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo | 90,92 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo | 92,8 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati | 91,52 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati | 93,03 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi | 89,39 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi | 69,15 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta | 91,45 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta | 92,04 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur | 49,79 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat | 45,56 | % | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan yang dileger | 77,26 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan | 69,23 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi | 73,04 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | 25.290.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat | | 20,22 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat | | 41,57 | % | | |
| | | | | | | Persentase rumah layak huni yang disediakan | 1,17 | % | | |
| | | | | | | Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani | 6,64 | % | | |
| | | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 3.765.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase penurunan kawasan kumuh | | 39,78 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh | 13,9 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | 480.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase penurunan kawasan kumuh | | 39,78 | % | | |
| | | | | | | Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman | 60 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 200.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat | | 20,22 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 1.520.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas) | | 12,60 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum | 59,13 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah | 80,29 | % | | |
| | | | | | | Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina | 64,54 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | 10.721.000.000 | Dinas Sosial |
| | | | | | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | | 15,41 | % | | |
| | | | | | | Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 15,41 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | | 200.000.000 | Dinas Sosial |
| | | | | | Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial | | 0,11 | % | | |
| | | | | | | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | 72.868.427.000 | Dinas Sosial |
| | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial | | 0,40 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti | 3,84 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti | 0,14 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Pelayanan Sosial Mardi Utomo | | | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri | 0,15 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | 0,16 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | 0,21 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring | 0,12 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede | 0,12 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo | 0,11 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | 0,17 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | 0,15 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | 0,17 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | 0,22 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | 0,16 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | 0,13 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata | 0,24 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | 0,08 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo | 0,25 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | 0,06 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | 0,22 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | 0,13 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | 0,21 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi | 0,12 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | 0,22 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti | 0,07 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Pelayanan Sosial Kasih Mesra | | | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | 0,07 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | 0,08 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | 0,11 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | 0,1 | % | | |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | 70.447.160.000 | Dinas Sosial |
| | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan | | 2,26 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | pelayanan jaminan sosial | | | | | |
| | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial | | 0,34 | % | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial | 82 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan | 0,04 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | 3.584.500.000 | Dinas Sosial |
| | | | | | Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial | | 0,11 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | 460.000.000 | Dinas Sosial |
| | | | | | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | | 15,41 | % | | |
| | | | | | | Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | 1.750.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | | | Persentase penanganan kecamatan rawan pangan | | 6,00 | % | | |
| | | | | | Skor PPH provinsi | | 95,20 | Skor | | |
| | | | | | | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah | 87,7 | kg/kapita/ tahun | | |
| | | | | | | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) | 87,7 | kg/kapita/ tahun | | |
| | | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | 3.930.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Persentase penanganan kecamatan rawan pangan | | 6,00 | % | | |
| | | | | | | Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi | 0,01 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | 2.300.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | | | Skor PPH provinsi | | 95,20 | Skor | | |
| | | | | | | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan | 82 | % | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan | 80 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | 20.850.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah | | 7,12 | % | | |
| | | | | | | Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | | | 602.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah | | 7,12 | % | | |
| | | | | | | Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP) | 59,32 | % | | |
| | | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | 1.540.320.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah | | 7,12 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | 2.705.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah | | 7,12 | % | | |
| | | | | | | Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah | 13,24 | % | | |
| | | | | | | Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | 130.646.680.000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | On Time Performance layanan transportasi | | 85,05 | % | | |
| | | | | | Rasio konektivitas provinsi | | 0,41 | Angka | | |
| | | | | | Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan | | 15,33 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio trayek angkutan jalan | 0,56 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio pemanfatan terminal | 0,229 | Angka | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis | 0,52 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 0,25 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0,02 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0,21 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0,24 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 0,18 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0,22 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio konektivitas perkotaan | 0,483 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | 0,39 | Angka | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 0,95 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0,94 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0,95 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0,94 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 0,95 | Angka | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0,95 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah | 0,985 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 0,84 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0,84 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0,84 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0,84 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 0,84 | Angka | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0,84 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase perpindahan moda angkutan umum | 53 | % | | |
| | | | | | | Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum | 67,34 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | 779.100.000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Rasio konektivitas provinsi | | 0,41 | Angka | | |
| | | | | | Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan | | 15,33 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP | 0,38 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai | 0,4 | Angka | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | | 1.099.774.000 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan | | 15,33 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | 0,08 | Angka | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | 1.499.384.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah | | 0,38 | % | | |
| | | | | | | Persentase koperasi berkualitas | 26,74 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | 734.908.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah | | 7,39 | % | | |
| | | | | | | Persentase SDM koperasi yang berkualitas | 11,5 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | 1.606.604.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah | | 7,39 | % | | |
| | | | | | | Persentase koperasi provinsi produktif | 48,53 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | 3.494.064.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah | | 7,39 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase usaha mikro mandiri | 82,3 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan wirausaha baru | 25 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | 2.578.582.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | | | | | Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah | | 7,39 | % | | |
| | | | | | | Persentase UMKM siap bermitra | 23,08 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | 560.640.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Persentase realisasi PMA dan PMDN | | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan | 50 | % | | |
| | | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | 1.612.500.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Persentase realisasi PMA dan PMDN | | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN | 67 | % | | |
| | | | | | | Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan | 50 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 20.185.806.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 80,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | 1.654.602.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 91,00 | % | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan | 91,00 | % | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan standar pelayanan | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | 561.470.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Persentase realisasi PMA dan PMDN | | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui | 22,00 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | 550.000.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 91,00 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan | 10,00 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | 520.062.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Produksi garam | | 134.640 | Ton | | |
| | | | | | | Persentase produksi garam | 2,00 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | 9.778.793.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Produksi perikanan | | 952.718 | Ton | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending | 63,00 | % | | |
| | | | | | | Persentase produksi perikanan tangkap | 5,00 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari | 72,00 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan | 72,72 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | kepelabuhanan PPP Asemdoyong | | | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto | 81,82 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor | 70 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang | 71,72 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak | 81 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa | 72,27 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan | 72 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | 14.184.548.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Produksi perikanan | | 952.718 | Ton | | |
| | | | | | | Produksi perikanan budidaya | 609000 | Ton | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase produksi ikan konsumsi air laut | 5 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | 6.200.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah | | 15.073.629 | Rupiah | | |
| | | | | | | Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan | 26,67 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | 5.660.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah | | 15.073.629 | Rupiah | | |
| | | | | | | Jumlah kunjungan wisatawan | 54069703 | Orang | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | 550.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Jumlah kabupaten/kota kreatif | | 1 | Kabupaten/ Kota | | |
| | | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan) | 8 | Kabupaten/ Kota | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | 3.375.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah | | 15.073.629 | Rupiah | | |
| | | | | | | Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi | 33,87 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | 66.134.053.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Produksi daging | | 457.959.903 | Kg | | |
| | | | | | Produksi susu | | 94.005.743 | Kg | | |
| | | | | | Produksi telur | | 345.079.651 | Kg | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi padi | | 0,2 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi jagung | | 0,2 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi kedelai | | 0,2 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi melati | | 2 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi jahe | | 3 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi durian | | 2,5 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi cabe | | 1,5 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi bawang merah | | 2,5 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi tebu | | 0,01 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi kelapa | | 0,01 | % | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi kopi | | 0,01 | % | | |
| | | | | | | Jumlah populasi ternak potong | 3.745.066 | (ST)/(AU) | | |
| | | | | | | Jumlah populasi ternak perah | 113.440 | (ST)/(AU) | | |
| | | | | | | Jumlah populasi ternak petelur | 247.848 | (ST)/(AU) | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi obat hewan | 1 | % | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan | 4 | Dokumen | | |
| | | | | | | Persentase produksi dan distribusi semen beku | 1 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging | 1 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu | 0,25 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur | 0,25 | % | | |
| | | | | | | Produksi kedelai | 52.762 | Ton | | |
| | | | | | | Produksi jagung | 3.583.730 | Ton | | |
| | | | | | | Produksi padi | 9.613.469 | Ton | | |
| | | | | | | Persentase luas lahan yang dioptimasi | 2,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi | 93 | % | | |
| | | | | | | Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani | 2,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan | 3 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta | 85 | % | | |
| | | | | | | Produksi bawang merah | 527.875 | Ton | | |
| | | | | | | Produksi cabai | 346.115 | Ton | | |
| | | | | | | Produksi durian | 153.410 | Ton | | |
| | | | | | | Produksi jahe | 35.908 | Ton | | |
| | | | | | | Produksi melati | 25.120 | Ton | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas | 85 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya | 2 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan | 3 | % | | |
| | | | | | | Persentase layanan sertifikasi benih | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang | 85 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan | 1 | % | | |
| | | | | | | Produksi kopi | 26.005 | Ton | | |
| | | | | | | Produksi tebu | 2.562.216 | Ton | | |
| | | | | | | Produksi kelapa | 167.187 | Ton | | |
| | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | 6.810.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Produksi daging | | 457.959.903 | Kg | | |
| | | | | | Produksi susu | | 94.005.743 | Kg | | |
| | | | | | Produksi telur | | 345.079.651 | Kg | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi padi | | 0,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong | 12 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah | 12 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur | 12 | % | | |
| | | | | | | Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik | 7420274 | m | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | 37.941.604.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Produksi daging | | 457.959.903 | Kg | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis | 4 | Dokumen | | |
| | | | | | | Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali | 7 | % | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara | 4 | Dokumen | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan | 4 | Dokumen | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | 745.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi padi | | 0,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam | 10 | % | | |
| | | | | | | Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) | 15 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | 14.317.982.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Produksi daging | | 457.959.903 | Kg | | |
| | | | | | Produksi susu | | 94.005.743 | Kg | | |
| | | | | | Produksi telur | | 345.079.651 | Kg | | |
| | | | | | Persentase peningkatan produksi padi | | 0,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong | 1,08 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah | 3,62 | % | | |
| | | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur | 2,29 | % | | |
| | | | | | | Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya | 2,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | | 2.503.054.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | | | Persentase penerapan Good Mining Practice (GMP) | | 57 | % | | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah | 45 | % | | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo | 70 | % | | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria | 70 | % | | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara | 45 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan | 45 | % | | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara | 45 | % | | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo | 45 | % | | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan | 45 | % | | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu | 70 | % | | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan | 45 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah | 100 | % | | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak | 70 | % | | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi | 70 | % | | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah | 70 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | 633.633.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB | | 4,83 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) | 10 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah | 8,6 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi | 10 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | 238.250.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB | | 4,83 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi | 15 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | 55.000.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB | | 4,83 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi | 65 | % | | |
| | | | | | | Persentase kinerja realisasi pupuk | 91 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | 1.334.967.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB | | 4,83 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan nilai ekspor non migas | 4,05 | % | | |
| | | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | 2.786.815.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB | | 4,83 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen | 1,05 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta | 0,1 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang | 10 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | 2.450.180.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB | | 4,83 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri | 15 | % | | |
| | | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | 10.029.492.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB | | 3,9 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan produksi industri agro | 2,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan produksi industri non agro | 2,5 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa | 4,07 | % | | |
| | | | | | | Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki | 85 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif | 4,39 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | | 245.681.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB | | 3,9 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | 9 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | 13 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | 250.686.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor | | 3,9 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | industri dalam PDRB | | | | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | 10 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | 6,95 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | 7.285.455.540.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun | | 100 | % | | |
| | | | | | Persentase realisasi APBD | | 93,75 | % | | |
| | | | | | Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase penyampaian LKPD tepat waktu | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase penetapan APBD tepat waktu | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase penyusunan dokumen manajemen kas | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu | 100 | % | | |
| | Inflasi | 1,50 - 3,50 | % | | | | | | 45.713.888.000 | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | 12.873.888.000 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | | | Angka Kecukupan Energi | | 3.801 | kkal/kapita / hari | | |
| | | | | | Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras) | | 10 | % | | |
| | | | | | | Rata-rata ketercukupan pangan | 1,25 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi | 0,4 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku | 55 | % | | |
| | | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | 32.840.000.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | Inflasi pangan bergejolak | | 4 | % | | |
| | | | | | | Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota | 9 | % | | |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,81 - 4,42 | % | | | | | | 11.900.281.000 | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | 246.740.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah | | 68,57 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja | 68,57 | % | | |
| | | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | 3.664.754.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten | | 10,15 | % | | |
| | | | | | Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah | | 56,5 | Juta Rupiah | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi | 30,59 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas | 4,6 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi | 2,35 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis | 3,2 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | kompetensi di bidang industri | | | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian | 9,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan | 13,22 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran | 46,9801 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | 2.319.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | | 71,06 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal | 71,05 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal | 68,3 | % | | |
| | | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | 1.908.787.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) | | 91,58 | % | | |
| | | | | | | Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan | 98,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk | 49,77 | % | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah | 45,54 | % | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial | 96,69 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | | 3.500.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan | | 80,96 | % | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | 89,59 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 | 26,67 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | 261.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | | | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | | 71,06 | % | | |
| | | | | | | Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi | 3,71 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian | 3,71 | % | | |
| | Nilai Tukar Petani | 107,52 | Angka | | | | | | 3.695.930.000 | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | 575.760.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Nilai Tukar Nelayan | | 105,5 | Angka | | |
| | | | | | | Indeks harga yang diterima oleh nelayan | 108,54 | Angka | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | 396.500.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan | | 110,5 | Angka | | |
| | | | | | | Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya | 111,55 | Angka | | |
| | | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | 1.942.120.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Angka Konsumsi Ikan | | 40,92 | kg/kapita/ tahun | | |
| | | | | | | Jumlah produksi olahan ikan | 160.800 | Ton | | |
| | | | | | | Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan | 4 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | 90.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | | | | | NTP Hortikultura | | 108,49 | Angka | | |
| | | | | | NTP Tanaman Pangan | | 105,57 | Angka | | |
| | | | | | NTP Perkebunan Rakyat | | 100,97 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura | 1,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan | 1,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan | 1,5 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | 350.000.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Persentase nilai tambah produk hasil ternak | | 5 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha | 12 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | 341.550.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | | | | Persentase nilai tambah produk hasil ternak | | 5 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) | 3,5 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| **PD2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata** | | | | | | | | | **4.338.343.815.000** | |
| | Indeks Pembangunan Manusia | 73,99 | Angka | | | | | | 4.285.656.755.000 | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | 3.484.266.030.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | APK SMA, SMK dan SLB | | 83,29 | % | | |
| | | | | | Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah | | 67,25 | Angka | | |
| | | | | | Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th | | 70,97 | Angka | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X | 78,06 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X | 32,14 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA | 75 | % | | |
| | | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA | 36,86 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | 67,8 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA | 56 | % | | |
| | | | | | | Persentase angka putus sekolah SMA | 2,28 | % | | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X | 85,17 | % | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI | 88,14 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | 4,84 | % | | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI | 48,73 | % | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV | 25,85 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | 1,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV | 71,25 | % | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII | 88,26 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | 2,53 | % | | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII | 79,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi | 20 | % | | |
| | | | | | | Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi | 20 | % | | |
| | | | | | | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi | 84,1 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V | 1,93 | % | | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V | 78,9 | % | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V | 94,23 | % | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI | 80,17 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | 93 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI | 93 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | 2,08 | % | | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII | 83 | % | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII | 81,4 | % | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII | 77,25 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | 2,3 | % | | |
| | | | | | | Persentase angka putus sekolah SMK | 0,024 | % | | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII | 76,13 | % | | |
| | | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK | 65 | % | | |
| | | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK | 0,6 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMK | 58,82 | % | | |
| | | | | | | Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | 53,49 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I | 1,7 | % | | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I | 0,95 | % | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I | 90,9 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | 3,24 | % | | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX | 79,2 | % | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX | 54,6 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III | 2,89 | % | | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III | 69,9 | % | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III | 76,06 | % | | |
| | | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB | 13,16 | % | | |
| | | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB | 15 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | 10 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SLB | 68,18 | % | | |
| | | | | | | Persentase angka putus sekolah SLB | 3,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | 2,75 | % | | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII | 85,6 | % | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII | 72,84 | % | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II | 76,84 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II | 1 | % | | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II | 40,41 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | 896.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Nilai karakter siswa sekolah menengah | | 85,94 | Angka | | |
| | | | | | | Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X | 82,71 | Angka | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | 82,27 | Angka | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | 86,56 | Angka | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V | 88,84 | Angka | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | 83,77 | Angka | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | 86,99 | Angka | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | 85,8 | Angka | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | 89,53 | Angka | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I | 89,56 | Angka | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | 86,35 | Angka | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III | 83,77 | Angka | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | 89,33 | Angka | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II | 81,72 | Angka | | |
| | | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | 1.250.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | APK SMA, SMK dan SLB | | 83,29 | % | | |
| | | | | | | Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri) | 78,2 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | | 1.120.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | APK SMA, SMK dan SLB | | 83,29 | % | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA | 16 | % | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X | 35 | % | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | 15 | % | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | 4,76 | % | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK | 94,29 | % | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V | 25 | % | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I | 3 | % | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | 50 | % | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 404.763.705.000 | Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD |
| | | | | | Persentase penurunan kasus kematian ibu | | 2 | % | | |
| | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyelengggarakan pelayanan kesehatan lansia | | 74,28 | % | | |
| | | | | | Persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting | | 85 | % | | |
| | | | | | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa | | 82 | % | | |
| | | | | | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar | | 51,69 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo | | 98 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo | | 89 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta | | 96,58 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan informasi kesehatan | 85 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita | 40 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin | 85 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting | 57,14 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 42,85 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa | 85,71 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 57,14 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang | 71,42 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 42,86 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati | 42,86 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 42,86 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten | 42,86 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 57,14 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang | 71,42 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan | 68,5 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular | 74,3 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa | 74,3 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM | 85 | % | | |
| | | | | | | Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 | 74,28 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | upaya pelayanan kesehatan lansia | | | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 1.151.000.000 | Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD |
| | | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar | | 51,69 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo | | 89 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi | | 98 | % | | |
| | | | | | | Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi | 98 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya | 85 | % | | |
| | | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo | 35 | % | | |
| | | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 35 | % | | |
| | | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | 300.394.000 | Dinas Kesehatan |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar | | 51,69 | % | | |
| | | | | | | Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku | 80 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 3.123.626.000 | Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD |
| | | | | | Persentase penurunan kasus kematian ibu | | 2 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo | | 98 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo | | 89 | % | | |
| | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi | | 98 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi | 85,71 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 42,85 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 57,14 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 42,86 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 42,86 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 57,14 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | 388.786.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Peringkat nasional pada kejuaraan multievent | | 3 | Peringkat | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan perolehan medali | 31,25 | % | | |
| | | | | | | Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi | 105 | Orang | | |
| | Indeks Pembangunan Kebudayaan | 62,24 - 62,31 | Angka | | | | | | 49.171.000.000 | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | 7.580.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Persentase karya budaya berperingkat nasional | | 16,89 | % | | |
| | | | | | Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan | | 23,44 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani | | 31,7 | % | | |
| | | | | | | Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional | 20,78 | % | | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan | 26,16 | % | | |
| | | | | | | Persentase cakupan pelestarian seni | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan | 52,38 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | 22.696.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani | | 31,7 | % | | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi seni tradisi | 11,1 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | 955.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan | | 23,44 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses literasi sejarah | 53,1 | % | | |
| | | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | 1.325.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Persentase karya budaya berperingkat nasional | | 16,89 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan | | 23,44 | % | | |
| | | | | | | Persentase cagar budaya berperingkat nasional | 13,15 | % | | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya | 26,73 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | 3.750.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | Persentase karya budaya berperingkat nasional | | 16,89 | % | | |
| | | | | | | Nilai survey kepuasan pengunjung museum | 89,9 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | 1.400.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | Nilai tingkat kegemaran membaca | | 74 | Nilai | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi | 88,89 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca | 61,54 | % | | |
| | | | | | | Nilai survey kepuasan masyarakat | 80 | Nilai | | |
| | | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | | 240.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi | | 95,57 | Nilai | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah | 92,25 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | 11.225.000.000 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | | | | Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda | | 11,5 | % | | |
| | | | | | Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda | | 38,75 | % | | |
| | | | | | | Jumlah wirausaha muda mandiri | 10 | Orang | | |
| | | | | | | Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi | 75 | Orang | | |
| | Indeks Pembangunan Gender | 93,13 | Angka | | | | | | 1.060.000.000 | |
| | | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | 1.000.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha | | 35 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan | 65 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | 60.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha | | 35 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar | 20 | % | | |
| | Indeks Pembangunan Keluarga | 64,07 | Angka | | | | | | 2.456.060.000 | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | 977.550.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan | | 4,2 | per 100.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar | 22 | % | | |
| | | | | | | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | 75.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | | 73 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar | 20 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | 185.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | | 73 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya | 82,86 | % | | |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | 253.510.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | | 76 | Angka | | |
| | | | | | | Rasio korban kekerasan terhadap anak | 11,8 | per 100.000 penduduk | | |
| | | | | | | Persentase korban kekerasan anak terlayani | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | 195.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | Keluarga Berencana |
| | | | | | Angka Kelahiran Total (TFR) | | 2,12 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan | 57 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | 450.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Angka Kelahiran Total (TFR) | | 2,12 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) | 65,99 | % | | |
| | | | | | | Unmetneed | 9,9 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | 320.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha | | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan | 32 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| **PD3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan** | | | | | | | | | **129.488.609.000** | |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 75,68 | Angka | | | | | | 125.638.609.000 | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | 85.151.387.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
| | | | | | Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air | | 62,08 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air | 62,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik | 69,19 | % | | |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi | 69,11 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi | 52,41 | % | | |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 77,38 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 92,23 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 100 | % | | |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 62,7 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 34,8 | % | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan | 53,26 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal | | | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 100 | % | | |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 71,84 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 63,64 | % | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto | 50,08 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 100 | % | | |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 62,85 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 50 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 67,36 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 67,35 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 100 | % | | |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 72,65 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 76,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | 10.461.088.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | | | Persentase akses air minum aman | | 42,93 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses air minum layak | 93,94 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | 4.701.793.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
| | | | | | Persentase keterwujudan penataan ruang | | 64,07 | % | | |
| | | | | | | Persentase implementasi pemanfaatan ruang | 76 | % | | |
| | | | | | | Persentase tertib ruang | 48 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan rencana tata ruang | 69,29 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 434.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Indeks Pencemaran Air | | 3,35 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 2.353.388.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Indeks Pencemaran Air | | 3,35 | Angka | | |
| | | | | | Indeks SO2 dan NO2 | | 0,37 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase sungai yang meningkat kualitasnya | 4,76 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya | 2,85 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pengujian kualitas air | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemantauan kualitas udara | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | 745.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Indeks SO2 dan NO2 | | 0,37 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani | 2,02 | % | | |
| | | | | | | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden | 2,6 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | 50.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Indeks Pencemaran Air | | 3,35 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase limbah B3 yang terkelola | 80 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | 564.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Indeks Pencemaran Air | | 3,35 | Angka | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase rekomendasi lingkungan hidup | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan | 50 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | 1.305.113.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Indeks SO2 dan NO2 | | 0,37 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya | 11 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah | 40 | % | | |
| | | | | | | Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya | 25 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 200.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Indeks Pencemaran Air | | 3,35 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase pengaduan yang ditangani | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | 389.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Indeks SO2 dan NO2 | | 0,37 | Angka | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase sampah yang tertangani | 60 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | 1.586.048.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan | | 63 | % | | |
| | | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | 4 | % | | |
| | | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 2,93 | % | | |
| | | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | 7,8 | % | | |
| | | | | | | Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif | 5 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | 227.375.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan | | 63 | % | | |
| | | | | | | Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya | 50 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | 1.756.361.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan | | 63 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan | 70 | % | | |
| | | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | 2 | % | | |
| | | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | 2 | % | | |
| | | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 2 | % | | |
| | | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 61 | % | | |
| | | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | 61 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | 61 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | | 5.854.089.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Luas tutupan lahan | | 1.022.457 | Ha | | |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan | 45,99 | % | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani | 0,21 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1 | 0,01 | % | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2 | 0,02 | % | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3 | 0,01 | % | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4 | 0,05 | % | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5 | 0,02 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6 | 0,02 | % | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8 | 0,04 | % | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9 | 0,03 | % | | |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9 | 0 | % | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10 | 0,01 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi bibit | -90 | % | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11 | 0,02 | % | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7 | 0,03 | % | | |
| | | | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | | | 824.768.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Luas tutupan lahan | | 1.022.457 | Ha | | |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani | 10 | % | | |
| | | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif | 60 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura | 71 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | | 1.005.832.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Luas tutupan lahan | | 1.022.457 | Ha | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat | 2,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1 | 0,3 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2 | 0,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3 | 0,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4 | 0,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5 | 0,3 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6 | 0,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8 | 0,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9 | 0,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10 | 0,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11 | 0,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7 | 0,3 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | | | 328.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | | | | | Luas tutupan lahan | | 1.022.457 | Ha | | |
| | | | | | | Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani | 10 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | | 2.178.750.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | | | Indeks Ketersediaan Air Tanah | | 3,63 | Angka | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah | 27,6 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo | 1,7 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria | 3,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara | 1,9 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan | 2,3 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara | 4,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo | 1,9 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan | 2,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu | 1,7 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan | 2,8 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak | 3 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi | 2,9 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah | 1,7 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | | | | | 2.381.039.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | | | Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi | | 21,32 | % | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah | 91370,61 | SBM | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo | 78834,57 | SBM | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria | 78666,36 | SBM | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara | 39241,43 | SBM | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan | 330,4 | SBM | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara | 122,33 | SBM | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo | 45,88 | SBM | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan | 78758,11 | SBM | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu | 61,17 | SBM | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan | 39259,78 | SBM | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak | 30,58 | SBM | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) | 61,17 | SBM | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | terbangun di Wilayah Merapi | | | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah | 30,58 | SBM | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | | 3.141.578.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | | | | | Tingkat konsumsi tenaga listrik | | 807 | KWh/kapita | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah | 68,81 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo | 50,03 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria | 51,88 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara | 50,09 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan | 49,57 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara | 49,96 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo | 49,95 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan | 49,66 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu | 49,87 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan | 49,59 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak | 52,92 | % | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi | 49,64 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah | 49,21 | % | | |
| | Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana | 4,00 | % | | | | | | 3.850.000.000 | |
| | | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | 3.850.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya | | 4,02 | % | | |
| | | | | | Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa | | 0,54 | Angka | | |
| | | | | | Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi | | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya | 0,12 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan darurat bencana | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik | 11,43 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana | 10 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
| **PD4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif** | | | | | | | | | **11.404.360.100.000** | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi | 83,50 | Angka | | | | | | 11.404.360.100.000 | |
| | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | 10.175.320.587.000 | Seluruh Perangkat Daerah |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | |
| | | | | | Indeks Manajemen Risiko | | | | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | 38.166.603.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar | | 61,65 | % | | |
| | | | | | | Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah | 5,83 | % | | |
| | | | | | | Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis | 12,23 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | 5.335.641.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | | | | | Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar | | 61,65 | % | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi | 61,61 | % | | |
| | | | | | | Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi | 48,42 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | 570.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Skor kinerja penegakan produk hukum daerah | | 6,2 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase penegakan produk hukum daerah | 86,67 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | 98.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | | Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas) | | 12,6 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | 150.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 88 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi | 30 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | sistem informasi gender dan anak | | | | |
| | | | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | | | | | 380.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum | | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi penetapan lokasi | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | 570.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | | | Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria | | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | | 525.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria | | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | 220.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KIA, akta kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah | | 89 | % | | |
| | | | | | | Persentase penduduk yang memiliki KTP-el | 98 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | 210.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KIA, akta kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah | | 89 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98% | 99 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | 194.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KIA, akta kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah | | 89 | % | | |
| | | | | | | Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan | 66,67 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | 24.459.750.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya | | 100 | % | | |
| | | | | | | Nilai keterbukaan informasi publik | 33 | Angka | | |
| | | | | | | Nilai survey kepuasan komunikasi publik | 81 | Angka | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | 20.107.445.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | Indeks Domain Layanan SPBE | | 3,81 | Angka | | |
| | | | | | Indeks Domain Tata Kelola SPBE | | 3,2 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi | 74 | % | | |
| | | | | | | Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi | 47 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | 1.210.829.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah | | 64 | % | | |
| | | | | | | Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah | 48 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | 3.000.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) | | 638 | Angka | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80% | 50 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | 701.598.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi | | 95,57 | Nilai | | |
| | | | | | | Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya | 30,26 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pengunjung arsip | 79 | % | | |
| | | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | | 70.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | | | | Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi | | 95,57 | Nilai | | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip | 20 | % | | |
| | | | | | | Persentase arsip yang diselamatkan | 65,92 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | | 1.780.528.000 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah | | 80 | % | | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi | 70 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya | 88,57 | % | | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif | 91,84 | % | | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A | 78 | % | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB | 17,14 | % | | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A | 69,05 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | 92 | % | | |
| | | | | | | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan | 91,01 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | | 3.478.000.000 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat | | 90 | % | | |
| | | | | | | Tingkat efektivitas kerjasama daerah | 95 | % | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | 95 | % | | |
| | | | | | | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | 95 | % | | |
| | | | | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | 402.293.148.000 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan | | 90 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | kesejahteraan rakyat | | | | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar | 83 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar | 84 | % | | |
| | | | | | | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | 60 | % | | |
| | | | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | | 2.918.000.000 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat | | 90 | % | | |
| | | | | | | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | 97 | % | | |
| | | | | | | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji | 97 | % | | |
| | | | | | | Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani | 96 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | 96 | % | | |
| | | | | PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN | | | | | 4.775.260.000 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa | | 90 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian | 87 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | 85 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | 85 | % | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | 84 | % | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | 79 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan | 86 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha | 82 | % | | |
| | | | | | | Persentase nilai kemandirian BLUD | 56 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | 2.348.489.000 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa | | 90 | % | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa | 91 | % | | |
| | | | | | | Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik | 82 | % | | |
| | | | | | | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa | 82 | % | | |
| | | | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | | 2.040.000.000 | Sekretariat Daerah |
| | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah | | 80 | % | | |
| | | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBD | 98,8 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBN | 95,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase realisasi bantuan keuangan | 85 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah | 86 | % | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | 380.153.260.000 | Sekretariat DPRD |
| | | | | | Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD) | | 76 | % | | |
| | | | | | | Persentase layanan bagian humas | 95 | % | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi penyusunan raperda | 95 | % | | |
| | | | | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 5.900.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen | | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | perencanaan sesuai regulasi | | | | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | 7.080.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional | | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | 5.365.000.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | | | | | Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan | | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik | 89,86 | % | | |
| | | | | | | Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | 38.151.060.000 | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah | | -6,19 | % | | |
| | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain | | 3,19 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan | -50,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan | -21,25 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang | -26,61 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang | -9,37 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan | -11,07 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan | 13,51 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang | 7,95 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan | -4,14 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang | 27,65 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang | 14,95 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan | -21,27 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan | -14,86 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | -15,51 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora | -25,71 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora | -13,35 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora | 14,7 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | 22,18 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora | -12,98 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora | 13,64 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1 | -19,25 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang | -3,73 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo | -27,79 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1 | 4,34 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang | -19,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang | 4,69 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo | -7,4 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 | 13,17 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo | 20,16 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 | 22,97 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo | -6,91 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo | -15 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo | 24,22 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo | -19,22 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta | -33,21 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang | 9,37 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen | -18,43 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang | 22,26 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta | -21,91 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen | -7,41 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta | 12,61 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen | -6 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang | -13,05 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta | 13,93 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo | -3,04 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | -19,68 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | 23,06 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang | -8,82 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen | -13,13 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang | 7,36 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta | 22,23 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas | -15,84 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang | 9,48 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen | 23,1 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang | 13,37 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas | -11,67 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten | -15,94 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas | -10,17 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas | -20,88 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati | -19,95 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten | -23,07 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati | -26,44 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten | 21,86 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung | -14,54 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung | -13,52 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung | 22,05 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung | 19,39 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung | 23,49 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati | -6,74 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten | 7,6 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal | -50,2 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas | 13,46 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten | 23,02 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati | 20,59 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal | 3,51 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati | 21,39 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen | -22,46 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap | -18,87 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen | -16,11 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal | 78,96 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap | -10,5 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen | -4,52 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan | -15,78 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen | 6,99 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap | 2,39 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal | 19,19 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen | 21,89 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan | -9,14 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap | 31,53 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang | -5,76 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang | -22,48 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang | 22,01 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang | -20,07 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang | 24,35 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap | 13,57 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan | 21,52 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal | 13,68 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal | 2,02 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan | 15,03 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo | -17,6 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo | -14,9 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan | 13,66 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo | -16,09 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal | 12,3 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | -20,99 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang | -70 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang | -23,76 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang | -4,53 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang | -7,78 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang | 13,43 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal | 13,63 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara | -15,04 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | 23,04 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga | -24,1 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II | -29,99 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara | -27,32 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga | -12,72 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri | -27,34 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II | -12,96 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara | 20,9 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes | -3,72 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga | 22,29 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga | -9,8 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes | 9,72 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II | 20,9 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri | -7,55 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara | -35,43 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes | 13,3 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II | 18,67 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | 13,41 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri | 21,07 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara | 18,91 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | 15,75 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes | 12,68 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II | 13,55 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | 13,46 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara | -3,1 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes | 22,92 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus | -27,87 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar | -10,91 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara | -20,02 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar | -22,6 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus | -23,32 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar | -0,41 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus | -11,69 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | 23,37 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara | 21,93 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus | -15,9 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | 23,33 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | -20,05 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus | 13,63 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | 22,35 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali | -16,92 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali | -13,53 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali | 21,6 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali | -20,67 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali | 22,53 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III | -21,44 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III | -21,1401 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III | 20,46 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III | -12,41 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III | 22,22 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang | -28,09 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang | -18,37 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang | 22,35 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang | -14,76 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang | 21,97 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga | -33,96 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga | -19,7 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga | 2,58 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga | 22,59 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga | -20,31 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal | -8,84 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak | -15,64 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak | -12,89 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal | -6,82 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak | 5,28 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal | 32,23 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak | 14,09 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal | 11,16 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal | 22,83 | % | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak | 13,67 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor | 73 | % | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain | -5,54 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal | 11,08 | % | | |
| | | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | 10.157.000.000 | Badan Kepegawaian Daerah |
| | | | | | Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja | | 357,5 | Angka | | |
| | | | | | Nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi | | 75,5 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | 15.836.640.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | | | | | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi | | 17,34 | % | | |
| | | | | | Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi | | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan | 100 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan) | 3,5 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | 4.675.000.000 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | | | | | Persentase riset dan inovasi daerah yang diterapkan | | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan riset dan inovasi | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi | 100 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | | 3.992.880.000 | Badan Penghubung |
| | | | | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | | 85 | % | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan penghubung | 100 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | 6.073.727.000 | Inspektorat |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Level Kapabilitas APIP | | 3 | Level | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri | 84 | % | | |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu | 86 | % | | |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah | 86 | % | | |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah | 86 | % | | |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah | 86 | % | | |
| | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | 2.830.072.000 | Inspektorat |
| | | | | | Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah | | 3 | Angka | | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3 | 12,24 | % | | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3 | 12,24 | % | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | 3.865.113.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | | 3,01 | Angka | | |
| | | | | | | Indeks Ideologi Pancasila | 3,1 | Nilai | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | 50.923.529.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | | 2,8 | Angka | | |
| | | | | | | IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi | 76 | Nilai | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | 127.445.543.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | | 3,01 | Angka | | |
| | | | | | | Indeks kinerja ormas | 77,87 | Nilai | | |

| Prioritas Daerah | Indikator Sasaran Prioritas Daerah | Target | Satuan | Program Prioritas Daerah | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Program | Indikator Hasil Program/ Sasaran PD | Indikator Kinerja Program | Target | Satuan | Pagu Indikatif (Rp) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | 2.844.451.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | | 3,01 | Angka | | |
| | | | | | | Indeks toleransi | 74,3 | % | | |
| | | | | | | Indeks penguatan dampak ekonomi | 3,1 | % | | |
| | | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | 48.143.947.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | | 2,8 | Angka | | |
| | | | | | | Indeks kewaspadaan Nasional | 73,5 | Angka | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | **23.911.942.794.000** | |

### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan **tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, serta intensitas emisi gas rumah kaca (GRK). Target indikator sasaran pembangunan Nasional tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 - 5,5 persen;
b. Inflasi sebesar 1,5 – 3,5 persen;
c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5 - 5,0 persen;
d. Angka Kemiskinan sebesar 8,0 - 7,0 persen;
e. Rasio Gini sebesar 0,379 – 0,382;
f. Indeks Modal Manusia sebesar 0,56;
g. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 38,6 persen.

Dalam rangka menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Prioritas Nasional 1
   Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2
   Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3
   Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4
   Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5
   Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6
   Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Prioritas Nasional 7
   Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8
   Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RKPD Tahun 2025 disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025, sekaligus juga dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2025. Keselarasan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025 ditunjukkan dengan **keselarasan tema pembangunan, prioritas, sasaran dan indikator sasaran, dan targetnya**. Keselarasan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 4.4.**
**Keselarasan Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025**

| No | RKP Tahun 2025 | RKPD Tahun 2025 |
|---|---|---|
| **A** | **Tema Pembangunan** | |
| | Akselerasi Pertumbuhan **Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** | Peningkatan **perekonomian** daerah yang **berdaya saing dan berkelanjutan** didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter |
| **B** | **Prioritas** | |
| 1 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | PD4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif |
| 2 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | ▪ PD4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif<br>▪ PD1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas<br>▪ PD3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan |
| 3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | ▪ PD1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas |
| 4 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas | PD2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata |

| No | RKP Tahun 2025 | RKPD Tahun 2025 |
|---|---|---|
| 5 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | PD1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas |
| 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | PD1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas |
| 7 | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | PD4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif |
| 8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | ▪ PD2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata<br>▪ PD4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif |

*Sumber: Bappenas, 2024 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Tabel 4.5.**
**Keselarasan Target Sasaran Pembangunan Daerah Dalam RKPD Tahun 2025 Dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam RKP Tahun 2025**

| No | Indikator | Target Provinsi Sesuai RKP Tahun 2025 | Target RKPD Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,90 – 5,60 | 4,90 - 5,60 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,81 - 4,42 | 4,81 - 4,42 |
| 3 | Rasio Gini | 0,362 – 0,367 | 0,362 – 0,367 |
| 4 | Indeks Modal Manusia | 0,59 | 0,59 |
| 5 | Tingkat Kemiskinan (%) | 9,00 - 9,66 | 9,66 – 9,00 |
| 6 | Intensitas Emisi GRK (%) | 0,32 | 0,32 |

*Sumber: Bappenas, 2024 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Tabel 4.6.**
**Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah Dalam RKPD Tahun 2025 Dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2025**

| | Nasional (RKP Tahun 2025) | | Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Sasaran Pembangunan** | **Target Nasional Dalam RKP 2025** | **Sasaran Pembangunan Daerah** | **Target RKPD Tahun 2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PN1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | | | |
| 1 | Indeks Demokrasi Indonesia | 81,69 – 85,23 | Indeks Demokrasi Indonesia | 85,81 – 89,07 |
| | PN2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | | | |
| 1 | Asia Power Index (*Millitary Capability*) | 20 | Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah | Cukup Tangguh |
| 2 | Asia Power Index (*Diplomatic Influence*) | 61,54 | Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah | Sedang |
| 3 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Sendirian di Area Tempat Tinggalnya | 67,5 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 74,56 |
| 4 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) | 7,21 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) (%) | 9,37 |
| 5 | Indeks Ketahanan Energi | 6,77 | Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar) | 92,20 |
| | | | Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) | 806,76 |
| 6 | Kapasitas tampungan air ($m^3$/kapita) | 65,18 | Kapasitas Air Baku ($m^3$/detik) | 5,20 |
| | | | Persentase kondisi baik infrastruktur tampungan air kewenangan provinsi (%) | 64,31 |
| 7 | Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) | 39,20 | Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) | 39,46 |
| 8 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 12,5 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 12,50 |
| 9 | Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global | 43 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 6,00 |
| 10 | Indeks Ekonomi Hijau | 70,80 | Indeks Ekonomi Hijau | 62,23 |
| 11 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | 20,00 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | 21,32 |
| 12 | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | 24,00 (16,00 terdaur ulang) | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | 17,00 |

| | Nasional (RKP Tahun 2025) | | Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Sasaran Pembangunan** | **Target Nasional Dalam RKP 2025** | **Sasaran Pembangunan Daerah** | **Target RKPD Tahun 2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0,44 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0,482 |
| 14 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 76,68 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 75,68 |
| 15 | Persentase Penurunan Emisi GRK | | Persentase Penurunan Emisi GRK | |
| | - Tahunan (%) | 32,65 | Tahunan (%) | 5,65 |
| | - Kumulatif (%) | 28,12 | Kumulatif (%) | 12,35 |
| | PN3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | | | |
| 1 | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) | 1,44 | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah nonpertanian pada level provinsi (%) | 10,39 |
| 2 | Rasio kewirausahaan (%) | 3,14 | Rasio kewirausahaan daerah (%) | 3,21 |
| 3 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) | 1,26 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) | 2,00 |
| 4 | Rasio PDB Pariwisata (%) | 4,60 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 3,50 |
| | | | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang) | 66,81 |
| 5 | Devisa Pariwisata (miliar USD) | 22,10 | | |
| 6 | Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) | 7,92 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%) | 12,61 |
| 7 | Aset Perbankan /PDB (%) | 59,50 | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) | 25,29 |
| 8 | Aset Dana Pensiun/PDB (%) | 8,10 | Aset Dana Pensiun/PDRB (%) | 0,43 |
| 9 | Aset Asuransi/PDB (%) | 8,78 | | |
| 10 | Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) | 56,7 | Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan | 3.700.540,29 |
| 11 | Total Kredit/PDB (%) | 36,1 | Total Kredit/PDB (%) | 23,20 |
| 12 | Inklusi Keuangan (%) | 90,6 | Inklusi Keuangan (%) | 92,07 |

| | Nasional (RKP Tahun 2025) | | Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Sasaran Pembangunan** | **Target Nasional Dalam RKP 2025** | **Sasaran Pembangunan Daerah** | **Target RKPD Tahun 2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PN4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas | | | |
| 1 | Hasil Pembelajaran | | | |
| | a. Rata-rata nilai PISA | | Persentase kabupaten/ kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | |
| | i. Membaca | 396 | - Literasi Membaca (%) | 78,31 – 78,49 |
| | ii. Matematika | 404 | - Numerasi (%) | 37,28 – 37,46 |
| | iii. Sains | 416 | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | |
| | | | - Literasi Membaca (%) | 66,28 – 66,46 |
| | | | - Numerasi (%) | 49,76 – 49,95 |
| | b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) | 9,46 | Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) | 8,73 – 8,74 |
| | c. Harapan lama sekolah (tahun) | 13,37 | Harapan lama sekolah (tahun) | 13,07 |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) | 33,94 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 8,18 |
| 3 | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 66,78 | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 66,89 |
| 4 | Tingkat Penguatan Iptek: | | | |
| | a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (%PDB) | 0,30 | Kapabilitas Inovasi | 4,80 |
| | b. Peringkat Indeks Inovasi Global | 60 | | |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,50 – 5,00 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,81 – 4,42 |
| 6 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 56,30 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 59,80 |

| | Nasional (RKP Tahun 2025) | | Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Sasaran Pembangunan** | **Target Nasional Dalam RKP 2025** | **Sasaran Pembangunan Daerah** | **Target RKPD Tahun 2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Usia Harapan Hidup (tahun) | 74,43 | Usia Harapan Hidup (tahun) | 74,65 |
| 8 | Kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| | a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 122 | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 111 |
| | b. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 18,80 | Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 18,00 |
| 9 | Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | 272 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)* (%) | 92,00 |
| | | | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%) | 92,00 |
| 10 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) | 98 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) | 96,36 |
| 11 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) | 70,29 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) | 73,81 – 73,82 |
| 12 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,425 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,34 |
| | PN5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | | | |
| 1 | Rasio PDB Industri Pengolahan (%) | 19,9 - 20,0 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 33,88 – 34,06 |
| 2 | Pembentukan Modal Total Bruto (%PDB) | 30,1 - 30,2 | Pembentukan Modal Total Bruto (% PDRB) | 30,19 |
| 3 | Ekspor Barang dan Jasa (%PDB) | 21,0 – 21,6 | Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) | 10,97 |
| 4 | Biaya Logistik (%PDB) | 13,50 | | |
| | PN6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | | | |
| 1 | Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%) | 15 | | |
| 2 | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) | 43,19 | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%) | 39,97 |

| | Nasional (RKP Tahun 2025) | | Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Sasaran Pembangunan** | **Target Nasional Dalam RKP 2025** | **Sasaran Pembangunan Daerah** | **Target RKPD Tahun 2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%) | 22 | Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%) | 20,00 |
| 4 | Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%) | 44,34 | Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%) | 2,41 |
| 5 | Persentase desa mandiri (%) | 4 | Persentase desa mandiri (%) | 9,10 |
| 6 | Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 67,00 | Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 72,80 |
| | PN7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | | | |
| 1 | *Return on Asset* (ROA) BUMN (%) | 3,45 | *Return on Asset* (ROA) BUMN (%) | 1,44 |
| 2 | Indeks Integritas Nasional | 74,52 | Indeks Integritas Nasional | 80,97 |
| 3 | Indeks Materi Hukum | 0,51 | Indeks Reformasi Hukum | 79,10 |
| 4 | Indeks Pelayanan Publik | 3,68 | Indeks Pelayanan Publik | 4,28 |
| 5 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,00 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 4,28 |
| 6 | Indeks Persepsi Korupsi | 38 | | |
| 7 | Indeks Pembangunan Hukum | 0,69 | Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM | 65,00 |
| 8 | Rasio Perpajakan terhadap PDB (%) | 10,70 – 11,20 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 1,38 |
| 9 | Tingkat Inflasi (%) | 1,5 – 3,5 | Tingkat Inflasi (%) | 1,50 – 3,50 |
| | PN8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Kebudayaa (IPK) | 58,39 | Indeks Pembangunan Kebudayaa (IPK) | 62,24 – 62,31 |
| 2 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 76,77 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 78,65 – 79,20 |
| 3 | Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) | 0,137 | | |

*Sumber: Bappenas, 2024 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Tabel 4.7.**
**Dukungan Program Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025**
**Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025**

| No | Prioritas Nasional | Program Prioritas Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produuksi melalui peran aktif koperasi | | 330.885.730.000 |
| | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 38.166.603.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 129.159.390.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 5.335.641.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 130.646.680.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 779.100.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | 1.099.774.000 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 1.499.384.000 |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 734.908.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 1.606.604.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 3.494.064.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 2.578.582.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 6.200.000.000 |
| | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 5.660.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 550.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 3.375.000.000 |
| 2 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas | | 6.308.402.272.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 1.990.250.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 3.484.266.030.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Prioritas Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 896.000.000 |
| | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 1.250.000.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 1.120.000.000 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 404.763.705.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1.151.000.000 |
| | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 300.394.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.123.626.000 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 246.740.000 |
| | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 3.664.754.000 |
| | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 2.319.000.000 |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1.558.963.000 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 3.500.000.000 |
| | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 1.000.000.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 977.550.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 135.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 150.000.000 |
| | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 185.000.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 253.510.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 195.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 450.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 320.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 11.225.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 388.786.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1.400.000.000 |
| | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 240.000.000 |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 4.675.000.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Prioritas Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | | 56.024.642.000 |
| | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 1.236.000.000 |
| | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 3.865.113.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 50.923.529.000 |
| 4 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | | 20.708.459.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 560.640.000 |
| | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 1.612.500.000 |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 1.654.602.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 561.470.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 550.000.000 |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 607.333.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 238.250.000 |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 55.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 1.334.967.000 |
| | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 2.786.815.000 |
| | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 2.450.180.000 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 7.800.335.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 245.681.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 250.686.000 |
| 5 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | | 480.109.195.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 85.151.387.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Prioritas Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 16.919.053.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 674.105.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 4.701.793.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 1.520.000.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 1.750.000.000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 3.930.000.000 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 2.300.000.000 |
| | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | 380.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 570.000.000 |
| | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 525.000.000 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 434.000.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.353.388.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 745.000.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 50.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 564.000.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 1.305.113.000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 200.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 389.000.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 3.000.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 2.106.110.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 10.581.928.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Prioritas Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 14.581.048.000 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.756.361.000 |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 1.942.120.000 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 66.224.053.000 |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 7.160.000.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 38.283.154.000 |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 745.000.000 |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 14.317.982.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 5.854.089.000 |
| | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 824.768.000 |
| | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 1.005.832.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 328.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | 2.178.750.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | 2.503.054.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | 2.381.039.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 3.141.578.000 |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 1.143.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 127.445.543.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 48.143.947.000 |
| 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | | 189.910.581.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 25.290.000.000 |
| | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 3.765.000.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Prioritas Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 480.000.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 200.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 10.721.000.000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 200.000.000 |
| | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 72.868.427.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 70.447.160.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 460.000.000 |
| | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 349.824.000 |
| | | PROGRAM PENATAAN DESA | 20.850.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 602.000.000 |
| | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1.540.320.000 |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 2.705.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 261.000.000 |
| 7 | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan | | 16.078.297.540.000 |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 8.205.256.393.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 570.000.000 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 12.873.888.000 |
| | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 220.000.000 |
| | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 210.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 194.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 24.459.750.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 20.107.445.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 1.210.829.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 701.598.000 |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 70.000.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Prioritas Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 26.300.000 |
| | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 32.840.000.000 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 2.229.157.000 |
| | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | 1.780.528.000 |
| | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 2.335.000.000 |
| | | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 1.371.724.000 |
| | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 1.682.000.000 |
| | | PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN | 4.775.260.000 |
| | | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2.348.489.000 |
| | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2.040.000.000 |
| | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 380.153.260.000 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 5.900.000.000 |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 7.080.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 7.285.455.540.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 5.365.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 38.151.060.000 |
| | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 10.157.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 15.836.640.000 |
| | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | 3.992.880.000 |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 6.073.727.000 |
| | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 2.830.072.000 |
| 8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | | 447.604.375.000 |
| | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 3.850.000.000 |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 98.000.000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 3.584.500.000 |

| No | Prioritas Nasional | Program Prioritas Daerah | Pagu Indikatif (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 7.580.000.000 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 22.696.000.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 955.000.000 |
| | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 1.325.000.000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 3.750.000.000 |
| | | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 400.921.424.000 |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 2.844.451.000 |
| | | **TOTAL** | **23.911.942.794.000** |

### 4.2.4. Inovasi Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 dikembangkan berbagai inovasi kebijakan pemerintah daerah. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yaitu Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, serta mendukung pada kebijakan nasional tahun 2025. Inovasi kebijakan tersebut sebagai berikut.

**Lapak BUMDES**

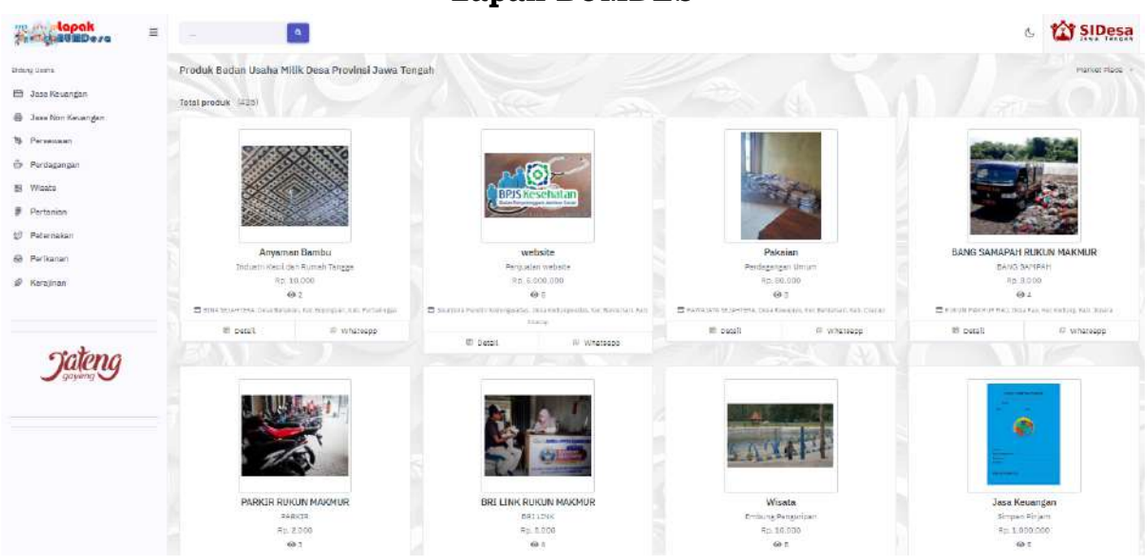


**Gambar 4.3**
***Platform* Lapak BUMDES pada Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi pembangunan aplikasi LAPAK BUMDES untuk menjawab permasalahan pemasaran bagi Badan Usaha Milik Desa dengan Klasifikasi dasar dan tumbuh sebagai sarana promosi dan penjualan produk barang/jasa. Harapannya ke depan dapat meningkatkan hasil penjualan produk barang/jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa yang pada akhirnya dapat mendukung pengurangan pengangguran dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan aplikasi dimaksud merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Desa (SIDESA) yang ada dengan penambahan fitur untuk LAPAK BUMDES.

Kegiatan pengembangan aplikasi SIDesa Jateng untuk pemasaran digital LAPAK BUMDES ini dimaksudkan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa secara digital melalui aplikasi Sistem Informasi Desa Jawa Tengah (SIDesa Jateng).

Tujuan inisiasi LAPAK BUMDES diantaranya adalah untuk penyediaan aplikasi berbasis *web* untuk sarana promosi dan penjualan produk Badan Usaha Milik Desa dan pengembangan aplikasi SIDesa Jateng dengan penambahan fitur layanan untuk meningkatkan penjualan produk Badan Usaha Milik Desa.

Kegiatan pengembangan aplikasi SIDesa Jateng untuk pemasaran digital LAPAK BUMDES dengan beberapa hal yang menjadi fokus yaitu:

a. Pencatatan data profil dan status badan hukum BUMDesa Jawa Tengah;
b. Pengelolaan data dan informasi produk BUMDesa Jawa Tengah dengan tampilan *market place*.

Adapun rincian ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

a. Mengidentifikasikan kebutuhan pengguna jasa melalui diskusi teknis;
b. Rancangan antarmuka aplikasi, dan rancangan informasi yang dihasilkan;
c. Modulasi prosedur, data, kebutuhan informasi;
d. Mengaplikasikan pengembangan fitur *profile* BUMDes dan lapak BUMDes pada sistem informasi desa berbasis *website* yang dapat bekerja pada *platform linux* serta *windows operation system*;
e. Melakukan testing *fitur profile desa* dan lapak bumdes pada aplikasi SIDesa;
f. Melaksanakan pelatihan dan asistensi seluruh modul serta *software* kepada pengguna dan administrator.

Metodologi dan pendekatan yang dipergunakan dalam pengembangan *fitur* dengan memperhatikan pengalaman pengguna (*experience user*), ketepatan dan kecermatan dalam perhitungan serta proses data. Kegiatan pengembangan *fitur profile* BUMDES dan lapak BUMDES akan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Analisis kebutuhan data dan perancangan objek data yang akan digunakan;
b. Perancangan kebutuhan data dengan memperhatikan aplikasi-aplikasi *existing*;
c. Perancangan sistem *frontend* dan *backend* aplikasi;
d. Pembuatan *Protype* Aplikasi;
e. *Application Development and Construction;*
f. *Data Modelling;*
g. *Selesai.*

# BAB V
# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota dengan karakteristik berbeda. Dalam pengembangannya diperlukan analisis pengembangan wilayah sebagai panduan dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Jawa Tengah akan menjadi rujukan dalam arah pembangunan kabupaten/kota dalam konteks pengembangan wilayah Jawa Tengah.

## 5.1. Arah Kebijakan Umum

Dalam menentukan arah kebijakan dalam pembangunan Kabupaten/kota, Provinsi Jawa Tengah mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam 10 (sepuluh) wilayah pengembangan (WP) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, pertimbangan daya saing daerah yang diukur dengan indeks daya saing daerah (IDSD) juga menjadi faktor untuk menentukan arah pembangunan kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2025. Kedua faktor ini diharapkan dapat mendorong pembangunan Jawa Tengah secara optimal tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Selaras dengan hal tersebut, pembangunan kabupaten/kota juga mempedomani aspek-aspek ekosistem inovasi, aspek penguat/*enabling environtment*, aspek SDM/*Human Capital*, dan aspek pasar/*market* yang diukur melalui pemetaan daya saing daerah (PDSD). Tujuan dari penggunaan pemetaan ini adalah memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah yang tidak hanya mempertimbangkan kondisi internal namun juga melihat secara komprehensif hubungan antara wilayah di Jawa Tengah dalam mewujudkan optimalisasi pembangunan sistem ekonomi wilayah.

## 5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, pengembangan wilayah Jawa Tengah diimplementasikan dengan pendekatan keterkaitan aspek fisik alam, sosial ekonomi, dan/atau budaya untuk mengoordinasikan pembangunan dan keterpaduan pengembangan. RTRW Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan bekelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan di Jawa Tengah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melakukan upaya mitigasi dan adaptasi dengan penanganan yang bersifat hulu-hilir. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan degradasi lingkungan yang menjadi ancaman di Jawa Tengah terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan tinggi dan sangat tinggi.

Sementara itu, pembangunan wilayah di Jawa Tengah diarahkan untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik

masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk memadukan fungsi budidaya dan lindung serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir.

Dalam upaya pemerataan pembangunan di Jawa Tengah, maka pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan/disparitas antarwilayah maupun di dalam wilayah dengan peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan; peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah; serta peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui strategi seperti ilustrasi pada Gambar 5.1 sebagai berikut:

a. Peningkatan sistem pusat pemukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan pedesaan;
b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah;
c. Peningkatan pelestarian kawasan lindung;
d. Pemanfaatan kawasan budidaya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;
e. Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah;
f. Pengembangan kawasan strategis provinsi; dan
g. Peningkatan kawasan pertahanan dan keamanan.

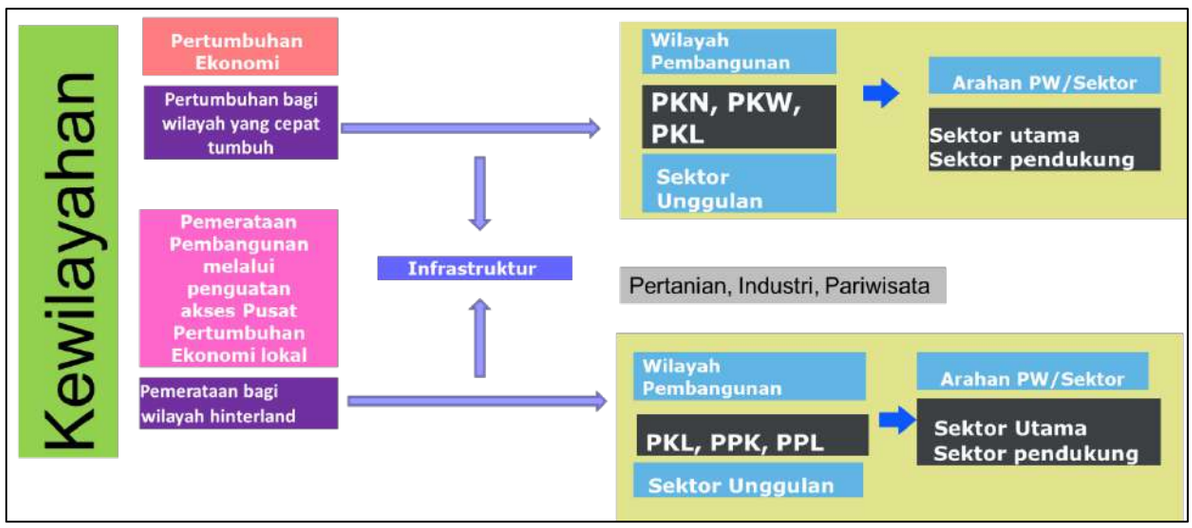


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.1.**
**Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah**

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa

pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Berikut 10 (sepuluh) Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. WP Kedungsepur yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kota Salatiga;
2. WP Jekuti yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati;
3. WP Banglor yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
4. WP Gelangmanggung yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang;
5. WP Wonobanjar yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
6. WP Keburejo yang terdiri dari 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
7. WP Cibalingmas yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banyumas;
8. WP Subosukawonosraten yang terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kota Surakarta;
9. WP Bregasmalang yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal;
10. WP Petanglong yang terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan.

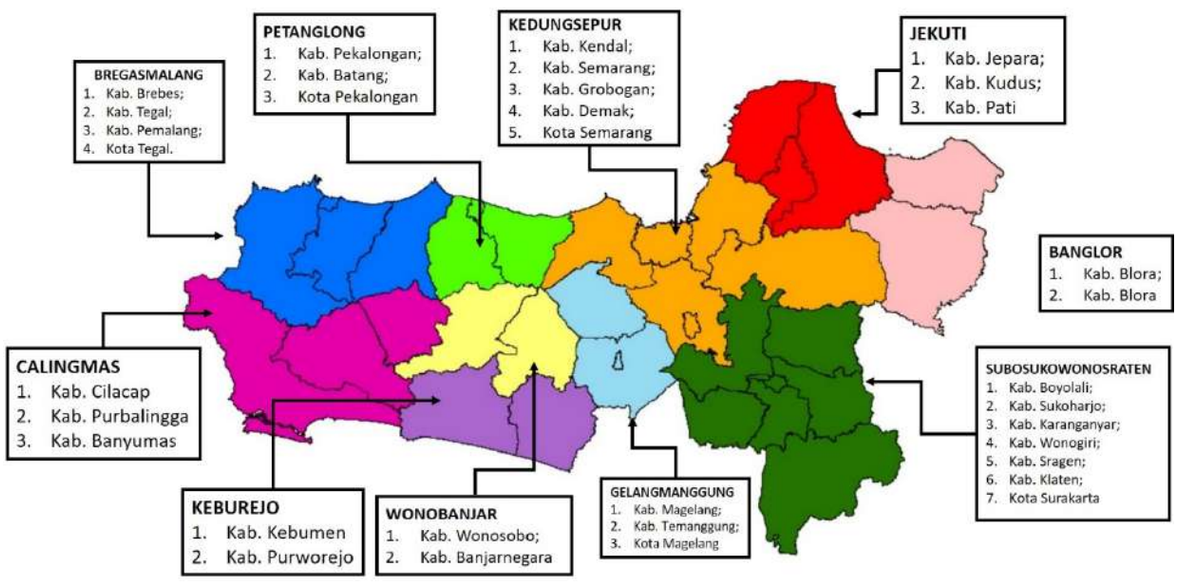


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.2.**
**Pembagian Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Tengah**

## 5.3. Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Kondisi umum wilayah yang dikaitkan dengan adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim, pengembangan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 4 (empat) koridor yaitu:

1. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan, pengendalian dan rehabilitasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana di sepanjang Koridor Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa;
2. Koridor yang dikembangkan dengan memantapkan pembangunan serta pengendalian di sepanjang koridor Semarang hingga Solo dan Koridor Jepara-Kudus-Rembang;
3. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan dengan mitigasi berada pada koridor Utara-Selatan di bagian barat Jawa Tengah di sepanjang Koridor Brebes hingga Cilacap dan koridor Rembang-Blora di bagian timur Jawa Tengah; dan
4. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan dan upaya konservasi karena merupakan bagian hulu di Jawa Tengah berada pada koridor wilayah tengah Jawa Tengah.

Empat koridor pembagian tersebut juga dioptimalkan untuk mendorong wilayah yang lambat berkembang serta mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah, dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, sistem perkotaan, dan interaksi antarwilayah.

## 5.4. Arahan Per Wilayah Pengembangan

Pengembangan 10 (sepuluh) WP bertujuan untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk, serta menciptakan pemerataan pembangunan berciri kuat terciptanya produk unggulan.

### 5.4.1. Wilayah Pengembangan Kedungsepur

Salah satu kegiatan prioritas Pemerintah Pusat adalah mewujudkan kota bertaraf internasional *(global city).* WP Kedungsepur diarahkan untuk mengelola kawasannya secara inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan dengan Kota Semarang sebagai sentral pertumbuhan. Berdasarkan capaian IPM tahun 2023, WP Kedungsepur menunjukan potensi tinggi dengan capaiannya di atas Jawa Tengah dan nasional. Dalam hal ini terdapat 1 (satu) kabupaten yang masih memerlukan upaya lebih yaitu Kabupaten Grobogan dengan capaian 71,49.

Selain itu, capaian kinerja pembangunan makro lainnya di Kedungsepur yang masih memerlukan perhatian karena dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah aspek penanganan pengangguran. Terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang di bawah TPT provinsi. Disparitas angka kemiskinan di WP Kedungsepur juga memerlukan perhatian, karena terdapat 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak yang angka kemiskinannya di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata WP. Secara lengkap capaian makro pembangunan di WP Kedungsepur Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.1.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Grobogan | 4,98 | 11,72 | 4,02 | 71,49 |
| 2 | Kab. Demak | 5,01 | 12,01 | 5,38 | 74,07 |
| 3 | Kab. Semarang | 4,74 | 7,17 | 4,05 | 75,13 |
| 4 | Kab. Kendal | 5,56 | 9,39 | 5,76 | 73,86 |

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kota Semarang | 5,79 | 4,23 | 5,99 | 84,43 |
| 6 | Kota Salatiga | 5,34 | 4,66 | 4,57 | 84,99 |
| Rata-Rata WP | | 5,24 | 8,19 | 4,96 | 76,56 |
| Jawa Tengah | | 4,98 | 10,77 | 5,13 | 73,39 |
| Nasional | | 5,05 | 9,36 | 5,32 | 74,39 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

**a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Kedungsepur**

Berdasarkan nilai total PDSD tahun 2023, sistem perwilayahan Kedungsepur memiliki nilai rata-rata 3,639. Adanya gap sebesar 3,3 antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Demak pada pilar akses keuangan karena persentase jumlah bank yang memberikan layanan pinjaman kepada dunia usaha serta persentase pertumbuhan kredit perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada UMKM untuk pengembangan usaha. Pada pilar dinamika bisnis terdapat 4 kabupaten/kota yang berada di bawah median Provinsi Jawa Tengah (3,96) diantaranya Kabupaten Kendal (3,25), Kabupaten Demak (3,54), Kota Salatiga (3,33), dan Kabupaten Grobogan (3,67). Pada pilar ketenagakerjaan terdapat 4 kabupaten/kota yang berada di bawah median Provinsi Jawa Tengah (4,00) di antaranya Kota Semarang (3,78), Kabupaten Demak (3,22), Kota Salatiga (3,61), dan Kabupaten Grobogan (3,39).

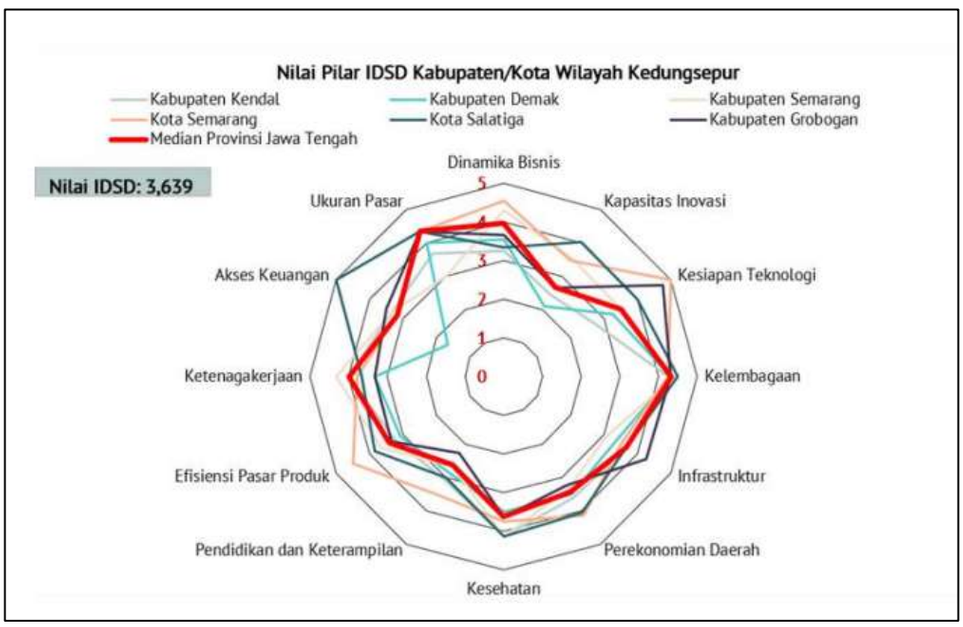


*Sumber: Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.3.**
**Nilai PDSD Kabupaten/Kota di WP Kedungsepur Tahun 2023**

Interaksi ekonomi wilayah yang terdapat di Kedungsepur terpusat pada interaksi daerah lainnya ke Kota Semarang. Hal ini karena peran Kota Semarang sebagai pusat distribusi konsumsi sektor-sektor unggulan di daerah Kedungsepur. Berdasarkan hal tersebut, interaksi ekonomi wilayah yang terjadi di Kedungsepur masih terpusat di Kota Semarang. Selain itu, Kota Semarang juga memiliki interaksi ekonomi dengan DKI Jakarta dan Surabaya. Interaksi pelayanan umum wilayah Kedungsepur juga kuat berada pada Kota Semarang. Selain itu interaksi

pelayanan umum dengan wilayah sekitar yang berdekatan juga terjadi. Kabupaten Kendal memiliki interaksi pelayanan umum yang lebih kuat terhadap Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Batang daripada ke Kota Semarang. Berdasarkan komoditas utama yang dihasilkan masing-masing wilayah, komoditas utama Kedungsepur didominasi oleh sektor industri pengolahan utamanya industri pengolahan makanan. Berikut penjabaran komoditas utama di Wilayah Pengembangan Kedungsepur.

1. Komoditas utama di Kabupaten Kendal berasal dari:
   a) sektor industri pengolahan berupa makanan;
   b) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi jagung, bawang merah, tebu, kambing, dan bandeng;
   c) sektor perdagangan besar dan eceran.
2. Komoditas utama di Kota Semarang berasal dari:
   a) sektor industri pengolahan;
   b) sektor konstruksi berupa pekerjaan gedung dan bangunan sipil;
   c) sektor perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor).
3. Komoditas utama di Kabupaten Semarang berasal dari:
   a) sektor industri pengolahan meliputi industri makanan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri pengolahan hasil pertanian;
   b) sektor konstruksi meliputi konstruksi bangunan gedung dan konstruksi bangunan sipil;
   c) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor meliputi *sparepart* kendaraan bermotor dan logam besi.
4. Komoditas utama di Kota Salatiga berasal dari:
   a) sektor industri pengolahan berupa industri makanan dan minuman;
   b) sektor konstruksi;
   c) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.
5. Komoditas utama di Kabupaten Demak berasal dari:
   a) sektor industri berupa industri makanan dan minuman (beras);
   b) sektor pertanian berupa industri 48 makanan dan minuman (beras);
   c) sektor perdagangan berupa perdagangan selain mobil dan sepeda motor.
6. Komoditas utama di Kabupaten Grobogan berasal dari:
   a) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi padi, jagung, kedelai;
   b) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
   c) sektor industri pengolahan berupa industri makanan.

**b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Kedungsepur**

Industri di Kedungsepur diarahkan pengembangannya pada kawasan industri Semarang, Kendal dan Demak berdasarkan prinsip mandiri, keberlanjutan, serta kelestarian alam. Selain itu, sektor pertanian terus dikembangkan utamanya pada kawasan penyangga disertai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah dan pencegahan *urban sprawl*. Dalam rangka peningkatan mobilitas transporatsi barang maka perlu upaya pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan pelabuhan darat *(dryport)* secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor Jawa Tengah serta upaya untuk mengurangi biaya logistik di Jawa Tengah. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata terus dilakukan secara terintegrasi di dalam dan antar kawasan serta mendorong kerjasama antar daerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling

menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana diberbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah.

Pada tahun 2025, pengembangan wilayah Kedungsepur diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.2.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2025**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Grobogan | 4,80-5,80 | 10,40-10,90 | 3,90-3,50 | 72,60 |
| 2 | Kab. Demak | 4.85-5,32 | 10,39-11,01 | 5,30-4,40 | 74,90 |
| 3 | Kab. Semarang | 4,90-5,60 | 6,21-6,80 | 3,95-3,70 | 75,96 |
| 4 | Kab. Kendal | 5,60-5,80 | 8,53-8,89 | 5,49-5,19 | 75,20-76,61 |
| 5 | Kota Semarang | 5,80-6,50 | 3,74-3,98 | 5,61-5,31 | 84,80-85,80 |
| 6 | Kota Salatiga | 5,40-6,10 | 4,24-4,52 | 4,49-4,19 | 85,69 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Target indikator makro pembangunan di atas merupakan agregat dalam mendukung capaian ditingkat provinsi yang memerlukan beberapa upaya penanganan secara terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Selain mengintegrasikan prioritas nasional yang telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, pada tahun 2025 arah pembangunan wilayah di WP Kedungsepur terdapat beberapa kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah yang akan diintervensikan di WP Kedungsepur.

Dalam upaya mencapai target-target makro pembangunan daerah, maka dilakukan intervensi dalam mendorong tercapainya indikator makro tersebut di antaranya adalah:

1. Menyediakan prasarana sarana di berbagai bidang meliputi:
   a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, fasilitas keselamatan, kinerja simpul transportasi dan integrasi antar moda transportasi;
   b. Air minum;
   c. Drainase.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
   a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
   b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;

c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.

3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantara dengan:
   a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
   b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
   c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
   d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up* digital berbasis komunitas;
   e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Kedungsepur untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut.

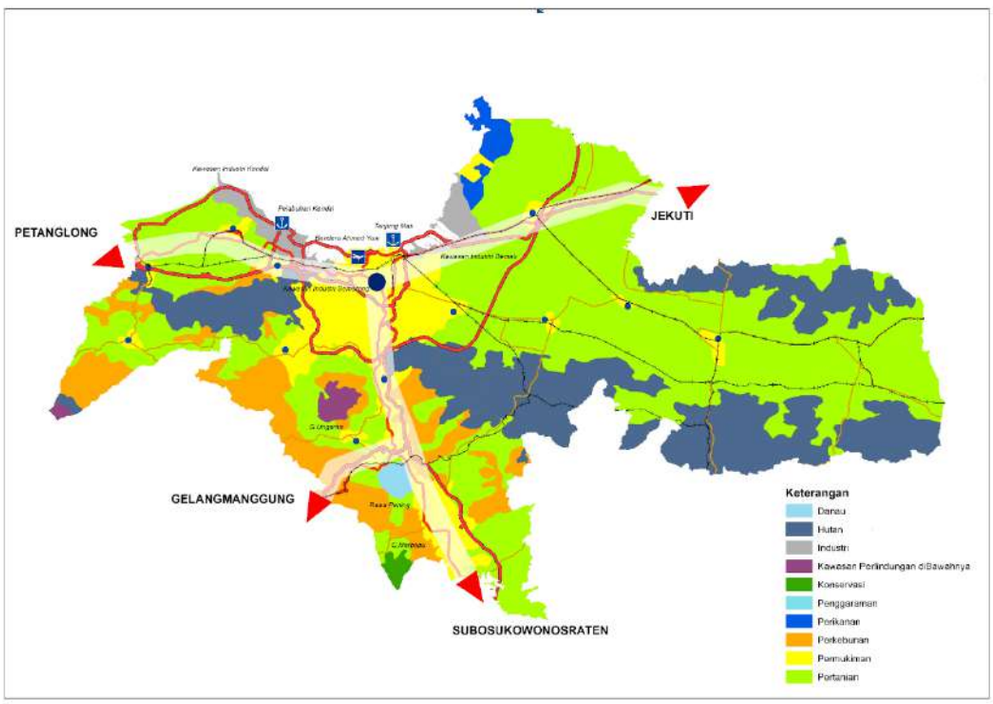


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.4.**
**Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur**

### 5.4.2. Wilayah Pengembangan Jekuti

Pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, WP Jekuti merupakan bagian dari WP Jekutibanglor besama dengan WP Banglor. Jekuti

merupakan wilayah pengembangan yang meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dam Kabupaten Jepara. Secara umum, WP ini menghadapi permasalahan di bidang pendidikan, perekonomian, dan sumber daya lingkungan yang menyebabkan angka kemiskinan masih tinggi sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Kondisi makro pembangunan wilayah Jekuti saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut.

**Tabel 5.3.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekuti Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Jepara | 5,17 | 6,61 | 3,35 | 73,85 |
| 2 | Kab. Kudus | 2,19 | 7,24 | 3,25 | 76,71 |
| 3 | Kab. Pati | 5,02 | 9,31 | 4,29 | 73,59 |
| Rata-Rata WP | | 4,13 | 7,72 | 3,63 | 74,47 |
| Jawa Tengah | | 4,98 | 10,77 | 5,13 | 73,39 |
| Nasional | | 5,05 | 9,36 | 5,32 | 74,39 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

Lokasi WP Jekuti berada di utara Jawa Tengah dengan potensi yang dapat dioptimalkan adalah perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, penyediaan akomodasi, penggalian dan pertambangan. Kawasan strategis yang ada di wilayah pengembangan ini adalah Kawasan Industri Rembang; Destinasi Pariwisata Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya; Kawasan Strategis Pariwisata Rembang–Lasem dan sekitarnya. Kawasan strategis ini dapat dijadikan daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan.

**a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Jekuti**

Penilaian PDSD untuk WP Jekuti dilakukan pada tahun 2023 dimana masih tergabung dalam WP Jekutibanglor. Berdasarkan nilai total PDSD tahun 2023, sistem perwilayahan Jekutibanglor memiliki nilai rata-rata 3,34.

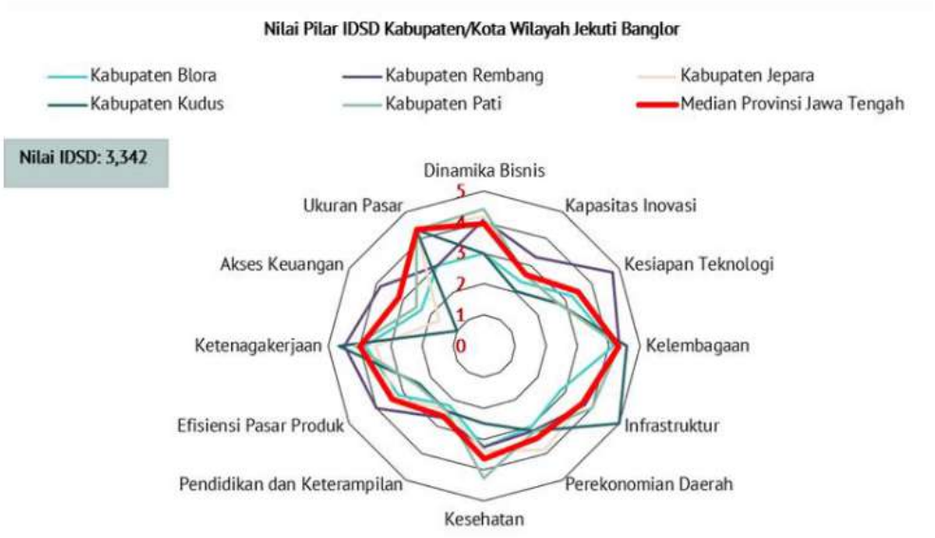


*Sumber: Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.5.**
**Nilai PDSD Kabupaten/Kota di WP Jekutibanglor Tahun 2023**

Interaksi kewilayahan yang saling melengkapi terjadi di beberapa kabupaten sekitar Kota Semarang dengan menciptakan jaringan ekonomi dan sosial yang kompleks. Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati menunjukkan interaksi yang kuat di antara mereka. Ketiganya juga memiliki keterkaitan yang signifikan dengan Kota Semarang, salah satunya di bidang pendidikan. Hal tersebut mencerminkan keberadaan pusat pelayanan pendidikan penting di kawasan ini

Kabupaten Kudus memiliki interaksi yang cukup kuat dengan wilayah di sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Demak dan Grobogan. Kabupaten Demak berperan sebagai penyedia tenaga kerja, memberikan kontribusi penting dalam memperkuat hubungan ekonomi di wilayah ini. Interaksi pelayanan umum juga membentuk pola yang berbeda di antara wilayah-wilayah ini.

**b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Jekuti**

Pengembangan wilayah Jekuti tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.4.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekuti Tahun 2025**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Jepara | 5,30 – 6,00 | 5,57-6,10 | 3,20 – 2,88 | 74,50 |
| 2 | Kab. Kudus | 2,30 – 3,00 | 5,75-6,76 | 3,15 – 2,65 | 77,22 – 78,02 |
| 3 | Kab. Pati | 5,10 – 5,80 | 8,37-8,90 | 4,04 – 3,74 | 74,69 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Arah pengembangan WP Jekuti antara lain untuk memadukan pembangunan kawasan perkotaan Kudus-Jepara-Juwana-Pati. Pengembangan pengelolaan industri khususnya kerajinan berada di Kabupaten Jepara, dan industri pengelolaan tapioka berada di Kabupaten Pati. Pengembangan sektor pertanian diupayakan melalui peningkatan kualitas dan produktivitas disertai dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah di kawasan ini. Sebagai kawasan yang memiliki ancaman bencana utamanya banjir, longsor dan kekeringan yang sangat tinggi maka perlu adanya upaya mitigasi bencana dalam setiap pembangunan. Selain itu perlu kerja sama antardaerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana diberbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah.

Sebagai upaya untuk mencapai pembangunan daerah yang tercapainya target-target makro, maka dilakukan intervensi dalam mendorong tercapainya indikator makro tersebut di antaranya adalah:

1. Menyediakan prasarana sarana di berbagai bidang meliputi:
   a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, fasilitasi layanan angkutan umum, fasilitas keselamatan dan kinerja simpul transportasi;
   b. Air minum;
   c. Drainase.

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
    a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
    b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
    c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
    d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
    e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
    f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui: pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantara dengan:
    a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
    b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
    c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
    d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up digital* berbasis komunitas;
    e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Jekuti untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut.

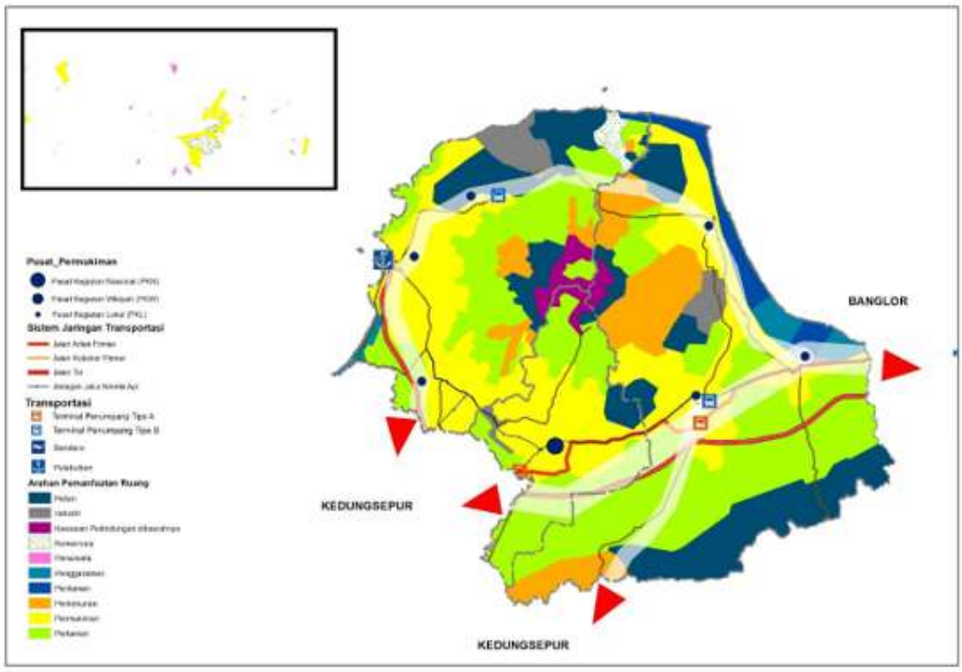


*Sumber: Analisis, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.6.**
**Arah Pengembangan Wilayah Jekuti**

### 5.4.3. Wilayah Pengembangan Banglor

Wilayah pengembangan yang terdiri dari Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora ini pada RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 tergabung dalam WP Jekutibanglor. Dalam perkembangannya, melihat pola interaksinya, WP Banglor berdiri sendiri. Permasalahan yang dihadapai oleh WP ini adalah masih tingginya angka kemiskinan dan capaian IPM yang masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

**Tabel 5.5.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Banglor Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Rembang | 5,20 | 14,17 | 3,10 | 70,63 |
| 2 | Kab. Blora | 3,10 | 11,49 | 2,60 | 71,89 |
| Rata-Rata WP | | 4,15 | 12,83 | 2,85 | 71,26 |
| Jawa Tengah | | 4,98 | 10,77 | 5,13 | 73,39 |
| Nasional | | 5,05 | 9,36 | 5,32 | 74,39 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

#### a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Banglor

Penilaian PDSD WP Banglor masih tergabung dalam penilaian WP Jekutibanglor. Penilaian tersebut mengidentifikasikan bahwa di wilayah ini masih terdapat gap dalam pilar akses keuangan karena persentase pertumbuhan kredit (perbankan, LKBB, LKM) kepada UMKM dan petani/nelayan dan modal ventura bagi struktur permodalan koperasi. Di sisi lain, interaksi antara Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora menunjukkan pola yang berbeda. Meskipun interaksi di antara keduanya cukup kuat, Kabupaten Blora lebih cenderung berinteraksi dengan wilayah Bojonegoro, Ngawi, dan Tuban. Sementara itu,

Kabupaten Rembang tetap memiliki interaksi yang cukup kuat dengan Kabupaten Jepara, khususnya dalam konteks industri mebel.

**b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Pengembangan Banglor**

Pengembangan wilayah Banglor untuk tahun 2025 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.6.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Banglor Tahun 2025**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Rembang | 5,20 – 6,00 | 12,68-13,10 | 2,53 – 2,23 | 72,47 |
| 2 | Kab. Blora | 3,40 – 4,10 | 9,97-10,57 | 3,00 – 2,70 | 71,80 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah,2024*

Dalam upaya mendorong pencapaian indikator tersebut, maka arah pengembangan wilayah WP Banglor diarahkan dengan:

1. mendorong pengembangan kawasan perkotaan Rembang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah;
2. mendorong kawasan perkotaan Cepu dan sekitarnya sebagai pusat bisnis pertambangan minyak dan gas bumi skala internasional;
3. mengembangkan pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan di Kabupaten Rembang;
4. meningkatkan aksesibilitas pusat ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
5. meningkatkan prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian tanaman; dan
6. menerpadukan pembangunan wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.

Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan upaya untuk mendorong beberapa hal seperti: 1) kawasan perkotaan Cepu dan sekitarnya sebagai pusat bisnis pertambangan minyak dan gas bumi berskala Internasional, 2) pengembangan industri di Kabupaten Rembang dan Blora, 3) pengembangan kawasan riset dan pengolahan air laut di Kabupaten Rembang, 4) pengembangan Bandara Ngloram, serta 5) mengembangkan pelabuhan umum dan perikanan di Kabupaten Rembang. Pada sektor pertanian perlu upaya peningkatan prasarana dan sarana dalam rangka untuk peningkatan produktivitas pertanian tanaman di Kawasan WP Banglor.

Intervensi perlu dilakukan dalam mendorong terlaksananya pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu upaya yang dilakukan di antaranya adalah:

1. Menyediakan prasarana sarana di berbagai bidang meliputi:
   a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, fasilitasi layanan angkutan umum, fasilitas keselamatan dan kinerja simpul transportasi;
   b. Air minum;
   c. Drainase.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:

a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.

3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantara dengan:
   a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
   b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
   c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
   d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up digital* berbasis komunitas; dan
   e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Banglor untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut.

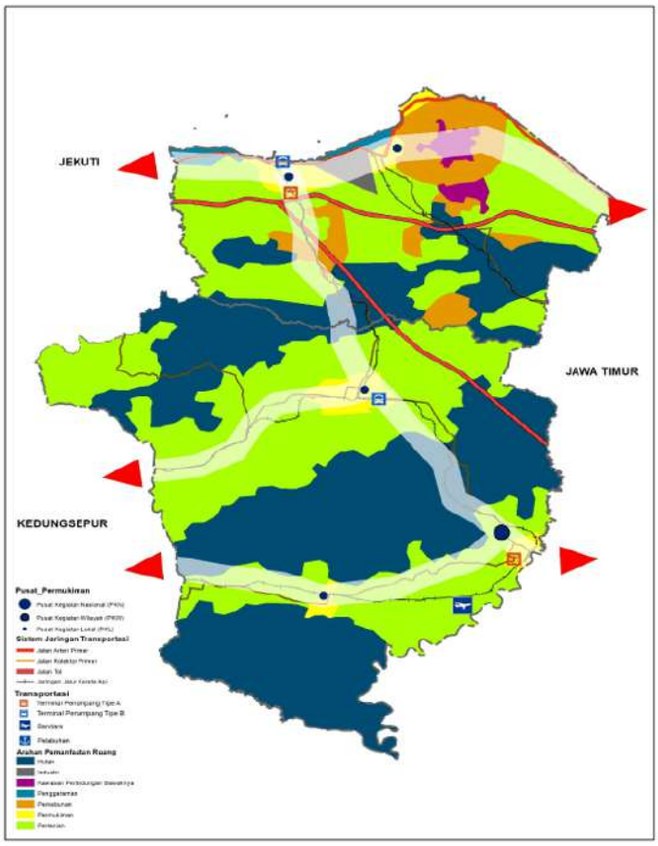


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.7.**
**Arah Pengembangan Wilayah Banglor**

### 5.4.4. Wilayah Pengembangan Gelangmanggung

Pada RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang tergabung dalam WP Purwomanggung. Pada perkembangannya, ketiga kabupaten/kota ini disatukan dalam WP tersendiri yang disebut dengan WP Gelangmanggung untuk lebih mengoptimalkan pembangunan daerahnya.

Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung capaian IPM masih di bawah capaian Provinsi dan Nasional, namun Kota Magelang sudah lebih baik mencapai 81,17. Sedangkan untuk angka kemiskinan Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang melaju lebih baik penurunannya dibanding provinsi dan nasional, untuk Kabupaten Magelang membutuhkan upaya lebih untuk menurunkan angka kemiskinan.

**Tabel 5.7.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Gelangmanggung Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Magelang | 5,04 | 10,96 | 4,42 | 71,56 |
| 2 | Kab. Temanggung | 5,00 | 9,26 | 2,32 | 71,33 |
| 3 | Kota Magelang | 5,45 | 6,11 | 5,25 | 81,17 |
| Rata-Rata WP | | 5,16 | 8,77 | 3,99 | 72,00 |
| Jawa Tengah | | 4,98 | 10,77 | 5,13 | 73,39 |
| Nasional | | 5,05 | 9,36 | 5,32 | 74,39 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

**a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Gelangmanggung**

Penilaian PDSD tahun 2023 yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah terhadap WP Gelangmanggung masih disatukan penilaiannya dengan WP Purwomanggung. persentase pertumbuhan kredit perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada UMKM untuk pengembangan usaha, persentase pertumbuhan kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada petani dan/atau nelayan, serta pertumbuhan nilai ekspor. Pada pilar dinamika bisnis, pilar kapasitas inovasi, pilar pendidikan dan keterampilan, pilar efisiensi pasar produk terdapat 3 kabupaten/kota yang berada di bawah median Provinsi Jawa Tengah.

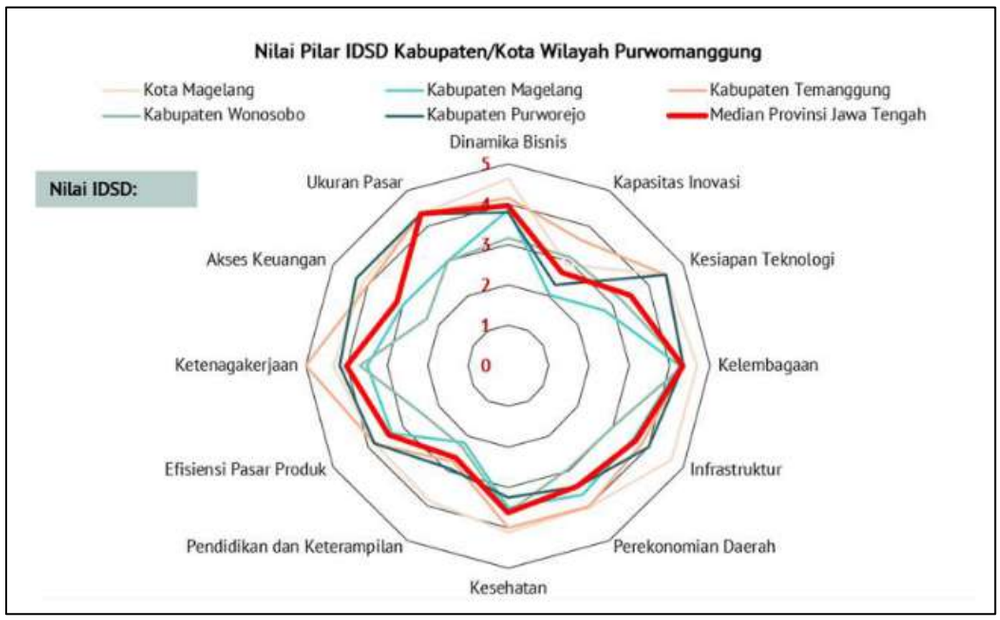


*Sumber: Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.8.**
**Nilai PDSD Kabupaten/Kota di WP Purwomanggung Tahun 2023**

Potensi komoditas utama pada WP Gelangmanggung dioptimalkan guna pelaksanaan pembangunan wilayah. Komoditas utama masing-masing daerah sebagai berikut:

1. Komoditas utama di Kabupaten Magelang berasal dari:
   a) sektor industri meliputi industri makanan dan minuman;
   b) sektor pertanian meliputi tanaman hortikultura tahunan dan lainnya;
   c) sektor perdagangan meliputi perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor.
2. Komoditas utama di Kabupaten Temanggung berasal dari:
   a) Sektor pengolahan meliputi Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau;
   b) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, produk perikanan dan penebangan kayu hutan;
   c) sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor.
3. Komoditas utama di Kota Magelang berasal dari:
   a) sektor konstruksi;
   b) industri;
   c) pengolahan;

d) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor berupa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

**b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Gelangmanggung**

Pengembangan wilayah Gelangmanggung untuk tahun 2025 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.8.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Gelangmanggung Tahun 2025**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Magelang | 5,20 – 5,90 | 9,67-10,55 | 4,25 – 3,89 | 71,90 – 72,89 |
| 2 | Kab. Temanggung | 5,28 | 8,70 - 9,00 | 2,30 – 2,17 | 72,76 |
| 3 | Kota Magelang | 5,50 – 6,20 | 5,00 - 5,7 | 5,02 – 4,72 | 82,05 – 82,23 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Pengembangan WP Gelangmanggung antara lain untuk melestarikan kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi – Merbabu - Telomoyo dan Gunung Sindoro – Sumbing yang terintegrasi dengan destinasi wisata unggulan Kabupaten/Kota yang mempertimbangkan kelestarian budaya, kelestarian alam, penggunaan energi terbarukan, dan kesejahteraan masyarakat. Kawasan perkotaan didorong pengembangannya pada koridor Muntilan – Mungkid - Kota Magelang – Secang - Temanggung disertai dengan pengembangan wilayah yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan risiko bencana alam seperti erupsi gunung api dan gempa bumi. Selain itu dilakukan upaya untuk peningkatan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyengga kebutuhan wilayah sekitarnya, pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian dan kehutanan dan dengan tetap memperhatikan kelestasian alam. Pada kawasan perbatasan provinsi Jawa Tengah – DIY dilakukan penyelarasan pembangunan serta mendorong kerjasama kerjasama antar daerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan.

Sebagai upaya untuk mencapai pembangunan daerah yang tercapainya target-target makro, maka dilakukan intervensi dalam mendorong tercapainya indikator makro tersebut di antaranya adalah:

1. Menyediakan prasarana sarana di berbagai bidang meliputi:
   a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, fasilitas keselamatan, dan kinerja simpul transportasi;
   b. Air minum;
   c. Persampahan;
   d. Drainase.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
   a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri

dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);

b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.

3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantara dengan:
   a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
   b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
   c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
   d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up* digital berbasis komunitas;
   e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Gelangmanggung untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut:

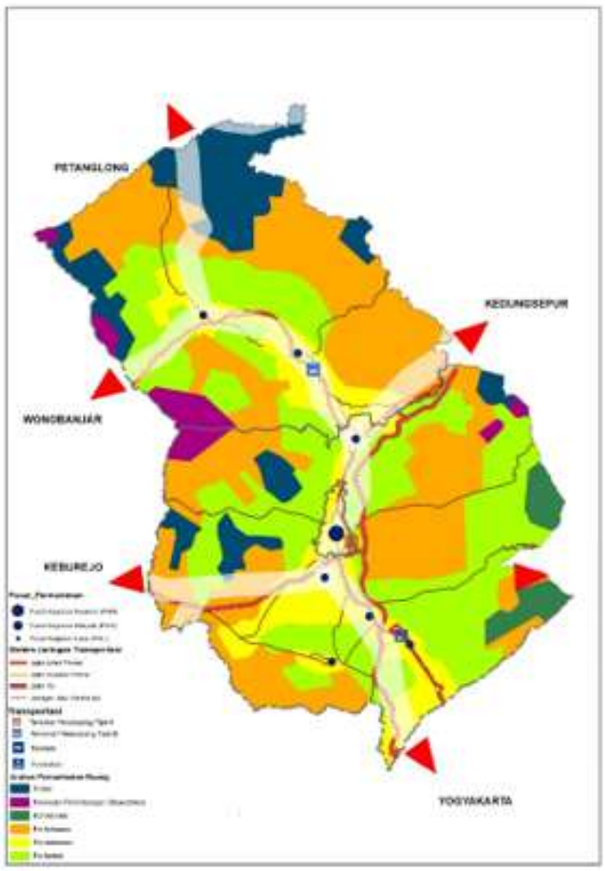


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.9.**
**Arah Pengembangan Wilayah Gelangmanggung**

### 5.4.5. Wilayah Pengembangan Wonobanjar

RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 belum memuat WP Wonobanjar yang terdiri dari Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Kedua kabupaten ini sebelumnya tergabung dalam WP lainnya, Kabupaten Wonosobo berada pada WP Puwomanggung dan Kabupaten Banjarnegara tergabung dalam WP Barlingmascakeb. Pada perkembangannya kedua kabupaten ini disatukan dalam WP tersendiri sesuai karakteristik dan agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Capaian indikator makro WP Wonobanjar memerlukan upaya kuat untuk ditingkatkan mengingat semua indikator dibawah capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi angka kemiskinan yang menunjukan gap yang cukup jauh dari capaian rata-rata nasional dan provinsi yaitu 15,58 untuk Kabupaten Wonosobo dan 17,90 untuk Kabupaten Banjarnegara.

**Tabel 5.9.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Wonobanjar Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Wonosobo | 5,04 | 10,96 | 4,42 | 71,56 |
| 2 | Kab. Banjarnegara | 5,00 | 9,26 | 2,32 | 71,33 |
| Rata-Rata WP | | 4,68 | 15,24 | 5.60 | 69,63 |
| Jawa Tengah | | 4,98 | 10,77 | 5,13 | 73,39 |
| Nasional | | 5,05 | 9,36 | 5,32 | 74,39 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

**a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Wonobanjar**

Angka kemiskinan, angka pengangguran, dan IPM Kabupaten Banjarnegara masih berada dibawah rata-rata provinsi, meskipun demikian terdapat berbagai potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan. Ekosistem inovasi dapat dimanfaatkan sebagai *leading actor* dalam inovasi daerah sehingga mendorong pengembangan kolaborasi eksternal melalui interaksi wilayah untuk menciptakan iklim inovasi. Sedangkan komoditas utama di Kabupaten Wonosobo berasal dari sektor pertanian meliputi hortikultura dan olahan kayu, sektor industri pengolahan meliputi makanan olahan dan kerajinan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

**b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Pengembangan Wonobanjar**

Pengembangan wilayah Wonobanjar pada tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.10.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Wonobanjar Tahun 2025**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Wonosobo | 4,30 – 5,10 | 13,45-14,20 | 4,00 – 3,00 | 71,37 |
| 2 | Kab. Banjarnegara | 4,80 – 5,70 | 12,46-13,64 | 6,10 – 5,72 | 70,55 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2024*

Arah pengembangan wilayah Wonobanjar diarahkan kepada peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu serta sebagai kawasan penyangga di sekitarnya. Dalam rangka mendorong pengembangan KSPN Dieng dan *Geopark* Dieng perlu dikakukan peningkatan akses kawasan serta kualitas destinasi wisata dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah. Pengembangan pusat permukiman dan perekonomian diarahkan melalui pengembangan koridor kawasan perkotaan Kertek – Wonosobo – Banjarnegara - Klampok dengan memperhatikan fungsi antar kawasan serta upaya mitigasi bencana alam seperti erupsi gunung api dan gerakan tanah. Peningkatan produksi hasil pertanian dan kehutanan terus dilakukan pada wilayah ini karena berfungsi sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya serta mengembangkan sektor industri hasil pertanian, kehutanan di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara bagian selatan serta Pengadaan Listrik dan Gas dari energi terbarukan antara lain air, panas bumi dan gas rawa.

Dalam rangka tercapainya target-target makro pembangunan daerah, maka WP Wonobanjar perlu melakukan intervensi dalam mendorong ketercapaian tersebut di antaranya melalui:

1. Menyediakan sarana prasarana di berbagai bidang meliputi:
   a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, fasilitasi layanan angkutan umum, fasilitas keselamatan dan kinerja simpul transportasi;
   b. Air minum;
   c. Drainase.

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
   a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
   b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
   c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
   d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
   e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
   f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantara dengan:
   a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
   b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
   c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
   d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up* digital berbasis komunitas;
   e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

### 5.4.6. Wilayah Pengembangan Keburejo

Selain WP Wonobanjar, WP Keburejo juga merupakan pembentukan baru dari WP yang semula berasal dari WP Barlingmascakeb dan Purwomanggung. Pada wilayah ini permasalahan utama yang dihadapi masih terkait kemiskinan. Capaian angka kemiskinan pada wilayah ini lebih tinggi daripada nasional dan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 16,34 untuk Kabupaten Kebumen dan 11,33 untuk Kabupaten Purworejo. Capaian IPM kedua kabupaten lebh baik daripada capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 5.11.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Keburejo Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%)*) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kebumen | 5,66 | 16,34 | 5,11 | 71,88 |
| 2 | Kab. Purworejo | 5,07 | 11,33 | 4,02 | 74,35 |
| Rata-Rata WP | | 5,37 | 13,83 | 4,56 | 73,92 |
| Jawa Tengah | | 4,98 | 10,77 | 5,13 | 73,39 |
| Nasional | | 5,05 | 9,36 | 5,32 | 74,39 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

**a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Keburejo**

Pada tahun 2023, penilaian PDSD Kabupaten Kebumen masih tergabung dalam WP Barlingmascakeb sedangkan Kabupaten Purworejo masih dinilai bersama dengan WP Purwomanggung. Potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kebumen yaitu pilar kesiapan teknologi karena proporsi rumah tangga yang mengakses internet dan produk inovasi teknologi sudah dikomersialisasikan. Sedangkan Kabupaten Purworejo memiliki peran dalam membentuk daya saing daerah yaitu pada faktor market/pasar.

Interaksi ekonomi di wilayah terpusat pada interaksi dengan Provinsi DI. Yogyakarta karena kedekatan geografis. Komoditas utama di Kabupaten Purworejo berasal dari (1) sektor pertanian meliputi padi, ubi kayu, dan kelapa; (2) sektor industri meliputi olahan kayu, gula kelapa, makanan dan minuman, VCO, kecap, keripik, dan klanting; (3) sektor perdagangan meliputi beras, kelapa, dan pisang.

Kondisi daya saing wilayah Keburejo ini memiliki kelemahan pada beberapa indikator, antara lain:

1) rendahnya komersialisasi terhadap inovasi teknologi;
2) kurangnya kolaborasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi; serta
3) rendahnya pendapatan daerah.

Di samping itu, masyarakat Keburejo memiliki ciri tingkat pendidikan yang rendah, namun berkeahlian (*skilled*). Dukungan Pemerintah untuk peningkatan *skill* melalui sekolah vokasi dan Balai Latihan Kerja sangat tinggi. Dengan memperhatikan potensi pengembangan perdagangan dan jasa pada wilayah ini, maka diperlukan program yang mampu mengungkit tingkat pendidikan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada penguasaan IPTEK. Di samping itu, perlu program peningkatan kreativitas untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta riset dan inovasi teknologi juga perlu diarahkan pada penguatan hilir untuk mendorong peningkatan komersialisasi. Selain itu juga perlu penguatan kolaborasi, khususnya dengan perguruan tinggi lokal untuk peningkatan inovasi dan teknologi.

**b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Keburejo**

Pengembangan wilayah Keburejo untuk tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.12.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Keburejo Tahun 2025**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kebumen | 5,40 – 6,30 | 13,90-14,71 | 4,98 – 4,55 | 72,45 |
| 2 | Kab. Purworejo | 5,16 – 6,16 | 9,04-10,22 | 3,11 | 75,04 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Arah pengembangan wilayah Keburejo diarahkan kepada perwujudan perkotaan Kebumen sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, serta menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo - Kutoarjo dengan kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kabupaten Kulon Progo sebagai koridor pengembangan ekonomi. Pengembangan wisata diarahkan pada koridor Kebumen – Purworejo – Borobudur – Magelang dan koridor wisata pantai - *geopark* Karangsambung Karangbolong - KSPN Dieng sebagai pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai disertai dengan peningkatan aksesibilitas. Kawasan industri diprioritaskan di Kabupaten Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otoritas Borobudur dengan fokus pada pengembangan industri manufaktur dan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam dan pengembangan wilayah serta upaya mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah.

Dalam rangka mencapai target indikator makro pembangunan dalam mendukung agregat makro capaian ditingkat provinsi, sehingga diperlukan beberapa upaya penanganan terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Berikut upaya yang dapat dilakukan sebagai strategi dalam mendorong tercapainya indikator makro di antaranya adalah:

1. Menyediakan sarana prasarana di berbagai bidang meliputi:
   a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, fasilitas keselamatan, kinerja simpul transportasi (pembangunan terminal) dan integrasi antar moda transportasi (terminal dan stasiun);
   b. Air minum;
   c. Drainase.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
   a. Meningkatkan enciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
   b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
   c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;

d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.

3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, diantaranya dengan:
   a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
   b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
   c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
   d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan start up digital berbasis komunitas;
   e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Keburejo untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut.

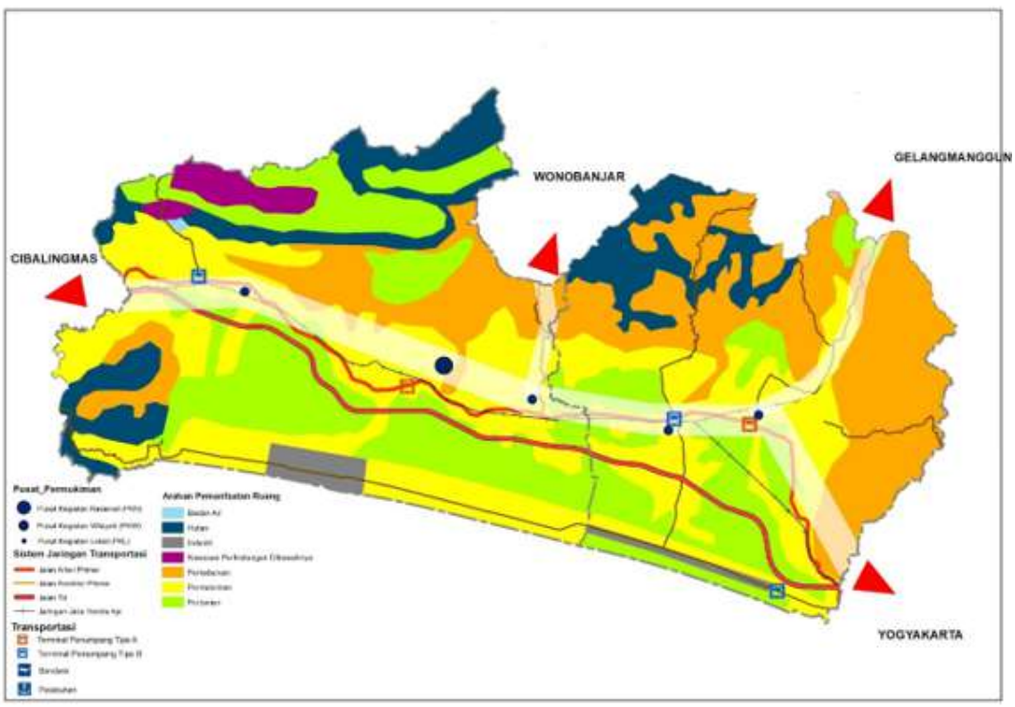


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.10.**
**Arah Pengembangan Wilayah Keburejo**

### 5.4.7. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten

WP Subosukowonosraten sebagai salah satu lokus penompang *global city* di Jawa Tengah selain WP Kedungsepur. Dalam pengembangannya difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi pada RPJPN 2025 – 2045 dengan Kota Surakarta sebagai pusatnya. Secara umum, capaian IPM pada WP

Subosukawonosraten telah melampaui capaian nasional dan provinsi Jawa Tengah, untuk Kabupaten Wonogiri masih perlu upaya lebih dengan IPM berada pada capaian 71,97. Tingkat Pengangguran Terbuka keseluruhan kabupaten/ kotanya sudah lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Beberapa kabupaten tercatat masih memerlukan upaya serius untuk mengurangi kemiskinan karena capaian persentase angka kemiskinan masih di atas provinsi terutama di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

**Tabel 5.13.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali | 5,63 | 9,81 | 4,05 | 75,41 |
| 2 | Kab. Sukoharjo | 5,06 | 7,58 | 3,40 | 78,65 |
| 3 | Kab. Karanganyar | 5,53 | 9,79 | 4,35 | 77,31 |
| 4 | Kab. Wonogiri | 4,98 | 10,94 | 1,92 | 71,97 |
| 5 | Kab. Sragen | 5,23 | 12,87 | 3,87 | 75,10 |
| 6 | Kab. Klaten | 5,70 | 12,28 | 4,20 | 77,59 |
| 7 | Kota Surakarta | 5,57 | 8,44 | 4,58 | 83,54 |
| Rata-Rata WP | | 5,36 | 10,24 | 3,76 | 76,58 |
| Jawa Tengah | | 4,98 | 10,77 | 5,13 | 73,39 |
| Nasional | | 5,05 | 9,36 | 5,32 | 74,39 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

**a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten**

Kabupaten/kota di WP Subosukawonosraten menunjukan kenaikan indeks daya saing daerah yang cukup positif dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota di WP lainnya. Berdasarkan nilai total PDSD tahun 2023, sistem perwilayahan Subosukawonosraten di posisi tertinggi dengan nilai rata-rata 3,818. Terdapat gap sebesar 3,48 antara Kota Surakarta dengan Kabupaten Karanganyar pada pilar kapasitas inovasi, sehingga diperlukan kolaborasi pengembangan teknologi dan inovasi, serta produk penelitian dan pengembangan (jumlah penelitian, intelektual, dan paten). Pada pilar akses keuangan terdapat 5 kabupaten/kota yang berada di bawah median Provinsi Jawa Tengah (3,17) di antaranya Kabupaten Wonogiri (3,00), Kabupaten Boyolali (2,50), Kabupaten Sukoharjo (2,33), Kabupaten Klaten (1,00), Kabupaten Karanganyar (2,83).

*Sumber: Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.11.**
**Nilai Dimensi IDSD Kabupaten/Kota di WP Subosukawonosraten**

Interaksi ekonomi wilayah yang terdapat di Subosukawonosraten, dengan interaksi kuat terjadi pada Pusat Perkotaan Surakarta. Namun, interaksi kolaborasi sektor yang tertinggi PDRB juga terjadi dengan daerah lainnya pada sistem perwilayahan. Contohnya pada industri kayu sebagai unggulan di Kabupaten Sukoharjo dipasok dari kayu di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar, dan pemasarannya oleh Kota Surakarta. Selain itu, Kota Surakarta juga memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan wilayah lain yang berada di Utara dan Selatan. Keterkaitan Kota Surakarta di wilayah Utara yaitu dengan Kota Semarang dan Kota Pekalongan. Sedangkan keterkaitan di wilayah Selatan yaitu dengan Yogyakarta dan Ponorogo. Interaksi pelayanan umum di wilayah Subosukawonosraten secara umum berada di Kota Surakarta. Selain itu interaksi dengan wilayah sekitar seperti Yogyakarta, juga terjadi pada Kabupaten Wonogiri yang berinteraksi pelayanan umum dengan Kota Yogyakarta dan Ponorogo. Berikut penjabaran komoditas utama di Wilayah Subosukawonosraten:

1. Komoditas utama di Kota Surakarta berasal dari:
   a) sektor konstruksi berupa pembangunan gedung untuk sektor pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*);
   b) sektor perdagangan besar dan eceran meliputi reparasi mobil dan sepeda motor, serta tekstil (batik);
   c) sektor informasi dan komunikasi berupa jasa sistem komunikasi data.
2. Komoditas utama di Kabupaten Boyolali berasal dari:
   a) sektor industri pengolahan meliputi tekstil dan *garment*, kertas, logam, makanan;
   b) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi sayur mayur, tanaman Perkebunan, sapi, kayu putih, ikan kolam dan tambak;
   c) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor meliputi produk sayur mayur, tanaman perkebunan, produk sapi dan olahannya.

3. Komoditas utama di Kabupaten Sukoharjo berasal dari:
   a) sektor industri pengolahan meliputi industri makanan dan minuman;
   b) sektor perdagangan besar dan kecil, meliputi industri reparasi mobil dan sepeda motor; dan
   c) sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berupa tanaman pangan.
4. Komoditas utama di Kabupaten Wonogiri berasal dari:
   a) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi padi dan palawija;
   b) sektor industri pengolahan berupa meliputi industri makanan dan minuman;
   c) sektor perdagangan besar dan kecil, meliputi industri reparasi mobil dan sepeda motor.
5. Komoditas utama di Kabupaten Sragen berasal dari:
   a) sektor industri pengolahan berupa industri mebel;
   b) sektor perdagangan besar dan eceran berupa batik;
   c) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berupa padi.
6. Komoditas utama di Kabupaten Karanganyar berasal dari:
   a) sektor industri pengolahan berupa agroindustri;
   b) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi tanaman pangan dan produk olahan ikan;
   c) sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor meliputi industri perdagangan, pertokoan modern, reparasi mobil dan sepeda motor.
7. Komoditas utama di Kabupaten Klaten berasal dari:
   a) sektor industri pengolahan meliputi olahan makanan, penenunan, *handycraft*, cor logam;
   b) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor meliputi mebel, jasa bengkel;
   c) pertanian, kehutanan, dan perikanan berupa padi.

**b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Subosukawonosraten**

Pengembangan wilayah Subosukawonosraten tahun 2025 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.14.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Subosukawonosraten Tahun 2025**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Boyolali | 5,70 – 6,40 | 8,58-9,08 | 3,92 – 3,62 | 76,67 |
| 2 | Kab. Sukoharjo | 5,30 – 5,94 | 7,10-7,30 | 4,00 – 3,40 | 79,00 |
| 3 | Kab. Karanganyar | 6,15 | 8,96 | 4,07 | 78,19 |
| 4 | Kab. Wonogiri | 5,00 – 6,00 | 9,51-9,93 | 1,82 – 1,52 | 73,60 |
| 5 | Kab. Sragen | 5,86 | 11,65-12,07 | 3,55 – 3,17 | 76,00 |
| 6 | Kab. Klaten | 5,70 – 6,00 | 10,61-11,24 | 4,00 – 3,68 | 77,90 – 78,80 |
| 7 | Kota Surakarta | 5,90 | 7,18-7,61 | 4,35 – 4,05 | 84,48 |

*Sumber: Bappeda Provnsi Jawa Tengah, 2024*

Pengembangan wilayah Subosukawonosraten diarahkan untuk mendorong pengembangan permukiman perkotaan Surakarta dan kabupaten disekitarnya secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing.

Kawasan ini didorong untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata, industri, dan pertanian dengan memperhatikan kesesuaian peruntukkan lahan dalam rencana tata ruang wilayah. Selain itu sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Tengah maka perlu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian serta menjaga alih fungsi lahan sawah. Dalam mendukung kemudahan pergerakan barang hasil produksi dari sektor industri dan pertanian maka perlu pengembangan fasilitas logistik di dalam wilayah pengembangan. Selain itu perlu adanya kerja sama antar daerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan. Penyediaan prasarana dan sarana diberbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah juga diperlukan kolaborasi antardaerah di WP Subosukawonosraten.

Dalam rangka pencapaian target-target makro pembangunan daerah di WP Subosukawonosraten, maka perlu dilakukan intervensi seperti:

1. Menyediakan sarana prasarana di berbagai bidang meliputi:
   a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, fasilitas keselamatan, kinerja simpul transportasi (revitalisasi terminal) dan integrasi antar moda transportasi;
   b. Air minum;
   c. Drainase.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
   a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
   b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
   c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
   d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
   e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
   f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, diantara dengan:
   a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
   b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
   c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan s*tart up digital* berbasis komunitas;
e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Subosukawonosraten untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar berikut.

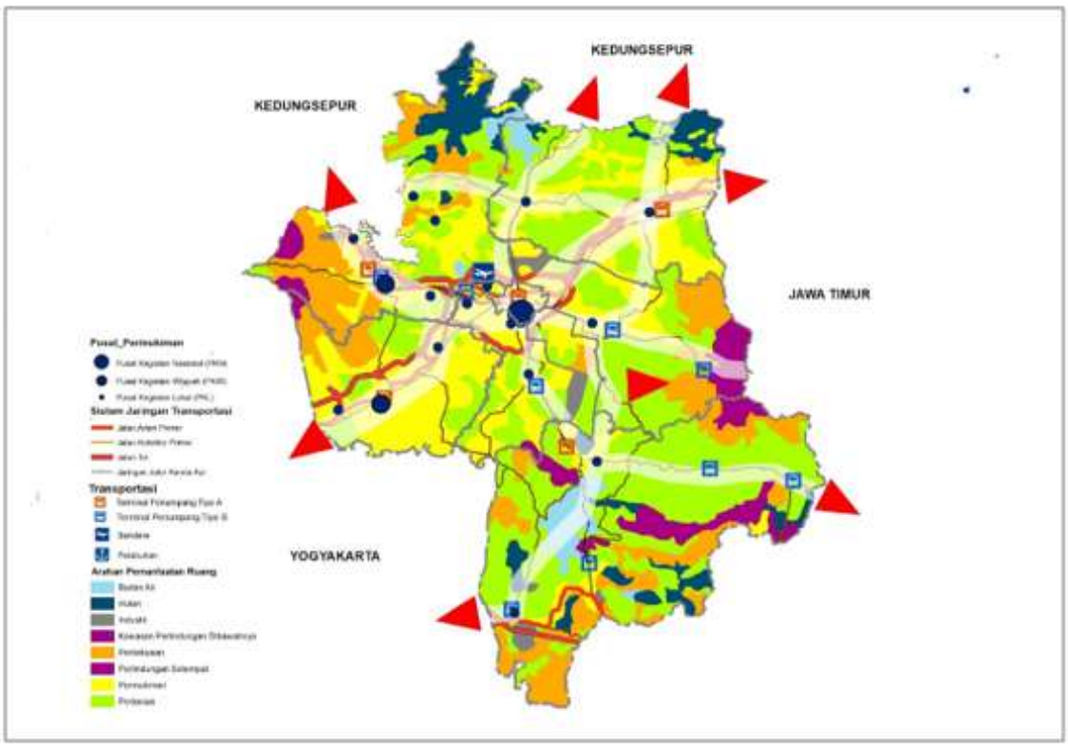


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.12.**
**Arah Pengembangan Wilayah Subosukawonosraten**

### 5.4.8. Wilayah Pengembangan Bregasmalang

Wilayah Pengembangan Bregasmalang berpusat di kawasan perkotaan Tegal meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal memiliki kesenjangan/disparitas sedang. Kondisi angka kemiskinan di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang perlu dilakukan upaya lebih untuk penurunannya. Sementara Kota Tegal untuk pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan IPM sudah berada diatas rata-rata provinsi. Tingkat pengangguran terbuka di WP Bregasmalang masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, sehingga perlu strategi dan upaya untuk menurunkannya. Secara lebih lengkap kondisi empat indikator utama di WP Bregasmalang yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut.

**Tabel 5.15.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%)*) | TPT (%)**) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Brebes | 3,74 | 15,78 | 8,98 | 69,71 |
| 2 | Kab. Tegal | 4,93 | 7,30 | 8,60 | 71,12 |
| 3 | Kab. Pemalang | 4,14 | 15,03 | 6,55 | 68,08 |
| 4 | Kota Tegal | 5,01 | 7,68 | 6,05 | 77,06 |
| Rata-Rata WP | | 4,46 | 11,44 | 7.55 | 70,06 |
| Jawa Tengah | | 4,98 | 10,77 | 5,13 | 73,39 |
| Nasional | | 5,05 | 9,36 | 5,32 | 74,39 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

WP Bregasmalang berlokasi di utara jawa dengan wilayah perairan pantai yang cukup panjang. Potensi kewilayahan yang dapat dioptimalkan dalam pencapaian target kinerja pembangunan yaitu industri, perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, perikanan, kehutanan dan pertambangan. Kawasan strategis di WP Bregasmalang yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan dengan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi Kawasan Industri Brebes (KSP), Kawasan Agropolitan MANGGAMAS (KSP), Kawasan Perkotaan Bregasmalang (KSP).

**a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Bregasmalang**

Berdasarkan nilai total PDSD tahun 2023, WP Bregasmalang memiliki nilai rata-rata 3,240. Terdapat gap sebesar 2,00 antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal pada pilar akses keuangan disebabkan karena persentase jumlah bank dan LKBB yang memberikan pelayanan pinjaman dan persentase pertumbuhan LKBB dan kredit perbankan kepada UMKM. Unsur pendukung IDSD pada Kabupaten Pemalang terdapat 11 pilar, Kabupaten Tegal 9 pilar, Kabupaten Brebes 8 pilar yang berada di bawah median Provinsi Jawa Tengah.

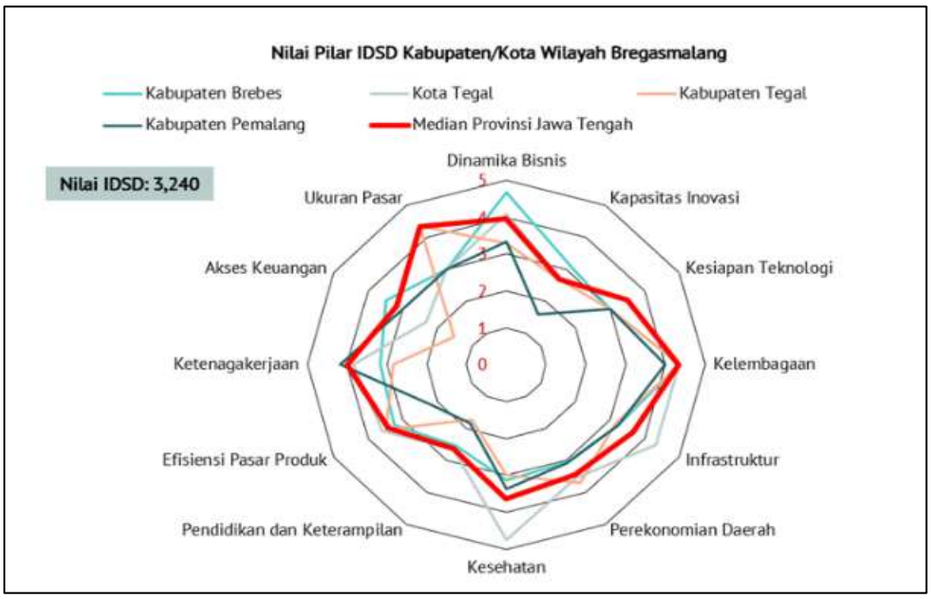


*Sumber: Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**Gambar 5.13.**
**Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Bregasmalang Tahun 2023**

Kondisi daya saing wilayah Bregasmalang masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai pada beberapa faktor pendukung daya saing yang masih lemah, antara lain masih relatif rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, angka kemiskinan yang tinggi, lemahnya investasi nasional, dan geliat ekonomi lokal pada sektor UMKM yang cenderung pasif. Dalam pengembangan potensi industri serta perdagangan dan jasa di WP Bregasmalang, diperlukan program yang mampu mengungkit secara optimal tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidikan tinggi maupun vokasi, di samping mendorong investasi produktif yang memiliki *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal tinggi.

**b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Pengembangan Bregasmalang**

Pengembangan wilayah Bregasmalang untuk tahun 2025 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.16.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2025**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Brebes | 4,70 – 5,25 | 13.96-14.34 | 8,59 – 8,14 | 70,54 |
| 2 | Kab. Tegal | 5,0 – 5,6 | 6,40-6,70 | 8,30 – 7,75 | 71,78 |
| 3 | Kab. Pemalang | 4,14 – 4,90 | 13.64-14.31 | 6,19 – 5,89 | 69,75 |
| 4 | Kota Tegal | 5,03 – 5,10 | 6.83-7.24 | 6,03 – 5,84 | 77,80 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

Pengembangan wilayah Bregasmalang diarahkan dengan memadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Tegal dengan kabupaten disekitarnya sebagai satu kesatuan sistem permukiman yang saling menunjang secara fungsi dengan memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan serta penanganan bencana dan kawasan terdampak rob. Pada kawasan ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Brebes sebagai salah satu kawasan indutri strategis di bagian barat Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian akan dikembangkan disertai dengan upaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Selain itu, sebagai salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat maka akan dilakukan upaya untuk memadukan pengembangan kawasan perbatasan provinsi Jawa Tengah-Jawa Barat dan mendorong kerjasama antar daerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana diberbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah.

Dalam rangka mencapai target indikator makro pembangunan dalam mendukung agregat makro capaian ditingkat provinsi, diperlukan beberapa upaya penanganan secara terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Sebagai upaya untuk mencapai indikator makro tersebut diantaranya melalui:

1. Menyediakan sarana prasarana di berbagai bidang meliputi:
    a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran serta keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, fasilitasi layanan angkutan umum, fasilitas keselamatan dan kinerja simpul transportasi;

b. Air minum;
c. Drainase.

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
   a. Meningkatkan Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
   b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
   c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
   d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
   e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
   f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, diantara dengan:
   a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
   b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
   c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
   d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan start up digital berbasis komunitas;
   e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Bregasmalang untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut:

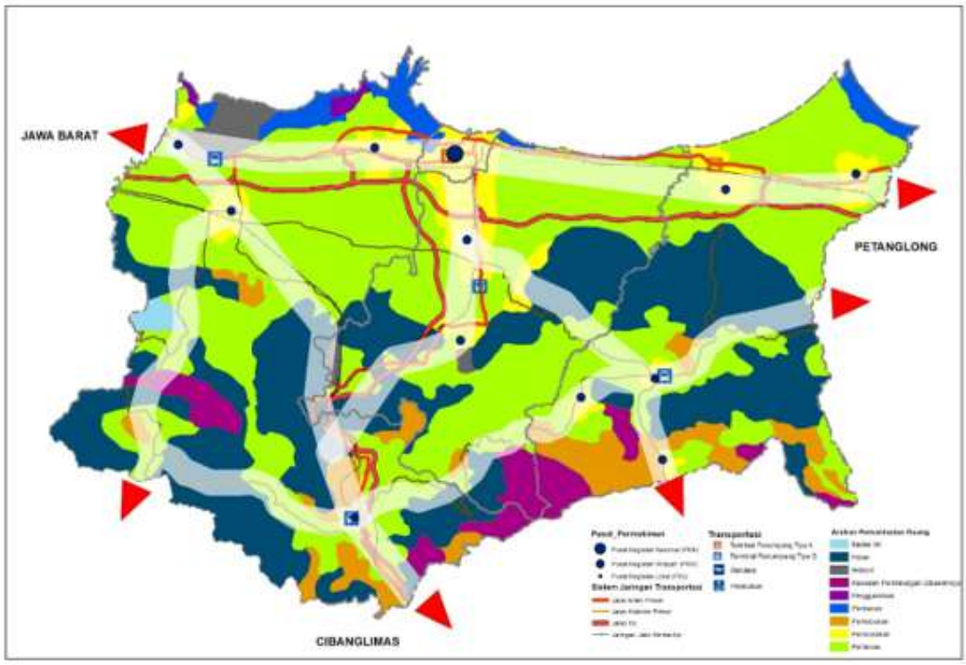


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024.*

**Gambar 5.14.**
**Arah Pengembangan Wilayah Bregasmalang**

### 5.4.9. Wilayah Pengembangan Petanglong

WP Petanglong berada di sisi utara Jawa Tengah dengan batas bagian utara adalah Laut Jawa. WP Petanglong memiliki kesenjangan/disparitas rendah. Wilayah Pengembangan Petanglong berpusat di kawasan perkotaan Pekalongan meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan. Kondisi makro pembangunan wilayah Petanglong saat ini dapat ditunjukkan dalam empat indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.17.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%)*) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Pekalongan | 5,14 | 9,67 | 3,25 | 71,45 |
| 2 | Kab. Batang | 5,53 | 8,92 | 6,06 | 70,20 |
| 3 | Kota Pekalongan | 5,44 | 6,81 | 45,02 | 76,71 |
| Rata-Rata WP | | 5,37 | 8,55 | 44,78 | 71,74 |
| Jawa Tengah | | 4,98 | 10,77 | 5,13 | 73,39 |
| Nasional | | 5,05 | 9,36 | 5,32 | 74,39 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

Di Wilayah Pengembangan Petanglong terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah, diantaranya: perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, penyediaan akomodasi, pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi dan *real estate*. Kawasan strategis yang berada di Wilayah Pengembangan Petanglong yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan

yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain: Kawasan Industri Terpadu Batang (KSP) dan Kawasan Perkotaan Petanglong (KSP).

**a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Petanglong**

Berdasarkan nilai total PDSD tahun 2023, sistem perwilayahan Petanglong berada di posisi ke-3 dengan nilai rata-rata 3,644. Terdapat gap sebesar 1,75 antara Kabupaten Batang dengan Kota Pekalongan pada pilar infrastruktur karena rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor, rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan, dan persentase RTH. Pada analisis daya saing Kota Pekalongan terdapat 8 pilar yang berada di bawah median Provinsi Jawa Tengah diantaranya pilar dinamika bisnis, pilar infrastruktur, pilar perekonomian daerah, pilar pendidikan dan keterampilan, pilar efisiensi pasar dan produk, pilar ketenagakerjaan, pilar akses keuangan, pilar ukuran pasar.

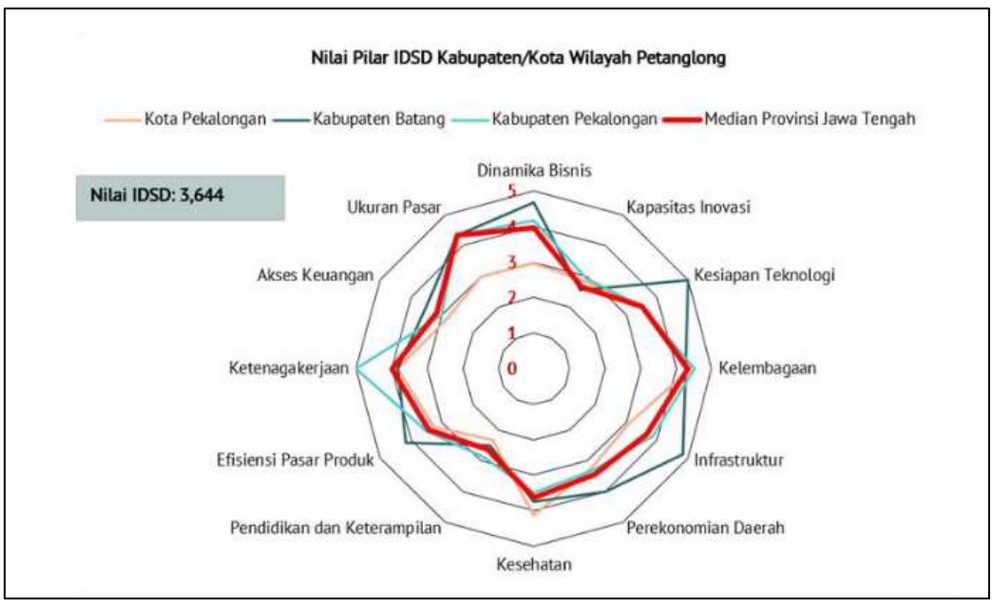


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.15.**
**Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Petanglong Tahun 2023**

Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan membentuk suatu hubungan kewilayahan yang kompleks, mewakili berbagai aspek ekonomi dan pelayanan umum. Kabupaten Pekalongan, dalam konteks ekonomi, berperan sebagai pemasok bahan baku, pasar, dan asal modal bagi Kota Pekalongan. Di sisi lain, Kabupaten Batang berperan sebagai penyedia tenaga kerja bagi Kabupaten Pekalongan, utamanya di sektor konstruksi. Selain interaksi regional, Kabupaten Batang menjalankan interaksi wilayah yang lebih luas, terutama dengan negara-negara seperti Jepang, Amerika, dan Eropa. Hubungan ini bersifat ekspor dan mencakup hasil pengolahan teh yang menunjukkan orientasi global dalam kegiatan ekonominya. Hubungan Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan utamanya pada sektor industri dan perkebunan. Keterkaitan ini menciptakan dinamika ekonomi yang saling melengkapi, dengan masing-masing wilayah memberikan kontribusi dalam pengembangan sektor-sektor tersebut.

Interaksi pelayanan umum antara Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan terbukti cukup kuat, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan jasa. Kota Pekalongan sebagai pusatnya, menjadi fokus utama dalam menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan, memperkuat

kualitas hidup di kedua kabupaten tersebut. Keseluruhan interaksi ekonomi dan pelayanan umum ini menciptakan kerangka kerjasama yang saling menguntungkan, menggambarkan hubungan yang kompleks dan terintegrasi antarwilayah.

**b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Pengembangan Petanglong**

Pengembangan wilayah Petanglong untuk tahun 2025 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.18.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2025**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Pekalongan | 5,60 - 5,85 | 8,00 - 9,15 | 3,10 – 2,78 | 72,70 |
| 2 | Kab. Batang | 5,50 - 6,10 | 8,27 - 8,34 | 5,80 – 5,27 | 70,75 |
| 3 | Kota Pekalongan | 5,44 - 6,00 | 6,23 - 6,70 | 5,05 – 4,47 | 77,39 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

Pengembangan WP Petanglong diarahkan untuk memadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Pekalongan dan kabupaten disekitarnya sebagai salah satu aglomerasi perkotaan yang saling menunjang dengan penyediaan sarana prasarana perkotaannya dengan mempertimbangkan upaya mitigasi dan penanganan bencana. Pada kawasan ini juga dikembangkan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai salah satu kawasan pusat pengembangan industri manufaktur berteknologi tinggi yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah. Sektor pertanian juga didorong sebagai salah satu sektor unggulan disertai dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah serta peningkatan berbagai upaya dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil pertanian. Pengembangan fasilitas logistik perlu didorong dalam rangka untuk kemudahan pergerakan barang hasil produksi sektor industri maupun sektor pertanian. Selain itu akan dilakukan upaya peningkatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan industri kreatif sebagai salah satu ciri khas kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam.

Dalam rangka pencapaian target indikator makro pembangunan dalam mendukung agregat makro capaian ditingkat provinsi, diperlukan beberapa upaya terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Berikut upaya untuk mendorong tercapainya indikator makro di WP Petanglong diantaranya adalah:

1. Menyediakan sarana prasarana di berbagai bidang meliputi:
   a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, fasilitasi layanan angkutan umum, fasilitas keselamatan, dan kinerja simpul transportasi;
   b. Air minum;
   c. Drainase.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
   a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri

dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);

b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.

3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, diantara dengan:
   a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
   b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
   c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
   d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up* digital berbasis komunitas; dan
   e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Petanglong untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut:

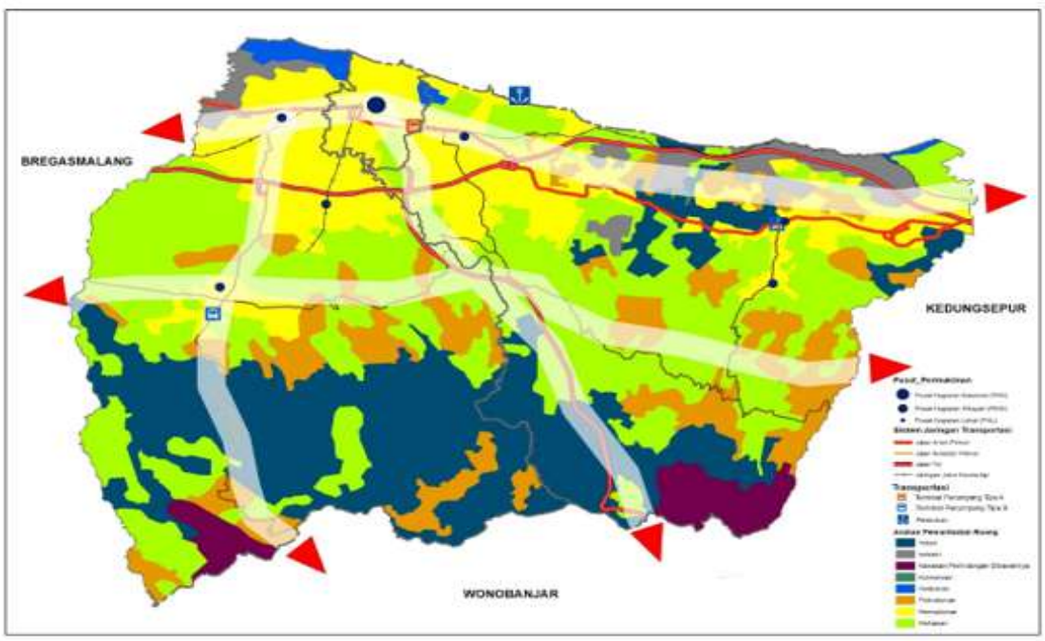


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.16.**
**Arah Pengembangan Wilayah Petanglong**

### 5.4.10. Wilayah Pengembangan Cibalingmas

WP Cibalingmas merupakan gabungan dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas. Wilayah Pengembangan ini merupakan WP baru dimana sebelumnya pada RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 termasuk dalam WP Barlingmascakeb. Namun, Kabupaten Kebumen bergabung dengan Kabupaten Purworejo menjadi WP Keburejo, dan Kabupaten Banjarnegara tergabung dalam WP Wonobanjar, maka penyebutannya menjadi WP Cibalingmas.

Pada capaian indikator makro tahun 2023, angka kemiskinan pada WP Cibalingmas masih berada di atas nasional dan provinsi sehingga memerlukan upaya khusus untuk menekan angka kemiskinan. Begitu pula dengan IPM di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga yang masih di bawah angka provinsi, sedangkan Kabupaten Banyumas sudah pada capaian sebesar 73,96.

**Tabel 5.19.**
**Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Cibalingmas Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) 2023 | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap | 5,34 | 10,99 | 8,74 | 72,04 |
| 2 | Kab. Purbalingga | 4,51 | 14,99 | 5,61 | 70,51 |
| 3 | Kab. Banyumas | 5,40 | 12,53 | 6,35 | 73,96 |
| Rata-Rata WP | | 5,08 | 12,83 | 6,90 | 72,44 |
| Jawa Tengah | | 4,98 | 10,77 | 5,13 | 73,39 |
| Nasional | | 5,05 | 9,36 | 5,32 | 74,39 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

#### a. Analisis Daya Saing Wilayah Pengembangan Cibalingmas

Pada tahun 2023, PDSD WP Cibalingmas masih tergabung dalam WP Barlingmascakeb. Ketimpangan nilai PDSD pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Cibalingmas menonjol sebagai kewilayahan ketimpangan terendah, dengan nilai 0,0039. Jika dilihat dari tingkat interaksi wilayahnya, perwilayahan Barlingmascakeb memiliki kegiatan ekonomi antar wilayahnya saling mendukung satu sama lain, sehingga interaksi yang terjadi lebih seimbang dengan wilayah lainnya. Performa yang dimiliki Kabupaten Purbalingga (3,861) dan Kabupaten Cilacap (3,511) optimal pada ekosistem inovasi dapat dimanfaatkan sebagai *leading actor* dalam inovasi daerah sehingga mendorong pengembangan kolaborasi eksternal melalui interaksi wilayah untuk menciptakan iklim inovasi.

Interaksi ekonomi wilayah di Cibalingmas menunjukkan kecenderungan terpusat pada beberapa lokasi kunci, yaitu Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, serta wilayah sekitar seperti Kabupaten Wonosobo, Pemalang, dan Temanggung. Wilayah ini menjadi pusat interaksi ekonomi yang signifikan dalam konteks perdagangan, jasa, dan industri pengolahan.

Dalam konteks ekonomi wilayah, Kabupaten Purbalingga memainkan peran penting sebagai pemasok bahan baku pada tingkat regional bahkan negara tujuan ekspor. Interaksi ekonomi wilayahnya tidak hanya terbatas pada tingkat lokal, melainkan melibatkan keterlibatan yang lebih luas hingga ke pasar internasional.

Kabupaten Purbalingga juga menjadi bagian integral dari rantai pasok global dengan peran kunci dalam penyediaan bahan baku dan ekspor produk.

Sementara itu, Kabupaten Cilacap terlibat dalam interaksi ekonomi yang berfokus pada sektor perminyakan. Hubungan ekonomi wilayahnya melibatkan Provinsi Kepulauan Riau, Maluku Tengah, Kota Bitung, Sukabumi, dan Kota Medan. Kerjasama dalam sektor perminyakan menjadi faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Cilacap.

**b. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Pengembangan Cibalingmas**

Pengembangan wilayah Cibalingmas untuk tahun 2025 diarahkan untuk bisa mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama yaitu sebagai berikut.

**Tabel 5.20.**
**Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Cibalingmas Tahun 2025**

| No | Kabupaten/Kota | PE (%) | Angka Kemiskinan (%) | TPT (%) | IPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Cilacap | 5,40 – 6,10 | 10,14 | 8,84 – 7,82 | 72,91 |
| 2 | Kab. Purbalingga | 5,00 – 6,00 | 12,50-13,50 | 5,40 – 4,90 | 71,64 |
| 3. | Kab. Banyumas | 5,50 – 6,45 | 9,93-11,00 | 6,82 – 5,56 | 75,50 |

*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah.,2024*

Arah pengembangan WP Cibalingmas diarahkan pengembangannya antara lain untuk peningkatan pengelolaan Pacangsanak sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan perkotaan diarahkan pengembangannya secara terpadu pada koridor kawasan perkotaan Cilacap – Purwokerto - Purbalingga sebagai koridor pertumbuhan ekonomi serta menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas. WP Cibalingmas merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat maka perlu dilakukan pengembangan kawasan perbatasan secara sinergis dengan pusat pengembangan di kawasan Perkotaan Majenang.

Dalam upaya peningkatkan pergerakan distribusi wilayah, maka perlu mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan Pelabuhan Darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor di wilayah selatan, pengembangan akses menuju Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman dan pengembangan pelabuhan perikanan Samudra Cilacap sebagai sentra pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya. Beberapa industri yang dikembangkan pada kawasan ini antara lain: industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam sedangkan pengembangan potensi wisata unggulan dilakukan dengan mengintegrasikan kawasan khususnya kawasan ekosistem mangrove Segara Anakan dan kawasan pariwisata Baturaden.

Berikut upaya untuk mencapai target makro Pembangunan daerah di WP Cibalingmas diantaranya adalah:

1. Menyediakan sarana prasarana di berbagai bidang, meliputi:
    a. Aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan transportasi diantaranya melalui peningkatan sistem jaringan jalan, layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan, fasilitas keselamatan, kinerja simpul transportasi dan integrasi antar moda transportasi;

b. Air minum;
c. Persampahan;
d. Drainase.

2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang difokuskan dengan peningkatan sektor ketenagakerjaan, dengan:
   a. Meningkatkan Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
   b. Mendorong terciptanya transformasi Balai Latihan Kerja untuk pengembangan pelatihan yang sesuai dengan Era 5.0 seperti *Digital Marketing, Social Media Specialist, Digital Art/Animasi, Multimedia, Green Productivity Specialist*, dan lain sebagainya;
   c. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
   d. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
   e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
   f. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
3. Meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, diantaranya melalui Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, diantara dengan:
   a. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku serta pendampingan promosi dan pengemasan produk;
   b. Perluasan akses pembiayaan serta pendampingan legalitas dan standarisasi produk;
   c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
   d. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan *start up* digital berbasis komunitas;
   e. Penguatan kelembagaan ekosistem usaha melalui koperasi berbasis komunitas.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Petanglong untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut.

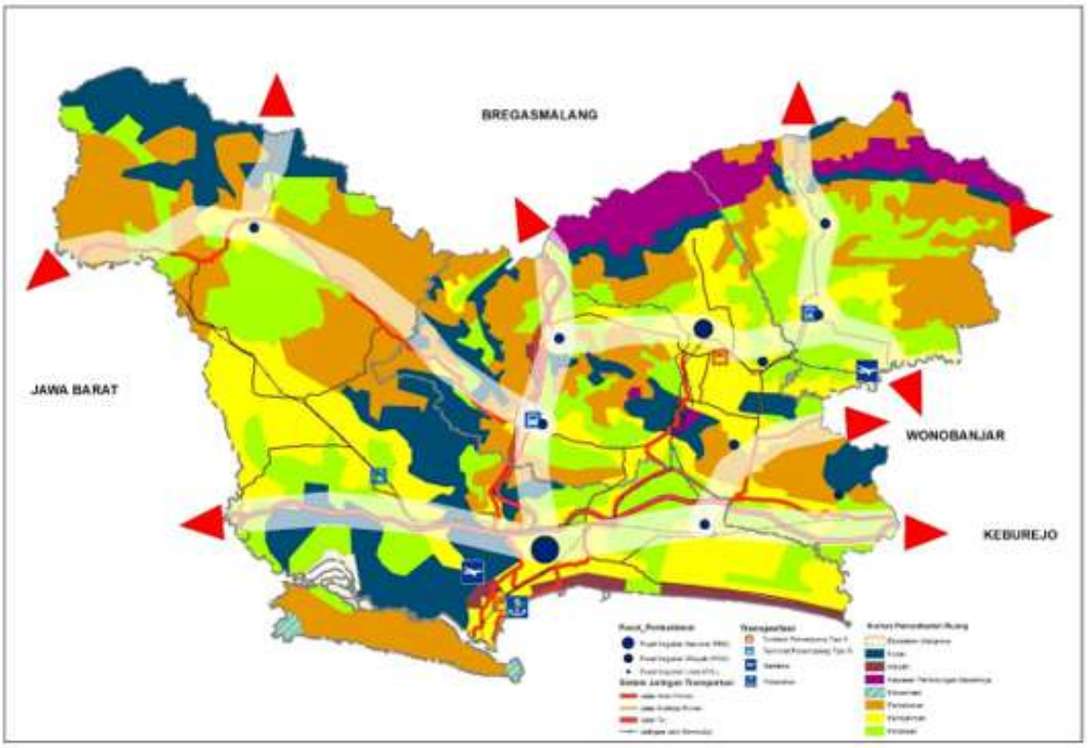


*Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024*

**Gambar 5.17.**
**Arah Pengembangan Wilayah Petanglong**

## 5.5. Arahan Pembangunan Wilayah Perbatasan Antarprovinsi

Ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik seringkali terjadi pada wilayah perbatasan daerah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena fokus dan arah pembangunan yang belum cermat, kondisi geografis yang kurang menguntungkan serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana infrastruktur dan pelayanan publik seperti pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat serta sosial). Di sisi lain, wilayah perbatasan mempunyai fungsi yang strategis sebagai *etalase* gambaran daerah/ wilayah bersangkutan.

Dalam rangka mendorong pembangunan di wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif dan intensif melakukan sinergi pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI. Yogyakarta. Sinergi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan 5 (lima) konsep pengembangan wilayah perbatasan, yaitu:

1. Keterpaduan dan sinergi penggunaan sumber daya untuk menserasikan pembangunan antar wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
2. Keselarasan adalah keberlanjutan pembangunan;
3. Penanganan konflik/ potensi konflik;
4. Pemanfaatan bersama adalah pemanfaatan fasilitas/sarana prasarana pada wilayah perbatasan;
5. Pengawasan dan penanganan bersama adalah upaya pelaksanaan/ implementasi peraturan.

# BAB VI
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

## 6.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan implementasi tahun kedua kebijakan RPD Tahun 2024-2026. Kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025 diarahkan pada tema **"Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter"** dengan prioritas daerah difokuskan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2025 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Pada tahun 2025, kerangka pendanaan daerah Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Penurunan pendapatan berdampak pada penurunan belanja daerah jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar 23,549 triliun rupiah, belanja daerah sebesar 23,911 triliun rupiah, dan pembiayaan netto sebesar 362,3 miliar rupiah. Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

**Tabel 6.1.**
**Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

| URAIAN | | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| **PENDAPATAN DAERAH** | | |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | **15.519.788.406.000** |
| 1 | Pajak Daerah | 12.650.725.636.000 |
| 2 | Retribusi Daerah | 1.805.361.743.000 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan | 707.349.144.000 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 356.351.883.000 |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | | **8.006.377.888.000** |
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 8.006.377.888.000 |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | | **23.476.500.000** |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | **23.549.642.794.000** |
| **BELANJA DAERAH** | | |
| **BELANJA OPERASI** | | **15.389.713.402.000** |
| 1 | Belanja Pegawai | 7.582.145.530.000 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.337.560.651.000 |

| URAIAN | | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| 3 | Belanja Subsidi | 9.274.000.000 |
| 4 | Belanja Hibah | 2.428.133.221.000 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 32.600.000.000 |
| **BELANJA MODAL** | | **1.253.873.852.000** |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | | **25.000.000.000** |
| **BELANJA TRANSFER** | | **7.243.355.540.000** |
| 1 | Belanja Bagi Hasil | 4.196.561.232.000 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan | 3.046.794.308.000 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **23.911.942.794.000** |
| **SURPLUS/DEFISIT** | | **(362.300.000.000)** |
| **PEMBIAYAAN** | | |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | **432.300.000.000** |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 432.300.000.000 |
| 2 | Pencairan dana cadangan | 0 |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | **70.000.000.000** |
| 1 | Penyertaan modal | 70.000.000.000 |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | | **362.300.000.000** |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)** | | **0** |

*Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2024*

## 6.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

### 6.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar

#### 1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada pemerataan kualitas layanan pendidikan meliputi perluasan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara bertahap di wilayah kemiskinan ekstrem; penyediaan prasarana dan sarana pendidikan berorientasi kebutuhan dan relevansi dunia usaha dunia industri (DUDI); peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara adaptif; percepatan implementasi kurikulum adaptif; perbaikan tata kelola pendidikan dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan multipihak; peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi; peningkatan pembinaan potensi siswa; penguatan pengelolaan *boarding* dan semi *boarding* dengan sasaran siswa dari keluarga kurang mampu; penyediaan layanan pendidikan jarak jauh (sekolah virtual dan kelas jarak jauh); dan pembiayaan operasional

sekolah melalui BOSDa dan BOP serta siswa melalui BSM (Beasiswa Siswa Miskin) dan seragam miskin.

**b. Program Pengembangan Kurikulum**

Program ini diarahkan pada penguatan pendidikan karakter dan *softskill* melalui internalisasi kurikulum, muatan lokal dan ekstra kurikuler.

**c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Program ini diarahkan pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

**d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.

**2. Kesehatan**

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, kesehatan usia produktif, kesehatan lansia, melalui pemenuhan prasarana dan sarana, sumber daya manusia, penyusunan regulasi, perbaikan *baseline* data, pemenuhan standar operasional (SOP), peningkatan pelayanan kesehatan santun usia lanjut sesuai standar, pencegahan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat; peningkatan kesehatan lingkungan melalui pendampingan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di 35 kabupaten/kota; pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui deteksi dini penyakit menular dan tidak menular di 35 kabupaten/kota, pengendalian vektor demam berdarah *dengue* dan malaria di kabupaten/kota dengan kasus tinggi, penyusunan rencana epidemologi dan peningkatan respon kejadian luar biasa (KLB) serta krisis kesehatan, penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa/bencana skala provinsi; pendampingan pelayanan bagi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), pemantauan imunisasi dasar rutin dan advokasi untuk pemenuhan *universal child immunization* (UCI) desa; pemenuhan fasilitas dan peningkatan layanan primer dan rujukan melalui fasilitasi akreditasi kesehatan primer dan rujukan di 35 kabupaten/kota, peningkatan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penguatan rumah sakit dalam kesiapan tanggap darurat krisis kesehatan dan bencana dengan penyiapan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) serta pemenuhan layanan unggulan KJSU (kanker, jantung, *stroke* dan urologi), pendampingan institusi layanan primer, pelayanan pengujian kalibrasi; pemenuhan prasarana dan sarana di tujuh RSUD/RSJD; pengelolaan sistem informasi kesehatan melalui implementasi sistem analisis kesehatan berbasis *Big Data* dan *AI* (kecerdasan buatan); distribusi dan pengadaan alat kesehatan, obat bahan habis pakai, vaksin, makan dan minuman di fasilitas kesehatan melalui pengembangan tanaman obat tradisional di 35 kabupaten/kota; serta penyediaan obat, *reagen* dan vaksin esensial untuk 35 kabupaten/kota.

**b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Program ini diarahkan pada penguatan implementasi data berkualitas; peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (SDMK) melalui pelatihan/seminar/*workshop*/magang/lainnya yang mendukung program prioritas; sosialisasi kebijakan perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan SDMK tingkat provinsi; serta peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan melalui sosialisasi dan bimtek.

**c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan melalui evaluasi peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, dan vaksin sesuai standar; pendampingan perizinan berusaha berbasis risiko distribusi pedagang besar farmasi, pedagang obat tradisional, serta pedagang besar kosmetika.

**d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Program ini diarahkan pada kampanye perubahan perilaku; pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan dan peningkatan peran serta masyarakat (ormas, kader, dunia usaha, PT, mitra, dan lainnya), peningkatan koordinasi, bimbingan teknis; implementasi germas di UPT; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, *daycare*, *home visit/home care*, edukasi pasien dan keluarga pasien serta masyarakat yang dilakukan oleh tujuh RSUD/RSJD, dan *follow up* pasien kusta.

**3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan *flood forecasting and warning system (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi dan penyediaan peralatan pendukung. Kegiatan-kegiatan di atas sekaligus untuk mendukung peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim sektor air.

**b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, pembangunan prasarana sarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

**c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui fasilitasi proses pembangunan Instalasi

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional Purbalingga-Banjarnegara, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi melalui pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

**d. Program Penataan Bangunan Gedung**

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

**e. Program Penyelenggaraan Jalan**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, dan rehabilitasi jalan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antarwilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; serta pengawasan pelaksanaan peningkatan menuju lebar standar, dan rehabilitasi jalan.

**f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

**g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program ini diarahkan pada penyusunan kajian pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Rencana program prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Perumahan**

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin melalui pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi.

**b. Program Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

**c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

**d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi, serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

**5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan daerah rawan kebakaran, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

**b. Program Penanggulangan Bencana**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas (Unit LIDi), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penyusunan dokumen kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), serta penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

**c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran.

**6. Sosial**

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pemberdayaan Sosial**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

**b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

**c. Program Rehabilitasi Sosial**

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

**d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antarwarga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penyaluran bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

**e. Program Penanganan Bencana**

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penam-pungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

**f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan, pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

### 6.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

**1. Tenaga Kerja**

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

**b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan, mesin dan menjahit), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan bidang jasa seperti *commercial cookery, housekeeping, tour guide, waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, pelatihan bidang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), peningkatan produktivitas (perusahaan dan desa), pengukuran produktivitas, uji kompetensi, konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.

**c. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, *job fair*, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, pemberdayaan penyandang disabilitas, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun

purna penempatan di daerah provinsi, pemberdayaan keluarga PMI dan PMI yang purna, penguatan jejaring desa migran produktif, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.

**d. Program Hubungan Industrial**

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

**e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan**

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pemeriksaan perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI), pemeriksaan perusahaan pengguna tenaga kerja asing (TKA), pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

**b. Program Perlindungan Perempuan**

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

**c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

**d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

**e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha, serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

**f. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

**3. Pangan**

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, penguatan cadangan panagn pemerintah, pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

**b. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Program ini diarahkan pada penanganan kerawanan pangan pada lokasi prioritas kemiskinan dan risiko *stunting*, dan implementasi pengelolaan serta pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste).*

**c. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

**4. Pertanahan**

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum berupa penetapan lokasi oleh gubernur.

**b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

**c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee***

Program ini diarahkan pada fasilitasi pelaksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

**5. Lingkungan Hidup**

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), fasilitasi

dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota, serta fasilitasi perdes tentang pelestarian lingkungan hidup.

**b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui fasilitasi pembinaan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, peningkatan pemantauan terhadap badan air permukaan dan kualitas udara ambien, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan sinergi peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim.

**c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui fasilitasi taman kehati, penanganan ruang terbuka hijau/RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

**d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.

**e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan/AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan–upaya pemantauan lingkungan/UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup/DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

**f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat dan generasi muda tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

**g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada penanganan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

**h. Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain fasilitasi persiapan pembangunan TPST Regional Magelang.

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pendaftaran Penduduk**

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek)

peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blangko KTP-*el* di kabupaten/kota.

**b. Program Pencatatan Sipil**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

**c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten/kota.

**7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penataan Desa**

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelengaraan pemerintah desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan desa adat.

**b. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan di Jawa Tengah.

**c. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi penysunan produk hukum daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang desa, melaksanakan evaluasi perkembangan desa serta melaksanakan penilaian melalui penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan, melaksanakan fasilitasi terhadap penetapan dan penegasan batas desa, pembinaan manajemen pemerintahan desa sekaligus fasilitasi terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD), fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan desa, serta pembinaan terhadap pencatatan data dan informasi pemerintah desa.

**d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antarsektor, pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa, serta peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendukung pembangunan desa.

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengendalian Penduduk**

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

**b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

**c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

**9. Perhubungan**

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam satu daerah provinsi berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng di 7 koridor); pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan Terminal Kutoarjo tahap V dan peningkatan Terminal Sukoharjo; penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi utamanya berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan melalui pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) diantaranya pada jalan akses menuju kawasan pariwisata dan *Geopark* Dieng, serta perlengkapan jalan lainnya (rambu pendahulu penunjuk jurusan/RPPJ, *warning light, guardrail*, marka dan rambu) di ruas jalan provinsi strategis.

**b. Program Pengelolaan Pelayaran**

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi utamanya pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga sungai (plengsengan) lintas penyeberangan sungai antarkabupaten di Desa Yosorejo Kabupaten Batang (Sungai Kalikutho); penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan

koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses pelimpahan aset); penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

**c. Program Pengelolaan Perkeretaapian**

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan (rambu dan marka) perlintasan kereta api di Kabupaten Cilacap serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif.

**10. Komunikasi dan Informatika**

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antarperangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, layanan *data center,* pengembangan kehumasan, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM), pengelolaan konten, *website,* dan media sosial terkait informasi pembangunan Jawa Tengah, menyaring/*filter* terhadap berita *hoax* dan berita *fake,* serta peningkatan pelayanan informasi publik, pengembangan kapasitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan monev keterbukaan informasi badan publik.

**b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan pendampingan pengelolaan ekosistem terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province,* mengembangkan dan mengelola integrasi layanan SPBE melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP), penerbitan dokumen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK), koordinasi pengembangan layanan Jawa Tengah Cerdas, serta fasilitasi internet desa di 17 kabupaten dalam rangka mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE), pemenuhan *data center facilities rated III,* layanan *bandwidth* internet untuk perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, serta pengembangan kapasitas SDM pengelola infrastruktur TIK.

**11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

**b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

**c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerja sama antarkoperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

**d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

**e. Program Pengembangan UMKM**

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

**12. Penanaman Modal**

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang penanaman modal yang berkualitas, serta dukungan insentif dan kemudahan penanaman modal dan peningkatan investasi di Jawa Tengah.

**b. Program Promosi Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi investasi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan terhadap kepeminatan investasi, dan memfasilitasi kemitraan antara Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**c. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

**d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

**e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**
Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

**13. Kepemudaan dan Olahraga**

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**
Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan melalui peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda.

**b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**
Peningkatan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, peningkatan penyediaan prasarana sarana olahraga yang memadai dan terjangkau, serta pembinaan dan pelatihan atlet.

**14. Statistik**

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yang diarahkan pada perwujudan *big data* klaster pertanian, pariwisata dan pendidikan, integrasi portal data menuju layanan data terbuka dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Jawa Tengah, serta pengembangan geospasial dalam rangka mendukung Satu Peta Jawa Tengah, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola peta geospasial.

**15. Persandian**

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada optimalisasi kinerja tim *computer security insident response team* (CSIRT), baik di perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun pendampingan bagi tim CSIRT Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, peningkatan layanan *pentest* dalam rangka meningkatkan keamanan siber, peningkatan literasi keamanan informasi (*security awareness*), peningkatan capaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) melalui penerapan standar ISO 27001 tentang Standar Manajemen Keamanan Informasi, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola keamanan informasi (siber) dan persandian.

**16. Kebudayaan**

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengembangan Kebudayaan**
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui penguatan pendataan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta pembinaan SDM/lembaga/pranata kebudayaan; dan penyusunan serta evaluasi Pokok Pikir Kebudayaan Daerah.

**b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**
Peningkatan kualitas kebudayaan melalui penguatan pendataan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian tradisional.

**c. Program Pembinaan Sejarah**
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui penguatan pendataan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sejarah.

**d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pengelolaan cagar budaya berbasis pendataan; pendaftaran dan penetapan cagar budaya; serta pengembangan kerjasama multipihak dan lintas sektor.

**e. Program Pengelolaan Permuseuman**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui peningkatan pengelolaan permuseuman.

**17. Perpustakaan**

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pembinaan Perpustakaan**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan provinsi sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM perpustakaan.

**b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan dan perluasan akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid.

**18. Kearsipan**

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Arsip**

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi, peningkatan pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK, peningkatan pemanfaatan arsip oleh masyarakat melalui digitalisasi dalam peningkatan pengolahan, dan pelayanan kearsipan.

**b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip melalui digitalisasi perlindungan dan penyelamatan arsip pada perangkat daerah tingkat provinsi dan arsip statis pada LKD.

### 6.2.3 Urusan Pilihan

**1. Kelautan dan Perikanan**

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Program ini diarahkan pada pengelolaan kawasan konservasi; pemberdayaan masyarakat pesisir melalui fasilitasi prasarana dan sarana usaha sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan; penanaman bibit mangrove; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional di Jawa Tengah.

**b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; fasilitasi alat penangkapan ikan dengan sasaran masyarakat miskin; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perizinan kapal perikanan.

**c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; revitalisasi prasarana dan sarana loka budidaya; pengembangan kawasan budidaya; fasilitasi prasarana budidaya ikan yang fokus pada sasaran penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan *ekstrem*); dan penanganan hama penyakit ikan.

**d. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

**e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Jawa Tengah melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) yang fokus pada sasaran penurunan *stunting*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate* of *analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; serta penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

**2. Pariwisata**

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya tarik wisata unggulan; penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan

kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

**b. Program Pemasaran Pariwisata**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

**c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

**d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

**3. Pertanian**

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi kartu tani sebagai *database* petani dan lahan, revitalisasi kebun benih, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, serta pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan aset balai dan program padat karya. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), fasilitasi *good farming practices* (GFP) dan revitalisasi balai budidaya dan pembibitan ternak.

**b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan dan P3KE melalui program Banter Melaju, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, serta fasilitasi inovasi peternakan.

**c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV), serta perbaikan pola konsumsi dan gizi keluarga rawan *stunting*.

**d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

**e. Program Penyuluhan Pertanian**

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (supra).

**4. Kehutanan**

Rencana program prioritas urusan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Hutan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerja sama pemanfaatan di kawasan hutan produksi; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang terdiri dari penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL), pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara, penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara, pembinaan dan/atau pengawasan rehabilitasi lahan; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi meliputi koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan; pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang terdiri dari pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya, pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu; pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 $m^3$/tahun melalui perencanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 $m^3$/tahun, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 $m^3$/tahun, fasilitasi pemenuhan komitmen izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUPHHK) dengan kapasitas produksi <6000 $m^3$/tahun melalui sistem pelayanan perizinan

berusaha terintegrasi secara elektronik; perbenihan tanaman hutan yang meliputi penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar, sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, sertifikasi mutu bibit, pengawasan peredaran benih dan/atau bibit, dan pembangunan sumber benih.

**b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) provinsi melalui pengamanan kawasan TAHURA provinsi, pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat TAHURA provinsi, pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan TAHURA provinsi, pemanfaatan jasa lingkungan TAHURA provinsi, kerja sama penyelenggaraan TAHURA provinsi, perencanaan pengelolaan TAHURA; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix ) CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) untuk kewenangan daerah provinsi melalui pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES; pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting melalui penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi.

**c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan, penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.

**d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, serta optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS.

**5. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Rencana program prioritas urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan konservasi air tanah melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi nilai perolehan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah; penyusunan studi kelayakan perizinan air tanah pada wilayah sungai dalam daerah provinsi; penyusunan regulasi pengelolaan air tanah di Jawa Tengah; pengembangan Sistem Aplikasi Geologi dan Air Tanah. Program ini juga ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi warisan geologi Provinsi Jawa Tengah, yang mana pada tahun 2025 akan dilaksanakan jelajah *Geopark*/*Geoheritage* beserta pendampingan dalam penetapan *Geoheritage*, peningkatan kapasitas pengelolaan *geopark* serta perkuatan mitra dan kolaboratif ke jaringan *geopark* global. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal

mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko akibat bencana geologi (*geological hazard*).

**b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**

Program ini diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan *good mining practice* melalui penyusunan regulasi terkait petunjuk teknis pengelolaan pertambangan di Jawa Tengah dengan muatan lokal kebijakan Jawa Tengah; pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; pengembangan sistem layanan pertambangan minerba melalui *updating* sistem SILUP (Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan); pemberian penghargaan *good mining practice* sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*; penertiban kegiatan PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dengan pelaksanaan Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah; serta peningkatan kompetensi SDM pada bidang pertambangan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada mahasiswa kebumian dan evaluasinya. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; peningkatan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penetapan harga patokan mineral beserta pengendalian; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah.

**c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dan transisi energi daerah dengan meningkatkan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) dalam bauran energi berbasis potensi lokal melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT utamanya pengembangan biogas, *biogenic shallow gas* (gas rawa), dan PLTS Atap; meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT, monitoring tingkat pemanfaatan energi di Jawa Tengah melalui kegiatan evaluasi bauran energi dan perhitungan Indeks Ketahanan Energi Jawa Tengah, penyusunan kajian potensi EBT untuk mendukung evaluasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED); meningkatkan edukasi dan peluang *green jobs* kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif dengan kegiatan pendamping energi, pengembangan desa mandiri energi melalui penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah memenuhi kategori DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan; serta pemberian penghargaan Hemat Energi dan Air (HEA) sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor industri yang telah menerapkan perilaku budaya hemat energi dan air.

**d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatan kehandalan pasokan listrik dan meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita. Perwujudan ketahanan energi tersebut melalui pemerataan dan keterjangkauan akses energi listrik untuk masyarakat miskin yang belum

berlistrik; evaluasi regulasi dan/atau kebijakan ketenagalistrikan daerah; serta sosialisasi penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik atau *electrifying lifestyle*. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; koordinasi K2 bersama *stakeholder* terkait di Jawa Tengah; pendampingan pemantauan pelaksanaan usaha ketenaga-listrikan, serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2 dan evaluasinya di Jawa Tengah.

**6. Perdagangan**

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan angka pengenal importir (API) melalui *post audit* dan verifikasi ekspor/impor di kabupaten/kota.

**b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).

**c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

**d. Program Pengembangan Ekspor**

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk subtitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerja sama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center* (ITPC).

**e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

**f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah.

**7. Perindustrian**

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).

**b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

**c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

**8. Transmigrasi**

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.

### 6.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

**1. Sekretariat Daerah**

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Penataan Organisasi**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis

daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

**b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama antarkabupaten/ kota; fasilitasi kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan swasta untuk mendukung alternatif pembiayaan pembangunan; pemetaan potensi kerja sama daerah; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

**c. Program Kesejahteraan Rakyat**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.

**d. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

**e. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

**f. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

**g. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi dan substansi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

**2. Sekretariat DPRD**

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

### 6.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

**1. Perencanaan**

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

**b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

**2. Keuangan**

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

**b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

**c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

**3. Kepegawaian**

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**. Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

**4. Pendidikan dan Pelatihan**

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, fungsional, dan manajerial yang komprehensif bagi ASN didukung dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

**5. Penelitian dan Pengembangan**

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

**6. Penghubung**

Rencana program prioritas unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

### 6.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**
   Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.
b. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**
   Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

### 6.2.7 Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**
   Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.
b. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
   Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan dan penguatan peran politik bagi masyarakat, peningkatan etika budaya politik dalam kerangka wawasan kebangsaan dan ideologi negara, penguatan proses demokrasi menuju demokrasi substansial, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik.
c. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
   Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
d. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**
   Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.
e. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**
   Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

Rincian rencana kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 beserta pagu indikatifnya dapat dilihat pada lampiran Buku III. Rekapitulasi rencana kerja program prioritas pada masing-masing urusan dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 6.2.**
**Rekapitulasi Rencana Program Prioritas Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| X.XX | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | 10.195.506.393.000 |
| X.XX.01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 10.195.506.393.000 |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | 3.487.532.030.000 |
| 1.01.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 3.484.266.030.000 |
| 1.01.03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 896.000.000 |
| 1.01.04 | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 1.250.000.000 |
| 1.01.05 | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 1.120.000.000 |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | 409.338.725.000 |
| 1.02.02 | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 404.763.705.000 |
| 1.02.03 | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1.151.000.000 |
| 1.02.04 | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 300.394.000 |
| 1.02.05 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.123.626.000 |
| 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | 280.107.972.000 |
| 1.03.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 85.151.387.000 |
| 1.03.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 16.919.053.000 |
| 1.03.05 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 674.105.000 |
| 1.03.08 | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 38.166.603.000 |
| 1.03.10 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 129.159.390.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1.03.11 | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 5.335.641.000 |
| 1.03.12 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 4.701.793.000 |
| 1.04 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | 29.735.000.000 |
| 1.04.02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 25.290.000.000 |
| 1.04.03 | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 3.765.000.000 |
| 1.04.05 | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 480.000.000 |
| 1.04.06 | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 200.000.000 |
| 1.05 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | 6.038.000.000 |
| 1.05.02 | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2.090.000.000 |
| 1.05.03 | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 3.850.000.000 |
| 1.05.04 | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 98.000.000 |
| 1.06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | 158.281.087.000 |
| 1.06.02 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 10.721.000.000 |
| 1.06.03 | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 200.000.000 |
| 1.06.04 | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 72.868.427.000 |
| 1.06.05 | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 70.447.160.000 |
| 1.06.06 | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 3.584.500.000 |
| 1.06.07 | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 460.000.000 |
| 2.07 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | 11.639.281.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.07.02 | | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 246.740.000 |
| 2.07.03 | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 3.664.754.000 |
| 2.07.04 | | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 2.319.000.000 |
| 2.07.05 | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1.908.787.000 |
| 2.07.06 | | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 3.500.000.000 |
| 2.08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | 2.701.060.000 |
| 2.08.02 | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 1.000.000.000 |
| 2.08.03 | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 977.550.000 |
| 2.08.04 | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 135.000.000 |
| 2.08.05 | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 150.000.000 |
| 2.08.06 | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 185.000.000 |
| 2.08.07 | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 253.510.000 |
| 2.09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | 20.853.888.000 |
| 2.09.03 | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 14.623.888.000 |
| 2.09.04 | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 3.930.000.000 |
| 2.09.05 | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 2.300.000.000 |
| 2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | 1.475.000.000 |
| 2.10.03 | | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | 380.000.000 |
| 2.10.04 | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 570.000.000 |
| 2.10.06 | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 525.000.000 |
| 2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | 6.040.501.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.11.02 | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 434.000.000 |
| 2.11.03 | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.353.388.000 |
| 2.11.04 | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 745.000.000 |
| 2.11.05 | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 50.000.000 |
| 2.11.06 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 564.000.000 |
| 2.11.08 | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 1.305.113.000 |
| 2.11.10 | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 200.000.000 |
| 2.11.11 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 389.000.000 |
| 2.12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | 624.000.000 |
| 2.12.02 | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 220.000.000 |
| 2.12.03 | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 210.000.000 |
| 2.12.04 | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 194.000.000 |
| 2.13 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | 4.868.170.000 |
| 2.13.02 | | PROGRAM PENATAAN DESA | 20.850.000 |
| 2.13.03 | | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 602.000.000 |
| 2.13.04 | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1.540.320.000 |
| 2.13.05 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 2.705.000.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | 965.000.000 |
| 2.14.02 | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 195.000.000 |
| 2.14.03 | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 450.000.000 |
| 2.14.04 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 320.000.000 |
| 2.15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | 132.525.554.000 |
| 2.15.02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 130.646.680.000 |
| 2.15.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 779.100.000 |
| 2.15.05 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | 1.099.774.000 |
| 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | 44.567.195.000 |
| 2.16.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 24.459.750.000 |
| 2.16.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 20.107.445.000 |
| 2.17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | 9.913.542.000 |
| 2.17.03 | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 1.499.384.000 |
| 2.17.05 | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 734.908.000 |
| 2.17.06 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 1.606.604.000 |
| 2.17.07 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 3.494.064.000 |
| 2.17.08 | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 2.578.582.000 |
| 2.18 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | 4.939.212.000 |
| 2.18.02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 560.640.000 |
| 2.18.03 | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 1.612.500.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2.18.04 | | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 1.654.602.000 |
| 2.18.05 | | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 561.470.000 |
| 2.18.06 | | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 550.000.000 |
| 2.19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | 400.011.000.000 |
| 2.19.02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 11.225.000.000 |
| 2.19.03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 388.786.000.000 |
| 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | 1.210.829.000 |
| 2.20.02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 1.210.829.000 |
| 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | 3.000.000.000 |
| 2.21.02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 3.000.000.000 |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | 36.306.000.000 |
| 2.22.02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 7.580.000.000 |
| 2.22.03 | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 22.696.000.000 |
| 2.22.04 | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 955.000.000 |
| 2.22.05 | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 1.325.000.000 |
| 2.22.06 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 3.750.000.000 |
| 2.23 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | 1.640.000.000 |
| 2.23.02 | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1.400.000.000 |
| 2.23.03 | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 240.000.000 |
| 2.24 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | 771.598.000 |
| 2.24.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 701.598.000 |
| 2.24.03 | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 70.000.000 |
| 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN | | 30.967.567.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | |
| 3.25.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 2.106.110.000 |
| 3.25.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 10.581.928.000 |
| 3.25.04 | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 14.581.048.000 |
| 3.25.05 | | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.756.361.000 |
| 3.25.06 | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 1.942.120.000 |
| 3.26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | 15.785.000.000 |
| 3.26.02 | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 6.200.000.000 |
| 3.26.03 | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 5.660.000.000 |
| 3.26.04 | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 550.000.000 |
| 3.26.05 | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 3.375.000.000 |
| 3.27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | 126.730.189.000 |
| 3.27.02 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 66.224.053.000 |
| 3.27.03 | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 7.160.000.000 |
| 3.27.04 | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 38.283.154.000 |
| 3.27.05 | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 745.000.000 |
| 3.27.07 | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 14.317.982.000 |
| 3.28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | 8.012.689.000 |
| 3.28.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 5.854.089.000 |
| 3.28.04 | | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 824.768.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 3.28.05 | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 1.005.832.000 |
| 3.28.06 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 328.000.000 |
| 3.29 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | 10.204.421.000 |
| 3.29.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | 2.178.750.000 |
| 3.29.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | 2.503.054.000 |
| 3.29.05 | | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | 2.381.039.000 |
| 3.29.06 | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 3.141.578.000 |
| 3.30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | 40.338.845.000 |
| 3.30.02 | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 633.633.000 |
| 3.30.03 | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 238.250.000 |
| 3.30.04 | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 32.895.000.000 |
| 3.30.05 | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 1.334.967.000 |
| 3.30.06 | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 2.786.815.000 |
| 3.30.07 | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 2.450.180.000 |
| 3.31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | 10.525.859.000 |
| 3.31.02 | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 10.029.492.000 |
| 3.31.03 | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 245.681.000 |
| 3.31.04 | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 250.686.000 |
| 3.32 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | 261.000.000 |
| 3.32.03 | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 261.000.000 |
| 4.01 | SEKRETARIAT DAERAH | | 419.633.425.000 |
| 4.01.02 | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | 1.780.528.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4.01.03 | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 3.478.000.000 |
| 4.01.04 | | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 402.293.148.000 |
| 4.01.05 | | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 2.918.000.000 |
| 4.01.06 | | PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN | 4.775.260.000 |
| 4.01.07 | | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2.348.489.000 |
| 4.01.08 | | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2.040.000.000 |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | 380.153.260.000 |
| 4.02.02 | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 380.153.260.000 |
| 5.01 | PERENCANAAN | | 12.980.000.000 |
| 5.01.02 | | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 5.900.000.000 |
| 5.01.03 | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 7.080.000.000 |
| 5.02 | KEUANGAN | | 7.328.971.600.000 |
| 5.02.02 | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 7.285.455.540.000 |
| 5.02.03 | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 5.365.000.000 |
| 5.02.04 | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 38.151.060.000 |
| 5.03 | KEPEGAWAIAN | | 10.157.000.000 |
| 5.03.02 | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 10.157.000.000 |
| 5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | 15.836.640.000 |
| 5.04.02 | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 15.836.640.000 |
| 5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | 4.675.000.000 |
| 5.05.02 | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 4.675.000.000 |
| 5.07 | PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | 3.992.880.000 |
| 5.07.02 | | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | 3.992.880.000 |
| 6.01 | INSPEKTORAT DAERAH | | 8.903.799.000 |
| 6.01.02 | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 6.073.727.000 |

| KODE | URUSAN | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (Rp) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 6.01.03 | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 2.830.072.000 |
| 8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | 233.222.583.000 |
| 8.01.02 | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 3.865.113.000 |
| 8.01.03 | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 50.923.529.000 |
| 8.01.04 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 127.445.543.000 |
| 8.01.05 | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 2.844.451.000 |
| 8.01.06 | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 48.118.947.000 |
| **TOTAL** | | | **23.911.942.794.000** |

## Tabel 6.3.
## Rekapitulasi Rencana Program Prioritas Berdasarkan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

| PERANGKAT DAERAH | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (RP) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | | **8.813.491.843.000** |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 3.484.266.030.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 896.000.000 |
| | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 1.250.000.000 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 1.120.000.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 7.580.000.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 22.696.000.000 |
| | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 955.000.000 |
| | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 1.325.000.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 3.750.000.000 |

| PERANGKAT DAERAH | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (RP) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 5.289.653.813.000 |
| **Dinas Kesehatan** | | **3.122.982.828.000** |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 404.763.705.000 |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1.151.000.000 |
| | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 300.394.000 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 3.123.626.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 2.713.644.103.000 |
| **Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang** | | **185.598.594.000** |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 85.151.387.000 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 4.701.793.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 95.745.414.000 |
| **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | | **297.519.957.000** |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 16.919.053.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 674.105.000 |
| | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 38.166.603.000 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 129.159.390.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 5.335.641.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 107.265.165.000 |
| **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | **52.534.033.000** |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 25.290.000.000 |
| | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 3.765.000.000 |
| | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 480.000.000 |
| | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 200.000.000 |
| | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | 380.000.000 |
| | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 570.000.000 |
| | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 525.000.000 |

| PERANGKAT DAERAH | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (RP) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 21.324.033.000 |
| **Satuan Polisi Pamong Praja** | | **20.726.991.000** |
| | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 2.090.000.000 |
| | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 98.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 18.538.991.000 |
| **Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | | **18.223.940.000** |
| | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 3.850.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 14.373.940.000 |
| **Dinas Sosial** | | **305.418.176.000** |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 10.721.000.000 |
| | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 200.000.000 |
| | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 72.868.427.000 |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 70.447.160.000 |
| | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 3.584.500.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 460.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 147.137.089.000 |
| **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** | | **99.455.101.000** |
| | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 246.740.000 |
| | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 3.664.754.000 |
| | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 2.319.000.000 |
| | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1.908.787.000 |
| | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 3.500.000.000 |
| | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 261.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 87.554.820.000 |
| **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | | **20.162.302.000** |
| | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 1.000.000.000 |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 977.550.000 |

| PERANGKAT DAERAH | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (RP) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 135.000.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 150.000.000 |
| | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 185.000.000 |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 253.510.000 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 195.000.000 |
| | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 450.000.000 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 320.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 16.496.242.000 |
| **Dinas Ketahanan Pangan** | | **42.108.917.000** |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 14.623.888.000 |
| | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 3.930.000.000 |
| | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 2.300.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 21.255.029.000 |
| **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** | | **157.218.385.000** |
| | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 434.000.000 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 2.353.388.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 745.000.000 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 50.000.000 |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 564.000.000 |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 1.305.113.000 |
| | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 200.000.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 389.000.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 5.854.089.000 |
| | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 824.768.000 |

| PERANGKAT DAERAH | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (RP) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 1.005.832.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 328.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 143.165.195.000 |
| **Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | **25.355.375.000** |
| | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 220.000.000 |
| | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 210.000.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 194.000.000 |
| | PROGRAM PENATAAN DESA | 20.850.000 |
| | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 602.000.000 |
| | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1.540.320.000 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 2.705.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 19.863.205.000 |
| **Dinas Perhubungan** | | **200.748.075.000** |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 130.646.680.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 779.100.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | 1.099.774.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 68.222.521.000 |
| **Dinas Komunikasi dan Informatika** | | **78.415.153.000** |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 24.459.750.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 20.107.445.000 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 1.210.829.000 |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 3.000.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 29.637.129.000 |
| **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | | **35.821.452.000** |
| | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 1.499.384.000 |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 734.908.000 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 1.606.604.000 |

| PERANGKAT DAERAH | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (RP) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 3.494.064.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 2.578.582.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 25.907.910.000 |
| **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | | **25.125.018.000** |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 560.640.000 |
| | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 1.612.500.000 |
| | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 1.654.602.000 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 561.470.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 550.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 20.185.806.000 |
| **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata** | | **465.772.367.000** |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 11.225.000.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 388.786.000.000 |
| | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 6.200.000.000 |
| | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 5.660.000.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 550.000.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 3.375.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 49.976.367.000 |
| **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | | **35.800.957.000** |
| | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1.400.000.000 |
| | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 240.000.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 701.598.000 |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 70.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 33.389.359.000 |
| **Dinas Kelautan dan Perikanan** | | **86.630.448.000** |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 2.106.110.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 10.581.928.000 |

| PERANGKAT DAERAH | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (RP) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 14.581.048.000 |
| | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.756.361.000 |
| | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 1.942.120.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 55.662.881.000 |
| **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** | | **143.277.041.000** |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 37.133.500.000 |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 1.200.000.000 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 38.283.154.000 |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 12.107.700.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 54.552.687.000 |
| **Dinas Pertanian dan Perkebunan** | | **149.815.487.000** |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 29.090.553.000 |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 5.960.000.000 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 745.000.000 |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 2.210.282.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 111.809.652.000 |
| **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | | **63.838.104.000** |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | 2.178.750.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | 2.503.054.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | 2.381.039.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 3.141.578.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 53.633.683.000 |
| **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | | **100.389.322.000** |
| | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 633.633.000 |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 238.250.000 |
| | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 32.895.000.000 |

| PERANGKAT DAERAH | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (RP) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 1.334.967.000 |
| | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 2.786.815.000 |
| | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 2.450.180.000 |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 10.029.492.000 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 245.681.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 250.686.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 49.524.618.000 |
| **Sekretariat Daerah** | | **645.806.071.000** |
| | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | 1.780.528.000 |
| | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 3.478.000.000 |
| | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 402.293.148.000 |
| | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 2.918.000.000 |
| | PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN | 4.775.260.000 |
| | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2.348.489.000 |
| | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2.040.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 226.172.646.000 |
| **Sekretariat DPRD** | | **599.025.008.000** |
| | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 380.153.260.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 218.871.748.000 |
| **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | | **48.421.011.000** |
| | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 5.900.000.000 |
| | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 7.080.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 35.441.011.000 |
| **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** | | **7.338.445.947.000** |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 7.285.455.540.000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 5.365.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 47.625.407.000 |
| **Badan Pengelola Pendapatan Daerah** | | **295.488.152.000** |

| PERANGKAT DAERAH | PROGRAM | PAGU INDIKATIF (RP) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 38.151.060.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 257.337.092.000 |
| **Badan Kepegawaian Daerah** | | **42.970.136.000** |
| | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | 10.157.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 32.813.136.000 |
| **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah** | | **59.710.905.000** |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 15.836.640.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 43.874.265.000 |
| **Badan Riset dan Inovasi Daerah** | | **20.455.100.000** |
| | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 4.675.000.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 15.780.100.000 |
| **Badan Penghubung** | | **24.261.771.000** |
| | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | 3.992.880.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 20.268.891.000 |
| **Inspektorat** | | **39.637.631.000** |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 6.073.727.000 |
| | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 2.830.072.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 30.733.832.000 |
| **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | **251.291.196.000** |
| | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | 3.865.113.000 |
| | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 50.923.529.000 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 127.445.543.000 |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 2.844.451.000 |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 48.143.947.000 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 18.068.613.000 |
| | **TOTAL** | **23.911.942.794.000** |

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026.

## 7.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebagai berikut.

**Tabel 7.1.**
**Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

| No | Indikator Kinerja Utama Daerah | Satuan | Realisasi 2023 | Target Capaian 2024 | Target Capaian 2025 | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PDRB per Kapita | Juta Rupiah | 45,20 | 45,82 | 49,30 - 49,73 | Sekretariat Daerah |
| 2 | Angka Kemiskinan | % | 10,77 | 9,76-8,96 | 9,66 – 9,00 | Sekretariat Daerah |
| 3 | Rasio Gini | Angka | 0,369 | 0,364 | 0,362-0,367 | Sekretariat Daerah |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,98 | 4,70 - 5,50 | 4,90 - 5,60 | Sekretariat Daerah |
| 5 | Inflasi | % | 2,89 | 2,5 ± 1 | 1,5 - 3,5 | Sekretariat Daerah |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,13 | 5,00 – 4,30 | 4,81-4,42 | Sekretariat Daerah |
| 7 | Nilai Tukar Petani | Angka | 117,11 | 107,45 | 107,52 | Sekretariat Daerah |
| 8 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 73,39 | 73,43 | 73,99 | Sekretariat Daerah |
| 9 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Angka | 60,89 | 61,13 | 62,24-62,31 | Sekretariat Daerah |
| 10 | Indeks Pembangunan Gender | Angka | 92,83 | 93,03 | 93,13 | Sekretariat Daerah |
| 11 | Indeks Pembangunan Keluarga | Angka | 63,07 | 58,20 | 64,07 | Sekretariat Daerah |
| 12 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 68,59 | 67,55 | 75,68 | Sekretariat Daerah |
| 13 | Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana | % | - | 4,00 | 4,00 | Sekretariat Daerah |
| 14 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 83,13 | 81,50 | 83,50 | Sekretariat Daerah |

## 7.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah, serta IKU perangkat daerah. Indikator kinerja daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.2.**
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Target Capaian Tahun 2024 | Target Capaian Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | |
| 1 | PDRB per Kapita | Juta Rupiah | 45,20 | 45,82 | 49,30 - 49,73 |
| 2 | Angka Kemiskinan | % | 10,77 | 9,76-8,96 | 9,66 – 9,00 |
| 3 | Rasio Gini | Angka | 0,369 | 0,364 | 0,362 – 0,367 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 4,98 | 4,70 - 5,50 | 4,90 - 5,60 |
| 5 | Inflasi | % | 2,89 | 2,5 ± 1 | 1,5 – 3,5 |
| 6 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,13 | 5,00 – 4,30 | 4,81-4,42 |
| 7 | Nilai Tukar Petani | Angka | 117,11 | 107,45 | 107,52 |
| 8 | Indeks Pembangunan Manusia | Angka | 73,39 | 73,43 | 73,99 |
| 9 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Angka | 60,89 | 61,13 | 62,24-62.31 |
| 10 | Indeks Pembangunan Gender | Angka | 92,83 | 93,03 | 93,13 |
| 11 | Indeks Pembangunan Keluarga | Angka | 63,07 | 58,20 | 64,07 |
| **B** | **Aspek Pelayanan Umum** | | | | |
| | **Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar** | | | | |
| | **Pendidikan** | | | | |
| 1 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 12,85 | 12,94 | 13,07 |
| 2 | Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 8,01 | 8,08 | 8,14 |
| | **Kesehatan** | | | | |
| 1 | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74,69 | 74,74 | 74,65 |
| 2 | Persentase penurunan kasus kematian ibu | % | - | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia | % | - | 60,00 | 74,28 |
| 4 | Persentase ketercapaian intervensi spesifik dalam penurunan *stunting* | % | - | 80,00 | 85,00 |
| 5 | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa | % | - | 78,00 | 82,00 |
| 6 | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan | % | - | 49,89 | 51,69 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Target Capaian Tahun 2024 | Target Capaian Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar | | | | |
| 8 | Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi | % | 88,97 | 87,00 | 88,97 |
| 9 | Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | % | 94,15 | 90,00 | 90,50 |
| 10 | Persentase capaian SPM di RSUD dr. Adhyatma MPH | % | 91,11 | 91,11 | 91,11 |
| 11 | Persentase capaian SPM di RSUD dr. Rehatta | % | 88,49 | 88,00 | 89,00 |
| 12 | Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo | % | 98,75 | 98,00 | 98,75 |
| 13 | Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta | % | 98,08 | 98,17 | 98,20 |
| 14 | Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi | % | 97,9 | 98,00 | 100,00 |
| 15 | Persentase capaian SPM di RS Mata | % | 0 | 0 | 100,00 |
| | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | | | |
| 1 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap | % | - | 91,29 | 89,46 |
| 2 | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor | % | 45,03 | 44,48 | 46,55 |
| 3 | Persentase kondisi jembatan provinsi baik | % | - | 83.38 | 83,38 |
| 4 | Persentase akses air minum aman | % | - | 40,43 | 42,93 |
| 5 | Persentase akses air limbah domestik aman | % | - | 10,97 | 12,50 |
| 6 | Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar | % | - | 49,42 | 61,65 |
| 7 | Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air | % | - | 61,78 | 62,08 |
| 8 | Persentase keterwujudan penataan ruang | % | - | 61,57 | 64,07 |
| | **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | | | | |
| 1 | Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat | % | - | 14,29 | 41,57 |
| 2 | Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat | % | - | 0,04 | 20,22 |
| 3 | Persentase penurunan kawasan kumuh | % | - | 55,21 | 39,78 |
| | **Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat** | | | | |
| 1 | Indeks Penyelenggaraan Trantibum | Angka | - | 82,00 | 85,00 |
| 2 | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | - | 0,74 | 0,75 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Target Capaian Tahun 2024 | Target Capaian Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Sosial** | | | | |
| 1 | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya | % | - | 2,46 | 3,1 |
| | **Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar** | | | | |
| | **Tenaga Kerja** | | | | |
| 1 | Persentase pengangguran yang ditempatkan | % | - | 28,60 | 28,64 |
| 2 | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah | % | 65,71 | 62,85 | 68,57 |
| 3 | Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah | Juta Rp | - | 56,00 | 56,50 |
| 4 | Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten | % | 8,26 | 9,24 | 10,15 |
| 5 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | % | 64,24 | 71,04 | 71,06 |
| 6 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) | % | 92,04 | 91,07 | 91,58 |
| 7 | Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan | % | 81,58 | 81,53 | 80,96 |
| | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | |
| 1 | Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha | % | - | 40,00 | 35,00 |
| 2 | Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan | Per 100.000 | - | 4,25 | 4,20 |
| 3 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Angka | - | 66,00 | 67,00 |
| | **Pangan** | | | | |
| 1 | Indeks Ketahanan Pangan | Angka | 84,8 | 83,00 | 83,05 |
| | **Pertanahan** | | | | |
| 1 | Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum | % | - | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agrarian | % | 216,06 | 100,00 | 100,00 |
| | **Lingkungan Hidup** | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Air | Angka | 51,14 | 50,66 | 68,71 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara | Angka | 100 | 85,01 | 84,91 |
| 3 | Indeks Pencemaran Air | Angka | 3,39 | 3,37 | 3,35 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Target Capaian Tahun 2024 | Target Capaian Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Indeks SO2 dan NO2 | Angka | 0,2 | 0,37 | 0,3696 |
| | **Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | |
| 1 | Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah | Nilai | - | 4,00 | 4,00 |
| | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | |
| 1 | Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah | % | - | 0,7318 | 0,7618 |
| | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | |
| 1 | Angka Kelahiran Total (TFR) | Angka | 2,04 | 2,13 | 2,12 |
| | **Perhubungan** | | | | |
| 1 | Indeks pelayanan transportasi | Angka | 5.997 | 6,05 | 6,274 |
| 2 | Rasio konektivitas provinsi | Angka | 0,373 | 0,38 | 0,411 |
| 3 | Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan | Angka | 16,698 | 16,098 | 15,333 |
| 4 | *On time performance* layanan transportasi | % | 84,19 | 83,22 | 85,05 |
| | **Komunikasi dan Informatika** | | | | |
| 1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Angka | 3,98 | 4,27 | 4,50 |
| | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | |
| 1 | Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB | % | - | 12,53 | 12,99 |
| 2 | Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah | % | - | 0,29 | 0,38 |
| 3 | Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah | % | - | 7,16 | 7,39 |
| | **Penanaman Modal** | | | | |
| 1 | Pertumbuhan nilai penanaman modal | % | 0,22 | 4,00 | 4,25 |
| 2 | Persentase realisasi PMA dan PMDN | % | 117,23 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 94,14 | 90,00 | 91,00 |
| | **Kepemudaan dan Olahraga** | | | | |
| 1 | Sport Development Index (SDI) | % | 0,37 | 0,42 | 0,45 |
| 2 | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | % | 54,5 | 56,85 | 58,25 |
| | **Statistik** | | | | |
| 1 | Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah | % | - | 32,00 | 64,00 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Target Capaian Tahun 2024 | Target Capaian Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Persandian** | | | | |
| 1 | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) | Angka | - | 636,00 | 638,00 |
| | **Kebudayaan** | | | | |
| 1 | Angka Melek Budaya | % | - | 52,32 | 53,82 |
| | **Perpustakaan** | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Angka | 13,67 | 14,08 | 15,62 |
| | **Kearsipan** | | | | |
| 1 | Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah | Nilai | 93,99 | 94,00 | 95,00 |
| | **Urusan Pilihan** | | | | |
| | **Kelautan dan Perikanan** | | | | |
| 1 | Produksi perikanan | Ton | 855.734,92 | 927.350 | 952.718 |
| 2 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | Angka | - | 105,00 | 105,50 |
| 3 | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) | Angka | - | 110,00 | 110,50 |
| | **Pariwisata** | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata | % | 11,24 | 8,01 | 8,26 |
| 2 | Nilai tambah ekonomi kreatif | Rupiah | - | 1.686.000.000.000 | 1.737.000.000.000 |
| | **Pertanian** | | | | |
| 1 | Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan | % | - | 3,00 | 3,10 |
| 2 | Nilai Tukar Petani Peternakan | Angka | - | 100,50 | 100,80 |
| 3 | Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | % | - | 0,58 | 0,16 |
| 4 | NTP Tanaman Pangan | Angka | 122,97 | 105,19 | 105,57 |
| 5 | NTP Hortikultura | Angka | 120,62 | 108,11 | 108,49 |
| 6 | NTP Perkebunan Rakyat | Angka | 110,04 | 100,59 | 100,97 |
| | **Kehutanan** | | | | |
| 1 | Indeks kualitas tutupan lahan | Angka | 46,22 | 42,45 | 59,46 |
| 2 | Luas tutupan lahan | Ha | 1.022.457 | 1.022.457 | 1.022.457 |
| | **Energi dan Sumber Daya Mineral** | | | | |
| 1 | Presentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi | % | 15,98 | 18,41 | 21,32 |
| 2 | Tingkat konsumsi tenaga listrik | kWh/kapita | - | 768,10 | 807 |
| 3 | Indeks Ketersediaan Air Tanah | Angka | 3,76 | 3,60 | 3,63 |
| 4 | Persentase penerapan *Good Mining Practice* | % | - | 53,00 | 57,00 |
| | **Perdagangan** | | | | |
| 1 | Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | % | - | 4,51 | 4,83 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Target Capaian Tahun 2024 | Target Capaian Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Perindustrian** | | | | |
| 1 | Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | - | 3,25 | 3,9 |
| | **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** | | | | |
| | **Sekretariat Daerah** | | | | |
| 1 | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | - | 36,10 | 37,10 |
| 2 | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah | % | - | 80,00 | 80,00 |
| 3 | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa | % | - | 90,00 | 90,00 |
| 4 | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat | % | - | 90,00 | 90,00 |
| | **Sekretariat DPRD** | | | | |
| 1 | Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah | Angka | - | 90,00 | 91,00 |
| 2 | Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD) | % | - | 75,00 | 76,00 |
| 3 | Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD) | % | - | 75,00 | 76,00 |
| | **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** | | | | |
| | **Perencanaan** | | | | |
| 1 | Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan | % | - | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi | % | - | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional | % | - | 100,00 | 100,00 |
| | **Keuangan** | | | | |
| 1 | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah | % | - | 13,09 | -6,19 |
| 2 | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain | % | - | -7,67 | 3,19 |
| 3 | Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah | % | - | 97,75 | 97,91 |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Target Capaian Tahun 2024 | Target Capaian Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 4 | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | % | - | 84,02 | 89,86 |
| | **Kepegawaian** | | | | |
| 1 | Indeks Sistem Merit | Angka | 0,83 | 0,86 | 0,87 |
| | **Pendidikan dan Pelatihan** | | | | |
| 1 | Indeks Kompetensi ASN | Angka | - | 3,07 | 3,08 |
| 2 | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi | % | - | 8,67 | 17,34 |
| 3 | Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi | % | 71,32 | 100,00 | 100,00 |
| | **Penelitian dan Pengembangan** | | | | |
| 1 | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 71,32 | 72,50 | 73,00 |
| | **Pengelolaan Penghubung** | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung | Angka | - | 85,00 | 85,00 |
| | **Unsur Pengawasan Pemerintahan** | | | | |
| 1 | Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi | Level | - | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Level kapabilitas APIP | Level | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 3 | Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah | Level | - | 3,00 | 3,00 |
| | **Unsur Pemerintahan Umum** | | | | |
| 1 | Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | - | 2,745 | 2,905 |
| **C** | **Aspek Daya Saing** | | | | |
| 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | 68,59 | 67,55 | 75,68 |
| 2 | Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana | % | - | 4,00 | 4,00 |
| 3 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 83,13 | 81,50 | 83,50 |

**) Keterangan:*
*Tanda strip '-' menandakan indikator baru pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sehingga Tahun 2023 data belum tersedia.*

## 7.3. Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Hasil Rakortek Tahun 2024 dan RKP Tahun 2025

Berdasarkan hasil koordinasi teknis perencanaan pembangunan antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Forum Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan telah disepakati besaran target sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2025. Kesepakatan tersebut merupakan wujud sinergi dan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah yang terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 7.3.**
**Sasaran Makro Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**
**Berdasarkan Hasil Rakortek Pembangunan Tahun 2024**

| No | Indikator Makro Pembangunan Daerah | Sasaran Awal RKPD Tahun 2025 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PDRB per kapita | 49,30 - 49,73 Juta Rupiah |
| 2 | Kontribusi PDB Industri Pengolahan | 33,88-34,06 % |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | 9,66 – 9,00% |
| 4 | Rasio Gini | 0,362-0,367 |
| 5 | Kontribusi PDRB Provinsi | 8,25% |
| 6 | Indeks Modal Manusia | 0,58 |
| 7 | Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI) | 65,3 |
| 8 | Penurunan intensitas emisi GRK | 0,32 |
| 9 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi | 39,97 % |
| 10 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 4,90-5,60 % |
| 11 | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal | 20 % |
| 12 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,81 – 4,42% |
| 13 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 59,80 % |
| 14 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | 3,50% |
| 15 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) | 0 |
| 16 | Proporsi PDB Ekonomi Kreatif | 1 % |
| 17 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 6 |
| 18 | Ekspor Barang dan Jasa | 10,97 % |
| 19 | Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provins | 7,38 |
| 20 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 30,19% |
| 21 | Indeks Reformasi Hukum (IRH) | 79,1 |
| 22 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 4,18 |
| 23 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,39 4,50 |
| 24 | Indeks Integritas Nasional | 79,68 - 80 |
| 25 | Indeks Demokrasi Indonesia | 85,81 – 89,07 |
| 26 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | 1,38 |
| 27 | Tingkat Inflasi | 1,5-3,5 % |
| 28 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) | 73,81 – 73,82 |
| 29 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,34 |
| 30 | Konsumsi Listrik per Kapita | 807 |
| 31 | Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan | 9,72 |

*Sumber: Hasil Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024*

Selanjutnya indikator sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang selaras dengan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025, dan selaras dengan penetapan Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 tertuang dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 7.4.**
**Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Yang Selaras Dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025**

| | Nasional (RKP Tahun 2025) | | Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Sasaran Pembangunan** | **Target Nasional Dalam RKP 2025** | **Sasaran Pembangunan Daerah** | **Target RKPD Tahun 2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Indeks Demokrasi Indonesia | 81,69 – 85,23 | Indeks Demokrasi Indonesia | 85,81 – 89,07 |
| 2 | Asia Power Index (*Millitary Capability*) | 20 | Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah | Cukup Tangguh |
| 3 | Asia Power Index (*Diplomatic Influence*) | 61,54 | Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah | Sedang |
| 4 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Sendirian di Area Tempat Tinggalnya | 67,5 | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 74,56 |
| 5 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) | 7,21 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) (%) | 9,37 |
| 6 | Indeks Ketahanan Energi | 6,77 | Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Milyar) | 92,20 |
| | | | Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) | 806,76 |
| 7 | Kapasitas tampungan air ($m^3$/kapita) | 65,18 | Kapasitas Air Baku ($m^3$/detik) | 5,20 |
| | | | Persentase kondisi baik infrastruktur tampungan air kewenangan provinsi (%) | 64,31 |
| 8 | Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) | 39,20 | Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) | 39,46 |
| 9 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 12,5 | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 12,50 |
| 10 | Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global | 43 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 6,00 |
| 11 | Indeks Ekonomi Hijau | 70,80 | Indeks Ekonomi Hijau | 62,23 |
| 12 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | 20,00 | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer | 21,32 |
| 13 | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | 24,00 (16,00 terdaur ulang) | Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) | 17,00 |
| 14 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0,44 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0,482 |
| 15 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 76,68 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 75,68 |
| 16 | Persentase Penurunan Emisi GRK | | Persentase Penurunan Emisi GRK | |

| | Nasional (RKP Tahun 2025) | | Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Sasaran Pembangunan** | **Target Nasional Dalam RKP 2025** | **Sasaran Pembangunan Daerah** | **Target RKPD Tahun 2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | - Tahunan (%) | 32,65 | Tahunan (%) | 5,65 |
| | - Kumulatif (%) | 28,12 | Kumulatif (%) | 12,35 |
| 17 | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) | 1,44 | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah nonpertanian pada level provinsi (%) | 10,39 |
| 18 | Rasio kewirausahaan (%) | 3,14 | Rasio kewirausahaan daerah (%) | 3,21 |
| 19 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) | 1,26 | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) | 2,00 |
| 20 | Rasio PDB Pariwisata (%) | 4,60 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 3,50 |
| | | | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang) | 66,81 |
| 21 | Devisa Pariwisata (miliar USD) | 22,10 | | |
| 22 | Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) | 7,92 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%) | 12,61 |
| 23 | Aset Perbankan /PDB (%) | 59,50 | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) | 25,29 |
| 24 | Aset Dana Pensiun/PDB (%) | 8,10 | Aset Dana Pensiun/PDRB (%) | 0,43 |
| 25 | Aset Asuransi/PDB (%) | 8,78 | | |
| 26 | Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) | 56,7 | Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan | 3.700.540,29 |
| 27 | Total Kredit/PDB (%) | 36,1 | Total Kredit/PDB (%) | 23,20 |
| 28 | Inklusi Keuangan (%) | 90,6 | Inklusi Keuangan (%) | 92,07 |
| 29 | Hasil Pembelajaran | | | |
| | a. Rata-rata nilai PISA | | Persentase kabupaten/ kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | |
| | i. Membaca | 396 | - Literasi Membaca (%) | 78,31 – 78,49 |
| | ii. Matematika | 404 | - Numerasi (%) | 37,28 – 37,46 |

| | Nasional (RKP Tahun 2025) | | Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Sasaran Pembangunan** | **Target Nasional Dalam RKP 2025** | **Sasaran Pembangunan Daerah** | **Target RKPD Tahun 2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | iii. Sains | 416 | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | |
| | | | - Literasi Membaca (%) | 66,28 – 66,46 |
| | | | - Numerasi (%) | 49,76 – 49,95 |
| | b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) | 9,46 | Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) | 8,73 – 8,74 |
| | c. Harapan lama sekolah (tahun) | 13,37 | Harapan lama sekolah (tahun) | 13,07 |
| 30 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) | 33,94 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 8,18 |
| 31 | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 66,78 | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) | 66,89 |
| 32 | Tingkat Penguatan Iptek: | | | |
| | a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (%PDB) | 0,30 | Kapabilitas Inovasi | 4,80 |
| | b. Peringkat Indeks Inovasi Global | 60 | | |
| 33 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,50 – 5,00 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,81 – 4,42 |
| 34 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 56,30 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 59,80 |
| 35 | Usia Harapan Hidup (tahun) | 74,43 | Usia Harapan Hidup (tahun) | 74,65 |
| 36 | Kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| | a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 122 | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 111 |
| | b. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 18,80 | Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 18,00 |
| 37 | Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | 272 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)* (%) | 92,00 |
| | | | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%) | 92,00 |

| | Nasional (RKP Tahun 2025) | | Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Sasaran Pembangunan** | **Target Nasional Dalam RKP 2025** | **Sasaran Pembangunan Daerah** | **Target RKPD Tahun 2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) | 98 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) | 96,36 |
| 39 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) | 70,29 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) | 73,81 – 73,82 |
| 40 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,425 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,34 |
| 41 | Rasio PDB Industri Pengolahan (%) | 19,9 - 20,0 | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 33,88 – 34,06 |
| 42 | Pembentukan Modal Total Bruto (%PDB) | 30,1 - 30,2 | Pembentukan Modal Total Bruto (% PDRB) | 30,19 |
| 43 | Ekspor Barang dan Jasa (%PDB) | 21,0 – 21,6 | Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) | 10,97 |
| 44 | Biaya Logistik (%PDB) | 13,50 | | |
| 45 | Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%) | 15 | | |
| 46 | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) | 43,19 | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%) | 39,97 |
| 47 | Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%) | 22 | Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%) | 20,00 |
| 48 | Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%) | 44,34 | Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%) | 2,41 |
| 49 | Persentase desa mandiri (%) | 4 | Persentase desa mandiri (%) | 9,10 |
| 50 | Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 67,00 | Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 72,80 |
| 51 | *Return on Asset* (ROA) BUMN (%) | 3,45 | *Return on Asset* (ROA) BUMN (%) | 1,44 |
| 52 | Indeks Integritas Nasional | 74,52 | Indeks Integritas Nasional | 80,97 |
| 53 | Indeks Materi Hukum | 0,51 | Indeks Reformasi Hukum | 79,10 |
| 54 | Indeks Pelayanan Publik | 3,68 | Indeks Pelayanan Publik | 4,28 |
| 55 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,00 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 4,28 |
| 56 | Indeks Persepsi Korupsi | 38 | | |
| 57 | Indeks Pembangunan Hukum | 0,69 | Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM | 65,00 |
| 58 | Rasio Perpajakan terhadap PDB (%) | 10,70 – 11,20 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 1,38 |
| 59 | Tingkat Inflasi (%) | 1,5 – 3,5 | Tingkat Inflasi (%) | 1,50 – 3,50 |

| | Nasional (RKP Tahun 2025) | | Provinsi Jawa Tengah (RKPD Tahun 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| **No** | **Sasaran Pembangunan** | **Target Nasional Dalam RKP 2025** | **Sasaran Pembangunan Daerah** | **Target RKPD Tahun 2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | Indeks Pembangunan Kebudayaa (IPK) | 58,39 | Indeks Pembangunan Kebudayaa (IPK) | 62,24 – 62,31 |
| 61 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 76,77 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 78,65 – 79,20 |
| 62 | Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) | 0,137 | | |

*Sumber: RKP Tahun 2025; Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045; Hasil Rakortekbang Tahun 2024*

## 7.4. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja program yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Indikator kinerja program adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.**
**Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | |
| | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | 100 | % | Seluruh Perangkat Daerah |
| | Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | 100 | % | Seluruh Perangkat Daerah |
| | Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi | 82 | % | RSUD Dr. Moewardi |
| | Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | 83 | % | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| | Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo | 49,91 | % | RSUD dr. ADHYATMA, MPH |
| | Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo | 40 | % | RSUD dr. REHATTA |
| | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 43 | % | RSJD Dr. Amino Gondohutomo |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta | 33 | % | RSJD dr. ARIF ZAINUDIN |
| | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 45,6 | % | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA | 75 | % | |
| | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA | 36,86 | Angka | |
| | Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | 67,8 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA | 56 | % | |
| | Persentase angka putus sekolah SMA | 2,28 | % | |
| | Persentase angka putus sekolah SMK | 0,024 | % | |
| | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK | 65 | % | |
| | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK | 0,6 | Angka | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMK | 58,82 | % | |
| | Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | 53,49 | % | |
| | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB | 13,16 | % | |
| | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB | 15 | Angka | |
| | Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | 10 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SLB | 68,18 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase angka putus sekolah SLB | 3,2 | % | |
| | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi | 84,1 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi | 20 | % | |
| | Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi | 20 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I | 1,7 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I | 0,95 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I | 90,9 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II | 76,84 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II | 1 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II | 40,41 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III | 2,89 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III | 69,9 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III | 76,06 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV | 25,85 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta | 1,5 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | | | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV | 71,25 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V | 1,93 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V | 78,9 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V | 94,23 | % | |
| | APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI | 80,17 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | 93 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI | 93 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | 2,75 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII | 85,6 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII | 72,84 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII | 77,25 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | 2,3 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII | 76,13 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | 3,24 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX | 79,2 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX | 54,6 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X | 78,06 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X | 32,14 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X | 85,17 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI | 88,14 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | 4,84 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI | 48,73 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | 2,08 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII | 83 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII | 81,4 | % | |
| | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII | 88,26 | % | |
| | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | 2,53 | % | |
| | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII | 79,5 | % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I | 89,56 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II | 81,72 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III | 83,77 | Angka | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | 82,27 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V | 88,84 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | 86,99 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | 89,33 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | 89,53 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | 86,35 | Angka | |
| | Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X | 82,71 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | 83,77 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | 85,8 | Angka | |
| | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | 86,56 | Angka | |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri) | 78,2 | % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA | 16 | % | |
| | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK | 94,29 | % | |
| | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus | 100 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan | 3 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I | | | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II | 100 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III | 100 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | 15 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V | 25 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | 100 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | 100 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | 100 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | 50 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X | 35 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, | 4,76 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | SMK dan SLB CABDIN XI | | | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | 100 | % | |
| | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD |
| | Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita | 40 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting | 57,14 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia | 74,28 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular | 74,3 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa | 74,3 | % | |
| | Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi | 100 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan | 68,5 | % | |
| | Persentase pemanfaatan informasi kesehatan | 85 | % | |
| | Persentase ketersediaan obat dan vaksin | 85 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 57,14 | % | |
| | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang | 71,42 | % | |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang | 100 | % | |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa | 100 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 42,85 | % | |
| | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa | 85,71 | % | |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang | 100 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang | 57,14 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | melaksanakan skrining kesehatan remaja | | | |
| | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang | 71,42 | % | |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten | 100 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 42,86 | % | |
| | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten | 42,86 | % | |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati | 100 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | 42,86 | % | |
| | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati | 42,86 | % | |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM | 85 | % | |
| | Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan | 100 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | masyarakat RSUD Kelet Donorejo | | | |
| | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta | 100 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD |
| | Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya | 85 | % | |
| | Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi | 98 | % | |
| | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo | 35 | % | |
| | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 70 | % | |
| | | | | |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | Dinas Kesehatan |
| | Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku | 80 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | Dinas Kesehatan, RSUD/RSJD |
| | Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi | 85,71 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 57,14 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 42,85 | % | |
| | Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 57,14 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 42,86 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | 42,86 | % | |
| | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo | 100 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 100 | % | |
| | Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 100 | % | |
| | Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
| | Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air | 62,5 | % | |
| | Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik | 64,31 | % | |
| | Indeks kinerja sistem irigasi | 69,11 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi | 52,41 | % | |
| | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 62,68 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 34,78 | % | |
| | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah | 53,26 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | BPSDA Pemali Comal | | | |
| | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 100 | % | |
| | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 71,54 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 63,64 | % | |
| | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto | 50,08 | % | |
| | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 100 | % | |
| | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 62,85 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 50 | % | |
| | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 100 | % | |
| | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 67,36 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 67,35 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 100 | % | |
| | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 60 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 92,23 | % | |
| | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 100 | % | |
| | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 72,65 | Angka | |
| | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 76,5 | % | |
| | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 100 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | Persentase akses air minum layak | 93,94 | % | |
| | Persentase akses air minum jaringan perpipaan | 57,82 | % | |
| | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan | 100 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | Persentase akses air limbah domestik layak | 95,18 | % | |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah | 5,83 | % | |
| | Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis | 12,23 | % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | Persentase panjang jalan yang dileger | 77,26 | % | |
| | Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan | 100 | % | |
| | Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan | 100 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur | 47,91 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat | 45,07 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi | 91,57 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal | | | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal | 77,37 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan | 89,44 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan | 86,19 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap | 90,1 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap | 87,57 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang | 91,47 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang | 85,47 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang | 90,2 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang | 71,44 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo | 90,92 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo | 92,66 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati | 86,43 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi | 87,66 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | kondisi baik di BPJ Wilayah Pati | | | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi | 87,39 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi | 67,34 | % | |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta | 89,45 | % | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta | 91,47 | % | |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan | 18,07 | % | |
| | Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi | 73,04 | % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya |
| | Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi | 66,67 | % | |
| | Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi | 48,42 | % | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang |
| | Persentase implementasi pemanfaatan ruang | 76 | % | |
| | Persentase tertib ruang | 48 | % | |
| | Persentase ketersediaan rencana tata ruang | 68,21 | % | |
| | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | 100 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | 100 | % | |
| | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | 100 | % | |
| | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | 100 | % | |
| | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | 100 | % | |
| | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase rumah layak huni yang disediakan | 0,73 | % | |
| | Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani | 6,64 | % | |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh | 13,9 | % | |
| | Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi | 100 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | bidang perumahan dan kawasan permukiman | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman | 60 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum | 56,07 | % | |
| | Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah | 65,69 | % | |
| | Persentase penegakan produk hukum daerah | 86,67 | % | |
| | Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina | 64,54 | % | |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya | 0,12 | % | |
| | Persentase penanganan darurat bencana | 100 | % | |
| | Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana | 2 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik | 2,86 | % | |
| PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | Dinas Sosial |
| | Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 15,41 | % | |
| PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | Dinas Sosial |
| | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan | 100 | % | |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | Dinas Sosial |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan | 3,84 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | pelayanan di dalam panti | | | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | 0,14 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri | 0,15 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | 0,16 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | 0,21 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring | 0,12 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede | 0,12 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan | 0,17 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Sosial Pangrukti Mulyo | | | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo | 0,11 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | 0,15 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | 0,17 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | 0,22 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | 0,16 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | 0,13 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam | 0,24 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Panti Pelayanan Sosial Dewanata | | | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | 0,08 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo | 0,25 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | 0,06 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | 0,22 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | 0,13 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | 0,21 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam | 0,12 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Panti Pelayanan Sosial Penganthi | | | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | 0,22 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | 0,07 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | 0,07 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | 0,08 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | 0,11 | % | |
| | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | 0,1 | % | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | Dinas Sosial |
| | Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan | 100 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial | 2,26 | % | |
| | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan | 0,04 | % | |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | Dinas Sosial |
| | Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial | 100 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | Dinas Sosial |
| | Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | |
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja | 68,57 | % | |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi | 30,59 | % | |
| | Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas | 4,6 | % | |
| | Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi | 2,35 | % | |
| | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis | 3,2 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | kompetensi di bidang industri | | | |
| | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian | 9,5 | % | |
| | Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan | 13,22 | % | |
| | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran | 46,9801 | % | |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal | 71,05 | % | |
| | Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal | 68,3 | % | |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan | 98,2 | % | |
| | Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk | 49,77 | % | |
| | Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah | 45,54 | % | |
| | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial | 96,69 | % | |
| PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | 89,59 | % | |
| | Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 | 26,67 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan | 65 | % | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar | 22 | % | |
| | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | 100 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar | 20 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar | 20 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak | 30 | % | |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya | 82,86 | % | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Rasio korban kekerasan terhadap anak | 11,8 | per 100.000 penduduk | |
| | Persentase korban kekerasan anak terlayani | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Rata-rata ketercukupan pangan | 1,25 | Angka | |
| | Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi | 0,38 | Angka | |
| | Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku | 55 | % | |
| | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah | 87,7 | kg/kapita/ tahun | |
| | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) | 87,7 | kg/kapita/ tahun | |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi | 0,01 | % | |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan | 92 | % | |
| | Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan | 80 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | |
| PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase fasilitasi penetapan lokasi | 100 | % | |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Kawasan Permukiman |
| | Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan | 100 | % | |
| PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun | 100 | % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase sungai yang meningkat kualitasnya | 4,76 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya | 2,85 | % | |
| | Persentase pengujian kualitas air | 100 | % | |
| | Persentase pemantauan kualitas udara | 100 | % | |
| | Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan | 100 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani | 0,4 | % | |
| | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden | 2,6 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase limbah B3 yang terkelola | 80 | % | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase rekomendasi lingkungan hidup | 100 | % | |
| | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan | 50 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya | 10,5 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah | 33 | % | |
| | Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya | 25 | % | |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase pengaduan yang ditangani | 100 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase sampah yang tertangani | 43 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase penduduk yang memiliki KTP-el | 98 | % | |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98% | 99 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan | 66,67 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | |
| PROGRAM PENATAAN DESA | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa | 100 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP) | 59,32 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa | 100 | % | |
| | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa | 100 | % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah | 13,24 | % | |
| | Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya | 100 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Keluarga Berencana |
| | Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan | 57 | % | |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) | 65,99 | % | |
| | Unmetneed | 9,9 | % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan | 32 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | Dinas Perhubungan |
| | Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | 0,39 | Angka | |
| | Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah | 0,985 | Angka | |
| | Rasio trayek angkutan jalan | 0,56 | Angka | |
| | Persentase penumpang pada masa angkutan | 67,34 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | lebaran, nataru menggunakan angkutan umum | | | |
| | Rasio pemanfatan terminal | 0,229 | Angka | |
| | Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis | 0,52 | Angka | |
| | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 0,25 | Angka | |
| | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 0,95 | Angka | |
| | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 0,84 | Angka | |
| | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0,02 | Angka | |
| | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0,94 | Angka | |
| | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0,84 | Angka | |
| | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0,21 | Angka | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0,95 | Angka | |
| | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0,84 | Angka | |
| | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0,24 | Angka | |
| | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0,94 | Angka | |
| | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0,84 | Angka | |
| | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 0,18 | Angka | |
| | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 0,95 | Angka | |
| | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana | 0,84 | Angka | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | | | |
| | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0,22 | Angka | |
| | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0,95 | Angka | |
| | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0,84 | Angka | |
| | Rasio konektivitas perkotaan | 0,483 | Angka | |
| | Persentase perpindahan moda angkutan umum | 53 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | Dinas Perhubungan |
| | Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP | 0,378 | Angka | |
| | Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai | 0,4 | Angka | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | Dinas Perhubungan |
| | Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | 0,08 | Angka | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Nilai survey kepuasan komunikasi publik | 81 | Angka | |
| | Nilai keterbukaan informasi publik | 33 | Angka | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi | 74 | % | |
| | Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi | 47 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | |
| PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | Persentase koperasi berkualitas | 26,74 | % | |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | Persentase SDM koperasi yang berkualitas | 11,5 | % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | Persentase koperasi provinsi produktif | 48,53 | % | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | Persentase usaha mikro mandiri | 82,3 | % | |
| | Persentase pertumbuhan wirausaha baru | 25 | % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
| | Persentase UMKM siap bermitra | 23,08 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan | 50 | % | |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Terpadu Satu Pintu |
| | Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN | 67 | % | |
| | Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan | 50 | % | |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan | 91 | % | |
| | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan standar pelayanan | 100 | % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui | 22 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan | 10 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Jumlah wirausaha muda mandiri | 10 | Orang | |
| | Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi | 75 | Orang | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Persentase peningkatan perolehan medali | 31,25 | % | |
| | Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi | 105 | Orang | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah | 48 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80% | 50 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional | 20,78 | % | |
| | Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan | 26,16 | % | |
| | Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan | 52,38 | % | |
| | Persentase cakupan pelestarian seni | 100 | % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Tingkat partisipasi seni tradisi | 11,1 | % | |
| PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase akses literasi sejarah | 53,1 | % | |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Persentase cagar budaya berperingkat nasional | 13,15 | % | |
| | Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya | 26,73 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | Nilai survey kepuasan pengunjung museum | 89,9 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi | 88,89 | % | |
| | Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca | 61,54 | % | |
| | Nilai survey kepuasan masyarakat | 80 | Nilai | |
| PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah | 92,25 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | |
| | Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten /kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya | 30,26 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK | 100 | % | |
| | Persentase peningkatan pengunjung arsip | 79 | % | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip | 20 | % | |
| | Persentase arsip yang diselamatkan | 65,92 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase produksi garam | 2 | % | |
| | Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif | 5 | % | |
| | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | 4 | % | |
| | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 2,93 | % | |
| | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | 7,8 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase produksi perikanan tangkap | 5 | % | |
| | Indeks harga yang diterima oleh nelayan | 108,54 | Angka | |
| | Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya | 50 | % | |
| | Persentase ketercapaian | 72 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari | | | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong | 72,72 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto | 81,82 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor | 70 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang | 71,72 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak | 81 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo | 100 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung | 100 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa | 72,27 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending | 63 | % | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan | 72 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan | 100 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase produksi ikan konsumsi air laut | 5 | % | |
| | Produksi perikanan budidaya | 609.000 | Ton | |
| | Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya | 111,55 | Angka | |
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan | 70 | % | |
| | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | 2 | % | |
| | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | 61 | % | |
| | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 2 | % | |
| | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | 61 | % | |
| | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di | 2 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | | | |
| | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | 61 | % | |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Jumlah produksi olahan ikan | 160.800 | Ton | |
| | Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan | 4 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan | 26,67 | % | |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Jumlah kunjungan wisatawan | 54.069.703 | Orang | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan) | 8 | Kabupaten /Kota | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki | 33,87 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | sertifikasi kompetensi | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Persentase luas lahan yang dioptimasi | 2,5 | % | |
| | Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi | 93 | % | |
| | Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani | 2,5 | % | |
| | Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan | 100 | % | |
| | Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan | 3 | % | |
| | Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik | 7420274 | m | |
| | Produksi kedelai | 52762 | Ton | |
| | Produksi jagung | 3583730 | Ton | |
| | Produksi padi | 9613469 | Ton | |
| | Produksi bawang merah | 527875 | Ton | |
| | Produksi cabai | 346115 | Ton | |
| | Produksi durian | 153410 | Ton | |
| | Produksi jahe | 35908 | Ton | |
| | Produksi melati | 25120 | Ton | |
| | Produksi kopi | 26005 | Ton | |
| | Produksi tebu | 2562216 | Ton | |
| | Produksi kelapa | 167187 | Ton | |
| | Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya | 2 | % | |
| | Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura | 1,5 | % | |
| | Persentase peningkatan nilai | 1,5 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | tambah produk tanaman pangan | | | |
| | Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan | 1,5 | % | |
| | Persentase layanan sertifikasi benih | 100 | % | |
| | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang | 85 | % | |
| | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta | 85 | % | |
| | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas | 85 | % | |
| | Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan | 3 | % | |
| | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan | 1 | % | |
| | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong | 12 | % | |
| | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah | 12 | % | |
| | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur | 12 | % | |
| | Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang | 12 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | terfasilitasi peningkatan skala usaha | | | |
| | Jumlah populasi ternak potong | 3.745.066 | (ST)/(AU) | |
| | Jumlah populasi ternak perah | 113.440 | (ST)/(AU) | |
| | Jumlah populasi ternak petelur | 247.848 | (ST)/(AU) | |
| | Persentase fasilitasi obat hewan | 1 | % | |
| | Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan | 4 | Dokumen | |
| | Persentase produksi dan distribusi semen beku | 1 | % | |
| | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging | 1 | % | |
| | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu | 1 | % | |
| | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur | 1 | % | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik | 7.420.274 | m | |
| | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong | 12 | % | |
| | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah | 12 | % | |
| | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan | 12 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur | | | |
| | Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha | 12 | % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis | 4 | Dokumen | |
| | Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali | 7 | % | |
| | Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) | 3,5 | % | |
| | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara | 4 | Dokumen | |
| | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan | 4 | Dokumen | |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam | 10 | % | |
| | Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) | 15 | % | |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong | 1,08 | % | |
| | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah | 3,62 | % | |
| | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur | 2,29 | % | |
| | Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya | 2,5 | % | |
| | Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih | 100 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan | 45,99 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani | 0,22 | % | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani | 100 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1 | 0,01 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2 | 0,01 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3 | 0,01 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4 | 0,02 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5 | 0,02 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6 | 0,03 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8 | 0,03 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9 | 0,02 | % | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9 | 0 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10 | 0,01 | % | |
| | Persentase peningkatan produksi bibit | -90 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11 | 0,02 | % | |
| | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7 | 0,03 | % | |
| PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani | 10 | % | |
| | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif | 60 | % | |
| | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura | 71 | Angka | |
| | Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden | 100 | % | |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat | 2,5 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok | 0,3 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | masyarakat di wilayah CDK 1 | | | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5 | 0,3 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11 | 0,2 | % | |
| | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7 | 0,3 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| | Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani | 10 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah | 27,6 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo | 1,7 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria | 3,5 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara | 1,9 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan | 2,3 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara | 4,2 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo | 1,9 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan | 2,5 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu | 1,7 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan | 2,8 | % | |
| | Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah | 100 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak | 3 | % | |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi | 2,9 | % | |
| | Persentase pengambilan air | 1,7 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | tanah Wilayah Serayu Tengah | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah | 45 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo | 45 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria | 45 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara | 45 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan | 45 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara | 45 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo | 45 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan | 45 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu | 45 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan | 45 | % | |
| | Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah | 100 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan | 45 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Wilayah Semarang Demak | | | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi | 45 | % | |
| | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah | 45 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah | 91370,61 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo | 30,58 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria | 18,35 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara | 39241,43 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan | 61,17 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara | 61,17 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo | 45,88 | SBM | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan | 61,17 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu | 61,17 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan | 39259,78 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak | 30,58 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi | 61,17 | SBM | |
| | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah | 30,58 | SBM | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah | 65,04 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo | 49,77 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan | 51,27 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | (K2) Wilayah Kendeng Muria | | | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara | 50,08 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan | 49,42 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara | 50,05 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo | 50,05 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan | 49,74 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu | 49,64 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan | 49,66 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak | 52,13 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi | 49,72 | % | |
| | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah | 49,12 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | |
| PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) | 10 | % | |
| | Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah | 8,6 | % | |
| | Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi | 10 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi | 15 | % | |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota | 9 | % | |
| | Persentase kinerja realisasi pupuk | 91 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi | 10 | % | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase kenaikan nilai ekspor non migas | 4,05 | % | |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen | 1,05 | % | |
| | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta | 0,1 | % | |
| | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang | 10 | % | |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri | 15 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase pertumbuhan produksi industri agro | 2,5 | % | |
| | Persentase pertumbuhan produksi industri non agro | 2,5 | % | |
| | Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa | 6,67 | % | |
| | Persentase peserta pelatihan yang diserap industri | 85 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | produk tekstil dan alas kaki | | | |
| | Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif | 4,39 | % | |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | 9 | % | |
| | Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | 5 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | 10 | % | |
| | Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | 6,95 | % | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | |
| PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi | 3,71 | % | |
| | Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian | 3,71 | % | |
| SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase perangkat daerah yang skor | 70 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | kematangan organisasinya dalam kategori tinggi | | | |
| | Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya | 88,57 | % | |
| | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif | 90 | % | |
| | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A | 36,59 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB | 48,57 | % | |
| | Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A | 69,05 | % | |
| | Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | 92 | % | |
| | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan | 91,01 | % | |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | Sekretariat Daerah |
| | Tingkat efektivitas kerjasama daerah | 95 | % | |
| | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | 95 | % | |
| | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | 95 | % | |
| PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | Sekretariat Daerah |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar | 83 | % | |
| | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar | 84 | % | |
| | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | 60 | % | |
| PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | 97 | % | |
| | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji | 97 | % | |
| | Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani | 96 | % | |
| | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | 96 | % | |
| PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN | | | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian | 87 | % | |
| | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | 85 | % | |
| | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | 85 | % | |
| | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | 84 | % | |
| | Persentase rekomendasi kebijakan | 79 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | | | |
| | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan | 86 | % | |
| | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha | 82 | % | |
| | Persentase nilai kemandirian BLUD | 56 | % | |
| PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa | 91 | % | |
| | Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik | 82 | % | |
| | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa | 82 | % | |
| PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | Sekretariat Daerah |
| | Persentase capaian pelaksanaan APBD | 98,8 | % | |
| | Persentase capaian pelaksanaan APBN | 95,5 | % | |
| | Persentase realisasi bantuan keuangan | 85 | % | |
| | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah | 86 | % | |
| | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi | 100 | % | |
| SEKRETARIAT DPRD | | | | |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | Sekretariat DPRD |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase layanan bagian humas | 95 | % | |
| | Persentase fasilitasi penyusunan raperda | 95 | % | |
| PERENCANAAN | | | | |
| PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi | 100 | % | |
| | Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi | 100 | % | |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | 100 | % | |
| | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | 100 | % | |
| | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian | 100 | % | |
| | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian | 100 | % | |
| | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan | 100 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | pengembangan wilayah | | | |
| | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | 100 | % | |
| KEUANGAN | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu | 100 | % | |
| | Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu | 100 | % | |
| | Persentase penetapan APBD tepat waktu | 100 | % | |
| | Persentase penyampaian LKPD tepat waktu | 100 | % | |
| | Persentase penyusunan dokumen manajemen kas | 100 | % | |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik | 89,86 | % | |
| | Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu | 100 | % | |
| | Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi | 100 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | Badan Pengelola Pendapatan Daerah |
| | Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah | 100 | % | |
| | Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor | 73 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain | 3,19 | % | |
| | Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan | 100 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1 | -17 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1 | 4,34 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 | 13,17 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 | 14,69 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II | -29,99 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II | -12,96 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II | -0,21 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II | 18,67 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II | 13,55 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III | -19,28 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III | -21,14 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III | 19,63 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III | 17,95 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III | 13,55 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang | -26,14 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang | -13,7 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang | -11,35 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang | 21,18 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang | 13,33 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga | -31,07 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga | -6,82 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga | 2,58 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga | 12,37 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset | 12,67 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | daerah UPPD Kota Salatiga | | | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal | -8,84 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal | -6,82 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal | 32,23 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal | 11,16 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal | 13,45 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak | -15,64 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak | -12,89 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak | 5,28 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset | 14,09 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | daerah UPPD Kabupaten Demak | | | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak | 13,67 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan | -15,78 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan | -9,14 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan | -11,08 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan | 15,03 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan | 13,66 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta | -32,48 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta | -10,64 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta | 0,55 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta | 13,93 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta | 13,57 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten | -15,94 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten | -16,34 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten | -1,14 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten | 7,6 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten | 13,67 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen | -19,81 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen | -22,66 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen | -4,52 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen | 6,99 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen | 13,54 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo | -17,6 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo | -14,9 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo | -16,09 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | 10,38 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset | 13,62 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | | | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri | -22,78 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri | -7,55 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri | -21,29 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | 15,75 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | 13,46 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar | -10,91 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar | -22,6 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar | -0,41 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi | 23,37 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | | | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | 13,52 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali | -16,92 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali | -13,53 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali | 14,18 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali | 6,13 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali | 13,53 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati | -19,95 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati | -15,98 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak | -6,74 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati | | | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati | 20,59 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati | 13,46 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora | -22,72 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora | -13,35 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora | 14,7 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora | 21,32 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora | 13,64 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang | -23,29 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor | -9,37 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang | | | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang | 7,95 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang | 27,65 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang | 14,95 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus | -22,3 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus | -17,98 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus | -11,69 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus | 12,52 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus | 13,63 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara | -15,04 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara | -18,29 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara | -4,88 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara | -35,43 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara | 13,32 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan | -50,2 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan | -21,25 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan | 18,98 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan | 13,51 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan | -4,14 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan | -14,89 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan | -14,86 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | 17,76 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | 12,72 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang | -3,73 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang | -19,2 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang | 4,69 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset | 9,37 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | daerah UPPD Kabupaten Batang | | | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang | 15,87 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang | -10,34 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang | -8,82 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang | 7,36 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang | 9,48 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang | 13,37 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal | -50,2 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal | 3,51 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal | 78,96 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal | 19,19 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal | 13,68 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal | 2,02 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal | 12,3 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal | 13,63 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal | 11,08 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes | 2,01 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes | 9,72 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes | 13,3 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes | 12,68 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes | 13,72 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas | -15,84 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas | -11,67 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas | -10,17 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas | 9,36 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas | 13,46 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor | -17,17 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap | | | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap | -10,5 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap | 2,39 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap | 31,53 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap | 13,57 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga | -21,96 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga | -17,71 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga | 4,55 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga | 22,05 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | 13,41 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara | -0,46 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara | -14,93 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara | 4,31 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | 6,97 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | 13,21 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang | -67,77 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang | -24,5 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak | -4,53 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang | | | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang | 21,75 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang | 13,43 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang | -5,76 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang | -11,38 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang | 19,12 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang | 11,24 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang | 13,58 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen | -13,87 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen | -7,41 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen | -6 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen | 20,73 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen | 13,59 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo | -27,79 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo | -7,4 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo | -2,81 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo | 32,02 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo | 13,71 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung | -9,56 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung | -13,52 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung | 11,47 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung | 19,39 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung | 13,36 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo | -15 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo | -24,1 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo | -3,04 | % | |
| | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | 5,55 | % | |
| | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | 13,46 | % | |
| KEPEGAWAIAN | | | | |
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | Badan Kepegawaian Daerah |
| | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi | 100 | % | |
| | Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | 100 | % | |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | 100 | % | |
| | Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN | 100 | % | |
| | Persentase layanan sistem informasi | 100 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | kepegawaian yang dikembangkan | | | |
| | Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN | 100 | % | |
| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis | 100 | % | |
| | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional | 100 | % | |
| | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial | 100 | % | |
| | Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan | 100 | % | |
| | Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan) | 3,5 | Angka | |
| | Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan | 100 | % | |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| | Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi | 100 | % | |
| | Persentase pelaksanaan riset dan inovasi | 100 | % | |
| | Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi | 100 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi | 100 | % | |
| PENGELOLAAN PENGHUBUNG | | | | |
| PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | Badan Penghubung |
| | Persentase ketercapaian pelayanan penghubung | 100 | % | |
| INSPEKTORAT DAERAH | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | Inspektorat |
| | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri | 84 | % | |
| | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu | 86 | % | |
| | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah | 86 | % | |
| | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah | 86 | % | |
| | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah | 86 | % | |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | Inspektorat |
| | Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3 | 12,24 | % | |
| | Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3 | 12,24 | % | |

| URUSAN | PROGRAM | TARGET | SATUAN | PD PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks Ideologi Pancasila | 3,1 | Nilai | |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi | 76 | Nilai | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks kinerja ormas | 77,87 | Nilai | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks toleransi | 74,3 | % | |
| | Indeks penguatan dampak ekonomi | 3,1 | % | |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks kewaspadaan Nasional | 73,5 | Angka | |

# BAB VIII
# PENUTUP

RKPD Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahun kedua RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Serangkaian program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2025 disusun secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan pendekatan *money follows programme* dan *programme follows result,* berbasis risiko (*risk-based planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, RKPD Tahun 2025 juga disusun dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

RKPD Tahun 2025 akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan dalam RKPD Tahun 2025 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Tahun 2025 juga menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025, serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk di dalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Jawa Tengah.

Dengan membangun sinergi dari berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut diharapkan akan mendukung tercapainya cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

bappeda.jatengprov.go.id

Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 21 Tahun 2024
Tentang

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

## EVALUASI PELAKSANAAN RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

*"Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari"*

**BUKU 2**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

# DAFTAR ISI


DAFTAR ISI ..... I
DAFTAR TABEL ..... III
BUKU II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023 ..... 1
2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama ..... 1
2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah ..... 2
2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program ..... 19
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar ..... 19
1. Urusan Pendidikan ..... 19
2. Kesehatan ..... 37
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... 47
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... 58
5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ..... 60
6. Sosial ..... 62
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ..... 69
1. Tenaga Kerja ..... 69
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... 72
3. Pangan ..... 75
4. Pertanahan ..... 76
5. Lingkungan Hidup ..... 78
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ..... 82
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... 83
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... 85
9. Perhubungan ..... 87
10. Komunikasi dan Informatika ..... 91
11. Koperasi dan UKM ..... 92
12. Penanaman Modal ..... 94
13. Kepemudaan dan Olahraga ..... 96
14. Statistik ..... 98
15. Persandian ..... 98
16. Kebudayaan ..... 99
17. Perpustakaan ..... 101
18. Kearsipan ..... 102

C. Urusan Pilihan ..... 103
1. Perikanan dan Kelautan ..... 103
2. Pariwisata ..... 108
3. Pertanian ..... 110
4. Kehutanan ..... 114
5. Energi dan Sumber Daya Mineral ..... 125
6. Perdagangan ..... 132
7. Perindustrian ..... 134
8. Transmigrasi ..... 136
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ..... 137
1. Sekretariat Daerah ..... 137
2. Sekretariat DPRD ..... 143
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ..... 145
1. Perencanaan ..... 145
2. Keuangan ..... 146
3. Kepegawaian ..... 169
4. Pendidikan dan Pelatihan ..... 171
5. Penelitian dan Pengembangan ..... 172
6. Penghubung ..... 174
F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ..... 175
G. Unsur Pemerintahan Umum ..... 177

# DAFTAR TABEL


Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... 1
Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ..... 2
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan ..... 19
Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan ..... 37
Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 48
Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... 58
Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... 60
Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Urusan Sosial ..... 62
Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja ..... 69
Tabel 2. 10 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ..... 72
Tabel 2. 11 Capaian Kinerja Urusan Pangan ..... 75
Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan ..... 76
Tabel 2. 13 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup ..... 78
Tabel 2. 14 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... 82
Tabel 2. 15 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .. 83
Tabel 2. 16 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... 85
Tabel 2. 17 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan ..... 87
Tabel 2. 18 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ..... 91
Tabel 2. 19 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM ..... 92
Tabel 2. 20 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal ..... 94
Tabel 2. 21 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ..... 96
Tabel 2. 22 Capaian Kinerja Urusan Statistik ..... 98
Tabel 2. 23 Capaian Kinerja Urusan Persandian ..... 98
Tabel 2. 24 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan ..... 99
Tabel 2. 25 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan ..... 101
Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan ..... 102
Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan ..... 103
Tabel 2. 28 Capaian Kinerja Pariwisata ..... 108
Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Urusan Pertanian ..... 110
Tabel 2. 30 Capaian Kinerja Kehutanan ..... 114
Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ..... 125
Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan ..... 132
Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian ..... 134
Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi ..... 136
Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah ..... 137
Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD ..... 143

Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Perencanaan ..... 145
Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Keuangan ..... 146
Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan ..... 171
Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan ..... 172
Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Penghubung ..... 174
Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Pengawasan ..... 175
Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum ..... 177

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

# BUKU II
# EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023

## 2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 1**
**Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah**
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

| No | Indikator Kinerja Utama Daerah | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Koordinator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target Perubahan | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 1 | Persentase penurunan konflik SARA | % | 15 | 15,38 | 15,38 | 102,53 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 2 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 80 | 83,13 | 83,13 | 102,57 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 3 | Angka Kemiskinan | % | 9,86-9,05 | 10,77 | 10,77 | 91,55 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 4 | Indeks Gini | Angka | 0,34 | 0,369 | 0,369 | 92,14 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,48-4,80 | 5,13 | 5,13 | 106,82 | Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 6 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,20-5,60 | 4,98 | 4,98 | 95,77 | Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 7 | Inflasi | % | 3,0 ± 1 | 2,89 | 2,89 | 103,81 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 8 | PDRB per kapita | Juta Rupiah | 43,11 | 45,20 | 45,20 | 104,84 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 9 | Indeks Williamson | Angka | 0,56 | 0,6325**) | 0,6325**) | 88,54 | Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 10 | Nilai Tukar Petani | Angka | 104,05 | 117,11 | 117,11 | 112,55 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 11 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 72,88 | 73,39 | 73,39 | 100,70 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 12 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka | 92,93 | 92,83 | 92,83 | 99,89 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 13 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 67,57 | 68,59 | 68,59 | 101,51 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Sampai dengan tahun 2023, dari 13 (tiga belas) IKU Daerah dari 13 indikator tersebut yang berstatus sangat tinggi sebanyak 11 indikator dan 2 indikator berstatus tinggi.

## 2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah

Capaian indikator kinerja daerah merupakan capaian indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggaran pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

**Tabel 2. 2**
**Capaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| **A** | **Aspek Kesejahteraan Masyarakat** | | | | | | | |
| 1 | Angka Kemiskinan | % | 9,86-9,05 | 10,77 | 10,77 | 91,55 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 2 | Indeks Gini | Angka | 0,34 | 0,369 | 0,369 | 92,14 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 3 | Persentase penduduk miskin perkotaan | % | 8,82-8,09 | 9,78 | 9,78 | 95,91 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 4 | Persentase penduduk miskin perdesaan | % | 10,96-10,05 | 11,87 | 11,87 | 92,33 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 5 | Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah | Ribu Rupiah | 450,72 | 420,42 | 420,42 | 93,28 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 6 | Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah | Angka | 61,75 | 62,59 | 62,59 | 101,36 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 7 | Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan | % | 29,75 | 33 | 33 | 110,92 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 8 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,48-4,80 | 5,13 | 5,13 | 106,82 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 9 | Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu | % | 7,26 | 6,03 | 6,03 | 83,06 | Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 10 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,20-5,60 | 4,98 | 4,98 | 95,77 | Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 11 | Inflasi | % | 3,0 ± 1 | 2,89 | 2,89 | 103,81 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 12 | PDRB per kapita | Juta Rupiah | 43,11 | 45,20 | 45,20 | 104,84 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 13 | Indeks Williamson | Angka | 0,56 | 0,6325**) | 0,6325**) | 88,54 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 14 | Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan | % | 3,1 | 2,11 | 2,11 | 68,06 | Sedang | Sekretariat Daerah |
| 15 | Pertumbuhan sektor industri pengolahan | % | 5,65 | 4,35 | 4,35 | 76,99 | Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 16 | Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa | % | 5,9 | 6,35 | 6,35 | 107,63 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 17 | Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD | % | 3,2 | 9,63 | 9,63 | 300,94 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 18 | Pertumbuhan nilai penanaman modal | % | 9,00-10,00 | 0,22 | 0,22 | 2,20 | Sangat Rendah | Sekretariat Daerah |
| 19 | Nilai Tukar Petani | Angka | 104,05 | 117,11 | 117,11 | 112,55 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 20 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | 72,88 | 73,39 | 73,39 | 100,70 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 21 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7,9 | 8,01 | 8,01 | 101,39 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 22 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,94 | 12,85 | 12,85 | 99,30 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 23 | Angka Harapan Hidup | Tahun | 74,73 | 74,69 | 74,69 | 99,95 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 24 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka | 92,93 | 92,83 | 92,83 | 99,89 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| **B** | **Aspek Pelayanan Umum** | | | | | | | |
| | **URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | |
| | **PENDIDIKAN** | | | | | | | |
| 1 | Disparitas APK SMA/SMK/SLB | % | 8,75 | 9,95 | 9,95 | 87,94 | Tinggi | Disdikbud |
| 2 | Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar | % | 83,95 | 92,78 | 92,78 | 110,52 | Sangat Tinggi | Disdikbud |
| 3 | Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB | Angka | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 100,00 | Sangat Tinggi | Disdikbud |
| 4 | Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 100,00 | Sangat Tinggi | Disdikbud |
| | **KESEHATAN** | | | | | | | |
| 5 | Angka Kematian Ibu | 100.000 /KH | 100 | 84,6 | 84,6 | 118,20 | Sangat Tinggi | Dinkes |
| 6 | Angka Kematian Balita | 1.000/KH | 9,2 | 8,2 | 8,2 | 112,20 | Sangat Tinggi | Dinkes |
| 7 | Angka Kematian Bayi | 1.000/KH | 7,8 | 7,02 | 7,02 | 111,11 | Sangat Tinggi | Dinkes |
| 8 | Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi | Angka | 0,21 | 0,32 | 0,32 | 152,38 | Sangat Tinggi | Dinkes |
| 9 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan | % | 69 | 69,47 | 69,47 | 100,68 | Sangat Tinggi | Dinkes |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 10 | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Dinkes |
| 11 | Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa | % | 60 | 91,71 | 91,71 | 152,85 | Sangat Tinggi | Dinkes |
| 12 | Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular | % | 85,71 | 92,14 | 92,14 | 107,50 | Sangat Tinggi | Dinkes |
| 13 | Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi | % | 84 | 88,97 | 88,97 | 105,92 | Sangat Tinggi | RSUD Dr. Moewardi |
| 14 | Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | % | 90 | 94,15 | 94,15 | 104,61 | Sangat Tinggi | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| 15 | Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo | % | 90 | 91,11 | 91,11 | 101,23 | Sangat Tinggi | RSUD Tugurejo |
| 16 | Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet Donorejo | % | 87 | 88,49 | 88,49 | 101,71 | Sangat Tinggi | RSUD Kelet Donorejo |
| 17 | Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo | % | 100 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | Sangat Tinggi | RSJD Dr. Amino Gondohutomo |
| 18 | Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta | % | 97,33 | 98,08 | 98,08 | 100,77 | Sangat Tinggi | RSJD Surakarta |
| 19 | Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 97 | 97,9 | 97,9 | 100,93 | Sangat Tinggi | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | |
| 20 | Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah | % | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 100,00 | Sangat Tinggi | BMCK |
| 21 | Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik | % | 44,24 | 45,03 | 45,03 | 101,79 | Sangat Tinggi | BMCK |
| 22 | Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat | % | 89,65 | 90,17 | 90,17 | 100,58 | Sangat Tinggi | BMCK |
| 23 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik | % | 92,35 | 90,32 | 90,32 | 97,80 | Sangat Tinggi | BMCK |
| 24 | Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | % | 66,85 | 66,45 | 66,45 | 99,40 | Sangat Tinggi | Pusdataru |
| 25 | Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air | % | 54,95 | 66,45 | 66,45 | 120,93 | Sangat Tinggi | Pusdataru |
| 26 | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR | % | 78,75 | 80,27 | 80,27 | 101,93 | Sangat Tinggi | Pusdataru |
| | **PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | |
| 27 | Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni | % | 46,7 | 67,7 | 67,7 | 144,97 | Sangat Tinggi | Disperakim |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 28 | Persentase penurunan kawasan kumuh | % | 8,1 | 7,92 | 7,92 | 102,27 | Sangat Tinggi | Disperakim |
| | **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | Perakim |
| 29 | Persentase penanganan gangguan tramtibum di Jawa Tengah | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Satpol PP |
| 30 | Persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Satpol PP |
| 31 | Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | BPBD |
| 32 | Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana | % | 12 | 39,77 | 39,77 | 331,42 | Sangat Tinggi | BPBD |
| 33 | Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB | % | 5 | 49,08 | 49,08 | 981,60 | Sangat Tinggi | BPBD |
| 34 | Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | BPBD |
| | **SOSIAL** | | | | | | | |
| 35 | Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | % | 2,37 | 8,03 | 8,03 | 338,82 | Sangat Tinggi | Dinsos |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 36 | Persentase peningkatan kapasitas bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | % | 34,38 | 36,59 | 36,59 | 106,43 | Sangat Tinggi | Dinsos |
| | **URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | |
| | **TENAGA KERJA** | | | | | | | |
| 37 | Persentase pengangguran yang ditangani | % | 28,55 | 8,61 | 8,61 | 30,16 | Sangat Rendah | Disnakertrans |
| 38 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | % | 71,01 | 64,24 | 64,24 | 90,47 | Sangat Tinggi | Disnakertrans |
| 39 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) | % | 91,67 | 92,04 | 92,04 | 100,40 | Sangat Tinggi | Disnakertrans |
| 40 | Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta Rp) | Juta Rupiah | 54,62 | 13,92 | 13,92 | 25,49 | Sangat Rendah | Disnakertrans |
| 41 | Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten | % | 8,19 | 8,26 | 8,26 | 100,85 | Sangat Tinggi | Disnakertrans |
| 42 | Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan | % | 82,97 | 81,58 | 81,58 | 98,32 | Sangat Tinggi | Disnakertrans |
| 43 | Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah | % | 57,14 | 65,71 | 65,71 | 115,00 | Sangat Tinggi | Disnakertrans |
| | **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN** | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | **PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | |
| 44 | Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak | Per 100.000 | 8,07 | 8,02 | 8,02 | 100,62 | Sangat Tinggi | DP3AKB |
| 45 | Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | DP3AKB |
| 46 | Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di pemerintah daerah | % | 38,88 | 51,42 | 51,42 | 132,25 | Sangat Tinggi | DP3AKB |
| 47 | Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak | % | 82,85 | 82,86 | 82,86 | 100,01 | Sangat Tinggi | DP3AKB |
| 48 | Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG | % | 90 | 90 | 90 | 100,00 | Sangat Tinggi | DP3AKB |
| 49 | Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Per 100.000 | 8,02 | 5,49 | 5,49 | 146,08 | Sangat Tinggi | DP3AKB |
| 50 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Angka | 72,9 | 73,78 | 73,78 | 101,49 | Sangat Tinggi | DP3AKB |
| | **PANGAN** | | | | | | | |
| 51 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | Angka | 88,8 | 94,2 | 94,2 | 106,08 | Sangat Tinggi | Dishanpan |
| 52 | Angka Konsumsi Energi | Kkal/kapita/hari | 2100 | 2025 | 2025 | 96,43 | Sangat Tinggi | Dishanpan |
| | **PERTANAHAN** | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 53 | Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | % | 100 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | Sangat Tinggi | Disperakim |
| | **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | |
| 54 | Indeks Pencemaran Air | % | 3,45 | 3,39 | 3,39 | 98,26 | Sangat Tinggi | DISLHK |
| 55 | Indeks Pencemar SO2 dan NO2 | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,00 | Sangat Tinggi | DISLHK |
| | **ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | |
| 56 | Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Dispermasdesd ukcapil |
| | **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | |
| 57 | Persentase Peningkatan Desa Mandiri | % | 68 | 91,27 | 91,27 | 134,22 | Sangat Tinggi | Dispermasdesd ukcapil |
| | **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | |
| 58 | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) | Angka | 2,19 | 2,04 | 2,04 | 93,15 | Sangat Tinggi | DP3AKB |
| 59 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR | Angka | 65,17 | 68,98 | 68,98 | 105,85 | Sangat Tinggi | DP3AKB |
| 60 | Indeks Pembangunan Keluarga | Angka | 56,29 | 63,07 | 63,07 | 112,04 | Sangat Tinggi | DP3AKB |
| | **PERHUBUNGAN** | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 61 | Persentase layanan jaringan distribusi transportasi | % | 60,38 | 73,89 | 73,89 | 122,37 | Sangat Tinggi | Dishub |
| 62 | Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi | % | 51,45 | 49,81 | 49,81 | 96,81 | Sangat Tinggi | Dishub |
| 63 | Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal | % | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 100,00 | Sangat Tinggi | Dishub |
| | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | |
| 64 | Indeks Domain Tata Kelola SPBE | Angka | 3,95 | 2,6 | 2,6 | 65,82 | Sedang | Diskominfo |
| 65 | Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE | Angka | 3,65 | 3,3 | 3,3 | 90,41 | Sangat Tinggi | Diskominfo |
| 66 | Indeks Domain Layanan SPBE | Angka | 4,3 | 3,94 | 3,94 | 91,63 | Sangat Tinggi | Diskominfo |
| | **KOPERASI DAN UKM** | | | | | | | |
| 67 | Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah | % | 29,68 | 23,28 | 23,28 | 78,44 | Tinggi | Dinkop UKM |
| 68 | Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah | % | 29,95 | 27,96 | 27,96 | 93,36 | Sangat Tinggi | Dinkop UKM |
| | **PENANAMAN MODAL** | | | | | | | |
| 69 | Persentase Realisasi PMA dan PMDN | % | 100 | 117,23 | 117,23 | 117,23 | Sangat Tinggi | DPMPTSP |
| 70 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 90 | 94,14 | 94,14 | 104,60 | Sangat Tinggi | DPMPTSP |
| | **KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA** | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 71 | Indeks Pembangunan Pemuda | % | 55,15 | 54,5 | 54,5 | 98,82 | Sangat Tinggi | Disporapar |
| 72 | Indeks Pembangunan Keolahragaan | % | 0,65 | 0,37 | 0,37 | 56,92 | Rendah | Disporapar |
| | **STATISTIK** | | | | | | | |
| 73 | Laju Pemanfaatan Data Sektoral | % | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 100,00 | Sangat Tinggi | Diskominfo |
| | **PERSANDIAN** | | | | | | | |
| 74 | Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | Level | 3 | 3 | 3 | 100,00 | Sangat Tinggi | Diskominfo |
| | **KEBUDAYAAN** | | | | | | | |
| 75 | Persentase Jenis seni budaya yang terlayani | % | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 100,00 | Sangat Tinggi | Disdikbud |
| | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | | |
| 76 | Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan | % | 100 | 108,67 | 108,67 | 108,67 | Sangat Tinggi | Disarpus |
| | **KEARSIPAN** | | | | | | | |
| 77 | Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi | Angka | 90 | 95,07 | 95,07 | 105,63 | Sangat Tinggi | Disarpus |
| | **URUSAN PILIHAN** | | | | | | | |
| | **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | |
| 78 | Produksi Perikanan | Ton | 1023928,09 | 855734,92 | 855734,92 | 83,57 | Tinggi | Dislutkan |
| 79 | Angka Konsumsi Ikan | kg/kapita/tahun | 37,07 | 38,83 | 38,83 | 104,75 | Sangat Tinggi | Dislutkan |
| | **PARIWISATA** | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 80 | Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata | % | 3,25 | 3,57 | 3,57 | 109,85 | Sangat Tinggi | Disporapar |
| | **PERTANIAN** | | | | | | | |
| 81 | Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan | % | 11,6 | 10,58 | 10,58 | 91,21 | Sangat Tinggi | Distanbun |
| 82 | Persentase kenaikan produksi daging, susu, telur | % | 4,06 | 6,46 | 6,46 | 159,11 | Sangat Tinggi | Disnakeswan |
| | **KEHUTANAN** | | | | | | | |
| 83 | Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB | % | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 97,67 | Sangat Tinggi | DISLHK |
| 84 | Luas Tutupan Lahan (LTV) | $km^2$ | 10224,57 | 10224,57 | 10224,57 | 100,00 | Sangat Tinggi | DISLHK |
| 85 | Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan | % | 0,47 | 4,15 | 4,15 | 882,98 | Sangat Tinggi | DISLHK |
| | **ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | | |
| 86 | Persentase izin usaha pertambangan operasi produksi melaksanakan *good mining practice* (GMP) | % | 67 | 89,79 | 89,79 | 134,01 | Sangat Tinggi | DISESDM |
| 87 | Indeks ketersediaan air tanah | Angka | 2,99 | 3,76 | 3,76 | 125,75 | Sangat Tinggi | DISESDM |
| 88 | Rasio ketersediaan daya listrik | Angka | 1 | 1,52 | 1,52 | 152,00 | Sangat Tinggi | DISESDM |
| 89 | Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi | % | 15,96 | 15,98 | 15,98 | 100,13 | Sangat Tinggi | DISESDM |
| | **PERDAGANGAN** | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 90 | Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan | % | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100,00 | Sangat Tinggi | Disperindag |
| | **PERINDUSTRIAN** | | | | | | | |
| 91 | Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri | % | 5,65 | 4,35 | 4,35 | 76,99 | Tinggi | Disperindag |
| | **TRANSMIGRASI** | | | | | | | |
| 92 | Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi | % | 3,45 | 4,96 | 4,96 | 143,77 | Sangat Tinggi | Disnakertrans |
| | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | |
| | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | |
| 93 | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | % | 85 | 63,57 | 63,57 | 74,79 | Sedang | Sekretariat Daerah |
| 94 | Persentase Kebijakan yang Efektif | % | 80 | 76,54 | 76,54 | 95,68 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 95 | Efektifitas kebijakan perekonomian daerah | % | 78 | 78,57 | 78,57 | 100,73 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 96 | Persentase efektivitas penyelesaian masalah hukum | % | 96 | 100 | 100 | 104,17 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 97 | Persentase efektivitas produk hukum daerah | % | 96 | 100 | 100 | 104,17 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 98 | Persentase peningkatan kualitas layanan keagamaan | % | 45 | 45 | 45 | 100,00 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 99 | Efektivitas kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah | % | 90 | 100 | 100 | 111,11 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 100 | Ketercapaian laba BUMD | % | 75 | 98,17 | 98,17 | 130,89 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 101 | Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA | % | 82 | 84 | 84 | 102,44 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 102 | Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat | % | 90 | 90 | 90 | 100,00 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 103 | Efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah | % | 89 | 93,7 | 93,7 | 105,28 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 104 | Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa | % | 90 | 92,53 | 92,53 | 102,81 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 105 | Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas | % | 85,37 | 90,24 | 90,24 | 105,70 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 106 | Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B keatas | % | 87,76 | 91,83 | 91,83 | 104,64 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 107 | Persentase OPD dengan Nilai Kematangan Organisasi dalam ketegori minimal sedang | % | 85,37 | 100 | 100 | 117,14 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 108 | Nilai IKM layanan Biro Umum | % | 78,5 | 82,75 | 82,75 | 105,41 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | |
| 109 | Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. | % | 89 | 91,23 | 91,23 | 102,51 | Sangat Tinggi | Sekretariat DPRD |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | |
| | **PERENCANAAN** | | | | | | | |
| 110 | Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas | % | 90 | 90 | 90 | 100,00 | Sangat Tinggi | BAPPEDA |
| | **KEUANGAN** | | | | | | | |
| 111 | Persentase peningkatan pajak daerah | % | 3,58 | 3,45 | 3,45 | 96,37 | Sangat Tinggi | BAPENDA |
| 112 | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan lain yang sah | % | 6,79 | 8,14 | 8,14 | 119,88 | Sangat Tinggi | BAPENDA |
| 113 | Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | BPKAD |
| 114 | Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan | % | 72,5 | 68 | 68 | 93,79 | Sangat Tinggi | BPKAD |
| | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | |
| 115 | Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | BKD |
| 116 | Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | BKD |
| | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 117 | Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi | % | 36,26 | 71,32 | 71,32 | 196,69 | Sangat Tinggi | BPSDMD |
| 118 | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya | % | 30 | 4,23 | 4,23 | 14,10 | Sangat Rendah | BPSDMD |
| | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | |
| 119 | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 71 | 71,32 | 71,32 | 100,45 | Sangat Tinggi | BAPPEDA |
| 120 | Indeks Daya Saing Daerah | Nilai | 4,2 | 4,23 | 4,23 | 100,71 | Sangat Tinggi | BAPPEDA |
| | **PENGELOLAAN PENGHUBUNG** | | | | | | | |
| 121 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | % | 85 | 85,75 | 85,75 | 100,88 | Sangat Tinggi | BANHUB |
| | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | |
| 122 | Level Kapabilitas APIP | Level | 3 | 3 | 3 | 100,00 | Sangat Tinggi | Inspektorat |
| 123 | Nilai Maturitas SPIP | Nilai | 3,19 | 3,46 | 3,46 | 108,46 | Sangat Tinggi | Inspektorat |
| | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | |
| 124 | Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 3,15 | 3,45 | 3,45 | 109,52 | Sangat Tinggi | BAKESBANGPOLINMAS |
| 125 | Indeks Ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 3,35 | 3,85 | 3,85 | 114,93 | Sangat Tinggi | BAKESBANGPOLINMAS |
| **C** | **Aspek Daya Saing** | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 1 | Persentase penurunan konflik SARA | % | 15 | 15,38 | 15,38 | 102,53 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 2 | Indeks Toleransi | Angka | 76,6 | 73,68 | 73,68 | 96,19 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 3 | Persentase tindak pidana yang tertangani | % | 90 | 92,15 | 92,15 | 102,39 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 4 | Indeks Reformasi Birokrasi | Angka | 80 | 83,13 | 83,13 | 102,57 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 88 | 87,25 | 87,25 | 99,15 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 6 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Angka | 3,33 | 3,98 | 3,98 | 119,52 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 7 | Nilai SAKIP | Angka | 85 | 81,92 | 81,92 | 96,38 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 8 | Indeks Persepsi Anti Korupsi | Angka | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 97,14 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 9 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP | WTP | 100,00 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 10 | Nilai Kematangan Organisasi Daerah | Angka | 39 | 40,68 | 40,68 | 104,31 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 11 | Indeks Sistem Merit | Angka | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 101,22 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 12 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Angka | 67,57 | 68,59 | 68,59 | 101,51 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 13 | Indeks Kualitas Air | Angka | 50,65 | 51,14 | 51,14 | 100,97 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 14 | Indeks Kualitas Udara | Angka | 85 | 100 | 100 | 117,65 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |
| 15 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Angka | 42,45 | 46,22 | 46,22 | 108,88 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| 16 | Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana | Angka | 3,6 | 3,65 | 3,65 | 101,39 | Sangat Tinggi | Sekretariat Daerah |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Capaian indikator kinerja daerah ditunjukan dengan indikator yang berjumlah 165 indikator yang terbagi dalam 3 aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing. Tingkat ketercapaian pada 3 Aspek diatas sebanyak 165 indikator dengan status capaian Sangat Tinggi sebanyak 151 indikator, Tinggi sebanyak 6 indikator, Sedang sebanyak 3 indikator, Rendah sebanyak 2 indikator dan Sangat Rendah 3 indikator.

## 2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program

### A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

### 1. Urusan Pendidikan

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 3**
**Capaian Kinerja Urusan Pendidikan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | | | |
| | APK SMA | % | 28,36 | 29,89 | 29,89 | 105,39 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan SMA |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar | % | 73,61 | 99,24 | 99,24 | 134,82 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan SMA |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang | % | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan SMA |
| | APK SMK | % | 49,46 | 53,51 | 53,51 | 108,19 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan SMK |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar | % | 88,98 | 89,25 | 89,25 | 100,30 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan SMK |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang | % | 23,47 | 20,73 | 20,73 | 88,33 | Tinggi | Bidang Pembinaan SMK |
| | APK SLB | % | 70 | 91,73 | 91,73 | 131,04 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan Diksus |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar | % | 87,87 | 87,93 | 87,93 | 100,07 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan Diksus |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang | % | 26,15 | 38,03 | 38,03 | 145,43 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan Diksus |
| | Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik | % | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Ketenagaan Dikbud |
| | Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik | % | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Ketenagaan Dikbud |
| | Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Ketenagaan Dikbud |
| | Persentase SMA Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT | % | 86 | 100,00 | 100,00 | 116,28 | Sangat Tinggi | Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | | | | | | | | Dan Kebudayaan Kelas A |
| | Persentase SMK Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT | % | 76,64 | 99,62 | 99,62 | 129,98 | Sangat Tinggi | Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A |
| | APK SMA Cabdin I | % | 39,46 | 38,44 | 38,44 | 97,42 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | APK SMK Cabdin I | % | 49,88 | 50,14 | 50,14 | 100,52 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | APK SLB Cabdin I | % | 170,1 | 156,47 | 156,47 | 91,99 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin I | % | 81,39 | 99,64 | 99,64 | 122,42 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin I | % | 77,06 | 89,10 | 89,10 | 115,62 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin I | % | 81,42 | 90,40 | 90,40 | 111,03 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I | % | 1,15 | 90,40 | 90,40 | 7860,87 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I | % | 4,2 | 89,1 | 89,1 | 2121,43 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin I | % | 3,36 | 9,23 | 9,23 | 274,70 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Persentase prasarana sarana SMA Cabdin II sesuai standar | % | 75,15 | 99,33 | 99,33 | 132,18 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Persentase prasarana sarana SMK Cabdin II sesuai standar | % | 88,5 | 88,50 | 88,50 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Persentase prasarana sarana SLB Cabdin II sesuai standar | % | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | APK SMA Cabdin II | % | 31,93 | 31,98 | 31,98 | 100,16 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | APK SMK Cabdin II | % | 39,51 | 40,30 | 40,30 | 102,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | APK SLB Cabdin II | % | 60 | 114,94 | 114,94 | 191,57 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II | % | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin II | % | 1,54 | 3,7 | 3,7 | 240,26 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang | % | 0,86 | 3,85 | 3,85 | 447,67 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | berjenjang Cabdin II | | | | | | | |
| | APK SMA Cabdin III | % | 31,62 | 30,65 | 30,65 | 96,93 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | APK SMK CAbdin III | % | 44,91 | 46,56 | 46,56 | 103,67 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | APK SLB Cabdin III | % | 72,33 | 143,67 | 143,67 | 198,63 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin III | % | 67,48 | 98,46 | 98,46 | 145,91 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin III | % | 90,19 | 88,50 | 88,50 | 98,13 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin III | % | 87,3 | 87,50 | 87,50 | 100,23 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III | % | 3,24 | 8,46 | 8,46 | 261,11 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III | % | 0,26 | 3,85 | 3,85 | 1480,77 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin III | % | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | APK SMA Cabdin IV | % | 25,72 | 27,61 | 27,61 | 107,35 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | APK SMK Cabdin IV | % | 44,88 | 47,65 | 47,65 | 106,17 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | APK SLB Cabdin IV | % | 64,11 | 182,45 | 182,45 | 284,59 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IV | % | 71,45 | 98,54 | 98,54 | 137,91 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin IV | % | 85,87 | 86,43 | 86,43 | 100,65 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IV | % | 80,94 | 99,40 | 99,40 | 122,81 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV | % | 0,57 | 0 | 0 | 0,00 | Sangat Rendah | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV | % | 0,34 | 0,43 | 0,43 | 126,47 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IV | % | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | APK SMA Cabdin V | % | 35,36 | 35,79 | 35,79 | 101,22 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | APK SMK Cabdin V | % | 59,24 | 73,41 | 73,41 | 123,92 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | APK SLB Cabdin V | % | 120,1 | 172,19 | 172,19 | 143,37 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin V | % | 50,21 | 99,51 | 99,51 | 198,19 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin V | % | 77,27 | 89,72 | 89,72 | 116,11 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin V | % | 94,6 | 94,67 | 94,67 | 100,07 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V | % | 1,72 | 3,43 | 3,43 | 199,42 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V | % | 0,52 | 1,11 | 1,11 | 213,46 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin V | % | 1,54 | 5,00 | 5,00 | 324,68 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | APK SMA Cabdin VI | % | 26,04 | 26,35 | 26,35 | 101,19 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | APK SMK Cabdin VI | % | 56,24 | 52,25 | 52,25 | 92,91 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | | | | | | | | PENDIDIKAN VI |
| | APK SLB Cabdin VI | % | 112,01 | 132,65 | 132,65 | 118,43 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VI | % | 77 | 99,71 | 99,71 | 129,49 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VI | % | 90,09 | 90,09 | 90,09 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VI | % | 85,5 | 90,33 | 90,33 | 105,65 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI | % | 1,34 | 1,92 | 1,92 | 143,28 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI | % | 0,34 | 1,15 | 1,15 | 338,24 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VI | % | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | APK SMA Cabdin VII | % | 51,79 | 51,45 | 51,45 | 99,34 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | APK SMK Cabdin VII | % | 66,71 | 62,25 | 62,25 | 93,31 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | APK SLB Cabdin VII | % | 190,2 | 289,93 | 289,93 | 152,43 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin VII | % | 76,74 | 99,95 | 99,95 | 130,24 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VII | % | 92,31 | 86,10 | 86,10 | 93,27 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VII | % | 87,51 | 81,05 | 81,05 | 92,62 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII | % | 2,48 | 4,61 | 4,61 | 185,89 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII | % | 1,12 | 12,31 | 12,31 | 1099,11 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VII | % | 4,62 | 1,15 | 1,15 | 24,89 | Sangat Rendah | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | APK SMA Cabdin VIII | % | 30,82 | 30,28 | 30,28 | 98,25 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | APK SMK Cabdin VIII | % | 52,33 | 52,35 | 52,35 | 100,04 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | APK SLB Cabdin VIII | % | 70,09 | 70,00 | 70,00 | 99,87 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai | % | 78,25 | 76,12 | 76,12 | 97,28 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | standar Cabdin VIII | | | | | | | PENDIDIKAN VIII |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin VIII | % | 89,1 | 89,9 | 89,9 | 100,90 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin VIII | % | 81,02 | 81,05 | 81,05 | 100,04 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII | % | 2,48 | 1,15 | 1,15 | 46,37 | Sangat Rendah | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII | % | 0,86 | 11,15 | 11,15 | 1296,51 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin VIII | % | 3,85 | 0,8 | 0,8 | 20,78 | Sangat Rendah | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | APK SMA Cabdin IX | % | 23,17 | 25,73 | 25,73 | 111,05 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | APK SMK Cabdin IX | % | 50,25 | 55,12 | 55,12 | 109,69 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | APK SLB Cabdin IX | % | 66,26 | 62,31 | 62,31 | 94,04 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin IX | % | 78,72 | 99,61 | 99,61 | 126,54 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Persentase prasarana sarana | % | 90,76 | 89,9 | 89,9 | 99,05 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | SMK sesuai standar Cabdin IX | | | | | | | PENDIDIKAN IX |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin IX | % | 81,65 | 82,95 | 82,95 | 101,59 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX | % | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX | % | 0,6 | 1,92 | 1,92 | 320,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin IX | % | 3,08 | 5,00 | 5,00 | 162,34 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | APK SMA Cabdin X | % | 24,83 | 26,22 | 26,22 | 105,60 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | APK SMK Cabdin X | % | 56,97 | 60,12 | 60,12 | 105,53 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | APK SLB Cabdin X | % | 50,11 | 77,72 | 77,72 | 155,10 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin X | % | 99,73 | 68,71 | 68,71 | 68,90 | Sedang | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin X | % | 98 | 89,39 | 89,39 | 91,21 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin X | % | 89,35 | 87,97 | 87,97 | 98,46 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X | % | 1,34 | 4,00 | 4,00 | 298,51 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X | % | 0,6 | 5,00 | 5,00 | 833,33 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin X | % | 1,54 | 1,00 | 1,00 | 64,94 | Rendah | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | APK SMA Cabdin XI | % | 30,71 | 32,89 | 32,89 | 107,10 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | APK SMK Cabdin XI | % | 54,12 | 57,13 | 57,13 | 105,56 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | APK SLB Cabdin XI | % | 30,21 | 56,70 | 56,70 | 187,69 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XI | % | 83,68 | 77,34 | 77,34 | 92,42 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XI | % | 90,02 | 89,68 | 89,68 | 99,62 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XI | % | 97,18 | 87,14 | 87,14 | 89,67 | Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI | % | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI | % | 1,03 | 1,92 | 1,92 | 186,41 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XI | % | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | APK SMA Cabdin XII | % | 22,59 | 22,13 | 22,13 | 97,96 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | APK SMK Cabdin XII | % | 59,02 | 60,61 | 60,61 | 102,69 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | APK SLB Cabdin XII | % | 49,88 | 68,03 | 68,03 | 136,39 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XII | % | 73,45 | 99,57 | 99,57 | 135,56 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XII | % | 90,66 | 90,91 | 90,91 | 100,28 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XII | % | 92,2 | 88,94 | 88,94 | 96,46 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK | % | 1,53 | 0,77 | 0,77 | 50,33 | Rendah | CABANG DINAS |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII | | | | | | | PENDIDIKAN XII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII | % | 0,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XII | % | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | APK SMA Cabdin XIII | % | 29,87 | 29,58 | 29,58 | 99,03 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | APK SMK Cabdin XIII | % | 55,18 | 55,29 | 55,29 | 100,20 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | APK SLB Cabdin XIII | % | 83,23 | 111,37 | 111,37 | 133,81 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar Cabdin XIII | % | 75,35 | 81,06 | 81,06 | 107,58 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar Cabdin XIII | % | 84,95 | 86,93 | 86,93 | 102,33 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar Cabdin XIII | % | 81,11 | 81,60 | 81,60 | 100,60 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMK dalam even lomba nasional yang | % | 0,57 | 1,15 | 1,15 | 201,75 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | berjenjang Cabdin XIII | | | | | | | |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SMA dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII | % | 0,34 | 2,21 | 2,21 | 650,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Prosentase keikutsertaan peserta didik SLB dalam even lomba nasional yang berjenjang Cabdin XIII | % | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sangat Rendah | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | | | | Bidang Pembinaan SMA |
| | Prersentase serapan kurikulum SMA | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan SMK |
| | Prsentase serapan kurikulum SMK | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan Diksus |
| | Persentase serapan kurikulum SLB | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin I | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin I | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN I |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin I | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin II | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin II | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN II |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin II | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin III | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin III | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN III |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin III | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IV | % | 100 | 99,89 | 99,89 | 99,89 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IV | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IV | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin V | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin V | % | 100 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN V |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin V | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI |
| | Persentase serapan | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | kurikulum SLB Cabdin VI | | | | | | | PENDIDIKAN VII |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VII | % | 100 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VII | % | 100 | 99,78 | 99,78 | 99,78 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin VIII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin VIII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin VIII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin IX | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin IX | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin IX | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin X | % | 100 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Persentase serapan kurikulum SMK Cabdin X | % | 100 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN X |
| | Persentase serapan kurikulum SLB Cabdin X | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI |
| | Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Persentase serapan kurikulum SMA Cabdin XII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Prosentase serapan kurikulum SMK Cabdin XII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII |
| | Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Presentase serapan kurikulum SMA Cabdin XIII | % | 100 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Presentase serapan kurikulum SMK Cabdin XIII | % | 100 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | Sangat Tinggi | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII |
| | Presentase serapan kurikulum SLB Cabdin XIII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | % | | | | | | Bidang Ketenagaan Dikbud |
| | Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA | % | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Ketenagaan Dikbud |
| | Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK | % | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Ketenagaan Dikbud |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB | | 0,5 | 0,50 | 0,50 | 100,00 | Sangat Tinggi | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | % | | | | | | Bidang Pembinaan SMA |
| | Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMA yang diterbitkan | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan SMK |
| | Presentase Jumlah rekomendasi perizinan SMK yang diterbitkan | % | 96 | 100,00 | 100,00 | 104,17 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan Diksus |
| | Persentase Ijin Pendidikan Khusus yang disetujui | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan SMA |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 179 indikator kinerja dengan 162 indikator berstatus sangat tinggi, 2 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus sedang, 2 indikator berstatus rendah dan 12 indikator berstatus sangat rendah dikarenakan kegiatan tersebut sudah tidak dilaksanakan pada triwulan 3.

## 2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 4**
**Capaian Kinerja Urusan Kesehatan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA | | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Ibu | % | 40 | 40 | 40 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Bayi | % | 60 | 60 | 60 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Cakupan Kesehatan Balita | % | 60 | 60 | 60 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| | Persentase Kabupaten/Kota dengan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga baik | % | 94 | 100 | 100 | 106,38 | Sangat Tinggi | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| | Prosentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit menular | % | 68,57 | 74 | 74 | 107,92 | Sangat Tinggi | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| | Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan kinerja program penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa | % | 77 | 83,81 | 83,81 | 108,84 | Sangat Tinggi | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pencegahan dan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam | | | | | | | Pengendalian Penyakit |
| | Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan yang bermutu | % | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pelayanan Kesehatan |
| | Persentase ketersediaan Informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| | Persentase ketersediaan obat dan vaksin | % | 75 | 75 | 75 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Semarang | % | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Semarang | % | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Semarang | % | 91,3 | 93,75 | 93,75 | 102,68 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | KLB/Bencana < 24 Jam | | | | | | | |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Ambarawa | % | 52 | 52 | 52 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Ambarawa | % | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Ambarawa | % | 91 | 91 | 91 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Wilayah Magelang | % | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian | % | 71,42 | 71,42 | 71,42 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | penyakit menular di Wilker Balkesmas magelang | | | | | | | Wilayah Magelang |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Magelang | % | 91 | 91 | 91 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Klaten | % | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas Klaten | % | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Klaten | % | 91 | 91 | 91 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan | % | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | penanggulangan penyakit tidak menular di Wilker Balkesmas Pati | | | | | | | |
| | Persentase Kabupaten / Kota yang difasilitasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Wilker Balkesmas | % | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati |
| | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas wilker Pati | % | 91 | 91 | 91 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati |
| | Persentase Kabupaten/Kota Dengan Respon Cepat Penanggulangan Klb/Bencana < 24 Jam | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati |
| | Persentase Kabupaten/Kota dengan 20% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan indera penglihatan dan pendengaran secara komprehensif | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A |
| | Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di BKIM | % | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A |
| | Prosentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes PAK | Sertifikat | 4 | 4 | 4 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Prosentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi pelayanan laboratorium dan pengujian alat kesehatan | Kabupaten/Kota | 35 | 38 | 38 | 108,57 | Sangat Tinggi | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A |
| | Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | % | 100 | 100,00 | 100,00 | NA | Sangat Tinggi | RSUD Dr. Moewardi |
| | Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | RSUD Tugurejo |
| | Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | RSUD Kelet Donorejo |
| | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | RSJD Dr. Amino Gondohutomo |
| | Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat | % | 95 | 100 | 100 | 105,26 | Sangat Tinggi | RSJD Surakarta |
| | Persentase Pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA | | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| MANUSIA KESEHATAN | | | | | | | | |
| | Persentase pemanfaatan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 70 | 90,1 | 90,1 | 128,71 | Sangat Tinggi | Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| | Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi | % | 92 | 99,86 | 99,86 | 108,54 | Sangat Tinggi | Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A |
| | Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih | % | 100 | 90,73 | 90,73 | 90,73 | Sangat Tinggi | RSJD Surakarta |
| | Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih | % | 89 | 94 | 94 | 105,62 | Sangat Tinggi | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | | | | |
| | Persentase sarana produksi dan distribusi farmasi, alkes dan makanan minuman serta pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan | % | 71 | 71 | 71 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | |
| | Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | % | 94,29 | 100 | 100 | 106,06 | Sangat Tinggi | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| | Prosentase Kabupaten/Kota | % | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Semarang | | | | | | | Masyarakat Wilayah Semarang |
| | Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Ambarawa | % | 86 | 86 | 86 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa |
| | Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Magelang | % | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang |
| | Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten | % | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten |
| | Prosentase Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi teknis dalam upaya peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Pati | % | 85,71 | 85,71 | 85,71 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati |
| | Persentase Organisasi kemasyarakatan | % | 55 | 55 | 55 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kesehatan Indera |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | dan organisasi Profesi kesehatan yang berperan serta secara aktif dalam upaya promotif dan preventif kesehatan indera penglihatan dan pendengaran | | | | | | | Masyarakat Kelas A |
| | Prosentase pelanggan yang menjalin kemitraan dengan Balabkes PAK | % | 60 | 60 | 60 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A |
| | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | % | 90 | 100 | 100 | 111,11 | Sangat Tinggi | RSUD Dr. Moewardi |
| | Persentase Capaian Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi | % | 40 | 105,3 | 105,3 | 263,25 | Sangat Tinggi | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| | Persentase Capaian Peserta Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Provinsi | % | 20 | 139,78 | 139,78 | 698,90 | Sangat Tinggi | RSUD Tugurejo |
| | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | % | 100 | 937 | 937 | 937,00 | Sangat Tinggi | RSUD Kelet Donorejo |
| | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | % | 100 | 110,8 | 110,8 | 110,80 | Sangat Tinggi | RSJD Dr. Amino Gondohutomo |
| | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan | % | 95 | 90,16 | 90,16 | 94,91 | Sangat Tinggi | RSJD Surakarta |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | masyarakat tingkat provinsi | | | | | | | |
| | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi | % | 20,35 | 167,15 | 167,15 | 821,38 | Sangat Tinggi | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | |
| | Cost Recovery Rate (CRR) Total | % | 82,5 | 79,45 | 79,45 | 96,30 | Sangat Tinggi | RSUD Dr. Moewardi |
| | Cost Recovery Rate (CRR) Total | % | 81 | 83,3 | 83,3 | 102,84 | Sangat Tinggi | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo |
| | Cost Recovery Rate (CRR) Total | % | 50,85 | 59,32 | 59,32 | 116,66 | Sangat Tinggi | RSUD Tugurejo |
| | Cost Recovery Rate (CRR) Total | % | 35 | 75 | 75 | 214,29 | Sangat Tinggi | RSUD Kelet Donorejo |
| | Cost Recovery Rate (CRR) Total | % | 45 | 37,99 | 37,99 | 84,42 | Tinggi | RSJD Dr. Amino Gondohutomo |
| | Cost Recovery Rate (CRR) Total | % | 35 | 34,46 | 34,46 | 98,46 | Sangat Tinggi | RSJD Surakarta |
| | Cost Recovery Rate (CRR) Total | % | 37,39 | 42,95 | 42,95 | 114,87 | Sangat Tinggi | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 67 indikator kinerja dengan 66 indikator berstatus sangat tinggi dan 1 indikator berstatus tinggi.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

## Tabel 2. 5
## Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | | | | |
| | Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti | % | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan air baku | % | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Irigasi dan Air Baku |
| | Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi | % | 83 | 83 | 83 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Irigasi dan Air Baku |
| | Persentase luasan daerah bebas genangan banjir | % | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai |
| | Persentase sungai dalam kondisi baik | % | 52,27 | 52,36 | 52,36 | 100,17 | Sangat Tinggi | Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai |
| | Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Pemali Comal |
| | Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Pemali Comal |
| | Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Pemali Comal |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | PSDA Pemali Comal | | | | | | | |
| | Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Pemali Comal |
| | Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Bodri Kuto |
| | Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Bodri Kuto |
| | Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Bodri Kuto |
| | Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Bodri Kuto |
| | Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Serang Lusi Juana |
| | Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Serang Lusi Juana |
| | Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Serang Lusi Juana |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | PSDA Serang Lusi Juana | | | | | | | |
| | Persentase Daerah Irigasi yang dipelihara di wilayah balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Bengawan Solo |
| | Persentase Prasarana dan sarana Air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Bengawan Solo |
| | Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Bengawan Solo |
| | Persentase daerah irigasi yang di pelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo |
| | Persentase prasarana sarana airbaku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo |
| | Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase daerah irigasi yang dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Serayu Citanduy. |
| | Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Serayu Citanduy. |
| | Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Serayu Citanduy. |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | | | |
| | Persentase akses layak air minum perkotaan | % | 94,15 | 94,15 | 94,15 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung |
| | Persentase akses layak air minum perdesaan | % | 83,3 | 84,22 | 84,22 | 101,10 | Sangat Tinggi | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung |
| | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota | | | | | | | Bangunan Gedung |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | | | | |
| | Persentase akses sanitasi air limbah domestik | % | 91,5 | 91,75 | 91,75 | 100,27 | Sangat Tinggi | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | |
| | Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar | % | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung |
| PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | | | | |
| | Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik | % | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Daerah yang diperiksa keandalannya | | | | | | | dan Bangunan Gedung |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | | | |
| | Persentase panjang jalan yang dileger | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan |
| | Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan |
| | Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan |
| | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur | % | 42,42 | 42,55 | 42,55 | 100,31 | Sangat Tinggi | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur |
| | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat | % | 48,01 | 48,01 | 48,01 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik | % | 95,73 | 90,7 | 90,7 | 94,75 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | BPJ Wilayah Tegal | | | | | | | Wilayah Tegal |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal | % | 86,09 | 86,09 | 86,09 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan | % | 85,27 | 89,02 | 89,02 | 104,40 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan | % | 88,44 | 88,44 | 88,44 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap | % | 95,02 | 92 | 92 | 96,82 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap | % | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang | % | 99,99 | 92,9 | 92,9 | 92,91 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang | % | 85,46 | 85,46 | 85,46 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik | % | 97,16 | 90,68 | 90,68 | 93,33 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | BPJ Wilayah Magelang | | | | | | | Wilayah Magelang |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang | % | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo | % | 90,16 | 90,53 | 90,53 | 100,41 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo | % | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati | % | 91,32 | 90,04 | 90,04 | 98,60 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati | % | 93,77 | 93,77 | 93,77 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi | % | 88,57 | 88,67 | 88,67 | 100,11 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi | % | 91,13 | 91,13 | 91,13 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi |
| | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik | % | 91,83 | 90,09 | 90,09 | 98,11 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | BPJ Wilayah Surakarta | | | | | | | |
| | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta | % | 94,73 | 94,73 | 94,73 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. |
| | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengujian dan Peralatan |
| | Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi | % | 100 | 117,79 | 117,79 | 117,79 | Sangat Tinggi | Balai Pengujian dan Peralatan |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | | | | |
| | Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung |
| | Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi | % | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Jasa Konstruksi |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | |
| | Persentase Dokumen/ arahan pengembangan kewilayahan yang disusun | % | 21,99 | 45,00 | 45,00 | 204,64 | Sangat Tinggi | Bidang Penataan Ruang |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase dokumen RTR Kabupaten/ Kota yang dievaluasi | % | 77,29 | 107,22 | 107,22 | 138,72 | Sangat Tinggi | Bidang Penataan Ruang |
| | Persentase Implementasi Indikasi Program Pemanfaatan Ruang | % | 80 | 81,64 | 81,64 | 102,05 | Sangat Tinggi | Bidang Penataan Ruang |
| | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | % | 77,5 | 78,90 | 78,90 | 101,81 | Sangat Tinggi | Bidang Penataan Ruang |
| | Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Pemali Comal |
| | Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Bodri Kuto |
| | Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Serang Lusi Juana |
| | Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Bengawan Solo |
| | Persentase pengawasan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo |
| | Persentase pengawasan ruang di wilayah | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai PSDA Serayu Citanduy. |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Balai PSDA Serayu Citanduy | | | | | | | |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 68 indikator kinerja dengan indikator berstatus sangat tinggi.

### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator program sebagai berikut.

**Tabel 2. 6**
**Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | | | | |
| | Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani | % | 15,08 | 15,36 | 15,36 | 101,86 | Sangat Tinggi | Bidang Perumahan |
| | Persentase rumah layak huni yang disediakan | % | 13,45 | 15,11 | 15,11 | 112,34 | Sangat Tinggi | Bidang Perumahan |
| PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | |
| | Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani | % | 37,50 | 100 | 100 | 266,67 | Sangat Tinggi | Bidang Kawasan Pemukiman |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | | | | |
| | Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani | % | 32,95 | 93,12 | 93,12 | 282,61 | Sangat Tinggi | Bidang Kawasan Pemukiman |
| PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | |
| | Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja dengan indikator berstatus sangat tinggi dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Persentase rumah layak huni yang disediakan dikarenakan adanya integrasi program pemenuhan kebutuhan backlog rumah antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, serta adanya antusiasme dari masyarakat penerima bantuan dalam menyediakan dana swadaya untuk mendukung melaksanakan program tersebut;

b. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani dikarenakan adanya integrasi program penanganan RTLH antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, serta adanya antusiasme dari masyarakat penerima bantuan dalam menyediakan dana swadaya untuk mendukung melaksanakan program tersebut;
c. Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani dikarenakan adanya kolaborasi penanganan antara Pemerintah Pusat - Pemerintah kabupaten/kota - Pemerintah Provinsi, kombinasi beberapa mekanisme pembiayaan melalui mata anggaran hibah, hadiah, serta Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Bankeupemdes) untuk penanganan RTLH di kawasan permukiman kumuh. Selain itu, terdapat beberapa lokasi kawasan permukiman kumuh yang telah tuntas RTLH melalui proses verifikasi dan validasi lapangan;
d. Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani dikarenakan dalam Pencapaian ini diperhitungkan secara agregat melalui integrasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman meliputi permukiman kumuh yang diintervensi melalui sumber pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan CSR serta adanya percepatan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten PKE dalam rangka mendukung penanganan kemiskinan ekstrem. Selain itu juga dengan melakukan verifikasi dan validasi capaian penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah
e. Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasn permukiman dikarenakan seluruh target kinerja kegiatan dapat direalisasikan secara tepat waktu.

## 5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 7**
**Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Kinerja Program | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran terhadap tramtibum | % | 13,51 | 17,23 | 17,23 | 127,54 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan Masyarakat |
| | Persentase Pemeliharaan Tramtibum Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat |
| | Persentase pelanggaran produk hukum daerah yang ditegakkan | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah |
| | Persentase anggota Linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya | % | 2,82 | 6,77 | 6,77 | 240,07 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | | | |
| | Persentase penurunan risiko bencana | % | 3 | 15 | 15 | 500,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
| | Persentase penanganan darurat kebencanaan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penanganan Darurat |
| | Persentase rehab rekon pasca bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
| | Persentase pemenuhan logistik bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Logistik dan Peralatan |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja dengan indikator berstatus sangat tinggi.

## 6. Sosial

Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 8**
**Capaian Kinerja Urusan Sosial**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | | |
| | Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas | % | 34,38 | 36,59 | 36,59 | 106,43 | Sangat Tinggi | Bidang Pemberdayaan Sosial |
| PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | | | | | |
| | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mnendapatkan penanganan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti | % | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi utomo | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Mandiri |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | % | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | % | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring | % | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Cepiring |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede | % | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Turusgede |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo | % | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Pendowo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Potroyudan |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | % | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | % | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | % | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | % | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata | % | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Dewanata |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | % | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo | % | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Raharjo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | % | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | % | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | % | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | % | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Penganthi |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Pelayanan Sosial Penganthi | | | | | | | |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | % | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | % | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | % | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | % | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | % | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso |
| | Persentase penanganan PPKS terlantar yang membutuhkan | % | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 100,00 | Sangat Tinggi | Panti Pelayanan Sosial |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | pelayanan dasar di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | | | | | | | Kumuda Putera Puteri |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | | |
| | Persentase Rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Rehabilitasi Sosial |
| | Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | % | 1,82 | 8,21 | 8,21 | 451,10 | Sangat Tinggi | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | Persentase fakir miskin yang mendapatkan penanganan | % | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penanganan Fakir Miskin |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | | | |
| | Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | | | | |
| | Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pemberdayaan Sosial |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 35 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

## B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

### 1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran urusan Tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 9**
**Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | | | | |
| | Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan | % | 57,14 | 65,71 | 65,71 | 115,00 | Sangat Tinggi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | | | | |
| | Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi | % | 8,19 | 8,26 | 8,26 | 100,85 | Sangat Tinggi | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS |
| | Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi | % | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS |
| | Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi | % | 2,25 | 2,27 | 2,27 | 100,89 | Sangat Tinggi | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS |
| | Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan | % | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pelatihan Kerja dan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | peningkatan produktivitas | | | | | | | Produktivitas LATTAS |
| | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri | % | 2,9 | 6,16 | 6,16 | 212,41 | Sangat Tinggi | Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A |
| | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian | % | 9,38 | 11,96 | 11,96 | 127,51 | Sangat Tinggi | Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A |
| | Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan | % | 13,04 | 24,16 | 24,16 | 185,28 | Sangat Tinggi | Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A |
| | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran | % | 46,75 | 65,37 | 65,37 | 139,83 | Sangat Tinggi | Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A |
| PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal | % | 71,01 | 64,11 | 64,11 | 90,28 | Sangat Tinggi | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA |
| | Persentase peningkatan penyerapan tenaga | % | 68 | 68,19 | 68,19 | 100,28 | Sangat Tinggi | Bidang Penempatan Tenaga Kerja |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | kerja baru disektor Informal | | | | | | | dan Transmigrasi PENTA |
| PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | | | | |
| | Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan | % | 97,8 | 98,5 | 98,5 | 100,72 | Sangat Tinggi | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS |
| | Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah | % | 43 | 43 | 43 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS |
| | Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk | % | 49,72 | 49,72 | 49,72 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS |
| | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial | % | 96 | 98,41 | 98,41 | 102,51 | Sangat Tinggi | Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A |
| PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | | | | | |
| | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | % | 89,57 | 89,99 | 89,99 | 100,47 | Sangat Tinggi | Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER |
| | Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori | % | 26,14 | 28,86 | 28,86 | 110,41 | Sangat Tinggi | Balai Keselamatan Kerja Kelas A |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | baik dalam penerapan K3 | | | | | | | |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 indikator kinerja dengan dengan seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

## 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 10**
**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | | | |
| | Persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan | Per 100.000 | 6,84 | 23,62 | 23,62 | 345,32 | Sangat Tinggi | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | | | |
| | Rasio korban kekerasan terhadap perempuan | Per 100.000 | 5,64 | 4,75 | 4,75 | 118,74 | Sangat Tinggi | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring | % | 20 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | | | | |
| | Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis gender | % | 40 | 63,88 | 63,88 | 159,70 | Sangat Tinggi | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan |
| | Persentase penyelenggaraan program kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak | % | 40 | 63,88 | 63,88 | 159,70 | Sangat Tinggi | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | | | | |
| | Persentase keterisian indikator oleh Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Provinsi | % | 20 | 20 | 20 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | | | | |
| | Persentase Kabupaten /Kota menuju Layak | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pemenuhan Hak dan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Anak Minimal Tingkat Pratama | | | | | | | Perlindungan Anak |
| | Persentase Keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) | % | 25 | 25 | 25 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | | | | |
| | Rasio korban kekerasan terhadap anak | Per 100.000 | 12,36 | 10,47 | 10,47 | 118,05 | Sangat Tinggi | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak |
| | Persentase kabupaten/kota yg sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring | % | 20 | 20 | 20 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

## 3. Pangan

Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 11**
**Capaian Kinerja Urusan Pangan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| | Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas | kkal/kapita/hari | 4.020 | 4.021,00 | 4.021,00 | 99,98 | Sangat Tinggi | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan |
| | CV harga pangan strategis (beras) | % | 2 | 0,58 | 0,58 | 344,83 | Sangat Tinggi | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan |
| | Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan | Ton | 1 | 1,03 | 1,03 | 103,00 | Sangat Tinggi | Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan |
| | Angka Konsumsi Beras | kg/kapita/tahun | 91,4 | 88,60 | 88,60 | 96,94 | Sangat Tinggi | Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | | | | |
| | Prosentase penurunan daerah rawan pangan | % | 1 | 52,56 | 52,56 | 5256,00 | Sangat Tinggi | Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | | | | |
| | Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan | % | 80 | 96,83 | 96,83 | 121,04 | Sangat Tinggi | Bidang Keamanan Pangan |
| | Prosentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamaman Pangan | % | 80 | 100,00 | 100,00 | 125,00 | Sangat Tinggi | Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus telah tercapai.

## 4. Pertanahan

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 12**
**Capaian Kinerja Urusan Pertanahan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | | | | | | | | |
| | Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum | % | 100 | 149,28 | 149,28 | 149,28 | Sangat Tinggi | Bidang Pertanahan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | | | | |
| | Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani | % | 100 | 100,14 | 100,14 | 100,14 | Sangat Tinggi | Bidang Pertanahan |
| PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | | | | | |
| | Persentase pelaksanaan reforma agraria | % | 100 | 216,06 | 216,06 | 216,06 | Sangat Tinggi | Bidang Pertanahan |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja, dengan seluruh dengan indikator berstatus sangat tinggi. Pencapaian masing-masing indikator kinerja dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Persentase pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dikarenakan realisasi yang menyesuaikan dengan pemenuhan permintaan pengadaan tanah oleh instansi pemohon dalam dukungan percepatan terhadap pelaksanaan PSN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
b. Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani dikarenakan pada fasilitasi permasalahan pertanahan yang dapat terfasilitasi sebanyak 4

permasalahan yang melebihi dari target yakni 3 permasalahan, serta pada sertifikasi tanah kas desa pelaksanaannya fokus pada peningkatan kesadaran Pemerintah Desa dan peningkatan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten;

c. Persentase pelaksanaan reforma agraria dikarenakan terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang terkait pemantauan penetapan lokasi dan bidang tanah yang difasilitasi penetapan akses reforma agraria realisasi menyesuaikan dengan pengajuan izin panlok T-1 dan T. Selain itu juga Sub kegiatan ini merupakan dukungan terhadap Pelaksanaan PSN, Gugus Tugas dan Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah.

### 5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 13**
**Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| | Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| | Persentase sungai yang meningkat kualitasnya | % | 10 | 10 | 10 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | | | | | | | | Lingkungan Hidup |
| | Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara | % | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup |
| | Persentase pengujian kualitas air | % | 100 | 112,17 | 112,17 | 112,17 | Sangat Tinggi | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A |
| | Persentase pemantauan kualitas udara ambien | % | 100 | 100,26 | 100,26 | 100,26 | Sangat Tinggi | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | | | |
| | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani | % | 3,83 | 3,83 | 7,65 | 199,74 | Sangat Tinggi | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup |
| | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani di | % | 0,14 | 0,14 | 0,28 | 200,00 | Sangat Tinggi | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Kebun Raya Baturraden | | | | | | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | | | |
| | Persentase rekomendasi lingkungan hidup | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup |
| | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan | % | 75 | 76,92 | 76,92 | 102,56 | Sangat Tinggi | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | | | | |
| | Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase kabupaten/kota yang jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya | % | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup |
| | Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 50 | 50 | 50 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| | Persentase pengaduan yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | | | | |
| | Persentase sampah yang dikelola | % | 63 | 54,66 | 54,66 | 86,76 | Tinggi | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 14 indikator kinerja. Terdapat 13 Indikator berstatus sangat tinggi dan 1 indikator berstatus tinggi.

## 6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja penyelenggaran urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 14**
**Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | | | | |
| | Persentase Kab/Kota yg seluruh penduduk wajib KTP terfasilitasi perekaman KTP-el | % | 97 | 100,00 | 100,00 | 103,09 | Sangat Tinggi | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk |
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | |
| | Persentase Kab/Kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen Akta Kelahiran usia 0-17 diatas 95% | % | 92 | 100,00 | 100,00 | 108,70 | Sangat Tinggi | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | | | | |
| | Persentase institusi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan | % | 100 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | Sangat Tinggi | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

## 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 15**
**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | | | | |
| | Persentase desa yang memiliki Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat | % | 100 | 232,21 | 232,21 | 232,21 | Sangat Tinggi | Bidang Penataan Desa |
| PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | | | | | | |
| | Persentase pengembangan kawasan perdesaan | % | 100 | 146 | 146 | 146,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa |
| PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | |
| | Presentase fasilitasi regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penataan Desa |
| | Persentase rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Administrasi Pemerintahan Desa |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | desa untuk kepentingan umum | | | | | | | |
| | Persentase Desa dengan Sistem Informasi Desa | % | 16,84 | 64,37 | 64,37 | 382,24 | Sangat Tinggi | Bidang Administrasi Pemerintahan Desa |
| | Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya | % | 4,34 | 32,34 | 32,34 | 745,16 | Sangat Tinggi | Bidang Administrasi Pemerintahan Desa |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | | | | |
| | Persentase Desa yang telah memiliki BUMDesa | % | 91 | 93,84 | 93,84 | 103,12 | Sangat Tinggi | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| | Persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya | % | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja, seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

## 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 16**
**Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | | | | |
| | Persentase Pemerintah Daerah yang menyusun GDPK (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) 5 Bidang | % | 27,7 | 61,11 | 61,11 | 220,61 | Sangat Tinggi | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera |
| | Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR) | % | 35 | 35 | 35 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | | | | |
| | Persentase pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | % | 30 | 30,38 | 30,38 | 101,27 | Sangat Tinggi | Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE |
| | Unmeetneed KB | % | 12,76 | 11,74 | 11,74 | 108,69 | Sangat Tinggi | Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase kelompok tribina yang aktif melaporkan Kegiatan | % | 96,3 | 96,6 | 96,6 | 100,31 | Sangat Tinggi | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera |
| | Persentase UPPKA yang aktif melaporkan kegiatan | % | 91 | 92,07 | 92,07 | 101,18 | Sangat Tinggi | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera |
| | Persentase Keterisian indikator Indeks Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota | % | 30 | 30 | 30 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja, seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

## 9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaran urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 17**
**Capaian Kinerja Urusan Perhubungan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | | |
| | Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang | % | 52,34 | 38,66 | 38,66 | 73,86 | Sedang | Bidang Lalu Lintas |
| | Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan | % | 18,52 | 12,99 | 12,99 | 70,14 | Sedang | Bidang Lalu Lintas |
| | Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM | % | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Angkutan Jalan |
| | Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru | % | 94,45 | 193,89 | 193,89 | 205,28 | Sangat Tinggi | Bidang Angkutan Jalan |
| | Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis | % | 42,86 | 42,86 | 42,86 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Angkutan Jalan |
| | Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan | % | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Jaringan Transportasi dan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | | | | | | | | Perkeretaapian |
| | Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian |
| | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | % | 31,25 | 37,50 | 37,50 | 120,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A |
| | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | % | 52,51 | 52,72 | 52,72 | 100,40 | Sangat Tinggi | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A |
| | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | % | 50 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B |
| | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | % | 43,21 | 43,50 | 43,50 | 100,67 | Sangat Tinggi | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B |
| | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana | % | 62,5 | 68,75 | 68,75 | 110,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | | | | | | | Wilayah III Kelas A |
| | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | % | 52,03 | 52,21 | 52,21 | 100,35 | Sangat Tinggi | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A |
| | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | % | 38,46 | 42,31 | 42,31 | 110,01 | Sangat Tinggi | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A |
| | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | % | 79,53 | 79,89 | 79,89 | 100,45 | Sangat Tinggi | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A |
| | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | % | 76,92 | 84,62 | 84,62 | 110,01 | Sangat Tinggi | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B |
| | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan | % | 66,43 | 66,59 | 66,59 | 100,24 | Sangat Tinggi | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | | | | | | | Wilayah V Kelas B |
| | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | % | 34,48 | 44,83 | 44,83 | 130,02 | Sangat Tinggi | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A |
| | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | % | 84,23 | 84,23 | 84,23 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A |
| | Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi | % | 34,85 | 34,85 | 34,85 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Transportasi Jawa Tengah |
| PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | | | | |
| | Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang | % | 75 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pelayaran |
| | Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin | % | 51,12 | 51,12 | 51,12 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pelayaran |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa | % | 87,79 | 88,28 | 88,28 | 100,56 | Sangat Tinggi | Balai Transportasi Jawa Tengah |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | | | | | |
| | Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api | % | 45,45 | 45,45 | 45,45 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 24 indikator kinerja. Terdapat 22 indikator berstatus sangat tinggi dan 2 indikator berstatus sedang.

## 10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 18**
**Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik | % | 85 | 87,54 | 87,54 | 102,99 | Sangat Tinggi | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik |
| | Persentase badan publik yang terbuka | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Statistik |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | | | | |
| | Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi | % | 80 | 85 | 85 | 106,25 | Sangat Tinggi | Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| | Persentase Aplikasi yang Diintegrasikan | % | 85 | 82 | 82 | 96,47 | Sangat Tinggi | Bidang E-Government |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja, seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

## 11. Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 19**
**Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGAWASAN DAN | | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | | | |
| | Persentase Jumlah Koperasi Aktif Provinsi | % | 85,19 | 85,41 | 85,41 | 100,26 | Sangat Tinggi | Bidang Pengawasan |
| PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | | | | |
| | Persentase Jml KSP/KSPPS Prov dng Kategori Sehat | % | 27,15 | 27,18 | 27,18 | 100,11 | Sangat Tinggi | Bidang Pengawasan |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | | | | |
| | Persentase SDM KUMKM yang terampil | % | 83 | 99,53 | 99,53 | 119,92 | Sangat Tinggi | Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | | | | |
| | Persentase Koperasi Provinsi yang berkualitas | % | 76,5 | 25,13 | 25,13 | 32,85 | Sangat Rendah | Bidang Kelembagaan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | | | |
| Persentase Koperasi Provinsi yang berkua | Persentase Usaha Mikro menuju kecil | % | 12,77 | 12,78 | 12,78 | 100,08 | Sangat Tinggi | Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | | | | |
| | Persentase Usaha Kecil menuju Menengah | % | 25 | 39,10 | 39,10 | 156,40 | Sangat Tinggi | Bidang Bina Usaha |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Terdapat 5 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus sangat rendah. yaitu persentase koperasi provinsi yang berkualitas dikarenakan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi mengakibatkan perubahan formulasi perhitungan.

## 12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai beirkut.

**Tabel 2. 20**
**Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| | Persentase perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang dipromosikan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Perencanaan dan Pengembangan |
| PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Rasio Izin Usaha terhadap kepeminatan penanaman modal | % | 24 | 32,43 | 32,43 | 135,13 | Sangat Tinggi | Bidang Promosi PM |
| | Rasio realisasi kemitraan usaha terhadap kepeminatan kemitraan Usaha | % | 26 | 25 | 25 | 96,15 | Sangat Tinggi | Bidang Promosi PM |
| PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| | Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan | % | 95 | 99,74 | 99,74 | 104,99 | Sangat Tinggi | Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan |
| | Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan |
| | Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan | % | 93 | 93 | 93 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pelayanan Perizinan |
| PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| | Persentase realisasi proyek penanaman modal | % | 15 | 20,56 | 20,56 | 137,07 | Sangat Tinggi | Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM |
| PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI | | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| | Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan | % | 90 | 70,68 | 70,68 | 78,53 | Tinggi | Bidang Pengelolaan Data dan Informasi |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja. Terdapat 7 indikator berstatus sangat tinggi, dan 1 indikator berstatus Tinggi

## 13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 21**
**Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | | | | |
| | Persentase capaian kapasitas kepemudaan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Kepemudaan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda | % | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Kepemudaan |
| PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan prestasi olahraga | % | 45 | 45 | 45 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A |
| | Persentase atlet PPLOP yang berprestasi | % | 15 | 15 | 15 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Keolahragaan |
| | Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik | % | 100 | 97 | 97 | 97,00 | Sangat Tinggi | Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja, seluruh indikator berstatus sangat tinggi

## 14. Statistik

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 22**
**Capaian Kinerja Urusan Statistik**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | | | | |
| | Persentase Ketersediaan data sektoral | % | 100 | 100,74 | 100,74 | 100,74 | Sangat Tinggi | Bidang Statistik |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator yang berstatus sangat tinggi.

## 15. Persandian

Kinerja penyelenggaran urusan persandian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 23**
**Capaian Kinerja Urusan Persandian**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki Keamanan Informasi > 80 | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Persandian dan Keamanan Informasi |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator yang berstatus sangat tinggi

## 16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 24**
**Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | |
| | Presentase ragam budaya terlayani | % | 3,1 | 3,10 | 3,10 | 100,00 | Sangat Tinggi | Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A |
| | Persentase seni budaya Kabupaten/Kota yang terfasilitasi | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan Kebudayaan |
| PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | | | | |
| | Presentase jenis seni tradisi terlayani | % | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan Kebudayaan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | | | | |
| | Persentase sumber belajar berbasis budaya | % | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan Kebudayaan |
| PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | | | | |
| | Persentase status cagar budaya | % | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan Kebudayaan |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | | | | |
| | Survei Kepuasan Pengunjung Museum | Angka | 89,8 | 89,84 | 89,84 | 100,04 | Sangat Tinggi | Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

## 17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai bertikut.

**Tabel 2. 25**
**Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | | | | |
| | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan | % | 100 | 106,88 | 106,88 | 106,88 | Sangat Tinggi | Bidang Pengelolaan Perpustakaan |
| | Persentase Perluasan Jejaring Kemitraan | % | 100 | 120 | 120 | 500,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan Perpustakaan |
| | Persentase Partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, Kabupaten/Kota dalam pembudayaan gemar membaca | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengelolaan Perpustakaan |
| | Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka | % | 100 | 101,36 | 101,36 | 101,36 | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan Perpustakaan |
| | Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi | % | 100 | 109,75 | 109,75 | 109,75 | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan Perpustakaan |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator. Kinerja seluruh indikator program urusan perpustakaan sangat tinggi

## 18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 26**
**Capaian Kinerja Urusan Kearsipan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | | | | |
| | Persentase perangkat daerah yang tertib arsip | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip |
| | Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan | % | 100 | 104,07 | 104,07 | 104,07 | Sangat Tinggi | Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip |
| | Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip | % | 100 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator yang seluruhnya berstatus sangat tinggi

## C. Urusan Pilihan

## 1. Perikanan dan Kelautan

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 27**
**Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase Peningkatan Produksi Garam | % | 25 | 37,99 | 37,99 | 151,96 | Sangat Tinggi | Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil |
| | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir | % | 30 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil |
| | Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif | % | 17,6 | 17,60 | 17,60 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil |
| | Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya | % | 25 | 30,72 | 47,30 | 189,20 | Sangat Tinggi | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A |
| | Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya | % | 25 | 38,63 | 47,30 | 189,20 | Sangat Tinggi | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi tahun sebelumnya | % | 25 | 38,99 | 46,90 | 187,61 | Sangat Tinggi | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A |
| | Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha | % | 1 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A |
| | Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha | % | 1 | 1,08 | 1,08 | 108,00 | Sangat Tinggi | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A |
| | Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha | % | 1 | 1,00 | 1,08 | 108,00 | Sangat Tinggi | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap | % | 0,1 | 0 | 0,04 | 40,00 | Sangat Rendah | Bidang Perikanan Tangkap |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A |
| | Persentase ketercapaian | % | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Pelabuhan Perikanan Pantai |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | pelayanan kepelabuhanan | | | | | | | Asemdoyong Kelas B |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 81,82 | 90,91 | 90,91 | 111,11 | Sangat Tinggi | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 100,00 | Sangat Tinggi | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 100,00 | Sangat Tinggi | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A |
| | Persentase Peningkatan Produksi Benih | % | 25 | 25,00 | 80,63 | 322,52 | Sangat Tinggi | Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A |
| | Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya | % | 0,2 | 0,40 | 0,20 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas |
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan | % | 72 | 72,00 | 72,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase peran aktif kelompok masyaraka | % | 45 | 45,00 | 45,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengawasan Sumberdaya |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | pengawas dalam pengawasan sdkp | | | | | | | Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan | % | 2 | 1,00 | 1,00 | 50,00 | Sangat Rendah | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A |
| | Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan | % | 2 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A |
| | Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan | % | 2 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Persentase Peningkatan Produksi Hasil Olahan Ikan | % | 25 | 37,61 | 71,82 | 287,28 | Sangat Tinggi | Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas |
| | Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu | % | 50 | 72,90 | 72,90 | 145,80 | Sangat Tinggi | Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 31 target indikator kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan. Terdapat 29 indikator berstatus sangat tinggi, dan 2 indikator berstatus sangat rendah.

## 2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 28**
**Capaian Kinerja Pariwisata**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP | % | 78,26 | 82,61 | 82,61 | 105,56 | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata |
| | Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | % | 70 | 83,18 | 83,18 | 118,83 | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata |
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Jumlah Kunjungan Wisatawan | Orang | 17.295.375 | 50.204.376 | 50.204.376 | 290,28 | Sangat Tinggi | Bidang Pemasaran Pariwisata |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK | | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | | | | |
| | Persentase Kota Kreatif | % | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | | | | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Kompetensi | % | 59,72 | 102,49 | 102,49 | 171,62 | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 5 target indikator kinerja Urusan Pariwisata. Dengan keseluruhan indikator status sangat tinggi.

## 3. Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 29**
**Capaian Kinerja Urusan Pertanian**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Jumlah Populasi ternak | (ST)/(AU) | ######## | 4.421.140 | 4.421.140 | 110,17 | Sangat Tinggi | Bidang Budidaya |
| | Persentase peningkatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan | % | 1 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Veteriner |
| | Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku | % | 1 | 0,70 | 0,70 | 70,00 | Sedang | Balai Inseminasi Buatan Kelas A |
| | Persentase peningkatan produksi ternak | % | 2 | 24,97 | 24,97 | 1248,50 | Sangat Tinggi | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A |
| | Persentase Penambahan Jumlah Alsintan | % | 4 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian |
| | Persentase penambahan jumlah petani yang mendapatkan jaminan keberlengsungan | % | 5 | 4,50 | 4,50 | 90,00 | Tinggi | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | usaha tani di Jawa Tengah | | | | | | | |
| | Persentase penyaluran pupuk subsidi | % | 100 | 86,70 | 86,70 | 86,70 | Tinggi | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian |
| | Persentase Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai | % | 2,9 | 2,78 | 2,78 | 95,86 | Sangat Tinggi | Bidang Tanaman Pangan |
| | Persentase Peningkatan Produksi bawang merah, cabe, durian, melati dan jahe | % | 10,8 | 10,80 | 10,80 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Hortikultura |
| | Persentase Peningkatan Produksi Kopi, Tebu, Kelapa | % | 3,1 | 3,17 | 3,17 | 102,26 | Sangat Tinggi | Bidang Perkebunan |
| | Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengolah Hasil | % | 2,5 | 2,50 | 2,50 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha |
| | Persentase layanan Sertifikasi benih | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A |
| | Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang | % | 3 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta | % | 3 | 2,37 | 2,37 | 79,00 | Tinggi | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta |
| | Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas | % | 3 | 4,59 | 4,59 | 153,00 | Sangat Tinggi | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas |
| | Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan | % | 17,22 | 3,00 | 3,00 | 17,42 | Sangat Rendah | Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan | % | 1 | 310,00 | 310,00 | 31000,00 | Sangat Tinggi | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan |
| | Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik | % | 18,88 | 25,98 | 25,98 | 137,61 | Sangat Tinggi | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian |
| | Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 10 | 5,59 | 5,59 | 55,90 | Rendah | Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN | | | | | | | | Dinas Peternakan dan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | | | Kesehatan Hewan |
| | Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) | % | 5 | 31,25 | 31,25 | 625,00 | Sangat Tinggi | Bidang Veteriner |
| | Persentase penurunan pemotongan betina produktif | % | 10 | 43,67 | 43,67 | 436,70 | Sangat Tinggi | Bidang Veteriner |
| | Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) | % | 5 | 31,25 | 31,25 | 625,00 | Sangat Tinggi | Balai veteriner semarang |
| | Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) | % | 5 | 31,25 | 31,25 | 625,00 | Sangat Tinggi | Balai veteriner boyolali |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | | | | |
| | Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT) | % | 2,1 | 4,46 | 4,46 | 212,38 | Sangat Tinggi | Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | | | |
| | Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan | % | 15,62 | 384,00 | 384,00 | 2458,39 | Sangat Tinggi | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan |
| | Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 10 | 10,58 | 10,58 | 105,80 | Sangat Tinggi | Bidang Penyuluhan, Pasca Panen |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | | | | | | | | dan Bina Usaha |
| | Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | BALAI PELATIHAN PERTANIAN |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 27 target indikator kinerja Urusan Pertanian Terdapat 21 indikator berstatus sangat tinggi, 3 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus sedang, 1 indikator berstatus rendah dan 1 indikator berstatus sangat rendah

## 4. Kehutanan

Kinerja penyelenggaran urusan kehutanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 30**
**Capaian Kinerja Kehutanan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | | | | | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan | % | 35,38 | 35,38 | 35,38 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | | | | | | | | Perlindungan Hutan |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil I | % | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 1 |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil I | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 1 |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil I | % | 1,63 | 1,73 | 1,73 | 106,13 | Sangat Tinggi | CDK 1 |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil II | % | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 2 |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil II | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 2 |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil II | % | 1,63 | 1,71 | 1,71 | 104,91 | Sangat Renda h | CDK 2 |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil III | % | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 3 |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil III | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 3 |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil III | % | 1,69 | 1,98 | 1,98 | 117,16 | Sangat Tinggi | CDK 3 |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IV | % | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 4 |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IV | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 4 |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IV | % | 1,81 | 1,83 | 1,83 | 101,10 | Sangat Tinggi | CDK 4 |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil V | % | 0,82 | 2,46 | 2,46 | 300,00 | Sangat Tinggi | CDK 5 |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil V | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 5 |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil V | % | 2 | 1,77 | 1,77 | 88,50 | Tinggi | CDK 5 |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VI | % | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 6 |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 6 |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VI | % | 3,25 | 2,39 | 2,39 | 73,54 | Sedang | CDK 6 |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VII | % | 0,82 | 0,00 | 0,72 | 87,80 | Tinggi | CDK 7 |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil VII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 7 |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VII | % | 3,13 | 3,67 | 3,67 | 117,25 | Sangat Tinggi | CDK 7 |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil VIII | % | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 8 |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 8 |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | ditangani di CDK Wil VIII | | | | | | | |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil VIII | % | 2,06 | 2,17 | 2,17 | 105,34 | Sangat Tinggi | CDK 8 |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil IX | % | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 9 |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil IX | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 9 |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil IX | % | 2,63 | 2,31 | 2,31 | 87,83 | Tinggi | CDK 9 |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di CDK Wil X | % | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 10 |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil X | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 10 |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil X | % | 2,06 | 2,45 | 2,45 | 118,93 | Sangat Tinggi | CDK 10 |
| | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang | % | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 11 |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | berkelanjutan di CDK Wil XI | | | | | | | |
| | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di CDK Wil XI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 11 |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di CDK Wil XI | % | 3,13 | 2,70 | 2,70 | 86,26 | Tinggi | CDK 11 |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di BSPTH | % | 0,91 | 0,65 | 0,65 | 71,43 | Sedang | Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A |
| PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | | | | | | |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil I | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 1 |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil I | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 1 |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil II | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 2 |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil II | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 2 |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil III | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 3 |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil III | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 3 |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IV | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100 | Sangat Tinggi | CDK 4 |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IV | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 4 |
| | Persentase konservasi ekosistem yang | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 5 |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | dikelola secara efektif di CDK Wil V | | | | | | | |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 6 |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VI | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 6 |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil VIII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 8 |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil VIII | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 8 |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil IX | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 9 |
| | Persentase konservasi ekosistem yang dikelola secara efektif di CDK Wil IX | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 9 |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang ditangani di CDK Wil X | % | 100 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Sangat Rendah | CDK 10 |
| | Persentase Tumbuhan dan Satwa Liar yang | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 11 |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | ditangani di CDK Wil XI | | | | | | | |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Tahura KGPAA Mangkunagoro I | % | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani di Kebun Raya Baturraden | % | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | | | | | |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat | % | 25 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil I | % | 3 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 1 |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil II | % | 2 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 2 |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok | % | 2 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 3 |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | masyarakat di CDK Wil III | | | | | | | |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IV | % | 2 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 4 |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil V | % | 3 | 0,75 | 0,75 | 25,00 | Sangat Rendah | CDK 5 |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VI | % | 2 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 6 |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VII | % | 3 | 2,40 | 2,40 | 80,00 | Tinggi | CDK 7 |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil VIII | % | 2 | 3,00 | 3,00 | 150,00 | Sangat Tinggi | CDK 8 |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil IX | % | 2 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 9 |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil X | % | 2 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 10 |
| | Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di CDK Wil XI | % | 2 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | CDK 11 |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | | | | | | |
| | Persentase jumlah DAS yang tertangani | % | 5 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam |
| | Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani | % | 25 | 26,97 | 26,97 | 107,88 | Sangat Tinggi | Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 71 target indikator kinerja Urusan Kehutanan Terdapat 61 indikator berstatus sangat tinggi, 5 indikator berstatus tinggi, 2 indikator berstatus sedang, dan 3 indikator berstatus sangat rendah.

## 5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian indikator kin-erja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 31**
**Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | | | | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| | Persentase pengambilan air tanah | % | 55,76 | 43,64 | 43,64 | 127,77 | Sangat Tinggi | Bidang Geologi dan Air Tanah |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo | % | 4,2 | 4,09 | 4,09 | 102,69 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria | % | 12,6 | 10,46 | 10,46 | 120,46 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara | % | 2,91 | 1,92 | 1,92 | 151,56 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan | % | 1,17 | 1 | 1 | 117,00 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara | % | 0,97 | 0,83 | 0,83 | 116,87 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 8,47 | 7,14 | 7,14 | 118,63 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo |
| | Persentase pengambilan air | % | 0,61 | 0,57 | 0,57 | 107,02 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | tanah Wilayah Kendeng Selatan | | | | | | | Kendeng Selatan |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu | % | 3,31 | 1,57 | 2,60 | 127,31 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan | % | 1,1 | 1,02 | 1,02 | 107,84 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak | % | 14,81 | 9,67 | 9,67 | 153,15 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi | % | 5,36 | 4,05 | 4,05 | 132,35 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi |
| | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah | % | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 113,64 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah |
| | Persentase pelayanan pengujian air tanah | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A |
| PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | | | | | |
| | Persentase Good Mining Practice | % | 90,7 | 96,53 | 96,53 | 106,43 | Sangat Tinggi | Bidang Mineral dan Batubara |
| | Persentase good mining practice Wilayah Solo | % | 6,76 | 7,89 | 7,89 | 116,72 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo |
| | Persentase good mining practice | % | 4,23 | 4,42 | 4,42 | 104,49 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Wilayah Kendeng Muria | | | | | | | Kendeng Muria |
| | Persentase good mining practice Wilayah Serayu Utara | % | 6,48 | 7,57 | 7,57 | 116,82 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara |
| | Persentase good mining practice Wilayah Serayu Selatan | % | 4,51 | 4,73 | 4,73 | 104,88 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan |
| | Persentase good mining practice Wilayah Slamet Utara | % | 12,11 | 12,93 | 12,93 | 106,77 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara |
| | Persentase good mining practice Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 3,1 | 3,47 | 3,47 | 111,94 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo |
| | Persentase good mining practice Wilayah Kendeng Selatan | % | 11,55 | 11,67 | 11,67 | 101,04 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan |
| | Persentase good mining practice Wilayah Sewu Lawu | % | 5,63 | 5,99 | 5,99 | 106,39 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu |
| | Persentase good mining practice Wilayah Slamet Selatan | % | 14,37 | 14,51 | 14,51 | 100,97 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan |
| | Persentase good mining practice Wilayah Semarang Demak | % | 4,79 | 5,99 | 5,99 | 125,05 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak |
| | Persentase good mining practice Wilayah Merapi | % | 13,24 | 13,25 | 13,25 | 100,08 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase good mining practice Wilayah Serayu Tengah | % | 3,94 | 4,10 | 4,10 | 104,06 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah |
| | Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A |
| PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | | | | | | | | |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi | tCO2e | 124.224 | 133.288,05 | 133.288,05 | 107,30 | Sangat Tinggi | Bidang Energi Baru Terbarukan |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Solo | tCO2e | 366,15 | 646,37 | 646,37 | 176,53 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Muria | tCO2e | 1.738 | 1.762,64 | 1.762,64 | 101,42 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Utara | tCO2e | 811,99 | 1.034,47 | 1.034,47 | 127,40 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Selatan | tCO2e | 739,00 | 756,42 | 756,42 | 102,36 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Utara | tCO2e | 408 | 424,73 | 424,73 | 104,10 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi | tCO2e | 462,07 | 577,59 | 577,59 | 125,00 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | wilayah Ungaran Telomoyo | | | | | | | Ungaran - Telomoyo |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Kendeng Selatan | tCO2e | 505 | 506,34 | 506,34 | 100,27 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Sewu Lawu | tCO2e | 417,85 | 489,42 | 489,42 | 117,13 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Slamet Selatan | tCO2e | 95.701,00 | 96.653,92 | 96.653,92 | 101,00 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Semarang Demak | tCO2e | 20.288 | 24.741,22 | 24.741,22 | 121,95 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Merapi | tCO2e | 1.856 | 3.676,39 | 3.676,39 | 198,07 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi |
| | Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi wilayah Serayu Tengah | tCO2e | 732,2 | 927,25 | 927,25 | 126,64 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah |
| PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | | | | | |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin | % | 37,13 | 50,89 | 50,89 | 137,06 | Sangat Tinggi | Bidang Ketenagalistrikan |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah | % | 1,92 | 2,34 | 2,34 | 121,88 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | tangga miskin Wilayah Solo | | | | | | | |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria | % | 2,53 | 3,82 | 3,82 | 150,99 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara | % | 1,95 | 4,01 | 4,01 | 205,64 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan | % | 4,15 | 5,23 | 5,23 | 126,02 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara | % | 5,06 | 6,55 | 6,55 | 129,45 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 1,62 | 2,19 | 2,19 | 135,19 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan | % | 4,8 | 5,38 | 5,38 | 112,08 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu | % | 1,82 | 2,49 | 2,49 | 136,81 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan | % | 5,01 | 7,93 | 7,93 | 158,28 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak | % | 1,82 | 1,96 | 1,96 | 107,69 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi | % | 3,73 | 3,83 | 3,83 | 102,68 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi |
| | Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah | % | 2,73 | 5,17 | 5,17 | 189,38 | Sangat Tinggi | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 54 indikator dengan keseluruhan indikator sangat tinggi.

## 6. Perdagangan

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 32**
**Capaian Kinerja Urusan Perdagangan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA di Jawa Tengah | % | 7 | 8,03 | 8,03 | 114,71 | Sangat Tinggi | Bidang Perdagangan Luar Negeri |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi | % | 0,21 | 0,60 | 0,60 | 285,71 | Sangat Tinggi | Bidang Perdagangan Dalam Negeri |
| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | | | | |
| | Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) | % | 11,5 | 9,04 | 9,04 | 127,21 | Sangat Tinggi | Bidang Perdagangan Dalam Negeri |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | | | | |
| | Nilai ekspor non migas | Juta US$ | 7.430 | 9.013,66 | 9.013,66 | 121,31 | Sangat Tinggi | Bidang Perdagangan Luar Negeri |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN | | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | | | | |
| | Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan | % | 3 | 2,64 | 2,64 | 113,64 | Sangat Tinggi | Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen |
| | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Surakarta) | % | 5 | 10,89 | 10,89 | 217,80 | Sangat Tinggi | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A |
| | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (BPSMB Semarang) | % | 4 | 5,00 | 5,00 | 125,00 | Sangat Tinggi | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri | % | 10 | 10,50 | 10,50 | 105,00 | Sangat Tinggi | Bidang Perdagangan Dalam Negeri |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 indikator kinerja dengan keseluruhan indikator sangat tinggi

## 7. Perindustrian

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 33**
**Capaian Kinerja Urusan Perindustrian**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro | % | 6 | 4,73 | 4,73 | 78,83 | Tinggi | Bidang Industri Agro |
| | Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro | % | 3 | 0,18 | 0,18 | 6,00 | Sangat Rendah | Bidang Industri Non Agro |
| | Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa | % | 3,17 | 13,70 | 13,70 | 432,18 | Sangat Tinggi | Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A |
| | Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki | % | 85 | 85,00 | 85,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A |
| | Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif | % | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 100,00 | Sangat Tinggi | Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI | | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| INDUSTRI NASIONAL | | | | | | | | |
| | Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | % | 1 | 11,58 | 11,58 | 1158,00 | Sangat Tinggi | Bidang Industri Agro |
| | Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | % | 2 | 9,94 | 9,94 | 497,00 | Sangat Tinggi | Bidang Industri Non Agro |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Keterangan :

Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja. Terdapat 5 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus Tinggi dan 1 indikator berstatus Sangat rendah. Indikator status sangat rendah yaitu Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro.

## 8. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 34**
**Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi | % | 3,45 | 4,96 | 4,96 | 143,77 | Sangat Tinggi | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA |
| | Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian | % | 3,45 | 3,97 | 3,97 | 115,07 | Sangat Tinggi | Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja dengan status sangat tinggi.

## D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

### 1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 35**
**Capaian Kinerja Sekrateriat Daerah**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM ADMINISTRASI UMUM | | | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | BIRO HUKUM |
| | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda | % | 100 | 70 | 70 | 70 | Sedang | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | BIRO PEREKONOMIAN |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | BIRO ORGANISASI |
| | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | BIRO ORGANISASI |
| | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | BIRO UMUM |
| | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | BIRO UMUM |
| | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | BIRO UMUM |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA |
| | Presentase Capaian Administrasi Umum dan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Keuangan Biro APBJ | | | | | | | |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | | | | | |
| | Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya | % | 34,15 | 155,37 | 155,37 | 454,96 | Sangat Tinggi | BIRO ORGANISASI |
| | Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya | % | 80 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO ORGANISASI |
| | Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD | % | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO ORGANISASI |
| | Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat | % | 91,42 | 94,28 | 94,28 | 103,13 | Sangat Tinggi | BIRO ORGANISASI |
| | Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat | % | 85,37 | 85,37 | 85,37 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO ORGANISASI |
| | Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO ORGANISASI |
| | Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan | % | 85,63 | 100,83 | 100,83 | 117,75 | Sangat Tinggi | BIRO ORGANISASI |
| | Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat | % | 95,92 | 14,63 | 14,63 | 15,25 | Sangat Rendah | BIRO ORGANISASI |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | | | | | |
| | Efektivitas kerjasama daerah | % | 95 | 100 | 100 | 105,26 | Sangat Tinggi | BIRO PEMERINTAHAN,OTONO |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | | | | | | | | MI DAERAH DAN KERJA SAMA |
| | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti | % | 90 | 100 | 100 | 111,11 | Sangat Tinggi | BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA |
| | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | % | 95 | 100 | 100 | 105,26 | Sangat Tinggi | BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA |
| PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | | | |
| | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | % | 42 | 42 | 42 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar | % | 95 | 95 | 95 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar | % | 95 | 95 | 95 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | | | | | |
| | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO HUKUM |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO HUKUM |
| | Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO HUKUM |
| | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | % | 96 | 100 | 100 | 104,17 | Sangat Tinggi | BIRO HUKUM |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | |
| | Presentase capaian kinerja program bidang pertanian | % | 90 | 90 | 90 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | % | 95 | 95 | 95 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | % | 96 | 96 | 96 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM |
| | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 82 | 77 | 77 | 93,90 | Sangat Tinggi | BIRO PEREKONOMIAN |
| | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 77 | 86 | 86 | 111,69 | Sangat Tinggi | BIRO PEREKONOMIAN |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan | % | 85 | 87 | 87 | 102,35 | Sangat Tinggi | BIRO PEREKONOMIAN |
| | Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha | % | 80 | 83,33 | 83,33 | 104,16 | Sangat Tinggi | BIRO PEREKONOMIAN |
| | Nilai kemandirian BLUD | % | 55 | 55 | 55 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO PEREKONOMIAN |
| PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | | | |
| | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa | % | 95 | 95 | 95 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | Efektivitas Pengadaan secara Elektronik | % | 90 | 90 | 90 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi | % | 92 | 92 | 92 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | | | | | |
| | Capaian Pelaksanaan APBD | % | 98,5 | 99,45 | 99,45 | 100,96 | Sangat Tinggi | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | Capaian Pelaksanaan APBN | % | 95,5 | 99,32 | 99,32 | 104,00 | Sangat Tinggi | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | Persentase realisasi bantuan keuangan | % | 85 | 96,07 | 96,07 | 113,02 | Sangat Tinggi | BIRO ADMINISTRASI |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Capaian Indikator Kinerja | Capaian Indikator Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | | | | | | | | PEMBANGUNAN |
| | Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah | % | 85 | 85 | 85 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
| | Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 47 indikator kinerja. Terdapat 45 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus sedang dan 3 indikator berstatus rendah.

## 2. Sekretariat DPRD

Kinerja unsur Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 36**
**Capaian Kinerja Sekretariat DPRD**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI | | | | | | | | Sekretariat DPRD |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Sekretariat DPRD | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bagian Umum |
| | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Sekretariat DPRD |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | | | | Sekretariat DPRD |
| | Persentase fasilitasi penyusunan RAPERDA | % | 95 | 95 | 95 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bagian Persidangan |
| | Persentase Layanan Bagian Humas | % | 95 | 95 | 95 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bagian Humas |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 indikator kinerja dengan sangat tinggi.

## E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

### 1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaran unsur Perencanaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 37**
**Capaian Kinerja Perencanaan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | |
| | Persentase dokumen perencanaan , evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundang - undangan | % | 90 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | |
| | Persentase keselarasan, dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan lintas sektor | % | 90 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Kajian dan Pengembangan |
| | Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | % | 90 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Presentasi konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian | % | 90 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Perekonomian |
| | Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup | % | 90 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

## 2. Keuangan

Kinerja penyelenggaran unsur Keuangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 38**
**Capaian Kinerja Keuangan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan | % | 100 | 99,05 | 99,05 | 99,05 | Sangat Tinggi | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| | Persentase Penetapan APBD tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Anggaran |
| | Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Akuntansi |
| | Persentase realisasi serapan APBD | % | 95 | 93,85 | 93,85 | 98,79 | Sangat Tinggi | Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | | | |
| | Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah | % | 72,5 | 68 | 68 | 93,79 | Sangat Tinggi | Bidang Aset Daerah |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | |
| | Persentase Pemanfaatan Informasi Pendapatan Daerah | % | 95 | 95 | 95 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan PKB | % | 7,08 | 6,6 | 6,6 | 93,22 | Sangat Tinggi | Bidang Pajak Kendaraan Bermotor |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB | % | 7,35 | 5,86 | 5,86 | 79,73 | Tinggi | Bidang Pajak Kendaraan Bermotor |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertangani | % | 12 | 28,38 | 28,38 | 236,50 | Sangat Tinggi | Bidang Pajak Kendaraan Bermotor |
| | Persentase Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | % | 13,08 | 13,24 | 13,24 | 101,22 | Sangat Tinggi | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan Lain lain Pendapatan Yang sah | % | 4,32 | 5,51 | 5,51 | 127,55 | Sangat Tinggi | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah | % | 12,5 | 12,92 | 12,92 | 103,36 | Sangat Tinggi | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan PAP | % | 14,33 | 12,39 | 12,39 | 86,46 | Tinggi | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan PBBKB | % | 2,03 | 2,46 | 2,46 | 121,18 | Sangat Tinggi | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok | % | -6,73 | -6,29 | -6,29 | 93,46 | Sangat Tinggi | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain |
| | Persentase Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah | % | 90 | 99,89 | 99,89 | 110,99 | Sangat Tinggi | Bidang Evaluasi dan Pembinaan |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I | % | 8,37 | 8,31 | 8,31 | 99,28 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I | % | 4,3 | 4,04 | 4,04 | 93,95 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang I | % | 10,26 | 9,92 | 9,92 | 96,69 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang I | % | 12 | 31,32 | 31,32 | 261,00 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II | % | 4,97 | 4,68 | 4,68 | 94,16 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II | % | 9,49 | 8,7 | 8,7 | 91,68 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan PAP UPPD Kota Semarang II | % | 16,38 | 13,02 | 13,02 | 79,49 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Semarang II | % | -5,55 | -5,21 | -5,21 | 93,87 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II | % | 12 | 26,81 | 26,81 | 223,42 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III | % | 5,34 | 5,09 | 5,09 | 95,32 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III | % | 11,24 | 9,78 | 9,78 | 87,01 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Semarang III | % | 16,16 | 22,61 | 22,61 | 139,91 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III | % | 12 | 28,12 | 28,12 | 234,33 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang | % | 7,76 | 7,27 | 7,27 | 93,69 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang |
| | Persentase Peningkatan Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang | % | 9,31 | 7,29 | 7,29 | 78,30 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Semarang | % | 7,88 | 7,06 | 7,06 | 89,59 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Semarang | % | -0,87 | -0,46 | -0,46 | 52,87 | Rendah | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang | % | 12 | 28,41 | 28,41 | 236,75 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB | % | 5,68 | 5,38 | 5,38 | 94,72 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | UPPD Kota Salatiga | | | | | | | Daerah Kota Salatiga |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga | % | 6,28 | 4,75 | 4,75 | 75,64 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Salatiga | % | 25 | 20,97 | 20,97 | 83,88 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Salatiga | % | 2,52 | 2,69 | 2,69 | 106,75 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga | % | 12 | 32,58 | 32,58 | 271,50 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal | % | 8 | 7,35 | 7,35 | 91,88 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal | % | 9,13 | 7,93 | 7,93 | 86,86 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kendal | % | 19,61 | 31,52 | 31,52 | 160,73 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kendal | % | 10,22 | 10,33 | 10,33 | 101,08 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal | % | 12 | 27,14 | 27,14 | 226,17 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak | % | 10,35 | 9,18 | 9,18 | 88,70 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak | % | 7,59 | 5,73 | 5,73 | 75,49 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Demak | % | 16,47 | 14,4 | 14,4 | 87,43 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Demak | % | 1,95 | 2,22 | 2,22 | 113,85 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak | % | 12 | 30,58 | 30,58 | 254,83 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan | % | 8,35 | 7,65 | 7,65 | 91,62 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan | % | 3,45 | 2,73 | 2,73 | 79,13 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Grobogan | % | 12,04 | 12,59 | 12,59 | 104,57 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Grobogan | % | 5,74 | 6,29 | 6,29 | 109,58 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan | % | 12 | 28,84 | 28,84 | 240,33 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta | % | 4,16 | 3,92 | 3,92 | 94,23 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta | % | 10,26 | 8,85 | 8,85 | 86,26 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Surakarta | % | 16,91 | 12,88 | 12,88 | 76,17 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Surakarta | % | 5,94 | 6,35 | 6,35 | 106,90 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta | % | 12 | 26,95 | 26,95 | 224,58 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten | % | 5,69 | 5,44 | 5,44 | 95,61 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | | | | | | | | Kabupaten Klaten |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten | % | 9,07 | 6,85 | 6,85 | 75,52 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Klaten | % | 16,22 | 13,96 | 13,96 | 86,07 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Klaten | % | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 105,77 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten | % | 12 | 26,19 | 26,19 | 218,25 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen | % | 6,18 | 5,84 | 5,84 | 94,50 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sragen | % | 21,95 | 35,32 | 35,32 | 160,91 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen | % | 7,01 | 4,86 | 4,86 | 69,33 | Sedang | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada | % | 4,58 | 4,8 | 4,8 | 104,80 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | UPPD Kabupaten Sragen | | | | | | | Kabupaten Sragen |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen | % | 12 | 32,07 | 32,07 | 267,25 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 5,04 | 4,88 | 4,88 | 96,83 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 8,39 | 6,36 | 6,36 | 75,80 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 16,4 | 9,51 | 9,51 | 57,99 | Rendah | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 6,85 | 6,91 | 6,91 | 100,88 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 12 | 30,22 | 30,22 | 251,83 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 5,83 | 5,58 | 5,58 | 95,71 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD | % | 8,82 | 6,91 | 6,91 | 78,34 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Kabupaten Wonogiri | | | | | | | Kabupaten Wonogiri |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 5,41 | 4,79 | 4,79 | 88,54 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 1,06 | | | 0,00 | Sangat Rendah | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 12 | 34,22 | 34,22 | 285,17 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 5,01 | 4,88 | 4,88 | 97,41 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 9,65 | 6,71 | 6,71 | 69,53 | Sedang | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 16,22 | 13,66 | 13,66 | 84,22 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 5,05 | 5,62 | 5,62 | 111,29 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani | % | 12 | 26,95 | 26,95 | 224,58 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | UPPD Kabupaten Karanganyar | | | | | | | Kabupaten Karanganyar |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali | % | 6,91 | 6,49 | 6,49 | 93,92 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali | % | 5,74 | 4,25 | 4,25 | 74,04 | Sedang | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Boyolali | % | 16,26 | 17,39 | 17,39 | 106,95 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Boyolali | % | -4,84 | -4,22 | -4,22 | 87,19 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali | % | 12 | 27,91 | 27,91 | 232,58 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati | % | 6,23 | 6,05 | 6,05 | 97,11 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pati | % | 16,1 | 13,62 | 13,62 | 84,60 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada | % | 3,47 | 3,91 | 3,91 | 112,68 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | UPPD Kabupaten Pati | | | | | | | Kabupaten Pati |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pati | % | 3,47 | | | 0,00 | Sangat Rendah | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati | % | 12 | 20,21 | 20,21 | 168,42 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora | % | 6,27 | 5,87 | 5,87 | 93,62 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora | % | 11,18 | 8,66 | 8,66 | 77,46 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Blora | % | 16,7 | 15,6 | 15,6 | 93,41 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Blora | % | 5,15 | 5,4 | 5,4 | 104,85 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora | % | 12 | 26,84 | 26,84 | 223,67 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB | % | 8,09 | 7,49 | 7,49 | 92,58 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | UPPD Kabupaten Rembang | | | | | | | Kabupaten Rembang |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang | % | 6,66 | 4,97 | 4,97 | 74,62 | Sedang | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Rembang | % | 16,36 | 15,4 | 15,4 | 94,13 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Rembang | % | 6,04 | 6,34 | 6,34 | 104,97 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang | % | 12 | 26,62 | 26,62 | 221,83 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus | % | 4,95 | 4,83 | 4,83 | 97,58 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus | % | 5,33 | 3,94 | 3,94 | 73,92 | Sedang | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kudus | % | -9,09 | 49,3 | 49,3 | -542,35 | Sangat Rendah | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada | % | 5,04 | 5,76 | 5,76 | 114,29 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | UPPD Kabupaten Kudus | | | | | | | Kabupaten Kudus |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus | % | 12 | 27,24 | 27,24 | 227,00 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara | % | 10,07 | 9,07 | 9,07 | 90,07 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara | % | 3,98 | 2,86 | 2,86 | 71,86 | Sedang | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Jepara | % | 13,04 | 12,94 | 12,94 | 99,23 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Jepara | % | 12,74 | 7,99 | 7,99 | 62,72 | Rendah | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara | % | 12 | 31,57 | 31,57 | 263,08 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan | % | 7,2 | 6,43 | 6,43 | 89,31 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan | % | 9,36 | 6,75 | 6,75 | 72,12 | Sedang | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Pekalongan | % | 6,87 | 7,54 | 7,54 | 109,75 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan | % | 12 | 27,79 | 27,79 | 231,58 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 10,73 | 9,64 | 9,64 | 89,84 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 5,25 | 4,14 | 4,14 | 78,86 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 76,74 | 43,81 | 43,81 | 57,09 | Rendah | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 10,85 | 12,48 | 12,48 | 115,02 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 12 | 28,81 | 28,81 | 240,08 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang | % | 11,44 | 10,18 | 10,18 | 88,99 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang | % | 6,53 | 5,34 | 5,34 | 81,78 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Batang | % | 49,42 | 37,28 | 37,28 | 75,44 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Batang | % | 7,36 | 7,48 | 7,48 | 101,63 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang | % | 12 | 27,38 | 27,38 | 228,17 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang | % | 10,09 | 8,89 | 8,89 | 88,11 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang | % | 7,15 | 8,89 | 8,89 | 124,34 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Pemalang | % | 16,53 | 16,36 | 16,36 | 98,97 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Pemalang | % | 5,02 | 5,2 | 5,2 | 103,59 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang | % | 12 | 28,83 | 28,83 | 240,25 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Tegal | % | 8,21 | 7,38 | 7,38 | 89,89 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal | % | 8,09 | 7,49 | 7,49 | 92,58 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Tegal | % | -48,69 | -2,35 | -2,35 | 4,83 | Sangat Rendah | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Tegal | % | 12 | 26,17 | 26,17 | 218,08 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal | % | 10,99 | 9,72 | 9,72 | 88,44 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal | % | 6,32 | 5,55 | 5,55 | 87,82 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Tegal | % | 16,19 | 18,07 | 18,07 | 111,61 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada | % | 7,34 | 8,33 | 8,33 | 113,49 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | UPPD Kabupaten Tegal | | | | | | | Kabupaten Tegal |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal | % | 12 | 33,05 | 33,05 | 275,42 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes | % | 11,42 | 10,07 | 10,07 | 88,18 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes | % | 6,91 | 6,66 | 6,66 | 96,38 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Brebes | % | 16,32 | 17,24 | 17,24 | 105,64 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Brebes | % | 2,47 | 2,85 | 2,85 | 115,38 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes | % | 12 | 27,34 | 27,34 | 227,83 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas | % | 8,02 | 7,24 | 7,24 | 90,27 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD | % | 6,69 | 5,16 | 5,16 | 77,13 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Kabupaten Banyumas | | | | | | | Kabupaten Banyumas |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Banyumas | % | 10,92 | 9,66 | 9,66 | 88,46 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banyumas | % | 0,67 | 0,77 | 0,77 | 114,93 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas | % | 12 | 27,78 | 27,78 | 231,50 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap | % | 8,21 | 7,49 | 7,49 | 91,23 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap | % | 5,05 | 4,09 | 4,09 | 80,99 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Cilacap | % | 17,58 | 12,47 | 12,47 | 70,93 | Sedang | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Cilacap | % | 5,01 | 6,29 | 6,29 | 125,55 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani | % | 12 | 27 | 27 | 225,00 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | UPPD Kabupaten Cilacap | | | | | | | Kabupaten Cilacap |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 9,43 | 8,35 | 8,35 | 88,55 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 8,61 | 5,67 | 5,67 | 65,85 | Sedang | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 16,35 | 16,36 | 16,36 | 100,06 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 5,75 | 6,44 | 6,44 | 112,00 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 12 | 28,83 | 28,83 | 240,25 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 9,92 | 8,72 | 8,72 | 87,90 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 7,65 | 5,53 | 5,53 | 72,29 | Sedang | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP | % | 3,5 | 9,66 | 9,66 | 276,00 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | UPPD Kabupaten Banjarnegara | | | | | | | Kabupaten Banjarnegara |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 2,2 | 2,47 | 2,47 | 112,27 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 12 | 27,42 | 27,42 | 228,50 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kota Magelang | % | 3,16 | 3,11 | 3,11 | 98,42 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang | % | 3,61 | 2,66 | 2,66 | 73,68 | Sedang | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kota Magelang | % | 15,97 | 13,92 | 13,92 | 87,16 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kota Magelang | % | 3,52 | 4,38 | 4,38 | 124,43 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kota Magelang | % | 12 | 31,39 | 31,39 | 261,58 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang | % | 6,03 | 5,93 | 5,93 | 98,34 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang | % | 6,72 | 4,85 | 4,85 | 72,17 | Sedang | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Magelang | % | 16,36 | 17,73 | 17,73 | 108,37 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Magelang | % | 26,54 | 28,1 | 28,1 | 105,88 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang | % | 12 | 27,99 | 27,99 | 233,25 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen | % | 7,68 | 7,29 | 7,29 | 94,92 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | Persentase peningkatan penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen | % | 6,1 | 4,61 | 4,61 | 75,57 | Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | Persentase peningkatan penerimaan PAP UPPD Kabupaten Kebumen | % | 3,32 | 3,1 | 3,1 | 93,37 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada UPPD Kabupaten Kebumen | % | 3,21 | 3,69 | 3,69 | 114,95 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase Objek Piutang Pajak Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen | % | 12 | 27 | 27 | 225,00 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | Persentase peningkatan penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo | % | 5,69 | 5,56 | 5,56 | 97,72 | Sangat Tinggi | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Keuangan ditunjukan dengan 198 indikator kinerja, Terdapat 130 indikator berstatus sangat tinggi, 45 indikator berstatus tinggi, 13 indikator berstatus sedang, 5 indikator berstatus rendah dan 5 indikator berstatus sangat rendah.

### 3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran unsur Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 38**
**Capaian Kinerja Kepegawaian**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | | | Badan Kepegawaian Daerah |
| | Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | terevaluasi kinerjanya | | | | | | | |
| | Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai |
| | Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Bidang Mutasi |
| | Presentase penanganan kasus kepegawaian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai |
| | Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan | % | 100 | 80 | 80 | 80 | Sangat Tinggi | Bidang Informasi Kepegawaian |
| | Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja dengan status sangat tinggi.

## 4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran unsur pendidikan dan pelatihan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 39**
**Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah |
| | Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis | % | 100 | 100 | 100 | 100,00 | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis |
| | Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional |
| | Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial |
| | Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial |
| | Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti | % | 82 | 86,84 | 86,84 | 105,90 | Sangat Tinggi | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu |
| | Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan | Skor | 3,5 | 3,51 | 3,51 | 100,29 | Sangat Tinggi | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | | | | | | | | Penjaminan Mutu |
| | Persentase PNS yang lulus uji kompetensi | % | 93,17 | 93 | 93 | 99,82 | Sangat Tinggi | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 indikator kinerja dengan status sangat tinggi.

## 5. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran urusan penelitian dan pegembangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 40**
**Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Ekonomi dan Industri | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100 | Sangat Tinggi | UPT Brida |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang ekonomi dan industri | % | 20 | 20,00 | 20,00 | 100 | Sangat Tinggi | UPT Brida |
| | Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100 | Sangat Tinggi | UPT Brida |
| | Persentase inovasi daerah yang siap diterapkan Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya | % | 100 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | Tinggi | UPT Brida |
| | Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | % | 20 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | UPT Brida |
| | Persentase hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang operasional bidang pemerintahan, sosial, dan budaya | % | 20 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | UPT Brida |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 indikator kinerja. Terdapat 5 indikator berstatus sangat tingg dan 1 indikator berstatus tinggi.

## 6. Penghubung

Kinerja penyelenggaran unsur penghubung ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 41**
**Capaian Kinerja Penghubung**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | | | | | Badan Penghubung |
| | Persentase Ketercapaian Pelayanan Penghubung | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Tinggi | Badan Penghubung |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Penghubung ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan status sangat tinggi.

## F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaran unsur pengawasan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 42**
**Capaian Kinerja Pengawasan**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | | | INSPEKTORAT |
| | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | % | 85 | 87,06 | 87,06 | 102,42 | Sangat Tinggi | INSPEKTORAT |
| | Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Khusus | % | 85 | 137,50 | 137,50 | 161,76 | Sangat Tinggi | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS |
| | Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | % | 85 | 101,27 | 101,27 | 119,14 | Sangat Tinggi | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| | Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah | % | 85 | 75,47 | 75,47 | 88,79 | Tinggi | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| | Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah | % | 85 | 186,36 | 186,36 | 219,25 | Sangat Tinggi | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | | | | |
| | Persentase Jumlah entitas yang dilakukan pendampingan dan asistensi | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | INSPEKTORAT |
| | Persentase Penerapan MR di OPD | % | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Sangat Tinggi | INSPEKTORAT |
| | Nilai Self Assessment RB Provinsi | Nilai | 86 | 88,38 | 88,38 | 102,77 | Sangat Tinggi | INSPEKTORAT |
| | Persentase Nilai MCP korsupgah | % | 85 | 53,43 | 53,43 | 62,86 | Renda h | INSPEKTORAT |
| | Persentase Capaian Aksi Stranas PK | % | 90 | 3,03 | 3,03 | 3,37 | Sangat Renda h | INSPEKTORAT |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Pemerintahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja. Terdapat 7 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator berstatus tinggi, 1 indikator berstatus rendah dan 1 indikator berstatus sangat rendah.

## G. Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaran unsur pemerintahan umum ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 43**
**Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum**

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | | | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 3,4 | 3,87 | 3,87 | 113,82 | Sangat Tinggi | Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional |
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | | | | |
| | Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 115,15 | Sangat Tinggi | Bidang Politik Dalam Negri |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | | | | |
| | Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 3,11 | 3,4 | 3,4 | 109,32 | Sangat Tinggi | Bidang Ketahanan Bangsa |

| Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Satuan | Capaian Indikator Kinerja | | | | Status | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target RKPD - P Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Realisasi s.d Tahun 2023 (%) | Tingkat Capaian s.d Tahun 2023 (%) | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | | | | |
| | Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 3,39 | 3,25 | 3,25 | 95,87 | Sangat Tinggi | Bidang Ketahanan Bangsa |
| PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | | | | |
| | Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Nilai | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 117,24 | Sangat Tinggi | Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional |

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Keterangan :
Sangat Tinggi : 91 % ≤ 100 % Tinggi : 76 % ≤ 90% Sedang : 66 % ≤ 75 % Rendah : 51 % ≤ 65 % Sangat Rendah : ≤ 50 %

Kinerja penyelenggaran urusan Pemerintahan Umum ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja dengan seluruh indikator berstatus sangat tinggi.

PJ GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

bappeda.jatengprov.go.id

Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 21 Tahun 2024
Tentang

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

## RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

*"Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari"*

BUKU 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **5.289.653.813.000** | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 75.07 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **5.131.111.958.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 3.25 | 5.131.111.958.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 5.131.111.958.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 5.089.781.258.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 5.041.376.458.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 5.041.376.458.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 5.038.626.458.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 32844 | 5.038.626.458.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.750.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 490.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 490.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 5 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 475.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 475.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 3 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 3 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 150.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 3.040.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 3.040.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 160.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 280.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 750.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 2 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 4.280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 60 | 4.280.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 3.030.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 40 | 3.030.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 38.109.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 38.109.800.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 2.000.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 2.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 35.889.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 35.889.800.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.010.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 100 | 2.010.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 17 | 240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 200 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Bulan | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 15 | 1.150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 220 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 250 | 125.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.908.100.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 482.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 482.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 32.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 32.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 72.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 72.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 39.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 206.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 12 | 206.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 106.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 3 | 106.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 667.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 667.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 365.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 365.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 6.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 290.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 290.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 488.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 539 | 488.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 5 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 369 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 66.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 493 | 66.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 175.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.369.400.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 446.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 446.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 175.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 6 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 428.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 428.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 170.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 248.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 248.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 415.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 415.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 33 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 230.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.580.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 376.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 376.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 17 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 7 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 7 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 436.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 48 | 436.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 160.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 623.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 105 | 623.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 22 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 70 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 245.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 245.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 175.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.133.100.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 470.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 470.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor | Paket | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 230.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 46.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | 46.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 46.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 31 | 46.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 463.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan | 1 | 463.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 135.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 135.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 255.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 255.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 143.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 143.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 3.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 20 | 3.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara | Unit | 24 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Gedung Yang Direhab | Unit | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Gedung Yang Direhab | Unit | 10 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.251.500.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 497.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 497.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 38.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 38.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 24 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 5 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 392.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Laporan | 12 | 392.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 107.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 18 | 107.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 5 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 22.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 20 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 5.366.500.000 | Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 428.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 2 | 428.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 135.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 135.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 8 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Paket | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Paket | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 3.270.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | 3.270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 13 | 220.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | 3.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 883.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 883.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 3 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 330.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 785.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 280 | 785.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 12 | 48.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 60 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 127.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 210 | 127.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.795.800.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 471.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 471.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 204.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 24 | 204.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 61.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 61.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 143.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 11 | 143.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 600.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 48 | 600.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 220.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 364.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 364.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 470.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 75 | 470.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 8 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 3 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 50 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 3 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 350.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 3.302.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 448.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 448.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 2.130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | 2.130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 7 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 2.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 434.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 3 | 434.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 188.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 188.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 265.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 265.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 40 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 55 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.772.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 100 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 686.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 1 | 686.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 35.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 400.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 521.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 521.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 265.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 265.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 335.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 335.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 20 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 20 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas | Unit | 3 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 4.617.000.000 | Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 490.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 490.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 2 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 140.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 585.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 8 | 585.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 40.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 6 | 220.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 325.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.950.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 1.950.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 660.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 660.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.552.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 28 | 1.552.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 8 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 3 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 6 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.686.500.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 451.500.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah | % | 100 | 451.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 16.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 16.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 220.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | 650.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 40 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 10 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 3 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 472.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 472.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 308.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 308.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 83.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 10 | 83.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 10 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 24 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.336.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 582.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 582.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 33.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 409.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 409.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 3 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 280.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 27 | 165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 5 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 15 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 6.038.200.000 | Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 545.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 545.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 75.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 170.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 85 | 650.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 10 | 650.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.028.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 2.028.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 632.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 632.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.381.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.381.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.770.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 22 | 2.770.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 7 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 2.500.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 5 | 2.500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 5 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.769.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 465.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 465.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 20 | 500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 10 | 400.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 504.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 504.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 294.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 294.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 15 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 15 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.405.600.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 355.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 355.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 10 | 190.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 140.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 5 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 480.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 480.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 285.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 285.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 25 | 350.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 10 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 5 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 5.000.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 567.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 567.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 85.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 225.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 3.210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 16 | 3.210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 340.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 8 | 340.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0009 | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 2.500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 0 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 603.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 21 | 603.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 330.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 258.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 258.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 620.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 146 | 620.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 60 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 22 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 49 | 190.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 190.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **158.541.855.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.28 | 158.541.855.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 158.541.855.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 158.541.855.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 158.541.855.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | Angka | 100 | 158.541.855.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 157.441.855.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 157.441.855.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.100.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 6 | 1.100.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| **Meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan inklusif** | | | | | | | | | **3.487.532.030.000** | | |
| | | | | | | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12.96 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | | | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 8.14 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | **Meningkatnya akses pemerataan pendidikan** | | | | | | | | **573.915.203.000** | | |
| | | | | | | APK SMA, SMK dan SLB | % | 83.29 | 573.915.203.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | 571.545.203.000 | | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I | % | 90.9 | 2.720.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I | % | 76.68 | 1.400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 6 | 1.200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I | % | 91 | 700.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 4 | 500.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi | Ruang | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 620.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I | % | 90.08 | 620.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 420.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 2 | 420.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II | % | 76.84 | 2.350.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II | % | 30.572 | 2.000.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 850.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 4 | 850.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 4 | 750.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 1 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II | % | 41.111 | 350.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III | % | 76.06 | 1.100.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III | % | 72.4 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 3 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III | % | 90.15 | 500.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III | % | 86.69 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV | % | 25.85 | 5.902.500.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 1.307.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV | % | 73.7 | 1.307.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 679.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 3 | 679.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 3 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 216.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Unit | 108 | 216.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | 212.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 212.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 4.287.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IV | % | 0 | 4.287.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 660.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Unit | 240 | 660.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 1 | 2.000.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 1.627.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 5 | 1.627.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 308.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IV | % | 0 | 308.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 208.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 2 | 208.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 3 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX | % | 54.6 | 5.500.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX | % | 24.83 | 800.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 4 | 800.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 4.550.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX | % | 88.43 | 4.550.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 3 | 1.200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 500.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 4 | 450.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 4 | 800.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 1.600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi | Ruang | 8 | 1.600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX | % | 83.07 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V | % | 94.23 | 3.400.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V | % | 69.37 | 2.500.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 1.000.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 0 | 1.000.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 4 | 1.400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V | % | 88.09 | 700.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 3 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V | % | 92.52 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI | % | 80.17 | 550.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI | % | 85 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI | % | 89 | 350.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII | % | 72.84 | 1.100.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII | % | 50.28 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII | % | 64.18 | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 0 | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII | % | 188.45 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.03.0045 | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 5 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII | % | 77.25 | 4.050.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 2.400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII | % | 78.4 | 2.400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 4 | 1.250.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 3 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0022 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 2 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0023 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 2 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII | % | 89.6 | 1.500.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 2 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0016 | | | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi | Ruang | 0 | 300.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII | % | 81.07 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X | % | 78.06 | 640.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X | % | 66.9 | 310.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 2 | 260.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 1 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X | % | 88.98 | 260.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 260.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X | % | 89.99 | 70.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 70.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI | % | 88.14 | 6.360.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 2.200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI | % | 82.96 | 2.200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 560.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 3 | 560.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 6 | 900.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 80.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 2 | 500.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 2 | 160.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 3.400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI | % | 84.96 | 3.400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 3 | 900.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi | Ruang | 12 | 2.500.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 760.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI | % | 83.96 | 760.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 2 | 160.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 6 | 600.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII | % | 81.4 | 3.625.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 1.525.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII | % | 75.3 | 1.525.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 875.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 5 | 875.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 2 | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.01.0046 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 1 | 250.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII | % | 91.5 | 2.000.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0038 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Paket | 1 | 250.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0063 | | | Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 400.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 800.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII | % | 93.5 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII | % | 88.26 | 400.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII | % | 75.26 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII | % | 84.77 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 1 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB | % | 13.16 | 18.950.881.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 18.950.881.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan | Angka | 20 | 18.950.881.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0003 | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 1.000.346.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 8 | 1.000.346.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0004 | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | 1.199.915.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 5 | 1.199.915.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0008 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 8.506.665.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 39 | 8.506.665.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0040 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | 1.320.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 18 | 1.320.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0069 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 1.160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 8 | 1.160.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0077 | | | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah | | | | 326.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 2 | 326.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0079 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 4.786.955.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 41 | 4.786.955.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0080 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 651.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | Ruang | 7 | 651.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA | % | 75 | 118.613.545.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 118.613.545.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan | Angka | 570 | 118.613.545.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0010 | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | 909.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 5 | 909.610.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0014 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 6.369.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 51 | 6.369.910.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0019 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 34.352.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 189 | 34.352.680.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0020 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 5.728.642.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 23 | 5.728.642.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0027 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | 248.667.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 3 | 248.667.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0028 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | 2.642.788.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 11 | 2.642.788.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.01.0036 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 17.820.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1203 | 17.820.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0041 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | 30.600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 175 | 30.600.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0068 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 2.319.664.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 23 | 2.319.664.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0070 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | 3.325.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun | Ruang | 11 | 3.325.740.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0071 | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium | | | | 14.295.844.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 12 | 14.295.844.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | | | | | Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK | % | 65 | 309.447.666.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 309.447.666.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan | Angka | 213 | 309.447.666.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0004 | | | Pembangunan Ruang Praktik Siswa | | | | 18.745.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun | Ruang | 15 | 18.745.500.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0005 | | | Pembangunan Ruang Laboratorium | | | | 7.873.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | 21 | 7.873.300.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0006 | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | 2.203.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 14 | 2.203.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0007 | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | 1.177.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 3 | 1.177.200.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0010 | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 6.269.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 68 | 6.269.500.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0018 | | | Rehabilitasi Ruang Laboratorium | | | | 113.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 113.400.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0028 | | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | 12.703.643.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | 1002 | 12.703.643.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0033 | | | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | 255.650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 229 | 255.650.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0062 | | | Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 962.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Unit | 4 | 962.120.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0069 | | | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah | | | | 3.750.003.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 29 | 3.750.003.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB | Angka | 15 | 17.590.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 17.590.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru SLB | Angka | 15 | 13.090.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0070 | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | 13.090.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah | Ruang | 77 | 13.090.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB | Angka | 2 | 4.500.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.03.0001 | | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | 4.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 4.500.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA | Angka | 36.86 | 29.616.861.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 29.616.861.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kebutuhan Ruang Kelas Baru | Angka | 27 | 9.616.861.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0072 | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | 9.616.861.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 27 | 9.616.861.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan | Angka | 5 | 20.000.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0001 | | | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | | | | 20.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | 5 | 20.000.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK | Angka | 0.6 | 39.628.750.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 39.628.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMK | Angka | 71 | 25.056.750.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0064 | | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | 25.056.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 71 | 25.056.750.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK | Angka | 3 | 14.572.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0001 | | | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) | | | | 14.572.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | 3 | 14.572.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri) | % | 78.2 | 1.250.000.000 | Bidang Ketenagaan Dikbud | |
| | | | | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi | | | | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB | Orang | 24132 | 1.250.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.04.1.01.0001 | | | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | | | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Dokumen | 4 | 1.250.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | | | 1.120.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus | % | 100 | 70.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus | Dokumen | 5 | 70.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.05.1.02.0001 | | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 6 | 70.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA | % | 16 | 200.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas | Dokumen | 15 | 200.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.05.1.01.0001 | | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 15 | 200.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK | % | 94.29 | 200.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan | Dokumen | 75 | 200.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.05.1.01.0001 | | | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 75 | 200.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I | % | 3 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN I | Dokumen | 2 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II | % | 100 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN II | Angka | 3 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Angka | 3 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN II | Angka | 3 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Angka | 3 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN II | Angka | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III | % | 100 | 55.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN III | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN III | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 0 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN III | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 0 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | % | 15 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN IV | Dokumen | | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN IV | Dokumen | | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN IV | Dokumen | | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | % | 50 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN IX | Dokumen | 66 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 3 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX | Dokumen | 154 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 3 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN IX | Dokumen | 14 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 3 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V | % | 25 | 55.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN V | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN V | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN V | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | % | 100 | 50.000.000 | | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VI | Dokumen | 1 | 20.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen | Dokumen | 1 | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VI | Dokumen | 1 | 20.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VI | Dokumen | 1 | 10.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | % | 100 | 50.000.000 | | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VII | Dokumen | 2 | 20.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 0 | 20.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VII | Dokumen | 2 | 20.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 0 | 20.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VII | Dokumen | 2 | 10.000.000 | | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 0 | 10.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | % | 100 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VIII | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VIII | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VIII | Dokumen | 2 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X | % | 35 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN X | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN X | Dokumen | 0 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN X | Dokumen | 0 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | % | 4.76 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XI | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XI | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XI | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | % | 100 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XII | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XII | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XII | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | % | 100 | 40.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 35.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XIII | Dokumen | 2 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 12 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XIII | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.05.1.01.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 12 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XIII | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.05.1.02.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya mutu pendidikan** | | | | | | | | **2.876.929.997.000** | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa sekolah menengah | Angka | 85.94 | 896.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | | | | | | 896.000.000 | | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I | Angka | 89.56 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I | Angka | 45 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I | Angka | 126 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I | Angka | 8 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 2 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II | Angka | 81.72 | 40.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II | Angka | 55 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II | Angka | 107 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II | Angka | 2 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | % | 100 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III | Angka | 83.77 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III | Angka | 45 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 0 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III | Angka | 70 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III | Angka | 7 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 0 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | Angka | 82.27 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV | % | 100 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV | % | 0 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV | % | 100 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 2 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | Angka | 86.35 | 95.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX | Angka | 66 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX | Angka | 154 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX | Angka | 14 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V | Angka | 88.84 | 75.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V | Unit | 66 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 60 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V | Unit | 116 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 108 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V | Angka | 32 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 29 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | Angka | 86.99 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI | Angka | 33 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas Yang Tersusun | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI | Angka | 26 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan Yang Tersusun | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI | Angka | 4 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus Yang Tersusun | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | Angka | 89.33 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII | Angka | 45 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII | Angka | 70 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII | Angka | 8 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 2 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | Angka | 89.53 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII | Angka | 33 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII | Angka | 20 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII | Angka | 14 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X | Angka | 82.71 | 85.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X | Angka | 61 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 20 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X | Angka | 146 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 4 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X | Angka | 8 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 2 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | Angka | 83.77 | 96.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 81.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI | Angka | 41 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI | Angka | 112 | 56.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 56.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 1 | 56.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI | Angka | 4 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | Angka | 85.8 | 65.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII | Angka | 50 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII | Angka | 110 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII | Angka | 4 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | Angka | 86.56 | 50.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII | Angka | 56 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII | Angka | 80 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.03.1.01.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII | Angka | 8 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.03.1.02.0007 | | | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Rata-rata literasi dan numerasi sekolah menengah | Angka | 67.25 | 2.876.033.997.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | 2.876.033.997.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SLB | % | 68.18 | 1.750.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional | Angka | 15 | 1.750.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 1.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 15 | 1.750.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA | % | 56 | 3.000.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional | Angka | 93 | 3.000.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 93 | 3.000.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I | % | 1.7 | 350.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I | Angka | 9 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 50 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I | Angka | 17 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 20 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I | Angka | 3 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 2 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II | % | 1 | 340.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II | Angka | 3 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 150 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II | Angka | 1 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 150 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II | Angka | 1 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 4 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III | % | 2.89 | 370.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 115.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III | Angka | 7 | 115.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 115.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 25 | 115.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III | Angka | 15 | 170.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 25 | 170.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III | Angka | 2 | 85.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 3 | 85.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV | % | 1.5 | 375.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV | Siswa | 3 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 134 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IV | Siswa | 0 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 87 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV | Siswa | 3 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 28 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX | % | 3.24 | 510.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX | Angka | 0.53 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 25 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX | Angka | 5.7 | 250.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 3 | 250.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX | Angka | 2.82 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 10 | 60.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V | % | 1.93 | 475.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V | Angka | 9 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 3 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V | Angka | 3 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 6 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V | Angka | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Unit | 3 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI | % | 93 | 250.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI | Angka | 21 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 132 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI | Angka | 21 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 80 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI | Angka | 7 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 35 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII | % | 2.75 | 180.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII | Angka | 22 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 15 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII | Angka | 8 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 5 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII | Angka | 7 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 5 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII | % | 2.3 | 190.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII | Angka | 5 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 20 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII | Angka | 8 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 20 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII | Angka | 6 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 4 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X | % | 32.14 | 250.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X | Angka | 5 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 80 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X | Angka | 5 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 146 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X | Angka | 3 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 4 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI | % | 4.84 | 505.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI | Angka | 7 | 180.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Angka | 35 | 180.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI | Angka | 6 | 250.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 250.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Angka | 40 | 250.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI | Angka | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Angka | 16 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII | % | 2.08 | 275.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII | Angka | 6 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik yang diperoleh Satuan Pendidikan SMA | Siswa | 32 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII | Angka | 5 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 22 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII | Angka | 5 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 5 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII | % | 2.53 | 420.000.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII | Angka | 12 | 110.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0049 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Angka | 5 | 110.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII | Angka | 3 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Angka | 3 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII | Angka | 3 | 110.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0048 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Angka | 3 | 110.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase capaian prestasi peserta didik SMK | % | 58.82 | 2.300.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 2.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional | Angka | 2256 | 2.300.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0041 | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | 2.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Siswa | 2420 | 2.300.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi | % | 20 | 1.300.000.000 | Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 575.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK | Angka | 5000 | 575.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.01.0057 | | | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 575.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang | 5000 | 575.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 575.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK | Angka | 9000 | 575.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0050 | | | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 575.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang | 9000 | 575.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK | Angka | 550 | 150.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.03.0056 | | | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Orang | 550 | 150.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi | % | 84.1 | 4.599.716.000 | Bidang Ketenagaan Dikbud | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang bersertifikat kompetensi | Angka | 13996 | 1.000.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS | |
| | | 1.01.02.1.01.0051 | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 13996 | 1.000.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 3.399.716.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang bersertifikat kompetensi | Angka | 955 | 3.399.716.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0043 | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 3.200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 955 | 3.200.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | 1.01.02.1.02.0073 | | | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | | | | 199.716.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | 105 | 199.716.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang bersertifikat kompetensi | Angka | 725 | 200.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.03.0050 | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 725 | 200.000.000 | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I | % | 0.95 | 80.089.269.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN I | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 30.522.003.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 6 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0065 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I | Siswa | 44120 | 30.247.003.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 30.247.003.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 27 | 30.247.003.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I | Siswa | 14158 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 98 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 45.741.241.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I | Siswa | 681200 | 45.666.241.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 45.666.241.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 134 | 45.666.241.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I | Siswa | 681200 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 125 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 3.826.025.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I | Siswa | 1930 | 3.791.025.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 3.791.025.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 25 | 3.791.025.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I | Siswa | 4704 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 27 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II | % | 40.41 | 42.701.729.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN II | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 20.161.989.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 22 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0065 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II | Siswa | 344 | 20.031.989.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 20.031.989.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 1 | 20.031.989.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II | Siswa | 8932 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 20.493.122.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 2 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0059 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II | Siswa | 456 | 20.363.122.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 20.363.122.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 1 | 20.363.122.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II | Siswa | 11634 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 1 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 2.046.618.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 2 | 10.000.000 | | |
| | | 1.01.02.1.03.0066 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 10.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II | Siswa | 52 | 2.001.618.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 2.001.618.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 1 | 2.001.618.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II | Siswa | 136 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 1 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III | % | 69.9 | 56.181.839.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN III | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 22.543.169.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 24 | 85.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0065 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 85.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III | Siswa | 35163 | 22.383.169.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 22.383.169.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 56 | 22.383.169.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III | Siswa | 10945 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 30.523.049.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 104 | 125.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0059 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 125.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III | Siswa | 54427 | 30.323.049.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 30.323.049.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 101 | 30.323.049.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III | Siswa | 9079 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 3.115.621.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 11 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0066 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 30.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III | Siswa | 1749 | 3.050.621.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 3.050.621.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 3.050.621.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III | Siswa | 375 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV | % | 71.25 | 34.474.832.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IV | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 12.552.268.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 3 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0065 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 1 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV | Siswa | 27337 | 12.442.268.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 12.442.268.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 58 | 12.442.268.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV | Siswa | 8556 | 95.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 58 | 95.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 20.591.348.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 111 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0059 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 1 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV | Siswa | 0 | 20.501.348.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 20.501.348.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 111 | 20.501.348.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV | Siswa | 0 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 111 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.331.216.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 2 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0066 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV | Siswa | 1013 | 1.271.216.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 1.271.216.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 11 | 1.271.216.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV | Siswa | 177 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 11 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX | % | 79.2 | 83.874.532.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN IX | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 27.021.815.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 68 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0065 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 1 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX | Siswa | 13.227 | 26.831.815.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 26.831.815.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 26.831.815.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX | Siswa | 13.227 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 54.046.637.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 154 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0059 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 1 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX | Siswa | 91.092 | 53.806.637.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 53.806.637.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 53.806.637.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX | Siswa | 91.092 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 200.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 2.806.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 14 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0066 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 1 | 10.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX | Siswa | 2.009 | 2.761.080.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 2.761.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 2.761.080.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX | Siswa | 2.009 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V | % | 78.9 | 48.872.998.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN V | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 19.452.738.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 62 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0065 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V | Siswa | 30217 | 19.302.738.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 19.302.738.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 19.302.738.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V | Siswa | 11531 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 100 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 27.877.648.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 109 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.01.02.1.02.0059 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V | Siswa | 30843 | 27.727.648.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 27.727.648.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 27.727.648.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V | Siswa | 10645 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 100 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.542.612.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 32 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0066 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V | Siswa | 314 | 1.457.612.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 1.457.612.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 1.457.612.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V | Siswa | 100 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 100 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI | % | 93 | 51.681.533.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VI | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 16.983.999.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 15 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0065 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI | Siswa | 27992 | 16.878.999.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 16.878.999.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan (SMA) yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 33 | 16.878.999.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI | Siswa | 11853 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 33 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 31.909.968.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 15 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0059 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 30.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI | Siswa | 29182 | 31.804.968.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 31.804.968.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 27 | 31.804.968.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI | Siswa | 22630 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 27 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 2.787.566.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 5 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0066 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 20.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI | Siswa | 886 | 2.732.566.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 2.732.566.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 2.732.566.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI | Siswa | 175 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII | % | 85.6 | 32.958.252.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 13.628.667.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII | Siswa | 30638 | 13.553.667.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 13.553.667.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 13.553.667.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII | Siswa | 10507 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 17.353.021.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII | Siswa | 41457 | 17.278.021.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 17.278.021.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 17.278.021.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII | Siswa | 10507 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.976.564.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII | Siswa | 518 | 1.941.564.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 1.941.564.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 1.941.564.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII | Siswa | 448 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII | % | 76.13 | 47.098.071.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 21.918.245.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII | Siswa | 36385 | 21.843.245.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 21.843.245.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 21.843.245.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII | Siswa | 11520 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 23.959.389.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII | Siswa | 60855 | 23.884.389.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 23.884.389.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 23.884.389.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII | Siswa | 19630 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.220.437.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII | Siswa | 1505 | 1.185.437.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 1.185.437.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 1.185.437.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII | Siswa | 446 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 35.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X | % | 85.17 | 58.916.701.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN X | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 25.246.549.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 80 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0065 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 3 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X | Siswa | 39788 | 25.096.549.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 25.096.549.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 79 | 25.096.549.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X | Siswa | 40580 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 79 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 32.093.597.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 147 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0059 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 3 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X | Siswa | 90481 | 31.943.597.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 31.943.597.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 146 | 31.943.597.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X | Siswa | 92137 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 146 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.576.555.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 11 | 7.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0066 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 1 | 7.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X | Siswa | 1622 | 1.529.055.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 1.529.055.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 8 | 1.529.055.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X | Siswa | 1721 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 8 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI | % | 48.73 | 31.928.968.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XI | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 13.903.618.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 5 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0065 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI | Siswa | 28183 | 13.778.618.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 13.778.618.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 42 | 13.778.618.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI | Siswa | 9099 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 42 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 16.968.621.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 8 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0059 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 100.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI | Siswa | 54637 | 16.718.621.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 16.718.621.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 111 | 16.718.621.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI | Siswa | 16406 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 111 | 150.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.056.729.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0066 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 2 | 25.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI | Siswa | 644 | 991.729.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 991.729.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 4 | 991.729.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI | Siswa | 165 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 4 | 40.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII | % | 83 | 56.377.959.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 19.957.047.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 65 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0065 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 3 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII | Siswa | 34989 | 19.840.047.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 19.840.047.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 65 | 19.840.047.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII | Siswa | 11663 | 67.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 67.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 65 | 67.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 34.125.815.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 146 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0059 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 50.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 3 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII | Siswa | 93058 | 34.008.815.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 34.008.815.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 146 | 34.008.815.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII | Siswa | 31020 | 67.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 67.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 146 | 67.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 2.295.097.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi | Unit | 5 | 7.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0066 | | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | 1 | 7.500.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII | Siswa | 1700 | 2.272.597.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 2.272.597.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 5 | 2.272.597.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII | Siswa | 566 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 5 | 15.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII | % | 79.5 | 43.211.837.000 | CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 17.819.076.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII | Siswa | 24800 | 17.744.076.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 17.744.076.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 57 | 17.744.076.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII | Siswa | 8050 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 57 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 23.420.312.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII | Siswa | 46700 | 23.345.312.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 23.345.312.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 89 | 23.345.312.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII | Siswa | 14040 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 89 | 75.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 1.972.449.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII | Siswa | 1410 | 1.922.449.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 1.922.449.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 9 | 1.922.449.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII | Siswa | 325 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 9 | 50.000.000 | SEKSI SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH LUAR BIASA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi | % | 20 | 1.200.000.000 | Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK | Angka | 171 | 400.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.01.0058 | | | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | Paket | 11 | 400.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK | Angka | 319 | 500.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.02.0051 | | | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | Paket | 20 | 500.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK | Angka | 38 | 300.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.1.03.0057 | | | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | Paket | 9 | 300.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | % | 10 | 85.675.947.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 85.675.947.000 | | |
| | | | | | | Jumlah siswa penerima dana BOS SLB | Angka | 21733 | 83.429.585.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0052 | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 83.429.585.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS | Siswa | 188 | 83.429.585.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi | Angka | 5 | 2.246.362.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0051 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | | | | 2.076.362.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 30 | 2.076.362.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.03.0071 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | 170.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 190 | 170.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | % | 67.8 | 731.070.509.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 731.070.509.000 | | |
| | | | | | | Jumlah siswa penerima dana BOS SMA | Siswa | 426470 | 706.100.384.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0053 | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | | | | 706.100.384.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | Siswa | 876 | 706.100.384.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi | Angka | 2 | 24.970.125.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0052 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | | | | 24.570.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 876 | 24.570.125.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0078 | | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 5 | 400.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum | % | 53.49 | 1.372.279.305.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 1.372.279.305.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK | Siswa | 1276225 | 1.318.196.111.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0046 | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 1.318.196.111.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | Unit | 1547 | 1.318.196.111.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi | Angka | 1547 | 54.083.194.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0045 | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 53.333.194.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Unit | 1547 | 53.333.194.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0072 | | | Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | Unit | 1593 | 750.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun** | | | | | | | | **36.686.830.000** | | |
| | | | | | | Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 th | Angka | 70.97 | 36.686.830.000 | | |
| | | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | 36.686.830.000 | | |
| | | | | | | Persentase angka putus sekolah SLB | % | 3.2 | 3.181.880.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | | | | | 3.181.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB | Kegiatan | 6 | 776.880.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0059 | | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 776.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | 10 | 776.880.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Siswa | 0 | 2.000.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0044 | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | | | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Siswa | 2000 | 2.000.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | | | | | Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin | Angka | 4481 | 405.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | |
| | | 1.01.02.1.03.0038 | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | 405.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 2700 | 405.000.000 | Bidang Pembinaan Diksus | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase angka putus sekolah SMA | % | 2.28 | 13.667.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | | | | | 13.667.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA | Kegiatan | 1 | 200.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0060 | | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | 1 | 200.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin | Siswa | 38995 | 13.467.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | |
| | | 1.01.02.1.01.0039 | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | 4.947.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 32985 | 4.947.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.01.0045 | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | | | | 8.520.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Siswa | 6010 | 8.520.000.000 | Bidang Pembinaan SMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase angka putus sekolah SMK | % | 0.024 | 19.837.950.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | | | | | 19.837.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK | Kegiatan | 4 | 200.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0053 | | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | 2 | 200.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin | Angka | 57257 | 19.637.950.000 | Bidang Pembinaan SMK | |
| | | 1.01.02.1.02.0031 | | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | 7.537.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 50253 | 7.537.950.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0037 | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | | | | 7.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Siswa | 7000 | 7.000.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.01.02.1.02.0060 | | | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik | | | | 5.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi | Orang | 225 | 5.100.000.000 | Bidang Pembinaan SMK | OPD Provinsi |
| **Meningkatkan Partisipasi Budaya Masyarakat** | | | | | | | | | **36.306.000.000** | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** | |
| | | | | | | Angka Melek Budaya | % | 53.82 | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | **Meningkatnya kualitas SDM dan lembaga kebudayaan** | | | | | | | | **23.196.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase SDM dan lembaga kebudayaan yang dilayani | % | 31.7 | 23.196.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan | % | 52.38 | 500.000.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM Kebudayaan berkompeten | % | 6.46 | 500.000.000 | SEKSI KESENIAN | |
| | | 2.22.02.1.01.0002 | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | | | 500.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah peserta pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Orang | 2134 | 500.000.000 | SEKSI KESENIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | | 22.696.000.000 | | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi seni tradisi | % | 11.1 | 22.696.000.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 22.696.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Lembaga Seni aktif berkarya | % | 26.74 | 22.696.000.000 | SEKSI KESENIAN | |
| | | 2.22.03.1.01.0003 | | | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | 22.696.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Kelompok | 814 | 22.696.000.000 | SEKSI KESENIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | **Meningkatnya pelestarian budaya** | | | | | | | | **9.130.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase karya budaya berperingkat nasional | % | 16.89 | 9.130.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | | 4.380.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase cakupan pelestarian seni | % | 100 | 2.750.000.000 | | |
| | | | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | | | | | 2.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok seni yang difasilitasi | Kelompok | 275 | 2.750.000.000 | | |
| | | 2.22.02.1.02.0001 | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | 2.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Jenis | 22 | 2.750.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional | % | 20.78 | 1.630.000.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | | | | | 1.630.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase partisipasi Pemanfaatan OPK Peringkat Nasional | % | 69.05 | 1.630.000.000 | SEKSI KESENIAN | |
| | | 2.22.02.1.02.0001 | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | 1.630.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yangDilakukan Pelindungan, Pengembangan danPemanfaatan | Buah | 29 | 1.630.000.000 | SEKSI KESENIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase cagar budaya berperingkat nasional | % | 13.15 | 1.000.000.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Cagar Budaya Berperingkat Provinsi | % | 8.77 | 300.000.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | |
| | | 2.22.05.1.01.000 | | | Penetapan Cagar Budaya | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan | Buah | 249 | 300.000.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase partisipasi pemanfaatan cagar budaya | % | 93.23 | 700.000.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | |
| | | 2.22.05.1.02.000 | | | Pemanfaatan Cagar Budaya | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan | Buah | 27 | 700.000.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | OPD Provinsi ; PROVINSI LAIN ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | | | | | | 3.750.000.000 | | |
| | | | | | | Nilai survey kepuasan pengunjung museum | % | 89.9 | 3.750.000.000 | Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Museum Provinsi | | | | | 3.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengunjung museum | Orang | 57500 | 3.750.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | 2.22.06.1.01.0001 | | | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | | | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan | Buah | 2000 | 1.200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.22.06.1.01.0003 | | | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | | | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum | Kegiatan | 7 | 2.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.22.06.1.01.0004 | | | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia | Unit | 4 | 550.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya tata kelola Cagar Budaya & Objek Pemajuan Kebudayaan** | | | | | | | | **3.980.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase cagar budaya dan objek pemajuan budaya yang dilayankan | % | 23.44 | 3.980.000.000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| | | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | | 2.700.000.000 | | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan | % | 26.16 | 2.700.000.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 2.700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase OPK yang Berdaya | % | 25.35 | 2.700.000.000 | SEKSI KESENIAN | |
| | | 2.22.02.1.01.0001 | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | 2.700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Buah | 159 | 2.700.000.000 | SEKSI KESENIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 2.22.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | | 955.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses literasi sejarah | % | 53.1 | 955.000.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi | | | | | 955.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Karya Literasi sejarah (tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, toponimi, sejarah yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia) | % | 53.1 | 955.000.000 | SEKSI SEJARAH DAN TRADISI | |
| | | 2.22.04.1.01.0003 | | | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | | | | 605.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data dan informasi Sejarah yang dapat di akses masyarakat | Dokumen | 540 | 605.000.000 | SEKSI SEJARAH DAN TRADISI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 2.22.04.1.01.0004 | | | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penulisan Sejarah Lokal, Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal | Dokumen | 173 | 350.000.000 | SEKSI SEJARAH DAN TRADISI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya | % | 26.73 | 325.000.000 | Bidang Pembinaan Kebudayaan | |
| | | | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi | | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase cagar budaya layak uji peringkat | % | 8.55 | 325.000.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.22.05.1.02.0001 | | | Pelindungan Cagar Budaya | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi | Buah | 281 | 160.000.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 2.22.05.1.02.0002 | | | Pengembangan Cagar Budaya | | | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | Buah | 13 | 165.000.000 | SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **8.813.491.843.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Kesehatan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **382.717.069.000** | **Dinas Kesehatan** | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.92 | | Dinas Kesehatan | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN.** | | | | | | | | **372.491.402.000** | | |
| | | | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar | % | 51.69 | 372.491.402.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 371.241.008.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan | % | 68.5 | 349.792.253.000 | Bidang Pelayanan Kesehatan | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase faskes lainnya yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan | % | 100 | 700.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL | |
| | | 1.02.02.1.01.0004 | | | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di fasilitasi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar | Unit | 1 | 700.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 348.592.253.000 | | |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Lainnya sesuai Standar | % | 99.49 | 347.877.080.000 | SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0016 | | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | 347.877.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dokumen | 20 | 347.877.080.000 | SEKSI STANDARISASI PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan | % | 67.61 | 221.410.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL | |
| | | 1.02.02.1.02.0010 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | | 21.410.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Dokumen | 10 | 21.410.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.02.02.1.02.0020 | | | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas | Dokumen | 25 | 200.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN KESEHATAN TRADISIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Presentase Faskes rujukan Sesuai Ketentuan | % | 68.5 | 493.763.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0023 | | | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | 493.763.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Unit | 27 | 493.763.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Prosentase RS kelas B dan faslitas Pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar | % | 100 | 500.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Unit | 5 | 200.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | Unit | 250 | 300.000.000 | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin | % | 85 | 8.989.130.000 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 8.989.130.000 | | |
| | | | | | | Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Vaksin | % | 85 | 8.989.130.000 | SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0025 | | | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen distribusi alkes, obat, BHP, BMHP, Vaksin, makanan ke fasilitas kesehatan | Dokumen | 2 | 50.000.000 | SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 8.939.130.000 | | |
| | | | | | | Pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan | Paket | 8 | 8.939.130.000 | SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa | % | 100 | 703.316.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 703.316.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas | % | 100 | 703.316.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar | Paket | 2 | 25.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 678.316.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 4 | 678.316.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten | % | 100 | 1.533.140.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 885.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas | % | 100 | 885.400.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.02.1.01.0004 | | | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 273.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang difasilitasi sarana, prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar | Unit | 2 | 273.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 62.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar | Paket | 2 | 62.400.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 4 | 550.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 647.740.000 | | |
| | | | | | | Angka Kepuasan Pasien di Balkesmas | Angka | 87 | 647.740.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 647.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM | Angka | 4 | 647.740.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang | % | 100 | 1.435.890.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 884.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas | % | 100 | 884.800.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0004 | | | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 144.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang difasilitasi sarana, prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar | Unit | 1 | 144.800.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar | Paket | 2 | 40.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 6 | 700.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 551.090.000 | | |
| | | | | | | Angka Kepuasan Pasien | Angka | 88 | 551.090.000 | | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 551.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM | Angka | 3 | 551.090.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati | % | 100 | 1.788.000.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 851.410.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas | % | 100 | 851.410.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 147.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar | Paket | 4 | 147.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 704.410.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 4 | 704.410.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 936.590.000 | | |
| | | | | | | Angka Kepuasan Pasien di balkesmas | Angka | 84.5 | 936.590.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 936.590.000 | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM | Angka | 3 | 936.590.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang | % | 100 | 739.690.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 565.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas | % | 100 | 565.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar | Paket | 2 | 65.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 4 | 500.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 174.690.000 | | |
| | | | | | | Angka Kepuasan Pasien | Angka | 88 | 174.690.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 174.690.000 | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM | Angka | 3 | 174.690.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM | % | 85 | 2.207.000.000 | Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di BKIM | % | 85 | 2.000.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0017 | | | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar | Paket | 2 | 100.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 1.900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 6 | 1.900.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 207.000.000 | | |
| | | | | | | Angka kepuasan pelanggan di BKIM | % | 86 | 207.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 207.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mutu Layanan kesehatan di BKIM yang sesuai INM | Angka | 3 | 207.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK | % | 100 | 3.652.589.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 3.124.150.000 | | |
| | | | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah provinsi | % | 100 | 3.124.150.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.01.0013 | | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | 624.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan faskes regional/regional maintenance center yang di sediakan dan dipelihara | Unit | 6 | 624.150.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.02.1.01.0027 | | | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | 2.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 15 | 2.500.000.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 528.439.000 | | |
| | | | | | | angka kepuasan pelanggan | Angka | 91 | 528.439.000 | | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 528.439.000 | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM | Angka | 5 | 528.439.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan informasi kesehatan | % | 85 | 400.000.000 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | |
| | | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Ketersediaan Informasi Kesehatan Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan | % | 100 | 400.000.000 | SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | |
| | | 1.02.02.1.03.0002 | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan | Dokumen | 8 | 400.000.000 | SEKSI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | OPD Provinsi |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | 950.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 85 | 500.000.000 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDMK yang kompeten dan bermutu | % | 90 | 500.000.000 | SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.03.1.02.0002 | | | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDMK | Dokumen | 6 | 500.000.000 | SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | |
| | | | | | | Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi | % | 98 | 450.000.000 | Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelatihan yang sesuai standart | % | 98 | 450.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat | Orang | 690 | 450.000.000 | SEKSI PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | 1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | | 300.394.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku | % | 80 | 300.394.000 | Bidang Sumber Daya Kesehatan | |
| | | | | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | | | | | 300.394.000 | | |
| | | | | | | Presentase penerbitan pengakuan PBF Cabang & Cabang PAK | % | 85 | 300.394.000 | SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN | |
| | | 1.02.04.1.01.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | | | | 300.394.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan | Angka | 95 | 300.394.000 | SEKSI KEFARMASIAN, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **MENINGKATNYA KESEHATAN KELOMPOK USIA PADA DAUR HIDUP** | | | | | | | | **3.634.742.000** | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyelengggarakan pelayanan kesehatan lansia | % | 74.28 | 50.242.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 50.242.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia | % | 74.28 | 50.242.000 | Bidang Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 50.242.000 | | |
| | | | | | | Prosentase Kab Kota Denganpelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70% | % | 74.27 | 50.242.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | |
| | | 1.02.02.1.02.0005 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | | | | 50.242.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Dokumen | 2 | 50.242.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penurunan kasus kematian ibu | % | 2 | 3.584.500.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 1.252.530.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita | % | 40 | 1.252.530.000 | Bidang Kesehatan Masyarakat | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 1.252.530.000 | | |
| | | | | | | Prosentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang baik | % | 57.14 | 200.000.000 | SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA | |
| | | 1.02.02.1.02.0007 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga | Dokumen | 4 | 200.000.000 | SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Prosentase kab kota dengan kesling yang baik | % | 62.86 | 500.000.000 | SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA | |
| | | 1.02.02.1.02.0008 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen has?l pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | Dokumen | 4 | 500.000.000 | SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70% | % | 60 | 75.645.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | 75.645.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dokumen | 2 | 75.645.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70% | % | 71.42 | 476.885.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | |
| | | 1.02.02.1.02.0003 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | | | | 476.885.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Dokumen | 4 | 476.885.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | 2.331.970.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi | % | 85.71 | 668.000.000 | Bidang Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kab/kota yang melaksanakan penggerakan Germas | % | 85.71 | 400.000.000 | SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 400.000.000 | SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 268.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan PHBS di Jawa Tengah | % | 25.71 | 268.000.000 | SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |
| | | 1.02.05.1.02.0001 | | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | 268.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat | Dokumen | 12 | 268.000.000 | SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | % | 42.85 | 332.744.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 332.744.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja | Kabupaten/Kota | 3 | 332.744.000 | SEKSI PELAYANAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 332.744.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor | Dokumen | 3 | 332.744.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | % | 42.86 | 324.794.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 324.794.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja | % | 42.86 | 324.794.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 324.794.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor | Dokumen | 4 | 324.794.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | % | 57.14 | 336.344.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 336.344.000 | | |
| | | | | | | Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja | % | 6 | 336.344.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 336.344.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor | Dokumen | 4 | 336.344.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | % | 42.86 | 324.344.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 324.344.000 | | |
| | | | | | | Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja | % | 42.86 | 324.344.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 324.344.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor | Dokumen | 4 | 324.344.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat | % | 57.14 | 345.744.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 345.744.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja | % | 42.86 | 345.744.000 | SEKSI PELAYANAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 345.744.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor | Dokumen | 4 | 345.744.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PM DAN PTM SERTA KESWA** | | | | | | | | **4.378.375.000** | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | % | 100 | 1.210.000.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 1.210.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi | % | 100 | 1.210.000.000 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 1.210.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap | % | 99 | 666.450.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | |
| | | 1.02.02.1.02.0017 | | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 666.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan | Dokumen | 4 | 666.450.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kejadian bencana yang difasilitasi penanganan krisis kesehatan | % | 100 | 543.550.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | |
| | | 1.02.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | 265.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Provinsi sesuai standar | Orang | 30000 | 265.000.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.02.02.1.02.0002 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | 278.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang sesuai standar | Orang | 1882 | 278.550.000 | SEKSI SURVEILENS DAN IMUNISASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa | % | 82 | 3.168.375.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 3.168.375.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular | % | 74.3 | 695.000.000 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 695.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB | % | 40 | 695.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 695.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 9 | 695.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa | % | 74.3 | 600.000.000 | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan Keswa | % | 74.3 | 600.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA | |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 5 | 400.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.02.02.1.02.0013 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Dokumen | 2 | 200.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa | % | 85.71 | 901.185.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 243.495.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM | % | 100 | 243.495.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | 50.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Orang | 500 | 50.080.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 193.415.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 4 | 193.415.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 657.690.000 | | |
| | | | | | | Angka Kepuasan Pasien | Angka | 86.75 | 657.690.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.04.0003 | | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | 657.690.000 | | |
| | | | | | | Jumlah standar pelayanan sesuai INM | Angka | 3 | 657.690.000 | SEKSI PENUNJANG PELAYANAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten | % | 42.86 | 227.275.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 227.275.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM | % | 100 | 227.275.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | 43.080.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas) | Orang | 500 | 43.080.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 184.195.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 4 | 184.195.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang | % | 71.42 | 242.385.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 242.385.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM | % | 100 | 242.385.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | 50.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Orang | 500 | 50.080.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 192.305.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 2 | 192.305.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati | % | 42.86 | 234.635.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 234.635.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM | % | 100 | 234.635.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | 44.830.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas) | Orang | 500 | 44.830.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 189.805.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 4 | 189.805.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang | % | 71.42 | 267.895.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 267.895.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penangulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM | % | 100 | 267.895.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | 64.080.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas) | Orang | 500 | 64.080.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 1.02.02.1.02.0011 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 203.815.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular | Dokumen | 4 | 203.815.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | **MENURUNNYA PERMASALAHAN GIZI** | | | | | | | | **2.212.550.000** | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting | % | 85 | 2.212.550.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 2.212.550.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting | % | 57.14 | 1.888.000.000 | Bidang Kesehatan Masyarakat | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 1.888.000.000 | | |
| | | | | | | Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 30% | % | 85.71 | 1.888.000.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | |
| | | 1.02.02.1.02.0006 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1.888.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 2 | 1.888.000.000 | SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | % | 42.85 | 64.630.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 64.630.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif | Kabupaten/ Kota | 3 | 64.630.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | 64.630.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dokumen | 4 | 64.630.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | % | 42.86 | 62.530.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 62.530.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yang difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) | Kabupaten/ Kota | 3 | 62.530.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | 62.530.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS) | Dokumen | 4 | 62.530.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | % | 57.14 | 64.630.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 64.630.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif | Kabupaten/ Kota | 3 | 64.630.000 | SEKSI PELAYANAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | 64.630.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS) | Dokumen | 4 | 64.630.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | % | 42.86 | 62.530.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 62.530.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS) | Kabupaten/Kota | 3 | 62.530.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | 62.530.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS) | Dokumen | 4 | 62.530.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja | % | 57.14 | 70.230.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 70.230.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif | Kabupaten/Kota | 3 | 70.230.000 | SEKSI PELAYANAN | |
| | | 1.02.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | | | 70.230.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dokumen | 4 | 70.230.000 | SEKSI PELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **146.239.428.000** | **Dinas Kesehatan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 90 | | Dinas Kesehatan | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **145.449.986.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 91 | 145.449.986.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 145.449.986.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 6.822.642.000 | Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 3.330.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 3.330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 3.330.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 3.330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 318.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 318.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 13.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 13.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang disediakan | Unit | 4 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 4 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.678.842.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 2.678.842.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.272.642.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 1.272.642.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.404.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.404.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 375.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 375.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 10 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | JUmlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.376.923.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 750.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 750.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 202.893.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 202.893.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 16.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 16.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 113.093.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 113.093.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 13.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 13.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.239.044.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 1.239.044.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 310.544.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 310.544.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 927.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 927.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 159.986.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 159.986.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 41.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 11 | 41.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 5 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 73.086.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 73.086.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 6 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 6.359.200.000 | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.560.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 2.560.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.560.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 2.560.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 349.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 349.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 85.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 85.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 13.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 13.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 4 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 6 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.550.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 2.550.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 112.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 112.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.062.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 1.062.870.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.374.830.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.374.830.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 699.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 699.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pada perangkat daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun | Unit | 5 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 224.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 55 | 224.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 3.456.610.000 | Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 398.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 398.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 13.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 13.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.292.810.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 2.292.810.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 784.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 784.110.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.507.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.507.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 765.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 48 | 765.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 7 | 75.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 7 | 70.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 120.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 120.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 400.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 7 | 100.000.000 | SEKSI PENUNJANG PELATIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.592.244.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 223.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 223.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 13.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 13.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 978.444.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 978.444.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 309.444.000 | | |
| | | | | | | Mengukur hasil dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah dalam satu tahun | Laporan | 4 | 309.444.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 668.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 668.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 340.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 340.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 11 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 148 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 16 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 8 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 114.976.924.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 101.599.797.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 101.599.797.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 100.801.797.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 540 | 100.801.797.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 700.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 4 | 48.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 417.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 417.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 250.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0004 | | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 167.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD | Laporan | 6 | 167.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 25 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.346.293.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.346.293.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 24.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 24.850.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 91.443.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 91.443.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 750.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 2.575.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 4 | 2.575.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 18 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.525.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 2.525.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 6.578.934.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 6.578.934.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.850.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 1.850.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 91.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 91.700.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 4.622.234.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 4.622.234.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.359.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 2.359.700.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 517.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 517.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 250.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 12 | 250.700.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.342.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 1.342.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 8 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.650.492.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 960.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 960.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 960.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 960.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 280.350.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 280.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 26.550.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 26.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 13.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 13.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.107.542.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 1.107.542.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 332.192.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 332.192.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 774.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 774.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 252.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 252.600.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 10 | 70.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 62.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 93 | 62.600.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 100.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 3.308.426.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 206.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 206.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> DESA BEJALEN |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 13.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 13.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 78.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 3 | 78.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 38.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 38.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.315.076.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 1.315.076.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 444.476.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 444.476.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 869.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 869.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 208.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 208.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 64.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 11 | 64.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 36.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 170 | 36.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; SEMARANG --> AMBARAWA --> KELURAHAN KRANGGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.906.525.000 | Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 900.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN | Dokumen | 4 | 900.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 261.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 261.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 93.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 93.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 13.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 13.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.534.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 1.534.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 420.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 420.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.112.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.112.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 170.425.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 170.425.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 35.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 35.625.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 2 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 37.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 37.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **789.442.000** | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.95 | 789.442.000 | Dinas Kesehatan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 789.442.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 75 | 789.442.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 789.442.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 95 | 789.442.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 616.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 10 | 616.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 173.442.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 4 | 173.442.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **528.956.497.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
RSUD Dr. Moewardi

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **1.063.695.115.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 90 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **1.063.695.115.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 91 | 1.063.695.115.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.063.695.115.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi | % | 82 | 930.000.000.000 | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 930.000.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 100 | 930.000.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 930.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 930.000.000.000 | SUB BAGIAN ANGGARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 133.695.115.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 133.695.115.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 24 | 133.695.115.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 133.695.115.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 1450 | 133.695.115.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **1.063.695.115.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **720.008.305.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 90 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **720.008.305.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 91 | 720.008.305.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 720.008.305.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | % | 83 | 636.800.000.000 | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 636.800.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate (CRR) Parsial | % | 97 | 636.800.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 636.800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 636.800.000.000 | SUBBAGIAN AKUNTANSI | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 83.208.305.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 83.208.305.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 83.208.305.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 83.208.305.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 823 | 83.208.305.000 | SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI | OPD Provinsi |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **720.008.305.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
RSUD dr. ADHYATMA, MPH

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **308.639.199.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 90 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **308.639.199.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 91 | 308.639.199.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 308.639.199.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo | % | 49.91 | 201.500.000.000 | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 201.500.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 71.6 | 201.500.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 201.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 6 | 201.500.000.000 | SUB BAGIAN ANGGARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 107.139.199.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 107.139.199.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 107.139.199.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 107.139.199.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 873 | 107.139.199.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **308.639.199.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
RSUD dr. REHATTA

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **1.300.000.000** | | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.92 | | | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSUD KELET DONOREJO** | | | | | | | | **1.300.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo | % | 89 | 1.300.000.000 | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 959.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo | % | 100 | 959.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 959.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan layanan dan alkes untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | % | 100 | 959.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.02.0022 | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | 959.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit | Dokumen | 12 | 959.000.000 | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | 101.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo | % | 35 | 101.000.000 | | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 101.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah diklat yang dilaksanakan | Kegiatan | 5 | 101.000.000 | | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 101.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat | Orang | 100 | 101.000.000 | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo | % | 100 | 240.000.000 | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Kegiatan | 12 | 240.000.000 | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 240.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peranserta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 240.000.000 | SEKSI PENUNJANG NON MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **105.744.642.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 90 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **105.744.642.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 91 | 105.744.642.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 105.744.642.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo | % | 40 | 59.950.000.000 | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 59.950.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 89 | 59.950.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 59.950.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 4 | 59.950.000.000 | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 45.794.642.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 45.794.642.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 14 | 45.794.642.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 45.794.642.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 302 | 45.794.642.000 | SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **107.044.642.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
RSJD Dr. Amino Gondohutomo

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **24.371.656.000** | | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.92 | | | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO** | | | | | | | | **24.371.656.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo | % | 98 | 24.371.656.000 | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 24.200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo | % | 100 | 200.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 200.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.02.0022 | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit | Dokumen | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo | % | 100 | 24.000.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 24.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 24.000.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.01.0010 | | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | | | 24.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 1 | 24.000.000.000 | SEKSI PENUNJANG MEDIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | 171.656.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo | % | 100 | 171.656.000 | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 171.656.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan home care, home visit, dropping | Kegiatan | 3 | 84.456.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 84.456.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 84.456.000 | SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan RSTD | Kegiatan | 1 | 87.200.000 | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 87.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | Dokumen | 4 | 87.200.000 | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **135.157.078.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 90 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **135.157.078.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 91 | 135.157.078.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 135.157.078.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo | % | 43 | 57.000.000.000 | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 57.000.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 89 | 65.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 89 | 56.935.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 56.935.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN AKUNTANSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 56.880.000.000 | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 78.157.078.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 78.157.078.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 78.157.078.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 78.157.078.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 520 | 78.157.078.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **159.528.734.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **470.000.000** | | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.92 | | | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD SURAKARTA** | | | | | | | | **470.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta | % | 96.58 | 470.000.000 | | |
| | | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | 470.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta | % | 100 | 470.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 470.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | 100 | 470.000.000 | | |
| | | 1.02.02.1.02.0022 | | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | 470.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dokumen | 12 | 470.000.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **128.093.962.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 90 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **128.093.962.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 91 | 128.093.962.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 128.093.962.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta | % | 33 | 54.500.000.000 | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 54.500.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 95 | 54.500.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 54.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 54.500.000.000 | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 73.593.962.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 73.593.962.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 73.593.962.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 73.593.962.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 449 | 73.593.962.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **128.563.962.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | **480.000.000** | | |
| | | | | | | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 74.92 | | | |
| | **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN DI RSJD DR. SOEDJARWADI** | | | | | | | | **480.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi | % | 98 | 480.000.000 | | |
| | | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 70 | 100.000.000 | | |
| | | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium | Kegiatan | 10 | 100.000.000 | | |
| | | 1.02.03.1.02.0001 | | | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | Orang | 300 | 100.000.000 | SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 100 | 148.920.000 | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 148.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Advokasi, Kemitraan dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Kegiatan | 2 | 148.920.000 | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 148.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 2 | 148.920.000 | SUB BAGIAN TATAUSAHA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 100 | 231.080.000 | | |
| | | | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 231.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi | Kegiatan | 7 | 231.080.000 | | |
| | | 1.02.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | | | | 231.080.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Dokumen | 7 | 231.080.000 | SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **106.066.374.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 90 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **106.066.374.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 91 | 106.066.374.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 106.066.374.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | % | 45.6 | 50.500.000.000 | | |
| | | | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | 50.500.000.000 | | |
| | | | | | | Cost Recovery Rate Parsial | % | 97 | 50.500.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.10.0001 | | | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | 50.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1 | 50.500.000.000 | SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 55.566.374.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 55.566.374.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 55.566.374.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 55.566.374.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 365 | 55.566.374.000 | SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KLATEN |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **106.546.374.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Jalan Provinsi** | | | | | | | | | **129.159.390.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | |
| | | | | | | Persentase jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor dan kondisi permukaan mantap | % | 68.01 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | **Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dengan Kualitas Struktur dan Kapasitas Sesuai Standar Jalan Kolektor** | | | | | | | | **36.751.133.000** | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor | % | 46.55 | 36.751.133.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | 36.751.133.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan | % | 100 | 3.124.106.000 | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 3.124.106.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan | Dokumen | 5 | 3.124.106.000 | SEKSI RANCANG BANGUN | |
| | | 1.03.10.1.01.0041 | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | | | | 2.049.553.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen) | Dokumen | 1 | 2.049.553.000 | SEKSI RANCANG BANGUN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.10.1.01.0043 | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | 1.074.553.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | Dokumen | 3 | 1.074.553.000 | SEKSI RANCANG BANGUN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat | % | 45.07 | 6.134.770.000 | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 6.134.770.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat | Km | 0.5 | 6.134.770.000 | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0040 | | | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | 6.134.770.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Barat | Km | 0.5 | 6.134.770.000 | SEKSI PELAKSANA JALAN BARAT 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur | % | 47.91 | 11.651.615.000 | Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 11.651.615.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur | Km | 1.5 | 11.651.615.000 | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0040 | | | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | 11.651.615.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Timur | Km | 1.5 | 11.651.615.000 | SEKSI PELAKSANA JALAN TIMUR 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase panjang jalan yang dileger | % | 77.26 | 109.835.000 | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 109.835.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N | Km | 1402.67 | 109.835.000 | SEKSI RANCANG BANGUN | |
| | | 1.03.10.1.01.004 | | | Pengelolaan Leger Jalan | | | | 109.835.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan | Dokumen | 1 | 109.835.000 | SEKSI RANCANG BANGUN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan | % | 18.07 | 4.807.161.000 | Balai Pengujian dan Peralatan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 4.807.161.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia | Unit | 45 | 4.807.161.000 | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT | |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 4.807.161.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah | Unit | 9 | 135.000.000 | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara | Unit | 36 | 1.872.441.000 | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus | Unit | 3550 | 2.799.720.000 | SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan | % | 100 | 9.140.955.000 | Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 9.140.955.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah | Dokumen | 2 | 5.750.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN | |
| | | 1.03.10.1.01.0040 | | | Pelebaran Jalan Menuju Standar | | | | 5.750.000.000 | | |
| | | | | | | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan | m2 | 100 | 5.750.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN ASET KEBINAMARGAAN DAN KECIPTAKARYAAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan | Dokumen | 13 | 3.390.955.000 | SEKSI PENGAWASAN TEKNIS | |
| | | 1.03.10.1.01.0024 | | | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi | | | | 347.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen) | Dokumen | 1 | 347.760.000 | SEKSI PENGAWASAN TEKNIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 780.165.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana | m | 35 | 780.165.000 | SEKSI PENGAWASAN TEKNIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 2.263.030.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana | Km | 0.45 | 2.263.030.000 | SEKSI PENGAWASAN TEKNIS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi | % | 73.04 | 1.782.691.000 | Balai Pengujian dan Peralatan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 1.782.691.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi | Sertifikat | 1420 | 1.782.691.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | |
| | | 1.03.10.1.01.0028 | | | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan | | | | 1.782.691.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001 | Dokumen | 2 | 452.325.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah pemeliharaan alat uji | Unit | 116 | 215.000.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu | Orang | 65 | 680.628.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi | Sertifikat | 1420 | 434.738.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | **Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap** | | | | | | | | **92.408.257.000** | | |
| | | | | | | Persentase kondisi jembatan provinsi baik | % | 83.38 | 15.103.848.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | 15.103.848.000 | | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap | % | 87.57 | 1.473.535.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 1.473.535.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap | m | 2562.67 | 1.473.535.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.473.535.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Cilacap | m | 2562.67 | 1.473.535.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang | % | 71.44 | 1.411.740.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 1.411.740.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang | m | 2455.2 | 1.411.740.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.411.740.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Magelang | m | 2455.2 | 1.411.740.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati | % | 87.66 | 1.565.725.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 1.565.725.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati | m | 2723 | 1.565.725.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.565.725.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pati | m | 2723 | 1.565.725.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan | % | 86.19 | 1.922.633.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 1.922.633.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan | m | 3343.71 | 1.922.633.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.922.633.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pekalongan | m | 3343.71 | 1.922.633.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi | % | 67.34 | 2.074.025.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 2.074.025.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi | m | 3607 | 2.074.025.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 2.074.025.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Purwodadi | m | 3607 | 2.074.025.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang | % | 85.47 | 1.421.175.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 1.421.175.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang | m | 2471.61 | 1.421.175.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.421.175.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Semarang | m | 2471.61 | 1.421.175.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta | % | 91.47 | 2.755.351.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 2.755.351.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta | m | 4791.92 | 2.755.351.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 2.755.351.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Surakarta | m | 4791.915 | 2.755.351.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal | % | 77.37 | 1.245.076.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 1.245.076.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal | m | 2165.35 | 1.245.076.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.245.076.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Tegal | m | 2165.35 | 1.245.076.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo | % | 92.66 | 1.234.588.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 1.234.588.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo | m | 2147.11 | 1.234.588.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0026 | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | 1.234.588.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Wonosobo | m | 2147.11 | 1.234.588.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaaan mantap | % | 89.46 | 77.304.409.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | 77.304.409.000 | | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap | % | 90.1 | 6.469.435.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 6.469.435.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap | Km | 205.75 | 6.469.435.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 6.469.435.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap | Km | 205.75 | 6.469.435.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang | % | 90.2 | 8.604.006.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 8.604.006.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang | Km | 259.58 | 8.604.006.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 8.604.006.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang | Km | 259.58 | 8.604.006.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati | % | 86.43 | 7.633.415.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 7.633.415.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati | Km | 247.82 | 7.633.415.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 7.633.415.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pati | Km | 247.82 | 7.633.415.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan | % | 89.44 | 9.091.504.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 9.091.504.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan | Km | 255.46 | 9.091.504.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 9.091.504.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Pekalongan | Km | 255.46 | 9.091.504.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi | % | 87.39 | 8.478.269.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 8.478.269.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi | Km | 384.14 | 8.478.269.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan | | | | 1.745.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi | Km | 1 | 1.745.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 6.733.269.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi | Km | 383.14 | 6.733.269.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang | % | 91.47 | 6.002.205.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 6.002.205.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang | Km | 224.91 | 6.002.205.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 6.002.205.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Semarang | Km | 224.91 | 6.002.205.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta | % | 89.45 | 14.428.510.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 14.428.510.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta | Km | 415.98 | 14.428.510.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 14.428.510.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta | Km | 415.981 | 14.428.510.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal | % | 91.57 | 5.983.333.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 5.983.333.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal | Km | 197.56 | 5.983.333.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 5.983.333.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal | Km | 197.56 | 5.983.333.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo | % | 90.92 | 10.613.732.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo | |
| | | | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | | | | | 10.613.732.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo | Km | 246.92 | 10.613.732.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | |
| | | 1.03.10.1.01.0030 | | | Rehabilitasi Jalan | | | | 1.745.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo | Km | 1 | 1.745.000.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | 1.03.10.1.01.0033 | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | 8.868.732.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo | Km | 245.92 | 8.868.732.000 | SEKSI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH 1 | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **107.265.165.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 61 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **106.425.165.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 92.25 | 106.425.165.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 106.425.165.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.571.277.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 335.700.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 335.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 28.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 28.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 64.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 64.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 28.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 28.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 720 | 3.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 190.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 190.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 835.577.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 835.577.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 126.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 126.060.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 702.517.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 702.517.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 48 | 400.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 160.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 39 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 89.838.538.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 77.368.668.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 45 | 77.368.668.000 | SUBBAG KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 74.915.428.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 440 | 74.915.428.000 | SUBBAG KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.013.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.013.240.000 | SUBBAG KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 440.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 19 | 440.000.000 | SUBBAG KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 13 | 350.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 13 | 350.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 193.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 193.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 193.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 440 | 193.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.788.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.788.500.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 116.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 116.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 361.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 361.500.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 84.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 84.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 2172 | 21.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2.037.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 2.037.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 77.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 77.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 72.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 72.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 1.371.613.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 298 | 1.371.613.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 378.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 9 | 378.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 240 | 240.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 753.613.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 49 | 753.613.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 5.318.157.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 50 | 5.318.157.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 24.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 1.800.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 3.494.157.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 26 | 3.494.157.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.448.600.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 155 | 2.448.600.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1.233.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 30 | 1.233.600.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 600.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 615.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 124 | 615.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.234.042.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta. | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 249.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 249.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 43.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 43.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 672 | 3.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Dokumen | 12 | 170.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 589.542.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 589.542.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 121.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 121.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 464.042.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 464.042.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 395.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 74 | 395.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 195.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 18 | 195.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 6 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 50 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.943.773.000 | Balai Pengujian dan Peralatan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 327.188.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 327.188.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 25.025.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.025.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 48.255.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 48.255.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 10.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 672 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 166.208.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 166.208.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.310.325.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 1.310.325.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 248.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 248.940.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.059.385.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 1.059.385.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 306.260.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 65 | 306.260.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 117.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 9 | 117.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 88.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 55 | 88.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.248.811.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 355.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 355.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 14.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 14.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 61.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 61.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 336 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.331.165.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 1.331.165.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 242.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 242.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.083.165.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 1.083.165.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 562.146.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 48 | 562.146.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 137.830.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 8 | 137.830.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 350.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 74.316.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 36 | 74.316.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.091.326.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 247.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 247.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 16.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 16.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 37.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 37.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 13.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 13.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 672 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 143.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 143.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 490.716.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 490.716.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 77.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 77.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 411.216.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 411.216.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 353.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 35 | 353.110.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 165.660.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 8 | 165.660.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 37.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 26 | 37.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 877.790.000 | Balai Jasa Konstruksi | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 153.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 153.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 9.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 9.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 38.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 38.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 9.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 9.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 672 | 3.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 89.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 89.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 542.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 542.490.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 94.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 94.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 446.890.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 446.890.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 182.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 41 | 182.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 55.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 41 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.021.200.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 373.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 373.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 57.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 57.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 16.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 16.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 48.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 672 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 231.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 231.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.187.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 1.187.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 188.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 188.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 992.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 992.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 461.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 132 | 461.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 9 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 5 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 81.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 118 | 81.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.523.028.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 235.330.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 235.330.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 9.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 9.680.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 66.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 66.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 18.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 18.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 30.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 30.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 384 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 106.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 106.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 723.663.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 723.663.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 8.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 8.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 173.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 173.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 541.863.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 541.863.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 564.035.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 58 | 564.035.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 165.885.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 10 | 165.885.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 350.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 48.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 55 | 48.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.217.270.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 314.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 314.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 52.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 52.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 41.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 41.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 336 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 188.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 188.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 524.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 524.270.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 102.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 102.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 414.970.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 414.970.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 378.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 33 | 378.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 7 | 140.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 38.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 24 | 38.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.491.250.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 349.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 349.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 13.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 702 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 220.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 686.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 686.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 3.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 573.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 573.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 455.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 70 | 455.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 118.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 12 | 118.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 250.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 87.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 55 | 87.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.366.860.000 | Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 274.181.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 274.181.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.699.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.699.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 36.159.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 36.159.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 11.664.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 11.664.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 36.159.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 36.159.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 672 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 610.288.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 610.288.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.832.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.832.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 112.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 112.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 492.456.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 492.456.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 482.391.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 98 | 482.391.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 139.968.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 139.968.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 42.423.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 91 | 42.423.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **840.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.11 | 840.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 840.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 840.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 840.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 840.000.000 | SUBBAG PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 520.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 21 | 520.000.000 | SUBBAG PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 320.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 45 | 320.000.000 | SUBBAG PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (IRB)** | | | | | | | | | **43.502.244.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Keciptakaryaan | % | 39.03 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | **Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Milik Daerah** | | | | | | | | **43.502.244.000** | | |
| | | | | | | Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar | % | 61.65 | 43.502.244.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | 38.166.603.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah | % | 5.83 | 37.917.050.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | 37.917.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N | Lokasi | 60 | 37.917.050.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | |
| | | 1.03.08.1.01.0012 | | | Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta mengikuti pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung kepada penyelenggara bangunan gedung, dan masyarakat | Orang | 160 | 100.000.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung negara | Orang | 80 | 50.000.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | |
| | | 1.03.08.1.01.0018 | | | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi | Dokumen | 60 | 180.000.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.03.08.1.01.0019 | | | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | 37.587.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Dokumen | 4 | 37.587.050.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis | % | 12.23 | 249.553.000 | | |
| | | | | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | | 249.553.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n | Lokasi | 126 | 249.553.000 | | |
| | | 1.03.08.1.01.0019 | | | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | | | | 249.553.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n | Dokumen | 1 | 249.553.000 | | OPD Provinsi |
| | | 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | | 5.335.641.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi | % | 66.67 | 200.000.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | |
| | | 1.03.11.1.01.0012 | | | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Orang | 320 | 200.000.000 | SEKSI TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi | % | 48.42 | 5.135.641.000 | Balai Jasa Konstruksi | |
| | | | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | | | | | 3.842.143.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi | Orang | 11779 | 3.842.143.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | 1.03.11.1.01.0011 | | | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | | | | 2.065.143.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang) | Orang | 2000 | 2.065.143.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.11.1.01.0014 | | | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | | | | 1.777.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi | Orang | 1200 | 1.777.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | | | | | 807.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Kegiatan | 5 | 807.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | 1.03.11.1.02.0008 | | | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | | | | 682.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data Dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | Dokumen | 2 | 247.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah pengadaan Buku Konstruksi | Buah | 125 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani | Kegiatan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Jumlah stand pameran yang dilaksanakan | Unit | 4 | 360.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | 1.03.11.1.02.0009 | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI | Orang | 80 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | | | | | 485.998.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi | Dokumen | 1 | 485.998.000 | | |
| | | 1.03.11.1.03.0006 | | | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | 485.998.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | Laporan | 4 | 485.998.000 | | |
| **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (LH)** | | | | | | | | | **10.461.088.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Keciptakaryaan | % | 39.03 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | **Meningkatnya Akses Air Minum Aman** | | | | | | | | **10.461.088.000** | | |
| | | | | | | Persentase akses air minum aman | % | 42.93 | 10.461.088.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | 10.461.088.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses air minum layak | % | 93.94 | 2.095.657.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | | 2.095.657.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa) | Orang | 34502341 | 2.095.657.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| | | 1.03.03.1.01.0015 | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | 1.453.657.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (fs, rispam, ded, amdal) (dokumen) Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen) | Dokumen | 6 | 1.453.657.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.03.03.1.01.0016 | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | 642.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota) | Kabupaten/ Kota | 15 | 642.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | % | 100 | 8.365.431.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | | 8.365.431.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota | Liter | 3.5 | 8.365.431.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| | | 1.03.03.1.01.0017 | | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | 8.365.431.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik) | Liter | 3.5 | 8.365.431.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keciptakaryaan (PE)** | | | | | | | | | **7.132.070.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya** | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Keciptakaryaan | % | 39.03 | | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | **Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik Aman** | | | | | | | | **674.105.000** | | |
| | | | | | | Persentase akses air limbah domestik aman | % | 12.5 | 674.105.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | | 674.105.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses air limbah domestik layak | % | 95.18 | 674.105.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | | | | | 674.105.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk yang Sudah Mempunyai Akses Air Limbah Domestik Layak Th-N | Orang | 35500068 | 674.105.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | |
| | | 1.03.05.1.01.0014 | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | 674.105.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik (Kab/Kota) | Kabupaten/ Kota | 12 | 674.105.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya Akses Air Minum Aman** | | | | | | | | **6.457.965.000** | | |
| | | | | | | Persentase akses air minum aman | % | 42.93 | 6.457.965.000 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | |
| | | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | 6.457.965.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses air minum jaringan perpipaan | % | 57.82 | 6.457.965.000 | Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung | |
| | | | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | | 6.457.965.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa) | Orang | 21236165 | 6.457.965.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | |
| | | 1.03.03.1.01.0017 | | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | | | | 6.457.965.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa | Lokasi | 12 | 6.457.965.000 | SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM | OPD Provinsi |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **297.519.957.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **95.745.414.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah | Angka | 31.5 | | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | **94.845.414.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 85 | 94.845.414.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 94.845.414.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 644.542.000 | Balai PSDA Bengawan Solo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 70.698.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 70.698.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 23.514.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.514.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 1.584.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 1.584.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.000 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 5 | 6.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 278.249.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 26 | 278.249.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 849.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 849.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 169.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 169.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 108.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 108.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 295.595.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 37 | 295.595.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 142.752.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 24 | 142.752.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 106.493.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 106.493.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 46.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 46.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 695.522.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 68.150.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 68.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 19.128.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 19.128.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.041.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 15.041.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.061.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 3.061.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.130.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 6 | 11.130.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 19.790.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 24 | 19.790.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 253.665.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 27 | 253.665.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 912.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 3 | 912.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 166.425.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 166.425.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 86.328.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 86.328.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 373.707.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 90 | 373.707.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 146.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 21 | 146.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 127.250.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 127.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.257.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 67 | 100.257.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 445.053.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 77.266.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 77.266.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 17.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 17.575.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 13.825.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 14 | 13.825.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 2.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.353.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 3 | 6.353.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 37.313.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 37.313.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 175.138.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 15 | 175.138.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 838.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 838.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 104.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 104.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 192.649.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 32 | 192.649.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 74.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 20 | 74.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 48.349.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 9 | 48.349.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 601.087.000 | Balai PSDA Serang Lusi Juana | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 72.672.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 72.672.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 10 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.392.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 4.392.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 10 | 8.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 17.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 17.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 203.179.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 25 | 203.179.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.179.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 1.179.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 142.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 142.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 325.236.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 60 | 325.236.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 27 | 165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 106.026.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 106.026.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 54.210.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 31 | 54.210.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 557.083.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy. | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 92.561.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 92.561.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 19.672.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 19.672.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.809.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.809.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8.380.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 8.380.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 46.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 46.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 253.558.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 3 | 253.558.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 958.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 958.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 135.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 135.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 117.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 117.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 210.964.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 49 | 210.964.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 117.580.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 30 | 117.580.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 22.668.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 22.668.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 70.716.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 25 | 70.716.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 944.695.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 104.900.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 104.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 38.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 38.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 7 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 24 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 4 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 34.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 36 | 34.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 433.980.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 433.980.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 257.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 257.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 175.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 405.815.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 83 | 405.815.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 223.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 36 | 223.420.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 62.395.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 44 | 62.395.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 90.957.432.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 81.478.881.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 81.478.881.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 80.011.809.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 500 | 80.011.809.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 1.467.072.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.467.072.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 383.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 383.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 383.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 383.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 461.632.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 461.632.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 269.292.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 21 | 269.292.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 92.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 350 | 92.340.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 90 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.609.339.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 77 | 1.609.339.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 495.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 495.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 133.944.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 133.944.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 47.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 47.350.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 2 | 8.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 72.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 72.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 184.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Dokumen | 12 | 184.080.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 608.065.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 3 | 608.065.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.817.239.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 48 | 3.817.239.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 68.874.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 68.874.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 683.980.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 683.980.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.619.595.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.619.595.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 444.790.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 444.790.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.206.841.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 422 | 3.206.841.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1.064.031.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 62 | 1.064.031.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 1.650.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 492.810.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 241 | 492.810.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | **900.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah | Angka | 3.16 | 900.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 900.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 900.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 4 | 450.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 3 | 450.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | | **89.853.180.000** | **Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang** | |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang | Angka | 63.08 | | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | **Meningkatnya Keterwujudan Penataan Ruang** | | | | | | | | **4.701.793.000** | | |
| | | | | | | Persentase keterwujudan penataan ruang | % | 64.07 | 4.701.793.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | | 4.701.793.000 | | |
| | | | | | | Persentase implementasi pemanfaatan ruang | % | 76 | 888.000.000 | Bidang Penataan Ruang | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 888.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang | Dokumen | 6 | 888.000.000 | SEKSI PEMANFAATAN RUANG | |
| | | 1.03.12.1.03.0004 | | | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | 709.696.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | Laporan | 4 | 709.696.000 | SEKSI PEMANFAATAN RUANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.12.1.03.0006 | | | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | 178.304.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang | Dokumen | 2 | 178.304.000 | SEKSI PEMANFAATAN RUANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan rencana tata ruang | % | 68.21 | 1.963.564.000 | Bidang Penataan Ruang | |
| | | | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi | | | | | 1.295.711.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan tata ruang | Dokumen | 3 | 1.295.711.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | 1.03.12.1.01.0006 | | | Penetapan RTRW Provinsi | | | | 1.133.211.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan | Dokumen | 2 | 1.133.211.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.12.1.01.0009 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang | | | | 162.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi | Orang | 300 | 162.500.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | | | | | 667.853.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | Dokumen | 16 | 667.853.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | |
| | | 1.03.12.1.02.0008 | | | Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota | | | | 467.853.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota | Laporan | 15 | 467.853.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.12.1.02.0013 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 72.097.000 | Balai PSDA Bengawan Solo | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 72.097.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | Dokumen | 1 | 72.097.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 72.097.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | Dokumen | 1 | 72.097.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 96.321.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 96.321.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Dokumen | 1 | 96.321.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 96.321.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Dokumen | 1 | 96.321.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 97.638.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 97.638.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | Dokumen | 1 | 97.638.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 97.638.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Dokumen | 1 | 97.638.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 72.961.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 72.961.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | Dokumen | 1 | 72.961.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 72.961.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai Progo Bogowonto Luk Ulo | Dokumen | 1 | 72.961.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 76.171.000 | Balai PSDA Serang Lusi Juana | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 76.171.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | Dokumen | 1 | 76.171.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 76.171.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | Dokumen | 1 | 76.171.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 67.200.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy. | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 67.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | Dokumen | 1 | 67.200.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 67.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Dokumen | 1 | 67.200.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tertib ruang | % | 48 | 1.367.841.000 | Bidang Penataan Ruang | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi | | | | | 1.367.841.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang | Dokumen | 2 | 505.874.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | |
| | | 1.03.12.1.04.0006 | | | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat | | | | 231.848.000 | | |
| | | | | | | Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat | Dokumen | 1 | 231.848.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.12.1.04.0007 | | | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan | | | | 274.026.000 | | |
| | | | | | | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan | Dokumen | 1 | 274.026.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang | Dokumen | 5 | 861.967.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | |
| | | 1.03.12.1.04.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 861.967.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Dokumen | 3 | 861.967.000 | SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air** | | | | | | | | **85.151.387.000** | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air | % | 62.08 | 85.151.387.000 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | | | | | | 85.151.387.000 | | |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi | Angka | 69.11 | 5.766.639.000 | Bidang Irigasi dan Air Baku | |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 5.766.639.000 | | |
| | | | | | | Jumlah DI yang direhab | Unit | 17 | 5.066.639.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | |
| | | 1.03.02.1.02.0014 | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 5.066.639.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | Km | 1.7 | 5.066.639.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi | Dokumen | 3 | 700.000.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.0037 | | | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air | Unit | 3 | 560.040.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan | Unit | 1 | 139.960.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | Angka | 67.36 | 8.596.296.000 | Balai PSDA Bengawan Solo | |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 8.596.296.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Bengawan Solo | % | 73.01 | 8.596.296.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.0021 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 8.596.296.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara diwilayah BPSDA Bengawan Solo | Km | 14.66 | 8.596.296.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Angka | 71.54 | 6.860.354.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 6.860.354.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 70.26 | 6.860.354.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.0021 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 6.860.354.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Km | 21.7 | 6.860.354.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | Angka | 62.68 | 7.631.399.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 7.631.399.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 60.33 | 7.631.399.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.0021 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 7.631.399.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal | Km | 202.39 | 7.631.399.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | Angka | 60 | 4.478.486.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 4.478.486.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 60 | 4.478.486.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.0021 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 4.478.486.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | Km | 134.51 | 4.478.486.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | Angka | 62.85 | 4.541.435.000 | Balai PSDA Serang Lusi Juana | |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 4.541.435.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana | % | 59.54 | 4.541.435.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.0021 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 4.541.435.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | Km | 156.787 | 4.541.435.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | Angka | 72.65 | 5.580.793.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy. | |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 5.580.793.000 | | |
| | | | | | | Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serayu Citanduy | % | 72.65 | 5.580.793.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.02.0021 | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | | 5.580.793.000 | | |
| | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy. | Km | 1.7 | 5.580.793.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik | % | 64.31 | 1.634.241.000 | Bidang Irigasi dan Air Baku | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.634.241.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun | Dokumen | 2 | 134.241.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0090 | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | | | | 134.241.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan | Unit | 1 | 134.241.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset | Dokumen | 4 | 1.500.000.000 | SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET | |
| | | 1.03.02.1.01.0075 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Unit | 2 | 381.363.000 | SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset | Laporan | 2 | 1.118.637.000 | SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 1.615.000.000 | Balai PSDA Bengawan Solo | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.615.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA | Dokumen | 5 | 1.615.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 1.615.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Bengawan Solo | Dokumen | 5 | 1.615.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 1.536.532.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.536.532.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA | Dokumen | 5 | 1.536.532.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 1.536.532.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Dokumen | 5 | 1.536.532.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 2.587.324.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 2.587.324.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA | Dokumen | 5 | 2.587.324.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 2.587.324.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | Dokumen | 5 | 2.587.324.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 1.150.000.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA | Dokumen | 5 | 1.150.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 1.150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | Dokumen | 5 | 1.150.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 1.370.663.000 | Balai PSDA Serang Lusi Juana | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.370.663.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA | Dokumen | 5 | 1.370.663.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 1.370.663.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana | Dokumen | 5 | 1.370.663.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 1.144.140.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy. | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.144.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA | Dokumen | 5 | 1.144.140.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 1.144.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Serayu Citanduy | Dokumen | 5 | 1.144.140.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 67.35 | 1.335.881.000 | Balai PSDA Bengawan Solo | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.335.881.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 27.78 | 1.335.881.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | 1.335.881.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | Unit | 13 | 1.335.881.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 63.64 | 649.991.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 649.991.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 9.09 | 649.991.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | 649.991.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Unit | 10 | 649.991.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 34.78 | 1.530.000.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.530.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 1.530.000.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | 1.530.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal | Unit | 2 | 1.530.000.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 92.23 | 332.993.000 | Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 332.993.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 332.993.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | 332.993.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | Unit | 2 | 332.993.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 50 | 1.018.029.000 | Balai PSDA Serang Lusi Juana | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.018.029.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 15 | 1.018.029.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | 1.018.029.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | Unit | 3 | 1.018.029.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 76.5 | 540.110.000 | Balai PSDA Serayu Citanduy. | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 540.110.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 10 | 540.110.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0105 | | | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | | 540.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | Unit | 3 | 540.110.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi | % | 52.41 | 14.242.510.000 | Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 14.242.510.000 | | |
| | | | | | | akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun | Km | 1.8 | 4.000.000.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | |
| | | 1.03.02.1.01.0079 | | | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | 1.450.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi | Km | 1.1 | 1.450.000.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.02.1.01.0118 | | | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | 2.550.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | Km | 0.7 | 2.550.000.000 | SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA | Kegiatan | 1 | 742.510.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0090 | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi | | | | 742.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan | Unit | 4 | 742.510.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir | Km | 2 | 9.500.000.000 | SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.03.02.1.01.0107 | | | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | | 9.500.000.000 | | |
| | | | | | | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | Km | 2 | 9.500.000.000 | SEKSI PENANGGULANGAN BANJIR DAN PERALATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto | % | 50.08 | 2.719.855.000 | Balai PSDA Bodri Kuto | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 2.719.855.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 2.719.855.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0107 | | | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | | 2.719.855.000 | | |
| | | | | | | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Km | 1.2 | 2.719.855.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal | % | 53.26 | 4.327.142.000 | Balai PSDA Pemali Comal | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 4.327.142.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 4.327.142.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0107 | | | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | | 4.327.142.000 | | |
| | | | | | | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | Km | 5 | 4.327.142.000 | SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air | % | 62.5 | 3.961.574.000 | Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis | |
| | | | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 3.396.574.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA | Dokumen | 3 | 1.100.000.000 | SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI | |
| | | 1.03.02.1.01.0103 | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi | Dokumen | 3 | 900.000.000 | SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.02.1.01.0104 | | | Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan | Unit | 2 | 200.000.000 | SEKSI HIDROLOGI DAN SISTEM INFORMASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi | Dokumen | 19 | 1.488.574.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN | |
| | | 1.03.02.1.01.0087 | | | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | | | | 638.574.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun | Dokumen | 11 | 638.574.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.03.02.1.01.0117 | | | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | | | | 850.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun | Dokumen | 3 | 850.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA | Dokumen | 9 | 808.000.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | |
| | | 1.03.02.1.01.0122 | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai | | | | 808.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai | Dokumen | 1 | 808.000.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 565.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi | Dokumen | 5 | 565.000.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | |
| | | 1.03.02.1.02.0032 | | | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | | 565.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | Dokumen | 1 | 565.000.000 | SEKSI SURVEI, INVESTIGASI DAN DESAIN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **185.598.594.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat** | | | | | | | | | **29.735.000.000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | |
| | | | | | | Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan | % | 60.22 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | | | Persentase rumah layak huni dan terjangkau yang terpenuhi | % | 74.85 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | **Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat** | | | | | | | | **25.490.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat | % | 41.57 | 10.020.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | | 10.020.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani | % | 6.64 | 10.020.000.000 | Bidang Perumahan | |
| | | | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana | Dokumen | 2 | 70.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.02.1.01.0011 | | | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi | Dokumen | 1 | 70.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana | Dokumen | 1 | 70.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.02.1.02.0001 | | | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana | Orang | 200 | 70.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 4.380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana | Unit | 170 | 4.380.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | |
| | | 1.04.02.1.03.0001 | | | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | 3.200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi | Unit | 150 | 3.200.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.04.02.1.03.0004 | | | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | | 1.180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun | Unit | 20 | 1.180.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 5.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Unit | 17000 | 5.500.000.000 | SEKSI PERUMAHAN SWADAYA | |
| | | 1.04.02.1.04.0006 | | | Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi | | | | 5.500.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Laporan | 1 | 5.500.000.000 | SEKSI PERUMAHAN SWADAYA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat | % | 20.22 | 15.470.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | | 15.270.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase rumah layak huni yang disediakan | % | 0.73 | 15.270.000.000 | Bidang Perumahan | |
| | | | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pendataan Penyedian Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi | Dokumen | 2 | 150.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.02.1.01.0010 | | | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi | Dokumen | 2 | 150.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi | Dokumen | 1 | 70.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | |
| | | 1.04.02.1.02.0009 | | | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP | Orang | 300 | 70.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | | | | | 15.050.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi | Unit | 340 | 15.050.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | |
| | | 1.04.02.1.03.0004 | | | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | | 15.050.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan | Unit | 240 | 10.600.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah | Unit | 100 | 4.450.000.000 | SEKSI PERUMAHAN UMUM | |
| | | 1.04.06 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | % | 100 | 200.000.000 | Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.06.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah | Laporan | 1 | 200.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | **Meningkatnya kualitas kawasan permukiman** | | | | | | | | **4.245.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase penurunan kawasan kumuh | % | 39.78 | 4.245.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | 3.765.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman | % | 100 | 960.000.000 | Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | 960.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.03.1.01.0017 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan | 1 | 100.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia | Dokumen | 2 | 460.000.000 | SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 1.04.03.1.01.0008 | | | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi | Dokumen | 1 | 310.000.000 | SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.04.03.1.01.0017 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Laporan | 1 | 150.000.000 | SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia | Dokumen | 2 | 400.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | | 1.04.03.1.01.0017 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi | Laporan | 2 | 400.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh | % | 13.9 | 2.805.000.000 | Bidang Kawasan Permukiman | |
| | | | | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun | Laporan | 3 | 75.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.03.1.01.0018 | | | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Laporan | 3 | 75.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | | 2.730.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun | Laporan | 3 | 690.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.04.03.1.02.0002 | | | Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | 690.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Laporan | 3 | 690.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | | | | | Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas | Ha | 50 | 2.040.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.03.1.02.0003 | | | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki | Unit | 584 | 140.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.04.03.1.02.0014 | | | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | | | | 1.900.000.000 | | |
| | | | | | | Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar | Ha | 50 | 1.900.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.04.05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | | | | | 480.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman | % | 60 | 480.000.000 | Bidang Kawasan Permukiman | |
| | | | | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman | | | | | 480.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Laporan | 2 | 480.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN | |
| | | 1.04.05.1.01.0002 | | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman | Lokasi | 1 | 400.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.04.05.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman | Laporan | 2 | 80.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **21.324.033.000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 77 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **20.173.577.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83 | 20.173.577.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 20.173.577.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 20.173.577.000 | SEKRETARIAT | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 15.229.577.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 6 | 15.229.577.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14.724.577.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 77 | 14.724.577.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 420.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 420.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 25.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0008 | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 175.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 155.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 155.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 50 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 50 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 10 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.020.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.020.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 370.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 370.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 84 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 6 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.829.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 36 | 1.829.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 479.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 479.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 720.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 267 | 720.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 25 | 240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 25 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 135 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 340.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 75 | 340.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **1.150.456.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.5 | 1.150.456.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.150.456.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 1.150.456.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 1.150.456.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 1.150.456.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 9 | 400.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 750.456.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 11 | 750.456.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan** | | | | | | | | | **1.475.000.000** | **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** | |
| | | | | | | Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi | % | 100 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | | | | | Persentase reforma agraria yang difasilitasi | % | 100 | | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | **Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum** | | | | | | | | **380.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum | % | 100 | 380.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | 2.10.03 | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | | | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi penetapan lokasi | % | 100 | 380.000.000 | Bidang Pertanahan | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum | Dokumen | 1 | 380.000.000 | SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH | |
| | | 2.10.03.1.01.0001 | | | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Dokumen | 5 | 380.000.000 | SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH | |
| | **Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | **1.095.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria | % | 100 | 1.095.000.000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| | | 2.10.04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | | | | | | 570.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan | % | 100 | 570.000.000 | Bidang Pertanahan | |
| | | | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 570.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi | Dokumen | 3 | 570.000.000 | SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN | |
| | | 2.10.04.1.01.0001 | | | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 330.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria | Dokumen | 1 | 280.000.000 | SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.10.04.1.01.0002 | | | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Dokumen | 10 | 240.000.000 | SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.10.06 | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | | | | | | 525.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria | % | 100 | 525.000.000 | Bidang Pertanahan | |
| | | | | Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 525.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria | Lokasi | 10 | 525.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN | |
| | | 2.10.06.1.01.0002 | | | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 22 | 130.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.10.06.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah | | | | 395.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria | Dokumen | 2 | 5.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria | Dokumen | 7 | 390.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **52.534.033.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (PE)** | | | | | | | | | **570.000.000** | **Satuan Polisi Pamong Praja** | |
| | | | | | | Indeks Penyelenggaraan Trantibum | Angka | 85 | | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | **Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah** | | | | | | | | **570.000.000** | | |
| | | | | | | Skor kinerja penegakan produk hukum daerah | Angka | 6.2 | 570.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | 570.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penegakan produk hukum daerah | % | 86.67 | 570.000.000 | Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah | |
| | | | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 100.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas | % | 100 | 100.000 | SEKSI PENINDAKAN | |
| | | 1.05.02.1.01.0015 | | | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 100.000 | | |
| | | | | | | Persentase warga negara yang menperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada | % | 100 | 100.000 | SEKSI PENINDAKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur | | | | | 481.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi | Orang | 200 | 151.700.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | |
| | | 1.05.02.1.02.0002 | | | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | 41.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelanggar yang diawasi | Orang | 100 | 41.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.02.1.02.0003 | | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | 110.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina | Orang | 100 | 41.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | |
| | | | | | | Pemetaan pelanggaran Perda dan Pergub | Dokumen | 4 | 69.700.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | |
| | | | | | | Persentase pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani | % | 100 | 329.700.000 | SEKSI PENINDAKAN | |
| | | 1.05.02.1.02.0001 | | | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah peserta sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub | Orang | 40 | 2.000.000 | SEKSI PENINDAKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.02.1.02.0003 | | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | | | | 327.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditindak | Orang | 50 | 327.700.000 | SEKSI PENINDAKAN | |
| | | | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | | | | | 88.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan PPNS | Dokumen | 2 | 88.500.000 | SEKSI PENINDAKAN | |
| | | 1.05.02.1.03.0001 | | | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | 88.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 80 | 88.500.000 | SEKSI PENINDAKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum (RB)** | | | | | | | | | **1.618.000.000** | **Satuan Polisi Pamong Praja** | |
| | | | | | | Indeks Penyelenggaraan Trantibum | Angka | 85 | | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | **Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat** | | | | | | | | **1.618.000.000** | | |
| | | | | | | Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas) | Angka | 12.6 | 1.618.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | 1.520.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum | % | 56.07 | 500.000.000 | Bidang Pembinaan Masyarakat | |
| | | | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok masyarakat yang dilakukan penyuluhan | Kelompok | 130 | 143.100.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | |
| | | 1.05.02.1.01.0017 | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | 143.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mitra trantib yang dibina | Kelompok | 35 | 21.782.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah sekolah, kelompok masyarakat dan BUMD yang dibina | Kelompok | 95 | 121.318.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah wilayah yang dilakukan pemetaan potensi rawan trantibum | Kabupaten/ Kota | 35 | 356.900.000 | SEKSI KEWASPADAAN | |
| | | 1.05.02.1.01.0014 | | | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | | | | 260.163.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta konsolidasi kewaspadaan gangguan trantibum | Orang | 140 | 260.163.000 | SEKSI KEWASPADAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.02.1.01.0017 | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | 96.737.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan daerah rawan tramtib | Dokumen | 1 | 47.593.000 | SEKSI KEWASPADAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah kasus gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini | Kasus | 10 | 49.144.000 | SEKSI KEWASPADAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah | % | 65.69 | 570.000.000 | Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | |
| | | | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 570.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penanganan gangguan tramtibum | Kegiatan | 74 | 405.000.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | |
| | | 1.05.02.1.01.0017 | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | 236.090.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi | Kegiatan | 25 | 89.280.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP | Kegiatan | 15 | 52.980.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah patroli pengendalian tramtibum | Kegiatan | 24 | 93.830.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.02.1.01.0019 | | | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | 168.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah operasi penertiban trantibum ( pekat, lintas kabkota, cipta kondisi, perbatasan prov.) | Kegiatan | 10 | 138.530.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase unjuk rasa yang tertangani | % | 100 | 30.380.000 | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah upaya pencegahan gangguan tramtibum di Jawa Tengah | Kegiatan | 16 | 165.000.000 | SEKSI KETERTIBAN UMUM | |
| | | 1.05.02.1.01.0017 | | | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | 125.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kawasan tertib yang dibina | Lokasi | 7 | 73.750.000 | SEKSI KETERTIBAN UMUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah peserta pembinaan trantibum | Orang | 120 | 51.270.000 | SEKSI KETERTIBAN UMUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.02.1.01.0019 | | | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | 39.980.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penertiban PNS | Kegiatan | 9 | 39.980.000 | SEKSI KETERTIBAN UMUM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina | % | 64.54 | 450.000.000 | Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat | |
| | | | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan | Kelompok | 150 | 125.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | |
| | | 1.05.02.1.01.0016 | | | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemutakhiran data Satgas Linmas dan Satlinmas | Dokumen | 2 | 125.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang dilakukan penguatan kelembagaannya | Kelompok | 185 | 325.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS | |
| | | 1.05.02.1.01.0018 | | | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jml personil Satgas Linmas dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 400 | 325.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SDM SATUAN LINMAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | | | | | | 98.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran | % | 100 | 98.000.000 | Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran | | | | | 98.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kab/kota yang telah dilakukan pemetaan daerah rawan kebakaran | Kabupaten/Kota | 35 | 98.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | |
| | | 1.05.04.1.01.0022 | | | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran | | | | 98.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal | Dokumen | 1 | 98.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN MOBILISASI SATUAN LINMAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **18.538.991.000** | **Satuan Polisi Pamong Praja** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 73 | | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **18.381.991.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 81 | 18.381.991.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 18.381.991.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 18.381.991.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 13.450.444.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 13 | 13.450.444.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 13.158.444.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 73 | 13.158.444.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 282.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 282.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | Paket | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 2 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 45.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 70 | 45.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 795.647.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 795.647.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 125.147.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 125.147.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 430.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 430.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 654.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 2 | 654.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 639.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 1 | 639.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.520.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 3 | 2.520.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 3.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 305.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 305.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.212.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 2.212.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 681.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 75 | 681.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 370.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 20 | 370.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 30 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 196.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 196.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **157.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 157.000.000 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 157.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 157.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 157.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 157.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 98.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 8 | 98.500.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 58.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 4 | 58.500.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **20.726.991.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | **3.850.000.000** | **Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | 0.75 | | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | **Meningkatnya Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan** | | | | | | | | **1.425.000.000** | | |
| | | | | | | Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa | Angka | 0.54 | 1.425.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | 1.425.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik | % | 2.86 | 1.025.000.000 | Bidang Logistik dan Peralatan | |
| | | | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase sarpras PB yang terpenuhi | % | 100 | 275.000.000 | SEKSI PERALATAN | |
| | | 1.05.03.1.02.0014 | | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Dokumen | 1 | 275.000.000 | SEKSI PERALATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase logistik penyelamatan dan evakuasi yang terpenuhi | % | 100 | 750.000.000 | SEKSI LOGISTIK | |
| | | 1.05.03.1.03.0004 | | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Orang | 5000 | 750.000.000 | SEKSI LOGISTIK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penanganan darurat bencana | % | 100 | 400.000.000 | Bidang Penanganan Darurat | |
| | | | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kejadian bencana yang terpenuhi kajiannya | % | 100 | 75.000.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT | |
| | | 1.05.03.1.02.0015 | | | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yangDikembangkan Kapasitas Teknis danManajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana | Orang | 50 | 75.000.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA DARURAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah bencana yang dilakukan kaji cepat | % | 100 | 100.000.000 | | |
| | | 1.05.03.1.03.0002 | | | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana | Laporan | 35 | 100.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kejadian bencana yang tertangani | % | 100 | 125.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | |
| | | 1.05.03.1.03.0003 | | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana | Laporan | 35 | 50.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.03.1.03.0005 | | | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | | | | 75.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Laporan | 1 | 75.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | |
| | | | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase sinkronisasi data bencana pusat dan daerah | % | 100 | 100.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | |
| | | 1.05.03.1.04.0017 | | | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan | Dokumen | 35 | 100.000.000 | SEKSI PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan** | | | | | | | | **2.225.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 4.02 | 2.225.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | 2.225.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 0.12 | 2.225.000.000 | Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | |
| | | | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi | | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana | % | 0.01 | 1.100.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | |
| | | 1.05.03.1.01.0002 | | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana(Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota | Orang | 3000 | 1.100.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | 1.125.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | % | 0.23 | 450.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | |
| | | 1.05.03.1.02.0013 | | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Desa | 15 | 300.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.03.1.02.0016 | | | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Orang | 200 | 150.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana | Kegiatan | 5 | 675.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | |
| | | 1.05.03.1.02.0017 | | | Penyusunan Rencana Kontijensi | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi | Dokumen | 1 | 75.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.03.1.02.0019 | | | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan GladiKesiapsiagaan | Laporan | 1 | 100.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.03.1.02.0021 | | | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan Pelindung Diri TerhadapBencana | Unit | 77 | 500.000.000 | SEKSI KESIAPSIAGAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Upaya Pemulihan Bencana** | | | | | | | | **200.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi | % | 100 | 200.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | | | 200.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana | % | 2 | 200.000.000 | Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | |
| | | | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB yang terlaksana | % | 100 | 50.000.000 | SEKSI REHABILITASI | |
| | | 1.05.03.1.04.0019 | | | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga danKemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI REHABILITASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | persentase pelaksanaan pemulihan pasca bencana | % | 100 | 150.000.000 | SEKSI REKONSTRUKSI | |
| | | 1.05.03.1.04.0007 | | | Penanganan Pasca Bencana Provinsi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SEKSI REKONSTRUKSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.05.03.1.04.0020 | | | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana | Laporan | 1 | 50.000.000 | SEKSI REKONSTRUKSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **14.373.940.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 74.08 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **14.123.940.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 92 | 14.123.940.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 14.123.940.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 14.123.940.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 7.813.463.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 7.813.463.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 7.513.463.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 38 | 7.513.463.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 300.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 2.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 38 | 2.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 38 | 3.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 926.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 926.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 10.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 25.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 10 | 35.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 1.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 50.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 800.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 5.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 1.182.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 2 | 1.182.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 1 | 1.100.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 82.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disedikan | Unit | 1 | 82.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.362.477.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 3 | 3.362.477.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 1.500.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 450.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.910.977.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 2.910.977.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 785.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 139 | 785.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 56 | 500.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 5 | 50.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 200.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 75 | 35.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **250.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.13 | 250.000.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 250.000.000 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 250.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 100.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 5 | 150.000.000 | BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **18.223.940.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Sosial

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** | | | | | | | | | **158.281.087.000** | **Dinas Sosial** | |
| | | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya | % | 3.1 | | Dinas Sosial | |
| | **Meningkatnya kemandirian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkelanjutan** | | | | | | | | **12.800.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial | % | 0.34 | 12.800.000.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | 12.800.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan | % | 0.04 | 12.800.000.000 | Bidang Penanganan Fakir Miskin | |
| | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | | | | | 12.800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Keluarga yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian | Orang | 400 | 1.800.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN | |
| | | 1.06.05.1.02.0002 | | | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota | Orang | 400 | 1.800.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 1) | Orang | 800 | 5.540.000.000 | SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN | |
| | | 1.06.05.1.02.0003 | | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | 5.540.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi | Orang | 10000 | 5.540.000.000 | SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN DAN DAERAH RENTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 2) | Orang | 800 | 5.460.000.000 | SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN | |
| | | 1.06.05.1.02.0003 | | | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | 5.460.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi | Orang | 10000 | 5.460.000.000 | SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial** | | | | | | | | **11.181.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dan berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | 15.41 | 11.181.000.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | 10.721.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | % | 15.41 | 10.721.000.000 | Bidang Pemberdayaan Sosial | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab./kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan | Dokumen | 200 | 250.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 1.06.02.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau BarangJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Dokumen | 200 | 250.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | | | | | 10.471.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas | Orang | 1552 | 9.171.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 1.06.02.1.02.0001 | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 250.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.02.1.02.0002 | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi | | | | 7.112.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya | Orang | 1152 | 7.112.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.02.1.02.0004 | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | | | | 1.809.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 1.809.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial | Orang | 2000 | 1.300.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 1.06.02.1.02.0003 | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi | | | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi | Orang | 2000 | 1.300.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | | | 460.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola | % | 100 | 460.000.000 | Bidang Pemberdayaan Sosial | |
| | | | | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | | 460.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah stakeholder yang berperan dalam pananaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial | Orang | 400 | 300.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL | |
| | | 1.06.07.1.01.0002 | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah stakeholder yang berperan serta dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial | Orang | 200 | 300.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah TMPN Provinsi yang dikelola | Unit | 1 | 160.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL | |
| | | 1.06.07.1.01.0001 | | | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Dokumen | 2 | 100.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.07.1.01.0002 | | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Unit | 1 | 60.000.000 | SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang layak dan tepat sasaran** | | | | | | | | **57.297.160.000** | | |
| | | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial | % | 2.26 | 57.297.160.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | 57.297.160.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial | % | 2.26 | 57.297.160.000 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| | | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi | | | | | 57.297.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial | Orang | 103528 | 57.297.160.000 | SEKSI JAMINAN SOSIAL | |
| | | 1.06.05.1.02.0001 | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | 57.297.160.000 | | |
| | | | | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Orang | 103528 | 57.297.160.000 | SEKSI JAMINAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi korban bencana yang memenuhi SPM Bidang Sosial** | | | | | | | | **3.784.500.000** | | |
| | | | | | | Persentase jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial | % | 0.11 | 3.784.500.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan | % | 100 | 200.000.000 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| | | | | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal | Orang | 200 | 200.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | |
| | | 1.06.03.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota | Orang | 200 | 200.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | 3.584.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial | % | 100 | 3.584.500.000 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | |
| | | | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | | | | | 3.584.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial | Orang | 2000 | 2.513.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | |
| | | 1.06.06.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.383.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi | Orang | 2000 | 1.383.280.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi | Orang | 2000 | 300.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0003 | | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi | Unit | 2000 | 150.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0004 | | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | 379.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi | Orang | 2000 | 379.720.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0005 | | | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi | Orang | 20000 | 300.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial | Orang | 2900 | 1.071.500.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | |
| | | 1.06.06.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 184.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi | Orang | 500 | 184.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 87.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi | Orang | 500 | 87.500.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0003 | | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi | Unit | 500 | 50.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0004 | | | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi | Orang | 2900 | 600.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.06.1.01.0005 | | | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi | Orang | 500 | 150.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dalam Panti yang memenuhi SPM Bidang Sosial** | | | | | | | | **73.218.427.000** | | |
| | | | | | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial | % | 0.4 | 73.218.427.000 | Dinas Sosial | |
| | | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | 72.868.427.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti | % | 3.84 | 9.010.490.000 | Bidang Rehabilitasi Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 2.589.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti | Orang | 4200 | 2.589.900.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS | |
| | | 1.06.04.1.01.000 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 2.019.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 4200 | 2.019.900.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 200.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 370.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Dokumen | 8 | 370.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 5.213.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti | Orang | 3400 | 5.213.240.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 1.692.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Pendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 3400 | 1.692.300.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 3.520.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 3.520.940.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 577.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti | Orang | 800 | 577.600.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 577.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 800 | 577.600.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | | 629.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti | Orang | 500 | 629.750.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG | |
| | | 1.06.04.1.04.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 354.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 500 | 354.750.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG | |
| | | 1.06.04.1.04.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti | Dokumen | 8 | 275.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PERDAGANGAN ORANG | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | % | 0.13 | 2.015.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.345.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Orang | 200 | 159.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 64.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 32.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 32.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 25.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 40 | 37.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Orang | 200 | 1.186.070.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 959.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 959.950.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 199.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 199.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 27.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 27.120.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | | 670.130.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Orang | 100 | 124.250.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.04.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 81.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 81.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 15.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 15.250.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 15.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Dokumen | 8 | 12.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Orang | 100 | 545.880.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.04.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 467.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 467.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 68.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 68.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | | | | 9.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 9.880.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | % | 0.13 | 2.052.205.000 | Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.463.445.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Orang | 220 | 167.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 67.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 67.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 32.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 32.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 27.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 40.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 40 | 40.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Orang | 220 | 1.295.745.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.055.945.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 1.055.945.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 213.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 213.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 26.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | | 588.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Orang | 80 | 111.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.04.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 77.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 77.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 12.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 12.600.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 12.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Dokumen | 8 | 10.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Orang | 80 | 476.960.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.04.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 373.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 373.760.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 96.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 96.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 80 | 7.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | % | 0.21 | 3.219.478.000 | Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 653.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Orang | 100 | 91.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 55.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 55.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 15.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 12.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Orang | 8 | 7.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Orang | 100 | 562.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 467.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 467.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 86.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 86.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 9.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 2.566.078.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Orang | 390 | 269.075.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai KebutuhanKewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 92.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 380 | 92.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 54.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 390 | 54.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 48.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 390 | 48.750.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 73.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 78 | 73.125.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Orang | 390 | 2.297.003.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.871.903.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 390 | 1.871.903.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 378.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 390 | 378.300.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 46.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi | Orang | 390 | 46.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring | % | 0.12 | 1.857.230.000 | Panti Pelayanan Sosial Cepiring | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.857.230.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring | Orang | 280 | 216.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 76.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 280 | 76.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 51.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 280 | 51.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 280 | 35.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 52.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 14 | 52.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring | Orang | 280 | 1.641.230.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.336.030.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 280 | 1.336.030.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 271.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 280 | 271.600.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 33.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 280 | 33.600.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata | % | 0.24 | 2.961.520.000 | Panti Pelayanan Sosial Dewanata | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.643.370.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata | Orang | 360 | 174.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 75.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 260 | 75.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 45.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 260 | 45.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 32.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 130 | 32.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 19.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 8 | 19.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata | Orang | 360 | 1.469.370.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.214.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 260 | 1.214.720.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 223.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 260 | 223.450.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 31.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 260 | 31.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.318.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata | Orang | 200 | 150.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 64.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 64.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 27.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 27.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 21.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 21.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 40 | 37.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata | Orang | 200 | 1.167.450.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 959.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 959.950.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 183.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 183.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 24.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | % | 0.16 | 2.583.151.000 | Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 535.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Orang | 100 | 83.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 53.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 53.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 13.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 13.600.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 40 | 10.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 8 | 6.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Orang | 100 | 451.960.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 373.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 373.760.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 71.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 71.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 7.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.223.121.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Orang | 150 | 322.656.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 25.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 25.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 258.131.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 258.131.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 20.545.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 20.545.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 18.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 18.780.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Orang | 150 | 900.465.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 700.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 700.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 190.165.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 190.165.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 9.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 824.770.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Orang | 120 | 114.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 52.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 52.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 24.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 24.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 15.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 22.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Orang | 120 | 710.370.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 575.970.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 575.970.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 120.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 14.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 120 | 14.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | % | 0.07 | 1.439.960.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.439.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial | Orang | 160 | 465.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 25.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 25.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 384.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 384.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 44.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 44.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 12.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial | Orang | 160 | 974.560.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 753.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 753.260.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 208.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 208.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 13.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 13.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | % | 0.1 | 2.142.980.000 | Dinas Sosial | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 2.142.980.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial | Orang | 240 | 719.600.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 32.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 32.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 603.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 603.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 66.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 66.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 18.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial | Orang | 240 | 1.423.380.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 1.121.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 1.121.280.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 286.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 286.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 16.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 16.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri | % | 0.15 | 2.503.140.000 | Panti Pelayanan Sosial Mandiri | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 895.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | Orang | 100 | 306.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 50.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 50.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 221.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 221.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 27.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 7.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri | Orang | 100 | 588.700.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 467.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 467.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 115.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 115.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 6.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 6.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.607.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | Orang | 240 | 190.600.000 | | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 70.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 70.200.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 35.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 35.900.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 30.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 54.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 48 | 54.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri | Orang | 240 | 1.417.140.000 | | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.151.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 1.151.940.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 240.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 25.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 240 | 25.200.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | % | 0.14 | 2.062.390.000 | Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 666.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Orang | 100 | 98.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 55.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 55.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 22.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 12.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 8 | 7.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Orang | 100 | 568.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 467.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 467.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 89.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 89.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 12.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | | | | | 1.395.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Orang | 220 | 190.850.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.04.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 105.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 220 | 105.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 25.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 220 | 25.150.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi | Orang | 220 | 33.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Dokumen | 8 | 27.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Orang | 220 | 1.204.640.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.04.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.027.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 220 | 1.027.840.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.04.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 157.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins | Orang | 220 | 157.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.04.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/WismaLayak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 220 | 19.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | % | 0.22 | 3.349.390.000 | Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.115.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo | Orang | 170 | 121.150.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 64.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 64.450.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 22.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 22.200.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0010 | | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | | | | 21.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 21.250.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 12.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | Dokumen | 8 | 12.750.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | Orang | 170 | 994.370.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 794.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 794.240.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 154.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 154.500.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 45.630.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 45.630.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | | | | | 2.233.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | Orang | 340 | 213.950.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.05.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 125.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 340 | 125.950.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 340 | 20.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.05.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | 25.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal | Orang | 340 | 25.500.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | Dokumen | 8 | 42.500.000 | SEKSI REHABILITASI DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo WIdodo | Orang | 340 | 2.019.920.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | |
| | | 1.06.04.1.05.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.588.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 340 | 1.588.450.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 352.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 340 | 352.000.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | | | | 79.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 340 | 79.470.000 | SEKSI IDENTIFIKASI DAN PENYANTUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | % | 0.21 | 2.948.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 2.948.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | Orang | 480 | 283.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 103.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 480 | 103.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 83.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 480 | 83.600.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 480 | 60.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 8 | 36.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | Orang | 480 | 2.664.900.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 2.242.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 480 | 2.242.560.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 319.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 480 | 319.950.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 102.390.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 480 | 102.390.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | % | 0.07 | 1.420.020.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.420.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial | Orang | 160 | 483.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 25.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 25.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 401.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 401.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 44.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 44.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 12.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial | Orang | 160 | 937.020.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 747.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 747.520.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 179.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 179.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 10.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 10.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | % | 0.17 | 2.341.150.000 | Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 2.341.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | Orang | 400 | 235.100.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 93.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 400 | 93.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 55.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 400 | 55.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 400 | 50.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | Dokumen | 8 | 36.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | Orang | 400 | 2.106.050.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.863.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 400 | 1.863.300.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 194.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 400 | 194.750.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 400 | 48.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo | % | 0.11 | 1.572.526.000 | Panti Pelayanan Sosial Pendowo | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.572.526.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo | Orang | 250 | 219.901.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 7.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 117.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 250 | 117.650.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 44.751.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 250 | 44.751.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 31.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 125 | 31.250.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 18.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 8 | 18.750.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo | Orang | 250 | 1.352.625.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.168.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 250 | 1.168.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 159.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 250 | 159.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 25.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 250 | 25.625.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi | % | 0.12 | 2.864.020.000 | Panti Pelayanan Sosial Penganthi | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 946.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi | Orang | 150 | 110.950.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 61.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 61.950.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 18.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 18.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 14.170.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 75 | 14.170.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 15.830.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | Dokumen | 8 | 15.830.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi | Orang | 150 | 835.250.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 700.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 700.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 120.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins | Orang | 150 | 120.950.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 13.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.216.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi | Orang | 140 | 382.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 25.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 25.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 323.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 323.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 23.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 23.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 10.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi | Orang | 140 | 834.470.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 654.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 654.080.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 171.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 171.490.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 8.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 8.900.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | | | | | 700.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pengathi | Orang | 100 | 135.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.05.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 92.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 92.950.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.05.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 15.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 15.250.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.05.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal | Orang | 20 | 15.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.05.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA | Dokumen | 8 | 12.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi | Orang | 100 | 565.250.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.05.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 467.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 467.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.05.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 78.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 78.550.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.05.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | | | | 19.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 19.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | % | 0.15 | 2.195.278.000 | Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.064.580.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan | Orang | 170 | 1.064.580.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 794.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 794.100.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 118.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 118.480.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 20.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 20.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 64.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 64.450.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 32.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 32.650.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 21.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 85 | 21.250.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 12.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 8 | 12.750.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.130.698.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | Orang | 170 | 142.395.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 59.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 59.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 29.070.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 29.070.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 21.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 21.250.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 31.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 34 | 31.875.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan | Orang | 170 | 988.303.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 811.503.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 811.503.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 156.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 156.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 20.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 170 | 20.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo | % | 0.25 | 4.108.995.000 | Panti Pelayanan Sosial Raharjo | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.742.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Orang | 280 | 189.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 78.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 280 | 78.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 54.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 280 | 54.600.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 140 | 35.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar | Dokumen | 8 | 21.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo | Orang | 280 | 1.553.180.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.308.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 280 | 1.308.060.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 212.220.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 280 | 212.220.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 32.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 280 | 32.900.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.681.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Orang | 200 | 540.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 25.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 25.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 447.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 447.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 53.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 53.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 15.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo | Orang | 200 | 1.140.940.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 934.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 934.140.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 194.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 194.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 12.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 685.175.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Orang | 100 | 102.450.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 49.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 49.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 22.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 22.250.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 20 | 12.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 20 | 18.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo | Orang | 100 | 582.725.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 478.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 478.575.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 92.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 92.150.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 12.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | % | 0.22 | 3.524.290.000 | Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 2.632.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Orang | 420 | 255.100.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 95.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 420 | 95.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 74.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 420 | 74.900.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 52.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 210 | 52.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 31.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 8 | 31.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Orang | 42030 | 2.377.040.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.962.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 420 | 1.962.240.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 364.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 420 | 364.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 50.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Unit | 420 | 50.400.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 892.150.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Orang | 100 | 301.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 25.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 25.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 241.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 241.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 27.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 7.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Orang | 100 | 590.450.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 467.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 467.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 116.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 116.750.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 6.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 6.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | % | 0.08 | 1.220.005.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.220.005.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | Orang | 180 | 154.450.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 68.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 68.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 30.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 30.050.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 22.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 36 | 33.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran | Orang | 180 | 1.065.555.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 863.955.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 863.955.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 180.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 21.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 21.600.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | % | 0.08 | 1.621.910.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.621.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial | Orang | 180 | 524.350.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 25.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 25.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 426.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 426.150.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 59.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 59.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 13.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial | Orang | 180 | 1.097.560.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 840.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 840.960.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 248.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 248.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 8.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi | Orang | 180 | 8.600.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | % | 0.22 | 3.299.222.000 | Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 2.144.602.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | Orang | 350 | 157.982.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 67.582.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 350 | 67.582.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 27.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 350 | 27.300.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 36.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 175 | 36.350.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 26.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar | Dokumen | 8 | 26.250.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha | Orang | 350 | 1.986.620.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.635.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 350 | 1.635.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 312.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 350 | 312.920.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 38.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 350 | 38.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.154.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | Orang | 160 | 147.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 83.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 83.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 6.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 44.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 44.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 13.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 13.800.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | Orang | 160 | 1.007.620.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 747.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 747.520.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 212.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 212.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 48.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 160 | 48.100.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | % | 0.06 | 1.260.550.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.260.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | Orang | 150 | 360.250.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 30.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 30.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 286.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 286.250.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 32.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 32.550.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 11.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 11.250.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | Orang | 150 | 900.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 700.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 700.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 190.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 150 | 9.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede | % | 0.12 | 1.908.953.000 | Panti Pelayanan Sosial Turusgede | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.908.953.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede | Orang | 290 | 192.225.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 45.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provins | Orang | 290 | 45.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 55.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 290 | 55.775.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 36.250.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 290 | 36.250.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 54.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 56 | 54.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede | Orang | 290 | 1.716.728.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.391.928.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 290 | 1.391.928.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 290.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 290 | 290.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 34.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 290 | 34.800.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | % | 0.17 | 2.594.450.000 | Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | | | | | 659.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Orang | 100 | 91.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 55.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 55.700.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 15.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 50 | 12.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.01.0012 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar | Dokumen | 8 | 7.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Orang | 100 | 568.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 467.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 467.200.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 91.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 91.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 100 | 9.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | | | | | 1.935.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Orang | 300 | 212.200.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.05.0005 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 120.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 300 | 120.450.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0009 | | | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 31.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 300 | 31.750.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0010 | | | Pemulangan ke Daerah Asal | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal | Orang | 300 | 22.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0011 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA | Dokumen | 8 | 37.500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Orang | 300 | 1.722.850.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.05.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 1.401.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 300 | 1.401.700.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 292.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 300 | 292.650.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.05.0003 | | | Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses | | | | 28.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 300 | 28.500.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | % | 0.16 | 2.599.924.000 | Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 1.394.669.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | Orang | 200 | 183.947.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 75.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 75.400.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 17.947.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 17.947.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 55.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 35.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 35.600.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | Orang | 200 | 1.210.722.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 969.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 969.720.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 221.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 221.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 20.002.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 200 | 20.002.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | | | | | 1.205.255.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya | Orang | 180 | 149.367.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | |
| | | 1.06.04.1.03.0004 | | | Penyediaan Alat Bantu | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi | Orang | 1 | 500.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | | | | 52.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 52.900.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0009 | | | Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 35.607.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 35.607.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 27.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 27.360.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0012 | | | Pemulasaraan | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi | Orang | 36 | 33.000.000 | SEKSI BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | Orang | 180 | 1.055.888.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | |
| | | 1.06.04.1.03.0001 | | | Penyediaan Permakanan | | | | 854.288.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 854.288.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0002 | | | Penyediaan Sandang | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 180.000.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 1.06.04.1.03.0003 | | | Penyediaan Asrama yang mudah Diakses | | | | 21.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 180 | 21.600.000 | SEKSI PENYANTUNAN DAN RUJUKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | % | 0.11 | 2.191.600.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti | | | | | 2.191.600.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial | Orang | 260 | 716.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | 1.06.04.1.02.0006 | | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | | | | 25.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi | Orang | 260 | 25.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 1.06.04.1.02.0009 | | | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | 600.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses keLayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | Orang | 260 | 600.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 1.06.04.1.02.0011 | | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | | | | 38.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | Orang | 260 | 38.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 1.06.04.1.02.0013 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | | | | 52.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Dokumen | 8 | 52.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial | Orang | 260 | 1.475.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | 1.06.04.1.02.0002 | | | Penyediaan Makanan | | | | 1.214.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | Orang | 260 | 1.214.720.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 1.06.04.1.02.0003 | | | Penyediaan Sandang | | | | 244.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi | Orang | 260 | 244.280.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 1.06.04.1.02.0004 | | | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses | | | | 16.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi | Orang | 260 | 16.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan | % | 100 | 350.000.000 | Bidang Rehabilitasi Sosial | |
| | | | | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan | Dokumen | 400 | 350.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | |
| | | 1.06.05.1.01.0001 | | | Pengangkatan Anak antar WNI | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi | Orang | 400 | 350.000.000 | SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **147.137.089.000** | **Dinas Sosial** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 82.5 | | Dinas Sosial | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **146.137.089.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 89.5 | 146.137.089.000 | Dinas Sosial | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 146.137.089.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 340.156.000 | Panti Pelayanan Sosial Cepiring | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 133.656.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring | % | 100 | 133.656.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 13.346.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 13.346.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 1.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 58.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 58.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 83.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 83.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 79.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 79.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 113.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring | Unit | 4 | 113.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 22.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 22.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 9.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 71.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 71.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 226.200.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 92.600.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 92.600.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 400.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 3.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 12.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 1.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 6.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 52.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 52.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 72.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 72.700.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 70.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 70.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 55.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 2 | 55.900.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 8.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 8.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 37.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 399.810.000 | Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 129.060.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | % | 100 | 129.060.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 13.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 13.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.730.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.730.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.420.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 52.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 52.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gerung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 144.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Laporan | 4 | 144.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 1.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 143.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 143.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 117.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo | Unit | 4 | 117.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 9.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 9.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 71.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 71.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 583.980.000 | Panti Pelayanan Sosial Raharjo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 240.820.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | % | 100 | 240.820.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 18.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 18.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 11.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 11.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 46.230.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 46.230.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 9.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 9.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 6.660.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 27.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 27.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 22.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 22.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 97.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 97.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Unit | 1 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 123.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Laporan | 4 | 123.610.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 5.610.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 118.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 118.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 197.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo | Unit | 8 | 197.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 28.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 28.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 18.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 18.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 138.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 138.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 11.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SRAGEN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 542.780.000 | Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 202.170.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | % | 100 | 202.170.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 8.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 8.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 1.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 104.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 104.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Unit | 1 | 27.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 27.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 160.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Laporan | 4 | 160.910.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 1.910.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 159.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 159.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 152.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera | Unit | 6 | 152.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 19.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 19.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 379.435.000 | Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 141.685.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | % | 100 | 141.685.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.825.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 1.825.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 120.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Laporan | 4 | 120.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 115.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 115.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 107.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama | Unit | 4 | 107.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 19.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 19.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 7.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 7.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 71.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | Unit | 4 | 71.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi | Unit | 4 | 10.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 407.480.000 | Panti Pelayanan Sosial Penganthi | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 156.280.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi | % | 100 | 156.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.420.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 78.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 132.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 132.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 109.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi | Unit | 4 | 109.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 19.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 19.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 2 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 71.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 71.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 523.620.000 | Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 204.560.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | % | 100 | 204.560.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 8.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 8.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 5.040.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket/bahan material yang disediakan | Paket | 2 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 91.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 91.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Unit | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 147.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Laporan | 4 | 147.360.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 140.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 140.360.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 157.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti | Unit | 4 | 157.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 26.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 12.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 12.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 13.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 13.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 533.220.000 | Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 221.220.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | % | 100 | 221.220.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 8.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 8.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 52.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 52.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 16.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 16.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 91.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 8 | 91.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Unit | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 142.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Laporan | 4 | 142.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 135.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 135.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 155.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata | Unit | 4 | 155.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 22.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 22.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 243.900.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 106.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | % | 100 | 106.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 400.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 3.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 12.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 1.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 6.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 65.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | Unit | 1 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 80.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | Laporan | 4 | 80.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 77.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 77.900.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 52.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | Unit | 2 | 52.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 4.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 4.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 37.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 387.960.000 | Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 162.360.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | % | 100 | 162.360.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 760.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket/bahan material yang disediakan | Paket | 2 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 84.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 84.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 112.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Laporan | 4 | 112.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 107.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 107.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 103.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara | Unit | 4 | 103.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 13.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 13.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 71.250.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 71.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 347.030.000 | Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 143.280.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | % | 100 | 143.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 2.160.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 15.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 15.510.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 65.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 83.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | Laporan | 4 | 83.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 81.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 81.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 111.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu | Unit | 4 | 111.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 71.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 71.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 643.070.000 | Panti Pelayanan Sosial Dewanata | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 297.440.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata | % | 100 | 297.440.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 27.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 27.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 11.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 11.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 46.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 46.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 9.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 9.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 2.160.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 27.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan material yg disediakan | Paket | 2 | 27.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 22.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 22.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 149.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 149.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 18.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata | Unit | 1 | 18.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 18.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 18.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 121.380.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata | Laporan | 4 | 121.380.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.380.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 7.380.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 114.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 114.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 205.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata | Unit | 4 | 205.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 18.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 18.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 138.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 138.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 18.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 18.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 327.385.000 | Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 124.995.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | % | 100 | 124.995.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 11.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 11.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.745.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.745.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 540.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 52.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 52.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | Unit | 1 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 79.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | Laporan | 4 | 79.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 1.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 78.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 112.690.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo | Unit | 4 | 112.690.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 19.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 19.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 71.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 71.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 12.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 12.840.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 289.700.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 119.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 119.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 400.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 3.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 12.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 1.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan | Paket | 2 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 6.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 78.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 100.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 97.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 97.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 65.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 2 | 65.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 18.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 18.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 37.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 488.900.000 | Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 211.700.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | % | 100 | 211.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Laporan | 4 | 500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan material yg disediakan | Paket | 2 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 16.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 16.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 104.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 104.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Unit | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 119.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Laporan | 4 | 119.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 117.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 117.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 144.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo | Unit | 4 | 144.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 14.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 14.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 10.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 335.925.000 | Panti Pelayanan Sosial Pendowo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 149.775.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo | % | 100 | 149.775.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.745.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.745.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.420.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.420.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 71.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 8 | 71.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 62.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo | Laporan | 4 | 62.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 114.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo | Unit | 4 | 114.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 71.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 71.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 581.827.000 | Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 216.797.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | % | 100 | 216.797.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 18.050.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 18.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.420.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 18.195.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 18.195.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 1.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 16.332.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 16.332.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 16.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 16.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 102.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 8 | 102.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 145.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | Laporan | 4 | 145.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 4.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 140.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 140.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 197.530.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha | Unit | 6 | 197.530.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 39.530.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 39.530.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | Unit | 4 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 135.451.361.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 105.627.096.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 5 | 105.627.096.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 103.727.096.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 599 | 103.727.096.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 1.350.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 4 | 300.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 4 | 250.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 225.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 150.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 75.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 325.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 4 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 10 | 125.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.691.050.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.691.050.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 75.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 250.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 250.050.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 36.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 1.800.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 362.515.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 5 | 362.515.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 362.515.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | 362.515.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 17.991.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 17.991.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 710.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 710.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 444.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 444.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 16.787.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 16.787.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 8.229.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 8.229.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 6 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 20 | 380.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 10 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 7.329.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 7.329.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 12 | 240.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 572.860.000 | Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 186.860.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 186.860.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 24.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 24.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 1.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 8.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 8.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 1.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 16.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 16.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 71.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 8 | 71.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 191.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | Laporan | 4 | 191.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 188.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 188.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 180.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya | Unit | 6 | 180.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 51.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 51.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 422.785.000 | Panti Pelayanan Sosial Turusgede | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 172.860.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede | % | 100 | 172.860.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 97.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 97.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 11.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede | Unit | 1 | 11.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 11.875.000 | | |
| | | | | | | Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya | Unit | 1 | 11.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 131.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede | Laporan | 4 | 131.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 107.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede | Unit | 4 | 107.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 16.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 16.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 71.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 71.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 344.650.000 | Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 149.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | % | 100 | 149.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 2.640.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 71.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 71.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 83.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | Laporan | 4 | 83.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 1.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 82.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 82.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 102.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan | Unit | 4 | 102.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 71.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 71.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 393.130.000 | Panti Pelayanan Sosial Mandiri | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 123.780.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | % | 100 | 123.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.420.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 11.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 45.500.000 | | |
| | | | | | | umlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 45.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 149.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | Laporan | 4 | 149.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 148.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 148.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 110.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri | Unit | 4 | 110.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 20.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 71.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 71.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 9.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 236.890.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 117.890.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 117.890.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 6.360.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 400.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 2.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 2.850.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 12.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 12.480.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.800.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 1.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 6.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 78.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 56.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 56.900.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 54.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 54.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 57.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 2 | 57.100.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 9.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 9.600.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 37.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 218.600.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 94.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | % | 100 | 94.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 400.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 4.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 12.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 12.300.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 1.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 6.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 52.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 52.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | Unit | 1 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 64.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | Laporan | 4 | 64.900.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 62.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 62.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 54.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | Unit | 2 | 54.700.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 7.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 37.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 37.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 261.700.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 144.600.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | % | 100 | 144.600.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 400.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 3.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 12.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 1.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket/bahan material yang disediakan | Paket | 2 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 6.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 104.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 104.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | Unit | 1 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 45.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | Laporan | 4 | 45.400.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 42.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 42.900.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 66.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | Unit | 2 | 66.700.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 19.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 19.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 37.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Sudagaran | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 253.395.000 | Dinas Sosial | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 117.195.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | % | 100 | 117.195.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 5.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 400.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 3.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 12.495.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 12.495.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 1.800.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket Bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 7.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 6.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 78.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 10.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | Unit | 1 | 10.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 10.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 65.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | Laporan | 4 | 65.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 63.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 63.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 60.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan<br>Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | Unit | 2 | 60.700.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 13.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 13.200.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 37.500.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 5.000.000 | Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 399.340.000 | Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 175.090.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | % | 100 | 175.090.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 11.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 11.490.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 760.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 5.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 23.745.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 23.745.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 4.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 420.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 14.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 2 | 14.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 9.975.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 9.975.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 104.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 104.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | Unit | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 110.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | Laporan | 4 | 110.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 2 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 108.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 108.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 104.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo | Unit | 4 | 104.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 21.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 21.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 71.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 71.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **1.000.000.000** | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.8 | 1.000.000.000 | Dinas Sosial | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 1.000.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 10 | 500.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 2 | 500.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **305.418.176.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **87.554.820.000** | **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 91 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **86.851.560.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 85.2 | 86.851.560.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 86.851.560.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.397.000.000 | Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 57.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 57.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 169.920.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 169.920.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 1.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 1.560.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.000 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 10.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 10.360.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 752.030.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 752.030.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 149.030.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 149.030.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 598.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 598.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 397.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 8 | 397.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 230.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 32.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 32.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 741.213.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 34.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 34.800.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 34.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 34.800.000 | | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 7.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 7.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 78.861.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 78.861.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 1.101.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 1.101.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 14.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 11.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan | Paket | 1 | 11.700.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 5.300.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 42.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 2 | 42.760.000 | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 496.508.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 496.508.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 3.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 70.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 423.508.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 423.508.000 | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 124.044.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 124.044.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | 6 | 35.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 39.044.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 39.044.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.000.000.000 | Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 933.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 933.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 273.026.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 273.026.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 660.374.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 660.374.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 1.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 1.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 849.571.000 | Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 34.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 34.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 34.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 34.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 67.811.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 67.811.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.165.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 7.165.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 4.845.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 4.845.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 4.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 9.796.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan | Paket | 12 | 9.796.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4.085.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 4.085.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 37.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 37.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 702.228.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 27 | 702.228.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 211.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 211.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 489.528.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 489.528.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 44.732.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 12 | 44.732.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 25.087.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 25.087.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 15.645.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 11 | 15.645.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 7 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.350.000.000 | Balai Keselamatan Kerja Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 44.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 24 | 44.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Laporan | 12 | 42.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | Laporan | 12 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 111.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 111.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 13.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 13.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 5.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 13.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 13.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 6.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 63.310.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 63.310.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 5 | 350.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 1 | 350.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 619.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 36 | 619.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.862.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 7.862.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 202.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 202.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 408.488.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 408.488.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 207.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 11 | 207.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 116.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 5 | 116.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 80.750.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 80.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 79.705.101.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 70.634.927.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 70.634.927.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 69.592.599.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 450 | 69.592.599.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 776.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 776.620.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 194.266.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 1 | 194.266.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 71.442.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 71.442.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 11 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 44.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 12 | 44.220.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 44.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 1 | 44.220.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 102.220.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 102.220.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 36.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 12 | 36.300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 100 | 22.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 33.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 50 | 33.920.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.899.312.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.899.312.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 135.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 135.780.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 73.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 73.240.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 41.562.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 41.562.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.713.730.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 1.713.730.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 236.713.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 8 | 236.713.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 206.713.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 10 | 206.713.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 0 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4.399.915.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 4.399.915.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 21.765.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 21.765.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.183.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 1.183.350.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 177.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 177.800.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 3.017.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 3.017.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.337.794.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 1.337.794.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 440.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | 20 | 440.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 20 | 42.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 122.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 25 | 122.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 85.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 3 | 85.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 488.804.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 5 | 488.804.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 91.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 6 | 91.740.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 67.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 67.050.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.808.675.000 | Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 54.000.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 1 | 54.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 54.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 54.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 355.305.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 355.305.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 38.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 38.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 990.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 11.273.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 6 | 11.273.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 2.585.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Dokumen | 1 | 2.585.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 25.881.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan | Paket | 2 | 25.881.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 6.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 227.096.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 227.096.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 86.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 86.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 86.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 3 | 86.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.041.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 1.041.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 264.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 264.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 774.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 774.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 270.595.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 270.595.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 53.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 53.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 85.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 65.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 65.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 66.695.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 12 | 66.695.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **703.260.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.02 | 703.260.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 703.260.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 703.260.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 703.260.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 5 | 703.260.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 459.605.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 10 | 459.605.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 243.655.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 5 | 243.655.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| **Meningkatkan Pengurangan Pengangguran** | | | | | | | | | **11.900.281.000** | **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** | |
| | | | | | | Persentase pengangguran yang ditempatkan | % | 28.64 | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | **Meningkatnya Kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan ( Norma Kerja, Norma K3 dan lingkungan Kerja )** | | | | | | | | **3.500.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan | % | 80.96 | 3.500.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2.07.06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | | | | | 3.500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 | % | 26.67 | 700.000.000 | | |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan | Laporan | 60 | 700.000.000 | | |
| | | 2.07.06.1.01.0003 | | | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 | Unit | 60 | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | % | 89.59 | 2.800.000.000 | Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER | |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan | | | | | 2.800.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan | % | 56.43 | 536.000.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN | |
| | | 2.07.06.1.01.0002 | | | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan | | | | 536.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan | Kasus | 260 | 536.000.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja | % | 30 | 723.000.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | 2.07.06.1.01.0003 | | | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan | | | | 723.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 | Unit | 581 | 723.000.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan | % | 62.21 | 1.541.000.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | | 2.07.06.1.01.0001 | | | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | | | | 1.541.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | Perusahaan | 1190 | 1.541.000.000 | SEKSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |
| | **Meningkatnya Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja** | | | | | | | | **3.664.754.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten | % | 10.15 | 2.514.325.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | | 2.514.325.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi | % | 30.59 | 176.875.000 | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS | |
| | | | | Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | 176.875.000 | | |
| | | | | | | Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga | % | 26.67 | 176.875.000 | SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI | |
| | | 2.07.03.1.02.0001 | | | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja | | | | 176.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi | Unit | 30 | 176.875.000 | SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri | % | 3.2 | 541.325.000 | Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | 541.325.000 | | |
| | | | | | | Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi | % | 100 | 9.410.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 9.410.000 | | |
| | | | | | | Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi | Orang | 100 | 4.150.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen TNA | Dokumen | 10 | 5.260.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK | % | 30 | 41.325.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | 41.325.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | Unit | 2 | 41.325.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri | % | 10.2 | 140.590.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 140.590.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n | Orang | 40 | 140.590.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja | % | 100 | 350.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0003 | | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | Unit | 1 | 350.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran | % | 46.9801 | 800.000.000 | Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi | % | 33.33 | 46.005.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 46.005.000 | | |
| | | | | | | Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi | Orang | 380 | 18.160.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen TNA | Dokumen | 1 | 27.845.000 | SEKSI PEMASARAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri ) yang diberikan pelatihan | % | 0.67 | 363.995.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 363.995.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n | Orang | 48 | 363.995.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1 | % | 20 | 10.000.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja | % | 100 | 380.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0003 | | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | Unit | 1 | 380.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian | % | 9.5 | 373.000.000 | Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | 373.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi | % | 66.67 | 5.000.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi | Orang | 200 | 1.550.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen TNA (Training NeedAsesment) | Dokumen | 2 | 3.450.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans | % | 40 | 8.000.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | Dokumen | 3 | 8.000.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | | | | | Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian | % | 64 | 60.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n | Orang | 20 | 60.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja | % | 100 | 300.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0003 | | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | Unit | 99 | 300.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi | % | 2.35 | 623.125.000 | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | 623.125.000 | | |
| | | | | | | Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya | % | 50 | 623.125.000 | SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 518.313.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n | Orang | 200 | 518.313.000 | SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI | |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | 104.812.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | Lembaga | 5 | 104.812.000 | SEKSI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI | |
| | | | | | | Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah | Juta Rupiah | 56.5 | 1.150.429.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | | 1.150.429.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas | % | 4.6 | 200.000.000 | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS | |
| | | | | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas | % | 20.67 | 200.000.000 | SEKSI PRODUKTIVITAS | |
| | | 2.07.03.1.03.0001 | | | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi / Peningkatan Produktivitas | Unit | 145 | 200.000.000 | SEKSI PRODUKTIVITAS | |
| | | | | | | Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan | % | 13.22 | 950.429.000 | Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | 925.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga ( penyedia dan pengguna tenaga kerja ) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga ( penyedia dan pengguna tenaga ) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen | Unit | 19 | 51.665.000 | | |
| | | 2.07.03.1.01.0002 | | | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | 51.665.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | Unit | 1 | 51.665.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan | % | 3.42 | 523.335.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0001 | | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | 523.335.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n | Orang | 205 | 523.335.000 | SEKSI PEMASARAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja | % | 100 | 350.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.01.0003 | | | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja | Unit | 1 | 350.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah | | | | | 19.429.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan | % | 8 | 19.429.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.03.0001 | | | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | | | | 19.429.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas | Unit | 5 | 19.429.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan | % | 4 | 6.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 2.07.03.1.04.0001 | | | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah | Dokumen | 1 | 6.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah** | | | | | | | | **246.740.000** | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah | % | 68.57 | 246.740.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2.07.02 | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | | | | | | 246.740.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja | % | 68.57 | 246.740.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | | | | | 246.740.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan | % | 31.43 | 246.740.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | 2.07.02.1.01.0001 | | | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | 80.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | Dokumen | 1 | 80.850.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | 2.07.02.1.01.0003 | | | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | 77.370.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro | Orang | 35 | 77.370.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | 2.07.02.1.01.0004 | | | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | | 88.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro | Orang | 35 | 88.520.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | **Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja** | | | | | | | | **2.580.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan | % | 71.06 | 2.580.000.000 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| | | 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | 2.319.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal | % | 71.05 | 526.500.000 | | |
| | | | | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan izin LPTKS yang diterbitkan | % | 20 | 10.000.000 | | |
| | | 2.07.04.1.02.0002 | | | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | | | | 10.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku | Lembaga | 4 | 10.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | | | | | 516.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN) | % | 19.41 | 516.500.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04.1.03.0001 | | | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | 116.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Dokumen | 1 | 116.500.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04.1.03.0003 | | | Job Fair /Bursa Kerja | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | Orang | 100 | 400.000.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | | | | | Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal | % | 68.3 | 1.792.500.000 | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA | |
| | | | | Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.490.153.000 | | |
| | | | | | | Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota | % | 57.14 | 840.191.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04.1.01.0001 | | | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | | | | 159.581.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 70 | 159.581.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04.1.01.0002 | | | Pelayanan Antar Kerja | | | | 601.830.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD | Orang | 80 | 601.830.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04.1.01.0003 | | | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | | 19.310.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan | Orang | 100 | 19.310.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04.1.01.0004 | | | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) | | | | 59.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL | Orang | 50 | 59.470.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | | | | | Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal . | % | 47.5 | 649.962.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | 2.07.04.1.01.0005 | | | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | 649.962.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja | Orang | 230 | 649.962.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | | | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi | | | | | 289.307.000 | | |
| | | | | | | Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal | % | 50 | 229.667.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | 2.07.04.1.04.0002 | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik | | | | 40.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online | Perusahaan | 15 | 40.200.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | 2.07.04.1.04.0004 | | | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | | | 189.467.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | Orang | 80 | 189.467.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | | | | | Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan | % | 1.51 | 59.640.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | 2.07.04.1.04.0001 | | | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | 50.600.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 60 | 50.600.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | 2.07.04.1.04.0003 | | | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | | | | 9.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA | Orang | 2 | 9.040.000 | SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | |
| | | | | Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 13.040.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA ( Tenaga Kerja Asing ) | % | 100 | 13.040.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.04.1.05.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 13.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA | Orang | 150 | 13.040.000 | SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | |
| | | 3.32.03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | | 261.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian | % | 3.71 | 30.000.000 | Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A | |
| | | | | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan | % | 80 | 30.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 3.32.03.1.01.0006 | | | Pelatihan Transmigrasi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian | Orang | 10 | 30.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | | | | | Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi | % | 3.71 | 231.000.000 | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA | |
| | | | | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | | 231.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi | % | 8.57 | 231.000.000 | SEKSI TRANSMIGRASI | |
| | | 3.32.03.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | | | | 231.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Laporan | 1 | 231.000.000 | SEKSI TRANSMIGRASI | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial** | | | | | | | | **1.908.787.000** | | |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) | % | 91.58 | 1.908.787.000 | | |
| | | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | | 1.908.787.000 | | |
| | | | | | | Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan | % | 98.2 | 349.824.000 | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS | |
| | | | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota | | | | | 349.824.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB | % | 26.97 | 349.824.000 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
| | | 2.07.05.1.01.0001 | | | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial | | | | 125.380.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online | Unit | 105 | 125.380.000 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
| | | 2.07.05.1.01.0002 | | | Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial | | | | 28.881.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online | Unit | 105 | 28.881.000 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
| | | 2.07.05.1.01.0003 | | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | | | | 195.563.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek | Laporan | 140 | 195.563.000 | SEKSI KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk | % | 49.77 | 793.936.000 | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS | |
| | | | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 793.936.000 | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk | % | 49.79 | 521.753.000 | SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | 2.07.05.1.02.0001 | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 241.997.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perselisihan yang Dicegah | Perkara | 30 | 241.997.000 | SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | 2.07.05.1.02.0003 | | | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | | | | 26.963.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang DiverifikasI | Unit | 1000 | 26.963.000 | SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | 2.07.05.1.02.0004 | | | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi | | | | 252.793.000 | | |
| | | | | | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | Unit | 36 | 252.793.000 | SEKSI SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL | |
| | | | | | | Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi | % | 80 | 272.183.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.05.1.02.0005 | | | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | | | | 272.183.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | Unit | 50 | 272.183.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial | % | 96.69 | 308.787.000 | | |
| | | | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 308.787.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan | % | 96.69 | 95.422.000 | | |
| | | 2.07.05.1.02.0002 | | | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 95.422.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | Kasus | 125 | 95.422.000 | | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | | | Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan | % | 36 | 213.365.000 | | |
| | | 2.07.05.1.02.0001 | | | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 213.365.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perselisihan yang dicegah | Kasus | 222 | 213.365.000 | | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | | | Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah | % | 45.54 | 456.240.000 | Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS | |
| | | | | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | | | | | 456.240.000 | | |
| | | | | | | Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota | % | 2.16 | 456.240.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.05.1.03.0001 | | | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | | | | 278.055.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penetapan UMP | Laporan | 1 | 278.055.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.05.1.03.0003 | | | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) | | | | 54.291.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penetapan UMK | Laporan | 1 | 54.291.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | |
| | | 2.07.05.1.03.0005 | | | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | 123.894.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Orang | 180 | 123.894.000 | SEKSI PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **99.455.101.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Keluarga Berkualitas** | | | | | | | | | **965.000.000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan | % | 2 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | **Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | | | | | | | **320.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha | % | 100 | 320.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | | | 320.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan | % | 32 | 320.000.000 | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera | |
| | | | | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | ASFR (Age Specific Fertility Rate) | Angka | 18.7 | 100.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | |
| | | 2.14.04.1.01.0008 | | | Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB | Kelompok | 1 | 40.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.04.1.01.0020 | | | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | Kabupaten/ Kota | 3 | 60.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha | % | 30 | 220.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | |
| | | 2.14.04.1.02.0006 | | | Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas | Kabupaten/ Kota | 2 | 40.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.04.1.02.0007 | | | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Laporan | 1 | 40.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.14.04.1.02.0008 | | | Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Kelompok | 2 | 140.000.000 | SEKSI KELUARGA SEJAHTERA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Terkendalinya Jumlah Penduduk** | | | | | | | | **645.000.000** | | |
| | | | | | | Angka Kelahiran Total (TFR) | Angka | 2.12 | 645.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | | | | 195.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan | % | 57 | 195.000.000 | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera | |
| | | | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan | Kabupaten/ Kota | 20 | 190.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | |
| | | 2.14.02.1.01.0002 | | | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | Dokumen | 2 | 35.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.02.1.01.0007 | | | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | Dokumen | 2 | 50.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.02.1.01.0015 | | | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain | Kabupaten/ Kota | 1 | 15.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.02.1.01.0017 | | | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga | | | | 90.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kencana) | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Dokumen | 1 | 90.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | |
| | | 2.14.02.1.02.0008 | | | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) | % | 65.99 | 380.000.000 | Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE | |
| | | | | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP | % | 31 | 380.000.000 | SEKSI KELUARGA BERENCANA | |
| | | 2.14.03.1.01.0007 | | | Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal | Dokumen | 20 | 180.000.000 | SEKSI KELUARGA BERENCANA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.14.03.1.01.0012 | | | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | Kabupaten/ Kota | 7 | 200.000.000 | SEKSI KELUARGA BERENCANA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Unmetneed | % | 9.9 | 70.000.000 | Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE | |
| | | | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas | % | 15 | 70.000.000 | SEKSI KELUARGA BERENCANA | |
| | | 2.14.03.1.02.0002 | | | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Kelompok | 3 | 70.000.000 | SEKSI KELUARGA BERENCANA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan** | | | | | | | | | **1.060.000.000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | |
| | | | | | | Pengeluaran perempuan per kapita | Ribu Rupiah | 9950 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | **Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan** | | | | | | | | **1.060.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha | % | 35 | 1.060.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan | % | 65 | 1.000.000.000 | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | |
| | | | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi | % | 10 | 80.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.02.1.01.0006 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi | Laporan | 2 | 25.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.02.1.01.0007 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | Dokumen | 50 | 30.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.02.1.01.0008 | | | Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi | Orang | 25 | 25.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | | | | | 920.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya | % | 75 | 920.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.02.1.02.0003 | | | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | | | | 880.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Orang | 1280 | 880.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.02.1.02.0004 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | | | | 40.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Kelompok | 3 | 40.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar | % | 20 | 60.000.000 | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | |
| | | | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak | % | 100 | 60.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | |
| | | 2.08.04.1.01.0001 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | OPD | 10 | 60.000.000 | SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **16.646.242.000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 74 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **16.421.242.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 88 | 16.421.242.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 16.271.242.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 90 | 608.960.000 | | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 255.960.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 90 | 255.960.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 255.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 255.960.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 57.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 90 | 57.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 1.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 1.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 1.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 50.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 5 | 1.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 1.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 280.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 50.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 230.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | | 14.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 10.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 2.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 2.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 90 | 15.662.282.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 12.926.902.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 12.926.902.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 12.508.502.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 60 | 12.508.502.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 368.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 368.400.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 67.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 67.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 65.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 2.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 90 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 20 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 587.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 90 | 587.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 55.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 55.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 270.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 12.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 5 | 12.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.742.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 1.742.880.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.242.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.242.880.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 291.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 291.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 24 | 160.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 0 | 1.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak | % | 30 | 150.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA | % | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | 2.08.05.1.01.0001 | | | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia | Dokumen | 6 | 150.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **225.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.8 | 225.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 50 | 225.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 50 | 225.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 1 | 110.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 115.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 1 | 115.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak** | | | | | | | | | **513.510.000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | |
| | | | | | | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Angka | 67 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | **Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak** | | | | | | | | **260.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) | Angka | 73 | 260.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar | % | 20 | 75.000.000 | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | |
| | | | | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak | % | 100 | 75.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | |
| | | 2.08.04.1.03.0001 | | | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Orang | 20 | 75.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | | | 185.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya | % | 82.86 | 185.000.000 | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | |
| | | | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA | Kabupaten/ Kota | 4 | 150.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | |
| | | 2.08.06.1.01.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Dokumen | 2 | 60.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.08.06.1.01.0003 | | | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | OPD | 10 | 90.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE | Kelompok | 20 | 35.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | |
| | | 2.08.06.1.02.0005 | | | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Kegiatan | 1 | 20.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.06.1.02.0006 | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak | Kegiatan | 1 | 15.000.000 | SEKSI PEMENUHAN HAK ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak** | | | | | | | | **253.510.000** | | |
| | | | | | | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | Angka | 76 | 253.510.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | | | 253.510.000 | | |
| | | | | | | Persentase korban kekerasan anak terlayani | % | 100 | 70.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif | % | 100 | 70.000.000 | | |
| | | 2.08.07.1.02.0005 | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | Orang | 50 | 20.000.000 | | |
| | | 2.08.07.1.02.0006 | | | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Orang | 35 | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio korban kekerasan terhadap anak | per 100.000 penduduk | 11.8 | 183.510.000 | Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | |
| | | | | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 50.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak | % | 34.2 | 50.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | 2.08.07.1.01.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.07.1.01.0005 | | | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 133.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya | Kelompok | 15 | 133.510.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | 2.08.07.1.03.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 2.500.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.07.1.03.0004 | | | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi | Kegiatan | 1 | 2.500.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | 2.08.07.1.03.0006 | | | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | |
| | | 2.08.07.1.03.0007 | | | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi | Orang | 20 | 15.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.07.1.03.0008 | | | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan | | | | 98.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi | Orang | 25 | 98.510.000 | SEKSI PERLINDUNGAN ANAK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan** | | | | | | | | | **977.550.000** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | |
| | | | | | | Rasio kekerasan terhadap perempuan | Per 100.000 | 5.5 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |
| | **Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan** | | | | | | | | **977.550.000** | | |
| | | | | | | Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan | Per 100.000 | 4.2 | 977.550.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | | | 977.550.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar | % | 22 | 927.510.000 | Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | |
| | | | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan | % | 52 | 80.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | 2.08.03.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.03.1.01.0002 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | OPD | 1 | 50.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | | | | | 847.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya | Kelompok | 12 | 847.510.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | |
| | | 2.08.03.1.03.0001 | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.03.1.03.0002 | | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | | | | 34.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Orang | 10 | 34.510.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.03.1.03.0003 | | | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik | Orang | 25 | 20.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.03.1.03.0004 | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 743.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 3 | 743.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | % | 100 | 50.040.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 50.040.000 | | |
| | | | | | | Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif | % | 100 | 50.040.000 | | |
| | | 2.08.03.1.02.0001 | | | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat | Orang | 50 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.08.03.1.02.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | | | | 30.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Orang | 5 | 30.040.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **20.162.302.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **21.255.029.000** | **Dinas Ketahanan Pangan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 82 | | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **20.505.029.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83 | 20.505.029.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 20.505.029.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 19.872.529.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 16.104.222.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 3 | 16.104.222.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 15.316.222.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 93 | 15.316.222.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 378.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 378.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 410.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Laporan | 12 | 410.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 118.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 118.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 18.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0005 | | | Pengolahan Data Retribusi Daerah | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 197.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 197.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 197.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 197.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.038.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.038.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 78.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 650.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 95.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 671.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 15 | 671.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 671.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 15 | 671.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.344.062.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 36 | 1.344.062.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 414.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 414.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 930.062.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 930.062.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 393.645.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 100 | 393.645.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 25 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 163.645.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 163.645.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 50 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP | % | 100 | 632.500.000 | Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 74.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP | % | 100 | 74.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 4 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP | Unit | 15 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 348.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP | Laporan | 26 | 348.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 186.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 186.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 162.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 162.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP | Unit | 17 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **750.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.97 | 750.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 750.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 750.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 7 | 380.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 370.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 18 | 370.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| **Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (I)** | | | | | | | | | **12.873.888.000** | **Dinas Ketahanan Pangan** | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Pangan | Skor | 85.34 | | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | **Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan** | | | | | | | | **7.440.000.000** | | |
| | | | | | | Rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras) | % | 10 | 7.440.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | 7.440.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku | % | 55 | 7.440.000.000 | Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan | |
| | | | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | 7.440.000.000 | | |
| | | | | | | PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA | % | 4 | 1.500.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH | Dokumen | 12 | 500.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | |
| | | | | | | VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN | Ton | 700 | 1.000.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | |
| | | | | | | PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP | % | 100 | 5.940.000.000 | SEKSI HARGA PANGAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.09.03.1.01.0009 | | | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi | | | | 5.940.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN | Dokumen | 12 | 190.000.000 | SEKSI HARGA PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH INTERVENSI HARGA PANGAN | Paket | 3 | 5.750.000.000 | SEKSI HARGA PANGAN | |
| | **Meningkatkan Ketersediaan Pangan** | | | | | | | | **5.433.888.000** | | |
| | | | | | | Angka Kecukupan Energi | kkal/kapita/h | 3801 | 5.433.888.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | 5.433.888.000 | | |
| | | | | | | Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi | Angka | 0.38 | 5.333.888.000 | Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan | |
| | | | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi | | | | | 5.333.888.000 | | |
| | | | | | | PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI | % | 10 | 5.333.888.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.02.0005 | | | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | | | | 5.333.888.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH YANG DIKELOLA | Ton | 350 | 5.333.888.000 | SEKSI CADANGAN PANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Rata-rata ketercukupan pangan | Angka | 1.25 | 100.000.000 | Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan | |
| | | | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.01.0013 | | | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG DISUSUN | Dokumen | 12 | 100.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI PANGAN | |
| **Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)** | | | | | | | | | **7.980.000.000** | **Dinas Ketahanan Pangan** | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Pangan | Skor | 85.34 | | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | **Meningkatkan Keterjangkauan / Akses Pangan** | | | | | | | | **4.055.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase penanganan kecamatan rawan pangan | % | 6 | 4.055.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP) | kg/kapita/tahun | 87.7 | 125.000.000 | Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan | |
| | | | | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi | | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | PPH KAB/KOTA > 87 (DRP) | Angka | 34 | 125.000.000 | SEKSI KONSUMSI PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.04.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI | Desa | 5 | 125.000.000 | SEKSI KONSUMSI PANGAN | |
| | | 2.09.04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | | 3.930.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi | % | 0.01 | 3.930.000.000 | Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi | | | | | 3.930.000.000 | | |
| | | | | | | PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI | % | 5.5 | 3.930.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | 2.09.04.1.02.0004 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi | | | | 3.930.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI YANG DIFASILITASI | Desa | 12 | 3.360.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH DESA STUNTING YANG DIINTERVENSI | Desa | 24 | 50.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH PETA FSVA YANG DISUSUN | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH REKOMENDASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | TERSUSUNNYA DOKUMEN MENEJEMEN FOOD LOSS DAN ATAU FOOD WASTE | Dokumen | 1 | 400.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | | | | | | TERSUSUNNYA PETA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI | Dokumen | 12 | 50.000.000 | SEKSI KERAWANAN PANGAN | |
| | **Meningkatkan Pemanfaatan Pangan** | | | | | | | | **3.925.000.000** | | |
| | | | | | | Skor PPH provinsi | Skor | 95.2 | 3.925.000.000 | Dinas Ketahanan Pangan | |
| | | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | 1.625.000.000 | | |
| | | | | | | Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah | kg/kapita/tahun | 87.7 | 1.625.000.000 | Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan | |
| | | | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN | Dokumen | 1 | 750.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL | |
| | | 2.09.03.1.01.0002 | | | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL YANG DIFASILITASI | Kelompok | 10 | 750.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL | |
| | | | | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi | | | | | 875.000.000 | | |
| | | | | | | PPH Kab / Kota > 87 | Angka | 34 | 875.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.04.0001 | | | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | 510.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal | Lokasi | 6 | 410.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | |
| | | | | | | Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan | Paket | 650 | 100.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | |
| | | 2.09.03.1.04.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | | | | 365.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DESA B2SA YANG DIFASILITASI | Desa | 5 | 125.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH DOKUMEN ANALISIS PPH | Dokumen | 1 | 240.000.000 | SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | | 2.300.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan | % | 92 | 1.000.000.000 | Bidang Keamanan Pangan | |
| | | | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN* | Dokumen | 1 | 280.000.000 | SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN | |
| | | 2.09.05.1.01.0011 | | | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN | Orang | 200 | 280.000.000 | SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN** | Dokumen | 1 | 300.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | 2.09.05.1.01.0011 | | | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGAR YANG DIAWASI | sampel | 160 | 300.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | | | | | Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran | % | 67 | 50.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | 2.09.05.1.01.0011 | | | Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | JUMLAH LOKASI PENGAWASAN IJIN EDAR | Lokasi | 42 | 50.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | | | | | PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA | % | 20 | 370.000.000 | SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | 2.09.05.1.01.0009 | | | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 370.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu | Kelompok | 4 | 165.000.000 | SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | | | | | JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN HIGIENE SANITASI | Kelompok | 20 | 205.000.000 | SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan | % | 80 | 1.300.000.000 | Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | |
| | | | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai | Dokumen | 2 | 1.300.000.000 | SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN | |
| | | 2.09.05.1.01.0006 | | | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan | Dokumen | 35 | 650.000.000 | SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN | |
| | | 2.09.05.1.01.0010 | | | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sampel Pangan yang Diuji | sampel | 90 | 650.000.000 | SEKSI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI PANGAN | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **42.108.917.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas air** | | | | | | | | | **1.906.015.000** | **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** | |
| | | | | | | Indeks Kualitas Air | Angka | 68.71 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | **Menurunnya pencemaran air permukaan** | | | | | | | | **1.906.015.000** | | |
| | | | | | | Indeks Pencemaran Air | Angka | 3.35 | 1.906.015.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 434.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun | % | 100 | 434.000.000 | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup | |
| | | | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup | Dokumen | 3 | 200.000.000 | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.02.1.01.0002 | | | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi | Dokumen | 3 | 200.000.000 | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | | | | | 234.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi | Dokumen | 10 | 234.000.000 | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.02.1.02.0005 | | | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS | | | | 234.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | Dokumen | 10 | 234.000.000 | SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 658.015.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengujian kualitas air | % | 100 | 458.015.000 | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A | |
| | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | | | | | 458.015.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air | Dokumen | 1 | 458.015.000 | SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN | |
| | | 2.11.03.1.01.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | 458.015.000 | | |
| | | | | | | Jumlah titik pengujian kualitas air | sampel | 380 | 458.015.000 | SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase sungai yang meningkat kualitasnya | % | 4.76 | 200.000.000 | Bidang  Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | |
| | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah | Unit | 105 | 200.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.03.1.01.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran air | Unit | 140 | 200.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN | | | | | | 50.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase limbah B3 yang terkelola | % | 80 | 50.000.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | |
| | | | | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola | Ton | 1476440 | 50.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | |
| | | 2.11.05.1.01.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 denganPemerintah dalam rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | | | 564.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan | % | 50 | 230.000.000 | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha berijin yang taat | Unit | 15 | 230.000.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | |
| | | 2.11.06.1.01.0006 | | | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Kegiatan | 30 | 230.000.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi lingkungan hidup | % | 100 | 334.000.000 | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 334.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan | Dokumen | 10 | 334.000.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | 334.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang difasilitasi | Dokumen | 10 | 334.000.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengaduan yang ditangani | % | 100 | 200.000.000 | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan | |
| | | | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan aduan yang ditangani | Laporan | 12 | 200.000.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | |
| | | 2.11.10.1.01.0007 | | | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani | Laporan | 12 | 200.000.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **143.165.195.000** | **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **142.615.195.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 85 | 142.615.195.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 142.615.195.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 134.576.707.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 130.520.707.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 130.520.707.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 130.370.707.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 677 | 130.370.707.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 61.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Laporan | 1 | 61.400.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 88.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 88.600.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 190.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 190.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 95.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 5 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 801.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 801.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 81.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 81.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 410.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 410.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.318.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 2.318.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 728.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 728.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 651.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 5 | 651.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 491.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 19 | 491.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden | % | 100 | 778.840.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 37.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada KR Baturraden | Dokumen | 1 | 37.800.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 37.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Kebun Raya Baturraden | Paket | 1 | 37.800.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 140.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden | % | 100 | 140.400.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden | Paket | 1 | 5.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden | Paket | 1 | 4.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Paket | 1 | 8.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 9.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Paket | 1 | 9.600.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 48.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden | Paket | 1 | 48.800.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Kebun Raya Baturraden | Laporan | 1 | 15.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Kebun Raya Baturraden | Laporan | 1 | 50.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 443.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada KR Baturraden | Laporan | 1 | 443.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Kebun Raya Baturraden | Laporan | 1 | 1.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 85.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan balai kebun raya baturraden | Laporan | 1 | 85.200.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 1 | 5.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 351.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden | Laporan | 1 | 351.800.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 157.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden | Unit | 1 | 157.640.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 3 | 80.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 1 | 3.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 17 | 21.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 33.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Kebun Raya Baturraden | Unit | 5 | 33.640.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai kebun Raya Baturraden | Unit | 3 | 20.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Tahura | % | 100 | 783.532.000 | Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada TAHURA | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Tahura | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 82.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA | % | 100 | 82.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai Tahura | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai tahura | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Tahura | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Tahura | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai Tahura | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Tahura | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Tahura | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 497.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada TAHURA | Laporan | | 497.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Tahura | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Balai Tahura | Laporan | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Tahura | Laporan | 1 | 6.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 414.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Tahura | Laporan | 1 | 414.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 179.232.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada TAHURA | Unit | | 179.232.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 155.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Tahura | Unit | 3 | 155.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Tahura | Unit | 7 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 13.982.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura | Unit | 4 | 13.982.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H | % | 100 | 518.000.000 | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah BPL2H | Dokumen | 1 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 121.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 121.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BPL2H | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BPL2H | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BPL2H | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BPL2H | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan BPL2H | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BPL2H | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 86.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi BPL2H | Laporan | 1 | 86.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BPL2H | Unit | 1 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 181.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 181.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat BPL2H | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BPL2H | Laporan | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BPL2H | Laporan | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 170.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BPL2H | Unit | 3 | 140.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BPL2H | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH | % | 100 | 481.992.000 | Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 81.652.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH | % | 100 | 81.652.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BSPTH | Paket | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BSPTH | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BSPTH | Paket | 1 | 3.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BSPTH | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BSPTH | Laporan | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 39.152.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah BSPTH | Laporan | 1 | 39.152.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 357.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BSPTH | Laporan | 1 | 357.840.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 135.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BSPTH | Laporan | 1 | 135.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 222.240.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BSPTH | Laporan | 1 | 222.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH | Unit | 1 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 29.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BSPTH | Unit | 3 | 29.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BSPTH | Unit | 12 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH | Unit | 2 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1 | % | 100 | 603.000.000 | CDK 1 | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1 | % | 100 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 1 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 1 | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan<br>CDK 1 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan<br>CDK 1 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan<br>CDK 1 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 1 | Laporan | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 1 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 357.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1 | Laporan | 1 | 357.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 1 | Laporan | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 1 | Laporan | 1 | 85.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 1 | Laporan | 1 | 270.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 146.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1 | Unit | 1 | 146.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 116.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya<br>CDK 1 | Unit | 3 | 116.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10 | % | 100 | 494.500.000 | CDK 10 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 10 | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 10 | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 81.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10 | % | 100 | 81.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 10 | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 10 | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 10 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 10 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 10 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 10 | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 10 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 288.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 10 | Laporan | 1 | 288.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 10 | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 117.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 10 | Laporan | 1 | 117.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 10 | Laporan | 1 | 170.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10 | Unit | 1 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 10 | Unit | 2 | 85.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 10 | Unit | 38 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11 | % | 100 | 432.000.000 | CDK 11 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 11 | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 11 | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 81.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11 | % | 100 | 81.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 11 | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 11 | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 11 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 11 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 11 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 11 | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 11 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 216.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 11 | Laporan | 1 | 216.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 11 | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 11 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 11 | Laporan | 1 | 165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11 | Unit | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 11 | Unit | 2 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 11 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOGIRI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2 | % | 100 | 490.000.000 | CDK 2 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 2 | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 2 | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 81.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2 | % | 100 | 81.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 2 | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 2 | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 2 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 2 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 2 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 2 | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 2 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 304.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 2 | Laporan | 1 | 304.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 2 | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 2 | Laporan | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 243.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 2 | Laporan | 1 | 243.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2 | Unit | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 2 | Unit | 2 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 2 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3 | % | 100 | 537.800.000 | CDK 3 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 3 | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 3 | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 91.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3 | % | 100 | 91.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 3 | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 3 | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 3 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 3 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 3 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 3 | Laporan | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi CDK 3 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 326.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 3 | Laporan | 1 | 326.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 3 | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 3 | Laporan | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 235.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 3 | Laporan | 1 | 235.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3 | Unit | 1 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 3 | Unit | 2 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 3 | Unit | 0 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4 | % | 100 | 572.750.000 | CDK 4 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 4 | Dokumen | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 4 | Dokumen | 1 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 81.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4 | % | 100 | 81.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 4 | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4 | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 4 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 4 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 4 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 4 | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 4 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 377.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 4 | Laporan | 1 | 377.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 4 | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 81.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 4 | Laporan | 1 | 81.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4 | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 290.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 4 | Laporan | 1 | 290.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4 | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 4 | Unit | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 4 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5 | % | 100 | 479.300.000 | CDK 5 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 5 | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 5 | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 80.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5 | % | 100 | 80.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 5 | Paket | 1 | 3.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 5 | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 5 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 4.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 5 | Paket | 1 | 4.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 5 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 5 | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 5 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 309.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 5 | Laporan | 1 | 309.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 5 | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 5 | Laporan | 1 | 78.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 5 | Laporan | 1 | 230.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5 | Unit | 1 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 5 | Unit | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 5 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6 | % | 100 | 552.000.000 | CDK 6 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 6 | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 6 | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 81.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 6 | % | 100 | 81.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 6 | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6 | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 6 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 6 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 6 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 6 | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 6 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 331.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 6 | Laporan | 1 | 331.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 6 | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 6 | Laporan | 1 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6 | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 6 | Laporan | 1 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6 | Unit | 1 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 6 | Unit | 2 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 6 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7 | % | 100 | 445.591.000 | CDK 7 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 7 | Dokumen | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 7 | Dokumen | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 91.191.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 7 | % | 100 | 91.191.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 7 | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 7 | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 7 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 7.710.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 7 | Paket | 1 | 7.710.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 3.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 7 | Paket | 1 | 3.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 7 | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 59.281.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 7 | Laporan | 1 | 59.281.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 249.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 7 | Laporan | 1 | 249.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 7 | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 46.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 7 | Laporan | 1 | 46.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 202.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 7 | Laporan | 1 | 202.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 102.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7 | Unit | 1 | 102.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 82.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 7 | Unit | 2 | 82.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 7 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8 | % | 100 | 461.183.000 | CDK 8 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 6.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 8 | Dokumen | 1 | 6.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 6.700.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 8 | Dokumen | 1 | 6.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8 | % | 100 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 8 | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8 | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 8 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 8 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 8 | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 8 | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 8 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 284.483.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 8 | Laporan | 1 | 284.483.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 8 | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 46.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 8 | Laporan | 1 | 46.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8 | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 231.983.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 8 | Laporan | 1 | 231.983.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8 | Unit | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 8 | Unit | 2 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 8 | Unit | 40 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9 | % | 100 | 408.000.000 | CDK 9 | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 9 | Dokumen | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 9 | Dokumen | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 88.440.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9 | % | 100 | 88.440.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 9 | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 9 | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 8.690.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 9 | Paket | 1 | 8.690.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 8.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 9 | Paket | 1 | 8.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 9 | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 9 | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 9 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 213.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 9 | Laporan | 1 | 213.560.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 9 | Laporan | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 9 | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 162.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 9 | Laporan | 1 | 162.560.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 100.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9 | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 9 | Unit | 2 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 9 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9 | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **550.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 550.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 550.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 550.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 9 | 300.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 5 | 250.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas tutupan lahan** | | | | | | | | | **8.012.689.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Angka | 59.46 | | | |
| | **Meningkatnya luasan tutupan lahan** | | | | | | | | **8.012.689.000** | | |
| | | | | | | Luas tutupan lahan | Ha | 1022457 | 8.012.689.000 | | |
| | | 3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | | | | | | 5.854.089.000 | | |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani | % | 0.22 | 105.000.000 | | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) | Ha | 811 | 105.000.000 | | |
| | | 3.28.03.1.04.0001 | | | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL) | Dokumen | 1 | 30.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.04.0008 | | | Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan | Dokumen | 3 | 75.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1 | % | 0.01 | 426.800.000 | CDK 1 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 426.800.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK1 | Ha | 43 | 426.800.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 188.400.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1 | Ha | 25 | 188.400.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 238.400.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1 | Ha | 18 | 238.400.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10 | % | 0.01 | 379.832.000 | CDK 10 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 379.832.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 10 | Ha | 29 | 379.832.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10 | Ha | 13 | 200.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 179.832.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10 | Ha | 16 | 179.832.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11 | % | 0.02 | 350.000.000 | CDK 11 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 11 | Ha | 65 | 350.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11 | Ha | 42 | 200.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11 | Ha | 23 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2 | % | 0.01 | 350.000.000 | CDK 2 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK2 | Ha | 56 | 350.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2 | Ha | 30 | 200.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2 | Ha | 26 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3 | % | 0.01 | 438.000.000 | CDK 3 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 438.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK3 | Ha | 52 | 438.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 244.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3 | Ha | 32 | 244.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 194.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3 | Ha | 20 | 194.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4 | % | 0.02 | 350.000.000 | CDK 4 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK4 | Ha | 83 | 350.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4 | Ha | 60 | 200.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4 | Ha | 23 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5 | % | 0.02 | 350.000.000 | CDK 5 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 5 | Ha | 60 | 350.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5 | Ha | 40 | 200.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5 | Ha | 20 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6 | % | 0.03 | 386.000.000 | CDK 6 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 386.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 6 | Ha | 124 | 386.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6 | Ha | 70 | 200.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 186.000.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6 | Ha | 54 | 186.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7 | % | 0.03 | 371.149.000 | CDK 7 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 371.149.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 7 | Ha | 121 | 371.149.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 245.029.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7 | Ha | 80 | 245.029.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 126.120.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7 | Ha | 41 | 126.120.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8 | % | 0.03 | 377.000.000 | CDK 8 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 377.000.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 8 | Ha | 94 | 377.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 227.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8 | Ha | 75 | 227.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8 | Ha | 19 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9 | % | 0.02 | 387.440.000 | CDK 9 | |
| | | | | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | | 387.440.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 9 | Ha | 84 | 387.440.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.03.1.04.0002 | | | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 237.440.000 | | |
| | | | | | | Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9 | Ha | 60 | 237.440.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 3.28.03.1.04.0004 | | | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9 | Ha | 24 | 150.000.000 | SEKSI REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani | % | 100 | 142.000.000 | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | | | | | 142.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan | Dokumen | 1 | 142.000.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | |
| | | 3.28.03.1.05.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | | | | 142.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan | Dokumen | 1 | 142.000.000 | SEKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi bibit | % | -90 | 836.428.000 | Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A | |
| | | | | Perbenihan Tanaman Hutan | | | | | 836.428.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi | Bibit | 1300000 | 749.678.000 | SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH | |
| | | 3.28.03.1.09.0006 | | | Pembangunan Sumber Benih | | | | 749.678.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang diproduksi | Bibit | 100000 | 653.088.000 | SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH | |
| | | | | | | Luas sumber benih yang dibangun | Ha | 0.5 | 96.590.000 | SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH | Sertifikat | 75 | 86.750.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | |
| | | 3.28.03.1.09.0001 | | | Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi teknis penetapan pengada/ pengedar benih dan/atau bibit terdaftar | Dokumen | 3 | 6.000.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.09.0002 | | | Sertifikasi Sumber Benih | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan | Sertifikat | 3 | 6.000.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.09.0003 | | | Sertifikasi Mutu Benih | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat mutu benih yang diterbitkan | Sertifikat | 3 | 10.000.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.09.0004 | | | Sertifikasi Mutu Bibit | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat mutu bibit yang diterbitkan | Sertifikat | 10 | 15.000.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.09.0005 | | | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | | | | 49.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data (Asal usul, jenis mutu) Benih Atau Bibit yang beredar | Dokumen | 2 | 49.750.000 | SEKSI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan | % | 45.99 | 567.000.000 | | |
| | | | | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | | | | | 192.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan | Unit | 82 | 192.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.28.03.1.03.0001 | | | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi | Dokumen | 4 | 50.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.03.0004 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | | | | 142.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi | Dokumen | 12 | 142.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang | Unit | 8 | 150.000.000 | | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit managemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi | Unit | 8 | 100.000.000 | | |
| | | 3.28.03.1.06.0004 | | | Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit managemen PBPHH HHBK skala kecil dan menengah yang tertib | Unit | 2 | 50.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan | Unit | 183 | 225.000.000 | | |
| | | 3.28.03.1.07.0001 | | | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit managemen yang melaksanakan tertib pelaporan RKOPHH untuk pemegang PBPHH skala usaha kecil dan menengah | Unit | 12 | 75.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.07.0002 | | | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH berkapasitas 2.000-6.000 m3/tahun | Unit | 12 | 75.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.03.1.07.0003 | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah permohonan PBPHH kayu skala kecil dan menengah yang dilayani | Unit | 12 | 75.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9 | % | 0 | 37.440.000 | CDK 9 | |
| | | | | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | | | | | 37.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 9 | Unit | 0 | 37.440.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.03.1.06.0003 | | | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | | | | 37.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 9 | Unit | 6 | 37.440.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | | | | | | 824.768.000 | | |
| | | | | | | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura | Angka | 71 | 475.968.000 | Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | | | | | 475.968.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I | Dokumen | 2 | 152.400.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | |
| | | 3.28.04.1.01.0006 | | | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah permohonan pelayanan pemanfaatan di tahura yang ditindaklanjuti | Dokumen | 55 | 30.000.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 3.28.04.1.01.0007 | | | Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi | | | | 22.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kerja sama penyelenggaraan tahura yag dilaksanakan | Dokumen | 3 | 22.400.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 3.28.04.1.01.0011 | | | Perencanaan Pengelolaan TAHURA | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana pengelolaan Tahura (Jangka panjang dan jangka pendek) yang ditetapkan | Dokumen | 2 | 100.000.000 | SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I | Ha | 231.3 | 323.568.000 | SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | |
| | | 3.28.04.1.01.0002 | | | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi | | | | 158.736.000 | | |
| | | | | | | Operasi kegiatan pengamanan kawasan tahura provinsi | Bulan | 12 | 158.736.000 | SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 3.28.04.1.01.0003 | | | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi | | | | 72.600.000 | | |
| | | | | | | Luas kawasan tahura yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi | Ha | 20 | 72.600.000 | SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | 3.28.04.1.01.0005 | | | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi | | | | 92.232.000 | | |
| | | | | | | Luas areal tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem | Ha | 10 | 92.232.000 | SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | | | | | Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani | % | 10 | 50.000.000 | | |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar | Dokumen | 2 | 50.000.000 | | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES | Laporan | 2 | 50.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif | % | 60 | 160.800.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | | | | | 160.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem | Dokumen | 3 | 160.800.000 | | |
| | | 3.28.04.1.03.0005 | | | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 160.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan/pengendalian pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting | Dokumen | 3 | 160.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden | % | 100 | 138.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix ) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 138.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis Tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden | Jenis | 705 | 138.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | |
| | | 3.28.04.1.02.0001 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | | | | 138.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES | Dokumen | 1 | 138.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | | | | | | 1.005.832.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat | % | 2.5 | 217.000.000 | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 217.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya | Kelompok | 25 | 217.000.000 | SEKSI PENYULUHAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas | Orang | 90 | 50.000.000 | SEKSI PENYULUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 107.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi | Dokumen | 2 | 107.000.000 | SEKSI PENYULUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian Perhutanan Sosial | Dokumen | 2 | 60.000.000 | SEKSI PENYULUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1 | % | 0.3 | 193.600.000 | CDK 1 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 193.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK1 | Kelompok | 3 | 193.600.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 193.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 1 | Kelompok | 130 | 193.600.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10 | % | 0.2 | 69.832.000 | CDK 10 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 69.832.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 10 | Kelompok | 2 | 69.832.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 29.832.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 10 | Orang | 60 | 29.832.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 10 | Kelompok | 105 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11 | % | 0.2 | 80.000.000 | CDK 11 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 11 | Kelompok | 2 | 80.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 11 | Orang | 40 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 11 | Kelompok | 57 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2 | % | 0.2 | 40.000.000 | CDK 2 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK2 | Kelompok | 2 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 2 | Kelompok | 101 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3 | % | 0.2 | 129.400.000 | CDK 3 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 129.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK3 | Kelompok | 2 | 129.400.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 84.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 3 | Kelompok | 109 | 84.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 3.28.05.1.01.0003 | | | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | | | | 45.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 3 | Unit | 1 | 45.400.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4 | % | 0.2 | 40.000.000 | CDK 4 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 4 | Kelompok | 2 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 4 | Kelompok | 54 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5 | % | 0.3 | 40.000.000 | CDK 5 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 5 | Kelompok | 3 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 5 | Kelompok | 75 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6 | % | 0.2 | 76.000.000 | CDK 6 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 76.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 6 | Kelompok | 2 | 76.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 76.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 6 | Kelompok | 107 | 76.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7 | % | 0.3 | 40.000.000 | CDK 7 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 7 | Kelompok | 3 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 7 | Kelompok | 121 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8 | % | 0.2 | 40.000.000 | CDK 8 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 8 | Kelompok | 2 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 8 | Kelompok | 72 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9 | % | 0.2 | 40.000.000 | CDK 9 | |
| | | | | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 9 | Kelompok | 2 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | |
| | | 3.28.05.1.01.0002 | | | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 9 | Kelompok | 69 | 40.000.000 | SEKSI PENYULUHAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.28.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | | | | 328.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani | % | 10 | 328.000.000 | | |
| | | | | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 328.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya | Unit | 2 | 298.000.000 | | |
| | | 3.28.06.1.01.0002 | | | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | | | | 114.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS | Dokumen | 5 | 114.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.28.06.1.01.0004 | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | | | | 184.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pengelolaan DAS | Kelompok | 2 | 184.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS | Dokumen | 2 | 30.000.000 | | |
| | | 3.28.06.1.01.0005 | | | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga yang dibentuk dan/atau dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS | Unit | 2 | 30.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas udara** | | | | | | | | | **4.134.486.000** | **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan** | |
| | | | | | | Indeks Kualitas Udara | Angka | 84.91 | | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | **Menurunnya pencemaran udara** | | | | | | | | **4.134.486.000** | | |
| | | | | | | Indeks SO2 dan NO2 | Angka | 0.3696 | 4.134.486.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 1.695.373.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya | % | 2.85 | 943.388.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | |
| | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | | | | | 943.388.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penurunan emisi grk di tingkat tapak | tCO2e | 20000 | 759.388.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.03.1.01.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | 759.388.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan | Dokumen | 1 | 78.345.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang teregistrasi | Lokasi | 100 | 681.043.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu udara emisi | Unit | 105 | 184.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.03.1.01.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | 184.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran udara | Unit | 140 | 184.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemantauan kualitas udara | % | 100 | 401.985.000 | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A | |
| | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | | | | | 401.985.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara | Dokumen | 1 | 401.985.000 | SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN | |
| | | 2.11.03.1.01.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | 401.985.000 | | |
| | | | | | | Jumlah titik pengujian kualitas udara | sampel | 130 | 401.985.000 | SEKSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan | % | 100 | 350.000.000 | Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A | |
| | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan | Dokumen | 1 | 350.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN | |
| | | 2.11.03.1.01.0015 | | | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan | Dokumen | 72 | 170.750.000 | SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah peralatan laboratorium yang terpelihara / terkalibrasi | Unit | 28 | 179.250.000 | SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | | | 745.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani | % | 0.4 | 210.000.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | |
| | | | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani | Ha | 10 | 210.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.04.1.01.0001 | | | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun / ditetapkan / dievaluasi | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.11.04.1.01.0004 | | | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi | Ha | 10 | 100.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.11.04.1.01.0006 | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Kehati | Orang | 60 | 80.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden | % | 2.6 | 535.000.000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
| | | | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | | | | | 535.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden | Unit | 2 | 535.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | |
| | | 2.11.04.1.01.0003 | | | Pengelolaan Kebun Raya | | | | 535.000.000 | | |
| | | | | | | Luas Kebun Raya yang dikelola lingkup Kewenangan Provinsi | Ha | 143.5 | 535.000.000 | Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | | | 1.305.113.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah | % | 33 | 350.000.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | |
| | | | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 350.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Kab/Kota yang ditingkatnkan kapasitas pengurangan sampah | Kabupaten/Kota | 2 | 350.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | |
| | | 2.11.08.1.01.0005 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait pengurangan sampah | Kelompok | 2 | 350.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | |
| | | | | | | Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 25 | 50.000.000 | Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Perlindungan Hutan | |
| | | | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) | Unit | 2 | 50.000.000 | SEKSI PENYULUHAN | |
| | | 2.11.08.1.01.0003 | | | Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat | Orang | 400 | 50.000.000 | SEKSI PENYULUHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya | % | 10.5 | 905.113.000 | Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup | |
| | | | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 905.113.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya | Unit | 128 | 905.113.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.08.1.01.0002 | | | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | | | 655.113.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sekolah peduli lingkungan | Unit | 125 | 655.113.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.11.08.1.01.0005 | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | Unit | 3 | 250.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN FASILITAS TEKNIS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | | | 389.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase sampah yang tertangani | % | 43 | 389.000.000 | Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | |
| | | | | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | | | | | 389.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sampah tertangani | Ton | 2650000 | 389.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | |
| | | 2.11.11.1.01.0005 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | | | | 389.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan | Dokumen | 1 | 389.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **157.218.385.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Desa Mandiri** | | | | | | | | | **4.868.170.000** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | |
| | | | | | | Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah | % | 0.7618 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | **Meningkatnya Kemandirian Desa di Jawa Tengah** | | | | | | | | **4.868.170.000** | | |
| | | | | | | Persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah | % | 7.12 | 4.868.170.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | | 20.850.000 | | |
| | | | | | | Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa | % | 100 | 20.850.000 | Bidang Penataan Desa | |
| | | | | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat | | | | | 20.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam rangka Penataan Desa | Desa | 70 | 20.850.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | |
| | | 2.13.02.1.01.0003 | | | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | | | | 20.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa | Dokumen | 1 | 20.850.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | OPD Provinsi |
| | | 2.13.03 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | | | | | | 602.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP) | % | 59.32 | 602.000.000 | Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa | |
| | | | | Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi | | | | | 602.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kerjasama yang di fasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama Desa | Buah | 3 | 190.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA | |
| | | 2.13.03.1.01.0002 | | | Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama Desa yang Dilaksanakan | Dokumen | 1 | 190.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KERJASAMA DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah pengembangan kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terfasilitasi | Kws | 1 | 412.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN | |
| | | 2.13.03.1.01.0003 | | | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | 412.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan | Dokumen | 1 | 412.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN | OPD Provinsi |
| | | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | | 1.540.320.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa | % | 100 | 627.320.000 | Bidang Penataan Desa | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | 627.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi | Kabupaten/ Kota | 35 | 313.170.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0008 | | | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | 313.170.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Dokumen | 1 | 313.170.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa | Desa | 50 | 4.150.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0016 | | | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | 4.150.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Dokumen | 1 | 4.150.000 | SEKSI EVALUASI PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah dokumen regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa yang difasilitasi dan direkomendasikan | Dokumen | 55 | 310.000.000 | SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0001 | | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa | Dokumen | 1 | 310.000.000 | SEKSI FASILITASI REGULASI PEMERINTAHAN DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa | % | 100 | 913.000.000 | Bidang Administrasi Pemerintahan Desa | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | 913.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ajuan dokumen tukar menukar tanah kas Desa yang difasilitasi dan direkomendasi | Dokumen | 60 | 200.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0006 | | | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Aset Desa | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan keuangan Desa | Orang | 58 | 50.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0005 | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBINAAN ASET DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa | Kabupaten/Kota | 29 | 478.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0012 | | | Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis | | | | 478.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan Desa | Dokumen | 1 | 478.000.000 | SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS DESA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Desa di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik | Desa | 58 | 185.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA | |
| | | 2.13.04.1.01.0018 | | | Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota | | | | 185.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pencatatan data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten | Dokumen | 1 | 185.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA | OPD Provinsi |
| | | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | | 2.705.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah | % | 13.24 | 500.000.000 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | |
| | | | | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya | Unit | 350 | 500.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.13.05.1.01.0005 | | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa | Dokumen | 1 | 500.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya | % | 100 | 1.980.000.000 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | |
| | | | | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.980.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat | Orang | 150 | 200.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | |
| | | 2.13.05.1.01.0002 | | | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah anggota Pokjanal Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas | Orang | 70 | 30.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | |
| | | 2.13.05.1.01.0003 | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Kabupaten/Kota | 35 | 1.750.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | |
| | | 2.13.05.1.01.0009 | | | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 1.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga | Dokumen | 1 | 1.750.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) | % | 100 | 225.000.000 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | |
| | | | | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat | | | | 225.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah | Kali | 1 | 100.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | |
| | | 2.13.05.1.01.0007 | | | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah | Unit | 35 | 125.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | |
| | | 2.13.05.1.01.0006 | | | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Dokumen | 1 | 125.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYRAKAT | OPD Provinsi |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **19.863.205.000** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 72 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | **19.408.205.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Dispermades | Angka | 85 | 19.408.205.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 19.408.205.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 19.408.205.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 15.625.428.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 15.625.428.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 15.250.428.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 78 | 15.250.428.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 375.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 1 | 375.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah | Bulan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 769.722.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 769.722.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Bulan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 10 | 65.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan tercukupinya penyediaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah | Bulan | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 82.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan Tercukupinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran | Bulan | 12 | 82.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.722.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 12.722.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 320.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | Bulan | 12 | 320.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.283.055.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 2.283.055.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 565.055.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah | Bulan | 12 | 565.055.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.688.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Bulan | 12 | 1.688.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 580.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 12 | 580.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 20 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 5 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Bulan | 12 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Bulan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Bulan | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Bulan | 12 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bulan | 12 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | **455.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko Dispermades | Nilai | 3 | 455.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 455.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 95 | 455.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 455.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan/jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun | % | 100 | 455.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan Dispermades yang tersusun | Dokumen | 5 | 325.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja Dispermades yang tersusun | Dokumen | 5 | 130.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | | | | | | | | | **624.000.000** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | |
| | | | | | | Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah | Nilai | 4 | | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | **Meningkatnya Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan** | | | | | | | | **624.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTPel, KIA, akta kelahiran dan buku pokok pemakaman) di Jawa Tengah | % | 89 | 624.000.000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penduduk yang memiliki KTP-el | % | 98 | 220.000.000 | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk | |
| | | | | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan | | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el | % | 99 | 220.000.000 | SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK | |
| | | 2.12.02.1.01.0003 | | | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi | | | | 220.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi | Dokumen | 1 | 220.000.000 | SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK | OPD Provinsi |
| | | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98% | % | 99 | 210.000.000 | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk | |
| | | | | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi Akta Kelahiran | % | 98 | 210.000.000 | SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL | |
| | | 2.12.03.1.01.0002 | | | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi | Dokumen | 1 | 210.000.000 | SEKSI BINA APARATUR CATATAN SIPIL | OPD Provinsi |
| | | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | | 194.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan | % | 66.67 | 194.000.000 | Bidang Fasilitasi Layanan Adminduk | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | | | | | 194.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Institusi/Lembaga/Badan Hukum yang difasilitasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan | % | 100 | 194.000.000 | SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK | |
| | | 2.12.04.1.03.0001 | | | Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 194.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi | Dokumen | 1 | 194.000.000 | SEKSI BINA APARATUR PENDAFTARAN PENDUDUK | OPD Provinsi |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **25.355.375.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Perhubungan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **68.222.521.000** | **Dinas Perhubungan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 78.48 | | Dinas Perhubungan | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **67.875.921.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80.5 | 67.875.921.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 67.875.921.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) | % | 100 | 237.600.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 140.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 44.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 44.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 5.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 52.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 52.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 45.600.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 45.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 45.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 45.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 21 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 20 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) | % | 100 | 114.112.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 64.112.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 64.112.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 35.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 35.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.612.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 7.612.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 2 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) | % | 100 | 148.340.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 82.340.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 82.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 37.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 19.340.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 19.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 11 | 39.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) | % | 100 | 155.200.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 84.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 84.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 37.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 37.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 1.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 21.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 21.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 8 | 39.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 7 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) | % | 100 | 161.900.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 88.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 88.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 38.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 38.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 26.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 26.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 13 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) | % | 100 | 142.275.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 82.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 82.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 36.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 36.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 22.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 22.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 15.075.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 24 | 15.075.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 13.075.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 13.075.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 38.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 9 | 38.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 8 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) | % | 100 | 306.000.000 | Balai Transportasi Jawa Tengah | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 41.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 41.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 10.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 252.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 7 | 252.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 5 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) | % | 100 | 66.610.494.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 51.028.889.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 2 | 51.028.889.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 50.238.689.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 300 | 50.238.689.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 720.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 720.200.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 1.155.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 1.155.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1.155.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 1.155.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 125.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 150 | 105.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.855.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.855.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 48.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 82.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 82.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 40 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 11.108.705.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 36 | 11.108.705.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 4.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.589.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 1.589.225.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 9.515.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 9.515.480.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.337.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 49 | 1.337.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 857.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 73 | 857.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 24 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 92 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 93 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **346.600.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.3 | 346.600.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 346.600.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 346.600.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 346.600.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 346.600.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 261.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 9 | 261.600.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 4 | 85.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi** | | | | | | | | | **132.525.554.000** | **Dinas Perhubungan** | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Transportasi | Angka | 6.274 | | Dinas Perhubungan | |
| | **Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah** | | | | | | | | **6.993.452.000** | | |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan | Angka | 15.333 | 6.993.452.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | 5.853.678.000 | | |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | Angka | 0.84 | 404.650.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 404.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | Unit | 22676 | 404.650.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | 363.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Laporan | 36 | 363.800.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 40.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 2 | 40.850.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | Angka | 0.84 | 115.950.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 115.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | Unit | 1038 | 115.950.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | 95.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Laporan | 36 | 95.950.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 2 | 20.000.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | Angka | 0.84 | 210.625.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 210.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | Unit | 2340 | 210.625.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | 185.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Laporan | 36 | 185.625.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 2 | 25.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | Angka | 0.84 | 197.800.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 197.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | Unit | 7071 | 197.800.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | 167.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Laporan | 36 | 167.800.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 2 | 30.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | Angka | 0.84 | 251.990.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 251.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | Unit | 3659 | 251.990.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | 221.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Laporan | 36 | 221.990.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 2 | 30.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | Angka | 0.84 | 195.500.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 195.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | Unit | 4198 | 195.500.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | 165.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Laporan | 36 | 165.500.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 2 | 30.000.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | Angka | 0.95 | 518.940.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 518.940.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | Angka | 0.33 | 518.940.000 | SEKSI LALU LINTAS | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | 198.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Laporan | 78 | 198.480.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 320.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan | Unit | 1 | 320.460.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | Angka | 0.94 | 469.700.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 469.700.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | Angka | 0.19 | 469.700.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | 121.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Laporan | 46 | 121.680.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 348.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan | Unit | 1 | 348.020.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | Angka | 0.95 | 413.953.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 413.953.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | Angka | 0.11 | 413.953.000 | SEKSI LALU LINTAS | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | 145.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Laporan | 56 | 145.680.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 268.273.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan | Unit | 1 | 268.273.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | Angka | 0.94 | 489.740.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 489.740.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | Angka | 0.14 | 489.740.000 | SEKSI LALU LINTAS | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | 145.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Laporan | 56 | 145.680.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 344.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan | Unit | 1 | 344.060.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | Angka | 0.95 | 479.540.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 479.540.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | Angka | 0.24 | 479.540.000 | SEKSI LALU LINTAS | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | 136.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Laporan | 52 | 136.080.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 343.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan | Unit | 1 | 343.460.000 | SEKSI LALU LINTAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | Angka | 0.95 | 414.270.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 414.270.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | Angka | 0.5 | 414.270.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | | | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | | | | 150.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Laporan | 58 | 150.480.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | | | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | 263.790.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan | Unit | 1 | 263.790.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah | Angka | 0.985 | 235.000.000 | Bidang Lalu Lintas | |
| | | | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | 235.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah | Unit | 439863 | 235.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0004 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi | Laporan | 135 | 200.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | | | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 66 | 35.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | Angka | 0.39 | 1.456.020.000 | Bidang Lalu Lintas | |
| | | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | | 1.264.700.000 | | |
| | | | | | | Rasio perlengkapan jalan terpasang | Angka | 0.63 | 1.264.700.000 | SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN | |
| | | 2.15.02.1.02.0002 | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | 1.264.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia | Unit | 159 | 1.264.700.000 | SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | | 116.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng | Kabupaten/Kota | 17 | 46.320.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | |
| | | 2.15.02.1.05.0003 | | | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | 46.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi | Dokumen | 30 | 46.320.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ | Dokumen | 12 | 70.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.05.0005 | | | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | Laporan | 6 | 70.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi | | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi / persetujuan andalalin di Jalan provinsi | Dokumen | 390 | 75.000.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | |
| | | 2.15.02.1.06.0006 | | | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan | Dokumen | 61 | 75.000.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai | Angka | 0.4 | 40.000.000 | Bidang Pelayaran | |
| | | | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi | Angka | 0.18 | 40.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | |
| | | 2.15.03.1.10.0009 | | | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia Provinsi | Unit | 25 | 40.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | | | | | | 1.099.774.000 | | |
| | | | | | | Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | Angka | 0.08 | 1.099.774.000 | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian | |
| | | | | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian | | | | | 1.099.774.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian | Angka | 0.36 | 1.099.774.000 | SEKSI PERKERETAAPIAN | |
| | | 2.15.05.1.01.0003 | | | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian | | | | 1.099.774.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian | Laporan | 3 | 1.099.774.000 | SEKSI PERKERETAAPIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya konektivitas provinsi** | | | | | | | | **7.709.578.000** | | |
| | | | | | | Rasio konektivitas provinsi | Angka | 0.411 | 7.709.578.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | 6.970.478.000 | | |
| | | | | | | Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis | Angka | 0.52 | 380.000.000 | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian | |
| | | | | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio implementasi dokumen RIJLLAJ | Angka | 0.5 | 380.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI | |
| | | 2.15.02.1.01.0007 | | | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | Laporan | 2 | 380.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | Angka | 0.21 | 50.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | Angka | 0.5 | 50.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | Angka | 0.02 | 50.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | Angka | 0.5 | 50.000.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | Angka | 0.25 | 200.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | Angka | 0.5 | 200.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 200.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | Angka | 0.24 | 50.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | Angka | 0.5 | 50.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | Angka | 0.22 | 50.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | Angka | 0.5 | 50.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | Angka | 0.18 | 50.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | Angka | 0.5 | 50.000.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | KEPALA BALAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Rasio konektivitas perkotaan | Angka | 0.483 | 874.690.000 | Balai Transportasi Jawa Tengah | |
| | | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | | 874.690.000 | | |
| | | | | | | Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi | Angka | 0.622 | 874.690.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA | |
| | | 2.15.02.1.02.0002 | | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | | | | 874.690.000 | | |
| | | | | | | Jumlah  Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia | Unit | 6 | 874.690.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Rasio pemanfatan terminal | Angka | 0.229 | 4.705.000.000 | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian | |
| | | | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B | | | | | 4.705.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik | Angka | 0.41 | 4.705.000.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0001 | | | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B | Dokumen | 1 | 105.000.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 2.15.02.1.03.0007 | | | Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | 1.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Unit | 1 | 1.100.000.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | 2.15.02.1.03.0010 | | | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | | | | 3.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun | Unit | 1 | 3.500.000.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | OPD Provinsi ; PURWOREJO --> KUTOARJO --> KELURAHAN KUTOARJO |
| | | | | | | Rasio trayek angkutan jalan | Angka | 0.56 | 560.788.000 | Bidang Angkutan Jalan | |
| | | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio angkutan barang yang berijin | Angka | 0.32 | 40.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.15.02.1.08.0003 | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>D | Unit | 216 | 40.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 360.788.000 | | |
| | | | | | | Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Angka | 0.86 | 360.788.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | |
| | | 2.15.02.1.09.0001 | | | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | | | | 290.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan kewenangan provinsi | Dokumen | 3 | 290.500.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.02.1.09.0002 | | | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi | | | | 70.288.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi | Dokumen | 7 | 70.288.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan | Angka | 0.09 | 35.000.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | |
| | | 2.15.02.1.11.0002 | | | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi | Dokumen | 1 | 35.000.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | |
| | | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin | Angka | 0.62 | 50.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.13.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan | Unit | 464 | 50.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 35.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Rasio angkutan taksi terpenuhi | Angka | 0.44 | 35.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.14.0004 | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan | Unit | 76 | 35.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio trayek yang ditetapkan pemukhtahiran tarif | Angka | 1 | 40.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.15.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Laporan | 1 | 40.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | | 739.100.000 | | |
| | | | | | | Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP | Angka | 0.378 | 739.100.000 | Bidang Pelayaran | |
| | | | | Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan | | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasrkan tingkatannya | Angka | 0.4 | 60.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | |
| | | 2.15.03.1.03.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan | Unit | 4 | 60.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin | Angka | 0.13 | 70.000.000 | SEKSI ANGKUTAN LAUT | |
| | | | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.15.03.1.06.0001 | | | Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikDO : | Dokumen | 10 | 70.000.000 | SEKSI ANGKUTAN LAUT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | | 79.100.000 | | |
| | | | | | | Berth occupancy ratio | Angka | 0.45 | 79.100.000 | SEKSI KEPELABUHANAN | |
| | | 2.15.03.1.09.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | | | | 79.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian perizinan | Unit | 8 | 79.100.000 | SEKSI KEPELABUHANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 530.000.000 | | |
| | | | | | | Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi | Angka | 0.53 | 530.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | |
| | | 2.15.03.1.10.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan | Laporan | 1 | 130.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 2.15.03.1.10.0002 | | | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun | Unit | 1 | 400.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | **Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum** | | | | | | | | **117.822.524.000** | | |
| | | | | | | On Time Performance layanan transportasi | % | 85.05 | 117.822.524.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | 117.822.524.000 | | |
| | | | | | | Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum | % | 67.34 | 924.955.000 | Bidang Angkutan Jalan | |
| | | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 924.955.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani | Orang | 27824836 | 924.955.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.08.0002 | | | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | | | | 924.955.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | Laporan | 3 | 924.955.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perpindahan moda angkutan umum | % | 53 | 116.897.569.000 | Balai Transportasi Jawa Tengah | |
| | | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 116.897.569.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan | Orang | 6944462 | 116.897.569.000 | SEKSI OPERASIONAL | |
| | | 2.15.02.1.08.0003 | | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 116.897.569.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Unit | 115 | 116.897.569.000 | SEKSI OPERASIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **200.748.075.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan** | | | | | | | | | **48.778.024.000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | |
| | | | | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Angka | 4.5 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | **Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Jawa Tengah** | | | | | | | | **3.000.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) | Angka | 638 | 3.000.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80% | % | 50 | 3.000.000.000 | Bidang Persandian dan Keamanan Informasi | |
| | | | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 1.341.640.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai | % | 50 | 1.341.640.000 | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI | |
| | | 2.21.02.1.01.0001 | | | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 240.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 240.520.000 | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI | OPD Provinsi |
| | | 2.21.02.1.01.0002 | | | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 145.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 100 | 145.000.000 | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI | OPD Provinsi |
| | | 2.21.02.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | 370.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi | Laporan | 50 | 370.600.000 | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI | OPD Provinsi |
| | | 2.21.02.1.01.0004 | | | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 585.520.000 | | |
| | | | | | | 80% Perangkat Daerah Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | % | 50 | 585.520.000 | SEKSI PENGAMANAN PERSANDIAN DAN INFORMASI | OPD Provinsi |
| | | | | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi | | | | | 1.658.360.000 | | |
| | | | | | | Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Jaring Komunkasi Sandi | % | 50 | 1.658.360.000 | SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH | |
| | | 2.21.02.1.02.0001 | | | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 1.658.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik melalui Jaring Komunikasi Sandi | % | 60 | 1.658.360.000 | SEKSI SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** | | | | | | | | **44.567.195.000** | | |
| | | | | | | Indeks Domain Layanan SPBE | Angka | 3.81 | 17.107.445.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | | 17.107.445.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi | % | 74 | 17.107.445.000 | Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | |
| | | | | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 17.107.445.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan Pusat Data | OPD | 41 | 15.226.645.000 | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | |
| | | 2.16.03.1.02.0029 | | | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | | | | 15.226.645.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Server pada Pusat Data yang digunakan untuk sistem layanan terintegrasi | Buah | 25 | 15.226.645.000 | SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tersedianya Domain dan SubDomain yang Aktif | Angka | | 1.880.800.000 | SEKSI INTERNET DAN INTRANET | |
| | | 2.16.03.1.02.0026 | | | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE | | | | 1.880.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapasitas Bandwidth(Mbps) | Angka | 15 | 1.880.800.000 | SEKSI INTERNET DAN INTRANET | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Indeks Domain Tata Kelola SPBE | Angka | 3.2 | 3.000.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi | % | 47 | 3.000.000.000 | Bidang E-Government | |
| | | | | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola | % | 100 | 2.817.254.000 | SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI | |
| | | 2.16.03.1.02.0017 | | | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | | | | 2.817.254.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan atau Dikelola | Angka | 12 | 2.817.254.000 | SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI | |
| | | | | | | Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government yang diterbitkan | % | 65 | 102.664.000 | SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT | |
| | | 2.16.03.1.02.0028 | | | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | | | | 102.664.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Tata Kelola Teknologi Informasi yang Diterbitkan | Angka | 10 | 102.664.000 | SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT | |
| | | | | | | Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi | % | 50 | 80.082.000 | SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT | |
| | | 2.16.03.1.02.0018 | | | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas | | | | 80.082.000 | | |
| | | | | | | Jumlah OPD atau Instansi yang mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas | Angka | 25 | 80.082.000 | SEKSI PENGEMBANGAN EKOSISTEM E-GOVERNMENT | |
| | | | | | | Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya | % | 100 | 24.459.750.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | | 24.459.750.000 | | |
| | | | | | | Nilai keterbukaan informasi publik | Angka | 33 | 2.359.750.000 | Bidang Statistik | |
| | | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 2.359.750.000 | | |
| | | | | | | Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif) | % | 80 | 2.359.750.000 | SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0006 | | | Pelayanan Informasi Publik | | | | 559.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Dipublikasikan Badan Publik | Dokumen | 83 | 559.750.000 | SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.16.02.1.01.0020 | | | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | | | | 1.800.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi | % | 87 | 1.800.000.000 | SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Nilai survey kepuasan komunikasi publik | Angka | 81 | 22.100.000.000 | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | |
| | | | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 22.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan | Kelompok | 91 | 5.753.000.000 | SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0010 | | | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Komunitas yang diberdayakan | Kelompok | 30 | 400.000.000 | SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0012 | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | | | | 5.353.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah komunitas yang dikoordinasikan | Kelompok | 30 | 5.353.000.000 | SEKSI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | | | | | Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan | Konten | 260 | 5.478.800.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0004 | | | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | | 1.368.209.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan | Konten | 10 | 1.368.209.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0005 | | | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | 1.700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Internal | Konten | 10 | 1.700.000.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0007 | | | Layanan Hubungan Media | | | | 505.841.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Eksternal | Konten | 3 | 505.841.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0008 | | | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | | | | 1.904.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Dengan Pemangku Kepentingan | Konten | 10 | 1.904.750.000 | SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN KOMUNIKASI PUBLIK | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum | Dokumen | 260 | 10.868.200.000 | SEKSI OPINI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0017 | | | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | | | | 334.027.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi analisis pendapat umum | Dokumen | 35 | 334.027.000 | SEKSI OPINI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0019 | | | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | | | | 9.437.881.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi analisis agenda publik | Dokumen | 80 | 9.437.881.000 | SEKSI OPINI PUBLIK | |
| | | 2.16.02.1.01.0023 | | | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | | | | 1.096.292.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Analisis Berita | Dokumen | 129 | 1.096.292.000 | SEKSI OPINI PUBLIK | |
| | **Meningkatnya Pelayanan Data Statistik Sektoral dan Geospasial** | | | | | | | | **1.210.829.000** | | |
| | | | | | | Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah | % | 64 | 1.210.829.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | | 1.210.829.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah | % | 48 | 1.210.829.000 | Bidang Statistik | |
| | | | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | | | | | 1.210.829.000 | | |
| | | | | | | Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi | % | 60 | 378.750.000 | SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 2.20.02.1.01.0002 | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | | | | 378.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial | Angka | 250 | 378.750.000 | SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data | % | 48 | 832.079.000 | SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | |
| | | 2.20.02.1.01.0004 | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | 100.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial | Angka | 70 | 100.000.000 | SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | |
| | | 2.20.02.1.01.0008 | | | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Metadata Statistik Sektoral dan Gespasial yang Dihimpun | Angka | 80 | 260.000.000 | SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.20.02.1.01.0009 | | | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional | | | | 304.370.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Analisis Statistik Sektoral dan Geospasial | Angka | 8 | 304.370.000 | SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 2.20.02.1.01.0011 | | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | 167.709.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data Statistik Sektoral dan Geospasial yang terkumpul melalui Portal Data | Angka | 100 | 167.709.000 | SEKSI STATISTIK SOSIAL POLITIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **29.637.129.000** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70 | | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **29.027.129.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 79 | 29.027.129.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 29.027.129.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 79 | 29.027.129.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 21.173.911.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 21.173.911.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 20.589.686.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 125 | 20.589.686.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 352.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 352.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0004 | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | 75.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 75.150.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0006 | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | 83.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan | Dokumen | 2 | 83.225.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 73.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 18 | 73.850.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran | Dokumen | 3 | 270.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.03.0001 | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 36.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 34.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah, termasuk dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 34.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran | % | 100 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 320.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 30 | 320.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.854.875.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran | % | 100 | 1.854.875.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 85.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 431.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 431.875.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah barang peralatan rumah tangga yang disediakan | Buah | 100 | 85.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 135.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 135.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 15 | 3.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 185.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 185.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 50 | 750.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran | Unit | 3 | 160.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 8 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4.241.343.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran | Laporan | 4 | 4.241.343.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.343.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 5.343.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 1.200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 36.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 3.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 3.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 877.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran | Unit | 239 | 877.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 30 | 350.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 100 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 22.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | umlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 100 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **610.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.01 | 610.000.000 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 610.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 3.01 | 610.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 610.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 610.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 411.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 411.510.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 198.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 2 | 198.490.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **78.415.153.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB** | | | | | | | | | **9.913.542.000** | **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | |
| | | | | | | Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB | % | 12.99 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | **Meningkatnya Koperasi Sehat Jawa Tengah** | | | | | | | | **1.499.384.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah | % | 0.38 | 1.499.384.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | | 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | 1.499.384.000 | | |
| | | | | | | Persentase koperasi berkualitas | % | 26.74 | 1.499.384.000 | Bidang Pengawasan | |
| | | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 645.052.000 | | |
| | | | | | | Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diperiksa | % | 100 | 645.052.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 2.17.03.1.01.0003 | | | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | 645.052.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Unit | 120 | 645.052.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 854.332.000 | | |
| | | | | | | Persentase Koperasi Simpan Pinjam Provinsi yang sudah diperiksa | % | 100 | 854.332.000 | SEKSI PENILAIAN KESEHATAN | |
| | | 2.17.03.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 854.332.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | Unit | 280 | 854.332.000 | SEKSI PENILAIAN KESEHATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | **Meningkatnya Omzet Koperasi dan UMKM Jawa Tengah** | | | | | | | | **8.414.158.000** | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah | % | 7.39 | 8.414.158.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | | 734.908.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM koperasi yang berkualitas | % | 11.5 | 734.908.000 | Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A. | |
| | | | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 734.908.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya | % | 90 | 734.908.000 | SEKSI PENYELENGGARA | |
| | | 2.17.05.1.01.0001 | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | 734.908.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Orang | 125 | 734.908.000 | SEKSI PENYELENGGARA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | | 1.606.604.000 | | |
| | | | | | | Persentase koperasi provinsi produktif | % | 48.53 | 1.606.604.000 | Bidang Kelembagaan | |
| | | | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 1.606.604.000 | | |
| | | | | | | Persentase Jumlah Koperasi Provinsi yang mengalami peningkatan usahanya | % | 42.93 | 705.776.000 | SEKSI TATALAKSANA | |
| | | 2.17.06.1.01.0002 | | | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | 705.776.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah,Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Unit | 145 | 705.776.000 | SEKSI TATALAKSANA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Presentase Koperasi Provinsi yang mengalami penguatan manajemen dan kelembagaannya | % | 33.56 | 900.828.000 | SEKSI ORGANISASI | |
| | | 2.17.06.1.01.0009 | | | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 900.828.000 | | |
| | | | | | | Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan | Unit | 150 | 900.828.000 | SEKSI ORGANISASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | 3.494.064.000 | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan wirausaha baru | % | 25 | 865.220.000 | Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A. | |
| | | | | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | 865.220.000 | | |
| | | | | | | Persentase SDM UMKM dan Wirausaha yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan usahanya | % | 95.86 | 865.220.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN | |
| | | 2.17.07.1.01.0002 | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | | | | 865.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | Orang | 2075 | 865.220.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase usaha mikro mandiri | % | 82.3 | 2.628.844.000 | | |
| | | | | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | 2.628.844.000 | | |
| | | | | | | Persentase Usaha Mikro yang meningkat kapasitas usahanya | % | 94.14 | 2.080.904.000 | | |
| | | 2.17.07.1.01.0001 | | | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | | | | 300.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Unit | 240 | 300.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 2.17.07.1.01.0011 | | | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi | Unit | 100 | 650.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 2.17.07.1.01.0012 | | | Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil | | | | 1.130.904.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | Unit | 800 | 1.130.904.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase Usaha Mikro yang meningkat pembiayaannya | % | 94.44 | 547.940.000 | | |
| | | 2.17.07.1.01.0007 | | | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | | | 547.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | Unit | 300 | 547.940.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | | 2.578.582.000 | | |
| | | | | | | Persentase UMKM siap bermitra | % | 23.08 | 2.578.582.000 | Bidang Bina Usaha | |
| | | | | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | | | | 2.578.582.000 | | |
| | | | | | | Persentase Usaha Kecil yang meningkat Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Jaringan Usaha, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologinya | % | 30 | 2.578.582.000 | SEKSI PEMASARAN | |
| | | 2.17.08.1.01.0001 | | | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | 554.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,Serta Desain dan Teknologi | Unit | 280 | 554.320.000 | SEKSI PEMASARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 2.17.08.1.01.0003 | | | Pengembangan Usaha Kecil | | | | 2.024.262.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi | Unit | 250 | 2.024.262.000 | SEKSI PEMASARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **25.907.910.000** | **Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 88 | | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **25.421.466.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 95 | 25.421.466.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 25.421.466.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 4.270.288.000 | Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A. | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 325.680.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 325.680.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 41.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 41.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 124.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 124.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 97.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 52 | 97.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 5 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 22.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 47 | 22.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.520.908.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 38 | 3.520.908.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 883.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 883.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.606.308.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.606.308.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 326.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 161 | 326.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 22 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 120.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 86.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 131 | 86.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 21.151.178.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 16.483.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 38 | 16.483.160.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 15.933.826.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 7 | 15.933.826.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 421.590.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 421.590.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 127.744.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 127.744.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 26.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 26.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 50 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Paket | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.398.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.398.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 130.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 12.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 115.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 115.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 44 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 35 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.758.018.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 48 | 2.758.018.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 650.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.058.018.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.058.018.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 286.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 133 | 286.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 16.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 25 | 16.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 25 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 25 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 50 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **486.444.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 486.444.000 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 486.444.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 486.444.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 486.444.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 486.444.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 311.444.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 311.444.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 6 | 175.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **35.821.452.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **20.185.806.000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 84 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **19.881.459.000** | | |
| | | | | | | Nilai Kepuasan Masyarakat | Angka | 80.5 | 19.881.459.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 19.881.459.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 19.881.459.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 16.263.466.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 16.263.466.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 15.933.466.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 86 | 15.933.466.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 330.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 330.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 54.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 54.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 2 | 24.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 50 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 680.674.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 680.674.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 87.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 87.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 68.854.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 68.854.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 8.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 279.820.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 279.820.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 370.173.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 27 | 370.173.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 370.173.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 27 | 370.173.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.099.646.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 2.099.646.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 8.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 600.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 600.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 24.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.467.146.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.467.146.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 333.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 187 | 333.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 95.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 24 | 95.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 10 | 4.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 150 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 109.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 109.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **304.347.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.1 | 304.347.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 304.347.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 304.347.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 304.347.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 304.347.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 158.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 4 | 158.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 146.347.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 4 | 146.347.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| **Meningkatkan pertumbuhan penanaman modal** | | | | | | | | | **4.939.212.000** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | |
| | | | | | | Pertumbuhan nilai penanaman modal | % | 4.25 | | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | **Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan** | | | | | | | | **2.204.602.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 91 | 2.204.602.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | 2.18.04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | | 1.654.602.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan standar pelayanan | % | 100 | 532.852.000 | Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan | |
| | | | | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 532.852.000 | | |
| | | | | | | Persentase standar pelayanan sesuai ISO | % | 90 | 274.344.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | 2.18.04.1.01.0008 | | | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 274.344.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan | Dokumen | 1 | 154.344.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen ISO yang diterapkan | Dokumen | 1 | 120.000.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | | | | | Presentase analisis pengembangan sarana prasarana layanan | % | 100 | 258.508.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | 2.18.04.1.01.0008 | | | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 258.508.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis pengembangan sarana prasarana layanan yang disusun | Orang | 1 | 228.508.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen evaluasi kinerja aparatur pelayanan | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SEKSI PENINGKATAN SARANA PRASARANA LAYANAN | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat | % | 100 | 317.148.000 | Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan | |
| | | | | Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 317.148.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | % | 100 | 317.148.000 | SEKSI PENANGANAN PENGADUAN | |
| | | 2.18.04.1.01.0008 | | | Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 317.148.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelayanan fasilitasi penyelesaian pengaduan | Kali | 60 | 56.480.000 | SEKSI PENANGANAN PENGADUAN | |
| | | | | | | Jumlah pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat | Kali | 600 | 260.668.000 | SEKSI PENANGANAN PENGADUAN | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan | % | 91 | 804.602.000 | Bidang Pelayanan Perizinan | |
| | | | | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 804.602.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan | Dokumen | 800 | 245.060.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0007 | | | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 216.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan | Unit | 900 | 216.860.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0008 | | | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 28.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan | Kali | 2 | 28.200.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN LINGKUNGAN | |
| | | | | | | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan | Dokumen | 700 | 357.142.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0007 | | | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 328.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan | Unit | 900 | 328.940.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0008 | | | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 28.202.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan | Kali | 2 | 28.202.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN | |
| | | | | | | Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian | Dokumen | 500 | 202.400.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0007 | | | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 174.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian | Unit | 1000 | 174.200.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN | |
| | | 2.18.04.1.02.0008 | | | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 28.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang perekonomian | Kali | 2 | 28.200.000 | SEKSI ADMINISTRASI PERIZINAN BIDANG PEREKONOMIAN | |
| | | 2.18.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan | % | 10 | 550.000.000 | Bidang Pengelolaan Data dan Informasi | |
| | | | | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aplikasi yang dikembangkan | Unit | 1 | 343.936.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | |
| | | 2.18.06.1.01.0002 | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | 343.936.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi | Dokumen | 1 | 343.936.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | |
| | | | | | | Persentase data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan | % | 100 | 206.064.000 | SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI | |
| | | 2.18.06.1.01.0002 | | | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | 206.064.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis data dan informasi penanaman modal | Dokumen | 4 | 206.064.000 | SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI | |
| | **Meningkatnya realisasi PMA dan PMDN** | | | | | | | | **2.734.610.000** | | |
| | | | | | | Persentase realisasi PMA dan PMDN | % | 100 | 2.734.610.000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | | 2.18.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | 560.640.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan | % | 50 | 560.640.000 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan | |
| | | | | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 310.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun | Dokumen | 1 | 310.640.000 | SEKSI PERENCANAAN | |
| | | 2.18.02.1.01.0001 | | | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | 310.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kajian Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disusun | Dokumen | 1 | 310.640.000 | SEKSI PERENCANAAN | |
| | | | | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kajian IPRO Pengembangan Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang dipromosikan | Dokumen | 1 | 250.000.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN | |
| | | 2.18.02.1.02.0005 | | | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi | | | | 250.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Kajian IPRO Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun | Dokumen | 1 | 250.000.000 | SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN KEWILAYAHAN | |
| | | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | 1.612.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan | % | 50 | 230.000.000 | Bidang Promosi PM | |
| | | | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kemitraan usaha yang dihasilkan | Dokumen | 8 | 230.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA | |
| | | 2.18.03.1.01.0002 | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi kemitraan usaha | Kali | 16 | 230.000.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA | |
| | | | | | | Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN | % | 67 | 1.382.500.000 | Bidang Promosi PM | |
| | | | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 1.382.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan | Dokumen | 35 | 1.157.500.000 | SEKSI PROMOSI | |
| | | 2.18.03.1.01.0002 | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | 1.127.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah promosi penanaman modal | Kali | 1 | 1.127.500.000 | SEKSI PROMOSI | |
| | | 2.18.03.1.01.0003 | | | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SEKSI PROMOSI | |
| | | | | | | Jumlah kepeminatan PMA/PMDN yang dilakukan pengawalan | Dokumen | 35 | 225.000.000 | SEKSI PEMBINAAN | |
| | | 2.18.03.1.01.0002 | | | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi dan/ atau monitoring kepeminatan PMA/PMDN | Kali | 24 | 225.000.000 | SEKSI PEMBINAAN | |
| | | 2.18.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | 561.470.000 | | |
| | | | | | | Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui | % | 22 | 561.470.000 | Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM | |
| | | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 561.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disetujui | Unit | 20500 | 161.470.000 | SEKSI MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | 2.18.05.1.01.0005 | | | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | 161.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan Penanaman Modal | Unit | 2100 | 161.470.000 | SEKSI MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha dan/atau aparatur yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal | Orang | 100 | 156.440.000 | SEKSI PENGENDALIAN | |
| | | 2.18.05.1.01.0006 | | | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | 156.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal | Kali | 2 | 156.440.000 | SEKSI PENGENDALIAN | |
| | | | | | | Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan | Unit | 200 | 200.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 2.18.05.1.01.0004 | | | Pengawasan Penanaman Modal | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pengawasan kepatuhan ketentuan penanaman modal | Kali | 80 | 200.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | | | | | Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi | % | 80 | 43.560.000 | SEKSI PENGENDALIAN | |
| | | 2.18.05.1.01.0006 | | | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | 43.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal | Dokumen | 11 | 43.560.000 | SEKSI PENGENDALIAN | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **25.125.018.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **49.976.367.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 80.41 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **49.426.337.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 79 | 49.426.337.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 49.426.337.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 45.926.337.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 27.526.337.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 27.526.337.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 27.066.337.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 170 | 27.066.337.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 460.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 460.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 400.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 400.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 250.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0011 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Orang | 50 | 250.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.930.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.930.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 130.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 300.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 100.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 270.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 1.000.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.000.000 | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 600.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 1 | 600.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 13.580.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 13.580.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 30.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 1.700.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 150.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 11.700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 11.700.000.000 | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.640.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 1.640.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 12 | 100.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 290.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 12 | 290.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 12 | 250.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 12 | 100.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 800.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 12 | 800.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 12 | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | | 3.500.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 100 | 150.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 150.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 184.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | | 184.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 4.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 15.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 100.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.055.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | | 2.055.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 5.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 2.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 2.000.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 50.000.000 | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.111.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | | 1.111.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 111.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 2 | 111.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 1.000.000.000 | | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **550.030.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.02 | 550.030.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 550.030.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 550.030.000 | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 550.030.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 550.030.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 300.030.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 300.030.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 2 | 250.000.000 | | |
| **Meningkatkan Pembangunan Olahraga** | | | | | | | | | **388.786.000.000** | | |
| | | | | | | Sport Development Index (SDI) | % | 0.45 | | | |
| | **Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional kejuaraan Multievent** | | | | | | | | **388.786.000.000** | | |
| | | | | | | Peringkat nasional pada kejuaraan multievent | Peringkat | 3 | 388.786.000.000 | | |
| | | 2.19.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | | | 388.786.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi | Orang | 105 | 23.086.000.000 | | |
| | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | | 9.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan | Orang | 105 | 9.000.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.01.0004 | | | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | | | | 9.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan | Orang | 2 | 9.000.000.000 | | |
| | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi | Orang | 190 | 600.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.02.0004 | | | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event | Orang | 10 | 600.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | | | 13.486.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional | Orang | 284 | 13.486.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.03.0001 | | | Seleksi Atlet Daerah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | Orang | 300 | 300.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.03.0007 | | | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | | | 13.186.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | Orang | 215 | 13.186.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase peningkatan perolehan medali | % | 31.25 | 365.700.000.000 | | |
| | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | | | | 17.320.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi | Orang | 250 | 17.320.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.02.0004 | | | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | 3.800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event | Orang | 50 | 3.800.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.02.0005 | | | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi | Dokumen | 1 | 150.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.02.0006 | | | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi | | | | 13.370.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi | Dokumen | 9 | 13.370.000.000 | | |
| | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | | | 348.380.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional | Orang | 125 | 348.380.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.03.0006 | | | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | | | | 70.055.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan | Orang | 200 | 70.055.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.03.0007 | | | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | Orang | 500 | 550.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.03.0008 | | | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan | Dokumen | 1 | 150.000.000 | | |
| | | 2.19.03.1.03.0009 | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi | | | | 277.625.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | Orang | 700 | 277.625.000.000 | | |
| **Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | | | | | | | | | **15.785.000.000** | | |
| | | | | | | Nilai tambah ekonomi kreatif | Rupiah | 1737000000000 | | | |
| | | | | | | Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata | % | 8.26 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | **Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai kabupaten/kota kreatif** | | | | | | | | **550.000.000** | | |
| | | | | | | Jumlah kabupaten/kota kreatif | Kabupaten/ | 1 | 550.000.000 | | |
| | | 3.26.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | | | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan) | Kabupaten/ Kota | 8 | 550.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I | Kabupaten/ | 2 | 450.000.000 | | |
| | | 3.26.04.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Penyediaan Sarana Prasarana Prasarana KaTa Kreatif | Unit | 3 | 450.000.000 | | |
| | | | | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI | Orang | 80 | 100.000.000 | | |
| | | 3.26.04.1.02.0008 | | | Perlindungan Hasil Kreativitas | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Dokumen Perlindungan Hasil kreativitas yang berupa kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif | Dokumen | 50 | 100.000.000 | | |
| | **Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan** | | | | | | | | **15.235.000.000** | | |
| | | | | | | Jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah | Rupiah | 15073629 | 15.235.000.000 | | |
| | | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | | | | | | 6.200.000.000 | | |
| | | | | | | Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan | % | 26.67 | 6.200.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi | | | | | 5.200.000.000 | | |
| | | | | | | Daya Tarik Wisata yang dikembangkan | Lokasi | 2 | 5.200.000.000 | | |
| | | 3.26.02.1.01.0008 | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi | | | | 5.200.000.000 | | |
| | | | | | | Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi jawa Tengah sesuai dengan tahapan (perintisan, pembangunan, Pemantapan, Revitalisasi) | Lokasi | 1 | 5.200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang terkelola | Lokasi | 2 | 500.000.000 | | |
| | | 3.26.02.1.02.0009 | | | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Masyarakat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Yang Diberdayakan | Orang | 50 | 500.000.000 | | |
| | | | | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Usaha Pariwiata yang memiliki TDUP/NIB | Dokumen | 110 | 500.000.000 | | |
| | | 3.26.02.1.04.0010 | | | Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi | | | | 118.000.000 | | |
| | | | | | | Pengelolaan Investasi Pariwisata | Laporan | 1 | 118.000.000 | | |
| | | 3.26.02.1.04.0013 | | | Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata | | | | 382.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Unit | 200 | 382.000.000 | | |
| | | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | | | | | 5.660.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kunjungan wisatawan | Orang | 54069703 | 5.660.000.000 | | |
| | | | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | | | | | 5.660.000.000 | | |
| | | | | | | Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata | Orang | 450000 | 5.010.000.000 | | |
| | | 3.26.03.1.01.0001 | | | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri | Dokumen | 1 | 350.000.000 | | |
| | | 3.26.03.1.01.0006 | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 4.660.000.000 | | |
| | | | | | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri | Kegiatan | 30 | 4.660.000.000 | | |
| | | | | | | Tujuan Pasar Wisata Potensial | Lokasi | 3 | 650.000.000 | | |
| | | 3.26.03.1.01.0005 | | | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Dokumen | 1 | 650.000.000 | | |
| | | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | | | | | 3.375.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi | % | 33.87 | 3.375.000.000 | | |
| | | | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | | | | | 2.675.000.000 | | |
| | | | | | | Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Orang | 831 | 2.675.000.000 | | |
| | | 3.26.05.1.01.0008 | | | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Laporan | 3 | 350.000.000 | | |
| | | 3.26.05.1.01.0014 | | | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | 1.275.000.000 | | |
| | | | | | | orang yang mengikuti peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata | Orang | 400 | 1.275.000.000 | | |
| | | 3.26.05.1.01.0016 | | | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | | | | 1.050.000.000 | | |
| | | | | | | SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya | Orang | 180 | 1.050.000.000 | | |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi | Orang | 240 | 700.000.000 | | |
| | | 3.26.05.1.02.0001 | | | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Pelaku SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pendampingan | Orang | 0 | 200.000.000 | | |
| | | 3.26.05.1.02.0003 | | | Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti sertifikasi kompetensi | Orang | 80 | 500.000.000 | | |
| **Meningkatkan Pembangunan Pemuda** | | | | | | | | | **11.225.000.000** | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | Angka | 58.25 | | | |
| | **Meningkatnya Lapangan dan kesempatan kerja pemuda** | | | | | | | | **3.250.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase lapangan dan kesempatan kerja pemuda | % | 11.5 | 3.250.000.000 | | |
| | | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | | 3.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah wirausaha muda mandiri | Orang | 10 | 3.250.000.000 | | |
| | | | | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | | | | | 3.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah wirausaha muda | Orang | 100 | 300.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.0015 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Orang | 85 | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda | Lokasi | 100 | 1.350.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | Orang | 500 | 700.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.0012 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kabupaten/kota | Orang | 200 | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi | Dokumen | 4 | 1.600.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.01.0014 | | | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi | | | | 1.600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Orang | 300 | 1.600.000.000 | | |
| | **Meningkatnya Partisipasi dan kepemimpinan pemuda** | | | | | | | | **7.975.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase partisipasi dan kepemimpinan pemuda | % | 38.75 | 7.975.000.000 | | |
| | | 2.19.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | | 7.975.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi | Orang | 75 | 7.975.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 7.975.000.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi | Orang | 250 | 7.975.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha | Orang | 100 | 225.000.000 | | |
| | | 2.19.02.1.02.0004 | | | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | | | | 7.750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi | Dokumen | 2 | 7.750.000.000 | | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **465.772.367.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **33.389.359.000** | **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 74 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **33.214.359.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 81 | 33.214.359.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 33.214.359.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 33.214.359.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 27.887.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 27.887.910.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 27.637.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 145 | 27.637.910.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 250.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 95.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 61.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 61.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 46.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 10 | 46.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.074.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.074.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 30.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah paket bahan/material | Paket | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 175.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 400.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 38 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.661.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 8 | 3.661.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 3 | 1.300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 86.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 86.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.265.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 3 | 2.265.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 235.449.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 50 | 235.449.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 2 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 15 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 100.449.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 100.449.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **175.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.02 | 175.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 175.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 175.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 135.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 3 | 135.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 5 | 40.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| **Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan** | | | | | | | | | **771.598.000** | **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | |
| | | | | | | Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah | Nilai | 95 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | **Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi** | | | | | | | | **771.598.000** | | |
| | | | | | | Nilai hasil pengawasan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi | Nilai | 95.57 | 771.598.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | | | | | | 701.598.000 | | |
| | | | | | | Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya | % | 30.26 | 220.000.000 | Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan | |
| | | | | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya | Unit | 23 | 120.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN | |
| | | 2.24.02.1.01.0012 | | | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi | | | | 120.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan | Lembaga | 117 | 120.000.000 | SEKSI PENGAWASAN KEARSIPAN | |
| | | | | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD | % | 85.36 | 100.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN | |
| | | 2.24.02.1.03.0002 | | | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi | Laporan | 41 | 100.000.000 | SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN | |
| | | | | | | Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK | % | 100 | 245.000.000 | Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip | |
| | | | | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian | Arsip | 1500 | 25.000.000 | SEKSI AKUISISI ARSIP | |
| | | 2.24.02.1.01.0004 | | | Penyusutan Arsip Dinamis | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Arsip Dinamis yang telah disusutkan | Arsip | 1750 | 25.000.000 | SEKSI AKUISISI ARSIP | |
| | | | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya | Dokumen | 12000 | 220.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN ARSIP | |
| | | 2.24.02.1.02.0005 | | | Akuisisi Arsip Statis | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi | Arsip | 1250 | 50.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN ARSIP | |
| | | | | | | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi | Arsip | 1500 | 70.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN ARSIP | |
| | | | | | | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi | Arsip | 11500 | 100.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN ARSIP | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pengunjung arsip | % | 79 | 236.598.000 | Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip | |
| | | | | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | | | | | 236.598.000 | | |
| | | | | | | Jumlah arsip yang terlayankan | Arsip | 1000 | 75.000.000 | SEKSI LAYANAN ARSIP | |
| | | 2.24.02.1.03.0001 | | | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN | 1 petak /tahun | 3250 | 75.000.000 | SEKSI LAYANAN ARSIP | |
| | | | | | | Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip | Unit | 41 | 161.598.000 | SEKSI PEMANFAATAN ARSIP | |
| | | 2.24.02.1.03.0002 | | | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | | | | 161.598.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi | Laporan | 4 | 161.598.000 | SEKSI PEMANFAATAN ARSIP | |
| | | 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase arsip yang diselamatkan | % | 65.92 | 45.000.000 | Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip | |
| | | | | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi | Arsip | 500 | 25.000.000 | SEKSI PELESTARIAN ARSIP | |
| | | 2.24.03.1.02.0001 | | | Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Arsip yg dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana | Arsip | 600 | 25.000.000 | SEKSI PELESTARIAN ARSIP | |
| | | | | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan | Arsip | 272000 | 20.000.000 | SEKSI PELESTARIAN ARSIP | |
| | | 2.24.03.1.04.0002 | | | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah daftar arsip yg dilakukan Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip | Arsip | 12000 | 20.000.000 | SEKSI PELESTARIAN ARSIP | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip | % | 20 | 25.000.000 | Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip | |
| | | | | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun) | OPD | 8 | 25.000.000 | SEKSI AKUISISI ARSIP | |
| | | 2.24.03.1.01.0001 | | | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yg memiliki retensi dibawah 10 tahun | Arsip | 10000 | 25.000.000 | SEKSI AKUISISI ARSIP | |
| **Meningkatkan Literasi Masyarakat** | | | | | | | | | **1.640.000.000** | **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** | |
| | | | | | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Angka | 15.62 | | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | **Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat** | | | | | | | | **1.640.000.000** | | |
| | | | | | | Nilai tingkat kegemaran membaca | Nilai | 74 | 1.640.000.000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | |
| | | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Nilai survey kepuasan masyarakat | Nilai | 80 | 1.105.000.000 | Bidang Pengelolaan Perpustakaan | |
| | | | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 640.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah | Jenis | 10 | 90.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | 2.23.02.1.01.0007 | | | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah layanan perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yg dikembangkan melalui peningkatan koleksi | Jenis | 5 | 40.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | 2.23.02.1.01.0015 | | | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000 | Unit | 1 | 50.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | | | | | Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah | % | 5 | 550.000.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0009 | | | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan | Eks | 9500 | 550.000.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 465.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi | Orang | 20 | 30.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | 2.23.02.1.02.0004 | | | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan | Unit | 1 | 30.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | | | | | Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah | Orang | 2657000 | 435.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |
| | | 2.23.02.1.02.0002 | | | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | 435.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi | Unit | 7 | 435.000.000 | SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi | % | 88.89 | 180.000.000 | Bidang Pengembangan Perpustakaan | |
| | | | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi | Unit | 8 | 80.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0002 | | | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan SNP di wilayah provinsi sesuai kewenangannya | Unit | 3 | 50.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0016 | | | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah data dan informasi perpustakaan | Dokumen | 1 | 30.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN | |
| | | | | | | Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi | Orang | 20 | 100.000.000 | SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0004 | | | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perpustakaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan | Unit | 5 | 25.000.000 | SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.02.1.01.0006 | | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah tenaga perpustakaan yg ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Daerah provinsi | Orang | 30 | 75.000.000 | SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca | % | 61.54 | 115.000.000 | Bidang Pengembangan Perpustakaan | |
| | | | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 115.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat | Kegiatan | 3 | 115.000.000 | SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | |
| | | 2.23.02.1.02.0001 | | | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan literasi pada sat pendidikan menengah dan pendidikn khusus | Lokasi | 5 | 60.000.000 | SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | |
| | | 2.23.02.1.02.0003 | | | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | 30.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca | Orang | 12 | 30.400.000 | SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | |
| | | 2.23.02.1.02.0006 | | | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi | | | | 24.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah duta baca Tingkat daerah provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya | Orang | 1 | 24.600.000 | SEKSI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | |
| | | 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | | | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah | % | 92.25 | 240.000.000 | Bidang Pengelolaan Perpustakaan | |
| | | | | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng | Unit | 194 | 80.000.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 2.23.03.1.01.0001 | | | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR | Eks | 2700 | 20.000.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.01.0002 | | | Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Unit | 3 | 60.000.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | | | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan | Dokumen | 2 | 50.000.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.02.0001 | | | Penerbitan Katalog Induk Daerah | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan | Dokumen | 4450 | 35.000.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.02.0002 | | | Penerbitan Bibliografi Daerah | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan | Dokumen | 1 | 15.000.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah koleksi naskah kuno yang dialihmediakan | Eks | 32 | 40.000.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.03.0002 | | | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Naskah Kuno yang dilakukan Pengembangan yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | Eks | 7 | 40.000.000 | SEKSI DEPOSIT DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | | | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah | Eks | 593 | 70.000.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.04.0001 | | | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Eks | 5 | 40.000.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| | | 2.23.03.1.04.0002 | | | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Eks | 225 | 30.000.000 | SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **35.800.957.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan** | | | | | | | | | **2.914.380.000** | **Dinas Kelautan dan Perikanan** | |
| | | | | | | Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) | Angka | 108.05 | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | **Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)** | | | | | | | | **1.942.120.000** | | |
| | | | | | | Angka Konsumsi Ikan | kg/kapita/ta | 40.92 | 1.942.120.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | | 1.942.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah produksi olahan ikan | Ton | 160800 | 801.310.000 | Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas | |
| | | | | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 99.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata | % | 20 | 99.500.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.01.0003 | | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 95.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan Data | Kabupaten/ Kota | 35 | 95.500.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.06.1.01.0005 | | | Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi perijinan | Orang | 30 | 4.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | | 697.810.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi | Jenis | 2 | 282.940.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.02.0004 | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | 282.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang meningkat keterampilanny | Orang | 70 | 282.940.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Poklahsar yang Meningkat Usahanya | Unit | 5 | 130.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana yang diberikan kepada pengolah dan pemasar | Paket | 0 | 130.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | | Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan | Unit | 35 | 284.870.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.25.06.1.02.0004 | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | 284.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN | Orang | 900 | 235.750.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran | Orang | 30 | 49.120.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan | Dokumen | 1 | 4.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | 3.25.06.1.03.0001 | | | Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang dibina | Orang | 25 | 4.000.000 | SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK | |
| | | | | | | Persentase  dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan | % | 4 | 1.140.810.000 | Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A | |
| | | | | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | | 1.140.810.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan | Sertifikat | 425 | 950.122.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | 3.25.06.1.02.0004 | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | 950.122.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen ISO 17025:2017 | Dokumen | 1 | 708.432.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | | | | | Jumlah Prasarana Laboratorium Penujian Yang Memada | Paket | 2 | 140.690.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | | | | | Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Yang Memadai | Unit | 2 | 101.000.000 | SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan | Sertifikat | 100 | 87.980.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | 3.25.06.1.02.0004 | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | 87.980.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina kelayakan dasar | Unit | 80 | 87.980.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | | | | | Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) | Dokumen | 1 | 102.708.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | 3.25.06.1.02.0004 | | | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | | | | 102.708.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen ISO 17065:2012 dan ISO 9001:2015 | Dokumen | 2 | 73.552.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | | | | | JUmlah DOkumen Kesesuaian Produk Yang Akan Disertifiasi | Dokumen | 2 | 13.336.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | | | | | | Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya | Orang | 20 | 15.820.000 | SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN | |
| | **Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan** | | | | | | | | **575.760.000** | | |
| | | | | | | Nilai Tukar Nelayan | Angka | 105.5 | 575.760.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | | 575.760.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Indeks harga yang diterima oleh nelayan | Angka | 108.54 | 575.760.000 | Bidang Perikanan Tangkap | |
| | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | | | | | 558.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan | Orang | 5050 | 558.510.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | |
| | | 3.25.03.1.01.0002 | | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | 558.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan | Dokumen | 1 | 7.000.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang diberikan premi asuransi | Orang | 5000 | 528.760.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah nelayan yang terdaftar kartu nelayan | Orang | 25 | 13.250.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah RTP yang difasilitasi usahanya | Kelompok | 25 | 9.500.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 17.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi | Orang | 60 | 17.250.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |
| | | 3.25.03.1.02.0004 | | | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | 17.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan Yang Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 30 | 17.250.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan** | | | | | | | | **396.500.000** | | |
| | | | | | | Nilai Tukar Pembudidaya Ikan | Angka | 110.5 | 396.500.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | 396.500.000 | | |
| | | | | | | Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya | Angka | 111.55 | 396.500.000 | Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas | |
| | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | | 396.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkat Keterampilannya | Orang | 60 | 396.500.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| | | 3.25.04.1.05.0007 | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 396.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang di fasilitasi sosialisasi kelembagaan | Kelompok | 20 | 12.120.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| | | | | | | Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan | Orang | 40 | 384.380.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| **Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan** | | | | | | | | | **3.569.784.000** | **Dinas Kelautan dan Perikanan** | |
| | | | | | | Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi | % | 0.79 | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | **Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif** | | | | | | | | **3.569.784.000** | | |
| | | | | | | Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan | % | 63 | 3.569.784.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | | 1.586.048.000 | | |
| | | | | | | Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif | % | 5 | 382.824.000 | Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 382.824.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan | Lokasi | 1 | 155.813.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | |
| | | 3.25.02.1.01.0002 | | | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | | | | 155.813.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kajian pencadangan kawasan konservasi | Dokumen | 1 | 155.813.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL | Orang | 4 | 227.011.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | |
| | | 3.25.02.1.01.0002 | | | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | | | | 227.011.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Stakeholder yang memahami peraturan perundang-undangan | Orang | 200 | 155.786.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Yang Dimanfaatkan | Lokasi | 4 | 71.225.000 | SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | % | 4 | 386.389.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 362.219.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola | Lokasi | 2 | 53.360.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | 53.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi | Dokumen | 2 | 9.160.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk | Unit | 2 | 10.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi | Orang | 60 | 34.200.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi | Ha | 2.2 | 308.859.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | 308.859.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan | Batang | 22000 | 308.859.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 24.170.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu | % | 100 | 24.170.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.02.0007 | | | Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan | | | | 24.170.000 | | |
| | | | | | | Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha | % | 100 | 24.170.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | % | 2.93 | 282.954.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 266.514.000 | | |
| | | | | | | Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi | Ha | 2.2 | 266.514.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | 266.514.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan | Batang | 22000 | 266.514.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 16.440.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu | % | 100 | 16.440.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.02.0007 | | | Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan | | | | 16.440.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha | % | 100 | 16.440.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | % | 7.8 | 533.881.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 506.881.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola | Lokasi | 2 | 138.140.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | 138.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi | Dokumen | 2 | 65.440.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk | Unit | 2 | 57.800.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi | Orang | 60 | 14.900.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi | Ha | 2.2 | 368.741.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.01.0003 | | | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | 368.741.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan | Batang | 22000 | 249.370.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan | Unit | 4 | 119.371.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu | % | 100 | 27.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.02.1.02.0007 | | | Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha | % | 100 | 27.000.000 | SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN | |
| | | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | | 227.375.000 | | |
| | | | | | | Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya | % | 50 | 227.375.000 | Bidang Perikanan Tangkap | |
| | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 227.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya | Lokasi | 1 | 227.375.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |
| | | 3.25.03.1.02.0004 | | | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | 227.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan Yang Mengetahui Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Ramah Lingkungan | Orang | 30 | 227.375.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 1.756.361.000 | | |
| | | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | % | 61 | 109.162.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 109.162.000 | | |
| | | | | | | Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan | Kali | 7 | 109.162.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0014 | | | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 109.162.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi | Unit | 20 | 109.162.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | % | 61 | 151.676.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 151.676.000 | | |
| | | | | | | Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan | Kali | 10 | 151.676.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0014 | | | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 151.676.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi | Unit | 20 | 151.676.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | | | | | Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | % | 61 | 83.000.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 83.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan | Kali | 8 | 83.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0014 | | | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 83.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi | Unit | 10 | 83.000.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan | % | 70 | 606.023.000 | Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 494.123.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Kelompok | 35 | 50.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0004 | | | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)yang Menerima Sarana dan prasarana | Kelompok | 3 | 50.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 18 | 81.900.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0013 | | | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 27.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 30 | 27.300.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0014 | | | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 27.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 30 | 27.300.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0016 | | | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan | | | | 27.300.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 30 | 27.300.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil | % | 100 | 362.223.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0013 | | | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 71.071.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil | % | 100 | 71.071.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0014 | | | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 278.452.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil | % | 100 | 278.452.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0016 | | | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 12.700.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil | % | 100 | 12.700.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 111.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 180 | 81.900.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 27.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 30 | 27.300.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0005 | | | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi | | | | 27.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 30 | 27.300.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.02.0006 | | | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi | | | | 27.300.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pada usaha pembudidaya di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP | Orang | 30 | 27.300.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | | | | | Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya | % | 100 | 30.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | % | 100 | 15.000.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0005 | | | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | % | 100 | 7.500.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.02.0006 | | | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | % | 100 | 7.500.000 | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN | |
| | | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat | % | 2 | 293.075.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 251.735.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil | % | 100 | 251.735.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0013 | | | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 10.390.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil | Orang | 6 | 10.390.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0014 | | | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 230.955.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil | Orang | 12 | 230.955.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.25.05.1.01.0016 | | | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 10.390.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil | Orang | 6 | 10.390.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 41.340.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | % | 100 | 41.340.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 15.820.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya | Orang | 15 | 15.820.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.02.0005 | | | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi | | | | 15.130.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya | Orang | 10 | 15.130.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.02.0006 | | | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi | | | | 10.390.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya | Orang | 10 | 10.390.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan | % | 2 | 240.505.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 73.826.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil | % | 100 | 73.826.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0013 | | | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 9.350.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil | Orang | 12 | 9.350.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0014 | | | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 8.468.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil | Orang | 12 | 8.468.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0016 | | | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 56.008.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil | Orang | 10 | 56.008.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 166.679.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | % | 100 | 166.679.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 55.898.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Orang | 12 | 55.898.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.02.0005 | | | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi | | | | 56.263.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya sesuai kewenangan provinsi | Orang | 10 | 56.263.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0006 | | | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi | | | | 54.518.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya sesuai kewenangan provinsi | Orang | 12 | 54.518.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur | % | 2 | 272.920.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | | | | | 119.322.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil | % | 100 | 119.322.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.01.0013 | | | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 56.048.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil | Orang | 18 | 56.048.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0014 | | | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 5.909.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil | Orang | 24 | 5.909.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.01.0016 | | | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | | | | 57.365.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil | Orang | 18 | 57.365.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 153.598.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | % | 100 | 153.598.000 | SEKSI PENGAWASAN | |
| | | 3.25.05.1.02.0003 | | | Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 57.086.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya | Orang | 18 | 57.086.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.05.1.02.0005 | | | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi | | | | 46.216.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya | Orang | 18 | 46.216.000 | SEKSI PENGAWASAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.25.05.1.02.0006 | | | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi | | | | 50.296.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya | Orang | 18 | 50.296.000 | SEKSI PENGAWASAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **55.662.881.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 83 | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **54.921.136.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 84 | 54.921.136.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 54.921.136.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 248.690.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 88.960.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 88.960.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.690.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.690.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 52.230.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 52.230.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 33.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 33.040.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 68.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 68.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 64.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 64.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 91.330.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 91.330.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 24.880.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 24.880.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 6.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 6.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 97.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 21.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 9.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 6.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 46.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 46.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 6.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 40.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 30.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 10.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 15.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 100.500.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 17.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 17.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.850.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 7.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 8.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 8.650.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 34.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 34.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 33.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 33.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 48.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 48.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 17.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 5 | 17.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 18 | 6.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 25.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 253.000.000 | Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 24.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 24.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 202.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 202.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 26.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 26.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 164.500.000 | Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 11.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 11.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 98.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 98.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 97.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 97.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 54.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 54.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 8.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 8.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 41.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 41.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 117.590.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 31.120.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 31.120.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.820.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.820.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 18.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 18.300.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 11.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 32.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 32.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 30.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 54.470.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 54.470.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 16.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 16.220.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 3.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 3.250.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 64.300.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 12.660.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 12.660.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 5.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 5.160.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 34.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 34.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 34.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 34.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 17.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 17.140.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 3.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 3.140.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 51.272.346.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 48.061.846.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 48.061.846.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 46.991.846.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 327 | 46.991.846.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 920.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 920.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 220.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 30 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 756.250.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 756.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 462.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 462.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 507.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 507.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 507.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 507.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.437.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 1.437.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 430.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 430.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 190.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 115.200.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 53.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 53.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 3.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 32.000.000 | | |
| | | | | | | Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal | Unit | 1 | 32.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 116.052.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 55.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 55.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 53.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 53.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 45.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 45.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 15.652.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 15.652.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 8.652.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 8.652.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 416.480.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 122.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 122.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 189.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 189.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 186.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 186.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 94.000.000 | Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 24.540.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 24.540.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 4.740.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 16.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 16.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 39.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 38.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 38.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 30.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 30.460.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 14.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 14.510.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 148.500.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 50.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 50.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 34.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 34.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 12.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 42.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 40.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 56.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 56.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 10.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 10.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 11.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 35.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 188.254.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 60.254.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 60.254.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 32.754.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 32.754.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 73.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 73.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 72.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 72.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 608.000.000 | Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 38.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 38.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 460.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 460.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 455.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 455.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 174.000.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 18.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 18.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 4.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 119.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 119.800.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 117.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 117.800.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 35.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 35.700.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 5.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 5.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.700.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 25.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 513.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 104.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 104.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 54.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 54.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 284.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 284.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 282.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 282.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 20 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 229.724.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 81.324.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 81.324.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 73.324.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 73.324.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 82.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 82.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 78.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 66.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 66.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 31.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 31.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **741.745.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.6 | 741.745.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 741.745.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 741.745.000 | SEKRETARIAT | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 741.745.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 741.745.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 359.445.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 359.445.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 382.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 1 | 382.300.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan** | | | | | | | | | **24.483.403.000** | **Dinas Kelautan dan Perikanan** | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan | % | 1.1 | | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | **Meningkatnya Produksi Garam** | | | | | | | | **520.062.000** | | |
| | | | | | | Produksi garam | Ton | 134640 | 520.062.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | | 520.062.000 | | |
| | | | | | | Persentase produksi garam | % | 2 | 520.062.000 | Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | 520.062.000 | | |
| | | | | | | Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya | Kelompok | 25 | 42.880.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | 3.25.02.1.03.0001 | | | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | | | | 42.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah petambak garam yang difasiltasi dan dibina | Orang | 100 | 42.880.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan | Kelompok | 4 | 13.645.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | 3.25.02.1.03.0001 | | | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | | | | 13.645.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya | Orang | 25 | 13.645.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya | Kelompok | 5 | 452.737.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | 3.25.02.1.03.0001 | | | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | | | | 452.737.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam | Jenis | 1 | 207.300.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Luas lahan garam yang menerapkan teknologi | Ha | 10 | 245.437.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya | Lokasi | 5 | 10.800.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | |
| | | 3.25.02.1.03.0001 | | | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | | | | 10.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data potensi garam | Kabupaten/ Kota | 9 | 10.800.000 | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Produksi Perikanan** | | | | | | | | **23.963.341.000** | | |
| | | | | | | Produksi perikanan | Ton | 952718 | 23.963.341.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | | | | | 9.778.793.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong | % | 72.72 | 583.640.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 583.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 5 | 120.980.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 120.980.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 10 | 52.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 70 | 6.150.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 18.480.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 30 | 44.350.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 5 | 9.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 80 | 4.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 75 | 4.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 20 | 2.300.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 2.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 2.300.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 50 | 66.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 66.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 66.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 3 | 4.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 4 | 4.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 30 | 380.360.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 380.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 4 | 380.360.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo | % | 100 | 635.108.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 635.108.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 9 | 416.888.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 416.888.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 2800 | 349.168.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 100 | 27.870.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 16.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 320 | 23.850.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 7 | 87.665.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 87.665.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 100 | 87.665.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 43 | 123.355.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 123.355.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 123.355.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 90 | 7.200.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 40000 | 7.200.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa | % | 72.27 | 584.829.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 584.829.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 5 | 31.887.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 31.887.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 300 | 5.887.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 45 | 16.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 6.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 40 | 4.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 3 | 18.327.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 18.327.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 40 | 5.025.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 60 | 13.302.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 50 | 60.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 3 | 60.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 60 | 98.215.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 98.215.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 2 | 98.215.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 60 | 50.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 30 | 50.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 70 | 326.400.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 326.400.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 10 | 326.400.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor | % | 70 | 1.104.456.000 | | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 1.104.456.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 9 | 46.000.000 | | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 46.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 2800 | 8.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 1100 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 16.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 110 | 1.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 6 | 3.000.000 | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 1200 | 1.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 3 | 1.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 10 | 100.000.000 | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 100.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 60 | 400.000.000 | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 400.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 10 | 31.656.000 | | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 31.656.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 3500 | 31.656.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 10 | 523.800.000 | | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 523.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 1 | 523.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan | % | 72 | 537.390.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 537.390.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 6 | 64.060.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 64.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 140 | 40.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 15 | 9.472.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 6.148.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 40 | 8.440.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 4 | 11.585.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 11.585.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 120 | 9.895.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 41 | 1.690.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 20 | 40.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 40.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 45 | 115.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 115.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 115.500.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 9 | 2.885.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 2.885.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 15 | 2.885.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 32 | 303.360.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 303.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 3 | 303.360.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending | % | 63 | 592.038.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 592.038.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 5 | 165.275.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 165.275.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 36 | 8.700.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 118 | 70.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 80.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 120 | 6.575.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 7 | 17.500.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 17.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 165 | 10.925.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 10 | 6.575.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 50 | 14.575.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 14.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 14.575.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 54 | 383.538.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 383.538.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 383.538.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 60 | 4.575.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 4.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 90 | 4.575.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 30 | 6.575.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 6.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 1 | 6.575.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak | % | 81 | 834.694.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 834.694.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 7 | 100.592.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 100.592.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 300 | 20.402.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 55 | 10.440.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 61.250.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 40 | 8.500.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 5 | 23.275.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 23.275.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 150 | 10.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 100 | 13.275.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 57 | 8.775.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 8.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 8.775.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 66 | 310.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 310.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 20 | 7.500.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 150 | 7.500.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 14 | 384.552.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 384.552.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 3 | 384.552.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung | % | 100 | 1.259.793.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 1.259.793.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 7 | 93.153.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 93.153.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 6500 | 9.830.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 6500 | 20.000.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 30.443.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 60 | 32.880.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 6 | 94.410.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 94.410.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 6500 | 43.200.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 75 | 51.210.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 57.14 | 60.960.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 60.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 60.960.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 100 | 215.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 215.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 2 | 215.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 35 | 63.550.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 63.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 20000 | 63.550.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 7.4 | 732.720.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 732.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 4 | 732.720.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang | % | 71.72 | 614.684.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 614.684.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 7 | 78.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 50 | 15.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 5 | 15.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 18.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 60 | 30.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 7 | 40.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 40.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 2000 | 20.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 43 | 20.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 20 | 55.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 55.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 50 | 100.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 100.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 7 | 26.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 26.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 60 | 26.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 25 | 315.684.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 315.684.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 1 | 315.684.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari | % | 72 | 1.197.023.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 1.197.023.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 9 | 885.329.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 885.329.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 3000 | 785.424.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 200 | 23.760.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 69.240.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 350 | 6.905.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 7 | 41.189.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 41.189.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 1300 | 15.000.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 100 | 26.189.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 33 | 7.200.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 7.200.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 70 | 183.853.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 183.853.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 183.853.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 90 | 24.465.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 24.465.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 10000 | 24.465.000 | SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 30 | 54.987.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 54.987.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 1 | 54.987.000 | SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto | % | 81.82 | 554.947.000 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |
| | | | | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | | | | | 554.947.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan | Jenis | 7 | 16.200.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 16.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan | Dokumen | 1050 | 3.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan | Unit | 60 | 2.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan | Laporan | 12 | 2.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan | Orang | 40 | 9.200.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan | Jenis | 4 | 119.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 119.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai | Unit | 120 | 6.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP | % | 40 | 113.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan | % | 28 | 7.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 1 | 7.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik | % | 42 | 408.447.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 408.447.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki | Unit | 1 | 408.447.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi | % | 16.22 | 1.300.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0002 | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | | | | 1.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi | Orang | 30 | 1.300.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya | % | 25 | 3.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | |
| | | 3.25.03.1.06.0003 | | | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya | Orang | 3 | 3.000.000 | Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase produksi perikanan tangkap | % | 5 | 1.280.191.000 | Bidang Perikanan Tangkap | |
| | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | | | | | 238.216.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan | Dokumen | 4 | 180.931.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.25.03.1.01.0002 | | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | 180.931.000 | | |
| | | | | | | Jumlah KUB yang difasilitasi Kelembagaannya | Kelompok | 1 | 9.500.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pelabuhan perikanan yang ditingkatkan tata kelola dan operasional kepelabuhanannya | Lokasi | 1 | 171.431.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah produksi perikanan yang didaratkan | Ton | 343717.5 | 57.285.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | |
| | | 3.25.03.1.01.0001 | | | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | 57.285.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaporkan Data | Kabupaten/Kota | 34 | 57.285.000 | SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 1.041.975.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan | Unit | 280 | 150.100.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |
| | | 3.25.03.1.02.0004 | | | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | 150.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Melalui TDKP | Unit | 160 | 82.650.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi alokasi usaha perikanan yang dikeluarkan | Unit | 40 | 67.450.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan | % | 0.25 | 891.875.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | |
| | | 3.25.03.1.02.0003 | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | 490.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan | Unit | 0 | 490.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.03.1.02.0004 | | | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | 401.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan | Unit | 15 | 376.875.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah lokasi kapal yang menerapkan Teknologi Penangkapan Ikan | Lokasi | 1 | 25.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | 14.184.548.000 | | |
| | | | | | | Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan | % | 100 | 808.192.000 | Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | | 808.192.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani | Kasus | 350 | 452.707.000 | SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN | |
| | | 3.25.04.1.05.0006 | | | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 452.707.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kab/Kota yang Melaporkan Data Peredaran Obat Ikan | Kabupaten/Kota | 35 | 44.932.000 | SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Lokasi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan | Lokasi | 35 | 396.675.000 | SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Terakses Informasi Kesehatan Ikan dan Lingungan | Orang | 350 | 11.100.000 | SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase Pengguna Layanan Pengujian | % | 20 | 340.485.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN | |
| | | 3.25.04.1.05.0007 | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 340.485.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Parameter Pengujian | Unit | 1 | 171.500.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium | sampel | 400 | 20.660.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Sertifikasi Laboratorium yang memenuhi standar teknis (2 Sertifikat) | Sertifikat | 2 | 148.325.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkat Kompetensinya | % | 29 | 15.000.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN | |
| | | 3.25.04.1.05.0007 | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis pelatihan yang diikuti petugas | Jenis | 5 | 15.000.000 | SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase produksi ikan konsumsi air laut | % | 5 | 11.274.856.000 | Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A | |
| | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | | 622.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut | Jenis | 1 | 20.000.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA | |
| | | 3.25.04.1.05.0007 | | | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Teknis (SDM) Loka yang Meningkat Keterampilannya | Orang | 5 | 20.000.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya | Lokasi | 1 | 602.000.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA | |
| | | 3.25.04.1.05.0002 | | | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi/dibangung | Unit | 1 | 250.000.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.04.1.05.0004 | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | 352.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi Ikan Konsumsi | Kg | 1575 | 352.000.000 | SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | | | | | 10.652.856.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya | Lokasi | 9 | 10.652.856.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | |
| | | 3.25.04.1.06.0003 | | | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | 10.652.856.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ikan Endemik Lokal yang di Produksi | Ekor | 200000 | 38.000.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi | Unit | 9 | 4.611.566.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi/Dibangun | Kg | 10500 | 2.755.546.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Produksi Benih Unggul | Ekor | 31500000 | 351.712.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Produksi Calon Induk Bermutu | Ekor | 5250 | 2.896.032.000 | SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Produksi perikanan budidaya | Ton | 609000 | 2.101.500.000 | Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas | |
| | | | | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 203.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha | Orang | 127 | 203.500.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| | | 3.25.04.1.01.0002 | | | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB | Unit | 3 | 64.040.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah unit pembesaran ikan yang memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB | Unit | 5 | 37.420.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah unit produksi pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB | Unit | 1 | 8.540.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 3.25.04.1.01.0003 | | | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan | | | | 93.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan data | Kabupaten/Ko | 35 | 93.500.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| | | | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | | 1.898.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya | Jenis | 3 | 1.898.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | |
| | | 3.25.04.1.05.0004 | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | | | | 1.898.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya | Kelompok | 0 | 1.898.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **86.630.448.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kesejahteraan peternak** | | | | | | | | | **691.550.000** | **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** | |
| | | | | | | Nilai Tukar Petani Peternakan | Angka | 100.8 | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | **Meningkatnya nilai tambah produk hasil ternak** | | | | | | | | **691.550.000** | | |
| | | | | | | Persentase nilai tambah produk hasil ternak | % | 5 | 691.550.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha | % | 12 | 350.000.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha | Unit | 2 | 350.000.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN | |
| | | 3.27.03.1.01.0019 | | | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pengolahan produk ternak yang terfasilitasi promosi & akses pasar | Kelompok | 3 | 151.320.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha terfasilitasi sertifikasi produk peternakan | Kelompok | 1 | 22.100.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi sarpras pengolahan & pemasaran | Kelompok | 1 | 119.180.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pemasaran | Orang | 10 | 57.400.000 | SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN | |
| | | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | 341.550.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) | % | 3.5 | 341.550.000 | Bidang Veteriner | |
| | | | | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | | | | | 341.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV | Buah | 15 | 341.550.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| | | 3.27.04.1.03.0001 | | | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | | | | 341.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi NKV | Unit | 40 | 96.500.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| | | | | | | jumlah sasaran yang terfasilitasi pembinaan higiene sanitasi | Unit | 6 | 245.050.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **54.552.687.000** | **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 71 | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **53.086.159.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82 | 53.086.159.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 53.086.159.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.190.746.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 194.746.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 194.746.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 2.500.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 81.616.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 81.616.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 23.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 23.880.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 20.300.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 53.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 53.950.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 500.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 5.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 5.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 305.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 305.500.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 500.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 230.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 75.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 685.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 685.500.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 11.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 11.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 53.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 53.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 500.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 605.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 605.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 11.000.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 3.118.889.000 | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 665.489.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 665.489.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 80.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 80.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 5.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 5.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 207.185.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 207.185.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 66.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 66.880.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 53.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 53.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 232.424.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 232.424.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 888.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 0 | 888.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 288.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 288.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 329.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 329.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 329.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 329.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.236.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 1.236.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 116.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 116.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 1.040.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 1.040.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 589.267.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 159.267.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 159.267.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.250.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 11.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 11.500.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 1.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 1.800.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 31.202.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 31.202.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.900.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 23.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 23.480.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 68.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 68.460.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 675.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 675.000 | Balai veteriner boyolali | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 352.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 352.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 1.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 310.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 41.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 41.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 78.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 11.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 19.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 19.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 20.000.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 18.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 18.500.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 9.500.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.073.900.000 | Balai Inseminasi Buatan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 442.380.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 442.380.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 189.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 189.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.202.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.202.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 43.068.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 43.068.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 194.735.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 194.735.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 176.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 176.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 4.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 172.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 172.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.455.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 1.455.320.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 49.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Unit | 1 | 49.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 155.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 155.420.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.050.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 1.050.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 46.113.357.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 33.862.915.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 33.862.915.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 33.546.515.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 205 | 33.546.515.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 266.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 266.400.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 25.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 178.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 178.740.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 70.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0007 | | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 8.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 8.740.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 108.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 0 | 108.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 108.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 20 | 108.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 555.316.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 555.316.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.106.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.106.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 78.614.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 78.614.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 27.246.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 27.246.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 96.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 96.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 87.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 87.800.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 225.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 15.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 15.550.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 0 | 165.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 10.173.386.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 10.173.386.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 630.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 630.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 9.537.386.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 9.537.386.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.040.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 1.040.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 360.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 360.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 178.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 178.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 183.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 183.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **1.466.528.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.4 | 1.466.528.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 1.466.528.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 1.466.528.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 1.466.528.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 1.466.528.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 349.768.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 349.768.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 1.116.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 1 | 1.116.760.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| **Meningkatkan pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan** | | | | | | | | | **88.032.804.000** | **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** | |
| | | | | | | Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan | % | 3.1 | | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | **Tercapainya Produksi Daging** | | | | | | | | **80.168.175.000** | | |
| | | | | | | Produksi daging | Kg | 457959903 | 80.168.175.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 33.336.929.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan | Dokumen | 4 | 9.763.031.000 | Bidang Veteriner | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor | | | | | 9.763.031.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan | Laporan | 4 | 9.763.031.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | 3.27.02.1.06.0001 | | | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | 9.763.031.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha obat hewan dan alsin obat hewan yang diawasi | Unit | 3 | 99.891.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan keamanan produk hewan | Unit | 12 | 9.663.140.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | | | | | Jumlah populasi ternak potong | (ST)/(AU) | 3745066 | 15.628.020.000 | Bidang Budidaya | |
| | | | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | | | | | 2.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok peternak potong yang meningkat skala usaha nya | Kelompok | 0 | 2.100.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | 2.100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak | Kelompok | 6 | 2.100.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak potong | Buah | 1 | 150.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Farming Practices (GFP) | Unit | 1 | 100.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak potong | Orang | 20 | 50.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 13.378.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pakan ternak potong yang produknya sesuai standar kualitas pakan | Unit | 1 | 12.164.910.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan | | | | 12.164.910.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kewenangan Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak potong | Orang | 40 | 30.000.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak potong | Unit | 1 | 12.134.910.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak potong | Buah | 1 | 1.213.110.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | 3.27.02.1.04.0004 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 1.213.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP) | Unit | 1 | 323.000.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak potong | Orang | 20 | 70.110.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak potong | Unit | 4 | 820.000.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi obat hewan | % | 1 | 166.969.000 | Bidang Veteriner | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor | | | | | 166.969.000 | | |
| | | | | | | Jumlah hewan/ternak yang difasilitasi obat hewan | Ekor | 10000 | 166.969.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | 3.27.02.1.06.0001 | | | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | 166.969.000 | | |
| | | | | | | Jumlah obat hewan yang di fasilitasi | Unit | 10000 | 166.969.000 | SEKSI PENGAWASAN OBAT HEWAN DAN KEAMANAN PRODUK HEWAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging | % | 1 | 4.280.409.000 | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 4.280.409.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi daging | % | 1 | 1.483.440.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 1.483.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah produksi ternak nonruminansia potong | Ekor | 20414 | 1.483.440.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi daging | % | 1 | 2.796.969.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 2.796.969.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bibit ternak ruminansia potong yang ber SKLB | Ekor | 61 | 608.000.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | | | | | Jumlah produksi ternak ruminansia potong | Ekor | 144 | 2.188.969.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | | | | | Persentase produksi dan distribusi semen beku | % | 1 | 3.498.500.000 | Balai Inseminasi Buatan Kelas A | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 3.498.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi semen segar | Angka | 27000 | 1.874.200.000 | SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 1.874.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ternak Pejantan Yang Layak Diproses semen bekunya | Ekor | 27 | 1.874.200.000 | SEKSI PEMELIHARAAN TERNAK DAN PELAYANAN REPRODUKSI | |
| | | | | | | Persentase semen beku yang dihasilkan dari semen segar yang layak diproduksi | % | 80 | 1.624.300.000 | SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI | |
| | | 3.27.02.1.04.0004 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 1.624.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah semen beku yang terdistribusi | Dosis | 432000 | 1.624.300.000 | SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI | |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | 124.710.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong | % | 12 | 124.710.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | 124.710.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak potong | Kelompok | 3 | 26.060.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 26.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan | Kelompok | 1 | 26.060.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak potong | Unit | 2 | 11.420.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 11.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak potong | Orang | 60 | 11.420.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak potong | Kelompok | 2 | 87.230.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 87.230.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak potong | Unit | 2 | 87.230.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | 37.941.604.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis | Dokumen | 4 | 34.235.350.000 | Bidang Veteriner | |
| | | | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | 34.235.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan situasi penyakit menular strategis (PHMS) | Laporan | 4 | 34.235.350.000 | SEKSI KESEHATAN HEWAN | |
| | | 3.27.04.1.01.0007 | | | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 34.235.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ternak /hewan Tersurveilans PHMS | Ekor | 2000 | 34.075.350.000 | SEKSI KESEHATAN HEWAN | |
| | | | | | | Jumlah ternak/hewan yang tervaksinasi | Ekor | 14000 | 160.000.000 | SEKSI KESEHATAN HEWAN | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan | Dokumen | 4 | 1.425.733.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi | | | | | 1.425.733.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengujian sampel | Laporan | 4 | 897.873.000 | Balai veteriner boyolali | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 897.873.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan | sampel | 26400 | 897.873.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | | | | | Jumlah laporan lalu lintas ternak | Laporan | 4 | 188.800.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 188.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah Jateng Selatan | Ekor | 1750000 | 188.800.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | | | | | Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan | Laporan | 4 | 339.060.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 339.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Selatan | Ekor | 13950 | 339.060.000 | Balai veteriner boyolali | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara | Dokumen | 4 | 1.483.571.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | | | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi | | | | | 1.483.571.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengujian sampel | Laporan | 4 | 711.300.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 711.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara | sampel | 25750 | 711.300.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | | | Jumlah laporan lalu lintas ternak | Laporan | 4 | 290.100.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 290.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah jateng Utara | Ekor | 1750000 | 290.100.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | | | Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan | Laporan | 4 | 482.171.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | 3.27.04.1.02.0004 | | | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | | | | 482.171.000 | | |
| | | | | | | Jumlah hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Utara | Ekor | 14750 | 482.171.000 | Balai veteriner semarang | |
| | | | | | | Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali | % | 7 | 796.950.000 | Bidang Veteriner | |
| | | | | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan | | | | | 796.950.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah RPH yang tidak melakukan pemotongan betina produktif | Unit | 6 | 796.950.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| | | 3.27.04.1.03.0001 | | | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit | | | | 796.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran RPH yang diawasi pemotongan betina produktif | Unit | 6 | 796.950.000 | SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | |
| | | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | 8.764.932.000 | | |
| | | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong | % | 1.08 | 8.764.932.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | | | 8.764.932.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak potong yang terbentuk | Kelompok | 3 | 8.764.932.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | 3.27.07.1.03.0006 | | | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | | | | 8.764.932.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak potong | Kelompok | 4 | 8.640.390.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | | | | | Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak potong | Orang | 250 | 124.542.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | **Tercapainya Produksi Susu** | | | | | | | | **1.378.683.000** | | |
| | | | | | | Produksi susu | Kg | 94005743 | 1.378.683.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 1.140.706.000 | | |
| | | | | | | Jumlah populasi ternak perah | (ST)/(AU) | 113440 | 437.675.000 | Bidang Budidaya | |
| | | | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak perah | Buah | 1 | 150.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.03.0003 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Farming Practices (GFP) | Unit | 1 | 100.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak perah | Orang | 20 | 50.000.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 287.675.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pakan ternak perah yang produknya sesuai standar kualitas pakan | Unit | 1 | 130.785.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 130.785.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak perah | Orang | 40 | 30.000.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak perah | Unit | 1 | 100.785.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak perah | Buah | 1 | 156.890.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | 3.27.02.1.04.0004 | | | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan | | | | 156.890.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kewenangan Provinsi | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP) | Unit | 1 | 89.260.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak perah | Orang | 20 | 67.630.000 | SEKSI PERBIBITAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu | % | 1 | 703.031.000 | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 703.031.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi susu | % | 1 | 703.031.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 703.031.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bibit ternak ruminansia perah yang ber SKLB | Ekor | 3 | 81.296.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | | | | | Jumlah produksi ternak ruminansia perah | Ekor | 10 | 621.735.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | 156.772.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah | % | 12 | 156.772.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | 156.772.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak perah | Kelompok | 1 | 7.332.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 7.332.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok ternak perah yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan | Kelompok | 1 | 7.332.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak perah | Unit | 1 | 15.085.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 15.085.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak perah | Orang | 30 | 15.085.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak perah | Kelompok | 2 | 134.355.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 134.355.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak perah | Unit | 2 | 134.355.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | 81.205.000 | | |
| | | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah | % | 3.62 | 81.205.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | | | 81.205.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak perah yang terbentuk | Unit | 1 | 81.205.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | 3.27.07.1.03.0006 | | | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | | | | 81.205.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak perah | Kelompok | 4 | 33.340.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak perah | Orang | 180 | 47.865.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | **Tercapainya Produksi Telur** | | | | | | | | **6.485.946.000** | | |
| | | | | | | Produksi telur | Kg | 345079651 | 6.485.946.000 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 2.655.865.000 | | |
| | | | | | | Jumlah populasi ternak petelur | (ST)/(AU) | 247848 | 22.305.000 | Bidang Budidaya | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 22.305.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pakan ternak petelur yang produknya sesuai standar kualitas pakan | Unit | 0 | 22.305.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 22.305.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak petelur | Unit | 1 | 22.305.000 | SEKSI PAKAN TERNAK | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur | % | 1 | 2.633.560.000 | Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | | 2.633.560.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi petelur | % | 1 | 2.633.560.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA | |
| | | 3.27.02.1.04.0001 | | | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | | | | 2.633.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah produksi ternak nonruminansia petelur | Ekor | 27060 | 2.633.560.000 | SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK NON RUMINANSIA | |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | 568.518.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur | % | 12 | 568.518.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | 568.518.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak petelur | Unit | 2 | 10.110.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 10.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak petelur | Orang | 60 | 10.110.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | | | | | Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak petelur | Kelompok | 2 | 558.408.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.03.1.01.0009 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | | | | 558.408.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak petelur | Unit | 2 | 558.408.000 | SEKSI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR | |
| | | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | 3.261.563.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur | % | 2.29 | 3.261.563.000 | Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan | |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | | | 3.261.563.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak petelur yang terbentuk | Kelompok | 1 | 3.261.563.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | 3.27.07.1.03.0006 | | | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | | | | 3.261.563.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak petelur | Kelompok | 4 | 3.229.630.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| | | | | | | Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak petelur | Orang | 120 | 31.933.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN KEMITRAAN | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **143.277.041.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Pertanian dan Perkebunan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Memantapkan Produksi Komoditas Pertanian dan Perkebunan sebagai wujud Kontribusi Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan di Jawa Tengah** | | | | | | | | | **37.915.835.000** | **Dinas Pertanian dan Perkebunan** | |
| | | | | | | Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | % | 0.16 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | **Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura** | | | | | | | | **6.332.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi bawang merah | % | 2.5 | 1.070.945.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 1.070.945.000 | | |
| | | | | | | Produksi bawang merah | Ton | 527875 | 1.070.945.000 | Bidang Hortikultura | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 1.070.945.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Bawang Merah | Ha | 52776 | 1.070.945.000 | SEKSI TANAMAN SAYURAN | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 1.070.945.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Bawang Merah | Ha | 55 | 1.070.945.000 | SEKSI TANAMAN SAYURAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi cabe | % | 1.5 | 4.078.055.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 4.078.055.000 | | |
| | | | | | | Produksi cabai | Ton | 346115 | 4.078.055.000 | Bidang Hortikultura | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 4.078.055.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Cabai | Ha | 44364 | 4.078.055.000 | SEKSI TANAMAN SAYURAN | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 4.078.055.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Cabai | Ha | 300 | 4.078.055.000 | SEKSI TANAMAN SAYURAN | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi durian | % | 2.5 | 550.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Produksi durian | Ton | 153410 | 550.000.000 | Bidang Hortikultura | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Alpukat | Ha | 15 | 390.000.000 | SEKSI TANAMAN BUAH | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 390.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Alpukat | Ha | 20 | 390.000.000 | SEKSI TANAMAN BUAH | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Durian | Ha | 28 | 160.000.000 | SEKSI TANAMAN BUAH | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Durian | Ha | 10 | 160.000.000 | SEKSI TANAMAN BUAH | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi jahe | % | 3 | 98.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 98.000.000 | | |
| | | | | | | Produksi jahe | Ton | 35908 | 98.000.000 | Bidang Hortikultura | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 98.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Jahe | Ha | 1647 | 98.000.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 98.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Jahe | Ha | 1 | 63.000.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Kencur | Ha | 1 | 35.000.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi melati | % | 2 | 535.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 535.000.000 | | |
| | | | | | | Produksi melati | Ton | 25120 | 535.000.000 | Bidang Hortikultura | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 535.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Panen Melati | Ha | 2 | 535.000.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 535.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanam Melati | Ha | 3 | 535.000.000 | SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT | |
| | **Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan** | | | | | | | | **26.486.627.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi jagung | % | 0.2 | 749.745.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 749.745.000 | | |
| | | | | | | Produksi jagung | Ton | 3583730 | 749.745.000 | Bidang Tanaman Pangan | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 749.745.000 | | |
| | | | | | | Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (jagung) | Ha | 584552 | 749.745.000 | SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 749.745.000 | | |
| | | | | | | Capaian luas tanam bantuan benih Jagung dan Serealia Lainnya | Ha | 700 | 749.745.000 | SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi kedelai | % | 0.2 | 361.269.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 361.269.000 | | |
| | | | | | | Produksi kedelai | Ton | 52762 | 361.269.000 | Bidang Tanaman Pangan | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 361.269.000 | | |
| | | | | | | Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (kedelai) | Ha | 31303 | 361.269.000 | SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 361.269.000 | | |
| | | | | | | Capaian luas tanam bantuan benih kedelai | Ha | 200 | 361.269.000 | SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi padi | % | 0.2 | 25.375.613.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 16.460.331.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan | % | 3 | 2.724.901.000 | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 2.724.901.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelembagaan pengelola alsintan | Unit | 1133 | 2.724.901.000 | SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 2.724.901.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani yang difasilitasi alsintan | Kelompok | 110 | 2.724.901.000 | SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya | % | 2 | 1.180.950.000 | Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 1.180.950.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah informasi harga pasar yang disebarluaskan | Komoditi | 6 | 85.000.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kab/kota yang dipublikasikan informasi harga pasar | Kabupaten/Kota | 35 | 85.000.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | | | | | Jumlah kelompok pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya | Kelompok | 105 | 1.065.950.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 1.065.950.000 | | |
| | | | | | | Angka persentase susut hasil padi | % | 10.15 | 100.000.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | | | | | Jumlah alat pasca panen perkebunan/tanaman pangan/hortikultura | Unit | 5 | 965.950.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | | | | | Jumlah kelompok pengolah hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya | Kelompok | 35 | 30.000.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah alat pengolah hasil perkebunan/tanaman pangan/hortikultura | Paket | 7 | 30.000.000 | SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta | % | 85 | 2.603.073.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta | |
| | | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | | 2.603.073.000 | | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih Buah | Batang | 15000 | 834.124.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 834.124.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi benih Tanaman Buah | Batang | 20000 | 834.124.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih Kedelai | Ton | 1.6 | 18.867.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 18.867.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi benih Palawija | Ton | 0.8 | 18.867.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih Kentang | Ton | 8 | 368.675.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 368.675.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi benih Sayur | Ton | 8 | 368.675.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih Padi | Ton | 49 | 1.236.833.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 1.236.833.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi benih Padi | Ton | 91 | 1.236.833.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih Planlet | Batang | 17000 | 144.574.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 144.574.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Produksi Planlet benih | Batang | 22000 | 144.574.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas | % | 85 | 2.483.517.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas | |
| | | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | | 2.483.517.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengembangan tanaman hias | Batang | 525 | 147.556.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 147.556.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengembangan Tanaman Hias | Batang | 12000 | 147.556.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih bawang merah | Ton | 4.25 | 82.245.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 82.245.000 | | |
| | | | | | | Jumlah luas Perbanyakan Benih Bawang Merah | Ha | 0.5 | 82.245.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih padi | Ton | 77.35 | 1.350.324.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 1.350.324.000 | | |
| | | | | | | Jumlah luas Perbanyakan Benih Padi | Ha | 36 | 1.350.324.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih palawija | Ton | 5.44 | 7.910.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 7.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah luas Perbanyakan Benih Palawija | Ha | 0.5 | 7.910.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | | | | | Jumlah Produksi benih tanaman buah | Batang | 1000 | 895.482.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 895.482.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perbanyakan benih Tanaman Buah | Batang | 1000 | 895.482.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang | % | 85 | 2.670.893.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang | |
| | | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | | 2.670.893.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perbanyakan benih tanaman buah | Batang | 2000 | 813.278.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 813.278.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perbanyakan benih tanaman buah | Batang | 1000 | 813.278.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih padi | Ton | 35 | 1.832.615.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 1.832.615.000 | | |
| | | | | | | Luas perbanyakan benih padi | Ha | 47 | 1.832.615.000 | SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN | |
| | | | | | | Jumlah produksi benih sayuran | Ton | 0.1 | 25.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Luas perbanyakan benih sayuran | Ha | 0.2 | 25.000.000 | SEKSI BENIH HORTIKULTURA | |
| | | | | | | Persentase layanan sertifikasi benih | % | 100 | 1.079.747.000 | | |
| | | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | | 1.079.747.000 | | |
| | | | | | | Pengawasan peredaran benih perkebunan | Bulan | 12 | 36.208.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 36.208.000 | | |
| | | | | | | Terpantaunya mutu benih tanaman perkebunan yang beredar | Bulan | 12 | 36.208.000 | | |
| | | | | | | Pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan | Bulan | 12 | 228.142.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 228.142.000 | | |
| | | | | | | Terpantaunya mutu benih tanaman pangan yang beredar | Bulan | 12 | 228.142.000 | | |
| | | | | | | Pengujian laboratorium hortikultura | Lembar | 122 | 27.140.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | | | | 27.140.000 | | |
| | | | | | | Terbitnya sertifikat benih tanaman hortikultura | Lembar | 1075 | 27.140.000 | | |
| | | | | | | Pengujian laboratorium tanaman pangan | Lembar | 1.075 | 40.283.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0001 | | | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih | | | | 40.283.000 | | |
| | | | | | | Terbitnya sertifikat benih tanaman pangan | Lembar | 122 | 40.283.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Sertifikasi benih hortikultura buah | Batang | 518175 | 138.351.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 138.351.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih hortikultura tanaman buah bersertifikat | Batang | 518175 | 138.351.000 | | |
| | | | | | | Sertifikasi benih hortikultura sayuran | Ha | 110 | 159.390.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 159.390.000 | | |
| | | | | | | Terpantaunya mutu benih tanaman hortikultura yang beredar | Bulan | 12 | 123.390.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih hortikultura tanaman sayuran | Ton | 110 | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Sertifikasi benih padi | Ha | 5454 | 376.028.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 376.028.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih padi bersertifikat | Ton | 5454 | 376.028.000 | | |
| | | | | | | Sertifikasi benih palawija | Ha | 1111 | 51.705.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 51.705.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih palawija bersertifikat | Ton | 1111 | 51.705.000 | | |
| | | | | | | Sertifikasi benih tanaman perkebunan | Batang | 848720 | 22.500.000 | | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih tanaman perkebunan | Batang | 848720 | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan | % | 100 | 350.000.000 | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah LKMA yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan | Unit | 20 | 350.000.000 | SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah LKMA yang difasilitasi kegiatan pembiayaan | Orang | 300 | 350.000.000 | SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN | |
| | | | | | | Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani | % | 2.5 | 656.900.000 | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 656.900.000 | | |
| | | | | | | luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani | Ha | 16550 | 656.900.000 | SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 656.900.000 | | |
| | | | | | | Luas lahan yang difasilitasi kegiatan asuransi | Ha | 15500 | 656.900.000 | SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN | |
| | | | | | | Persentase luas lahan yang dioptimasi | % | 2.5 | 312.657.000 | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 312.657.000 | | |
| | | | | | | jumlah luasan lahan yang dioptimasi | Ha | 200 | 312.657.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 312.657.000 | | |
| | | | | | | jumlah benih mendukung optimasi lahan | Kg | 500 | 10.500.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | |
| | | | | | | jumlah pupuk organik mendukung optimasi lahan | Ton | 30 | 302.157.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | |
| | | | | | | Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi | % | 93 | 236.757.000 | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 236.757.000 | | |
| | | | | | | jumlah kab/kota yang menyalurkan pupuk sesuai alokasi | Kabupaten/Kota | 35 | 236.757.000 | SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 236.757.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi distribusi pupuk | Orang | 350 | 236.757.000 | SEKSI PUPUK DAN PEMBIAYAAN | |
| | | | | | | Produksi padi | Ton | 9613469 | 2.160.936.000 | Bidang Tanaman Pangan | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 2.160.936.000 | | |
| | | | | | | Capaian Luas Panen  Tanaman Pangan (padi) | Ha | 1689538 | 2.160.936.000 | SEKSI PADI | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 2.160.936.000 | | |
| | | | | | | Capaian luas tanam  bantuan benih Padi | Ha | 5100 | 2.160.936.000 | SEKSI PADI | |
| | | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | 5.960.000.000 | | |
| | | | | | | Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik | m | 7420274 | 5.960.000.000 | Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian | |
| | | | | Penataan Prasarana Pertanian | | | | | 5.960.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Jaringan irigasi alternatif | % | 5 | 4.880.000.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | |
| | | 3.27.03.1.01.0001 | | | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | | | | 4.880.000.000 | | |
| | | | | | | Jaringan Irigasi Alternatif yang difasilitasi (unit) | Unit | 40 | 4.880.000.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | |
| | | | | | | Persentase jaringan irigasi tersier yang baik | % | 1.88 | 1.080.000.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | |
| | | 3.27.03.1.01.0001 | | | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | | | | 1.080.000.000 | | |
| | | | | | | jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi (m) | m | 900 | 1.080.000.000 | SEKSI LAHAN DAN IRIGASI | |
| | | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | | | 745.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam | % | 10 | 100.000.000 | Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A | |
| | | | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Luasan lahan yang terdampak Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang bisa ditangani | % | 10 | 100.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.05.1.01.0002 | | | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Luasan lahan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang tertangani | Ha | 40 | 100.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) | % | 15 | 645.000.000 | Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A | |
| | | | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | | | | | 645.000.000 | | |
| | | | | | | Luasan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap luas pengembangan tanaman | % | 15 | 645.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | |
| | | 3.27.05.1.01.0001 | | | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | 645.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Agens Pengendali Hayati (APH) yang diproduksi dan digunakan untuk pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Liter | 285 | 25.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Luasan pengendalian OPT tanaman hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabe) | Ha | 20 | 165.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Luasan pengendalian OPT tanaman  pangan (padi, jagung kedelai) | Ha | 300 | 410.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Luasan pengendalian OPT tanaman perkebunan (tebu, kelapa, kopi) | Ha | 20 | 45.000.000 | SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN | OPD Provinsi |
| | | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | 2.210.282.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 2.5 | 1.440.282.000 | Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha | |
| | | | | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | | | | | 256.970.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya | % | 2.5 | 256.970.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN | |
| | | 3.27.07.1.01.0004 | | | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian | | | | 256.970.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 237 | 256.970.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN | |
| | | | | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | | | | | 560.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan | % | 0.2 | 560.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN | |
| | | 3.27.07.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | | | | 560.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani yang difasilitasi promosi pemasaran | Kelompok | 60 | 425.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN | |
| | | | | | | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan | Kelompok | 127 | 135.000.000 | SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN | |
| | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | | | | 623.312.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi | % | 60 | 623.312.000 | SEKSI BINA USAHA | |
| | | 3.27.07.1.03.0006 | | | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani | | | | 623.312.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi | Unit | 6 | 623.312.000 | SEKSI BINA USAHA | |
| | | | | | | Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih | % | 100 | 770.000.000 | BALAI PELATIHAN PERTANIAN | |
| | | | | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | | | | | 770.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian | Orang | 5250 | 770.000.000 | SEKSI PELATIHAN | |
| | | 3.27.07.1.02.0001 | | | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM pertanian | Orang | 3476 | 400.000.000 | SEKSI PELATIHAN | OPD Provinsi |
| | | 3.27.07.1.02.0002 | | | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | | | | 370.000.000 | | |
| | | | | | | Optimalisasi capaian sasaran teknis SDM pertanian | Orang | 1200 | 370.000.000 | SEKSI PELATIHAN | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan** | | | | | | | | **5.097.208.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi kelapa | % | 0.009 | 2.118.573.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 2.118.573.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan | % | 1 | 1.418.573.000 | Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | | 1.418.573.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman rempah dan penyegar | % | 1 | 581.451.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 581.451.000 | | |
| | | | | | | Produksi tanaman rempah dan penyegar | Kg | 50000 | 415.363.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Produksi tanaman rempah dan penyegar | Kg | 29500 | 166.088.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman semusim | % | 1 | 594.106.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 594.106.000 | | |
| | | | | | | Produksi tanaman semusim | Ton | 1050 | 594.106.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman tahunan | % | 1 | 243.016.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 243.016.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Produksi tanaman tahunan | Butir | 40000 | 243.016.000 | SEKSI PRODUKSI | |
| | | | | | | Produksi kelapa | Ton | 167187 | 700.000.000 | | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kelapa | Ha | 50 | 700.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman kelapa yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon | Batang | 7700 | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi kopi | % | 0.009 | 967.157.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 967.157.000 | | |
| | | | | | | Produksi kopi | Ton | 26005 | 967.157.000 | Bidang Perkebunan | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 967.157.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kopi | Ha | 50 | 967.157.000 | SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 967.157.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman kopi yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon | Batang | 68000 | 967.157.000 | SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi tebu | % | 0.009 | 2.011.478.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 2.011.478.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan | % | 3 | 1.311.478.000 | Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A | |
| | | | | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | | | | 1.311.478.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar siap salur | % | 1 | 552.527.000 | SEKSI BENIH | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 552.527.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih tanaman rempah dan penyegar siap tanam | Batang | 40000 | 552.527.000 | SEKSI BENIH | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman semusim siap salur | % | 3 | 600.000.000 | SEKSI BENIH | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih tanaman semusim siap tanam | Batang | 45000 | 600.000.000 | SEKSI BENIH | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman tahunan siap salur | % | 1 | 158.951.000 | SEKSI BENIH | |
| | | 3.27.02.1.02.0005 | | | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan | | | | 158.951.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya benih tanaman tahunan siap tanam | Batang | 2500 | 158.951.000 | SEKSI BENIH | |
| | | | | | | Produksi tebu | Ton | 2562216 | 700.000.000 | | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Peningkatan luas tanaman produktif (TM) tebu | Ha | 300 | 700.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon | Batang | 0 | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana produksi tanaman tebu yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon | Kg | 53000 | 500.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kesejahteraan Petani** | | | | | | | | | **90.000.000** | | |
| | | | | | | NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Angka | 105.17 | | | |
| | **Meningkatnya NTP Hortikultura** | | | | | | | | **30.000.000** | | |
| | | | | | | NTP Hortikultura | Angka | 108.49 | 30.000.000 | | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura | % | 1.5 | 30.000.000 | | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen | Kelompok | 5 | 30.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen | Kelompok | 4 | 30.000.000 | | |
| | **Meningkatnya NTP Perkebunan** | | | | | | | | **30.000.000** | | |
| | | | | | | NTP Perkebunan Rakyat | Angka | 100.97 | 30.000.000 | | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan | % | 1.5 | 30.000.000 | | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen | Kelompok | 2 | 30.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen | Kelompok | 4 | 30.000.000 | | |
| | **Meningkatnya NTP Tanaman Pangan** | | | | | | | | **30.000.000** | | |
| | | | | | | NTP Tanaman Pangan | Angka | 105.57 | 30.000.000 | | |
| | | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan | % | 1.5 | 30.000.000 | | |
| | | | | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen | Kelompok | 3 | 30.000.000 | | |
| | | 3.27.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen | Kelompok | 4 | 30.000.000 | | |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **111.809.652.000** | **Dinas Pertanian dan Perkebunan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 100 | | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **110.909.652.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 81 | 110.909.652.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 110.909.652.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 805.000.000 | BALAI PELATIHAN PERTANIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 188.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 188.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.000 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.000 | | | Pengadaan Mebel | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 252.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 252.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 275.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 275.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 978.227.000 | Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 63.227.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 63.227.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 13.227.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 13.227.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 365.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 365.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 365.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 365.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 530.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 530.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 425.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | 425.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 101.161.313.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 92.950.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 92.950.400.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 87.963.499.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 618 | 87.963.499.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 4.986.901.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 4.986.901.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 184.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 184.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 2 | 4.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 60 | 65.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 40 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.386.713.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.386.713.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 176.713.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 176.713.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 975.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 975.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 1.485.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 13 | 1.485.100.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 975.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 3 | 975.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 65.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 347.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 21 | 347.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0011 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 98.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 15 | 98.100.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.399.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 3.399.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 13.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 13.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 965.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 965.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 116.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 116.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.305.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 2.305.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.675.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 25 | 1.675.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 665.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 17 | 665.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 135.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 20 | 135.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 460.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 460.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.373.220.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 125.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 406.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 406.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 406.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 406.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 205.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 205.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 180.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 636.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 636.720.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 36.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 36.720.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 550.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 683.020.000 | | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 179.070.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 179.070.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 14.070.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 14.070.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 10.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 135.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 135.000.000 | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 239.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 239.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 216.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 216.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 18.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 18.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 237.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 10 | 237.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 157.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 157.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.776.872.000 | Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 117.382.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 117.382.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 11.521.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 11.521.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 93.361.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 93.361.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 407.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 407.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 179.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 179.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 226.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 226.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.210.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 1.210.090.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 52.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 52.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 27.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 27.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 1.130.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.249.000.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 386.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 386.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 285.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 285.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 77.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 77.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 223.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 223.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 205.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 205.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 637.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 637.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 1 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 10 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 543.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | 543.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.883.000.000 | Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 156.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 156.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 26.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah | Laporan | 1 | 26.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 560.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 560.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 560.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 0 | 560.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 362.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 362.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 250.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 1.800.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 192.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | 192.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1.498.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 0 | 1.498.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **900.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.85 | 900.000.000 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 900.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 900.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 10 | 500.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 21 | 400.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **149.815.487.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan ketahanan energi** | | | | | | | | | **5.522.617.000** | **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Energi | Angka | 4.6 | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | **Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang berkelanjutan dalam Bauran Energi** | | | | | | | | **2.381.039.000** | | |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi | % | 21.32 | 2.381.039.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | 3.29.05 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | | | | | | 2.381.039.000 | | |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah | SBM | 91370.61 | 881.955.000 | | |
| | | | | Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi | | | | | 881.955.000 | | |
| | | | | | | Persentase desa yang melaksanakan Konservasi Energi di Jawa Tengah | % | 28.8 | 881.955.000 | | |
| | | 3.29.05.1.10.0002 | | | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota | | | | 881.955.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED di Jawa Tengah | Dokumen | 1 | 688.581.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah | Orang | 904 | 193.374.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria | SBM | 18.35 | 55.560.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 55.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria | Orang | 6 | 55.560.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 55.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Muria | Unit | 2 | 55.560.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan | SBM | 61.17 | 137.360.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 137.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan | Orang | 30 | 137.360.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 137.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Selatan | Unit | 2 | 137.360.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi | SBM | 61.17 | 139.560.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 139.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi | Orang | 30 | 139.560.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 139.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Merapi | Unit | 2 | 139.560.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak | SBM | 30.58 | 99.560.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 99.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang Demak | Orang | 18 | 99.560.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 99.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Semarang Demak | Unit | 2 | 99.560.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan | SBM | 61.17 | 139.560.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 139.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan | Orang | 30 | 139.560.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 139.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Selatan | Unit | 2 | 139.560.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah | SBM | 30.58 | 99.560.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 99.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah | Orang | 18 | 99.560.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 99.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Tengah | Unit | 2 | 99.560.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara | SBM | 39241.43 | 151.320.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 151.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara | Orang | 150 | 151.320.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 151.320.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Utara | Unit | 2 | 151.320.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu | SBM | 61.17 | 137.360.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 137.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Sewu Lawu | Orang | 45 | 137.360.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 137.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Sewu Lawu | Unit | 2 | 137.360.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan | SBM | 39259.78 | 190.562.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 190.562.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan | Orang | 156 | 190.562.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 190.562.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Selatan | Unit | 3 | 190.562.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara | SBM | 61.17 | 139.560.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 139.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara | Orang | 30 | 139.560.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 139.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Utara | Unit | 2 | 139.560.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo | SBM | 30.58 | 99.560.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 99.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo | Orang | 18 | 99.560.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 99.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Solo | Unit | 2 | 99.560.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo | SBM | 45.88 | 109.562.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | |
| | | | | Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | | | | | 109.562.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo | Orang | 15 | 109.562.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.05.1.07.0007 | | | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT | | | | 109.562.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Ungaran Telomoyo | Unit | 5 | 109.562.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | **Terpenuhinya kebutuhan energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat** | | | | | | | | **3.141.578.000** | | |
| | | | | | | Tingkat konsumsi tenaga listrik | KWh/Kapita | 807 | 3.141.578.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | 3.29.06 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | | | 3.141.578.000 | | |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah | % | 65.04 | 916.018.000 | | |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 916.018.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah | % | 32.6 | 916.018.000 | | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 916.018.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Jawa Tengah | Laporan | 24 | 916.018.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria | % | 51.27 | 158.025.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria | % | 100 | 33.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Muria | Dokumen | 30 | 33.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria | % | 5.16 | 33.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 33.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Muria | Laporan | 30 | 33.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 92.025.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria | % | 97.39 | 92.025.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 2.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Muria | Dokumen | 1 | 2.080.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 89.945.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Muria | RT/KK | 50 | 89.945.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan | % | 49.74 | 194.790.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 16.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan | % | 100 | 16.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 16.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Selatan | Dokumen | 15 | 16.500.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan | % | 2.08 | 22.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Selatan | Laporan | 20 | 22.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 156.290.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan | % | 97.39 | 156.290.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 3.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Selatan | Dokumen | 1 | 3.120.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 153.170.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Selatan | RT/KK | 100 | 153.170.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi | % | 49.72 | 211.290.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Merapi | % | 100 | 33.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Merapi | Dokumen | 30 | 33.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi | % | 2.04 | 22.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Merapi | Laporan | 20 | 22.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 156.290.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi | % | 97.39 | 156.290.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 3.120.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Merapi | Dokumen | 1 | 3.120.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 153.170.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Merapi | RT/KK | 100 | 153.170.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak | % | 52.13 | 182.165.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 56.100.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak | % | 100 | 56.100.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 56.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Semarang Demak | Dokumen | 51 | 56.100.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak | % | 6.86 | 33.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Semarang Demak | Laporan | 30 | 33.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 93.065.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang Demak | % | 97.39 | 93.065.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 3.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Semarang Demak | Dokumen | 1 | 3.120.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 89.945.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Semarang Demak | RT/KK | 50 | 89.945.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan | % | 49.42 | 188.190.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan | % | 100 | 19.800.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Selatan | Dokumen | 18 | 19.800.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 12.100.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan | % | 1.45 | 12.100.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 12.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Selatan | Laporan | 10 | 12.100.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 156.290.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan | % | 97.39 | 156.290.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 3.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Selatan | Dokumen | 1 | 3.120.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 153.170.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Selatan | RT/KK | 100 | 153.170.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah | % | 49.12 | 180.490.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 13.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah | % | 100 | 13.200.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 13.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Tengah | Dokumen | 12 | 13.200.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah | % | 0.85 | 11.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Tengah | Laporan | 10 | 11.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 156.290.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah | % | 97.4 | 156.290.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 3.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Tengah | Dokumen | 1 | 3.120.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 153.170.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Tengah | RT/KK | 100 | 153.170.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara | % | 50.08 | 210.190.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara | % | 100 | 26.400.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 26.400.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Utara | Dokumen | 24 | 26.400.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara | % | 2.78 | 27.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Utara | Laporan | 25 | 27.500.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 156.290.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara | % | 97.39 | 156.290.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 3.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Utara | Dokumen | 1 | 3.120.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 153.170.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Utara | RT/KK | 100 | 153.170.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu | % | 49.64 | 138.225.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu | % | 100 | 26.400.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Sewu Lawu | Dokumen | 24 | 26.400.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 19.800.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu | % | 1.89 | 19.800.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Sewu Lawu | Laporan | 18 | 19.800.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 92.025.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Sewu Lawu | % | 97.39 | 92.025.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 2.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Sewu Lawu | Dokumen | 1 | 2.080.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 89.945.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Sewu Lawu | RT/KK | 50 | 89.945.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan | % | 49.66 | 210.190.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan | % | 100 | 26.400.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Selatan | Dokumen | 24 | 26.400.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan | % | 1.93 | 27.500.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Selatan | Laporan | 25 | 27.500.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 156.290.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan | % | 97.39 | 156.290.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 3.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Selatan | Dokumen | 1 | 3.120.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 153.170.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Selatan | RT/KK | 100 | 153.170.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara | % | 50.05 | 201.390.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara | % | 100 | 19.800.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Utara | Dokumen | 18 | 19.800.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 25.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara | % | 2.71 | 25.300.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 25.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Utara | Laporan | 23 | 25.300.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 156.290.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara | % | 97.39 | 156.290.000 | SEKSI ENERGI | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 3.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Utara | Dokumen | 1 | 3.120.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 153.170.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Utara | RT/KK | 100 | 153.170.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo | % | 49.77 | 207.990.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Solo | % | 100 | 26.400.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 26.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Solo | Dokumen | 24 | 26.400.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 25.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo | % | 2.15 | 25.300.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 25.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Solo | Laporan | 23 | 25.300.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 156.290.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo | % | 97.39 | 156.290.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 3.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Solo | Dokumen | 1 | 3.120.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 153.170.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Solo | RT/KK | 100 | 153.170.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 50.05 | 142.625.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | | 39.600.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 100 | 39.600.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.01.0002 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | | | | 39.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Ungaran Telomoyo | Dokumen | 36 | 39.600.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 2.71 | 11.000.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.02.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo | Laporan | 10 | 11.000.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | | 92.025.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 97.39 | 92.025.000 | SEKSI ENERGI | |
| | | 3.29.06.1.06.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 2.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Ungaran Telomoyo | Dokumen | 1 | 2.080.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 3.29.06.1.06.0002 | | | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | 89.945.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Ungaran Telomoyo | RT/KK | 50 | 89.945.000 | SEKSI ENERGI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| **Meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB** | | | | | | | | | **2.503.054.000** | **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | |
| | | | | | | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB | % | 2.15 | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | **Meningkatnya produktivitas pemanfaatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan** | | | | | | | | **2.503.054.000** | | |
| | | | | | | Persentase penerapan Good Mining Practice (GMP) | % | 57 | 2.503.054.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | 3.29.03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | | | 2.503.054.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah | % | 100 | 186.250.000 | Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A | |
| | | | | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | | | | | 186.250.000 | | |
| | | | | | | Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah | % | 100 | 186.250.000 | SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL | |
| | | 3.29.03.1.01.0006 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut | | | | 186.250.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut di Jawa Tengah | Laporan | 264 | 186.250.000 | SEKSI PENGUJIAN GEOLOGI DAN MINERAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah | % | 45 | 1.000.984.000 | | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 850.984.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah | % | 60 | 850.984.000 | | |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 850.984.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Jawa Tengah | Laporan | 5 | 850.984.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | | 150.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | % | 10 | 150.000.000 | | |
| | | 3.29.03.1.07.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam | Laporan | 1 | 150.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria | % | 45 | 98.180.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 98.180.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria | % | 60 | 98.180.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 16.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria | Dokumen | 8 | 16.660.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 81.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria | Laporan | 20 | 81.520.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan | % | 45 | 123.380.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 123.380.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan | % | 60 | 123.380.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 26.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan | Dokumen | 17 | 26.560.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 96.820.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan | Laporan | 32 | 96.820.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi | % | 45 | 191.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 191.500.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi | % | 60 | 191.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi | Dokumen | 30 | 36.000.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut | | | | 155.500.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi | Laporan | 35 | 155.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak | % | 45 | 106.380.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 106.380.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak | % | 60 | 106.380.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 29.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak | Dokumen | 20 | 29.860.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 76.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak | Laporan | 25 | 76.520.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan | % | 45 | 86.480.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 86.480.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan | % | 60 | 86.480.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin | | | | 13.360.000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan | Dokumen | 5 | 13.360.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 73.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan | Laporan | 20 | 73.120.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah | % | 45 | 79.780.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 79.780.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah | % | 60 | 79.780.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 13.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah | Dokumen | 5 | 13.360.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 66.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah | Laporan | 12 | 66.420.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara | % | 45 | 91.880.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 91.880.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara | % | 60 | 91.880.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 18.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara | Dokumen | 10 | 18.860.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 73.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara | Laporan | 18 | 73.020.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu | % | 45 | 103.680.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 103.680.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu | % | 60 | 103.680.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 25.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu | Dokumen | 16 | 25.460.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 78.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu | Laporan | 17 | 78.220.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan | % | 45 | 137.880.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 137.880.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan | % | 60 | 137.880.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 24.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan | Dokumen | 21 | 24.360.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 113.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan | Laporan | 33 | 113.520.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara | % | 45 | 119.480.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 119.480.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara | % | 60 | 119.480.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 29.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara | Dokumen | 20 | 29.860.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 89.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara | Laporan | 35 | 89.620.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo | % | 45 | 110.480.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 110.480.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo | % | 60 | 110.480.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 35.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo | Dokumen | 25 | 35.360.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha | | | | 75.120.000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo | Laporan | 18 | 75.120.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 45 | 66.720.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | |
| | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | | 66.720.000 | | |
| | | | | | | Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 60 | 66.720.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.03.1.03.0003 | | | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 8.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo | Dokumen | 8 | 8.800.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | 3.29.03.1.03.0004 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | | | | 57.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo | Laporan | 10 | 57.920.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **53.633.683.000** | **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 56 | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **52.702.647.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90.5 | 52.702.647.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 52.702.647.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 646.141.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 151.361.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 151.361.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 21.061.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 21.061.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 82.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 82.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 359.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 359.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 266.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 266.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 63.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 39 | 63.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 23.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 23.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 677.680.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 115.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 115.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 62.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 62.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 445.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 445.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 98.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 98.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 345.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 345.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 43 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 626.630.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 100.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 100.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 3 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 47.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 47.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 15.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 7 | 15.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 13.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 13.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 402.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 402.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 330.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 21 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 699.687.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 112.900.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 112.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 2 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 73 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 73 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 456.507.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 456.507.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 96.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 96.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 357.207.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 357.207.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 27 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 617.960.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 114.180.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 114.180.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 5 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 68.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 68.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 376.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 376.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 73.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 73.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 70.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 48 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 657.180.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 120.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 120.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 5 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 69.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 69.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 3 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 425.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 425.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 82.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 82.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 340.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 340.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 33 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 608.228.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 122.860.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 122.860.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 69.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 69.960.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 377.588.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 377.588.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 65.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 65.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 309.688.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 309.688.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 19 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 659.735.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 114.900.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 114.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 62.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 62.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 437.055.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 437.055.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 91.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 91.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 343.355.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 343.355.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 685.473.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 97.900.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 97.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 5 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 16.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 5 | 16.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 1.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 1.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 463.143.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 463.143.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 93.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 93.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 367.143.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 367.143.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 38 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 44.317.326.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 40.242.266.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 40.242.266.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 39.704.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 194 | 39.704.620.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 355.740.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 355.740.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 87.566.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 12 | 87.566.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0006 | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | 52.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan | Dokumen | 12 | 52.500.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 41.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 41.840.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 157.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 157.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 144.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 144.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 12.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 140.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 140.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 36 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 664.910.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 664.910.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 12.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 3 | 12.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 56.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 5 | 56.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 13.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 13.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 55.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 357.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 357.760.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 115.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 115.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.729.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 2.729.950.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 8.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 8.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 650.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 13.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 13.250.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.058.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 2.058.100.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 383.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 72 | 383.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 6 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 136.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 6 | 136.560.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 81.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 20 | 81.640.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 65.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 20 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 635.966.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 115.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 115.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 62.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 62.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 412.786.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 412.786.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 320.286.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 320.286.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 47 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 620.680.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 115.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 115.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 2 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 62.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 62.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 397.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 397.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 85.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 310.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 19 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 548.281.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 113.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 113.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 11.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 11.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 3 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 4.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 4.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 62.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 62.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 6.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 6.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 6.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 6.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 320.351.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 320.351.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 242.851.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 242.851.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 20 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 701.680.000 | Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 57.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 57.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 106.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 38 | 106.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 106.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 106.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 346.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 346.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 344.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 344.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 121.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 205 | 121.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 12.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 109.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 109.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **931.036.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.05 | 931.036.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 931.036.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 931.036.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 931.036.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 931.036.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 632.512.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 9 | 632.512.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 298.524.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 18 | 298.524.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Meningkatkan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan** | | | | | | | | | **2.178.750.000** | **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral** | |
| | | | | | | Indeks Pengelolaan Air Tanah | Angka | 351 | | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | **Meningkatnya konservasi air tanah** | | | | | | | | **2.178.750.000** | | |
| | | | | | | Indeks Ketersediaan Air Tanah | Angka | 3.63 | 2.178.750.000 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| | | 3.29.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | | | | | | 2.178.750.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah | % | 100 | 563.700.000 | Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 563.700.000 | | |
| | | | | | | Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah | % | 100 | 563.700.000 | SEKSI PENGUJIAN AIR | |
| | | 3.29.02.1.03.0001 | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah | | | | 563.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul di Jawa Tengah | Dokumen | 1500 | 563.700.000 | SEKSI PENGUJIAN AIR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah | % | 27.6 | 800.000.000 | | |
| | | | | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 605.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah cakupan wilayah penyediaan data geologi di Jawa Tengah | Kabupaten/ Kota | 35 | 605.000.000 | | |
| | | 3.29.02.1.01.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | | | | 605.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi yang tersedia di Jawa Tengah | Dokumen | 2 | 605.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 195.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah | % | 100 | 195.000.000 | | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 195.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Jawa Tengah | Laporan | 4 | 195.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria | % | 3.5 | 100.400.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 100.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Muria | % | 100 | 100.400.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 100.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Muria | Laporan | 20 | 100.400.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan | % | 2.5 | 92.700.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 92.700.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Selatan | % | 100 | 92.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 92.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Selatan | Laporan | 13 | 92.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi | % | 2.9 | 39.850.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 39.850.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi | % | 100 | 39.850.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 39.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Merapi | Laporan | 20 | 39.850.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak | % | 3 | 87.950.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 87.950.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang Demak | % | 100 | 55.250.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 55.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Semarang Demak | Laporan | 33 | 55.250.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak | % | 100 | 32.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 32.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Semarang Demak | Dokumen | 23 | 32.700.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan | % | 2.3 | 33.800.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 33.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan | % | 100 | 33.800.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 33.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Selatan | Laporan | 13 | 33.800.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah | % | 1.7 | 33.800.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 33.800.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Tengah | % | 100 | 33.800.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 33.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Tengah | Laporan | 13 | 33.800.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara | % | 1.9 | 163.100.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 163.100.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara | % | 100 | 123.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 123.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Utara | Laporan | 40 | 123.500.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara | % | 100 | 39.600.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 39.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Serayu Utara | Dokumen | 23 | 39.600.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu | % | 1.7 | 39.850.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 39.850.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Sewu Lawu | % | 100 | 39.850.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 39.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Sewu Lawu | Laporan | 20 | 39.850.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SUKOHARJO |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan | % | 2.8 | 40.950.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 40.950.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan | % | 100 | 40.950.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 40.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Selatan | Laporan | 20 | 40.950.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara | % | 4.2 | 102.400.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 102.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Utara | % | 100 | 61.300.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 61.300.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Utara | Laporan | 39 | 61.300.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara | % | 100 | 41.100.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 41.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Slamet Utara | Dokumen | 30 | 41.100.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo | % | 1.7 | 39.300.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 39.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo | % | 100 | 39.300.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 39.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Solo | Laporan | 19 | 39.300.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 1.9 | 40.950.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | 40.950.000 | | |
| | | | | | | Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Ungaran Telomoyo | % | 100 | 40.950.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | |
| | | 3.29.02.1.03.0003 | | | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | | | | 40.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo | Laporan | 20 | 40.950.000 | SEKSI GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **63.838.104.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **49.524.618.000** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 80 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **48.975.876.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 86.2 | 48.975.876.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 48.975.876.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.252.480.000 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 84.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 84.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 84.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 84.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 380.080.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 380.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 155.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 8 | 155.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.000 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 568.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 2 | 568.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 188.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 188.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 380.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 3 | 380.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 19 | 210.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 7 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 20 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.202.280.000 | Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 76.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 76.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 76.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 76.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 19.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 19.625.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 19.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 19.625.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 212.375.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 212.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 38.075.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 38.075.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 39.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 4 | 39.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 12.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 24.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 24.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 730.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 3 | 730.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 213.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 213.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 516.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 516.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 164.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 41 | 164.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 3 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 4 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 59.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 45 | 59.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 43.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 43.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 12.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 12.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 20 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 2.377.666.000 | Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 77.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 77.880.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 77.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 77.880.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 30.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.960.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 30.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 30.960.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 278.958.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 278.958.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.158.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 30.158.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 41.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 41.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 48 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 117.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 48 | 117.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.315.868.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 3 | 1.315.868.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 2.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 373.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 373.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 939.468.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 939.468.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 674.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 33 | 674.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 4 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 221.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 221.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 354.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 354.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 14.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 13 | 14.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 20 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.800.880.000 | Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 93.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 93.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 93.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 93.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 246.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 246.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 11 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 61.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 61.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.262.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 2 | 1.262.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 375.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 375.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 887.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 887.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 164.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 30 | 164.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 3 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 2 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 29.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 29.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 1.582.180.000 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 78.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 3 | 78.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 78.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 78.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 424.660.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 424.660.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 15 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 199.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 199.660.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 2 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 849.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 849.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 285.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 3 | 285.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 564.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 564.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 185.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 47 | 185.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 4 | 70.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 90 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 80 | 40.760.390.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 33.973.064.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 3 | 33.973.064.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 32.808.304.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 200 | 32.808.304.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.099.760.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.099.760.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 65.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 117.677.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 2 | 117.677.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 42.677.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 2 | 42.677.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 20 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.385.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.385.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 40.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 800.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4.077.323.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 2 | 4.077.323.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.675.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 1.675.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.402.323.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 2 | 2.402.323.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.057.326.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 102 | 1.057.326.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 242.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 20 | 242.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 5 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 214.926.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 25 | 214.926.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 280.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah** | | | | | | | | **548.742.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.1 | 548.742.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 548.742.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 80 | 548.742.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 548.742.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 5 | 548.742.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 5 | 300.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 248.742.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 8 | 248.742.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| **Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan** | | | | | | | | | **10.525.859.000** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | % | 3.5 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | **Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB** | | | | | | | | **10.525.859.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor industri dalam PDRB | % | 3.9 | 10.525.859.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | | | | | 10.029.492.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif | % | 4.39 | 877.000.000 | Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A | |
| | | | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | | 877.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan dan Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan | Orang | 30 | 877.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN | |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 877.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | 2 | 877.000.000 | SEKSI PENGEMBANGAN KEMASAN | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa | % | 6.67 | 2.083.961.000 | Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A | |
| | | | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | | 2.083.961.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan dan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna | Orang | 160 | 2.083.961.000 | SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 2.083.961.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | 3 | 2.083.961.000 | SEKSI PELAYANAN JASA KETEKNIKAN | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan produksi industri agro | % | 2.5 | 1.460.072.000 | Bidang Industri Agro | |
| | | | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | | 1.460.072.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Industri Agro yang mendapatkan fasilitasi | Orang | 22 | 1.088.172.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | 1.088.172.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dokumen | 3 | 1.088.172.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI AGRO | |
| | | | | | | Jumlah SDM Industri Agro Yang dilatih | Orang | 40 | 371.900.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 371.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | 1 | 371.900.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN INOVASI INDUSTRI AGRO | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan produksi industri non agro | % | 2.5 | 3.379.302.000 | Bidang Industri Non Agro | |
| | | | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | | 3.379.302.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Industri Non Agro yang mendapatkan fasilitasi | Orang | 112 | 3.126.291.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | 3.126.291.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dokumen | 2 | 3.126.291.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI NON AGRO | |
| | | | | | | Jumlah SDM Industri Non Agro Yang dilatih | Orang | 40 | 253.011.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 253.011.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | 1 | 253.011.000 | SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | | | | | Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki | % | 85 | 2.229.157.000 | Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A | |
| | | | | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | | | | 2.229.157.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil dan alas kaki | Orang | 500 | 2.229.157.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL | |
| | | 3.31.02.1.01.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 2.229.157.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | 4 | 2.229.157.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK TEKSTIL | |
| | | 3.31.03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | | | | | | 245.681.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | % | 9 | 220.681.000 | Bidang Industri Agro | |
| | | | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | | | | 220.681.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan | Dokumen | 1 | 220.681.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.03.1.01.0004 | | | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | 220.681.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS | Dokumen | 1 | 220.681.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | | | | | Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan | % | 5 | 25.000.000 | Bidang Industri Non Agro | |
| | | | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan | Dokumen | 47 | 25.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.03.1.01.0004 | | | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | | | | | 250.686.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | % | 10 | 20.000.000 | Bidang Industri Agro | |
| | | | | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penambahan Industri Agro dalam SIINAS | Unit | 25 | 20.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | 3.31.04.1.01.0003 | | | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI AGRO | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional | % | 6.95 | 230.686.000 | Bidang Industri Non Agro | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | | 230.686.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS | Unit | 200 | 230.686.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.04.1.01.0002 | | | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | | | | 30.175.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Provinsi melalui SIINaS | Dokumen | 1 | 30.175.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| | | 3.31.04.1.01.0003 | | | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | 200.511.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas | Dokumen | 1 | 200.511.000 | SEKSI PENGENDALIAN DAN INFORMASI INDUSTRI NON AGRO | |
| **Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (Inf)** | | | | | | | | | **32.840.000.000** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | % | 4.59 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | **Terjaganya Inflasi Pangan Bergejolak** | | | | | | | | **32.840.000.000** | | |
| | | | | | | Inflasi pangan bergejolak | % | 4 | 32.840.000.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | | 32.840.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota | % | 9 | 32.840.000.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | |
| | | | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau ketersediaannya | Komoditi | 3 | 40.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.04.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan sub distributor | Laporan | 2 | 40.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | | | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | | 32.800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di pantau Harganya | Unit | 12 | 20.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.04.1.02.0001 | | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 20.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas | Lokasi | 12 | 32.780.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.04.1.02.0002 | | | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | 32.780.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab / kota dalam 1 provinsi | Laporan | 5 | 32.780.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| **Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (PE)** | | | | | | | | | **7.498.845.000** | **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan | % | 4.59 | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | **Meningkatnya persentase nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB** | | | | | | | | **7.498.845.000** | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB | % | 4.83 | 7.498.845.000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | |
| | | 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | | | | | 633.633.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah | % | 8.6 | 438.712.000 | Bidang Perdagangan Luar Negeri | |
| | | | | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | | | | | 438.712.000 | | |
| | | | | | | Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal | % | 4.6 | 438.712.000 | SEKSI EKSPOR DAN IMPOR | |
| | | 3.30.02.1.04.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | | | | 438.712.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penerbitan SKA | Dokumen | 105000 | 438.712.000 | SEKSI EKSPOR DAN IMPOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2) | % | 10 | 168.621.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | |
| | | | | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor | | | | | 168.621.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB | Unit | 2 | 168.621.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.02.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | 168.621.000 | | |
| | | | | | | Jumlah SIUP MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perozonan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik | Dokumen | 2 | 168.621.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi | % | 10 | 26.300.000 | Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | |
| | | | | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | | | | | 26.300.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya Yang diawasi | Orang | 5 | 26.300.000 | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | 3.30.02.1.03.0003 | | | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | | | | 26.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya | Laporan | 1 | 26.300.000 | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | | | | | 238.250.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi | % | 15 | 238.250.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | |
| | | | | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | | | | | 238.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Pasar Rakyat yang Dilatih | Orang | 25 | 238.250.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH | |
| | | 3.30.03.1.01.0002 | | | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | | | | 238.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan persiapan pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | Laporan | 1 | 238.250.000 | SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH | |
| | | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | | | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kinerja realisasi pupuk | % | 91 | 20.000.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | |
| | | | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan | Orang | 4 | 20.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | 3.30.04.1.03.0003 | | | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90 % | Laporan | 1 | 20.000.000 | SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK | |
| | | | | | | Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi | % | 10 | 35.000.000 | Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | |
| | | | | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Pupuk Bersubsidi Yang diawasi | Orang | 30 | 35.000.000 | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | 3.30.04.1.03.0005 | | | Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi | Laporan | 1 | 35.000.000 | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | | | | | 1.334.967.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan nilai ekspor non migas | % | 4.05 | 1.334.967.000 | Bidang Perdagangan Luar Negeri | |
| | | | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | | | | | 1.334.967.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri | Dokumen | 2 | 140.950.000 | SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.30.05.1.01.0004 | | | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | | 140.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi | Komoditi | 4 | 140.950.000 | SEKSI INFORMASI DAN ANALISIS PASAR | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Ekspor | Orang | 1430 | 72.650.000 | SEKSI EKSPOR DAN IMPOR | |
| | | 3.30.05.1.01.0002 | | | Pameran Dagang Lokal | | | | 72.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina | Orang | 30 | 72.650.000 | SEKSI EKSPOR DAN IMPOR | |
| | | | | | | Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi | Dokumen | 2 | 1.121.367.000 | SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI | |
| | | 3.30.05.1.01.0001 | | | Pameran Dagang Internasional/Nasional | | | | 1.071.367.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang | Orang | 8 | 1.071.367.000 | SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI | |
| | | 3.30.05.1.01.0003 | | | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang | Orang | 50 | 50.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN LUAR NEGERI | |
| | | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | | | 2.786.815.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen | % | 1.05 | 906.893.000 | Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | |
| | | | | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 518.012.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Aduan Masyarakat | Laporan | 3 | 188.512.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | 3.30.06.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | | | | 188.512.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani | Dokumen | 3 | 188.512.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi | Orang | 150 | 329.500.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | 3.30.06.1.01.0001 | | | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | | | | 329.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Badan Penanganan Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif | Kelompok | 1 | 329.500.000 | SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN | |
| | | | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 211.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Standarisasi Industri | Orang | 31 | 211.560.000 | SEKSI STANDARISASI INDUSTRI | |
| | | 3.30.06.1.02.0007 | | | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi | | | | 211.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sertifikat produk yang di terbitkan | Sertifikat | 1 | 211.560.000 | SEKSI STANDARISASI INDUSTRI | |
| | | | | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 177.321.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Barang Beredar Yang diawasi (Unit Barang) | Unit | 30 | 177.321.000 | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | 3.30.06.1.03.0003 | | | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | | | | 177.321.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi | Laporan | 1 | 177.321.000 | SEKSI TERTIB NIAGA | |
| | | | | | | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang | % | 10 | 610.054.000 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 610.054.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu | Kegiatan | 1711 | 610.054.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0004 | | | Pengembangan Layanan Kalibrasi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan | Sertifikat | 1650 | 100.000.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 3.30.06.1.02.0005 | | | Pengembangan Layanan Pengujian | | | | 510.054.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang | Dokumen | 61 | 510.054.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta | % | 0.1 | 1.269.868.000 | Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A | |
| | | | | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.269.868.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu | Kegiatan | 2400 | 1.269.868.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0004 | | | Pengembangan Layanan Kalibrasi | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan | Sertifikat | 980 | 210.000.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0005 | | | Pengembangan Layanan Pengujian | | | | 181.172.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang | Dokumen | 1400 | 181.172.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.06.1.02.0007 | | | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi | | | | 878.696.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan | Sertifikat | 20 | 878.696.000 | SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI | |
| | | 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | | | 2.450.180.000 | | |
| | | | | | | Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri | % | 15 | 2.450.180.000 | Bidang Perdagangan Dalam Negeri | |
| | | | | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | | | | | 325.180.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi | Orang | 2 | 325.180.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.07.1.01.0002 | | | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | 325.180.000 | | |
| | | | | | | Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri | Unit | 1 | 325.180.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | | | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | 2.110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi kemitraan | Dokumen | 1 | 2.110.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.07.1.02.0002 | | | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | 2.110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi | Kelompok | 3 | 2.110.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | | | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri | Orang | 50 | 15.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| | | 3.30.07.1.03.0005 | | | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stake holder dan tokoh masyarakat | Laporan | 1 | 15.000.000 | SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **100.389.322.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Sekretariat Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas kebijakan daerah** | | | | | | | | | **419.633.425.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 37.1 | | | |
| | **Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil** | | | | | | | | **419.633.425.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah | % | 80 | 3.820.528.000 | | |
| | | 4.01.02 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | | | 1.780.528.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB | % | 48.57 | 104.660.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 104.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota | Dokumen | 3 | 104.660.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0001 | | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | 104.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota | Laporan | 4 | 104.660.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya | % | 88.57 | 212.400.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | 212.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | 212.400.000 | | |
| | | 4.01.02.1.01.0002 | | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | | | | 212.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota | Laporan | 4 | 212.400.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A | % | 69.05 | 240.160.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 240.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya | Dokumen | 2 | 240.160.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0002 | | | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | | | 240.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota | Laporan | 4 | 240.160.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | % | 92 | 276.640.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 276.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan | Dokumen | 2 | 276.640.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | | | | 276.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan | Laporan | 8 | 276.640.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif | % | 90 | 212.800.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | 212.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota | Dokumen | 1 | 212.800.000 | | |
| | | 4.01.02.1.01.000 | | | Penataan Analisis Jabatan | | | | 212.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota | Laporan | 4 | 212.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A | % | 36.59 | 196.700.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 196.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD | Dokumen | 2 | 196.700.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0001 | | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | 196.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD | Laporan | 4 | 196.700.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi | % | 70 | 262.352.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | 262.352.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi | Dokumen | 1 | 262.352.000 | | |
| | | 4.01.02.1.01.0001 | | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | | | | 262.352.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah | Laporan | 3 | 167.352.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah | Laporan | 1 | 95.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan | % | 91.01 | 274.816.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 274.816.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik | Dokumen | 2 | 274.816.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0005 | | | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | | | | 274.816.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Laporan | 6 | 274.816.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.08 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | | | 2.040.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBD | % | 98.8 | 465.000.000 | | |
| | | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 465.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | Dokumen | 4 | 225.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0001 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | Laporan | 12 | 225.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | Dokumen | 4 | 240.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0001 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | Laporan | 12 | 240.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBN | % | 95.5 | 285.000.000 | | |
| | | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 285.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | Dokumen | 4 | 285.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0002 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | | | | 285.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | Laporan | 4 | 285.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah | % | 86 | 467.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 467.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Dokumen | 4 | 120.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.02.0001 | | | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah | Dokumen | 4 | 120.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap | % | 92 | 347.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.02.0002 | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | 347.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah | Dokumen | 12 | 347.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase realisasi bantuan keuangan | % | 85 | 720.000.000 | | |
| | | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 720.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I | Dokumen | 8 | 254.309.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 254.309.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I | Dokumen | 9 | 254.309.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II | Dokumen | 8 | 325.691.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 325.691.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II | Dokumen | 8 | 325.691.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III | Dokumen | 8 | 140.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III | Dokumen | 8 | 140.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi | % | 100 | 103.000.000 | | |
| | | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 103.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Dokumen | 2 | 103.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.02.0003 | | | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | | | | 103.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Dokumen | 2 | 103.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat | % | 90 | 408.689.148.000 | | |
| | | 4.01.03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | | | 3.478.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | % | 95 | 1.005.000.000 | | |
| | | | | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | | | | | 1.005.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ | Dokumen | 8 | 1.005.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.01.0001 | | | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKebijakan Pemerintahan | Dokumen | 4 | 550.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.03.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | | | | 230.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PelaksanaanPemerintahan Umum | Dokumen | 4 | 230.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.03.1.01.0003 | | | Fasilitasi Penataan Wilayah | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | Dokumen | 4 | 225.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | % | 95 | 1.330.000.000 | | |
| | | | | Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | 1.330.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | Dokumen | 3 | 225.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0002 | | | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | Dokumen | 4 | 225.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD | % | 95 | 800.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0001 | | | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Dokumen | 45 | 800.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 100 | 305.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0003 | | | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 305.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Laporan | 37 | 305.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tingkat efektivitas kerjasama daerah | % | 95 | 1.143.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | | | 1.143.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti | % | 95 | 593.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0001 | | | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah | | | | 593.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri | Dokumen | 10 | 463.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri | Dokumen | 6 | 130.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti | % | 95 | 200.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0002 | | | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri | Dokumen | 4 | 100.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri | Dokumen | 4 | 100.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah | % | 95 | 350.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0003 | | | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi | Laporan | 4 | 150.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi | Laporan | 4 | 100.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri | % | 100 | 100.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | 4.01.04 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | 402.293.148.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar | % | 83 | 643.908.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | | | 643.908.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan | Dokumen | 4 | 200.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02.0002 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Dokumen | 8 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan | Dokumen | 4 | 200.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 4.01.04.1.02.0001 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Dokumen | 8 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial | Dokumen | 4 | 243.908.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02.0003 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | | 243.908.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Dokumen | 8 | 243.908.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar | % | 84 | 727.816.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | | | | | 727.816.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | Dokumen | 4 | 200.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.03.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | Dokumen | 8 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dokumen | 4 | 327.816.000 | | |
| | | 4.01.04.1.03.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | 327.816.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dokumen | 8 | 327.816.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan | Dokumen | 4 | 200.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.03.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan | Dokumen | 8 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | % | 60 | 400.921.424.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | | | | | 400.921.424.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku | Dokumen | 4 | 396.380.724.000 | | |
| | | 4.01.04.1.01.0001 | | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | | | | 396.380.724.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan | Unit | 800 | 396.380.724.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan | Dokumen | 4 | 4.540.700.000 | | |
| | | 4.01.04.1.01.0002 | | | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | | | | 4.540.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji | Kegiatan | 1 | 2.550.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan | Kegiatan | 8 | 1.990.700.000 | | OPD Provinsi |
| | | 4.01.05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | | | 2.918.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani | % | 96 | 1.000.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara | Dokumen | 12 | 1.000.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02.0001 | | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara | Perkara | 12 | 450.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu | Perkara | 200 | 550.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | % | 96 | 236.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | 236.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Dokumen | 12 | 236.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02.0002 | | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | | | | 236.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota | Kabupaten/Kota | 35 | 120.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Sengketa | 12 | 116.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | % | 97 | 1.030.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | | | 1.030.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen kajian produk hukum | Dokumen | 12 | 465.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0003 | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | | | | 465.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Laporan | 12 | 276.400.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Laporan | 12 | 188.600.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur | Dokumen | 12 | 65.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0002 | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah | Laporan | 12 | 65.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Dokumen | 12 | 500.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0001 | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah | Laporan | 12 | 192.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah | Laporan | 12 | 308.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji | % | 97 | 652.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | | | 652.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 12 | 652.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0004 | | | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | | | | 652.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I | Dokumen | 115 | 215.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II | Dokumen | 120 | 218.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III | Dokumen | 120 | 219.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa | % | 90 | 7.123.749.000 | | |
| | | 4.01.06 | PROGRAM PEREKONOMIAND ANPEMBANGUNAN | | | | | | 4.775.260.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | % | 85 | 514.086.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | | 514.086.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, | Dokumen | 2 | 267.043.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | 267.043.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Laporan | 4 | 267.043.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Dokumen | 2 | 247.043.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | 247.043.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Laporan | 4 | 247.043.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | % | 85 | 521.683.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | | 521.683.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM | Dokumen | 2 | 264.640.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | 264.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM | Laporan | 4 | 264.640.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dokumen | 2 | 257.043.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | 257.043.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Laporan | 4 | 257.043.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian | % | 87 | 577.043.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | | 577.043.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan | Dokumen | 2 | 175.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 175.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan | Laporan | 4 | 175.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan | Dokumen | 2 | 180.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan | Laporan | 4 | 180.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian | Dokumen | 2 | 222.043.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 222.043.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian | Laporan | 4 | 222.043.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha | % | 82 | 390.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | | 390.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha | Dokumen | 2 | 390.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | | | | 390.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha | Laporan | 4 | 390.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan | % | 86 | 960.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | | 960.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan | Dokumen | 2 | 810.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | | 810.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan | Laporan | 4 | 810.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan | Dokumen | 2 | 150.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan | Laporan | 4 | 150.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase nilai kemandirian BLUD | % | 56 | 50.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD | Dokumen | 2 | 25.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.0004 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Laporan | 2 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD | Dokumen | 2 | 25.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 4.01.06.1.03.0005 | | | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah | Laporan | 2 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 84 | 462.448.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | | | 462.448.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan | Dokumen | 4 | 220.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan | Laporan | 8 | 220.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro | Dokumen | 4 | 242.448.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | | 242.448.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro | Laporan | 8 | 242.448.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 79 | 1.300.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro | Dokumen | 4 | 315.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | 315.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro | Laporan | 8 | 315.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan | Dokumen | 4 | 985.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | 985.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan | Laporan | 8 | 985.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | 2.348.489.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa | % | 91 | 1.270.335.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | 1.270.335.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 4 | 1.270.335.000 | | |
| | | 4.01.07.1.01.0001 | | | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 262.535.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa | Laporan | 4 | 180.475.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyusunan SHB | Laporan | 2 | 82.060.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.01.0002 | | | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 799.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing) | Laporan | 12 | 655.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal | Laporan | 4 | 144.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.01.0003 | | | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 208.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 4 | 208.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa | % | 82 | 474.434.000 | | |
| | | | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | 474.434.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 4 | 474.434.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 4.01.07.1.03.0001 | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 147.204.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah | Laporan | 2 | 147.204.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.03.0002 | | | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 162.210.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ | Laporan | 4 | 162.210.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.03.0003 | | | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 165.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa | Laporan | 4 | 165.020.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik | % | 82 | 603.720.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | 603.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 4 | 603.720.000 | | |
| | | 4.01.07.1.02.0001 | | | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | | | | 190.230.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik | Laporan | 4 | 190.230.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.02.0002 | | | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 295.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem InformasiPengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 2 | 295.350.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.02.0003 | | | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 118.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 4 | 118.140.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **226.172.646.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76.5 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **225.982.646.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82.5 | 225.982.646.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 225.982.646.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 6.410.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 50.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 50.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | Laporan | 12 | 30.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 30.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | 210.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 210.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.11.0002 | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan | Paket | 4 | 80.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan | Paket | 4 | 80.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.11.0003 | | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah | Orang | 4 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah | Orang | 4 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | | 6.120.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan | % | 100 | 6.120.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.12.0001 | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | 2.950.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan | Paket | 12 | 2.950.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.12.0002 | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | 1.770.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan | Paket | 12 | 1.770.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.12.0003 | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan | Paket | 12 | 1.400.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah | % | 100 | 445.524.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 445.524.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah | % | 100 | 445.524.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 370.195.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan | Laporan | 24 | 370.195.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 75.329.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan | Laporan | 16 | 75.329.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa | % | 100 | 245.740.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 245.740.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | % | 100 | 245.740.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 222.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 12 | 222.300.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 23.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 12 | 23.440.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum | % | 100 | 154.092.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 154.092.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum | % | 100 | 154.092.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 144.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum | Laporan | 12 | 144.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 10.092.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum | Laporan | 12 | 10.092.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang | % | 100 | 700.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang | % | 100 | 700.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 660.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan | Laporan | 12 | 480.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA | Laporan | 12 | 180.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan | Laporan | 12 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA | Laporan | 12 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | 343.736.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 343.736.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | 343.736.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 275.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 68.736.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 68.736.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | % | 100 | 820.541.000 | | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 145.312.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi | % | 100 | 145.312.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 104.574.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 4 | 104.574.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 40.738.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 10 | 40.738.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 675.229.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | % | 100 | 675.229.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 634.968.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi | Laporan | 12 | 470.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi | Laporan | 12 | 164.968.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 40.261.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi | Laporan | 12 | 30.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi | Laporan | 12 | 10.261.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan | % | 100 | 909.526.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 909.526.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra | % | 100 | 909.526.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 872.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 422.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | Laporan | 12 | 450.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 37.526.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 13.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | Laporan | 12 | 24.526.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian | % | 100 | 307.952.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 307.952.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian | % | 100 | 307.952.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 287.952.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian | Laporan | 12 | 287.952.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian | Laporan | 12 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol | % | 100 | 18.409.450.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 195.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol | % | 100 | 195.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 45.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 150.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | | | | | 15.334.203.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan | Laporan | 12 | 15.334.203.000 | | |
| | | X.XX.01.1.13.0001 | | | Penyiapan Materi Pimpinan | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan | Dokumen | 12 | 350.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.13.0002 | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 11.484.203.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan | Laporan | 12 | 11.484.203.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.13.0003 | | | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | | | | 3.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan | Laporan | 12 | 3.500.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | 2.880.247.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun | Laporan | 12 | 2.880.247.000 | | |
| | | X.XX.01.1.14.0001 | | | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | | | | 2.580.247.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara | Laporan | 12 | 2.580.247.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.14.0002 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah | Laporan | 12 | 250.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.14.0003 | | | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan | Laporan | 1 | 50.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda | % | 100 | 197.236.085.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 115.305.142.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Laporan | 12 | 115.305.142.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 113.340.142.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Bulan | 12 | 113.340.142.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.540.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.540.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 12 | 300.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 125.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 792.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 792.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 442.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 442.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 350.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 12 | 30.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 12 | 30.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 10.604.954.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda | % | 100 | 10.604.954.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 400.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 500.718.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 500.718.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 425.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 425.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 150.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 5.500.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 3.429.236.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 3.429.236.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 10.700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Paket | 2 | 10.700.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 1.500.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 9.200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 50 | 9.200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 25.481.213.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda | Laporan | 12 | 25.481.213.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 7.500.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 7.500.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 631.213.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 631.213.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 17.350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 16.750.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum | Laporan | 12 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah | Laporan | 2 | 400.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 8.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 833 | 8.300.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 4 | 250.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 2.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 182 | 2.250.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 87.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 30 | 87.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 300 | 1.400.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 17 | 4.000.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 312.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 300 | 312.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | 26.022.776.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda | % | 100 | 26.022.776.000 | | |
| | | X.XX.01.1.11.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 2.743.094.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah | Orang | 2 | 2.743.094.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.11.0004 | | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 23.279.682.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | Orang | 2 | 23.279.682.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **190.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 190.000.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 190.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 90 | 190.000.000 | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 190.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah | Dokumen | 4 | 110.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah | Laporan | 6 | 80.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **645.806.071.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas kebijakan daerah** | | | | | | | | | **1.612.812.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 37.1 | | | |
| | **Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil** | | | | | | | | **1.612.812.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa | % | 90 | 1.612.812.000 | | |
| | | 4.01.06 | PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANGUNAN | | | | | | 1.612.812.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur | % | 85 | 514.086.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | | 514.086.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, | Dokumen | 2 | 267.043.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | 267.043.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Laporan | 4 | 267.043.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Dokumen | 2 | 247.043.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0003 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | | | | 247.043.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Laporan | 4 | 247.043.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan | % | 85 | 521.683.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | | 521.683.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM | Dokumen | 2 | 264.640.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | 264.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM | Laporan | 4 | 264.640.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dokumen | 2 | 257.043.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0002 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | 257.043.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Laporan | 4 | 257.043.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian | % | 87 | 577.043.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | | | | | 577.043.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan | Dokumen | 2 | 175.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 175.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan | Laporan | 4 | 175.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan | Dokumen | 2 | 180.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan | Laporan | 4 | 180.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian | Dokumen | 2 | 222.043.000 | | |
| | | 4.01.06.1.02.0001 | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | 222.043.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian | Laporan | 4 | 222.043.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **700.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76.5 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **700.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82.5 | 700.000.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang | % | 100 | 700.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang | % | 100 | 700.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 660.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan | Laporan | 12 | 480.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA | Laporan | 12 | 180.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan | Laporan | 12 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA | Laporan | 12 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **2.312.812.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO HUKUM

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas kebijakan daerah** | | | | | | | | | **2.918.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 37.1 | | | |
| | **Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil** | | | | | | | | **2.918.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat | % | 90 | 2.918.000.000 | | |
| | | 4.01.05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | | | 2.918.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani | % | 96 | 1.000.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara | Dokumen | 12 | 1.000.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02.0001 | | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara | Perkara | 12 | 450.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu | Perkara | 200 | 550.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota peduli HAM | % | 96 | 236.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | 236.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Dokumen | 12 | 236.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.02.0002 | | | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | | | | 236.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota | Kabupaten/ Kota | 35 | 120.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Sengketa | 12 | 116.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | % | 97 | 1.030.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | | | 1.030.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen kajian produk hukum | Dokumen | 12 | 465.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0003 | | | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | | | | 465.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Laporan | 12 | 276.400.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Laporan | 12 | 188.600.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur | Dokumen | 12 | 65.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0002 | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah | Laporan | 12 | 65.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Dokumen | 12 | 500.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0001 | | | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah | Laporan | 12 | 192.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah | Laporan | 12 | 308.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji | % | 97 | 652.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | | | 652.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 12 | 652.000.000 | | |
| | | 4.01.05.1.01.0004 | | | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | | | | 652.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I | Dokumen | 115 | 215.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II | Dokumen | 120 | 218.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III | Dokumen | 120 | 219.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **154.092.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76.5 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **154.092.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82.5 | 154.092.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 154.092.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum | % | 100 | 154.092.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 154.092.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum | % | 100 | 154.092.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 144.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum | Laporan | 12 | 144.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 10.092.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum | Laporan | 12 | 10.092.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **3.072.092.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas kebijakan daerah** | | | | | | | | | **2.040.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 37.1 | | | |
| | **Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil** | | | | | | | | **2.040.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah | % | 80 | 2.040.000.000 | | |
| | | 4.01.08 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | | | 2.040.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBD | % | 98.8 | 465.000.000 | | |
| | | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 465.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | Dokumen | 4 | 225.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0001 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | Laporan | 12 | 225.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | Dokumen | 4 | 240.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0001 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD | Laporan | 12 | 240.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian pelaksanaan APBN | % | 95.5 | 285.000.000 | | |
| | | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 285.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | Dokumen | 4 | 285.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0002 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | | | | 285.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN | Laporan | 4 | 285.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah | % | 86 | 467.000.000 | | |
| | | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 467.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Dokumen | 4 | 120.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.02.0001 | | | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah | Dokumen | 4 | 120.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap | % | 92 | 347.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.02.0002 | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | 347.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah | Dokumen | 12 | 347.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase realisasi bantuan keuangan | % | 85 | 720.000.000 | | |
| | | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 720.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I | Dokumen | 8 | 254.309.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 254.309.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I | Dokumen | 9 | 254.309.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II | Dokumen | 8 | 325.691.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 325.691.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II | Dokumen | 8 | 325.691.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III | Dokumen | 8 | 140.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.01.0003 | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III | Dokumen | 8 | 140.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi | % | 100 | 103.000.000 | | |
| | | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | 103.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Dokumen | 2 | 103.000.000 | | |
| | | 4.01.08.1.02.0003 | | | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | | | | 103.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | Dokumen | 2 | 103.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **635.524.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76.5 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **445.524.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82.5 | 445.524.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 445.524.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah | % | 100 | 445.524.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 445.524.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah | % | 100 | 445.524.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 370.195.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan | Laporan | 24 | 370.195.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 75.329.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan | Laporan | 16 | 75.329.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | **Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **190.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 190.000.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 90 | 190.000.000 | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 190.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah | Dokumen | 4 | 110.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah | Laporan | 6 | 80.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **2.675.524.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO PEREKONOMIAN

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas kebijakan daerah** | | | | | | | | | **3.162.448.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 37.1 | | | |
| | **Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil** | | | | | | | | **3.162.448.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa | % | 90 | 3.162.448.000 | | |
| | | 4.01.06 | PROGRAM PEREKONOMIA NDANPEMBANGUNAN | | | | | | 3.162.448.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha | % | 82 | 390.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | | 390.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha | Dokumen | 2 | 390.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.000 2 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | | | | 390.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha | Laporan | 4 | 390.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan | % | 86 | 960.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | | 960.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan | Dokumen | 2 | 810.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.000 1 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | | | | 810.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan | Laporan | 4 | 810.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan | Dokumen | 2 | 150.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.000 3 | | | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan | Laporan | 4 | 150.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase nilai kemandirian BLUD | % | 56 | 50.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD | Dokumen | 2 | 25.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.03.000 4 | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Laporan | 2 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD | Dokumen | 2 | 25.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 4.01.06.1.03.0005 | | | Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah | Laporan | 2 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 84 | 462.448.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | | | 462.448.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan | Dokumen | 4 | 220.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan | Laporan | 8 | 220.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro | Dokumen | 4 | 242.448.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0001 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | | | | 242.448.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro | Laporan | 8 | 242.448.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan | % | 79 | 1.300.000.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | | | | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro | Dokumen | 4 | 315.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | 315.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro | Laporan | 8 | 315.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan | Dokumen | 4 | 985.000.000 | | |
| | | 4.01.06.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | | | | 985.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan | Laporan | 8 | 985.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **307.952.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76.5 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **307.952.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82.5 | 307.952.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 307.952.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian | % | 100 | 307.952.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 307.952.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian | % | 100 | 307.952.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 287.952.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian | Laporan | 12 | 287.952.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian | Laporan | 12 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **3.470.400.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas kebijakan daerah** | | | | | | | | | **402.293.148.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 37.1 | | | |
| | **Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil** | | | | | | | | **402.293.148.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat | % | 90 | 402.293.148.000 | | |
| | | 4.01.04 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | 402.293.148.000 | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar | % | 83 | 643.908.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | | | | | 643.908.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan | Dokumen | 4 | 200.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02.0002 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Dokumen | 8 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan | Dokumen | 4 | 200.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02.0001 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Dokumen | 8 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial | Dokumen | 4 | 243.908.000 | | |
| | | 4.01.04.1.02.0003 | | | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | | | | 243.908.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Dokumen | 8 | 243.908.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar | % | 84 | 727.816.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | | | | | 727.816.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | Dokumen | 4 | 200.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.03.0001 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | Dokumen | 8 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dokumen | 4 | 327.816.000 | | |
| | | 4.01.04.1.03.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | 327.816.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dokumen | 8 | 327.816.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan | Dokumen | 4 | 200.000.000 | | |
| | | 4.01.04.1.03.0002 | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan | Dokumen | 8 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik | % | 60 | 400.921.424.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | | | | | 400.921.424.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku | Dokumen | 4 | 396.380.724.000 | | |
| | | 4.01.04.1.01.0001 | | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | | | | 396.380.724.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan | Unit | 800 | 396.380.724.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan | Dokumen | 4 | 4.540.700.000 | | |
| | | 4.01.04.1.01.0002 | | | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | | | | 4.540.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji | Kegiatan | 1 | 2.550.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan | Kegiatan | 8 | 1.990.700.000 | | OPD Provinsi |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **343.736.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76.5 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **343.736.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82.5 | 343.736.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 343.736.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | 343.736.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 343.736.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | 343.736.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 275.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 68.736.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 68.736.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **402.636.884.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO ORGANISASI

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas kebijakan daerah** | | | | | | | | | **1.780.528.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 37.1 | | | |
| | **Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil** | | | | | | | | **1.780.528.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah | % | 80 | 1.780.528.000 | | |
| | | 4.01.02 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | | | | 1.780.528.000 | | |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB | % | 48.57 | 104.660.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 104.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota | Dokumen | 3 | 104.660.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0001 | | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | 104.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota | Laporan | 4 | 104.660.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya | % | 88.57 | 212.400.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | 212.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | 212.400.000 | | |
| | | 4.01.02.1.01.0002 | | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | | | | 212.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota | Laporan | 4 | 212.400.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A | % | 69.05 | 240.160.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 240.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya | Dokumen | 2 | 240.160.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0002 | | | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | | | 240.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota | Laporan | 4 | 240.160.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan | % | 92 | 276.640.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 276.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan | Dokumen | 2 | 276.640.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0004 | | | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | | | | 276.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan | Laporan | 8 | 276.640.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif | % | 90 | 212.800.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | 212.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota | Dokumen | 1 | 212.800.000 | | |
| | | 4.01.02.1.01.000 | | | Penataan Analisis Jabatan | | | | 212.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota | Laporan | 4 | 212.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A | % | 36.59 | 196.700.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 196.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD | Dokumen | 2 | 196.700.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0001 | | | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | 196.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD | Laporan | 4 | 196.700.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi | % | 70 | 262.352.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | 262.352.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi | Dokumen | 1 | 262.352.000 | | |
| | | 4.01.02.1.01.0001 | | | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | | | | 262.352.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah | Laporan | 3 | 167.352.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah | Laporan | 1 | 95.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan | % | 91.01 | 274.816.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | | | 274.816.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik | Dokumen | 2 | 274.816.000 | | |
| | | 4.01.02.1.02.0005 | | | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | | | | 274.816.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Laporan | 6 | 274.816.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **820.541.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76.5 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **820.541.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82.5 | 820.541.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 820.541.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | % | 100 | 820.541.000 | | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 145.312.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi | % | 100 | 145.312.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 104.574.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 4 | 104.574.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 40.738.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 10 | 40.738.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 675.229.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | % | 100 | 675.229.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 634.968.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi | Laporan | 12 | 470.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi | Laporan | 12 | 164.968.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 40.261.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi | Laporan | 12 | 30.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi | Laporan | 12 | 10.261.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **2.601.069.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO UMUM

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **222.055.535.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76.5 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **222.055.535.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82.5 | 222.055.535.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 222.055.535.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 6.410.000.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 50.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 50.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | Laporan | 12 | 30.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 30.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | 210.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | % | 100 | 210.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.11.0002 | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan | Paket | 4 | 80.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan | Paket | 4 | 80.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.11.0003 | | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah | Orang | 4 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah | Orang | 4 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | | | 6.120.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan | % | 100 | 6.120.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.12.0001 | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | 2.950.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan | Paket | 12 | 2.950.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.12.0002 | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | 1.770.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan | Paket | 12 | 1.770.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.12.0003 | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan | Paket | 12 | 1.400.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol | % | 100 | 18.409.450.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 195.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol | % | 100 | 195.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 45.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 150.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | | | | | 15.334.203.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan | Laporan | 12 | 15.334.203.000 | | |
| | | X.XX.01.1.13.0001 | | | Penyiapan Materi Pimpinan | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan | Dokumen | 12 | 350.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.13.0002 | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 11.484.203.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan | Laporan | 12 | 11.484.203.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.13.0003 | | | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | | | | 3.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan | Laporan | 12 | 3.500.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | 2.880.247.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun | Laporan | 12 | 2.880.247.000 | | |
| | | X.XX.01.1.14.0001 | | | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | | | | 2.580.247.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara | Laporan | 12 | 2.580.247.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.14.0002 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah | Laporan | 12 | 250.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.14.0003 | | | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan | Laporan | 1 | 50.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda | % | 100 | 197.236.085.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 115.305.142.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Laporan | 12 | 115.305.142.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 113.340.142.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Bulan | 12 | 113.340.142.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.540.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.540.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 12 | 300.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 125.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 792.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 792.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 442.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 442.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 350.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 12 | 30.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 12 | 30.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 10.604.954.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda | % | 100 | 10.604.954.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 400.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 500.718.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 500.718.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 425.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 425.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 150.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 5.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 5.500.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 3.429.236.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 3.429.236.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 10.700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Paket | 2 | 10.700.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 1.500.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 9.200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 50 | 9.200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 25.481.213.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda | Laporan | 12 | 25.481.213.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 7.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 7.500.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 631.213.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 631.213.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 17.350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 16.750.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum | Laporan | 12 | 200.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah | Laporan | 2 | 400.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 8.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 833 | 8.300.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 4 | 250.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 2.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 182 | 2.250.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 87.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 30 | 87.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 300 | 1.400.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 17 | 4.000.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 312.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 300 | 312.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | 26.022.776.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda | % | 100 | 26.022.776.000 | | |
| | | X.XX.01.1.11.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 2.743.094.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah | Orang | 2 | 2.743.094.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.11.0004 | | | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 23.279.682.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | Orang | 2 | 23.279.682.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **222.055.535.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas kebijakan daerah** | | | | | | | | | **3.478.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 37.1 | | | |
| | **Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil** | | | | | | | | **3.478.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat | % | 90 | 3.478.000.000 | | |
| | | 4.01.03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | | | | | | 3.478.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | % | 95 | 1.005.000.000 | | |
| | | | | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | | | | | 1.005.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ | Dokumen | 8 | 1.005.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.01.0001 | | | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKebijakan Pemerintahan | Dokumen | 4 | 550.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.03.1.01.0002 | | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | | | | 230.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PelaksanaanPemerintahan Umum | Dokumen | 4 | 230.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.03.1.01.000 | | | Fasilitasi Penataan Wilayah | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah | Dokumen | 4 | 225.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah | % | 95 | 1.330.000.000 | | |
| | | | | Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | 1.330.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | Dokumen | 3 | 225.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0002 | | | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM | Dokumen | 4 | 225.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD | % | 95 | 800.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0001 | | | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Dokumen | 45 | 800.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 100 | 305.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.02.0003 | | | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 305.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Laporan | 37 | 305.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tingkat efektivitas kerjasama daerah | % | 95 | 1.143.000.000 | | |
| | | | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | | | | | 1.143.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti | % | 95 | 593.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0001 | | | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah | | | | 593.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri | Dokumen | 10 | 463.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri | Dokumen | 6 | 130.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti | % | 95 | 200.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 4.01.03.1.03.0002 | | | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri | Dokumen | 4 | 100.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri | Dokumen | 4 | 100.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah | % | 95 | 350.000.000 | | |
| | | 4.01.03.1.03.0003 | | | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi | Laporan | 4 | 150.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi | Laporan | 4 | 100.000.000 | | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri | % | 100 | 100.000.000 | | OPD Provinsi |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **909.526.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76.5 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **909.526.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82.5 | 909.526.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 909.526.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan | % | 100 | 909.526.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 909.526.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra | % | 100 | 909.526.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 872.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 422.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | Laporan | 12 | 450.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 37.526.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12 | 13.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | Laporan | 12 | 24.526.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **4.387.526.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas kebijakan daerah** | | | | | | | | | **2.348.489.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kematangan Kebijakan | Angka | 37.1 | | | |
| | **Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil** | | | | | | | | **2.348.489.000** | | |
| | | | | | | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa | % | 90 | 2.348.489.000 | | |
| | | 4.01.07 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | 2.348.489.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa | % | 91 | 1.270.335.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | 1.270.335.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 4 | 1.270.335.000 | | |
| | | 4.01.07.1.01.0001 | | | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 262.535.000 | | |
| | | | | | | Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa | Laporan | 4 | 180.475.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyusunan SHB | Laporan | 2 | 82.060.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.01.0002 | | | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 799.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing) | Laporan | 12 | 655.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal | Laporan | 4 | 144.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.01.0003 | | | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 208.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 4 | 208.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa | % | 82 | 474.434.000 | | |
| | | | | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | 474.434.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 4 | 474.434.000 | | |
| | | 4.01.07.1.03.0001 | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 147.204.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah | Laporan | 2 | 147.204.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.03.0002 | | | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 162.210.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ | Laporan | 4 | 162.210.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.03.0003 | | | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 165.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa | Laporan | 4 | 165.020.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik | % | 82 | 603.720.000 | | |
| | | | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | 603.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa | Laporan | 4 | 603.720.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 4.01.07.1.02.0001 | | | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | | | | 190.230.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik | Laporan | 4 | 190.230.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.02.0002 | | | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 295.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem InformasiPengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 2 | 295.350.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.01.07.1.02.0003 | | | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 118.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 4 | 118.140.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **245.740.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah | Angka | 76.5 | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **245.740.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 82.5 | 245.740.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 245.740.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa | % | 100 | 245.740.000 | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 245.740.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | % | 100 | 245.740.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 222.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 12 | 222.300.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 23.440.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 12 | 23.440.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **2.594.229.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Sekretariat DPRD

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **218.871.748.000** | **Sekretariat DPRD** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 77 | | Sekretariat DPRD | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **39.746.542.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 77 | 39.746.542.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 39.746.542.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 39.746.542.000 | Bagian Umum | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 1.055.674.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 1.055.674.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1.055.674.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 1.055.674.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 600.101.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 600.101.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 206.808.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 206.808.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 393.293.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 75 | 393.293.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 3.256.952.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 3.256.952.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 435.701.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 435.701.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 182.189.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 182.189.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 480.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 12 | 480.500.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.000 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 980.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 980.400.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 178.162.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 178.162.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 5.762.981.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 141 | 5.762.981.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 639.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Unit | 1 | 639.680.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 2.163.948.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 10 | 2.163.948.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 276.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 2 | 276.640.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 381.288.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 20 | 381.288.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.301.425.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 108 | 2.301.425.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 19.393.158.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 48 | 19.393.158.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 196.957.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 196.957.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 3.439.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 3.439.000.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.031.086.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 1.031.086.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 14.726.115.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 14.726.115.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 7.718.675.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 160 | 7.718.675.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 502.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 10 | 502.800.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 3.027.582.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Unit | 72 | 3.027.582.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 57.475.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 12 | 57.475.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.699.503.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 3 | 1.699.503.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.431.315.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 63 | 2.431.315.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | 1.959.001.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar | % | 100 | 1.959.001.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | |
| | | X.XX.01.1.15.0002 | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | 1.392.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan | Paket | 4 | 1.392.880.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.15.0003 | | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | 566.121.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD | Orang | 120 | 566.121.000 | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **179.125.206.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 179.125.206.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 179.125.206.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 179.125.206.000 | BAGIAN KEUANGAN | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 1.112.567.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 1.112.567.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 812.567.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 6 | 812.567.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 20 | 300.000.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 20.665.764.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 24 | 20.665.764.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 19.560.764.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 124 | 19.560.764.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 24 | 1.105.000.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | 157.346.875.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar | % | 100 | 157.346.875.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | |
| | | X.XX.01.1.15.0001 | | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | 157.346.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD | Orang | 120 | 157.346.875.000 | SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Meningkatkan Pelayanan Kedewanan** | | | | | | | | | **380.153.260.000** | **Sekretariat DPRD** | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah | Angka | 91 | | Sekretariat DPRD | |
| | **Meningkatnya sarana dan prasarana yang tersedia** | | | | | | | | **195.305.169.000** | | |
| | | | | | | Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD) | % | 76 | 195.305.169.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | | 195.305.169.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan bagian humas | % | 95 | 195.305.169.000 | Bagian Humas | |
| | | | | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | 78.981.307.000 | | |
| | | | | | | Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | % | 100 | 78.981.307.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | |
| | | 4.02.02.1.04.0004 | | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | 2.173.208.000 | | |
| | | | | | | jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli | Orang | 42 | 2.173.208.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.02.02.1.04.0005 | | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | 454.190.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | Orang | 8 | 454.190.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.02.02.1.04.0006 | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | 10.849.896.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat | Dokumen | 6 | 10.849.896.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.02.02.1.04.0007 | | | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | 65.504.013.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana kerja DPRD | Dokumen | 7 | 65.504.013.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembahasan Kerja Sama Daerah | | | | | 116.323.862.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama | Dokumen | 12 | 116.323.862.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | |
| | | 4.02.02.1.07.0002 | | | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | | | 116.323.862.000 | | |
| | | | | | | jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun | Dokumen | 12 | 116.323.862.000 | SUB BAGIAN PROTOKOL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Terwujudnya hubungan antara Setwan dengan DPRD yang baik** | | | | | | | | **184.848.091.000** | | |
| | | | | | | Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD) | % | 76 | 184.848.091.000 | Sekretariat DPRD | |
| | | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | | 184.848.091.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi penyusunan raperda | % | 95 | 184.848.091.000 | Bagian Persidangan | |
| | | | | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | | | | | 8.483.926.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan RAPERDA | Dokumen | 23 | 8.483.926.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.01.0001 | | | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | 8.483.926.000 | | |
| | | | | | | jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Raperda | Dokumen | 23 | 8.483.926.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | 2.102.662.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran | Dokumen | 2 | 2.102.662.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.02.000 | | | Pembahasan APBD | | | | 2.102.662.000 | | |
| | | | | | | jumlah dokumen hasil pembahasan APBD | Dokumen | 2 | 2.102.662.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | 21.819.030.000 | | |
| | | | | | | Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | % | 100 | 21.819.030.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.03.0001 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 3.814.668.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Laporan | 48 | 3.814.668.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 4.02.02.1.03.0002 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | 3.814.668.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Laporan | 48 | 3.814.668.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 4.02.02.1.03.0003 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | 3.814.668.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 48 | 3.814.668.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 4.02.02.1.03.0004 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | 3.814.668.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Laporan | 48 | 3.814.668.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 4.02.02.1.03.0005 | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | 3.814.668.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Laporan | 48 | 3.814.668.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 4.02.02.1.03.0006 | | | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | 1.149.830.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Dokumen | 2 | 1.149.830.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 4.02.02.1.03.0007 | | | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | 1.595.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | Dokumen | 25 | 1.595.860.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | 4.380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD | Dokumen | 6 | 4.380.000.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.04.0002 | | | Pendalaman Tugas DPRD | | | | 4.380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD | Dokumen | 6 | 4.380.000.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | 70.153.805.000 | | |
| | | | | | | Persentase tercapainya kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | % | 100 | 70.153.805.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.05.0001 | | | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | 25.263.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD | Laporan | 24 | 25.263.680.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.02.02.1.05.0002 | | | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun | Dokumen | 1 | 175.000.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 4.02.02.1.05.0003 | | | Pelaksanaan Reses | | | | 44.715.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses | Dokumen | 24 | 44.715.125.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | 552.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Dokumen | 21 | 552.860.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.06.0001 | | | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | 552.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD | Dokumen | 21 | 552.860.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | 77.355.808.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD | Dokumen | 33 | 77.355.808.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | |
| | | 4.02.02.1.08.0001 | | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | 77.355.808.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Dokumen | 33 | 77.355.808.000 | SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **599.025.008.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **35.441.011.000** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 72.5 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **34.781.011.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 84.25 | 34.781.011.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 34.781.011.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 34.781.011.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 22.081.232.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 22.081.232.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 21.406.192.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 119 | 21.406.192.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 350.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 350.040.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 260.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 390.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 390.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 190.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 45 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 125 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.871.200.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.871.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 120.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 120.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 52.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 52.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 220.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 220.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 39.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 180.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 180.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 1.250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 40 | 1.250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 10 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 10 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 950.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 24 | 950.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4.275.418.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 4.275.418.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 1.200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 3.045.418.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 3.045.418.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.653.161.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1475 | 3.653.161.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 46 | 650.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 425 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 440 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 340.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 215 | 340.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 5 | 24.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 1.809.161.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 6 | 1.809.161.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 125 | 250.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiv | Unit | 92 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **660.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | % | 2.92 | 660.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 660.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 660.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 660.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 660.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 360.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 6 | 360.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas** | | | | | | | | | **12.980.000.000** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | |
| | | | | | | Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan | % | 100 | | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | **Terwujudnya keselerasan dokumen perencanaan** | | | | | | | | **3.003.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional | % | 100 | 3.003.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | 943.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi | % | 100 | 943.000.000 | Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | |
| | | | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 943.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Evaluasi yang sesuai amanah regulasi | Dokumen | 4 | 943.000.000 | SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN | |
| | | 5.01.02.1.03.0003 | | | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | 678.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | 4 | 678.000.000 | SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.01.02.1.03.0004 | | | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 265.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kab/kota yang dievaluasi | Dokumen | 105 | 265.000.000 | SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | 2.060.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | % | 100 | 550.000.000 | Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Infrastruktur dan Perhubungan | Laporan | 1 | 150.000.000 | SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN | |
| | | 5.01.03.1.03.0003 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 150.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Infrukstruktur dan perhubungan | OPD | 3 | 150.000.000 | SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman | Laporan | 1 | 150.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | | 5.01.03.1.03.0007 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan | OPD | 1 | 150.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup SDH LH | Laporan | 1 | 250.000.000 | SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 5.01.03.1.03.0007 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup SDA dan LH | OPD | 3 | 250.000.000 | SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | % | 100 | 490.000.000 | Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya | |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | 490.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang Pemberdes | Laporan | 1 | 140.000.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | 5.01.03.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pemberdes | OPD | 13 | 140.000.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kesos | Laporan | 1 | 80.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 5.01.03.1.01.0007 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kesejahteraan Sosial | OPD | 11 | 80.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup PMS | Laporan | 1 | 270.000.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL | |
| | | 5.01.03.1.01.0007 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 270.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pendidikan Mental Spiritual | OPD | 5 | 270.000.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian | % | 100 | 1.020.000.000 | Bidang Perekonomian | |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | 1.020.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Eknaker | Laporan | 1 | 420.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | 5.01.03.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 420.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja | OPD | 6 | 420.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup KKI | Laporan | 1 | 260.000.000 | SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI | |
| | | 5.01.03.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi | OPD | 3 | 260.000.000 | SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Tanlut | Laporan | 1 | 340.000.000 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN | |
| | | 5.01.03.1.02.0007 | | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | 340.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Tanlut | OPD | 4 | 340.000.000 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN | |
| | **Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan** | | | | | | | | **9.977.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi | % | 100 | 9.977.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| | | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | 4.957.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi | % | 100 | 4.957.000.000 | Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan | |
| | | | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | 4.216.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan yang diamanahkan regulasi | Dokumen | 3 | 4.216.000.000 | SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN | |
| | | 5.01.02.1.01.0006 | | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | | | | 4.216.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan | Dokumen | 3 | 4.216.000.000 | SUB BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 741.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen analisis data dan informasi Perencanaan Pembangunan | Dokumen | 1 | 741.000.000 | SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN | |
| | | 5.01.02.1.02.0001 | | | Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 601.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah | Dokumen | 2 | 601.000.000 | SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.01.02.1.02.0004 | | | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | | | | 140.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah | Buku | 1 | 140.000.000 | SUB BIDANG ANALISA DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | 5.020.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | % | 100 | 1.600.000.000 | Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | 1.600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Infrastruktur dan Perhubungan | Dokumen | 1 | 500.000.000 | SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN | |
| | | 5.01.03.1.03.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Infrastruktur dan Perhubungan | Laporan | 4 | 500.000.000 | SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman | Dokumen | 1 | 550.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |
| | | 5.01.03.1.03.0008 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan | Laporan | 4 | 550.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup SDH LH | Dokumen | 1 | 550.000.000 | SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 5.01.03.1.03.0008 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 550.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup SDA dan LH | Laporan | 4 | 550.000.000 | SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya | % | 100 | 2.210.000.000 | Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya | |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | 2.210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Kesos | Dokumen | 1 | 813.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL | |
| | | 5.01.03.1.01.0008 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 813.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kesejahteraan Sosial | Laporan | 4 | 813.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pemberdes | Dokumen | 1 | 984.000.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | |
| | | 5.01.03.1.01.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 984.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pemberdes | Laporan | 4 | 984.000.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup PMS | Dokumen | 1 | 413.000.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL | |
| | | 5.01.03.1.01.0008 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 413.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pendidikan Mental Spiritual | Laporan | 4 | 413.000.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian | % | 100 | 1.210.000.000 | Bidang Perekonomian | |
| | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | 1.210.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Eknaker | Dokumen | 1 | 340.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN | |
| | | 5.01.03.1.02.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | 340.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja | Laporan | 4 | 340.000.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup KKI | Dokumen | 1 | 520.000.000 | SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI | |
| | | 5.01.03.1.02.0004 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | 520.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi | Laporan | 4 | 520.000.000 | SUB BIDANG KEUANGAN, KERJASAMA DAN INVESTASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Tanlut | Dokumen | 1 | 350.000.000 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN | |
| | | 5.01.03.1.02.0008 | | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Tanlut | Laporan | 4 | 350.000.000 | SUB BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **48.421.011.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Pengelola Pendapatan Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **257.337.092.000** | **Badan Pengelola Pendapatan Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 80 | | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **256.732.092.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 90 | 256.732.092.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 256.732.092.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 95 | 192.538.297.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 158.279.449.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 158.279.449.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 157.386.249.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 605 | 157.386.249.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 665.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 665.640.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 227.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 4 | 227.560.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 355.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 355.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 355.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerahJumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 355.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 207.550.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 207.550.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 157.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 157.550.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 8.115.694.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 8.115.694.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 125.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.012.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.012.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 3.801.860.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 3.801.860.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 350.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 789.834.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 789.834.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 12.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 7.392.128.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 1 | 7.392.128.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0001 | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 5.200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 1 | 5.200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 2.192.128.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 2.192.128.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 14.332.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 14.332.260.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 2.667.710.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 2.667.710.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 9.684.828.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 9.684.828.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.969.722.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.969.722.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.856.216.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 3.856.216.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 650.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 650.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.000.010.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 1.000.010.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 95.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2.111.206.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 2.111.206.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 95 | 1.524.864.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 278.092.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 100 | 278.092.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.270.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 43.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 43.540.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 96.114.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 96.114.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 14.753.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 14.753.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 91.315.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 91.315.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 2.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 863.085.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara | Laporan | 4 | 863.085.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 186.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 186.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 670.585.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 670.585.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 331.187.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara | Unit | 1 | 331.187.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 14.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 14.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 159.587.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 159.587.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 35.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 35.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Banjarnegara | Unit | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas | % | 95 | 2.140.132.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 49.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 49.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 49.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 49.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 13.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 13.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 282.632.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas | % | 100 | 282.632.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 18.480.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 18.480.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | umlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 7.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 131.797.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 131.797.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.655.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 11.655.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 88.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 88.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.456.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas | Laporan | 4 | 1.456.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 345.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 345.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 27.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 27.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.081.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.081.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 338.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas | Unit | 1 | 338.460.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 132.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 132.960.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 35.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 35.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang | % | 95 | 1.644.534.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 43.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 43.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 43.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 43.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 272.109.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang | % | 100 | 272.109.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Paket | 1 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 28.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Paket | 1 | 28.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 21.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Paket | 1 | 21.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 102.694.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Batang UPPD Kabupaten Batang | Paket | 1 | 102.694.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 32.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Batang | Laporan | 4 | 32.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 75.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang | Laporan | 4 | 75.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 960.275.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang | Laporan | 4 | 960.275.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Batang | Laporan | 4 | 3.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Laporan | 4 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 716.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang | Laporan | 4 | 716.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 364.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 364.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 52.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 52.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 145.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 145.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 48.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 48.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 75.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 75.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 35.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang | Unit | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora | % | 95 | 1.835.312.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 257.821.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora | % | 100 | 257.821.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 36.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Paket | 1 | 36.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 11.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Paket | 1 | 11.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 108.828.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakanUPPD Kabupaten Blora | Paket | 1 | 108.828.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 15.960.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Blora | Laporan | 4 | 15.960.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 70.133.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora | Laporan | 4 | 70.133.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.215.261.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora | Laporan | 4 | 1.215.261.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Blora | Laporan | 4 | 3.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 254.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Laporan | 4 | 254.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Laporan | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 953.661.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora | Laporan | 4 | 953.661.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 309.730.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora | Unit | 1 | 309.730.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 14.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 14.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 99.630.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 99.630.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 42.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 42.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 110.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 25.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali | % | 95 | 1.587.726.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 44.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali | Dokumen | 4 | 44.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 44.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 44.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 277.886.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali | % | 100 | 277.886.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 35.380.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 35.380.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 23.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 23.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 5.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 101.123.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 101.123.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 22.278.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 22.278.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 82.805.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 82.805.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 945.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali | Laporan | 4 | 945.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 204.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 204.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 738.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 738.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 319.690.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali | Unit | 1 | 319.690.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 24.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 24.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 161.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 161.040.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 48.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 48.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 56.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 56.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 21.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 21.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes | % | 95 | 2.284.995.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 287.915.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes | % | 100 | 287.915.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Paket | 1 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 31.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Paket | 1 | 31.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 11.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 11.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 97.765.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Paket | 1 | 97.765.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 22.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Brebes | Laporan | 4 | 22.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 108.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes | Laporan | 4 | 108.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.577.370.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes | Laporan | 4 | 1.577.370.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Brebes | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 405.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 405.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.169.370.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes | Laporan | 4 | 1.169.370.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 367.210.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 367.210.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 19.712.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 19.712.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 120.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 120.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 77.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 77.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 107.518.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 107.518.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap | % | 95 | 2.145.337.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 311.362.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap | % | 100 | 311.362.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 38.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 38.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 11.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 11.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 4.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 151.756.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 151.756.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 25.512.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 25.512.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 61.244.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 61.244.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.317.376.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap | Laporan | 4 | 1.317.376.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 283.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 283.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.029.076.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.029.076.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 459.599.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap | Unit | 1 | 459.599.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 39.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 39.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 221.999.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 221.999.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 51.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 51.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 24.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 24.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak | % | 95 | 1.575.255.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 303.090.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak | % | 100 | 303.090.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Paket | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 49.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Paket | 1 | 49.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 27.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Paket | 1 | 27.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 10.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 10.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 115.312.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Paket | 1 | 115.312.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.230.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Demak | Laporan | 4 | 20.230.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 70.298.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak | Laporan | 4 | 70.298.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 849.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak | Laporan | 4 | 849.840.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Demak | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 196.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Laporan | 4 | 196.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 650.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak | Laporan | 4 | 650.840.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 374.825.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 374.825.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 27.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 27.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 166.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 166.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 43.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 43.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 27.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak | Unit | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan | % | 95 | 1.598.624.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 5.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 289.095.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan | % | 100 | 289.095.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 41.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Paket | 1 | 41.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 19.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Paket | 1 | 19.320.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 100.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Paket | 1 | 100.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 24.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 24.625.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 88.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 88.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 976.679.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 976.679.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 254.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 254.540.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 720.639.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan | Laporan | 4 | 720.639.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 285.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 285.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 109.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 109.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 56.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 56.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiUPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 25.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 1 | 8.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara | % | 95 | 1.707.173.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 257.028.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara | % | 100 | 257.028.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.154.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.154.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 35.505.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 35.505.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 11.633.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 11.633.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 5.920.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 97.196.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 97.196.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 17.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 17.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 82.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 82.720.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.074.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara | Laporan | 4 | 1.074.775.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 331.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 331.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 741.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 741.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 332.870.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara | Unit | 1 | 332.870.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 16.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 16.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 156.320.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 156.320.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 54.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 54.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 46.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 46.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 95 | 1.637.557.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 43.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 43.360.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 43.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 43.360.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 273.582.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 100 | 273.582.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 32.610.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 32.610.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 11.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 11.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 100.730.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 100.730.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.580.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 20.580.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 99.212.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 99.212.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.023.765.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar | Laporan | 4 | 1.023.765.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.990.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 196.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 196.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 823.275.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 823.275.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 296.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar | Unit | 1 | 296.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 143.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 143.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 39.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 39.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 76.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 76.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KARANGANYAR |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 29.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 29.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen | % | 95 | 1.461.127.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 42.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | % | 100 | 8.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 8.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 227.369.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 227.369.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.490.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.490.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 39.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 12.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.609.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 6.609.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 84.654.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 84.654.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 22.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 22.260.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 55.656.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 55.656.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 877.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 877.270.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 216.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 216.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 659.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 659.270.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 306.038.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 306.038.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 112.288.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 112.288.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 60.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharaJumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 60.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 8.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal | % | 95 | 1.604.072.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 328.902.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal | % | 100 | 328.902.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 25.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 25.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 149.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 149.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 25.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 25.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 74.252.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 74.252.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 941.675.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal | Laporan | 4 | 941.675.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 269.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 269.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 670.425.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 670.425.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 290.995.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal | Unit | 1 | 290.995.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 26.270.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 26.270.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 97.775.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 97.775.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 52.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 52.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 78.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 78.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 36.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 36.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten | % | 95 | 2.571.808.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 42.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 354.029.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten | % | 100 | 354.029.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 11.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 11.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.204.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 7.204.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 151.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 151.260.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 52.696.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 52.696.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 125.369.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 125.369.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.776.435.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten | Laporan | 4 | 1.776.435.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 348.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 348.920.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.426.015.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.426.015.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 389.044.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten | Unit | 1 | 389.044.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 23.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 23.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 135.009.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 135.009.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 75.705.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 75.705.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 7.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 7.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 31.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 31.680.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus | % | 95 | 1.597.894.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 6.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 6.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 6.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 6.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 250.724.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus | % | 100 | 250.724.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.100.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Paket | 1 | 6.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Paket | 1 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.204.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Paket | 1 | 12.204.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 9.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 9.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 95.055.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus UPPD Kabupaten Kudus | Paket | 1 | 95.055.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 18.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 18.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 83.965.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 83.965.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 1.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 976.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 976.120.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 324.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 324.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 648.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus | Laporan | 4 | 648.620.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 321.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 321.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 12.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 12.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 109.300.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 109.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 39.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 39.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 103.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 103.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 37.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 37.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang | % | 95 | 1.802.587.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 297.999.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang | % | 100 | 297.999.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 41.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 41.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 30.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 30.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 4.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 99.330.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 99.330.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 36.078.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 36.078.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 77.711.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 77.711.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.080.145.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang | Laporan | 4 | 1.080.145.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 212.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 212.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 862.545.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 862.545.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 371.943.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang | Unit | 1 | 371.943.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 21.488.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 21.488.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 146.455.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 146.455.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 87.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 87.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati | % | 95 | 1.657.594.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 220.889.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati | % | 100 | 220.889.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 41.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Paket | 1 | 41.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 4.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Paket | 1 | 4.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 7.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 76.252.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Paket | 1 | 76.252.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 19.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 19.090.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 68.847.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 68.847.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.064.205.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 1.064.205.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.080.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 1.080.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 315.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 315.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 748.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati | Laporan | 4 | 748.125.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 310.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 310.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 138.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 138.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 84.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 84.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 9.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati | Unit | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 95 | 1.581.106.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 15.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 15.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 286.059.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 100 | 286.059.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Paket | 1 | 6.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 51.380.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Paket | 1 | 51.380.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 19.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Paket | 1 | 19.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 6.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 113.804.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD KAbupaten Pekalongan UPPD Kabupaten Pekalongan | Paket | 1 | 113.804.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 22.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 22.125.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 64.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 64.250.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 2.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 898.965.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 898.965.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 1.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 216.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 216.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 679.765.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan | Laporan | 4 | 679.765.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 338.582.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 338.582.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 24.182.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 24.182.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 127.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 127.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 56.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 56.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 39.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 39.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang | % | 95 | 1.732.604.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 42.500.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN  UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 42.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 10.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah  UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 10.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 271.366.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang | % | 100 | 271.366.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Paket | 1 | 12.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 24.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Paket | 1 | 24.250.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Paket | 1 | 5.750.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 7.200.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 118.579.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Paket | 1 | 118.579.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 13.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 13.650.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 87.437.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 87.437.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 2.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 995.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 995.100.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 1.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 246.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 246.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 2.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 745.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang | Laporan | 4 | 745.600.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 413.638.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 413.638.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 20.438.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 20.438.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 179.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 179.200.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 44.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 44.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 12.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 110.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 39.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 39.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 1 | 8.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 95 | 1.505.419.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 276.084.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 100 | 276.084.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 4.150.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Paket | 1 | 4.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 38.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Paket | 1 | 38.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Paket | 1 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 110.329.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Paket | 1 | 110.329.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 24.920.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 24.920.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 70.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 70.720.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1.865.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 1.865.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 837.955.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 837.955.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 5.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 231.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 231.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 594.955.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga | Laporan | 4 | 594.955.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 339.380.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 339.380.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 25.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 25.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 135.700.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 135.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 71.510.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 71.510.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 74.170.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 74.170.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 1 | 7.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo | % | 95 | 1.800.454.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 286.890.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 286.890.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 52.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 52.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 8.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 8.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 6.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 108.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 108.560.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 23.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 23.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 67.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 67.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.184.064.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 1.184.064.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.475.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.475.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 193.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 193.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 988.089.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 988.089.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 1 | 275.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 13.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 13.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 114.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 114.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 28.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 28.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 1.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 1.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 30.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 6.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang | % | 95 | 1.239.915.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 42.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 231.885.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang | % | 100 | 231.885.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.560.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 32.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 32.280.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 4.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 74.360.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 74.360.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 19.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 19.460.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 84.425.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 84.425.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 658.383.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang | Laporan | 4 | 658.383.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 151.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 151.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 483.883.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 483.883.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 297.297.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang | Unit | 1 | 297.297.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 17.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 17.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 159.497.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 159.497.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 39.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 39.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 18.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 7.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang | % | 95 | 2.415.395.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang | Dokumen | 4 | 42.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 291.482.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang | % | 100 | 291.482.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 41.350.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 41.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 20.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 20.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 121.863.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 121.863.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 29.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 29.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 61.769.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 61.769.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.699.905.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang | Laporan | 4 | 1.699.905.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 498.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 498.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.183.905.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.183.905.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 381.758.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang | Unit | 1 | 381.758.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 32.038.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 32.038.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 193.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 193.220.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 57.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 57.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 25.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen | % | 95 | 1.400.639.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen | Dokumen | 4 | 42.720.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.720.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.720.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 260.233.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen | % | 100 | 260.233.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 32.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 32.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 6.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 6.840.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 6.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 91.888.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 91.888.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 34.475.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 34.475.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 81.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 81.880.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 799.096.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen | Laporan | 4 | 799.096.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 198.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 198.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 597.596.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 597.596.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 298.590.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen | Unit | 1 | 298.590.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 36.167.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 36.167.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 119.693.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 119.693.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 34.570.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 34.570.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 68.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 68.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 29.460.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 29.460.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 7.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 95 | 1.713.741.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 42.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 42.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 260.580.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 100 | 260.580.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.570.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Paket | 1 | 8.570.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 41.975.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Paket | 1 | 41.975.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 18.020.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Paket | 1 | 18.020.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 100.627.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Paket | 1 | 100.627.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 19.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 19.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 62.438.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 62.438.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.084.246.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 1.084.246.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 3.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 279.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 279.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 711.846.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Laporan | 4 | 711.846.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 326.865.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 326.865.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 34.875.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 34.875.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 91.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 91.450.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 78.715.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 78.715.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 6.325.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 6.325.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 80.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 27.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 27.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal | % | 95 | 1.622.489.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 249.985.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal | % | 100 | 249.985.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 29.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Paket | 1 | 29.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 97.017.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal UPPD Kabupaten Tegal | Paket | 1 | 97.017.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 11.075.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 11.075.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 83.593.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 83.593.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 948.429.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 948.429.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 187.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 187.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 757.229.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal | Laporan | 4 | 757.229.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 361.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 361.575.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 32.325.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 32.325.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 156.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 156.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 44.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 44.750.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 90.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 90.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 29.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 29.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 7.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 1 | 7.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung | % | 95 | 1.550.156.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 275.634.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung | % | 100 | 275.634.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 57.424.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 57.424.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 80.454.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 80.454.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 25.410.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 25.410.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 85.796.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 85.796.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 958.797.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung | Laporan | 4 | 958.797.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.410.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.410.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 181.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 181.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 774.187.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 774.187.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 273.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung | Unit | 1 | 273.225.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 16.275.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 16.275.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 107.100.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 107.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 33.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 33.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 2.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 2.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 84.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 84.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 95 | 2.275.042.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri | Dokumen | 4 | 42.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 282.122.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 100 | 282.122.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 42.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 114.932.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 114.932.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 19.390.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 19.390.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 75.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 75.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.551.525.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri | Laporan | 4 | 1.551.525.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 3.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 399.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 399.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.149.275.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 1.149.275.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 399.045.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri | Unit | 1 | 399.045.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 24.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 24.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 151.045.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 151.045.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 63.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 63.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 44.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 44.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 95 | 1.412.429.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 42.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 12.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 283.019.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 100 | 283.019.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 41.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 41.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 19.794.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 19.794.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 88.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 88.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 22.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 22.575.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 93.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 93.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 752.310.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo | Laporan | 4 | 752.310.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 165.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 165.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 579.310.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 579.310.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 322.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo | Unit | 1 | 322.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 22.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 22.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 100.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 55.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 55.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 105.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 4.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang | % | 95 | 1.218.356.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 282.321.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang | % | 100 | 282.321.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 24.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 24.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 18.884.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 18.884.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 109.142.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 109.142.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 36.435.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 36.435.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 85.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 85.060.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 675.003.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Magelang | Laporan | 4 | 675.003.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 1.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 174.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 174.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 498.903.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 498.903.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 212.532.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang | Unit | 1 | 212.532.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 19.192.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 19.192.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 90.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 90.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 28.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 28.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 13.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 13.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 6.050.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 6.050.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan | % | 95 | 1.540.255.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 220.081.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan | % | 100 | 220.081.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Paket | 1 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 26.175.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Paket | 1 | 26.175.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Paket | 1 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 102.953.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Paket | 1 | 102.953.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 9.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 9.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 54.403.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 54.403.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 1.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 1.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 956.584.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 956.584.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 1.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 240.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 1.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 714.084.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan | Laporan | 4 | 714.084.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 311.090.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 311.090.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 21.190.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 21.190.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 161.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 161.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 42.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 42.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 50.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 20.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan | Unit | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga | % | 95 | 1.347.469.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | 42.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 294.044.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga | % | 100 | 294.044.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 72.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 72.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 29.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 29.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 87.017.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 87.017.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 20.527.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 20.527.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 68.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 68.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 674.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga | Laporan | 4 | 674.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 175.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 175.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 497.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 497.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 335.975.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga | Unit | 1 | 335.975.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 20.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 20.625.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 113.100.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 113.100.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 52.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 52.750.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 98.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 98.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 33.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 33.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 8.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I | % | 95 | 2.296.528.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 43.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1 | Dokumen | 4 | 43.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 43.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang I | Dokumen | 4 | 43.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 5.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang 1 | Dokumen | 4 | 5.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 5.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 5.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 269.258.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1 | % | 100 | 269.258.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 6.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 22.025.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 22.025.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 24.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 24.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 128.384.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 128.384.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 16.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 16.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 67.949.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 67.949.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.715.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1 | Laporan | 4 | 1.715.060.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 438.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 438.800.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 280.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 994.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 994.260.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 262.910.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1 | Unit | 1 | 262.910.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 102.110.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 102.110.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 38.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 38.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 54.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 54.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II | % | 95 | 1.732.086.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 309.939.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II | % | 100 | 309.939.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 46.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 46.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 38.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 38.340.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 7.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 109.874.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 109.874.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 30.240.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 30.240.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 62.485.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 62.485.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.087.935.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II | Laporan | 4 | 1.087.935.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 370.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 370.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 14.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 14.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 701.835.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 701.835.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 291.712.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II | Unit | 1 | 291.712.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 25.312.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 25.312.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 95.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 95.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 57.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 57.750.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 10.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 60.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 30.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 30.850.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 12.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III | % | 95 | 1.987.121.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 285.526.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III | % | 100 | 285.526.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 54.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 54.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 15.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 4 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 112.876.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 112.876.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 24.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 4 | 24.850.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 64.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 4 | 64.400.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.330.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III | Laporan | 4 | 1.330.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 4 | 2.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 439.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 4 | 439.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 22.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 867.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 4 | 867.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 328.195.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III | Unit | 1 | 328.195.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 18.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 1 | 18.375.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 91.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 1 | 91.050.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 87.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 1 | 87.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 75.370.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 75.370.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 48.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 48.400.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 8.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta | % | 95 | 1.707.896.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 267.038.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta | % | 100 | 267.038.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Paket | 1 | 10.350.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 1.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Paket | 1 | 1.150.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 12.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Paket | 1 | 12.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 6.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 6.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 138.890.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Paket | 1 | 138.890.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 26.565.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Surakarta | Laporan | 4 | 26.565.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 70.833.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Surakarta | Laporan | 4 | 70.833.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.119.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta | Laporan | 4 | 1.119.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 320.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Laporan | 4 | 320.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 799.375.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta | Laporan | 4 | 799.375.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 278.983.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 278.983.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 13.613.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 13.613.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 96.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 96.300.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 52.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 52.550.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 47.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 47.520.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 9.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta | Unit | 1 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal | % | 95 | 1.738.104.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 42.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 42.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 286.774.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal | % | 100 | 286.774.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 8.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal | Paket | 1 | 8.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 74.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Tegal | Paket | 1 | 74.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Tegal | Paket | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 7.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 7.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0007 | | | Penyediaan Bahan/Material | | | | 86.742.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Tegal UPPD Kota Tegal | Paket | 1 | 86.742.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 17.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Tegal | Laporan | 4 | 17.650.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 78.382.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Tegal | Laporan | 4 | 78.382.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.143.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Tegal | Laporan | 4 | 1.143.880.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Tegal | Laporan | 4 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 342.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Tegal | Laporan | 4 | 342.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 796.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal | Laporan | 4 | 796.880.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 244.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 244.950.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 11.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 11.250.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 78.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 78.700.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **605.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.72 | 605.000.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 605.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 90 | 605.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 605.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 605.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 345.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 4 | 345.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 4 | 260.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi |
| **Tumbuhnya Pendapatan Asli Daerah** | | | | | | | | | **38.151.060.000** | **Badan Pengelola Pendapatan Daerah** | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah | % | -4.58 | | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | **Tumbuhnya Pendapatan Pajak Daerah** | | | | | | | | **22.749.109.000** | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah | % | -6.19 | 22.749.109.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | 22.749.109.000 | | |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan | % | 100 | 800.000.000 | Bidang Evaluasi dan Pembinaan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 800.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB | Laporan | 37 | 290.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0012 | | | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | 290.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Laporan | 37 | 290.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain | Laporan | 37 | 260.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN | |
| | | 5.02.04.1.01.0013 | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Retribusi Daerah | Laporan | 37 | 260.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya | Laporan | 37 | 250.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA | |
| | | 5.02.04.1.01.0003 | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 37 | 250.000.000 | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah | % | 100 | 10.142.674.000 | Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 10.142.674.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Informasi data pendapatan yang tersusun | Dokumen | 4 | 225.209.000 | SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0009 | | | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | 225.209.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Dokumen | 4 | 225.209.000 | SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA PENDAPATAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah yang terapkan | Dokumen | 1 | 860.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0002 | | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | | | | 860.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah | Dokumen | 1 | 860.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah | Laporan | 4 | 9.057.465.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | |
| | | 5.02.04.1.01.0014 | | | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | 9.057.465.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Laporan | 4 | 9.057.465.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | -14.93 | 62.515.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 62.515.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara | Ribu Rupiah | 39565884 | 62.515.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 62.515.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 62.515.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas | % | -11.67 | 10.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas | Ribu Rupiah | 95377608 | 10.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 10.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang | % | -19.2 | 19.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Batang | Ribu Rupiah | 46287644 | 19.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 19.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora | % | -13.35 | 4.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD kabupaten Blora | Ribu Rupiah | 38499895 | 4.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 4.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali | % | -13.53 | 10.850.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 10.850.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali | Ribu Rupiah | 62048864 | 10.850.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 10.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Boyolali | Dokumen | 4 | 10.850.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes | % | 9.72 | 8.060.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 8.060.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes | Ribu Rupiah | 112261562 | 8.060.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 8.060.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 8.060.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap | % | -10.5 | 20.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 20.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap | Ribu Rupiah | 100784103 | 20.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 20.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 20.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak | % | -12.89 | 5.625.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 5.625.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Demak | Ribu Rupiah | 96532791 | 5.625.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 5.625.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 5.625.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan | % | -9.14 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan | Ribu Rupiah | 80075218 | 3.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara | % | -18.29 | 2.250.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 2.250.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara | Ribu Rupiah | 79897306 | 2.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 2.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | 2.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar | % | -22.6 | 1.300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.300.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar | Ribu Rupiah | 64035615 | 1.300.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 1.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 1.300.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen | % | -7.41 | 47.080.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 47.080.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen | Ribu Rupiah | 54408329 | 47.080.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 47.080.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kebumen | Dokumen | 4 | 47.080.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal | % | -6.82 | 4.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.050.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal | Ribu Rupiah | 77308709 | 4.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | 4.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten | % | -16.34 | 4.830.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.830.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten | Ribu Rupiah | 89407036 | 4.830.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.830.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 4.830.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus | % | -17.98 | 3.150.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.150.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus | Ribu Rupiah | 74564278 | 3.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 3.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 3.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang | % | -11.38 | 32.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 32.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang | Ribu Rupiah | 67984364 | 32.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 32.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 32.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati | % | -15.98 | 4.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pati | Ribu Rupiah | 93008431 | 4.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 4.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan | % | -14.89 | 7.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 7.650.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan | Ribu Rupiah | 52058877 | 7.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 7.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 7.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang | % | -8.82 | 2.250.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 2.250.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang | Ribu Rupiah | 70805035 | 2.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 2.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 2.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga | % | -17.71 | 4.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.050.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga | Ribu Rupiah | 42262590 | 4.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 4.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo | % | -7.4 | 14.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 14.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo | Ribu Rupiah | 38951486 | 14.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 14.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten PUrworejo | Dokumen | 4 | 14.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang | % | -9.37 | 31.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 31.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang | Ribu Rupiah | 40742878 | 31.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 31.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 31.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang | % | -13.7 | 9.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 9.750.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang | Ribu Rupiah | 83062163 | 9.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 9.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Semarang | Dokumen | 4 | 9.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen | % | -22.66 | 3.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen | Ribu Rupiah | 62139620 | 3.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sragen | Dokumen | 4 | 3.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | -14.9 | 11.340.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 11.340.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo | Ribu Rupiah | 82192398 | 11.340.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 11.340.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 11.340.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal | % | 2.02 | 9.225.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 9.225.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal | Ribu Rupiah | 93656565 | 9.225.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 9.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 9.225.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung | % | -13.52 | 1.575.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.575.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung | Ribu Rupiah | 33421502 | 1.575.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 1.575.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 1.575.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri | % | -7.55 | 20.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri | Ribu Rupiah | 44130893 | 20.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo | % | -24.1 | 1.350.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.350.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo | Ribu Rupiah | 32265389 | 1.350.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 1.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 1.350.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang | % | -24.5 | 900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 900.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Magelang | Ribu Rupiah | 13412432 | 900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 900.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan | % | -21.25 | 4.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Pekalongan | Ribu Rupiah | 27752323 | 4.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 4.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga | % | -6.82 | 4.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Salatiga | Ribu Rupiah | 25246360 | 4.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 4.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | 4.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1 | % | 4.34 | 7.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang 1 | Ribu Rupiah | 174716311 | 7.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 7.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang I | Dokumen | 4 | 7.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II | % | -12.96 | 2.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang II | Ribu Rupiah | 125774625 | 2.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | 2.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III | % | -21.14 | 3.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang III | Ribu Rupiah | 105715002 | 3.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 3.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang III | Dokumen | 4 | 3.600.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta | % | -10.64 | 20.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Surakarta | Ribu Rupiah | 97613482 | 20.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 20.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal | % | 3.51 | 11.250.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 11.250.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Tegal | Ribu Rupiah | 31465237 | 11.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 11.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 11.250.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | -0.46 | 143.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 143.650.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara | Ribu Rupiah | 79430909 | 143.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 143.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD abupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 143.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas | % | -15.84 | 234.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 234.750.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banyumas | Ribu Rupiah | 182892682 | 234.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 234.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 234.750.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang | % | -3.73 | 174.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 174.400.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Batang | Ribu Rupiah | 79989403 | 174.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 174.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 174.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora | % | -22.72 | 171.650.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 171.650.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Blora | Ribu Rupiah | 71306856 | 171.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 171.650.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 171.650.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali | % | -16.92 | 128.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 128.400.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Boyolali | Ribu Rupiah | 122893737 | 128.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 128.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Boyolali | Dokumen | 4 | 128.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes | % | 2.01 | 174.450.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 174.450.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Brebes | Ribu Rupiah | 131289711 | 174.450.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 174.450.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 174.450.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap | % | -17.17 | 161.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 161.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Cilacap | Ribu Rupiah | 176500170 | 161.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 161.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 161.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak | % | -15.64 | 268.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 268.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Demak | Ribu Rupiah | 134528768 | 268.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 268.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 268.800.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan | % | -15.78 | 130.120.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 130.120.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Grobogan | Ribu Rupiah | 126126565 | 130.120.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 130.120.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 130.120.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara | % | -15.04 | 198.275.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 198.275.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Jepara | Ribu Rupiah | 142051610 | 198.275.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 198.275.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | 198.275.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar | % | -10.91 | 176.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 176.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar | Ribu Rupiah | 136635766 | 176.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 176.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 176.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen | % | -13.87 | 175.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 175.400.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kebumen | Ribu Rupiah | 102864247 | 175.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 175.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kebumen | Dokumen | 4 | 175.400.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal | % | -8.84 | 221.435.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 221.435.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kendal | Ribu Rupiah | 115552981 | 221.435.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 221.435.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | 221.435.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten | % | -15.94 | 218.450.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 218.450.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Klaten | Ribu Rupiah | 170559812 | 218.450.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 218.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 218.450.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus | % | -22.3 | 166.150.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 166.150.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kusus | Ribu Rupiah | 134194641 | 166.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 166.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 166.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang | % | -5.76 | 171.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 171.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Magelang | Ribu Rupiah | 127389286 | 171.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 171.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 171.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati | % | -19.95 | 161.150.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 161.150.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pati | Ribu Rupiah | 169139692 | 161.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 161.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 161.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang | % | -10.34 | 243.030.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 243.030.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pemalang | Ribu Rupiah | 115832343 | 243.030.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 243.030.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 243.030.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga | % | -21.96 | 194.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 194.900.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga | Ribu Rupiah | 81271448 | 194.900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 194.900.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 194.900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo | % | -27.79 | 165.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 165.200.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purworejo | Ribu Rupiah | 68238499 | 165.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 165.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purworejo | Dokumen | 4 | 165.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang | % | -23.29 | 254.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 254.200.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Rembang | Ribu Rupiah | 63811883 | 254.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 254.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 254.200.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang | % | -26.14 | 207.450.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 207.450.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Semarang | Ribu Rupiah | 141520544 | 207.450.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 207.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Semarang | Dokumen | 4 | 207.450.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen | % | -19.81 | 246.940.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 246.940.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sragen | Ribu Rupiah | 132649504 | 246.940.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 246.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sragen | Dokumen | 4 | 246.940.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | -17.6 | 171.150.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 171.150.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo | Ribu Rupiah | 145801529 | 171.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 171.150.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 171.150.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal | % | 13.68 | 156.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 156.050.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Tegal | Ribu Rupiah | 133010753 | 156.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 156.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 156.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung | % | -9.56 | 145.525.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 145.525.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Temanggung | Ribu Rupiah | 70016434 | 145.525.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 145.525.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 145.525.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri | % | -22.78 | 145.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 145.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri | Ribu Rupiah | 94785629 | 145.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 145.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri | Dokumen | 4 | 145.000.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo | % | -15 | 190.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 190.050.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo | Ribu Rupiah | 71037885 | 190.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 190.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 190.050.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang | % | -67.77 | 216.397.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 216.397.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Magelang | Ribu Rupiah | 33142524 | 216.397.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 216.397.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 216.397.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan | % | -50.2 | 188.469.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 188.469.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Pekalongan | Ribu Rupiah | 46977430 | 188.469.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 188.469.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 188.469.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga | % | -31.07 | 144.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 144.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Salatiga | Ribu Rupiah | 45368560 | 144.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 144.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | 144.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1 | % | -17 | 244.300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 244.300.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang 1 | Ribu Rupiah | 234884528 | 244.300.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 244.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang I | Dokumen | 4 | 244.300.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II | % | -29.99 | 290.850.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 290.850.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang II | Ribu Rupiah | 194972389 | 290.850.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 290.850.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | 290.850.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III | % | -19.28 | 245.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 245.900.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang III | Ribu Rupiah | 176507301 | 245.900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 245.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang III | Dokumen | 4 | 245.900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta | % | -32.48 | 218.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 218.900.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Surakarta | Ribu Rupiah | 170779171 | 218.900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 218.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 218.900.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal | % | -50.2 | 191.594.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 191.594.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Tegal | Ribu Rupiah | 44665201 | 191.594.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 191.594.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 191.594.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan | % | -4.14 | 153.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 153.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan | Ribu Rupiah | 84738032 | 153.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0008 | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | 153.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 153.500.000 | SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor | % | 73 | 4.300.000.000 | Bidang Pajak Kendaraan Bermotor | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 4.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen regulasi pelayanan PKB | Dokumen | 1 | 1.850.000.000 | SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0002 | | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | | | | 1.850.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 1 | 1.850.000.000 | SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PKB dan BBNKB yang terlaksana | Laporan | 2 | 1.300.000.000 | SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0003 | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 2 | 1.300.000.000 | SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Laporan regulasi penanganan piutang PKB | Laporan | 1 | 1.000.000.000 | SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak | Dokumen | 12 | 1.000.000.000 | SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan pengajuan keberatan PKB yang terselesaikan | % | 100 | 150.000.000 | SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | |
| | | 5.02.04.1.01.0011 | | | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti | Dokumen | 1 | 150.000.000 | SUB BIDANG PELAPORAN DAN KEBERATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR | OPD Provinsi |
| | **Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain** | | | | | | | | **15.401.951.000** | | |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain | % | 3.19 | 15.401.951.000 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| | | 5.02.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | | | | | 15.401.951.000 | | |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 13.21 | 246.225.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 246.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara | Unit | 14730 | 246.225.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.001 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 246.225.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 246.225.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas | % | 13.46 | 332.941.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 332.941.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas | Unit | 28340 | 332.941.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.001 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 332.941.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 332.941.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang | % | 15.87 | 276.640.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 276.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang | Unit | 17280 | 276.640.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.001 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 276.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 276.640.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora | % | 13.64 | 348.430.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 348.430.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora | Unit | 11720 | 348.430.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.001 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 348.430.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 348.430.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali | % | 13.53 | 314.190.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 314.190.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali | Unit | 17540 | 314.190.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 314.190.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Boyolali | Dokumen | 4 | 314.190.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes | % | 13.72 | 507.540.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 507.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes | Unit | 28500 | 507.540.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 507.540.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 507.540.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap | % | 13.57 | 351.839.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 351.839.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap | Unit | 29420 | 351.839.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 351.839.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 351.839.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak | % | 13.67 | 327.670.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 327.670.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak | Unit | 22400 | 327.670.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 327.670.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 327.670.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan | % | 13.66 | 445.905.000 | | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 445.905.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan | Unit | 21950 | 445.905.000 | | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 445.905.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 445.905.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara | % | 13.32 | 389.790.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 389.790.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara | Unit | 23230 | 389.790.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 389.790.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | 389.790.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 13.52 | 352.640.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 352.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar | Unit | 17050 | 352.640.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 352.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 352.640.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen | % | 13.59 | 316.020.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 316.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen | Unit | 17530 | 316.020.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 316.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kebumen | Dokumen | 4 | 316.020.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal | % | 13.45 | 305.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 305.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal | Unit | 19400 | 305.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 305.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | 305.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten | % | 13.67 | 400.220.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 400.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten | Unit | 26000 | 400.220.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 400.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 400.220.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus | % | 13.63 | 307.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 307.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus | Unit | 15730 | 307.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 307.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 307.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang | % | 13.58 | 322.250.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 322.250.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang | Unit | 17000 | 322.250.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 322.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 322.250.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati | % | 13.46 | 451.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 451.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati | Unit | 21220 | 451.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 451.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 451.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 12.72 | 302.700.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 302.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan | Unit | 14700 | 302.700.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 302.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 302.700.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang | % | 13.37 | 421.520.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 421.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang | Unit | 23000 | 421.520.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 421.520.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 421.520.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 13.41 | 389.405.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 389.405.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga | Unit | 16210 | 389.405.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 389.405.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 389.405.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo | % | 13.71 | 207.158.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 207.158.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo | Unit | 9900 | 207.158.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 207.158.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purworejo | Dokumen | 4 | 207.158.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang | % | 14.95 | 230.330.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 230.330.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang | Unit | 10670 | 230.330.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 230.330.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 230.330.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang | % | 13.33 | 339.527.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 339.527.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang | Unit | 19740 | 339.527.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 339.527.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Semarang | Dokumen | 4 | 339.527.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen | % | 13.54 | 363.840.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 363.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen | Unit | 17890 | 363.840.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 363.840.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sragen | Dokumen | 4 | 363.840.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 13.62 | 322.140.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 322.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo | Unit | 17880 | 322.140.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 322.140.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 322.140.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal | % | 13.63 | 455.663.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 455.663.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal | Unit | 25820 | 455.663.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 455.663.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 455.663.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung | % | 13.36 | 231.430.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 231.430.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung | Unit | 9140 | 231.430.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025 | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 231.430.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 231.430.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 13.46 | 369.780.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 369.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri | Unit | 14250 | 369.780.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 369.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonogiri | Dokumen | 4 | 369.780.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 13.46 | 203.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 203.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo | Unit | 9740 | 203.050.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 203.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 203.050.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang | % | 13.43 | 312.050.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 312.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Magelang | Unit | 3240 | 312.050.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 312.050.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 312.050.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan | % | 13.51 | 190.020.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 190.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan | Unit | 6900 | 190.020.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 190.020.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 190.020.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga | % | 12.67 | 97.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 97.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga | Unit | 4430 | 97.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 97.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | 97.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 | % | 14.69 | 344.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 344.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang 1 | Unit | 23740 | 344.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 344.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang I | Dokumen | 4 | 344.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II | % | 13.55 | 308.248.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 308.248.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II | Unit | 18120 | 308.248.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 308.248.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | 308.248.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III | % | 13.55 | 197.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 197.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III | Unit | 16400 | 197.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 197.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang III | Dokumen | 4 | 197.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta | % | 13.57 | 407.260.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 407.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta | Unit | 16810 | 407.260.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 407.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 407.260.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal | % | 19.19 | 250.160.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 250.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Tegal | Unit | 9890 | 250.160.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 250.160.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 250.160.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 4.31 | 18.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 18.900.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara | Ribu Rupiah | 3895000 | 18.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 18.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 18.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas | % | -10.17 | 41.550.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 41.550.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banyumas | Ribu Rupiah | 740000 | 41.550.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 41.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 41.550.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang | % | 4.69 | 48.750.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 48.750.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Batang | Ribu Rupiah | 395000 | 48.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 48.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 48.750.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora | % | 14.7 | 18.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 18.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Blora | Ribu Rupiah | 100000 | 18.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 18.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 18.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali | % | 14.18 | 16.950.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 16.950.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Boyolali | Ribu Rupiah | 200000 | 16.950.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 16.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Boyolali | Dokumen | 4 | 16.950.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes | % | 13.3 | 16.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 16.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Brebes | Ribu Rupiah | 266000 | 16.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 16.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 16.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap | % | 2.39 | 18.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 18.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Cilacap | Ribu Rupiah | 3925000 | 18.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 18.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 18.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak | % | 5.28 | 18.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 18.900.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Demak | Ribu Rupiah | 230000 | 18.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 18.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 18.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan | % | -11.08 | 18.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 18.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Grobogan | Ribu Rupiah | 900000 | 18.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 18.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD  Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 18.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara | % | -4.88 | 16.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 16.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Jepara | Ribu Rupiah | 12000 | 16.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 16.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | 16.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar | % | -0.41 | 16.725.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 16.725.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar | Ribu Rupiah | 408000 | 16.725.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 16.725.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 16.725.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen | % | -6 | 19.125.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 19.125.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kebumen | Ribu Rupiah | 736000 | 19.125.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 19.125.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kebumen | Dokumen | 4 | 19.125.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal | % | 32.23 | 31.350.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 31.350.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kendal | Ribu Rupiah | 96000 | 31.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 31.350.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | 31.350.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten | % | -1.14 | 19.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 19.200.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Klaten | Ribu Rupiah | 550000 | 19.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 19.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 19.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus | % | -11.69 | 15.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kudus | Ribu Rupiah | 7000 | 15.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 15.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang | % | 19.12 | 23.550.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 23.550.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Magelang | Ribu Rupiah | 905000 | 23.550.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 23.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 23.550.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati | % | -6.74 | 18.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 18.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pati | Ribu Rupiah | 78000 | 18.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 18.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 18.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan | % | -14.86 | 35.700.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 35.700.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan | Ribu Rupiah | 291000 | 35.700.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 35.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 35.700.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang | % | 7.36 | 17.250.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 17.250.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pemalang | Ribu Rupiah | 247000 | 17.250.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 17.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 17.250.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga | % | 4.55 | 26.355.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 26.355.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga | Ribu Rupiah | 454000 | 26.355.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 26.355.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 26.355.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo | % | -2.81 | 16.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 16.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purworejo | Ribu Rupiah | 110000 | 16.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 16.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purworejo | Dokumen | 4 | 16.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang | % | 7.95 | 25.815.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 25.815.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Rembang | Ribu Rupiah | 96000 | 25.815.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 25.815.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 25.815.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang | % | -11.35 | 22.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 22.200.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Semarang | Ribu Rupiah | 1260000 | 22.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 22.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Semarang | Dokumen | 4 | 22.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen | % | -4.52 | 16.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 16.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sragen | Ribu Rupiah | 7500 | 16.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 16.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sragen | Dokumen | 4 | 16.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | -16.09 | 19.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 19.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo | Ribu Rupiah | 235000 | 19.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 19.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 19.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal | % | 11.08 | 20.025.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 20.025.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Tegal | Ribu Rupiah | 406000 | 20.025.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 20.025.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 20.025.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung | % | 11.47 | 27.450.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 27.450.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Temanggung | Ribu Rupiah | 316000 | 27.450.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 27.450.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 27.450.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri | % | -21.29 | 19.200.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 19.200.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri | Ribu Rupiah | 255500 | 19.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 19.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonogiri | Dokumen | 4 | 19.200.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo | % | -3.04 | 28.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 28.900.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo | Ribu Rupiah | 567000 | 28.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 28.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 28.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang | % | -4.53 | 19.800.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Magelang | Ribu Rupiah | 105000 | 19.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 19.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 19.800.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga | % | 2.58 | 18.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 18.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Salatiga | Ribu Rupiah | 50000 | 18.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 18.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | 18.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II | % | -0.21 | 16.500.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 16.500.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang II | Ribu Rupiah | 572000 | 16.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 16.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | 16.500.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III | % | 19.63 | 15.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang III | Ribu Rupiah | 435000 | 15.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 15.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang III | Dokumen | 4 | 15.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta | % | 0.55 | 15.300.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 15.300.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Surakarta | Ribu Rupiah | 50000 | 15.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 15.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 15.300.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain | % | 3.19 | 1.098.000.000 | Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 1.098.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Daerah | Dokumen | 4 | 399.000.000 | SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH | |
| | | 5.02.04.1.01.0013 | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 399.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Laporan | 4 | 399.000.000 | SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang terlaksana | Laporan | 4 | 347.000.000 | SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN | |
| | | 5.02.04.1.01.0003 | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 347.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 4 | 347.000.000 | SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pendapatan Pajak Lain | Laporan | 4 | 352.000.000 | SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN | |
| | | 5.02.04.1.01.0005 | | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | 352.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan | 4 | 352.000.000 | SUB BIDANG PAJAK LAIN-LAIN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | % | 6.97 | 28.584.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 28.584.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara | Ribu Rupiah | 87928 | 28.584.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 28.584.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banjarnegara | Dokumen | 4 | 28.584.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas | % | 9.36 | 73.980.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 73.980.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banyumas | Ribu Rupiah | 234072 | 73.980.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 73.980.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banyumas | Dokumen | 4 | 73.980.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANYUMAS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang | % | 9.37 | 60.555.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 60.555.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Batang | Ribu Rupiah | 73960 | 60.555.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 60.555.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Batang | Dokumen | 4 | 60.555.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora | % | 21.32 | 37.895.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 37.895.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Blora | Ribu Rupiah | 124083 | 37.895.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 37.895.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Blora | Dokumen | 4 | 37.895.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BLORA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali | % | 6.13 | 29.811.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 29.811.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Boyolali | Ribu Rupiah | 103130 | 29.811.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 29.811.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Boyolali | Dokumen | 4 | 29.811.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes | % | 12.68 | 80.439.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 80.439.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Brebes | Ribu Rupiah | 138458 | 80.439.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 80.439.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Brebes | Dokumen | 4 | 80.439.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BREBES |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap | % | 31.53 | 47.401.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 47.401.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Cilacap | Ribu Rupiah | 162735 | 47.401.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 47.401.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Cilacap | Dokumen | 4 | 47.401.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak | % | 14.09 | 24.900.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 24.900.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Demak | Ribu Rupiah | 96369 | 24.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 24.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Demak | Dokumen | 4 | 24.900.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan | % | 15.03 | 55.600.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 55.600.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Grobogan | Ribu Rupiah | 164364 | 55.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 55.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Grobogan | Dokumen | 4 | 55.600.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> GROBOGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara | % | -35.43 | 27.657.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 27.657.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Jepara | Ribu Rupiah | 158559 | 27.657.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 27.657.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Jepara | Dokumen | 4 | 27.657.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | % | 23.37 | 27.813.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 27.813.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar | Ribu Rupiah | 95327 | 27.813.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 27.813.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Karanganyar | Dokumen | 4 | 27.813.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen | % | 20.73 | 54.017.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 54.017.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kebumen | Ribu Rupiah | 134169 | 54.017.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 54.017.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kebumen | Dokumen | 4 | 54.017.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal | % | 11.16 | 41.550.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 41.550.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kendal | Ribu Rupiah | 86779 | 41.550.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 41.550.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kendal | Dokumen | 4 | 41.550.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten | % | 7.6 | 51.055.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 51.055.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Klaten | Ribu Rupiah | 177532 | 51.055.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 51.055.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Klaten | Dokumen | 4 | 51.055.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus | % | 12.52 | 29.357.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 29.357.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kudus | Ribu Rupiah | 124200 | 29.357.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 29.357.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kudus | Dokumen | 4 | 29.357.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KUDUS |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang | % | 11.24 | 71.568.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 71.568.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Magelang | Ribu Rupiah | 220382 | 71.568.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 71.568.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Magelang | Dokumen | 4 | 71.568.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati | % | 20.59 | 32.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 32.400.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pati | Ribu Rupiah | 132609 | 32.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 32.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pati | Dokumen | 4 | 32.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | % | 17.76 | 41.011.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 41.011.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pekalongan | Ribu Rupiah | 80275 | 41.011.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 41.011.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pekalongan | Dokumen | 4 | 41.011.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang | % | 9.48 | 35.570.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 35.570.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pemalang | Ribu Rupiah | 121007 | 35.570.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 35.570.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pemalang | Dokumen | 4 | 35.570.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga | % | 22.05 | 30.100.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 30.100.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga | Ribu Rupiah | 89068 | 30.100.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 30.100.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya laporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purbalingga | Dokumen | 4 | 30.100.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURBALINGGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo | % | 32.02 | 56.400.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 56.400.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purworejo | Ribu Rupiah | 88320 | 56.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 56.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purworejo | Dokumen | 4 | 56.400.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PURWOREJO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang | % | 27.65 | 27.921.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 27.921.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaat Aset Daerah UPPD Kabupaten Rembang | Ribu Rupiah | 99233 | 27.921.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 27.921.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Rembang | Dokumen | 4 | 27.921.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang | % | 21.18 | 33.598.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 33.598.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Semarang | Ribu Rupiah | 169815 | 33.598.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 33.598.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Semarang | Dokumen | 4 | 33.598.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen | % | 6.99 | 24.348.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 24.348.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sragen | Ribu Rupiah | 72080 | 24.348.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 24.348.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sragen | Dokumen | 4 | 24.348.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | % | 10.38 | 37.424.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 37.424.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo | Ribu Rupiah | 118348 | 37.424.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 37.424.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sukoharjo | Dokumen | 4 | 37.424.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal | % | 12.3 | 52.212.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 52.212.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Tegal | Ribu Rupiah | 90995 | 52.212.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 52.212.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Tegal | Dokumen | 4 | 52.212.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung | % | 19.39 | 28.680.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 28.680.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Temanggung | Ribu Rupiah | 93957 | 28.680.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 28.680.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Temanggung | Dokumen | 4 | 28.680.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEMANGGUNG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | % | 15.75 | 41.757.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 41.757.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri | Ribu Rupiah | 160359 | 41.757.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 41.757.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonogiri | Dokumen | 4 | 41.757.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | % | 5.55 | 34.611.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 34.611.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo | Ribu Rupiah | 109617 | 34.611.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 34.611.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonosobo | Dokumen | 4 | 34.611.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> WONOSOBO |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang | % | 21.75 | 18.192.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 18.192.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Magelang | Ribu Rupiah | 74732 | 18.192.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 18.192.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Magelang | Dokumen | 4 | 18.192.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA MAGELANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan | % | 18.98 | 17.068.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 17.068.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Pekalongan | Ribu Rupiah | 73637 | 17.068.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 17.068.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Pekalongan | Dokumen | 4 | 17.068.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga | % | 12.37 | 25.253.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 25.253.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Salatiga | Ribu Rupiah | 78150 | 25.253.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 25.253.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Salatiga | Dokumen | 4 | 25.253.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SALATIGA |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1 | % | 13.17 | 150.620.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 150.620.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang 1 | Ribu Rupiah | 365453 | 150.620.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 150.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang I | Dokumen | 4 | 150.620.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II | % | 18.67 | 53.008.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 53.008.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang II | Ribu Rupiah | 243079 | 53.008.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 53.008.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang II | Dokumen | 4 | 53.008.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III | % | 17.95 | 65.411.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 65.411.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang III | Ribu Rupiah | 308090 | 65.411.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 65.411.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang III | Dokumen | 4 | 65.411.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta | % | 13.93 | 54.559.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 54.559.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Surakarta | Ribu Rupiah | 198818 | 54.559.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 54.559.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Surakarta | Dokumen | 4 | 54.559.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal | % | 78.96 | 22.000.000 | Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal | |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Tegal | Ribu Rupiah | 311023 | 22.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | |
| | | 5.02.04.1.01.0010 | | | Penagihan Pajak Daerah | | | | 22.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Tegal | Dokumen | 4 | 22.000.000 | SEKSI RETRIBUSI, PENDAPATAN LAIN DAN PENAGIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **295.488.152.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **47.625.407.000** | **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | % | 76 | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **47.118.312.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 81.1 | 47.118.312.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 47.118.312.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 39.860.980.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 31.434.373.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 31.434.373.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 29.576.252.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 150 | 29.576.252.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.661.421.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 1.661.421.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 56.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 56.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 140.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 4 | 140.700.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 20 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.066.707.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.066.707.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 565.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 6 | 565.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 15 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 601.707.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 601.707.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 5 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 95.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 521 | 95.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 35.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 60 | 35.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 4 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 4.664.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 4.664.900.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 650.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 650.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 3.804.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 3.804.900.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 326 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 66 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 200 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 10 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 7.257.332.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 534.500.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 534.500.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 4 | 100.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 204.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 4 | 204.500.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 60.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 170.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.551.454.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 3.551.454.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 1.200.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 1.170.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 1.170.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.380.254.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 2.380.254.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 3.171.378.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 730 | 3.171.378.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 132.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 15 | 132.600.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 350 | 70.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 1.268.778.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 350 | 1.268.778.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 1.700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 15 | 1.700.000.000 | Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B | |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **507.095.000** | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 1.29 | 507.095.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 507.095.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 507.095.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 507.095.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 507.095.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 256.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 7 | 256.300.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 250.795.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 1 | 250.795.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | | | | **7.285.455.540.000** | **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** | |
| | | | | | | Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah | % | 97.91 | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | **Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan** | | | | | | | | **7.285.455.540.000** | | |
| | | | | | | Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan | % | 100 | 7.278.155.540.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | 7.278.155.540.000 | | |
| | | | | | | Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu | % | 100 | 7.268.355.540.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | 7.268.355.540.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun | Dokumen | 1 | 7.268.355.540.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | 5.02.02.1.05.0008 | | | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | 3.046.794.308.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Dokumen | 1 | 3.046.794.308.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.05.0009 | | | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | 25.000.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya laporan Dana Darurat dan Mendesak | Dokumen | 1 | 25.000.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.05.0010 | | | Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi | | | | 4.196.561.232.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya laporan Dana bagi Hasil Provinsi | Dokumen | 1 | 4.196.561.232.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu | % | 100 | 1.200.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 105 | 1.200.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | 5.02.02.1.02.0002 | | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | | | | 218.900.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 35 | 218.900.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 5.02.02.1.02.0003 | | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | | | | 218.900.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturanaerah tentang Perubahan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran PerubahanPBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 35 | 218.900.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.02.0004 | | | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | 218.900.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 35 | 218.900.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.02.0005 | | | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | | | | 498.400.000 | | |
| | | | | | | Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 498.400.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.02.0012 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | | | | 44.900.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Dokumen | 1 | 44.900.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase penetapan APBD tepat waktu | % | 100 | 8.600.000.000 | Bidang Anggaran | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | | | | | 8.600.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku | Dokumen | 8 | 4.757.137.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| | | 5.02.02.1.01.0001 | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS | Dokumen | 2 | 160.000.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.01.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 4.597.137.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. | Dokumen | 2 | 4.597.137.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku | Dokumen | 8 | 2.884.546.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | |
| | | 5.02.02.1.01.0002 | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun | Dokumen | 2 | 160.000.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.01.0008 | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | 2.724.546.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. | Dokumen | 2 | 2.724.546.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan. | Dokumen | 35 | 958.317.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN | |
| | | 5.02.02.1.01.0009 | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | 958.317.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen | 35 | 958.317.000 | SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun | % | 100 | 4.150.000.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | 4.150.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyampaian LKPD tepat waktu | % | 100 | 4.150.000.000 | Bidang Akuntansi | |
| | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | | | | | 4.150.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun | Dokumen | 1 | 1.199.137.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | |
| | | 5.02.02.1.04.0002 | | | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | | 408.927.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | Laporan | 1 | 408.927.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.04.0011 | | | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | | | | 790.210.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | Orang | 41 | 790.210.000 | SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun | Dokumen | 1 | 1.066.096.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA | |
| | | 5.02.02.1.04.0008 | | | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | 746.868.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Dokumen | 1 | 746.868.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.04.0009 | | | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | 319.228.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 319.228.000 | SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun | Dokumen | 1 | 1.884.767.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN | |
| | | 5.02.02.1.04.0004 | | | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 220.530.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 1 | 220.530.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.04.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | | | | 1.664.237.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Dokumen | 1 | 1.664.237.000 | SUB BIDANG PEMERINTAHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase realisasi APBD | % | 93.75 | 3.150.000.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | 5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | 3.150.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase penyusunan dokumen manajemen kas | % | 100 | 3.150.000.000 | Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah | |
| | | | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | | | | | 2.200.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Dokumen | 2 | 600.000.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | |
| | | 5.02.02.1.03.0006 | | | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Dokumen | 43 | 600.000.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra | Dokumen | 1 | 600.000.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA | |
| | | 5.02.02.1.03.0003 | | | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Dokumen | 4 | 600.000.000 | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun | Dokumen | 1 | 1.000.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | |
| | | 5.02.02.1.03.0001 | | | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Dokumen | 49 | 400.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.02.1.03.0009 | | | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Dokumen | 49 | 600.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | | | | | 950.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan | Dokumen | 2 | 950.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | |
| | | 5.02.02.1.06.0002 | | | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | 950.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Dokumen | 1 | 950.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah** | | | | | | | | | **5.365.000.000** | **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) | % | 89.86 | | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | **Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan** | | | | | | | | **5.365.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola aset sesuai peraturan perundang-undangan | % | 100 | 5.365.000.000 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| | | 5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | | | 5.365.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi | % | 100 | 1.837.000.000 | Bidang Aset Daerah | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | 1.837.000.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya jumlah aset yang teramankan | Angka | 72.46 | 1.705.000.000 | SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0007 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | 1.705.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah | Laporan | 1 | 1.705.000.000 | SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah | % | 100 | 132.000.000 | SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0009 | | | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 132.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Laporan | 42 | 132.000.000 | SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH | |
| | | | | | | Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik | % | 89.86 | 1.180.000.000 | Bidang Aset Daerah | |
| | | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | 1.180.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu | Dokumen | 1 | 1.180.000.000 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0005 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | 352.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan | 2 | 352.000.000 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.02.03.1.01.0006 | | | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah | Laporan | 42 | 400.000.000 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.02.03.1.01.0012 | | | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | 428.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah | Laporan | 84 | 428.000.000 | SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu | % | 100 | 2.348.000.000 | Bidang Aset Daerah | |
| | | | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | 2.348.000.000 | | |
| | | | | | | Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan | % | 100 | 2.348.000.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | |
| | | 5.02.03.1.01.0003 | | | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 698.000.000 | | |
| | | | | | | Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Dokumen | 42 | 698.000.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.03.1.01.0004 | | | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | 189.000.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Dokumen | 1 | 189.000.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.02.03.1.01.0008 | | | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | 193.000.000 | | |
| | | | | | | Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah | Laporan | 1 | 193.000.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.02.03.1.01.0010 | | | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 1.268.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen | 3 | 1.268.000.000 | SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **7.338.445.947.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Kepegawaian Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **32.813.136.000** | **Badan Kepegawaian Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 82 | | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **32.313.136.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 92 | 32.313.136.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 32.313.136.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 92 | 32.253.136.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 27.720.170.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 27.720.170.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26.602.950.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 150 | 26.602.950.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.022.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 1.022.220.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 7 | 50.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 4 | 25.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah | Laporan | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 20.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | Laporan | 2 | 20.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 170.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 170.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 30 | 140.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 30.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 20 | 30.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.195.966.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.195.966.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 2 | 140.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 25.966.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 25.966.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 2 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 175.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 5 | 175.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0008 | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan | Unit | 1 | 75.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 6 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; ACEH |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.112.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 2.112.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 12.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 700.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 700.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 1.350.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 710.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 27 | 710.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 27 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 3 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; ACEH |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 190.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Bulan | 12 | 190.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 92 | 60.000.000 | Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **500.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.22 | 500.000.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 3.222 | 500.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 500.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 18 | 250.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 250.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 23 | 250.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Mewujudkan Meritokrasi Dalam Manajemen ASN** | | | | | | | | | **10.157.000.000** | **Badan Kepegawaian Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Sistem Merit | Angka | 0.87 | | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | **Terwujudnya Distribusi Penempatan ASN Dalam Jabatan Yang Akurat dan Akuntabel** | | | | | | | | **6.711.000.000** | | |
| | | | | | | Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, dan manajemen kinerja | Angka | 357.5 | 6.711.000.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | 6.711.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan | % | 100 | 3.501.000.000 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai | |
| | | | | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan | % | 100 | 600.000.000 | SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL | |
| | | 5.03.02.1.02.000 | | | Pengelolaan Promosi ASN | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan | Orang | 148 | 600.000.000 | SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | 2.626.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan | % | 100 | 2.626.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | |
| | | 5.03.02.1.03.0004 | | | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | 2.256.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang mengikuti ujian kedinasan | Orang | 1000 | 100.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Jalur Pendidikan | Orang | 66 | 2.156.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.03.0013 | | | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimonitoring dan diberikan pembinaan | % | 100 | 50.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.03.0014 | | | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | 320.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan fungsional | Orang | 1000 | 20.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen kepegawaian Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan | Dokumen | 1800 | 300.000.000 | SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya | % | 100 | 275.000.000 | SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL | |
| | | 5.03.02.1.04.0002 | | | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terevaluasi dan terdatabase Kinerja, Sikap dan Perilakunya | Orang | 38000 | 275.000.000 | SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi | % | 100 | 140.000.000 | Bidang Mutasi | |
| | | | | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi | % | 100 | 140.000.000 | SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN | |
| | | 5.03.02.1.02.000 | | | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | 140.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang melakukan mutasi | Dokumen | 350 | 140.000.000 | SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | % | 100 | 3.070.000.000 | Bidang Mutasi | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | 3.070.000.000 | | |
| | | | | | | persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | % | 100 | 3.070.000.000 | SUB BIDANG PENGANGKATAN | |
| | | 5.03.02.1.01.0002 | | | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan | Dokumen | 1 | 110.000.000 | SUB BIDANG PENGANGKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.01.0003 | | | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | 2.960.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Fasilitasi Seleksi masuk dan Pembekalan bagi peserta didik Sekolah Kedinasan Provinsi Jawa Tengah | Orang | 400 | 60.000.000 | SUB BIDANG PENGANGKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah seleksi pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kabupaten/Kota di Jawa Tengah | Kegiatan | 1 | 2.900.000.000 | SUB BIDANG PENGANGKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Terwujudnya Layanan Kepegawaian yang Cepat dan Terintegrasi** | | | | | | | | **3.446.000.000** | | |
| | | | | | | Nilai aspek penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi | Angka | 75.5 | 3.446.000.000 | Badan Kepegawaian Daerah | |
| | | 5.03.02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | | | 3.446.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | % | 100 | 315.000.000 | Bidang Mutasi | |
| | | | | Mutasi dan Promosi ASN | | | | | 315.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu | % | 100 | 315.000.000 | SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | |
| | | 5.03.02.1.02.0002 | | | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | 315.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah penyelesaian Kenaikan Pangkat dan layanan administrasi kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota | Dokumen | 1000 | 315.000.000 | SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan | % | 100 | 710.000.000 | Bidang Informasi Kepegawaian | |
| | | | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | 710.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan | % | 60 | 710.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN | |
| | | 5.03.02.1.01.0010 | | | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 385.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penyajian Informasi dan Layanan Kepegawaian Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota | % | 60 | 385.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.01.0011 | | | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | 325.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen kepegawaian digital ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkelola | Dokumen | 150000 | 313.850.000 | SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah dokumen kepegawaian fisik ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang terkelola | Dokumen | 16900 | 11.150.000 | SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN | % | 100 | 1.021.000.000 | Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A | |
| | | | | Pengembangan Kompetensi ASN | | | | | 1.021.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN | % | 100 | 1.021.000.000 | SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI | |
| | | 5.03.02.1.03.0002 | | | Pengelolaan Assessment Center | | | | 1.021.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya | Orang | 300 | 606.000.000 | SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya | Orang | 400 | 200.000.000 | SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipetakan Potensinya | Orang | 15000 | 215.000.000 | SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | % | 100 | 280.000.000 | Bidang Mutasi | |
| | | | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN | % | 100 | 280.000.000 | SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN | |
| | | 5.03.02.1.01.0006 | | | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Penyelesaian dokumen Pemberhentian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Dokumen | 2100 | 280.000.000 | SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN | % | 100 | 1.120.000.000 | Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai | |
| | | | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | | | | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN | % | 100 | 275.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN | |
| | | 5.03.02.1.01.0008 | | | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | 275.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan Netralitas ASN | Orang | 300 | 175.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase Peningkatan Pemahaman ASN Provinsi Jawa Tengah tentang Radikalisme dan Intoleransi | % | 100 | 100.000.000 | SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | 845.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN | % | 100 | 845.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | |
| | | 5.03.02.1.04.0004 | | | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | | | | 292.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan | Orang | 300 | 292.800.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.04.0005 | | | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | | | | 92.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota yang mendapatkan Tanda Jasa | Orang | 2000 | 92.200.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.04.0007 | | | Pembinaan Disiplin ASN | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang diberikan pembinaan disiplin | Orang | 550 | 180.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.03.02.1.04.0008 | | | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase Penangangan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | % | 100 | 280.000.000 | SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **42.970.136.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **MENINGKATKAN KOMPETENSI ASN** | | | | | | | | | **15.836.640.000** | **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Kompetensi ASN | Angka | 3.08 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | **TERPENUHINYA HAK PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN** | | | | | | | | **15.436.640.000** | | |
| | | | | | | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi | % | 17.34 | 15.436.640.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | 15.436.640.000 | | |
| | | | | | | Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan) | Angka | 3.5 | 416.885.000 | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu | |
| | | | | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | | 26.700.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis | Dokumen | 3 | 26.700.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | |
| | | 5.04.02.1.01.0002 | | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 2.924.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan | Dokumen | 1 | 2.924.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.04.02.1.01.0004 | | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 23.776.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan | Dokumen | 15 | 4.224.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi | Angka | 18 | 19.552.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | 390.185.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi | Dokumen | 3 | 390.185.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | |
| | | 5.04.02.1.02.0006 | | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan | Dokumen | 10 | 70.000.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.04.02.1.02.0008 | | | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan | | | | 320.185.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan | Dokumen | 16 | 41.631.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu | Dokumen | 1 | 48.739.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah pelatihan yang diakreditasi | Jenis | 3 | 167.267.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi | Angka | 26 | 62.548.000 | SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional | % | 100 | 1.300.000.000 | Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional | |
| | | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional | Orang | 1150 | 1.300.000.000 | SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL | |
| | | 5.04.02.1.02.0007 | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | 1.300.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional | Orang | 660 | 547.220.000 | SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional | Orang | 250 | 448.644.000 | SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional | Orang | 240 | 304.136.000 | SUB BIDANG PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial | % | 100 | 12.336.640.000 | Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial | |
| | | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | 12.336.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial | Orang | 1320 | 12.336.640.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | |
| | | 5.04.02.1.02.0007 | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | 12.336.640.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS | Orang | 624 | 2.859.440.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator | Orang | 240 | 3.768.900.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas | Orang | 200 | 2.749.600.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama | Orang | 120 | 2.559.600.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah | Orang | 200 | 399.100.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis | % | 100 | 1.200.000.000 | Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis | |
| | | | | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | | 1.200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis | Orang | 17320 | 1.200.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN | |
| | | 5.04.02.1.01.0003 | | | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah | | | | 1.200.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti | Orang | 5760 | 381.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan | Orang | 5760 | 384.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum | Orang | 5800 | 435.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan | % | 100 | 183.115.000 | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu | |
| | | | | Pengembangan Kompetensi Teknis | | | | | 121.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis | Dokumen | 3 | 121.250.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | |
| | | 5.04.02.1.01.0001 | | | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 21.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan | Dokumen | 1 | 1.500.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisi pengembangan kompetensi | Dokumen | 2 | 19.750.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.04.02.1.01.0002 | | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan | Dokumen | 18 | 100.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | 61.865.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi | Dokumen | 3 | 61.865.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | |
| | | 5.04.02.1.02.0001 | | | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional | | | | 58.750.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan | Dokumen | 1 | 1.500.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi | Dokumen | 2 | 17.250.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 20 | 40.000.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.04.02.1.02.0006 | | | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional | | | | 3.115.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan | Dokumen | 1 | 3.115.000 | SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **TERPENUHINYA KEBUTUHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN** | | | | | | | | **400.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi | % | 100 | 400.000.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | | 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan | % | 100 | 400.000.000 | Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu | |
| | | | | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi | Dokumen | 2 | 400.000.000 | SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI | |
| | | 5.04.02.1.02.0002 | | | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi | | | | 25.437.000 | | |
| | | | | | | Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi | Dokumen | 2 | 10.459.000 | SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Jumlah kualifikasi asessor kompetensi yang dimiliki | Orang | 3 | 14.978.000 | SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 5.04.02.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota | | | | 374.563.000 | | |
| | | | | | | Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi | Orang | 150 | 374.563.000 | SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI DI PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | | **43.874.265.000** | **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 73 | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **43.524.265.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 80 | 43.524.265.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 43.524.265.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 43.524.265.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 29.413.493.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 6 | 29.413.493.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 27.693.553.000 | | |
| | | | | | | Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN | Bulan | 12 | 27.693.553.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 1.499.930.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 1 | 1.499.930.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 82.174.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan | Dokumen | 1 | 82.174.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 78.868.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa | Laporan | 1 | 78.868.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 58.968.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun | Laporan | 1 | 58.968.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 234.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 234.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 234.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 234.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | 79.990.000 | | |
| | | | | | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 79.990.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.04.0007 | | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 79.990.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi | Laporan | 1 | 79.990.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 198.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 198.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 48.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 48.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 20 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 2.088.982.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 2.088.982.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 178.093.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 178.093.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 188.916.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 188.916.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 343.025.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 343.025.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 305.260.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 305.260.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 76.200.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 76.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 36.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Bulan | 12 | 36.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 105.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Bulan | 12 | 105.400.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 280.693.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Bulan | 12 | 280.693.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 8.505.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Bulan | 12 | 8.505.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 566.890.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 566.890.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 297.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Dokumen | 1 | 297.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 218.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 11 | 218.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 10.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 1 | 10.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 69.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Unit | 2 | 69.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 9.725.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 9.725.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Bulan | 12 | 4.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 2.252.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Bulan | 12 | 2.252.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 7.469.600.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Bulan | 12 | 7.469.600.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.486.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Dokumen | 1 | 1.486.800.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 117.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Bulan | 12 | 117.300.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Bulan | 12 | 21.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 760.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Bulan | 12 | 760.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 588.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Bulan | 12 | 588.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah** | | | | | | | | **350.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.05 | 350.000.000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 350.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 350.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 10 | 150.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 21 | 200.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **59.710.905.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Penghubung

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Penghubung** | | | | | | | | | **20.268.891.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 71.6 | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **20.140.824.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 85 | 20.140.824.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 20.140.824.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 20.140.824.000 | Badan Penghubung | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 9.898.194.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 9.898.194.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 9.840.414.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 52 | 9.840.414.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 37.780.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 37.780.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 251.580.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 251.580.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 251.580.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 35 | 251.580.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 65 | 90.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; JAWA BARAT |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.757.213.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.757.213.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 50.941.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 50.941.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 75.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 204.372.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 204.372.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 2 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 630.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 630.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 750.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 12 | 750.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 198 | 1.500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 1.000.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | Unit | 2 | 1.000.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 3 | 500.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 5.239.837.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 12 | 5.239.837.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 21.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 950.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 | 950.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 80.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 4.188.837.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 | 4.188.837.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.404.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 4 | 1.404.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 762.900.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 31 | 762.900.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 5 | 25.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 150.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 13 | 150.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 86.100.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 6 | 86.100.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 380.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 4 | 380.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko di Badan Penghubung** | | | | | | | | **128.067.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3 | 128.067.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 128.067.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 128.067.000 | Badan Penghubung | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 128.067.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 128.067.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 68.067.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 8 | 68.067.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 9 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung** | | | | | | | | | **3.992.880.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung | Angka | 85 | | | |
| | **Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah** | | | | | | | | **3.992.880.000** | | |
| | | | | | | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | % | 85 | 3.992.880.000 | | |
| | | 5.07.02 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | | | | 3.992.880.000 | | |
| | | | | | | Persentase ketercapaian pelayanan penghubung | % | 100 | 3.992.880.000 | Badan Penghubung | |
| | | | | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | | | | | 3.992.880.000 | | |
| | | | | | | Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | % | 100 | 1.050.000.000 | SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI | |
| | | 5.07.02.1.01.0003 | | | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | | | | 1.050.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam Pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah di Jakarta | Kabupaten/ Kota | 35 | 520.000.000 | SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | | | Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi Produk Unggulan Jawa Tengah di Jakarta | Kabupaten/ Kota | 35 | 530.000.000 | SUB BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | | | Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat | % | 100 | 2.792.880.000 | SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT | |
| | | 5.07.02.1.01.0001 | | | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | | | | 2.792.880.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelayanan terhadap Unsur Aparatur Pemerintah Jawa Tengah di Jakarta yang terpenuhi | Laporan | 12 | 500.000.000 | SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | | | | | Jumlah masyarakat yang menerima fasilitas Pelayanan Badan Penghubung | Orang | 3742 | 2.292.880.000 | SUB BIDANG PELAYANAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN MASYARAKAT | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase Terpenuhinya fasilitasi Pengunjung Anjungan Daerah Jawa Tengah | % | 100 | 150.000.000 | SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH | |
| | | 5.07.02.1.01.0003 | | | Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Anjungan Daerah Jawa Tengah | Kegiatan | 6 | 150.000.000 | SUB BIDANG ANJUNGAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **24.261.771.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
INSPEKTORAT

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **30.733.832.000** | **INSPEKTORAT** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 82 | | INSPEKTORAT | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **30.628.832.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 83.7 | 30.628.832.000 | INSPEKTORAT | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 30.628.832.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 30.628.832.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 24.827.954.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 1 | 24.827.954.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24.812.954.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 131 | 24.812.954.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 1 | 15.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 200.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 200.500.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 200.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 200.500.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 587.889.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 587.889.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 20.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 567.889.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 50 | 567.889.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 820.434.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 820.434.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 10.214.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 10.214.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 5.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 300.220.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 300.220.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 480.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 480.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 25.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 70.012.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 2 | 70.012.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 17.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 1 | 17.400.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 52.612.000 | | |
| | | | | | | umlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | Unit | 7 | 52.612.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.782.015.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 4 | 2.782.015.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 229.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 229.940.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 707.074.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 707.074.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 40.581.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 40.581.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1.804.420.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 1.804.420.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.340.028.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 152 | 1.340.028.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 37.953.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 11 | 37.953.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 553.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 23 | 553.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 7 | 20.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 160.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 108 | 160.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 419.075.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 419.075.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 150.000.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **105.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.01 | 105.000.000 | INSPEKTORAT | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 105.000.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 105.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 105.000.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 6 | 60.000.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 45.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 2 | 45.000.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi** | | | | | | | | | **8.903.799.000** | | |
| | | | | | | Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi | Level | 3 | | | |
| | **Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah** | | | | | | | | **2.830.072.000** | | |
| | | | | | | Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah | Level | 3 | 2.830.072.000 | INSPEKTORAT | |
| | | 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | | | | | | 2.830.072.000 | | |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3 | % | 12.24 | 1.858.725.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Pendampingan dan Asistensi | | | | | 1.858.725.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Laporan | 5 | 1.858.725.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | |
| | | 6.01.03.1.02.0003 | | | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | 1.858.725.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kegiatan | 5 | 1.858.725.000 | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3 | % | 12.24 | 971.347.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | 198.940.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Kegiatan | 1 | 198.940.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| | | 6.01.03.1.01.0001 | | | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | 198.940.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Dokumen | 1 | 198.940.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pendampingan dan Asistensi | | | | | 772.407.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi | Laporan | 5 | 772.407.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | |
| | | 6.01.03.1.02.0002 | | | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | 772.407.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | OPD | 49 | 772.407.000 | SUB BAGIAN PERENCANAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | **Meningkatnya Peran Pengawasan Internal** | | | | | | | | **6.073.727.000** | | |
| | | | | | | Level Kapabilitas APIP | Level | 3 | 6.073.727.000 | | |
| | | 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | | | | | 6.073.727.000 | | |
| | | | | | | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri | % | 84 | 579.243.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | 579.243.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semesteran | Dokumen | 2 | 579.243.000 | SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI | |
| | | 6.01.02.1.01.0007 | | | Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil | | | | 579.243.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen | 70 | 579.243.000 | SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah | % | 86 | 1.474.400.000 | INSPEKTORAT | |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | 1.474.400.000 | | |
| | | | | | | Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah | % | 100 | 1.474.400.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH | |
| | | 6.01.02.1.01.0002 | | | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 1.126.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 42 | 1.126.400.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 6.01.02.1.01.000 | | | Reviu Laporan Keuangan | | | | 348.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Laporan | 20 | 348.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu | % | 86 | 1.279.300.000 | INSPEKTORAT | |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | | 1.279.300.000 | | |
| | | | | | | Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | % | 100 | 1.279.300.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS | |
| | | 6.01.02.1.02.0001 | | | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani | Laporan | 4 | 200.000.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 6.01.02.1.02.0002 | | | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | 1.079.300.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 20 | 1.079.300.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah | % | 86 | 1.420.914.000 | INSPEKTORAT | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | 1.420.914.000 | | |
| | | | | | | Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 1.420.914.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH | |
| | | 6.01.02.1.01.0001 | | | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 1.420.914.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 50 | 1.420.914.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah | % | 86 | 1.319.870.000 | INSPEKTORAT | |
| | | | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | | | | 1.319.870.000 | | |
| | | | | | | Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | % | 100 | 1.319.870.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | |
| | | 6.01.02.1.01.0003 | | | Reviu Laporan Kinerja | | | | 484.250.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Laporan | 60 | 484.250.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 6.01.02.1.01.0005 | | | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | | | | 835.620.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | Laporan | 30 | 835.620.000 | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **39.637.631.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | | | | | | | **233.222.583.000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Angka | 2.905 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | **Meningkatnya Ketahanan Bangsa** | | | | | | | | **134.155.107.000** | | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan IDEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Angka | 3.01 | 134.155.107.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | 8.01.02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | | 3.865.113.000 | | |
| | | | | | | Indeks Ideologi Pancasila | Nilai | 3.1 | 3.865.113.000 | Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | 3.865.113.000 | | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | % | 85 | 1.096.000.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.02.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | | | | 35.210.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 150 | 35.210.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.02.1.01.0007 | | | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | | | | 9.590.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Orang | 35 | 9.590.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 8.01.02.1.01.0008 | | | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | | | | 44.611.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | Dokumen | 4 | 44.611.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN |
| | | 8.01.02.1.01.0009 | | | Pelaksanaan tugas Paskibraka | | | | 11.042.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pelaksanaan tugas Paskibraka | Dokumen | 4 | 11.042.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | 8.01.02.1.01.001 | | | Pembentukan Paskibraka | | | | 995.547.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pembentukan Paskibraka | Orang | 70 | 995.547.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme | % | 85 | 2.769.113.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.02.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | | | | 2.715.113.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Orang | 3200 | 2.715.113.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.02.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka | | | | 54.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Laporan | 4 | 54.000.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | | 127.445.543.000 | | |
| | | | | | | Indeks kinerja ormas | Nilai | 77.87 | 127.445.543.000 | Bidang Ketahanan Bangsa | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | 127.445.543.000 | | |
| | | | | | | Skor variabel program dan kegiatan ormas | Skor | 37.31 | 124.715.000.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | |
| | | 8.01.04.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 124.715.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan | 4 | 124.715.000.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Skor variabel sumber daya ormas | Skor | 40.56 | 2.730.543.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | |
| | | 8.01.04.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 2.550.543.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 3200 | 2.550.543.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 8.01.04.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 200 | 180.000.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | |
| | | 8.01.05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | | 2.844.451.000 | | |
| | | | | | | Indeks penguatan dampak ekonomi | % | 3.1 | 2.044.959.000 | Bidang Ketahanan Bangsa | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | 2.044.959.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | % | 87 | 2.044.959.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | |
| | | 8.01.05.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 2.044.959.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 2400 | 2.044.959.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SURAKARTA |
| | | | | | | Indeks toleransi | % | 74.3 | 799.492.000 | Bidang Ketahanan Bangsa | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | 799.492.000 | | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | % | 87 | 799.492.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | |
| | | 8.01.05.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 593.400.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 800 | 593.400.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK |
| | | 8.01.05.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 206.092.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 12 | 206.092.000 | SUB BIDANG KETAHANAN SENI DAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA ; JAWA TENGAH --> CILACAP |
| | **Meningkatnya Stabillitas Politik** | | | | | | | | **99.067.476.000** | | |
| | | | | | | Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik | Angka | 2.8 | 99.067.476.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | 8.01.03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | | 50.923.529.000 | | |
| | | | | | | IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi | Nilai | 76 | 50.923.529.000 | Bidang Politik Dalam Negri | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | 50.923.529.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik | % | 89.5 | 2.462.040.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK | |
| | | 8.01.03.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 2.462.040.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 3055 | 2.462.040.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik | % | 89.5 | 48.091.944.000 | SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK | |
| | | 8.01.03.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 48.091.944.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan | 12 | 48.091.944.000 | SUB BIDANG SISTEM IMPLEMENTASI DAN KELEMBAGAAN POLITIK | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi | % | 89.5 | 369.545.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK | |
| | | 8.01.03.1.01.0002 | | | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 29.660.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Dokumen | 4 | 29.660.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK | |
| | | 8.01.03.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 339.885.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 120 | 339.885.000 | SUB BIDANG PEMILU, PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK | |
| | | 8.01.06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | | 48.143.947.000 | | |
| | | | | | | Indeks kewaspadaan Nasional | Angka | 73.5 | 48.143.947.000 | Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional | |
| | | | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | 48.143.947.000 | | |
| | | | | | | Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial | % | 77 | 2.701.086.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.06.1.01.0003 | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 2.701.086.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 3200 | 2.701.086.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | | | Persentase penanganan konflik sosial | % | 100 | 45.442.861.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | |
| | | 8.01.06.1.01.0004 | | | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 5000 | 200.000.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | 8.01.06.1.01.0005 | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 43.742.861.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan | 8 | 43.742.861.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | 8.01.06.1.01.0006 | | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | | | | 1.500.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Laporan | 5 | 1.500.000.000 | SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| **Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah** | | | | | | | | | **18.068.613.000** | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 74.5 | | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah** | | | | | | | | **15.766.496.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 88.15 | 15.766.496.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 15.766.496.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 15.766.496.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 10.195.687.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 12 | 10.195.687.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 9.822.687.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 62 | 9.822.687.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 350.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.500.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0005 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 1.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah | Laporan | 12 | 1.500.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 14 | 20.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 12 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 4 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 370.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 370.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 15.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0005 | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | Dokumen | 12 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 80.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 80 | 80.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 260.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 110 | 260.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.516.629.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.516.629.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 200.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 | 200.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 100.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 12 | 100.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 180.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 85.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 12 | 85.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 50 | 25.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 12 | 90.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 731.629.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 24 | 731.629.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 12 | 20.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 60.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 8 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 400.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 41 | 400.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | | | Pengadaan Mebel | | | | 50.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan | Paket | 5 | 50.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 350.000.000 | | |
| | | | | | | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya | Unit | 27 | 350.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 2.591.180.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 84 | 2.591.180.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 | 7.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 450.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 36 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 2.134.180.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 36 | 2.134.180.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 613.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 352 | 613.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0001 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | 225.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 21 | 225.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 3.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 50 | 3.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Unit | 80 | 110.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 205.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 1 | 205.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 70.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 200 | 70.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah** | | | | | | | | **2.302.117.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3.6 | 2.302.117.000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 2.302.117.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 2.302.117.000 | SEKRETARIAT | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 2.302.117.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 2.302.117.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1.350.280.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 16 | 1.350.280.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 951.837.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 20 | 951.837.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BANJARNEGARA |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **251.291.196.000** | | |

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Badan Riset dan Inovasi Daerah

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **15.780.100.000** | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 70.2 | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah** | | | | | | | | **15.440.100.000** | | |
| | | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 84.25 | 15.440.100.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 15.440.100.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | 100 | 15.440.100.000 | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 10.928.099.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 19 | 10.928.099.000 | | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 10.484.539.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang | 67 | 10.484.539.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 223.560.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 | 223.560.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0003 | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah | Dokumen | 12 | 110.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 12 | 110.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | 125.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | 125.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 110.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 110.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.03.0006 | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 15.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | 340.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan | % | 100 | 340.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 280.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | Dokumen | 1 | 280.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | 45.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang | 30 | 45.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.05.0010 | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 45 | 15.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 1.014.435.000 | | |
| | | | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan | % | 100 | 1.014.435.000 | | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 20.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 20.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 40.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | 2.500.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Paket | 1 | 2.500.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 112.374.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 1 | 112.374.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 65.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Paket | 1 | 65.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Dokumen | 1 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 40.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | Laporan | 1 | 40.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | Laporan | 1 | 600.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0010 | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 15.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah | Laporan | 1 | 15.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 94.561.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah | Dokumen | 1 | 94.561.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan | Unit | 40 | 150.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.07.0007 | | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | 150.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan | Unit | 10 | 150.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.676.766.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun | Laporan | 1 | 1.676.766.000 | | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 1 | 5.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 570.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Laporan | 1 | 570.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0003 | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 305.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 305.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 796.766.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 1 | 796.766.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 1.205.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan | Unit | 700 | 1.205.800.000 | | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 375.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit | 11 | 375.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0005 | | | Pemeliharaan Mebel | | | | 12.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah mebel yang dipelihara | Unit | 20 | 12.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0007 | | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | 58.800.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara | Unit | 56 | 58.800.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | 90.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara | Unit | 3 | 90.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | 305.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 305.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 235.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 50 | 235.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 130.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 | 130.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG |
| | **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah** | | | | | | | | **340.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 2.92 | 340.000.000 | | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 340.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah | % | 100 | 340.000.000 | | |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 340.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | % | 100 | 340.000.000 | | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 240.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 6 | 240.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | Laporan | 12 | 100.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi Daerah** | | | | | | | | | **4.675.000.000** | | |
| | | | | | | Indeks Inovasi Daerah | Angka | 73 | | | |
| | **Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | **4.675.000.000** | | |
| | | | | | | Persentase riset dan inovasi daerah yang diterapkan | % | 100 | 4.675.000.000 | | |
| | | 5.05.02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | 4.675.000.000 | | |
| | | | | | | Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi | % | 100 | 1.225.000.000 | | |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | 342.872.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen fasilitasi penelitian dan pengembangan riset inovasi | Dokumen | 1 | 342.872.000 | | |
| | | 5.05.02.1.01.0012 | | | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | 25.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola | Dokumen | 1 | 25.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.01.0014 | | | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | | | 317.872.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | Dokumen | 1 | 317.872.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | 882.128.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pemanfaatan riset inovasi | Dokumen | 1 | 882.128.000 | | |
| | | 5.05.02.1.04.0004 | | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | 690.846.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil kelitbangan | Laporan | 1 | 690.846.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.04.0005 | | | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | 191.282.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan fasilitasi Hak kekayaan Intelektual | Laporan | 1 | 191.282.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi | % | 100 | 900.000.000 | | |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | 900.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengembangan Infrastruktur | Dokumen | 1 | 900.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.01.0003 | | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | | 552.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Laporan | 1 | 552.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.01.0004 | | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | | | | 348.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Laporan | 1 | 348.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2025 | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp (000) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | | | | | Persentase pelaksanaan riset dan inovasi | % | 100 | 1.350.000.000 | | |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | 218.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan | Dokumen | 1 | 218.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.02.0001 | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | | | | 218.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial | Dokumen | 1 | 218.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | | 218.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan | Dokumen | 1 | 218.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.03.0005 | | | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | | | | 218.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Dokumen | 1 | 218.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | 914.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi | Dokumen | 1 | 914.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.04.0002 | | | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | | | | 914.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Dokumen | 1 | 914.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | | | Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi | % | 100 | 1.200.000.000 | | |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | 675.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | Dokumen | 1 | 675.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.01.0002 | | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | | | | 250.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Dokumen | 1 | 250.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | 5.05.02.1.01.0013 | | | Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan | | | | 425.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan diterbitkan | Dokumen | 1 | 425.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| | | | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | 525.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Dokumen | 1 | 525.000.000 | | |
| | | 5.05.02.1.04.0001 | | | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | 525.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Dokumen | 1 | 525.000.000 | | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| **JUMLAH** | | | | | | | | | **20.455.100.000** | | |

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 14 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

bappeda.jatengprov.go.id

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024